



RKPD 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2026



2025

BAPPEDALITBANG
KOTA PROBOLINGGO



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
21. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan Penjabaran dari RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pembangunan karakter masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
 - b. peningkatan ketahanan sosial masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - c. penguatan harmoni sosial dan pelestarian kebudayaan guna menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban umum wilayah;
 - d. pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung peningkatan kapasitas pelaku usaha guna mendorong penguatan potensi investasi dan ekonomi inklusif;
 - e. peningkatan sektor pertanian dan perikanan yang produktif guna penguatan ketahanan pangan;
 - f. penguatan kapasitas sdm untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, bersih dan efektif; dan
 - g. pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu berbasis harmoni alam dan lingkungan hidup.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi :

- a. acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026;
- b. pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sekaligus dasar lebih lanjut untuk penyusunan RKA PD Tahun 2026; dan
- c. salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tahun 2026.

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2026 yaitu :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Tahun 2026 di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD Tahun 2026 dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

Pasal 6

Materi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Juli 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 15 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H

NIP. 19780608 200903 1 004

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG I.1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN I.9

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I.12

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN..... I.15

 1.4.1. MAKSUD I.15

 1.4.2. TUJUAN I.15

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN I.16

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH II.1

 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI..... II.1

 2.1.1.1. Administrasi Wilayah..... II.1

 2.1.1.1. Administrasi Wilayah..... II.1

 2.1.1.2. Topografi II.1

 2.1.1.3. Geologi II.2

 2.1.1.4. Jenis Tanah..... II.4

 2.1.1.5. Hidrologi..... II.4

 2.1.1.6. Kedalaman Air Tanah..... II.7

 2.1.1.7. Penggunaan Lahan..... II.7

 2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah II.11

 2.1.1.9. Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan II.17

 2.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana..... II.21

 2.1.1.11. Aspek Demografi II.26

 2.1.1.12. Aspek Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca II.29

 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II.29

 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II.29

 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II.32

 2.1.2.3. Fokus Pemerintahan..... II.37

 2.1.2.4. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga..... II.37

 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM..... II.40

 2.1.3.1. Pendidikan II.62

 2.1.3.2. Kesehatan..... II.64



2.1.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.66
2.1.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II.69
2.1.3.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II.72
2.1.3.6. Sosial	II.74
2.1.3.7. Tenaga Kerja.....	II.76
2.1.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.77
2.1.3.9. Pangan	II.79
2.1.3.10. Pertanahan	II.81
2.1.3.11. Lingkungan Hidup	II.82
2.1.3.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II.83
2.1.3.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.84
2.1.3.14. Perhubungan	II.87
2.1.3.15. Komunikasi dan Informatika.....	II.89
2.1.3.16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II.91
2.1.3.17. Penanaman Modal.....	II.93
2.1.3.18. Kepemudaan dan Olahraga.....	II.96
2.1.3.19. Statistik	II.97
2.1.3.20. Persandian.....	II.99
2.1.3.21. Kebudayaan.....	II.100
2.1.3.22. Perpustakaan.....	II.102
2.1.3.23. Kearsipan.....	II.105
2.1.3.24. Kelautan dan Perikanan.....	II.107
2.1.3.25. Pariwisata	II.111
2.1.3.26. Pertanian	II.113
2.1.3.27. Perdagangan	II.117
2.1.3.28. Perindustrian.....	II.118
2.1.3.29. Sekretariat Daerah.....	II.120
2.1.3.30. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.....	II.122
2.1.3.31. Perencanaan.....	II.124
2.1.3.32. Keuangan	II.124
2.1.3.33. Kepegawaian	II.126
2.1.3.34. Pendidikan dan Pelatihan	II.128
2.1.3.35. Penelitian dan Pengembangan.....	II.129
2.1.3.36. Pengawasan	II.130
2.1.3.37. Kewilayahan.....	II.131
2.1.3.38. Kesatuan Bangsa dan Politik	II.132

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II.134
2.1.4.1. Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Iklim Investasi.....	II.134
2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II.136
2.1.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAERAH.....	II.137
2.1.5.1. Capaian SPM Bidang Pendidikan	II.138
2.1.5.2. Capaian SPM Bidang Kesehatan.....	II.141
2.1.5.3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	II.143
2.1.5.4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II.145
2.1.5.5. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II.146
2.1.5.6. Capaian SPM Bidang Sosial	II.149
2.1.6. REALISASI RPJMD.....	II.151
2.1.6.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II.151
2.1.6.2. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)	II.157
2.2. EVALUASI PROGRAM KEGIATAN RKPD	II.179
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II.183
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II.183
2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II.186

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III.1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024.....	III.1
3.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025-2026	III.7
3.1.3. Kebijakan Ekonomi Tahun 2026	III.8
3.1.2.1. Kebijakan Ekonomi Nasional	III.9
3.1.2.2. Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur	III.17
3.1.2.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo.....	III.22
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.25
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III.25
3.2.1.1. Sumber Pendanaan APBD	III.25
3.2.1.2. Sumber Pendanaan NON APBN dan NON APBD	III.30
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III.30
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III.34



BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNANIV.1

4.2. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026..... IV.17

4.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026.....IV.41

4.4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRDIV.48

 4.4.1. KAJIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAHIV.49

 4.4.2. USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH.....IV.52

 4.4.3. USULAN KEGIATAN ASPIRASI MASYARAKATIV.53

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) VI.2

6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) VI.5

6.3. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) VI.24

BAB 7 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	II.2
Tabel 2. 2	Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	II.3
Tabel 2. 3	Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan.....	II.4
Tabel 2. 4	Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo.....	II.5
Tabel 2. 5	Sumber Mata Air di Kota Probolinggo.....	II.5
Tabel 2. 6	Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan	II.7
Tabel 2. 7	Data Penggunaan Lahan di Kota Probolinggo Tahun 2024	II.8
Tabel 2. 8	Kemampuan Lahan Menurut Kecamatan Kota Probolinggo.....	II.10
Tabel 2. 9	Daya Dukung Pangan Kota Probolinggo Tahun 2023	II.18
Tabel 2. 10	Luasan Kawasan Banjir Berdasarkan Kecamatan.....	II.22
Tabel 2. 11	Luasan Kawasan Banjir Lahar Berdasarkan Kecamatan	II.23
Tabel 2. 12	Luasan Kawasan Rawan Angin Puting Beliung Berdasarkan Kecamatan	II.24
Tabel 2. 13	Luasan Kawasan Rawan Gelombang Pasang Berdasarkan Kecamatan	II.25
Tabel 2. 14	Luasan Kawasan Kebakaran Berdasarkan Kecamatan	II.26
Tabel 2. 15	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (dalam ribu jiwa)..	II.27
Tabel 2. 16	Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Probolinggo Tahun 2024	II.27
Tabel 2. 17	Angka Kelahiran Berdasarkan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024.....	II.28
Tabel 2. 18	Angka Kematian Berdasarkan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024.....	II.28
Tabel 2. 19	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024	II.30
Tabel 2. 20	Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024.....	II.31
Tabel 2. 21	Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024	II.33
Tabel 2. 22	Persentase penduduk miskin Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024	II.33
Tabel 2. 23	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024	II.33

Tabel 2. 24 Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo	
Tahun 2020 - 2024.....	II.33
Tabel 2. 25 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus	
Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	II.34
Tabel 2. 26 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus	
Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024	II.37
Tabel 2. 27 Realisasi Kinerja Urusan Seni dan Kebudayaan Kota Probolinggo	
Tahun 2020-2024.....	II.39
Tabel 2. 28 Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota	
Probolinggo Tahun 2020-2024.....	II.39
Tabel 2. 29 Realisasi Kinerja Aspek Pelayanan Umum Kota Probolinggo	
Tahun 2020-2024.....	II.41
Tabel 2. 30 Ruas Jalan Menurut Fungsinya Tahun 2023	II.66
Tabel 2. 31 Kota Layak Anak Tahun 2020-2024	II.78
Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kota Probolinggo	
Tahun 2020-2024.....	II.109
Tabel 2. 33 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020-2024.....	II.115
Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun	
2020-2024	II.118
Tabel 2. 35 Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian.....	II.119
Tabel 2. 36 Realisasi Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kota Probolinggo	
Tahun 2020-2024.....	II.134
Tabel 2. 37 Realisasi IPM Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.137
Tabel 2. 38 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022-2024.....	II.138
Tabel 2. 39 Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	II.141
Tabel 2. 40 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	II.144
Tabel 2. 41 Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	II.145
Tabel 2. 42 Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban	
Umum.....	II.147
Tabel 2. 43 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	II.149
Tabel 2. 44 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Probolinggo	
Tahun 2024.....	II.151
Tabel 2. 45 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo	
Tahun 2024.....	II.157
Tabel 2. 46 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 ..	II.183
Tabel 2. 47 Permasalahan Pembangunan Daerah (Penyelenggaraan Urusan)	
Kota Probolinggo Tahun 2024	II.187



Tabel 3. 1	Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024	III.2
Tabel 3. 2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024	III.4
Tabel 3. 3	Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025-2026.....	III.7
Tabel 3. 4	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026.....	III.12
Tabel 3. 5	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2026.....	III.18
Tabel 3. 6	Target Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026.....	III.24
Tabel 3. 7	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026.....	III.24
Tabel 3. 8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2023 s/d 2027	III.29
Tabel 3. 9	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Probolinggo Tahun 2023 s/d 2027	III.33
Tabel 3. 10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Probolinggo Tahun 2023 s/d 2027	III.35
Tabel 4. 1	Tujuan & Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029.....	IV.6
Tabel 4. 2	Strategi & Arah Kebijakan untuk Pencapaian Tujuan & Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029	IV.11
Tabel 4. 3	Penyelarasan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026	IV.20
Tabel 4. 4	Prioritas, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 dan Penanggungjawab	IV.22
Tabel 4. 5	Penyelarasan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan RKP & RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.....	IV.26
Tabel 4. 6	Program Prioritas Pendukung Prioritas dan Arah Kebijakan Kota Probolinggo Tahun 2026.....	IV.35
Tabel 4. 7	Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Probolinggo	IV.41
Tabel 4. 8	Usulan Program Prioritas Pembangunan 2026 oleh DPRD Kota Probolinggo	IV.52
Tabel 4. 9	Akomodasi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 Berdasarkan Pengusul	IV.56

Tabel 4.10	Akomodasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 Berdasarkan Perangkat Daerah	IV.58
Tabel 5. 1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026	V.2
Tabel 6. 1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2026	VI.3
Tabel 6. 2	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Probolinggo Tahun 2026.....	VI.5
Tabel 6. 3	Target Indikator Spesifik Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026.....	VI.13
Tabel 6. 4	Sinkronisasi Target Pembangunan Tahun 2026	VI.15
Tabel 6. 5	Target Indikator SPM Urusan Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2026	VI.26
Tabel 6. 6	Target Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2026	VI.28
Tabel 6. 7	Target Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun 2026	VI.32
Tabel 6. 8	Target Indikator SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2026	VI.33
Tabel 6. 9	Target Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Probolinggo Tahun 2026	VI.34
Tabel 6. 10	Target Indikator SPM Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2026	VI.36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Pedoman Tahapan dan Proses Penyusunan RKP
Kota Probolinggo Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 I.8

Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RKP di antara Dokumen Perencanaan
Lainnya I.13

Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RKP dengan Dokumen Penganggaran I.13

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo II.1

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo..... II.2

Gambar 2. 3 Persentase luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi..... II.3

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo II.3

Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo II.4

Gambar 2. 6 Peta Hidrologi Kota Probolinggo II.6

Gambar 2. 7 Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo II.7

Gambar 2. 8 Peta Tutupan Vegetasi Tahun 2024 II.9

Gambar 2. 9 Kawasan Pelabuhan II.9

Gambar 2. 10 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo II.11

Gambar 2. 11 Peta Hinterland Kota Probolinggo II.12

Gambar 2. 12 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo II.12

Gambar 2. 13 Rencana Pola Ruang Kota Probolinggo..... II.14

Gambar 2. 14 Kawasan Pelabuhan II.15

Gambar 2. 15 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun
2020-2024 II.16

Gambar 2. 16 Rasio Konektivitas Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 II.17

Gambar 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Kota Probolinggo II.19

Gambar 2. 18 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Probolinggo... II.21

Gambar 2. 19 Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Probolinggo II.22

Gambar 2. 20 Peta Kawasan Rawan Banjir Lahar Kota Probolinggo II.23

Gambar 2. 21 Peta Kawasan Rawan Puting Beliung Kota Probolinggo II.24

Gambar 2. 22 Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kota Probolinggo II.25

Gambar 2. 23 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Kota Probolinggo II.26

Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun
2020-2024 II.28

Gambar 2. 25 Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Probolinggo II.29

Gambar 2. 26 Indeks Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 II.64

Gambar 2. 27	Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024	II.65
Gambar 2. 28	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II.67
Gambar 2. 29	Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Tahun 2020-2024.....	II.68
Gambar 2. 30	Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Dan Sanitasi Aman Tahun 2020-2024	II.68
Gambar 2. 31	Capaian Rumah Tidak Layak Huni Dan Luasan Permukiman Kumuh.....	II.70
Gambar 2. 32	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024	II.71
Gambar 2. 33	Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II.72
Gambar 2. 34	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.73
Gambar 2. 35	Indeks Risiko Bencana Dan Wilayah Tangguh Bencana Tahun 2020-2024	II.73
Gambar 2. 36	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Serta Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024	II.75
Gambar 2. 37	Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2020-2024	II.75
Gambar 2. 38	Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	II.76
Gambar 2. 39	Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Tahun 2020-2024	II.77
Gambar 2. 40	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	II.78
Gambar 2. 41	Ketersediaan Pangan (Ton) Tahun 2020-2024.....	II.79
Gambar 2. 42	Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Tahun) Tahun 2020-2024	II.80
Gambar 2. 43	Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2020-2024	II.80
Gambar 2. 44	Capaian Indikator Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Tahun 2020-2024	II.82
Gambar 2. 45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II.82
Gambar 2. 46	Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	II.83
Gambar 2. 47	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	II.84

Gambar 2. 48	Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (%) Tahun 2020-2024	II.85
Gambar 2. 49	Unmeet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/Kb Yang Tidak Terpenuhi) (%) Tahun 2020-2024	II.86
Gambar 2. 50	Capaian Kinerja MCPR, TFR Dan ASFR Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.86
Gambar 2. 51	Capaian Indikator Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.88
Gambar 2. 52	Indeks SPBE Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.89
Gambar 2. 53	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan E-Government Terintegrasi Tahun 2020-2024	II.90
Gambar 2. 54	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024	II.91
Gambar 2. 55	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020-2024	II.92
Gambar 2. 56	Rasio Kewirausahaan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.92
Gambar 2. 57	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp Dalam Milyar) Berdasarkan Data LKPM Dan NIB Tahun 2020-2024	II.93
Gambar 2. 58	Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Tahun 2020-2024	II.94
Gambar 2. 59	ICOR Dan Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.94
Gambar 2. 60	Nilai Realisasi Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.95
Gambar 2. 61	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.95
Gambar 2. 62	Jumlah Organisasi Pemuda Dan Olahraga Tahun 2020-2024	II.96
Gambar 2. 63	Capaian Indikator Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2020-2024	II.97
Gambar 2. 64	Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2020-2024	II.98
Gambar 2. 65	Capaian Indikator Urusan Persandian Tahun 2020-2024	II.99
Gambar 2. 66	Jumlah Sarana Seni Dan Budaya (Unit) Tahun 2020-2024	II.100
Gambar 2. 67	Jumlah Penyelenggara Seni Dan Budaya (Kegiatan) Tahun 2020-2024	II.100
Gambar 2. 68	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)	II.101
Gambar 2. 69	Jumlah Kelompok, Sanggar, Organisasi Seni Tahun 2020-2024 ..	II.101

Gambar 2. 70	Indeks Kebudayaan Berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Serta Persentase Kebudayaan yang Dikelola Menjadi Daya Saing Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.102
Gambar 2. 71	Jumlah Pengunjung Dan Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2020-2024	II.103
Gambar 2. 72	Capaian Indikator TGM Dan IPLM Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024	II.103
Gambar 2. 73	Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baik Tahun 2020-2024	II.105
Gambar 2. 74	Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Pengelolaan.....	II.106
Gambar 2. 75	Capaian Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024.....	II.106
Gambar 2. 76	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.107
Gambar 2. 77	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Kota Probolinggo 2020-2024	II.108
Gambar 2. 78	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.110
Gambar 2. 79	Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.111
Gambar 2. 80	Capaian Indikator Rasio Pad Sektor Pariwisata Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.112
Gambar 2. 81	Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.113
Gambar 2. 82	Produksi Padi, Jagung, Dan Bawang Merah Tahun 2020-2024	II.114
Gambar 2. 83	Jumlah Kelompok Tani Aktif Dan Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024	II.115
Gambar 2. 84	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2020-2024	II.116
Gambar 2. 85	Jumlah Nilai Impor Dan Ekspor Kota Probolinggo Tahun 2021-2024	II.117
Gambar 2. 86	Persentase Pertumbuhan Pdrb Kategori Perindustrian (%) Tahun 2020-2024	II.119
Gambar 2. 87	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Dan Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri Tahun 2020-2024.....	II.120
Gambar 2. 88	Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.121

Gambar 2. 89	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.121
Gambar 2. 90	Nilai SAKIP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.122
Gambar 2. 91	Persentase Anggota DPRD Yang Puas Akan Pelayanan Sekretariat DPTD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.123
Gambar 2. 92	Capaian Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024	II.124
Gambar 2. 93	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.125
Gambar 2. 94	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo	II.127
Gambar 2. 95	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2020-2024	II.128
Gambar 2. 96	Capaian Kinerja Urusan Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.129
Gambar 2. 97	Capaian Kinerja Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.130
Gambar 2. 98	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2024	II.131
Gambar 2. 99	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 5 Kecamatan Di Kota Probolinggo 2020-2024	II.132
Gambar 2. 100	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.133
Gambar 2. 101	Jumlah Orkesmas Aktif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	II.133
Gambar 3. 1	Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kota Probolinggo Tahun 2024	III.3
Gambar 3. 2	Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan TPT Kota Probolinggo Tahun 2024	III.3
Gambar 3. 3	Struktur Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2024	III.5
Gambar 3. 4	Sebaran Sektor Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2024	III.6
Gambar 3. 5	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional	III.17
Gambar 3. 6	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Triwulan I Tahun 2025	III.17
Gambar 3. 7	Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur 2019-Triwulan I 2025	III.18
Gambar 3. 8	Perkembangan Inflasi Jawa Timur 2024-April 2025	III.18



Gambar 4. 1 Tema Dan Prioritas Pembangunan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Rancangan Akhir RPJMD)IV.18



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan penjabaran dari RPJMD. Substansi dan tahapan penyusunan RKPD dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD dimaksud sebagaimana dijelaskan pada 12 ayat 3 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Secara terperinci, bagan alir tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten / Kota sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimaksud dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Bappeda selaku koordinator Tim Penyusun RKPD perlu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi dan harmonisasi dimaksud dalam tahapan penyusunan Rancangan RKPD ini diarahkan melalui penyusunan agenda kerja Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 yang meliputi :

a. Persiapan penyusunan RKPD

Tahapan ini meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Untuk RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026, tahapan ini telah dilaksanakan sejak bulan Oktober Tahun 2024 yang meliputi :

- Koordinasi Tim Penyusun untuk penentuan jadwal penyusunan RKPD, penyusunan Kamus Usulan Kegiatan untuk Aspirasi Masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD serta penentuan Rancangan Awal tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahunan pada Bulan Oktober–November 2024 ;
- Bimbingan Teknis Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026 bagi Pejabat Pengelola Program Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo pada Tanggal 26 November 2024 ;



- Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 pada Tanggal 2 s/d 6 Desember 2024 ;
- Koordinasi Penyusunan, Pengumpulan dan Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada bulan November-Januari 2025 ;
- Koordinasi pengumpulan data dasar capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2024 pada Desember 2024–Februari 2025 ;
- Penyusunan pedoman pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026 pada Desember 2024–Januari 2025.

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun pada periode bulan Desember 2024 sampai Januari 2025 dengan berpedoman pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2024, serta mengacu pada RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, dan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029. Pada tahapan ini juga dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD yang telah disusun yang dilaksanakan pada 12 Februari 2025.

c. Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Rancangan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun mulai Februari 2025 berdasarkan saran masukan hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang telah dilaksanakan pada 12 Februari 2025 sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD. Dengan adanya pelantikan Kepala Daerah baru pada 20 Februari 2025, maka terdapat Rancangan Awal RPJMD yang telah mengintegrasikan Janji Politik Kepala Daerah untuk Visi, Misi dan Program Prioritas yang juga perlu diselaraskan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Oleh karena itu pada Tahapan Rancangan RKPD Tahun 2026 juga dilakukan penyesuaian dari Rancangan Awal RKPD yang masih mengacu pada RPD menjadi penyelarasan dengan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga telah disusun dan disosialisasikan dalam Tahapan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJMD pada Tanggal 17 Maret 2025.



Rancangan RKPD ini juga disusun dengan mempertimbangkan harmonisasi program dan kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah (berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah pada Januari 2025) serta sinkronisasi kebijakan daerah mengacu pada hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur (yang dilaksanakan pada 3-4 Februari 2025). Pada Tahapan ini belum dapat dilaksanakan penyelarasan dengan RKP Tahun 2026 mengingat belum adanya Kick Off RKP 2026 hingga Bulan Maret 2025.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD ditujukan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota guna memperoleh saran/masukan dan penyepakatan dari para pemangku kepentingan terkait permasalahan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator kinerja serta target kinerja daerah. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang RKPD Kabupaten / Kota harus dilaksanakan maksimal akhir maret Tahun n-1. Adapun jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Musrenbang Kelurahan : 20 Januari – 13 Februari 2025;
- Musrenbang Kecamatan : 17 - 21 Februari 2025 ;
- Forum Perangkat Daerah : 3 – 7 Maret 2025 ;
- Musrenbang Kota : 26 Maret 2025.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil dan saran masukan pemangku kepentingan dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kota, maka dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan RKPD. Dimana untuk penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 dilaksanakan pada April – Mei 2025 dan akan dilaksanakan Reviu APIP atas Rancangan Akhir RKPD pada akhir Mei 2025 sebelum diajukan untuk proses Fasilitasi Gubernur dan Penetapan RKPD.

Pada Tahapan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 ini dilakukan penyelarasan dengan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2025 dan *Kick Off Meeting* Penyusunan RKP 2026 (yang dilaksanakan pada 5 Mei 2025), serta Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang disampaikan pada Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Tanggal 29 April 2025.

f. Penetapan RKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Kabupaten Kota harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota maksimal pada akhir Juni Tahun n-1 setelah mendapatkan saran masukan hasil Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD oleh Gubernur. Dalam jadwal pelaksanaan penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026, penetapan RKPD terdiri dari kegiatan :

- Penyampaian Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur : Minggu ke-1 Juni 2025 ;
- Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD oleh Gubernur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur : Minggu ke-1 s/d 2 Juni 2025 ;
- Penyempurnaan RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur : Minggu ke-3 Juni 2025 ;
- Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2024 : Minggu ke-4 Juni 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 ini merupakan penjabaran Tahun Pertama dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang saat ini masih dalam tahapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (pembahasan dengan DPRD) dan telah disusun hingga tahapan Rancangan Akhir secara Paralel dengan Penyusunan RKPD. RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 ini merupakan tahapan awal dari periode perencanaan Pembangunan baru dari kepemimpinan **dr. H. Aminuddin, Sp. OG(K).**, **M.Kes.** sebagai Wali Kota Probolinggo bersama **Hj. Ina Dwi Lestari Buchori, S.AP., M.M.** sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo hasil pemilihan umum Tahun 2024, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Kepala Daerah Kota Probolinggo dimaksud telah berkomitmen menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan.

Sebagai tahun awal periode Pembangunan jangka menengah daerah yang baru, maka RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 ini memiliki peran strategis dalam usaha pencapaian seluruh target kinerja yang telah diperjanjikan dalam periode RPJMD yang baru mengingat Tahun 2026 sebagai *starting point* dan landasan dasar untuk pencapaian target pada Tahun-tahun selanjutnya hingga akhir periode RPJMD serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dari seluruh rangkaian prioritas pada tahun rencana RPJMD. Sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 maka Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 yaitu : **“PENINGKATAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA DAN STABILITAS WILAYAH SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI BERKELANJUTAN”**. Berdasarkan tema pembangunan dimaksud juga dijabarkan menjadi 6 (enam) Prioritas Pembangunan.

Tema penguatan kapasitas SDM dan kewillayahan ini terkait dengan periode awal Pembangunan jangka menengah daerah Dimana Tahun 2026 sebagai landasan Pembangunan Tahun 2025-2029. SDM merupakan subyek dan obyek Pembangunan, dengan peningkatan kapasitas dan daya saing SDM diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk keberhasilan Pembangunan sosial ekonomi kota. Daya saing SDM sebagai subyek Pembangunan mengandung pengertian bahwa Masyarakat dan stakeholder yang merupakan pelaku Pembangunan Kota Probolinggo memiliki modal dasar (kemampuan, pengetahuan, ketrampilan) yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan Pembangunan secara efektif, efisien dan berhasil guna. Sedangkan daya saing SDM sebagai obyek Pembangunan

mengandung pengertian Upaya untuk peningkatan keberdayaan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk mendukung Upaya Pembangunan Sosial Ekonomi Kota yang berkelanjutan. Kebutuhan penguatan dan daya saing SDM ini tergambarkan dari capaian indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM kota probolinggo selama 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024) terus meningkat hingga sebesar 77,9 di Tahun 2024, diatas capaian nasional dan provinsi, serta menduduki peringkat ke-10 IPM tertinggi di Jawa Timur. Akan tetapi jika dibandingkan dengan 9 (Sembilan) kota di Jawa Timur, Kota Probolinggo masih menduduki peringkat IPM terendah sehingga diperlukan usaha untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM dimaksud. Sedangkan fokus stabilitas wilayah pada Tahun 2026 ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum wilayah, penanganan konflik sosial dimana keamanan merupakan juga merupakan modal dasar Pembangunan wilayah dan landasan Pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa RKPD Kabupaten/Kota disusun dengan berpedoman pada :

- a. Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dilakukan melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya ;
- b. Berpedoman pada RKPD provinsi, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

Mengacu pada ketentuan dimaksud maka Tema Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD perlu untuk diselaraskan kembali dengan Tema, Agenda Pembangunan dan Prioritas Nasional serta Provinsi. Tema RKP Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2025 dan *Kick Off Meeting* Penyusunan RKP 2026 yaitu : "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Sedangkan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana disampaikan dalam Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur yaitu : "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi". Adapun persandingan dan penyelarasan tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2026 dimaksud secara lengkap disajikan pada Bab IV RKPD ini.

Selain penyelarasan tema dan prioritas pembangunan, arahan untuk penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan strategis dimaksud ditujukan untuk menelaah kebijakan yang menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu ;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut ;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

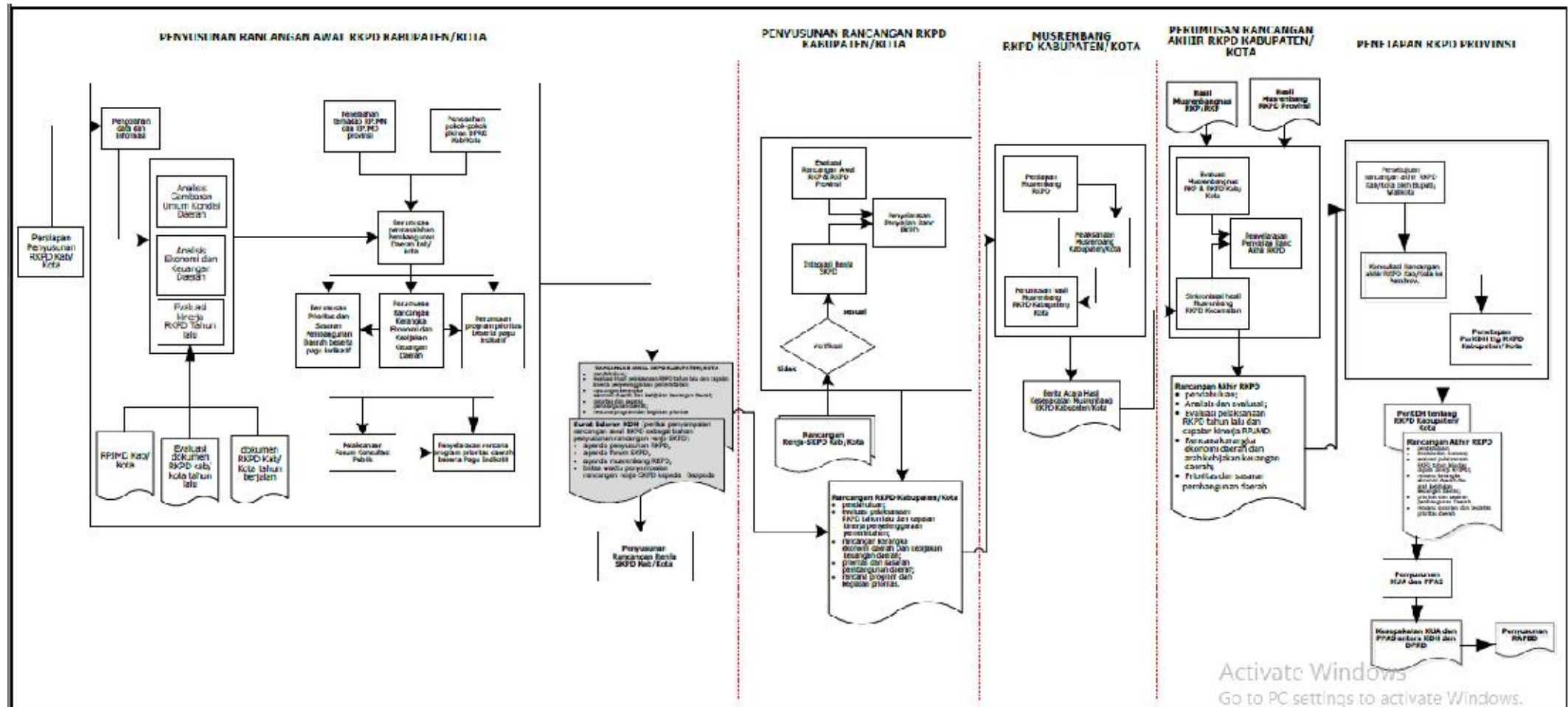
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun rencana, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Penyusunan RKPD, maka RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD beserta perubahannya kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD beserta perubahannya sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan sebagaimana Pemutakhiran Nomenklatur dimaksud (untuk pemutakhiran nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dirilis melalui SIPD akan tetapi belum ditetapkan dalam bentuk Kepmendagri). Hasil dari sinkronisasi kebijakan dalam RKPD dimaksud kemudian ditindaklanjuti melalui Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan penyelarasan program dan kegiatan prioritas pada RKPD dengan program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi tentang indikator kinerja. Selain itu juga diarahkan untuk memastikan agar program dan kegiatan prioritas kota telah sepenuhnya tercantum dalam Renja Perangkat Daerah terkait.

Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo bertekad untuk mewujudkan tema pembangunan Tahun 2026 tersebut secara optimal dalam bentuk program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam APBD Kota Probolinggo Tahun 2026. Dengan penetapan tema pembangunan dan program prioritas di atas, terdapat implikasi serangkaian agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026. Dalam kerangka perencanaan, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 ini menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Dalam kerangka penganggaran, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Kota Probolinggo Tahun 2026.



Gambar 1. 1 Bagan Alir Pedoman Tahapan dan Proses Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Aturan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19) ;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 29. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6);

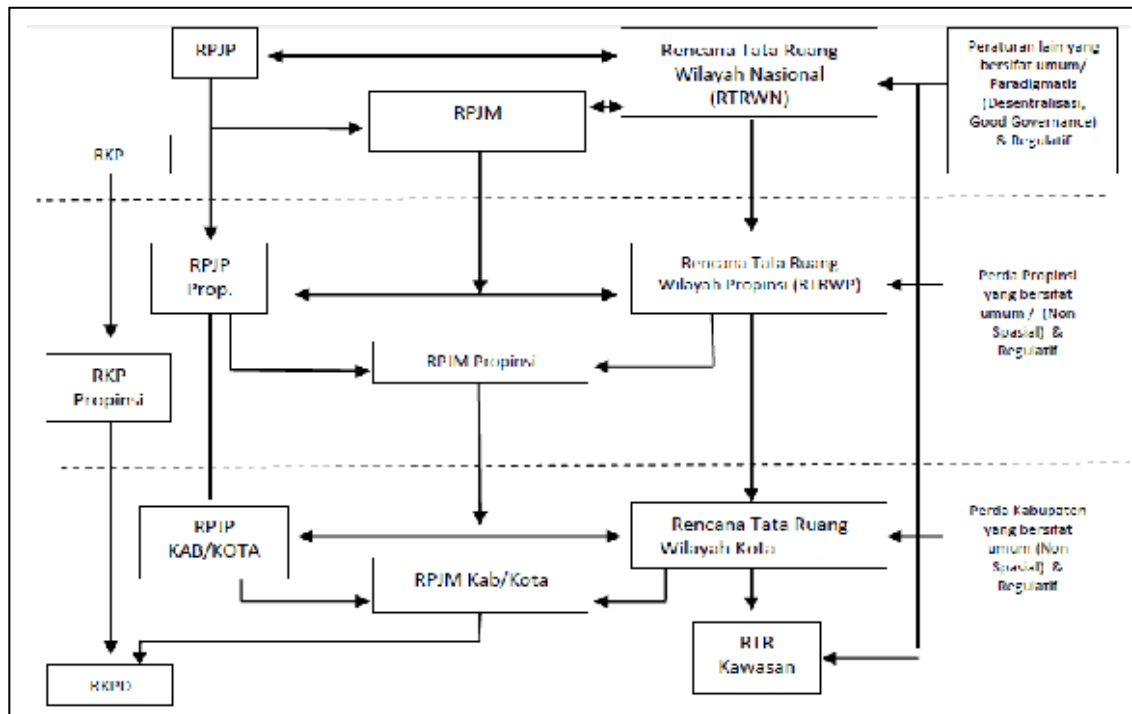


33. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Nomor 18 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9); dan;
36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

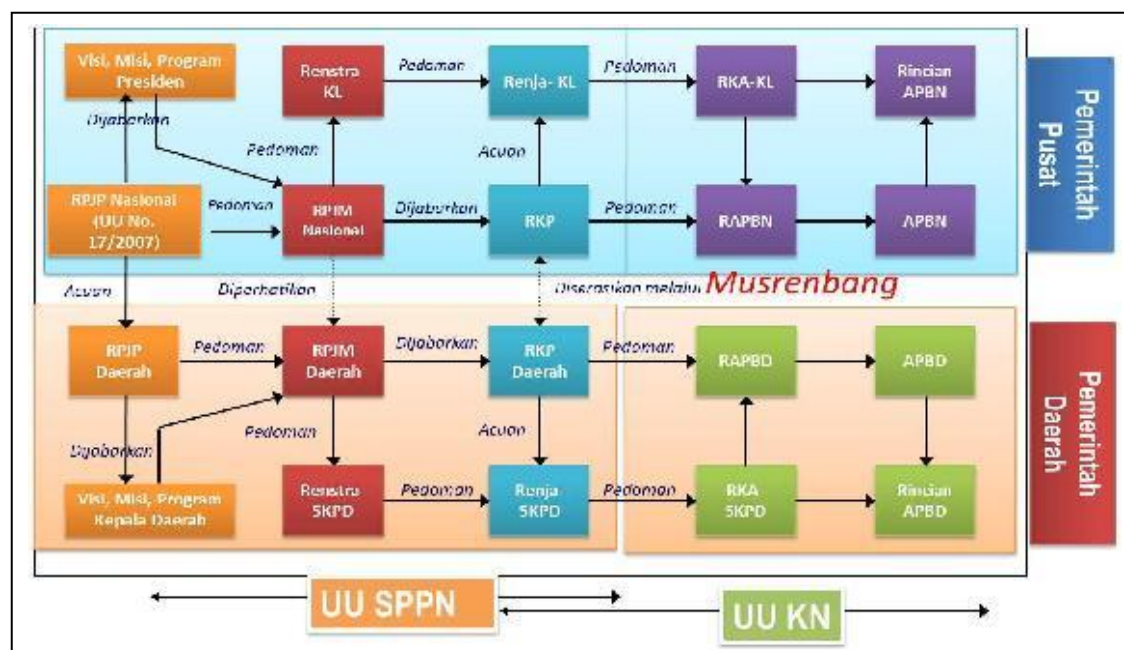
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyusun Perencanaan Pembangunan yang terpadu dengan Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang terintegrasi secara berjenjang dengan rencana pembangunan di tingkat yang lebih tinggi (Provinsi dan Nasional). Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Kota Probolinggo sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan daerah juga wajib memperhatikan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat Kota Probolinggo sendiri antara lain RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.3.



Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 mengacu pada kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Meskipun RKPD juga tetap harus berpedoman kepada RPJMD Kota Probolinggo sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Probolinggo. Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam RKPD dimaksud dalam tataran kebijakan nasional yang bersifat mengikat secara



umum dan menjadi relevan bagi suatu daerah untuk dipedomani, mengandung peluang bagi pengembangan daerah, mengambil lokus wilayah di daerah, serta yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur, RKPD provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Wilayah Kota Probolinggo yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota Probolinggo.

Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 merupakan Tahun Pertama dari Tahun Rencana RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang saat ini disusun secara bersamaan dengan penyusunan RKPD dan masuk dalam tahapan legislasi (pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir RPJMD dengan DPRD). Keterkaitan kedua dokumen perencanaan ini berupa penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Walaupun RPJMD dimaksud masih belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah karena disusun secara bersamaan/parallel, akan tetapi RKPD Tahun 2026 tetap disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD dimaksud untuk keselarasan antar dokumen perencanaan.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Kota Probolinggo dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki kesesuaian substansi dalam hal program dan kegiatan, pendanaan serta target kinerja pembangunan daerah untuk masing-masing bidang urusan.

Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun kota, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 juga perlu mengacu kepada RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu tahun 2026 serta indikasi program strategis perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2026 agar nantinya mendapatkan prioritas pendanaan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo.

Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan RKPD sebagai bagian dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana penganggaran, RKPD Kota



Probolinggo Tahun 2026 menjadi dasar bagi penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun 2026 yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. MAKSUD

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dari pendekatan penetapan program pembangunan prioritas, pembiayaan pembangunan, dan target kinerja pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 melalui penjabaran pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dari dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kota.

1.4.2. TUJUAN

Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 memiliki tujuan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026;
3. Merumuskan Rancangan Kerangka Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah ;
4. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah melalui rencana kerja, pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana serta target kinerja pembangunan daerah dari tahun anggaran yang direncanakan ;
5. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah serta memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026.



1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterkaitan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana Program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target kinerja pencapaian SPM untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

BAB VII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD Kota Tahun 2026 merupakan acuan penyusunan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun 2026.



BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

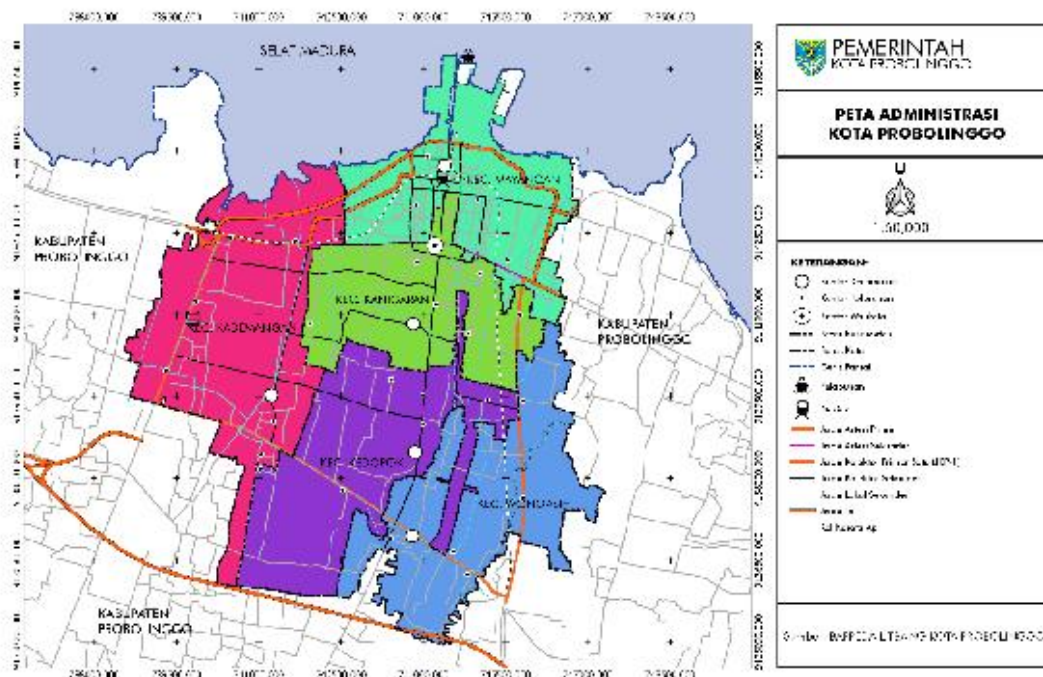
2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Administrasi Wilayah

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP Probolinggo–Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7°43’ sampai 7°49’ Lintang Selatan dan 113°09’ sampai dengan 113°14’ Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 5.504,14 Ha. Secara administrasi, Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo



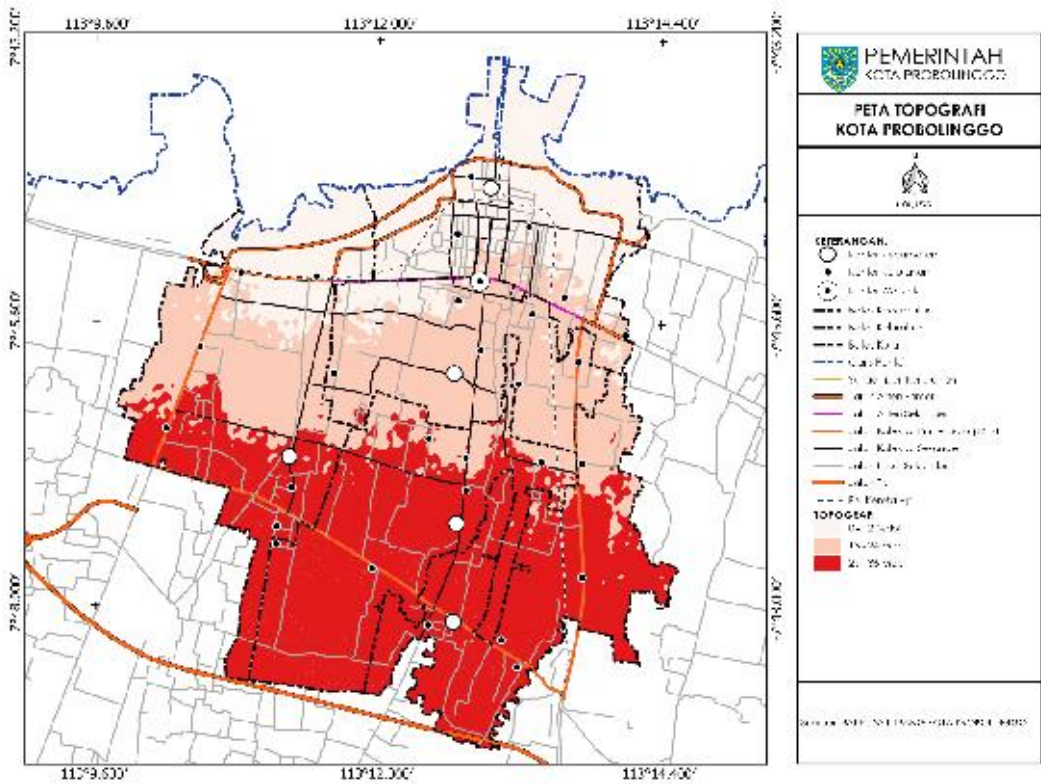
2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan data BPS (2025) ketinggian Kota Probolinggo berkisar pada 0 s/d 36 mdpl. Jika ditinjau dari aspek kelerengan maka wilayah Kota Probolinggo berada pada kelerengan 0–2% atau dapat dikatakan memiliki wilayah yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan budidaya. Topografi yang semakin tinggi di wilayah selatan berdampak pada arah limpasan air yang mengarah ke wilayah utara dan berpotensi menyebabkan banjir bila tidak didukung oleh sistem drainase yang memadai.

Tabel 2. 1 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Topografi (mdpl)				
		0-12.5	12.5-25	25-37.5	37.5-50	>50
1	Kademangan	7,12%	9,38%	6,53%	1,85%	0,56%
2	Kedopak	0,05%	2,71%	10,48%	6,32%	0,06%
3	Wonoasih	15,09%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Mayangan	2,15%	13,48%	0,09%	0,00%	0,00%
5	Kanigaran	0,00%	3,55%	9,72%	7,05%	1,13%
	Jumlah	24,41%	31,80%	26,81%	15,23%	1,75%

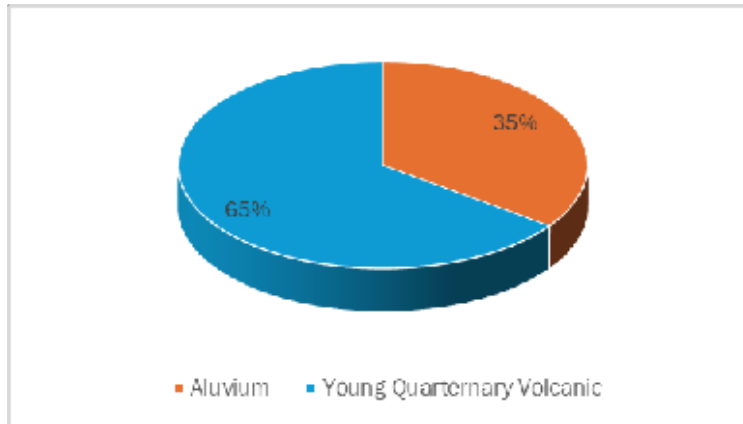
Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2025



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo

2.1.1.3. Geologi

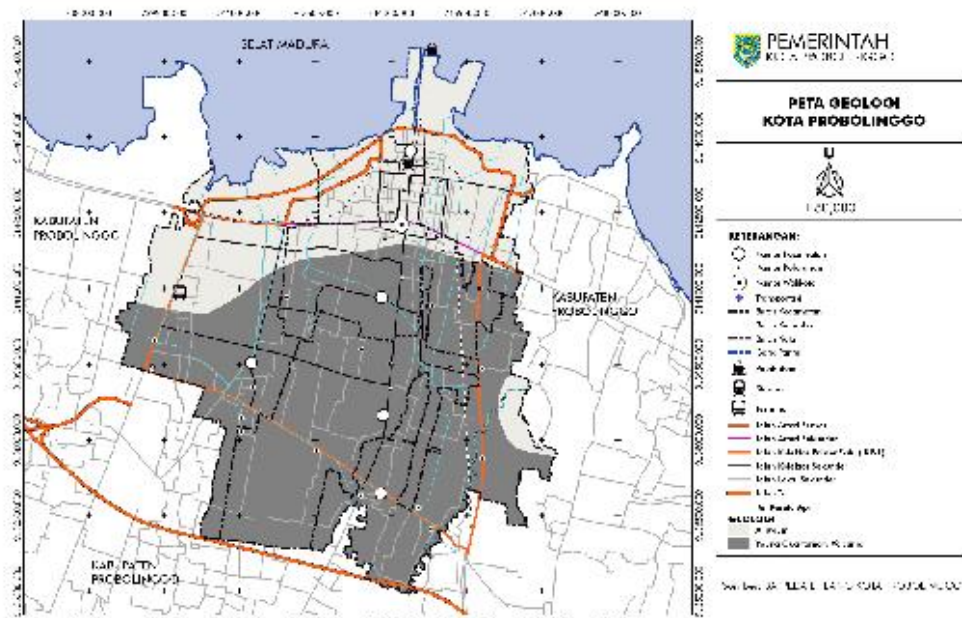
Kondisi geologi adalah letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan lempeng bumi. Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kota Probolinggo berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi yaitu:



Gambar 2. 3 Persentase Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi
Tabel 2. 2 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Batuan (geologi)	
		Alluvium	Young Quarternary Volcanic
1	Kademangan	12,62%	12,8%
2	Wonoasih	1,38%	18,2%
3	Mayangan	17,10%	0,7%
4	Kanigaran	3,86%	11,9%
5	Kedopok	0,00%	21,4%
	Kota Probolinggo	34,95%	65,0%

Sumber: Bappeda Litbang, 2025



Gambar 2. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (young quarternary volcanic product) dan batuan endapan (alluvium). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Geologi jenis young quarternary

volcanic tersebar merata di kecamatan Kota Probolinggo seluas 3.580,24 Ha atau sekitar 65,05% dari luas wilayah, jenis batuan aluvium seluas 1.923,91 Ha atau sekitar 34,95%, tersebar di Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran.

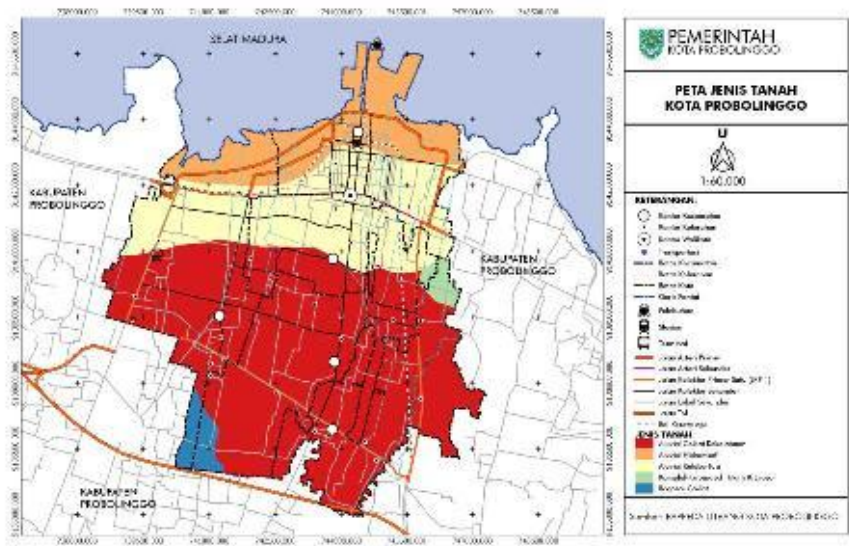
2.1.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Grumosol dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas pada wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya. Jenis tanah aluvial merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena pada jenis ini tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat.

Tabel 2. 3 Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah				
		Aluvial Hidromorf	Aluvial Kelabu Tua	Aluvial Coklat Kekelabuan	Komplek Grumosol Hitam & Litosol	Regosol Coklat
1	Kademangan	3,96%	6,97%	13,51%	0,00%	1,01%
2	Wonoasih	0,00%	0,00%	18,67%	0,93%	0,00%
3	Mayangan	10,36%	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Kanigaran	0,00%	9,96%	5,51%	0,26%	0,00%
5	Kedopok	0,00%	0,25%	20,07%	0,00%	1,13%
	KOTA PROBOLINGGO	14,31%	24,60%	57,76%	1,19%	2,14%

Sumber : Bappeda Litbang, 2025



Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di wilayah perencanaan. Kota Probolinggo mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak, pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger,



Legundi, Kasbah dan Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengannya wilayah.

Tabel 2. 4 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo

NO	NAMA SUNGAI / KALI	PANJANG (Km)
1	Kedunggaleng	3,097
2	Umbul	5,138
3	Banger	2,865
4	Legundi	5,439
5	Kasbah	2,037
6	Pancor	4,239
7	Pesisir	3,693
8	Dringu	5,949
9	Tempuran	2,059
10	Afvoer Brantas	3,704
11	Afvoer Bromo	3,297
12	Pakis	3,225
13	Gladak Serang	4,392
14	Akub	3,693
15	Belo'an	5,539
16	Esan	4,137
17	Bangsingan	2,844
18	Barat TPA	2,510
19	Kedunggaleng 1	3,206

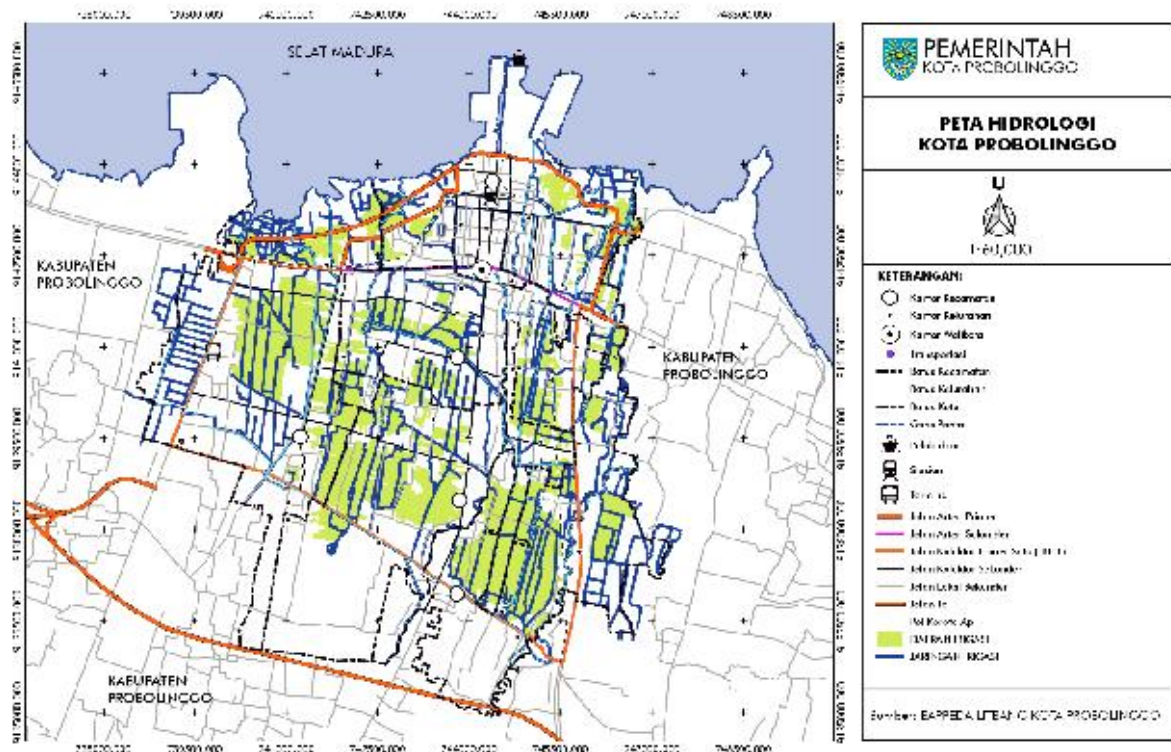
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Sumber Mata Air di Wilayah Kota Probolinggo Sebagai Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah terdapat 17 sumber mata air yang tersebar di seluruh Kota Probolinggo. Sumber-sumber mata air tersebut merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang tidak dapat dialihfungsikan peruntukkannya.

Tabel 2. 5 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

No	Sumber Mata Air	Lokasi	
		Kelurahan	Kecamatan
1	Sumber Mata Air Langse	Triwung Lor	Kademangan
2	Sumber Mata Air Pilang Renes	Pilang	Kademangan
3	Sumber Mata Air Jalil	Ketapang	Kademangan
4	Sumber Mata Air Tiban	Pilang	Kademangan
5	Sumber Mata Air Gentong	Pilang	Kademangan
6	Sumber Mata Air Umbul	Curah Ginting	Kanigaran
7	Sumber Mata Air Sumber Pacar	Tisnonegaran	Kanigaran
8	Sumber Mata Air Kekok	Tisnonegaran	Kanigaran
9	Sumber Mata Air Arum	Mangunharjo	Mayangan
10	Sumber Mata Air Jati	Jati	Mayangan
11	Sumber Mata Air Sumbertaman	Sumber Taman	Wonoasih
12	Sumber Mata Air Ardi	Wonoasih	Wonoasih
13	Sumber Mata Air Kareng	Kareng Lor	Kedopok
14	Sumber Mata Air Grinting	Sumber Wetan	Kedopok
15	Sumber Mata Air Sentong	Jrebeng Wetan	Kedopok

Sumber : DLH Kota Probolinggo, 2025



Gambar 2. 6 Peta Hidrologi Kota Probolinggo



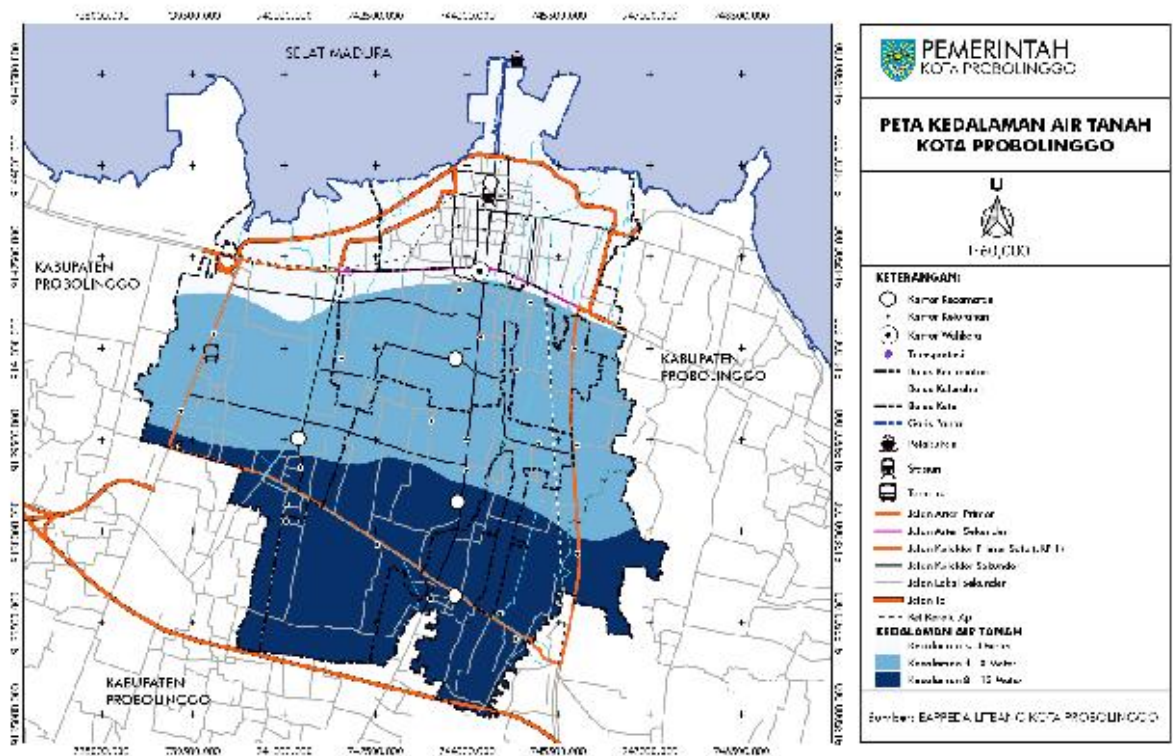
2.1.1.6. Kedalaman Air Tanah

Kedalaman air tanah Kota Probolinggo didominasi oleh kedalaman 4 – 8 m sebesar 40,36% sedangkan kedalaman di bawah 4 m sebesar 26,87% dari luas wilayah. Dapat dikatakan semakin ke selatan maka kedalaman air tanah akan semakin tinggi.

Tabel 2. 6 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kedalaman Air Tanah		
		Kedalaman < 4 Meter	Kedalaman 4 - 8 Meter	Kedalaman 8 - 12 Meter
1	Kademangan	7,90%	12,80%	4,75%
2	Wonoasih	0,00%	5,72%	13,88%
3	Mayangan	16,99%	0,78%	0,00%
4	Kanigaran	2,08%	13,64%	0,00%
5	Kedopok	0,00%	7,42%	14,03%
	KOTA PROBOLINGGO	26,97%	40,36%	32,66%

Sumber : Bappeda Litbang, 2024



Gambar 2. 7 Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Probolinggo pada tahun 2024 menunjukkan pola pemanfaatan ruang yang masih didominasi oleh sektor pertanian, khususnya sawah dan kebun/tegalan. Berdasarkan data yang ada, luas lahan sawah mencapai 1.930,72 hektar, disusul oleh kebun dan tegalan seluas 1.846,72 hektar. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Kota Probolinggo merupakan wilayah perkotaan, sektor agraris masih memiliki peran signifikan dalam struktur ruang kota.

Di sisi lain, kawasan permukiman mencakup luas sebesar 1.018,08 hektar, mencerminkan intensitas pembangunan kawasan hunian yang cukup tinggi. Penggunaan lahan untuk prasarana transportasi berupa jalan juga cukup besar, yaitu sebesar 211,25



hektar, yang mengindikasikan kebutuhan akan konektivitas dan mobilitas penduduk di kawasan urban.

Sektor industri menempati luas lahan sebesar 112,03 hektar, sedangkan kawasan perdagangan dan jasa seluas 31,69 hektar, yang menunjukkan kontribusi sektor ekonomi produktif terhadap struktur tata ruang kota. Selain itu, kawasan mangrove seluas 112,46 hektar dan perairan sebesar 174,46 hektar turut menggambarkan pentingnya perlindungan kawasan pesisir dan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Probolinggo.

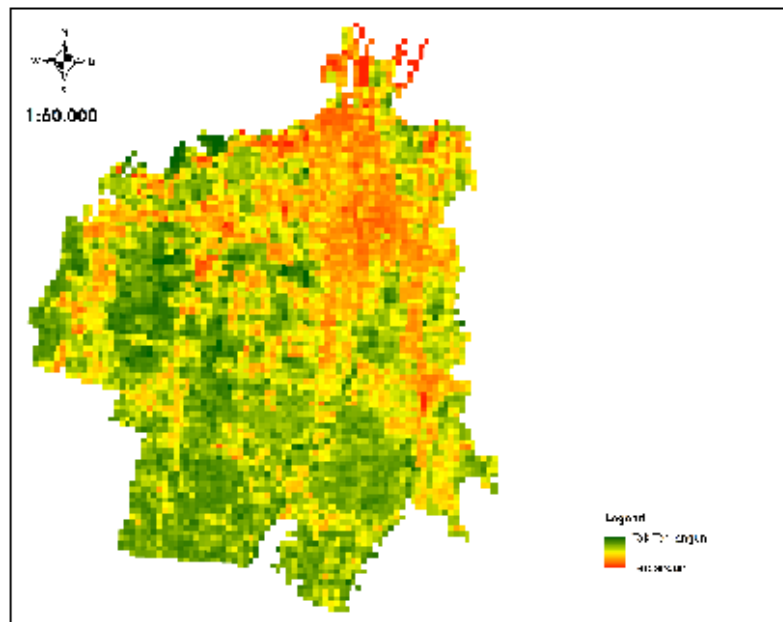
Pemanfaatan lahan untuk fasilitas publik seperti fasilitas umum (18,58 ha), pendidikan (20,52 ha), kesehatan (2,46 ha), dan peribadatan (5,39 ha) menunjukkan alokasi ruang untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan lahan untuk perkantoran dan makam masing-masing tercatat seluas 6,80 ha dan 34,57 ha.

Tabel 2. 7 Data Penggunaan Lahan Di Kota Probolinggo Tahun 2024

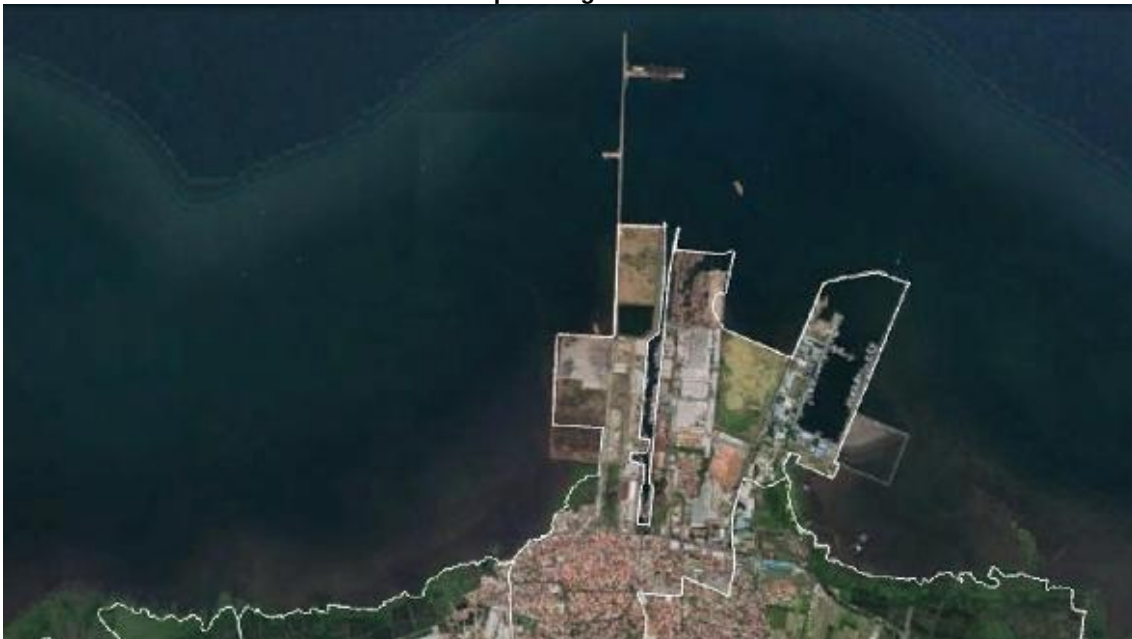
No.	Penggunaan Lahan	Luas	%
1.	Perairan	174,46 Ha	2,77
2.	Fasilitas Umum	18,58 Ha	0,34
3.	Fasilitas Peribadatan	5,39 Ha	0,10
4.	Industri	112,03 Ha	2,04
5.	Jalan	211,25 Ha	3,84
6.	Kebun dan Tegalan	1846,72 Ha	33,55
7.	Makam	34,57 Ha	0,63
8.	Mangrove	112,46 Ha	2,04
9.	Perkantoran	6,80 Ha	0,12
10.	Permukiman	1018,08 Ha	18,50
11.	Perdagangan dan Jasa	31,69 Ha	0,58
12.	Fasilitas Kesehatan	2,46 Ha	0,04
13.	Sawah	1930,72 Ha	35,08
14.	Fasilitas Pendidikan	20,52 Ha	0,37
		5.504 Ha	

Sumber: DPUPR PKP Kota Probolinggo, 2025

Secara keseluruhan, komposisi penggunaan lahan tersebut mencerminkan karakter Kota Probolinggo sebagai kota dengan fungsi ganda, yakni sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus masih mempertahankan karakter pertanian dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, dalam kerangka perencanaan jangka menengah, pengelolaan tata ruang yang berimbang dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan Kota Probolinggo yang inklusif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 2. 8 Peta Tutupan Vegetasi Tahun 2024



Gambar 2. 9 Kawasan Pelabuhan

Kemampuan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan. Kesesuaian lahan berhubungan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan tertentu maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut. Lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar.

Nilai ambang batas terbagi menjadi batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dapat dikatakan

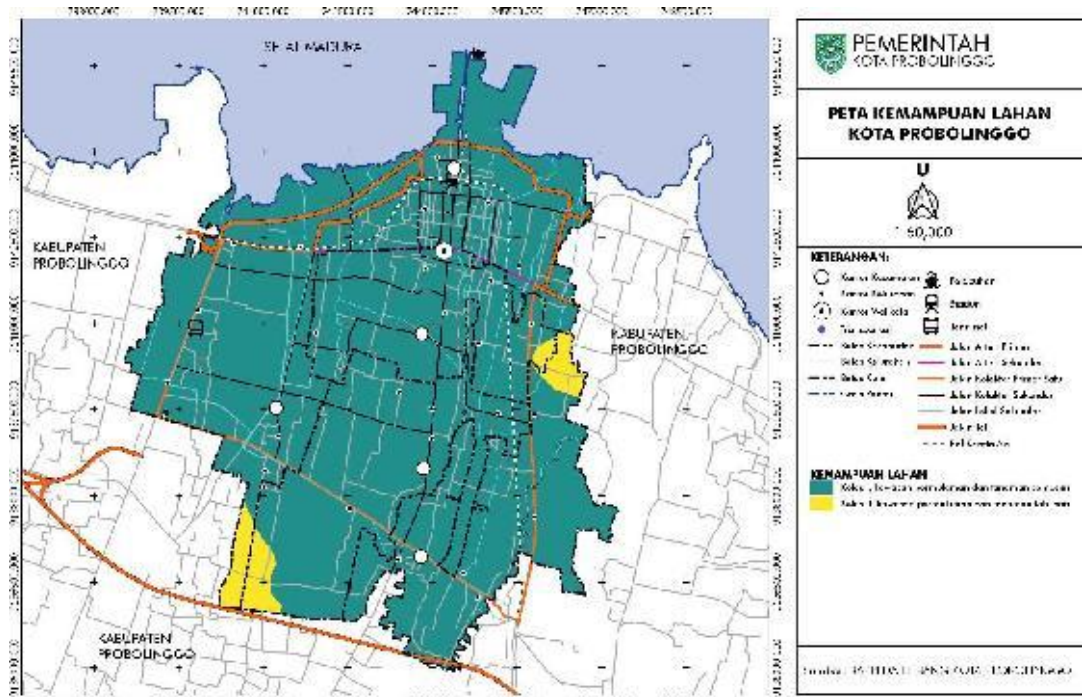


lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. Analisis kemampuan lahan Kota Probolinggo ini beracuan pada 2 pedoman, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik& Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Berikut ini merupakan Daya Dukung Kemampuan Lahan Kota Probolinggo:

Tabel 2. 8 Kemampuan Lahan Menurut Kecamatan Kota Probolinggo

Kelas Kemampuan Lahan	Kesesuaian Lahan	Kecamatan	Luas (Ha)
Kemampuan Lahan	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Kademangan	1345.33
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Kanigaran	851.155
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Kedopak	1,118.379
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Mayangan	977.539
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Wonoasih	1,027.840
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Kademangan	55.67
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Kanigaran	14.049
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Kedopak	62.21
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Mayangan	0.568
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Wonoasih	51.40

Sumber: KLHS RPJMD Kota Probolinggo 2025 – 2029



Gambar 2. 10 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

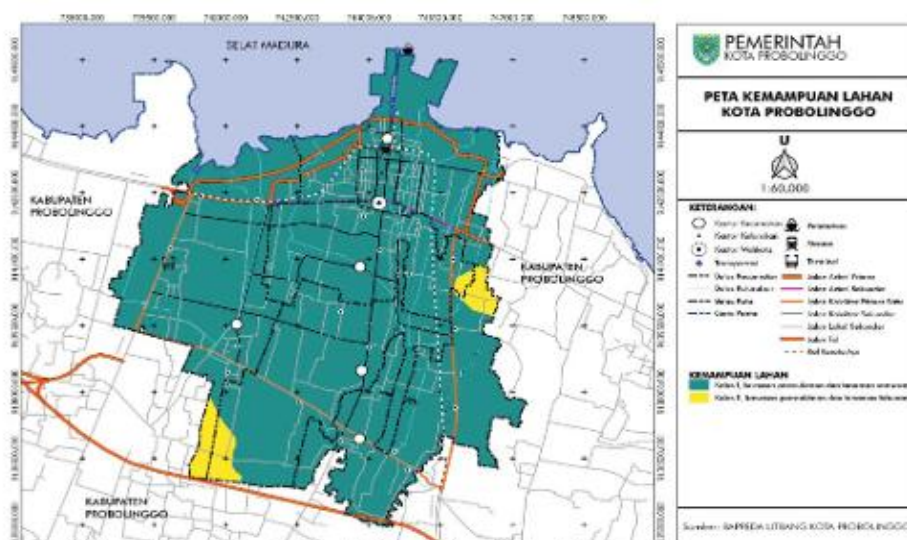
Kemampuan lahan Kota Probolinggo didominasi lahan kelas kemampuan I yang memiliki sedikit penghambat yang membatasi penggunaannya. Lahan kelas I memungkinkan untuk penggunaan budidaya dan pertanian. Dapat dikatakan bahwa secara fisik Kota Probolinggo memiliki potensi pengembangan wilayah guna mendukung fungsi kota sebagai simpul perdagangan dan jasa, terlebih dengan adanya dukungan fasilitas transportasi berupa jalan tol dan Pelabuhan Pengumpul. Ke depan diharapkan Kota Probolinggo dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lingkup pengembangan Kawasan Bromo–Tengger–Semeru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, khususnya sebagai kawasan pendukung sekaligus pintu gerbang menuju KSPN BTS.

Posisi strategis Kota Probolinggo dalam konstelasi regional Provinsi Jawa Timur memberi dampak positif dalam pengembangan perekonomian Kota Probolinggo. Posisi yang menghubungkan bagian barat dan timur serta menjadi Pusat Kegiatan Wilayah WP Probolinggo – Lumajang menjadikan Kota Probolinggo memiliki keunggulan dibandingkan wilayah sekitarnya terlebih dengan adanya dukungan Pelabuhan Pengumpul yang mampu menjadi magnet yang menarik aktivitas dari wilayah hinterland.



Gambar 2. 11 Peta Hinterland Kota Probolinggo

Guna mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan ruang kota, Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040. Dimana muatan RTRW telah menetapkan struktur dan pola ruang kota dengan harapan dapat menjadi acuan pengembangan kota secara spasial. Di sisi pola ruang, RTRW telah menetapkan kawasan-kawasan pengembangan baik berupa kawasan lindung maupun budidaya di antaranya pengembangan kawasan peruntukan industri di Jalan Brantas serta sekitar pelabuhan serta penetapan kawasan pelabuhan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai kawasan penyangga kebutuhan pangan. Selain pengembangan kawasan budidaya RTRW juga memuat pelestarian dan pengembangan kawasan lindung seperti: pelestarian dan pengembangan kawasan mata air, pengembangan potensi wisata di wilayah pesisir serta mengupayakan pemenuhan 20% RTH Publik.



Gambar 2. 12 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo

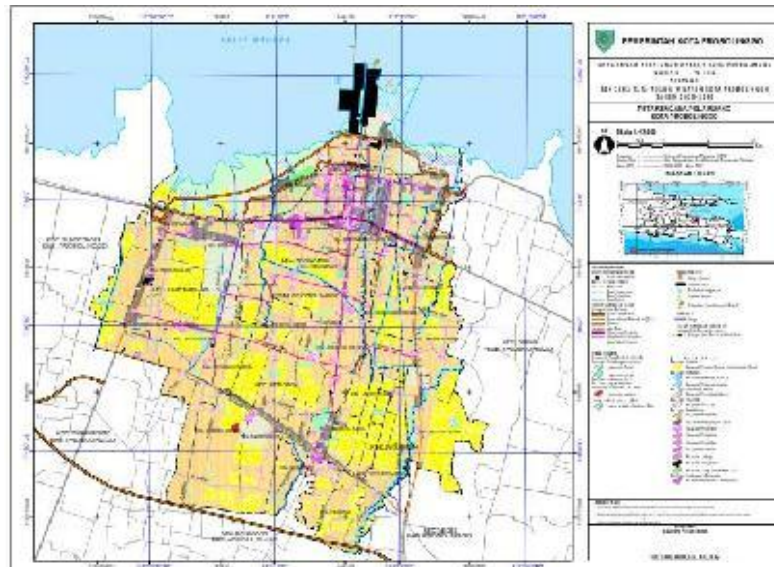
Berdasarkan peta kemampuan lahan, sebagian besar wilayah Kota Probolinggo termasuk Kelas I atau memungkinkan untuk difungsikan sebagai kawasan budidaya. Mengacu pada RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan ruang wilayah Kota Probolinggo berbasis perdagangan dan jasa,



industri dan transportasi sebagai pusat kegiatan wilayah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, perwujudan rencana pola ruang Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung yang meliputi:
 - a. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - Sempadan Pantai dengan luas kurang lebih 162 ha,
 - Sempadan Sungai dengan luas kurang lebih 61 ha
 - b. Kawasan lindung geologi berupa kawasan sempadan mata air dengan seluas kurang lebih 7 Ha.
 - c. Kawasan rawan bencana;
 - d. Kawasan cagar budaya; dan
 - e. Ruang Terbuka Hijau Kota sebesar 30 % dari luas wilayah kota atau seluas kurang lebih 1.650 ha
2. Kawasan Budidaya yang meliputi:
 - a. Kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 1.099 ha
 - b. Kawasan perikanan seluas kurang lebih 97 ha,
 - c. Kawasan peruntukan industri yang meliputi;
 - kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 321 ha
 - kawasan sentra industri berupa industri rumah tangga
 - d. Kawasan pariwisata;
 - e. Kawasan permukiman yang meliputi;
 - Kawasan Perumahan dengan luas kurang lebih 2.751 ha
 - Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan luas kurang lebih 414 ha
 - Kawasan Perkantoran dengan luas kurang lebih 59 ha
 - Kawasan Peribadatan dengan luas kurang lebih 5 ha
 - Kawasan Pendidikan dengan luas kurang lebih 89 ha
 - Kawasan Kesehatan dengan luas kurang lebih 10 ha
 - Kawasan Olah Raga dengan luas kurang lebih 19 ha
 - Kawasan Transportasi dengan luas kurang lebih 91 ha
 - Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan luas kurang lebih 18 ha
 - Kawasan Sektor Informal.
 - f. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 23 ha



Gambar 2. 13 Rencana Pola Ruang Kota Probolinggo

Dalam konteks pengembangan kawasan, RTRW Kota Probolinggo menetapkan kawasan Pelabuhan di Kecamatan Mayangan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berimplikasi bahwa kawasan pelabuhan menjadi bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi.

Kawasan Pelabuhan meliputi Pelabuhan Baru (sisi barat) dan Pelabuhan Tanjung Tembaga (bagian tengah) dengan status sebagai Pelabuhan Pengumpul. Di sisi timur terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai. Pelabuhan Tanjung Tembaga dikelola oleh PT PELINDO III. Pelabuhan Baru dikelola oleh PT DABN yang dioperasikan sebagai pelabuhan umum dengan fasilitas antara lain adalah: dermaga, gudang, lapangan penumpukan. Adapun Pelabuhan Perikanan Pantai dikelola oleh Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan yang saat ini berjalan di Pelabuhan Probolinggo adalah: kegiatan bongkar muat, curah kering, pergudangan, penumpukan, perikanan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Pelabuhan Probolinggo juga melayani jasa penyeberangan menuju Pulau Gili Ketapang serta menjadi lokasi sandar kapal pesiar.

Kawasan Pelabuhan merupakan kawasan yang menjadi penggerak perekonomian sekaligus menjadi trigger pengembangan wilayah tidak hanya Kota Probolinggo namun juga hinterland pelabuhan (Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo).



Gambar 2. 14 Kawasan Pelabuhan

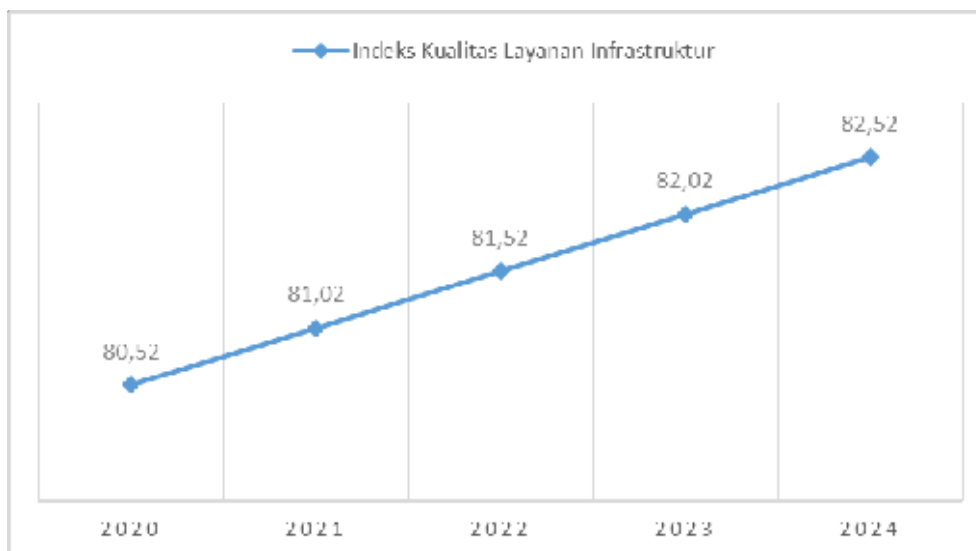
Sebagai respons terhadap kebutuhan konektivitas dan pemerataan pembangunan, Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan jaringan jalan yang terintegrasi dengan sub-sub pusat pertumbuhan sebagaimana diatur dalam dokumen tata ruang. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut ditopang oleh sistem jaringan jalan nasional dan kota. Ruas jalan nasional dengan fungsi sebagai jalan arteri primer di Kota Probolinggo meliputi: Jalan Sukarno Hatta (batas kota – Pilang), Jalan Lingkar Utara, Jalan Bromo, Jalan Prof. Hamka, Jalan Ir. Sutami, Jalan KH. Hasan Genggong, Jalan Panglima Sudirman (Randu Pangger – Batas Kota). Selain jalan nasional, konektivitas antar wilayah Kota Probolinggo didukung oleh jaringan jalan kota seperti Jalan Brantas, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mastrip, Jalan Abdurrahman Wahid. Keberadaan jaringan jalan kota ini mendukung aksesibilitas terhadap wilayah-wilayah yang menjadi pemusatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya mendorong pergerakan barang dan jasa dan memperkuat konektivitas antarwilayah untuk mendukung arah pertumbuhan kota yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Probolinggo telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, meski masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan ketersediaannya secara optimal. Permasalahan seperti tantangan teknis dalam perancangan serta pemeliharaan infrastruktur, dan peningkatan kebutuhan masyarakat menjadi beberapa isu penting yang harus ditangani secara strategis. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan seperti peningkatan investasi infrastruktur, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta perencanaan pembangunan yang lebih integratif menjadi langkah penting untuk memastikan infrastruktur Kota Probolinggo dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator strategis yang mencerminkan sejauh mana infrastruktur publik mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Kota Probolinggo, IKLI menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas layanan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi yang

berperan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, efisiensi produksi, serta kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang andal dan merata tidak hanya mendukung kehidupan urban, tetapi juga memperkuat wilayah sub-perkotaan dan perdesaan sebagai bagian integral dari sistem pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan IKLI secara konsisten menjadi kunci dalam mendorong daya saing wilayah, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan. Kota Probolinggo yang memiliki potensi sektor unggulan seperti perikanan, industri kecil, dan pariwisata, memerlukan layanan infrastruktur yang berkualitas untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, serta menarik investasi. Berikut capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2020-2024:



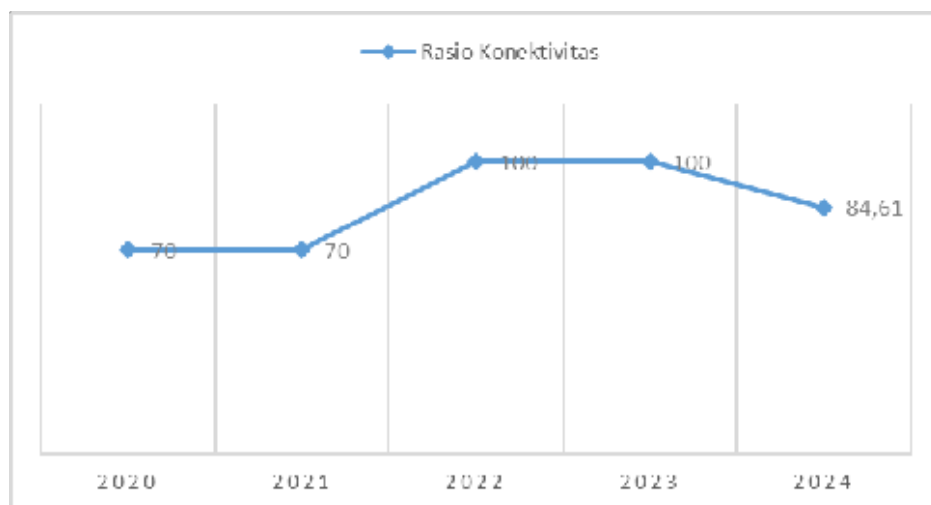
Gambar 2. 15 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo, 2025

Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Nilai IKLI yang naik secara bertahap dari 80,52 pada tahun 2020 menjadi 82,52 pada tahun 2024 mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar di berbagai sektor. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur secara terencana dan berkelanjutan. Peningkatan IKLI juga menunjukkan semakin tingginya kualitas layanan publik yang mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan ini berdampak positif terhadap konektivitas antarwilayah, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta penguatan kapasitas wilayah sub-perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan baru. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa investasi infrastruktur telah diarahkan secara tepat untuk memperkuat daya saing daerah dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif.



RASIO KONEKTIVITAS

Rasio konektivitas mencerminkan tingkat keterhubungan antarwilayah, baik secara fisik melalui jaringan transportasi maupun secara digital melalui infrastruktur teknologi informasi. Tingginya rasio konektivitas menjadi fondasi penting dalam mendukung pergerakan barang, jasa, informasi, dan mobilitas penduduk secara efisien. Di wilayah sub perkotaan dan perdesaan, konektivitas yang baik dapat mempercepat aliran komoditas unggulan lokal ke pasar yang lebih luas serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Peningkatan rasio konektivitas secara langsung berdampak pada daya saing daerah. Wilayah sub perkotaan dan perdesaan di Kota Probolinggo lebih kompetitif dalam menarik investasi dan memperkuat sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Berikut adalah data capaian rasio konektivitas Kota Probolinggo:



Gambar 2. 16 Rasio Konektivitas Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, 2025

Capaian rasio konektivitas Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara mendalam. Periode 2020–2021 ditandai dengan capaian yang masih terbatas pada angka 70, kemudian mengalami lonjakan signifikan menjadi 100 pada 2022–2023, yang mencerminkan perbaikan akses dan keterhubungan antarwilayah. Lompatan tersebut mengindikasikan optimalisasi infrastruktur konektivitas dan penyediaan layanan transportasi yang lebih merata. Penurunan capaian rasio konektivitas pada tahun 2024 menjadi 84,61 menandakan adanya tantangan baru dalam menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat. Bertambahnya jumlah kebutuhan trayek menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap aksesibilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh sistem yang ada. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, baik dari sisi layanan, trayek maupun integrasi moda transportasi.

2.1.1.9. Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan

Mengacu pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, diketahui bahwa terdapat 2.069,97 ha lahan sawah yang dilindungi yang berada di luar kawasan hutan. Luas lahan pertanian di



Kota Probolinggo berdasarkan BPN seluas 1,916.57 Ha. Luas lahan sawah di Kota Probolinggo berdasarkan BPN seluas 1,703.91 Ha, sedangkan luas sawah pada tahun 2017 seluas 1,792.50 Ha. Luas lahan tegal berdasarkan BPN seluas 212.66 Ha, sedangkan luas tegal pada tahun 2017 seluas 627.50 Ha. Sementara itu, daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan bagi kebutuhan manusia. Dalam mengukur tingkat daya dukung lahan pertanian, maka digunakan beberapa variabel dalam rumus pengukuran teori Odum, Christeiler, Ebenezer Howard dan Issard dalam Soehardjo dan Tukiran (1990) dalam Moniaga (2011).

Nilai KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) setara dengan 98 Kg per kapita per tahun. Sehingga, dapat diketahui bahwa wilayah yang mampu swasembada pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum atau KFM sebesar 98 Kg/Kapita/Tahun. Adapun klasifikasi daya dukung lahan pertanian antara lain apabila < 1 , artinya wilayah tersebut merupakan wilayah yang belum mampu swasembada pangan. Sedangkan apabila > 1 artinya wilayah tersebut mampu swasembada pangan. Berikut merupakan perhitungan daya dukung lahan pertanian Kota Probolinggo Tahun 2023.

Tabel 2. 9 Daya Dukung Pangan Kota Probolinggo Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk (2023)	Luas Panen(Ha)	Produksi (kg)	Produksi Lahan Sawah (kg/ha)	Daya Dukung Pangan	Status
1	Kademangan	46.090	603,00	4.027.030,00	6678,32	0,36	Defisit
2	Kedopok	40.320	595,00	3.949.140,00	6637,21	0,40	Defisit
3	Wonoasih	36.290	327,00	2.172.990,00	6645,22	0,25	Defisit
4	Mayangan	62.300	107,00	708.140,00	6618,13	0,05	Defisit
5	Kanigaran	61.990	254,00	1.689.930,00	6653,26	0,11	Defisit
	Jumlah	246.980	1.886,00	12.547.230,00	1.309,00	0,23	Defisit

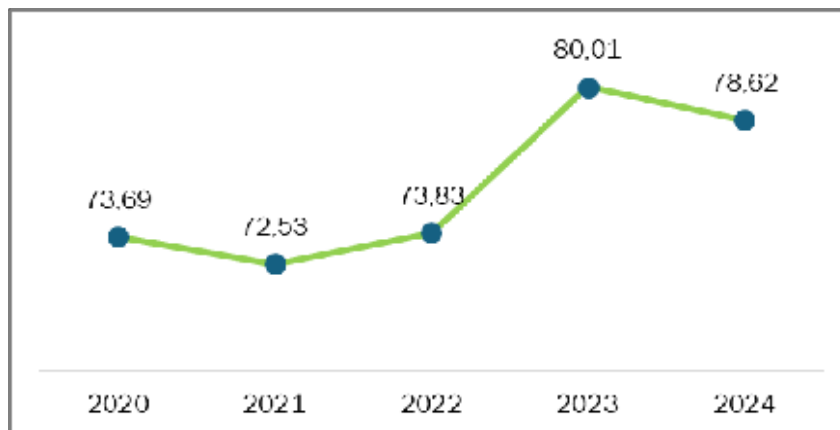
Sumber: KLHS RPJMD Kota Probolinggo 2025 – 2029

Berdasarkan hasil analisa daya dukung lahan pertanian Kota Probolinggo Tahun 2023 semua kecamatan mengalami defisit dalam daya dukung pangan untuk tanaman padi. Meskipun total produksi padi mencapai 12.547.230 kg dengan luas panen 1.886 ha, daya dukung pangan per kecamatan menunjukkan angka yang cukup rendah, berkisar antara 0,05 hingga 0,40. Kademangan, Kedopok, dan Wonoasih memiliki daya dukung pangan yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dengan nilai 0,36, 0,40, dan 0,25 masing-masing, sedangkan Mayangan dan Kanigaran memiliki nilai yang lebih tinggi namun tetap defisit, yaitu 0,05 dan 0,11. Total daya dukung pangan untuk seluruh area adalah 0,23, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, produksi padi tidak mencukupi kebutuhan pangan penduduk di daerah tersebut, dan semuanya dalam status defisit. Selanjutnya, diperlukan perhitungan rasio kemampuan daya dukung (carrying capacity ratio). Carrying Capacity Ratio (CCR) merupakan sebagai kapasitas atau kemampuan lahan yang berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada tahun 2023, Kota Probolinggo memiliki defisit pangan dan diperkirakan tetap defisit pangan pada 2025-2029. Sehingga diperlukan upaya agar menjaga kondisi surplus sehingga isu ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat dapat tertangani.



A. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Indeks ketahanan pangan merupakan alat penting yang dapat digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan pada daerah tertentu guna mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah. Selain itu indeks ketahanan pangan berfungsi sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah mencakup ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan pemanfaatan pangan. Berikut ini merupakan nilai indeks ketahanan pangan Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir (2020–2024):



Gambar 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Indeks ketahanan pangan Kota Probolinggo pada 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Capaian tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2023 dengan angka sebesar 80,01 yang kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 78,62. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor seperti adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, yang mengurangi luas area produksi pangan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Probolinggo perlu memperhatikan penurunan pada indeks ketahanan pangan ini sehingga dapat meningkat kembali pada tahun berikutnya. Penurunan Indeks Ketahanan Pangan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penurunan produksi pangan, tingginya angka stunting, terbatasnya akses air bersih, dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti keterbatasan lahan pertanian, kualitas infrastruktur distribusi yang buruk, tingkat kemiskinan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga turut berkontribusi. Capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo tidak berbanding lurus dengan capaian pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan hanya berkontribusi sekitar 7% dari Nilai PDRB, namun demikian tidak dapat dipungkiri penurunan sektor Pertanian dan perikanan pada tahun 2024 yang cukup signifikan terhadap PDRB yaitu sebesar -3,64% turut berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi dimana laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 5,15%.

Selain itu, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk modal manusia, modal fisik, teknologi dan inovasi, institusi dan kebijakan pemerintah, serta sumber daya alam. Setiap negara memiliki

kombinasi unik dari faktor-faktor ini, yang memungkinkan mereka mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara yang berbeda. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa membuat strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional ataupun internasional. Poin Sumber Daya Alam sebagai salah satu penentu dalam Pertumbuhan ekonomi, juga merupakan faktor penyusun utama dalam Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan suatu daerah ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya persentase produksi pertanian, rata-rata pengeluaran perkapita, indeks daya beli, persentase luas panen, dan kepadatan penduduk.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. IKP yang tinggi menunjukkan ketersediaan pangan yang baik, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang baik, yang tercermin dalam IKP yang tinggi, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi. Hal ini berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia, seperti peningkatan harapan hidup, kesehatan, dan produktivitas kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang kuat juga menciptakan stabilitas sosial. Jika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, maka potensi konflik sosial akibat kelangkaan pangan akan berkurang. Stabilitas sosial ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang baik juga menarik investasi di sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi rantai pasok, dan akses pasar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang baik juga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Jika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau, maka beban pengeluaran untuk makanan akan berkurang, sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena peningkatan pendapatan rumah tangga akan meningkatkan konsumsi dan investasi. IKP yang tinggi juga dapat meningkatkan berbagai indikator ekonomi, seperti PDRB perkapita, tingkat lapangan kerja, dan pertumbuhan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

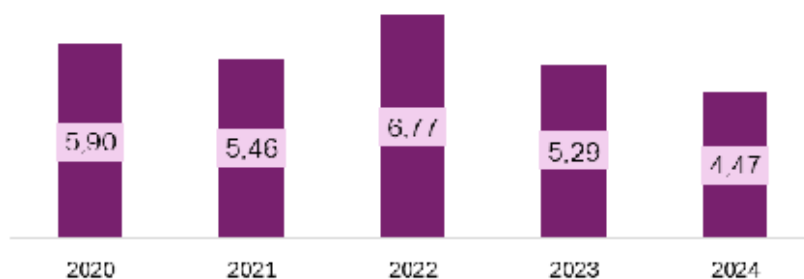
Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya merupakan isu sosial, tetapi juga merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor pangan dan pembangunan ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

B. PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

Prevalensi ketidakcukupan pangan merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang pada kehidupan sehari-hari dari makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan, maka semakin tinggi pula persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, namun kurang dari kebutuhan energinya. Indikator ini dapat



menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga dalam mengakses di tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Indikator ini dapat mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi besar, sehingga PoU digunakan untuk mengukur target menghilangkan kelaparan secara menyeluruh. Berikut ini merupakan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2. 18 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Probolinggo
Sumber: Buku Saku Pou Badan Pangan Nasional

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Probolinggo dalam waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 atau sebesar 6,77 kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 5,29 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 4,47. Menurunnya angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Hal ini sebagai tanda bahwa masyarakat Kota Probolinggo telah memiliki kondisi yang lebih sehat dan sejahtera serta dapat mengakses makanan yang cukup dan bergizi sehingga kebutuhan pangan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Kriteria minimum yang diterapkan dalam menghitung prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan disesuaikan dengan kebutuhan kalori suatu individu berdasarkan jenis kelamin, usia, tinggi dan berat badan, serta tingkat aktivitas tertentu. Dilihat dari persentasenya terdapat lima kategori PoU, jika dibawah 2,5 persen maka dikategorikan sangat rendah, 2,5 sampai 4 persen dikategorikan rendah, 5 sampai 19 persen dikategorikan sedang, 20 sampai 34 persen dikategorikan tinggi, dan jika diatas 35 persen maka dikategorikan sangat tinggi. Semakin tinggi PoU maka akan semakin banyak individu atau masyarakat yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 4,47 dan termasuk dalam kategori rendah.

2.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Jenis bencana yang teridentifikasi dalam di Kota Probolinggo meliputi: kawasan rawan banjir, kawasan rawan banjir lahar, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran.

A. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan genangan air (banjir) di Kota Probolinggo hampir tersebar di seluruh kecamatan dan diperburuk oleh keadaan saluran drainase yang rusak dan terjadinya

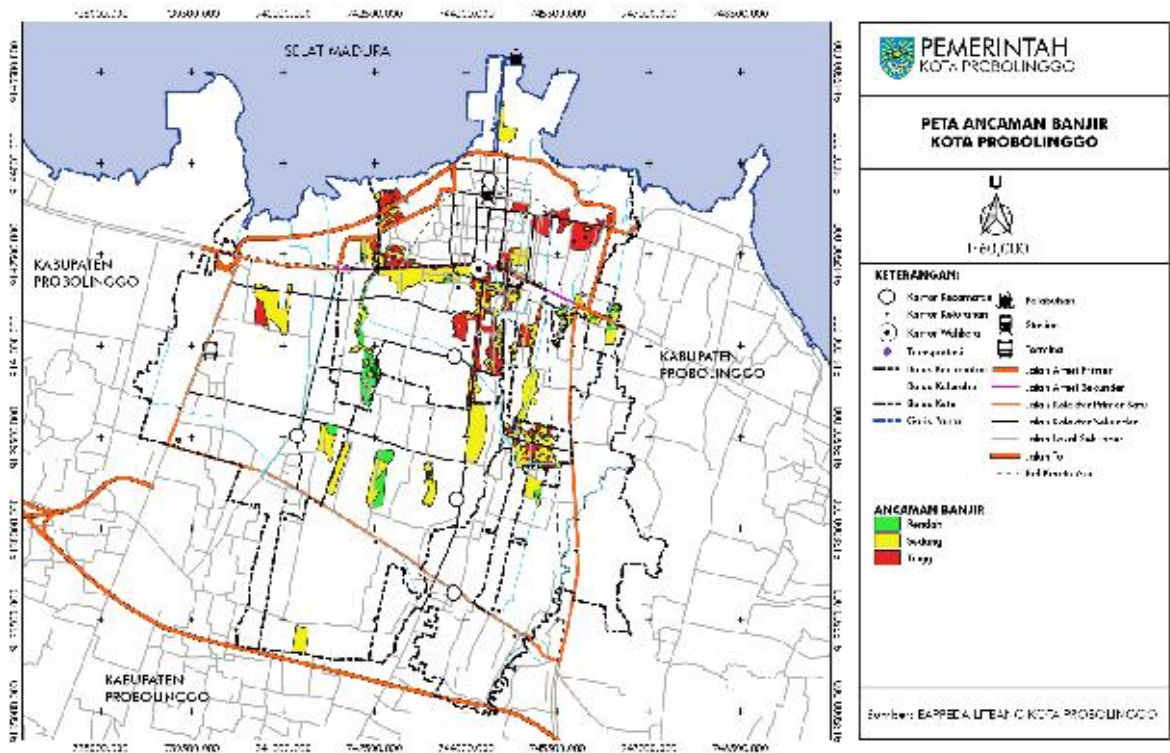


banjir lahar dingin Gunung Bromo. Ancaman banjir cenderung pada level sedang hingga tinggi dengan persentase ancaman kawasan banjir terbesar ada di Kecamatan Kanigaran (36,59%).

Tabel 2. 10 Luasan Kawasan Banjir Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Ancaman Banjir			Persentase (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kademangan	4,52	43,95	9,48	10,71%
Kanigaran	24,38	114,83	58,69	36,59%
Kedopok	15,19	94,65	16,37	23,33%
Mayangan	7,48	64,81	76,38	27,49%
Wonoasih	1,17	9,03	0	1,88%
Persentase (%)	9,75%	60,50%	29,75%	

Sumber : Bappeda Litbang, 2025



Gambar 2. 19 Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Probolinggo



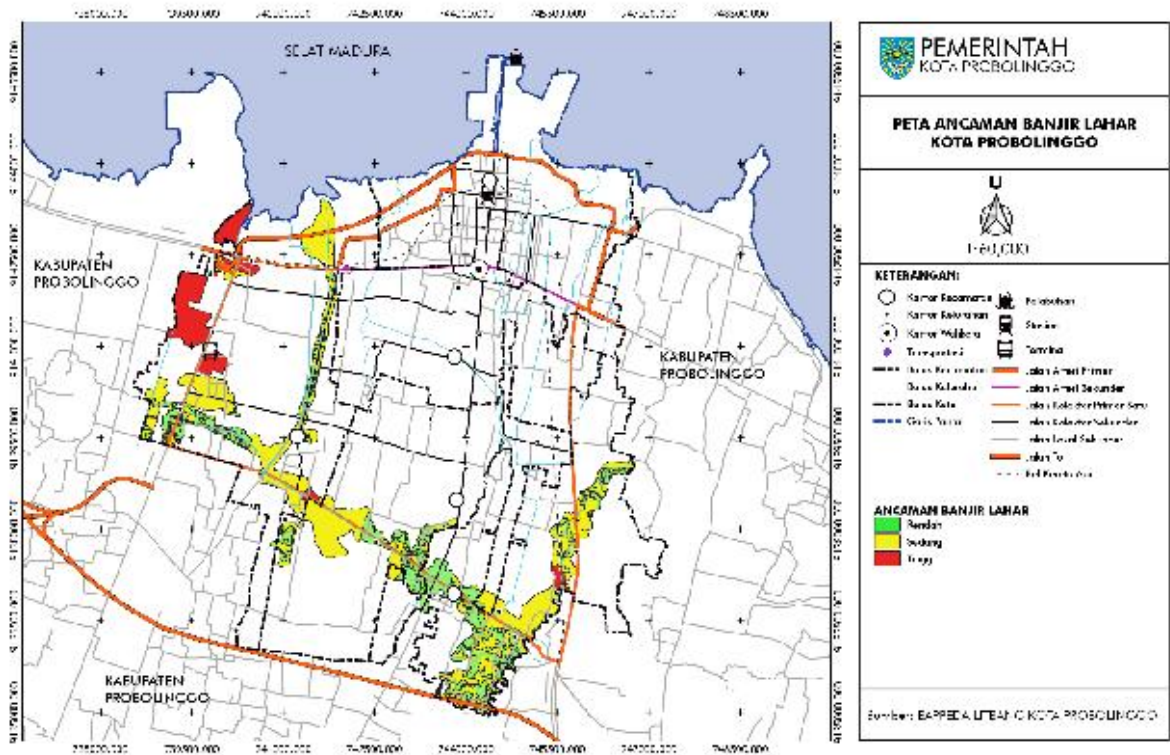
B. Kawasan Rawan Banjir Lahar

Selain kawasan rawan banjir sebagaimana disebutkan di atas, di Kota Probolinggo juga terdapat kawasan rawan banjir lahar akibat erupsi Gunung Bromo. Kawasan rawan banjir lahar terutama berada pada kawasan disekitar sungai yang ada di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kademangan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo. Kecamatan dengan dampak banjir lahar terbesar adalah Kecamatan Kademangan yang dilintasi oleh aliran sungai dari wilayah selatan (Gunung Bromo). Untuk lebih jelasnya luas kawasan rawan bencana banjir lahar di Kota Probolinggo sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 11 Luasan Kawasan Banjir Lahar Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Banjir Lahar			Luas	Persentase (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Kademangan	51,27	204,98	103,81	360,06	43,87%
Kedopok	51,56	100,78	0,15	152,49	18,58%
Wonoasih	119,13	182,18	6,95	308,26	37,56%
Total	221,96	487,94	110,91	820,81	
Persentase (%)	27,04%	59,45%	13,51%		

Sumber : Bappeda Litbang, 2025



Gambar 2. 20 Peta Kawasan Rawan Banjir Lahar Kota Probolinggo

C. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

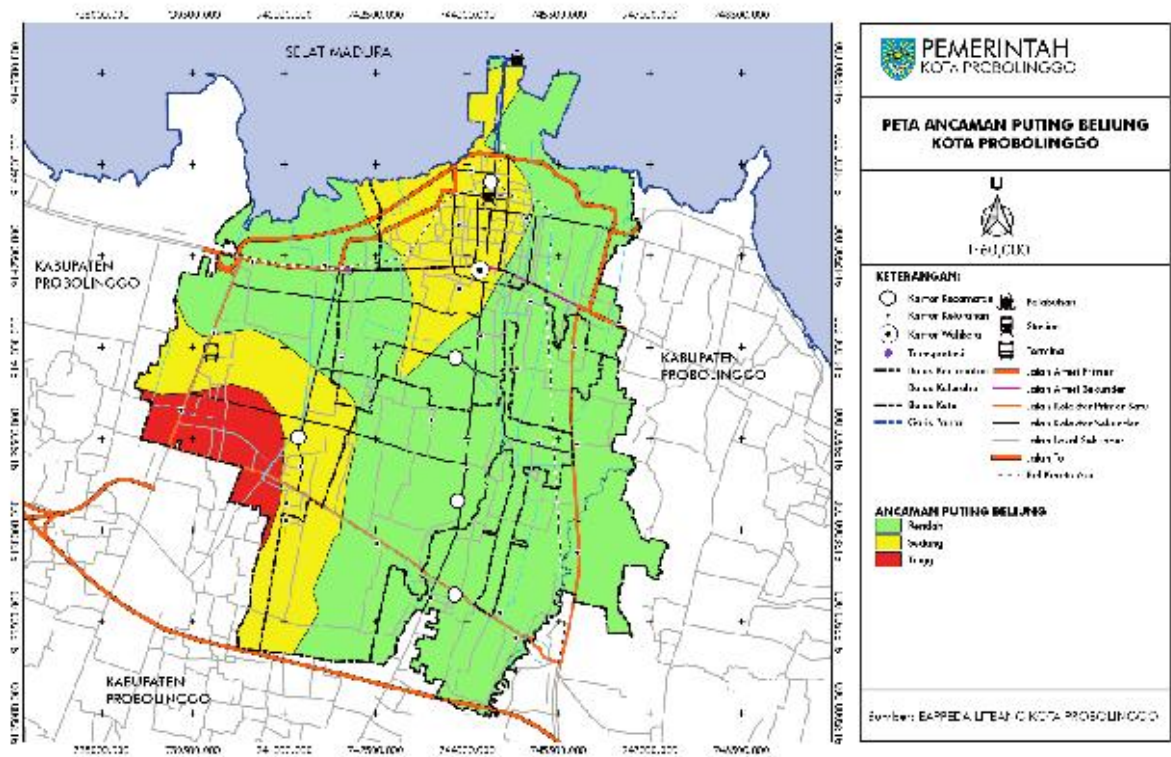
Kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kota Probolinggo sering disebut juga angin gending. Angin puting beliung umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Angin ini melanda seluruh Kota Probolinggo. Tingginya kecepatan angin puting beliung dapat menimbulkan robohnya bangunan, baliho, tiang listrik dan pohon.



Tabel 2. 12 Luasan Kawasan Rawan Angin Puting Beliung Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Kawasan rawan Bencana Angin Puting Beliung			Persentase (%)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kademangan	581,91	523,17	295,93	25,45%
Kanigaran	660,12	205,09	0	15,72%
Kedopok	958,87	221,72	0	21,45%
Mayangan	563,97	414,14	0	17,77%
Wonoasih	1.079,24	0	0	19,61%
Persentase (%)	69,84%	24,78%	5,38%	

Sumber : Bappeda Litbang, 2025



Gambar 2. 21 Peta Kawasan Rawan Puting Beliung Kota Probolinggo

D. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut yang berpotensi terjadi di Kota Probolinggo ada 2 (dua) macam yaitu :

Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kota Probolinggo meliputi beberapa bagian dari wilayah kecamatan yang berlokasi di sekitar Pantai Utara yaitu, Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan. Pengendalian pemanfaatan ruang antara lain, dengan pembatasan kegiatan budidaya ikan tambak dan penanaman mangrove di sekitar kawasan pantai. Selain itu pembangunan fisik di sepanjang Pantai Utara Kota Probolinggo harus memperhatikan ketentuan sempadan pantai.



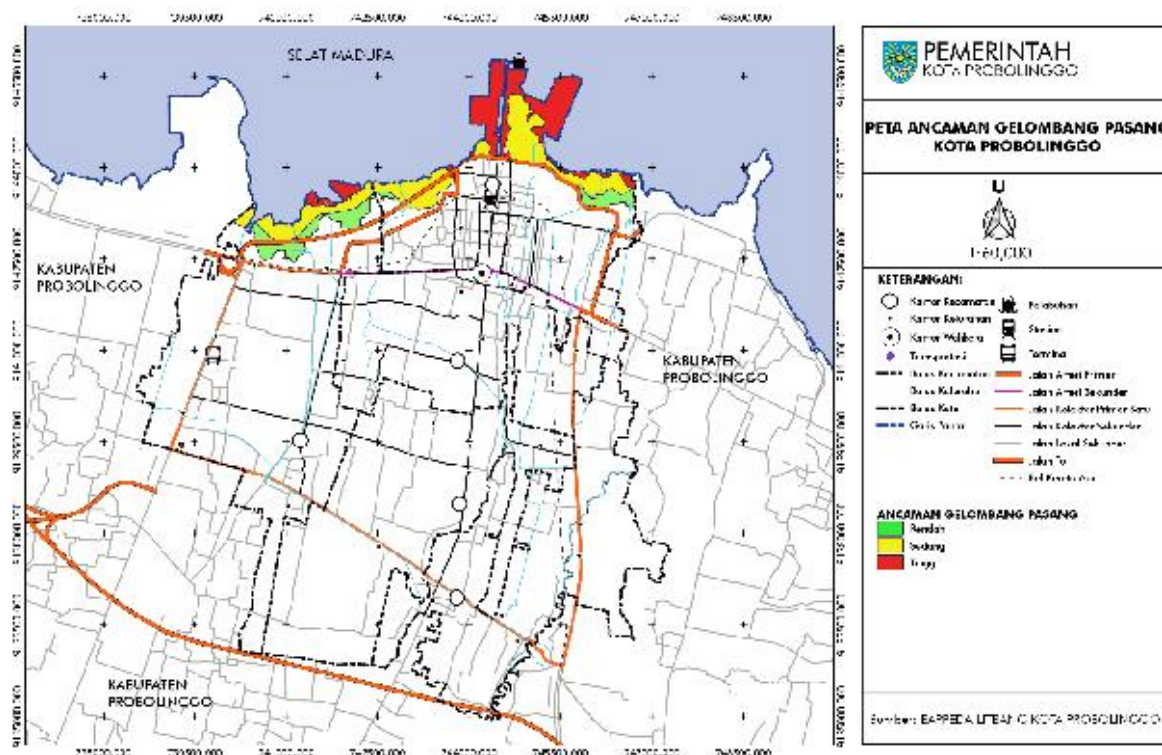
Tabel 2. 13 Luasan Kawasan Rawan Gelombang Pasang Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang			Luas (ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kademangan	50,79	50,04	20,31	121,13
Mayangan	24,30	137,35	131,81	293,45
Jumlah	75,09	187,38	152,11	414,58

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi (ROB).

Gelombang ekstrim pada umumnya ditimbulkan oleh siklon tropis. Hampir sama dengan bencana tsunami dan daerah yang berpotensi adalah wilayah pantai utara namun gelombang ekstrim skalanya lebih kecil dan salah satu penyebab abrasi terjadi lebih cepat.



Gambar 2. 22 Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kota Probolinggo

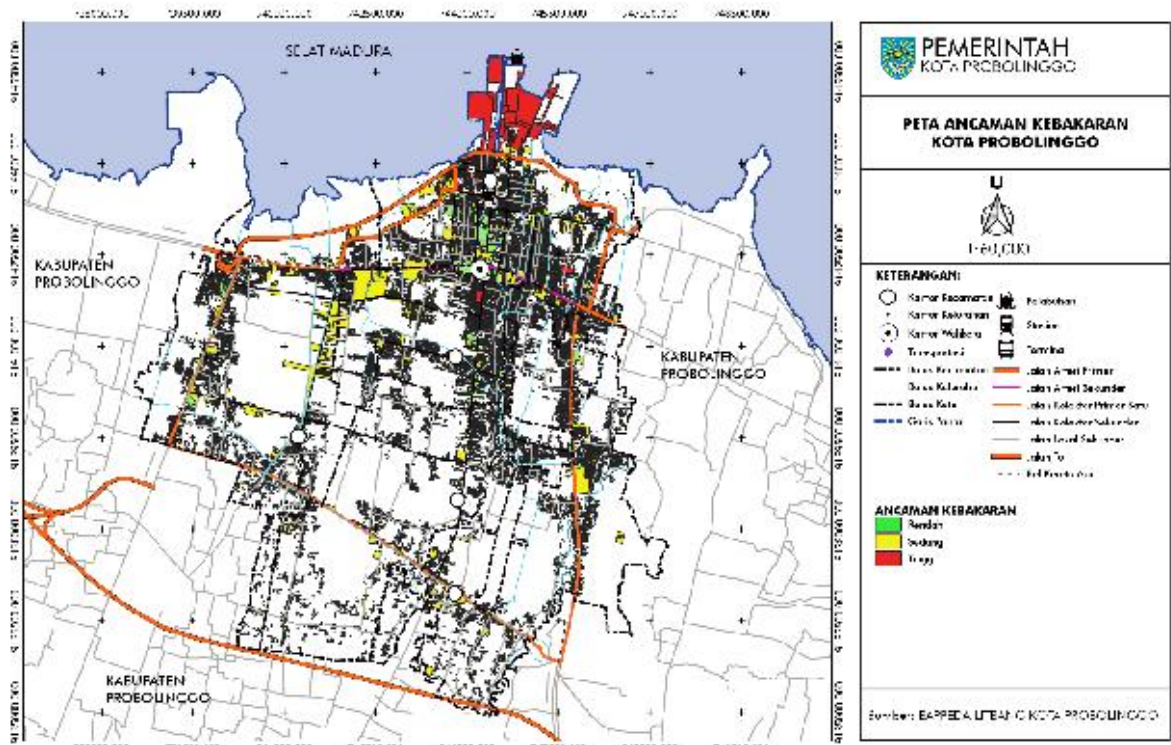
E. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Probolinggo meliputi beberapa bagian dari wilayah kecamatan Mayangan (Kawasan Pelabuhan) dan Kecamatan Kanigaran yang merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan yang tinggi. Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat sering terjadi.

Tabel 2. 14 Luasan Kawasan Kebakaran Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Rawan Bencana Kebakaran			Luas (ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kademangan	21,46	170,07	44,24	235,77
Kanigaran	0,00	174,52	29,99	204,51
Kedopok	2,86	107,64	0,00	110,50
Mayangan	33,07	176,89	149,34	359,30
Wonoasih	6,36	115,88	0,00	122,24
Jumlah	63,76	744,99	223,58	1.032,33

Sumber : Bappeda Litbang, 2025



Gambar 2. 23 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, BPBD Kota Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Hal ini berarti, bahwa paradigma manajemen BPBD Kota Probolinggo yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana yaitu dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance.

2.1.1.11. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2024 berdasarkan BPS (Kota Probolinggo Dalam Angka) adalah sejumlah 243.746 orang yang terdiri atas 121.121 orang penduduk laki-laki dan 122.625 orang penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk



pada Tahun 2024 sebesar 0,25%. Gambaran penduduk berdasarkan usia dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 15 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (dalam ribu jiwa)

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	8.971	8.667	17.638
2	5-9	9.925	9.535	19.460
3	10-14	10.385	9.929	20.314
4	15-19	10.167	9.591	19.758
5	20-24	10.427	9.773	20.200
6	25-29	9.783	9.276	19.059
7	30-34	8.800	8.785	17.585
8	35-39	8.440	8.587	17.027
9	40-44	9.270	9.690	18.960
10	45-49	8.406	8.791	17.197
11	50-54	7.958	8.249	16.207
12	55-59	6.648	7.410	14.048
13	60-64	4.702	5.554	10.256
14	65-69	3.476	3.848	7.324
15	70-74	2.190	2.401	4.591
16	75+	1.573	2.539	4.112
	Total	121.121	122.625	243.746

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2025, BPS

Tabel 2. 16 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kota Probolinggo Tahun 2024

No	Pendidikan Tertinggi	Angkatan_Bekerja	Jumlah
1	Sampai dengan Sekolah Dasar	Bekerja	32.184
2	Sampai dengan Sekolah Dasar	Pengangguran	0
3	Sekolah Menengah Pertama	Bekerja	17.905
4	Sekolah Menengah Pertama	Pengangguran	511
5	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Bekerja	53.707
6	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Pengangguran	4.648
7	Perguruan Tinggi	Bekerja	20.058
8	Perguruan Tinggi	Pengangguran	589

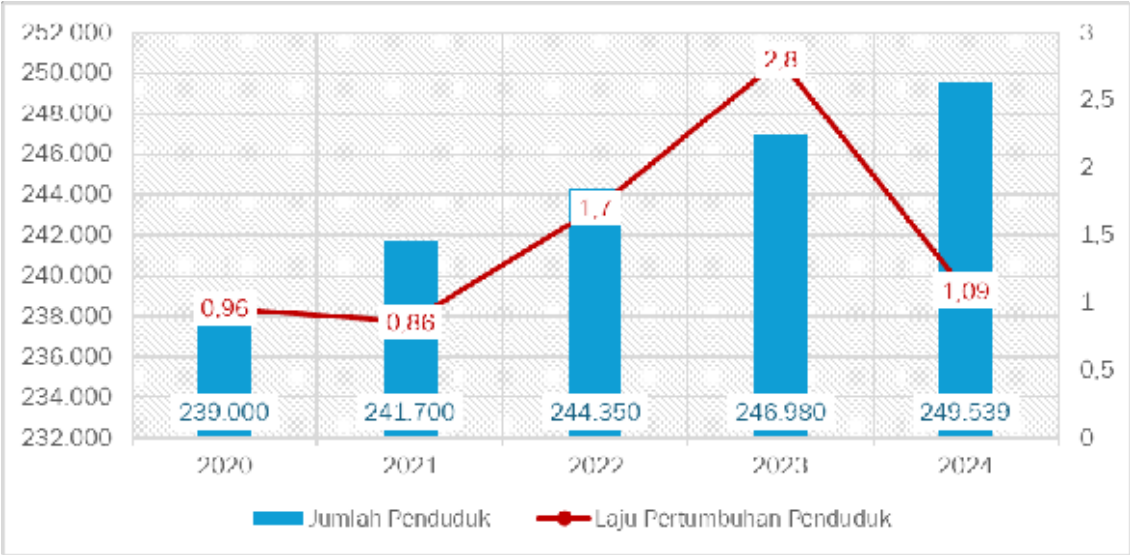
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2025, BPS

Dari data diatas dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia produktif dengan kategori umur 15-60 tahun yang merupakan subyek / pelaku pembangunan utama, merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk dapat mengarahkan program-program pembangunan daerah guna memberdayakan masyarakat serta upaya-upaya peningkatan kualitas SDM yang masuk dalam kelompok usia ini mengingat bonus demografi ini menjadi modal untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Penduduk 15 tahun ke atas menurut



pendidikan terakhir yang ditamatkan Tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase terbesar tingkat pendidikan masyarakat Kota Probolinggo adalah lulusan Sekolah Menengah Atas.

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo cenderung linier dengan angka pertumbuhan di kisaran 0,86% - 2,8% setiap tahunnya. Angka kelahiran dalam lima tahun terakhir berada di kisaran 3.000 kelahiran per tahun dengan angka kematian yang lebih rendah (berada di kisaran 1.000 s/d 2.000 kematian tiap tahunnya). Adapun angka jumlah penduduk yang datang dan pindah relatif sama dan bersifat fluktuatif, secara rinci laju pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Tabel 2. 17 Angka Kelahiran Berdasarkan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kademangan	427	385	812
2	Kanigaran	525	523	1048
3	Kedopok	357	352	709
4	Mayangan	513	534	1.047
5	Wonoasih	366	289	655
	Total	2188	2083	4271

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel 2. 18 Angka Kematian Berdasarkan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024

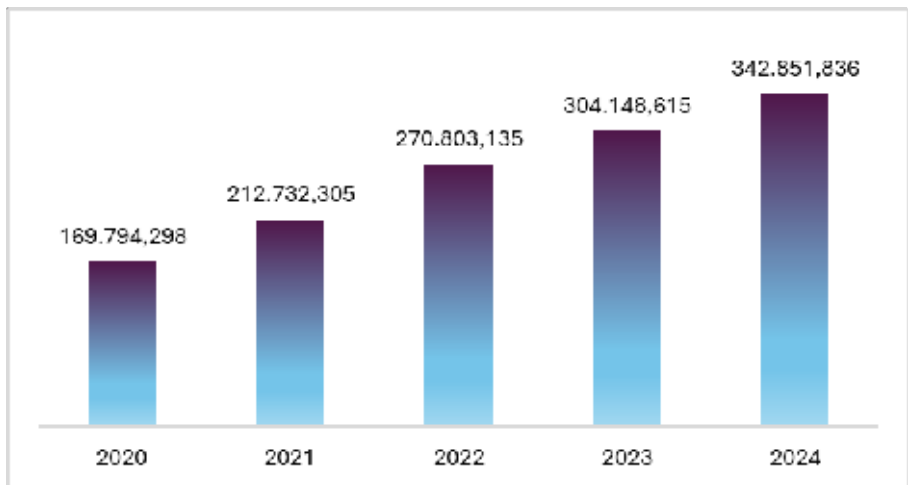
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kademangan	289	254	543
2	Kanigaran	426	408	834
3	Kedopok	234	221	455
4	Mayangan	451	402	853
5	Wonoasih	212	235	447
	Total	1612	1520	3132

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025



2.1.1.12. Aspek Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam rangka mendukung upaya nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan memenuhi komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, Pemerintah Kota Probolinggo menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.



Gambar 2. 25 Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Probolinggo

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, total penurunan kumulatif emisi tercatat sebesar 169.794,298 ton CO₂ eq, dan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2021 mencapai 212.732,298 ton CO₂ eq, kemudian naik menjadi 270.803,135 ton CO₂ eq pada 2022. Pada tahun 2023, capaian penurunan emisi mencapai 304.148,615 ton CO₂ eq, dan meningkat lagi menjadi 342.851,836 ton CO₂ eq pada tahun 2024. Tren peningkatan capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengendalian emisi kendaraan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Meski capaian penurunan emisi terus tumbuh, tantangan seperti pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan konsumsi energi, dan alih fungsi lahan tetap perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan pengurangan emisi di masa mendatang.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tinjauan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dalam kurun 5 tahun terakhir (2020-2024).



Tabel 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Pertumbuhan ekonomi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03
Provinsi Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Kota Probolinggo	-3.64	4.06	6.12	6.04	5.15

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan tersebut adalah: pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, kontribusi 3 sektor (pertanian, industri pengolahan dan perdagangan) terhadap PDRB serta skor pola pangan harapan.

Tabel 2. 20 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB	%	-3,64	4,06	6,12	6,04	5,15
2	Laju inflasi	%	1,88	1,76	5,45	2,86	1,9
3	PDRB per kapita	Juta Rupiah	46,21	48,51	53,17	57,88	61,61
4	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	6,17	5,72	5,98	6,00	5.59
5	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	14,46	14,67	14,59	14,65	14,63
6	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	25,71	26,35	26,48	26,22	26,20
7	Nilai PDRB						
	PDRB ADHB	Juta Rp	11.074.503,3	11.699.903,0	12.931.380,9	14.296.470,00	15.374.982,45
	PDRB ADHK	Juta Rp	8.035.267,3	8.361.142,1	8.872.843,00	9.408.510,00	9.893.268,43
8	PDRB perkapita						
	ADHB	Ribu Rp	46.301,58	48.506,66	53.171,80	57.885,13	61.613,54
	ADHK 2010	Ribu Rp	33.594,78	34.664,48	36.483,73	38.094,21	39.646,18
9	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indeks	84,2	78,2	85,1	81,2	81,4

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah terkait, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor pendukung PDRB Per Kapita terbesar secara berurutan berasal dari kontribusi Perdagangan terhadap PDRB, disusul dengan kontribusi Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB dan Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB. Walaupun kontribusi sektor Pertanian,



Kehutanan dan Perikanan bukan merupakan sektor dominan dalam PDRB per Kapita, akan tetapi sektor ini juga berperan sebagai penunjang kesejahteraan Masyarakat.

Selain itu salah satu Prioritas Intervensi Pemerintah Daerah di fokuskan pada peningkatan sektor pertanian, kelestarian sumber daya alam, dan penyediaan pangan yang berkelanjutan, melalui :

1. Peningkatan kesejahteraan petani untuk mendukung perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas SDM pertanian, peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, pemanfaatan teknologi, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, peningkatan kelembagaan petani serta penerapan praktik berkelanjutan.
2. Evaluasi ketersediaan pangan melalui prognosa neraca bahan makanan, infografis kebutuhan pangan, koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan serta menjaga stabilitas harga pangan.

Kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2025) sebagai berikut:

- a. Secara umum pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo tahun 2024 masih tumbuh positif meskipun tidak sebesar tahun 2023. Menurut data BPS Kota Probolinggo Tahun 2024 secara umum terjadi laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Meskipun begitu ternyata ada beberapa kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tertinggi selama 2024 dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,66%, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 8,27%, selanjutnya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,64%. Adapun yang mengalami penurunan paling besar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontraksi sebesar 3,87%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan iklim dengan terjadinya fenomena El Nino selama tahun 2024 sehingga mempengaruhi besarnya produksi pertanian.
- b. Laju inflasi menunjukkan tren positif penurunan dari 2,86% pada tahun 2023 menjadi 1,9% pada tahun 2024. Inflasi bulanan tertinggi Kota Probolinggo terjadi pada bulan Maret 2024 sebesar 0,77 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan Juni 2024 sebesar -0,24 persen atau deflasi 0,24 persen. Inflasi month to month (mtm) pada bulan Maret 2024 dipicu kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Deflasi month o month (mtm) bulan Juni 2024 dipicu penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
- c. Realisasi skor PPH Konsumsi Tahun 2024 adalah 81,4 belum mencapai target RPJMD yaitu 85, sehingga capaiannya adalah 95,76 persen. Dari capaian tersebut konsumsi padi-padian, minyak dan lemak telah mencapai standar maksimal. Sedangkan konsumsi umbi - umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih di bawah skor maksimal. Diharapkan konsumsi umbi-umbian dapat ditingkatkan sebagai pengganti konsumsi padi-padian.



Umbi-umbian masih memberi sumbangan energi yang kecil. Hal ini menjadi tugas dari Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk lebih mensosialisasikan konsumsi umbi-umbian yang merupakan pangan lokal. Skor konsumsi pangan hewani masih di bawah skor maksimal sehingga diharapkan produksi pangan hewani dapat dipacu lebih banyak lagi dan harga ditekan lebih rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Diperlukan juga upaya diversifikasi pangan hewani dari sumber-sumber lain yang belum diupayakan secara maksimal seperti budidaya kelinci, bebek, burung puyuh dan lain - lain. Dengan garis pantai hampir 12 km, maka Kota Probolinggo adalah penghasil ikan. Dengan sosialisasi gemar makan ikan, diharapkan konsumsi ikan masyarakat dapat bertambah. Skor Konsumsi kacang-kacangan juga belum mencapai skor yang diharapkan, hanya memperoleh skor 7,8 dari skor maksimal yang diharapkan yaitu 10,0. Sehingga tetap diperlukan langkah-langkah agar konsumsi kacang-kacangan tetap stabil sepanjang tahun dengan penyediaan produksi yang mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menekan harga. Edukasi kepada masyarakat tetap harus terus dilakukan tentang manfaat kacang-kacangan sebagai salah satu sumber zat gizi yang diperlukan tubuh antara lain sebagai sumber asam lemak esensial dan sebagai sumber mikro mineral penting lainnya. Skor sayur dan buah juga masih di bawah skor maksimal. Peningkatan konsumsi sayur dan buah harus menjadi prioritas utama kegiatan di semua dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kesehatan P2KB, Sekolah Dasar dan Menengah karena sayur dan buah sumber mineral dan vitamin yang merupakan zat gizi mikro yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sejak usia balita, anak harus dibiasakan mengkonsumsi buah dan sayur agar tumbuh kembang dan kesehatan anak menjadi normal.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) diperoleh pengeluaran rata-rata perkapita sebulan suatu wilayah baik pengeluaran makanan maupun non makanan. Pengeluaran rata - rata per kapita per bulan di Kota Probolinggo di kelompok makanan sebanyak 39,69 persen dan pengeluaran terbesar kelompok makanan adalah kelompok makanan/minuman jadi sebesar 14,86 persen sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat cenderung tidak beragam bergizi seimbang dan aman.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kinerja aspek kesejahteraan sosial disajikan dalam beberapa indikator yang menggambarkan capaian aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya dalam pengentasan kemiskinan serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.



Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
Provinsi Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
Kota Probolinggo	74.81	75,2	76.08	76.93	77,79

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

Tabel 2. 22 Persentase penduduk miskin Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Persentase Penduduk Miskin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03
Provinsi Jawa Timur	11,46	10,59	10,49	10,35	9,79
Kota Probolinggo	7.43	7.44	6.65	6.48	6.18

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

Tabel 2. 23 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82
Provinsi Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	3,74
Kota Probolinggo	6.7	6.55	4.57	4.53	4.44

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

Tabel 2. 24 Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Indeks Gini	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,381	0,381
Provinsi Jawa Timur	0,364	0,364	0,365	0,387	0,373
Kota Probolinggo	0.311	0.299	0.322	0.347	0.344

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

Realisasi kinerja aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif. Hal tersebut ditandai dengan kinerja positif beberapa indikator seperti menurunnya persentase penduduk miskin, kenaikan angka IPM, peningkatan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka usia harapan hidup, kenaikan cakupan desa/kelurahan siaga aktif, penurunan tingkat pengangguran terbuka serta penurunan indeks gini.



Tabel 2. 25 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1	Persentase penduduk miskin	%	7,43	7,44	6,65	6,48	6,18
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.81	75,2	76.08	76.93	77,79
3	Angka melek huruf	%	94,45	95,15	98,86	96,64	97,04
4	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,7	8,95	9,29	9,56	9,72
5	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,59	13,6	13,67	13,73	13,98
6	Angka usia harapan hidup	tahun	70.29	70,35	70,68	70,99	74,31
7	Persentase balita gizi buruk	%	0.4	0,2	0.5	0,8	1,1
8	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,5	1,8	6.8	7,3	7,6
9	Cakupan Desa / Kelurahan Siaga Aktif	%	10	17	6,9	13,7	17,2
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69.07	69,71	68,39	70,61	67,55
11	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,70	6,55	4,57	4,53	4,44
12	Indeks Gini	Indeks	0,311	0,299	0,322	0,347	0,344

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah, Tahun 2025

Capaian indikator-indikator dalam fokus kesejahteraan sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Indikator dengan peningkatan capaian dibandingkan tahun 2023 yang meliputi:
 - 1. Persentase Penduduk Miskin

Nilai realisasi pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan target 2024, yakni 7,3 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan yang ditargetkan, sebesar 0,3 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 15,86 ribu jiwa dan pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 15,24 ribu jiwa. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 telah berkurang sebanyak 620 jiwa dibandingkan dengan Jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo pada tahun 2023. Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index merupakan ukuran rata - rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P1 pada tahun 2020 sebesar 1,19 kemudian



mengalami fluktuasi turun menjadi 0,90 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai P1 naik kembali menjadi 1,04 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan P1 menjadi 0,98.

Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai P2 pada tahun 2020 sebesar 0,28 mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai P2 kembali meningkat menjadi 0,23 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan P2 menjadi 0,24. Hingga pada tahun 2024 turun menjadi 0,21.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kota Probolinggo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Kota Probolinggo rata-rata meningkat sebesar 1,32 persen per tahun, dari 74,81 pada tahun 2020 menjadi 77,79 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh seluruh dimensi penyusunnya, terutama dimensi pengetahuan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,82 persen.

3. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf, terjadi peningkatan capaian yakni sebesar 96,64 pada tahun 2023 menjadi 97,04 pada tahun 2024, hal ini dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan

4. Angka rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS tahun 2024 sebesar 13,98 tahun, meningkat 0,25 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2. Sementara RLS tahun 2024 sebesar 9,72 tahun, meningkat 0,16 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

5. Angka usia harapan hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Probolinggo adalah 73,52 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,31 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024, memiliki harapan hidup selama 74,31 tahun



6. Cakupan Desa / Kelurahan Siaga Aktif

Cakupan desa/kelurahan siaga mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 17,2% pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat serta adanya dukungan penganggaran untuk pendampingan dan pembinaan.

7. Tingkat pengangguran terbuka

Tren tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, Pada tahun 2023 yakni 4,53 dan tahun 2024 menjadi 4,44 persen. Semakin besar persentase TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), maka semakin besar jumlah pengangguran yang ada. Nilai realisasi tahun 2024 (4,44 persen) sudah lebih rendah dari target yang ditentukan yakni 5,17 dengan nilai capaian 114,12%. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka sudah menurun dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan kesempatan kerja.

8. Indeks Gini

Indikator ketimpangan pendapatan (indeks gini) di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 nilainya yaitu 0,311. Pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan (indeks gini) di Kota Probolinggo mengalami penurunan menjadi 0,299, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga menjadi 0,322. Peningkatan indeks gini terus berlanjut di tahun 2023 sehingga menjadi 0,347 namun di tahun 2024 indeks gini Kota Probolinggo kembali menurun menjadi 0,344. Walaupun ketimpangan pendapatan (indeks gini) di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, namun ketimpangan yang terjadi di Kota Probolinggo masih termasuk dalam taraf/ kategori rendah atau memiliki pemerataan pendapatan yang relatif tinggi (merata), dimana menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa bila Indeks gini terletak antara 0,20-0,35 maka ketimpangan termasuk dalam taraf rendah atau pemerataan relatif tinggi (merata), bila Indeks gini terletak antara 0,36-0,49 menunjukkan ketimpangan taraf sedang, dan bila Indeks gini terletak antara 0,50-0,70 maka menandakan bahwa pemerataan sangat timpang atau ketimpangan berada pada taraf tinggi.

b. Indikator dengan penurunan capaian dibandingkan tahun 2023 yang meliputi:

1. Persentase balita gizi buruk dan Prevalensi balita gizi kurang

Persentase balita gizi buruk sebesar 1,1% pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 0,8%. Demikian pula prevalensi balita gizi kurang sebesar 7,6% pada tahun 2024 atau meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,3%. Permasalahan balita gizi buruk pada tahun 2024 dikarenakan tingginya kasus temuan dan balita gizi buruk setelah pandemi covid-19. Pada tahun 2021, saat pandemi covid-19, terjadi pengalihan posyandu ke puskesmas



sehingga mengakibatkan rendahnya kunjungan dan pemeriksaan bayi yang membuat temuan kasus gizi buruk rendah. Disamping itu juga disebabkan isu yang kompleks dan multidimensi, dengan berbagai faktor yang saling terkait antara lain : Kurangnya pengetahuan tentang gizi, pola makan tidak sesuai kebutuhan gizi, daya beli masyarakat rendah, bayi tidak mendapatkan asi eksklusif, sehingga daya tahan tubuh balita rendah dan mudah terkena penyakit infeksi dan masih ditemukan beberapa rumah tangga tidak mempunyai jamban sehingga mempengaruhi mudahnya terjadi penyakit infeksi

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pada tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja kembali mengalami penurunan tajam ke angka 67,55%, yang menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengevaluasi kondisi pasar kerja lokal, termasuk tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan serta hambatan yang dihadapi para pencari kerja.

2.1.2.3. Fokus Pemerintahan

Fokus pemerintahan merupakan aspek pendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dari sisi kebijakan publik dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang digambarkan dalam 3 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat, persentase PAD terhadap pendapatan dan opini BPK. Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM sebagai cerminan layanan publik mengalami peningkatan sebesar 0,59 poin menjadi 85,41 pada tahun 2023. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan 1,61% menjadi 21,66% pada tahun 2023. Raihan WTP pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan semakin transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tabel 2. 26 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Fokus Pemerintahan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,5	82,75	83	85,41	86,57
2	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	19,91	21,4	20,05	21,66	20,78
3	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD dan Sekretariat Daerah, Tahun 2025

2.1.2.4. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Seni dan budaya dapat didefinisikan sebagai segala hal yang diciptakan oleh manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama pada suatu kelompok yang mempunyai unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sebagai hal yang bersifat lokal dan diwariskan secara turun temurun, seni dan budaya yang berkembang di Kota Probolinggo memiliki keunikan dan telah ada sejak lama yang terus dipertahankan hingga saat ini. Keunikan seni dan budaya di Kota Probolinggo tidak lepas dari ciri khas Pendalungan yang merupakan asimilasi budaya Jawa dan Madura.



Kinerja urusan kebudayaan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menunjukkan tren positif, khususnya terkait jumlah penyelenggaraan even seni dan budaya yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 yang diindikasikan akibat adanya Pandemi Covid-19. Namun jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya tersebut kembali meningkat pada Tahun 2021 hingga 2024. Gelar Seni Budaya Kota Probolinggo tahun 2024 menyajikan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas Probolinggo, seperti seni Jaran Bodhag, musik Probolinggoan, tari, ludruk, reog, dan pameran seni rupa dalam rangka mengapresiasi dan mempromosikan seni budaya lokal serta meningkatkan kecintaan para pelajar terhadap warisan budaya. Beberapa event seni dan budaya yang diikuti maupun diselenggarakan oleh Kota Probolinggo pada Tahun 2024 adalah:

a. Seminggu di Probolinggo (SEMIPRO)

Semipro atau “Seminggu di Kota Probolinggo” merupakan agenda tahunan yang pada tahun 2024 diselenggarakan pada 28 Juni sampai dengan 6 Juli di Alun-Alun Kota Probolinggo. Pekan ini mencakup pariwisata, kesenian budaya lokal (Pendalungan) pelayanan publik, stand UMKM, dan pasar rakyat tempoe jaman biyen.

b. Gelar Seni Pawai Budaya

Kota Probolinggo mengadakan berbagai karnaval dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-665 (30 Agustus - 8 September 2024), termasuk Pawai Budaya yang bertema "Dengan Kolaborasi Seni Budaya dan Kreativitas Mewujudkan Kota Probolinggo Maju dan Sejahtera". Selain itu, ada juga Karnaval Asoka yang diinisiasi oleh Pemkot Probolinggo.

c. Cokro Fair

Cokro Fair merupakan salah satu event yang pernah digelar pada tahun 90-an dan dihidupkan kembali pada tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di sepanjang Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Kanigaran. Festival ini berisi penampilan seni budaya local serta booth UMKM yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian rakyat.

d. Apresiasi Seni Budaya

Digelar pada tanggal 1-3 November 2024, menampilkan berbagai kreatifitas seni dari putra-putri terbaik Kota Probolinggo.

e. Youth Culture Festival (FLS3N):

Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo selama lima hari, di Gedung Kesenian.

f. Probolinggo Night Culture Festival:

Acara ini melibatkan 20 peserta yang menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya malam hari.

g. Gelar Seni Budaya Lokal:

Digelar pada saat pergantian tahun baru, menyajikan pertunjukan seni budaya khas Kota Probolinggo.



Tabel 2. 27 Realisasi Kinerja Urusan Seni dan Kebudayaan Kota Probolinggo
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sarana seni dan budaya	unit	3	3	3	3	3
2.	Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya	kegiatan	16	19	19	23	40
3.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	unit	7	7	7	7	9
4	Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	7	7	2	2	2
5	Jumlah kelompok, sanggar, organisasi seni	kelompok/ sanggar /organisasi	218	222	244	244	256
6	Data Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah (pada tahun 2023 diganti menjadi indeks pembangunan kebudayaan)	%	N/A	73,73	92,60	53,34	54,76
7	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan kebudayaan regional dan nasional	jumlah	0	1	2	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2025

Kinerja urusan kepemudaan dan olah raga Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menunjukkan tren positif, khususnya terkait jumlah organisasi pemuda yang mengalami peningkatan pada tahun 2024. Jumlah kegiatan olah raga sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 yang diindikasikan akibat adanya Pandemi Covid-19. Namun jumlah tersebut kembali meningkat pada Tahun 2024.

Prestasi olah raga yang diraih Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah capaian 236 medali emas, 234 perak dan 237 perunggu sehingga apabila ditotal keseluruhan berjumlah 707 medali dari semua cabor yang diikuti.

Tabel 2. 28 Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Probolinggo
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Klub Olah Raga	klub	28	30	30	30	60
2.	Jumlah Gedung Olah Raga	unit	3	5	5	5	5
3.	Jumlah organisasi Pemuda	organisasi	13	13	28	20	18
4.	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	28	30	30	30	44
5.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	6	3	5	2	1
6.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	2	1	3	5	8
7.	Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)	unit	0	0	0	0	0
8.	Lapangan Olah Raga	unit	80	80	80	80	80
9.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	64,29	70	70	70	70



10.	Persentase wirausaha muda	%	0,12	0,18	7,03	7,02	7,02
11.	Cakupan pembinaan olahraga	%	75	83,33	83,33	88,89	88,89
12.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	75	83,33	83,33	88,89%	88,89
13.	Jumlah atlet berprestasi	atlet	16	116	112	114	1088
14.	Jumlah prestasi olahraga	Medali	16	321	691	763	707

Sumber : Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Tahun 2025

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek ini dinilai berdasarkan urusan pemerintahan yang diampu oleh Pemerintah Kabupaten Kota berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar, Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Fokus Layanan Urusan Pilihan serta Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan. Adapun secara terperinci capaian kinerja aspek pelayanan umum Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



TABEL 2. 29 Realisasi Kinerja Aspek Pelayanan Umum Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
1.1	PENDIDIKAN							
1.1.1	PAUD							
1.1.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	85,75	74,06	82,85	84,35	84,35	Disdikbud
1.1.2	Pendidikan Dasar							
1.1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,27	102,17	89,05	88,77	89,83	Disdikbud
1.1.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,47	96,87	84,45	85,67	85,79	Disdikbud
1.1.2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	97,59	99,46	99,88	99,67	Disdikbud
1.1.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	115,68	115,48	106,16	108,36	107,77	Disdikbud
1.1.2.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	87,60	88,22	87,62	96,59	95,74	Disdikbud
1.1.2.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	94,73	87,6	96,93	99,28	99,12	Disdikbud
1.1.2.7	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	rasio	0,0043	0,0044	0,0046	0,00467	0,00459	Disdikbud
1.1.2.8	Rasio Guru/Murid	rasio	1:17	1:16	1 : 20	1 : 20	1:27	Disdikbud
1.1.3	Pendidikan Menengah							
1.1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	97,89	96,99	104,50	N/A	N/A	BPS



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	SMA/SMK/MA/Paket C							
1.1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	72.61	72.73	72.87	69,18	N/A	BPS
1.1.3.3	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdikbud
1.1.3.4	Rasio Guru/Murid	rasio	1:13	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdikbud
1.1.4	Fasilitas Pendidikan							
1.1.4.1	Gedung SD/MI dalam kondisi baik	unit	112	112	114	114	115	Disdikbud
1.1.4.2	Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	unit	46	47	49	49	49	Disdikbud
1.1.5	Angka Putus Sekolah :							
1.1.5.1	APS SD/MI	%	0,02	0	0,02	0,05	0,04	Disdikbud
1.1.5.2	APS SMP/MTs	%	0,02	N/A	0,06	0,31	0	Disdikbud
1.1.5.3	APS SMA/SMK/MA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdikbud
1.1.6	Angka Kelulusan :							
1.1.6.1	AL SD/MI	%	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.1.6.2	AL SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.1.6.3	AL SMA/SMK/MA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdikbud
1.1.7	Angka Melanjutkan							
1.1.7.1	AM SD/MI ke SMP/MTs	%	116,27	113,26	104,11	100	100	Disdikbud
1.1.7.2	AM SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	%	124,38	118,86	112,86	100	100	Disdikbud
1.8	Tenaga Pendidik :							
1.8.1	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar	rasio	15	16	19,5	15,43	26	Disdikbud
1.8.2	Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah	rasio	15	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdikbud
1.8.3	Persentase guru TK,	%	51,40	51,93	46,02	46,50	56,58	Disdikbud



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik							
1.2	KESEHATAN							
1.2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	70,29	70,35	70,68	70,99	74,31	BPS
1.2.2	Jumlah kematian Bayi	bayi	31	39	36	45	46	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.3	Angka kematian bayi (AKB)	jumlah absolut / 1.000 KH	8,6/1.000 KH	11.03/1000	10.9/1000	14,05/1000	15,04/1000	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.4	Jumlah kematian ibu	orang	5	17	8	4	8	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.5	Angka kematian ibu (AKI)	jumlah absolut / 10.000 KH	138/100.000 KH	481.04/100.000 KH	236/100.000 KH	124,92/100.000	250,70/100.000	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.6	Gizi Buruk	%	0,4	0,2	0,5	0,8	1,1	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.7	Stunting	%	10,62	13,35	12,13	12,8	9,88	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.8	Angka kesakitan penderita hipertensi	Kasus	9.854	13.898	16.390	31.158	19.424	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.9	Angka kesakitan penderita diabetes melitus	Kasus	6.079	6.669	4.530	9.042	9.482	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.10	Angka kesakitan orang dengan gangguan jiwa berat	Kasus	308	435	220	546	546	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.11	Angka kesakitan orang dengan TB	Kasus	731	713	544	554	393	Dinas Kesehatan dan PPKB



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.12	Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Kasus	6.423	4.408	95	187	230	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.13	Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi Kusta	Kasus	7	13	14	11	14	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	79,16	82,63	80,99	90,23	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.15	Capaian kinerja SPM RS	%	70,24	71	85	78	83,38	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.16	Presentase desa/ kelurahan ODF	%	14 (48,28%)	21 (72,41%)	24 (82,75%)	24 (82,75%)	29 (100%)	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.17	Cakupan Akses Sanitasi	%	96,05	96,58	98,52	99,15	100	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.18	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1:747	1:496	1:702	1:970	1:929	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.19	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,85	95,1	91,04	86	79	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.2.20	Rasio unit pelayanan kesehatan per satuan penduduk	Rasio	n/a	n/a	1:2044	1:6289	1:6232	Dinas Kesehatan dan PPKB
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	%	89,31	63,83	63,4	74,61	97,52	DPUPR & Perkim
1.3.2	Persentase Jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi (%)	%	98,5	98.70	98,8	98,9	99	DPUPR & Perkim



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3	Panjang jalan dilalui roda 4 (km)	km	199,109	199,109	199,109	199,109	218,13	DPUPR & Perkim
1.3.4	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	km	177,824	127,091	126,24	148,555	212,72	DPUPR & Perkim
1.3.5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (min 1,5 m)	km	110,781	110,781	110,781	110,781	110,781	DPUPR & Perkim
1.3.6	Drainase dalam kondisi baik / aliran air tidak tersumbat (km)	km	112,02	111,32	112,32	112,32	95,472	DPUPR & Perkim
1.3.7	Pembangunan turap di Jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	%	63,1	63,10	63,1	63,12	66,2	DPUPR & Perkim
1.3.8	Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)	Ha	1.438	1.438	1.459	1.459	1.432	DPUPR & Perkim
1.3.9	Cakupan Rumah Tangga dengan akses Air Bersih yang Layak (%)	%	99,86	99,89	100	100	100	DPUPR & Perkim
1.3.10	Cakupan Rumah tangga bersanitasi (%)	%	93,89	95,95	97,2	98,82	100	DPUPR & Perkim
1.3.11	Rasio ruang terbuka hijau kota per satuan luas wilayah (%)	%	10,34	5,66	5,49	5,665	5,665	DLH
1.3.12	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	20	21	23	25	31	DPUPR & Perkim
1.3.13	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja	Rumah	N/A	2.309	3.176	3.354	4.223	DPUPR & Perkim



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.4.1	Persentase Penurunan Luas Permukiman Kumuh	%	53,14	36,73	26,58	23,34	21,85	DPUPR & Perkim
1.4.2	Jumlah rumah tidak layak huni	Rumah	634	634	472	465	354	DPUPR & Perkim
1.4.3	Rumah Tangga dg akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	99,15	99,27	99,35	99,43	99,5	DPUPR & Perkim
1.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.5.1	Persentase Penurunan Kriminalitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Satpol PP
1.5.2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	orang	53	21	21	21	21	Satpol PP
1.5.3	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	21	23	23	23	23	Satpol PP
1.5.4	Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kota	orang	1.268	464	464	464	464	Satpol PP
1.5.5	Indeks Resiko Bencana	Indeks	114,16	108,3	101,02	107,22	105,01	BPBD
1.5.6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	km ²	56,67 km2	56,67 km2	56,67 km2	56,67 km2	56,67	Satpol PP
1.5.7	Wilayah Tangguh Bencana	kelurahan	15	17	20	23	25	BPBD
1.5.8	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,59	0,55	0,38	0,41	0,42	BPBD
1.6	SOSIAL							
1.6.1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	orang	85.089	116.032	118.597	112.880	105.943	Dinsos, PP & PA



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	71.819	100.046	71.824	30.678	32.058	Dinsos, PP & PA
1.6.3	Persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri	%	40%	40%	40%	40%	14,34%	Dinsos, PP & PA
1.6.4	Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	orang	2.081	2.101	1185	1185	802	Dinsos, PP & PA
1.6.5	Jumlah Pantu Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	unit	18	19	14	14	12	Dinsos, PP & PA
2	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
2.1	TENAGA KERJA							
2.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,07	69,71	68,39	70,61	67,55	Disperinaker
2.1.2	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,70	6,55	4,57	4,53	4,44	Disperinaker
2.1.3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	547	1.080	1.309	1.312	1.315	Disperinaker
2.1.4	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	205	905	1.178	1.227	1.174	Disperinaker
2.1.5	Angka Sengketa Perusahaan	Pekerja	9	12	13	9	9	Disperinaker
2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.2.1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	orang	1.702	1.680	1.703	2020	2047	Dinsos, PP & PA



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PENGEMBANGAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	14,86	45,3	51	55,5	55,5	Dinsos, PP & PA
2.2.3	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	orang	9.500	11.040	9.941	94.41	13.096	Dinsos, PP & PA
2.2.4	Jumlah laporan kekerasan anak	Kasus	23	27	20	29	26	Dinsos, PP & PA
2.2.5	Jumlah laporan kekerasan perempuan	kasus	22	20	23	26	26	Dinsos, PP & PA
2.2.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65.92	65,05	65,81	65,81*	76,80	Dinsos, PP & PA
2.2.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.87	96,01	96,24	96,24*	97,26	Dinsos, PP & PA
2.2.8	Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Dinsos, PP & PA
2.3	PANGAN							
2.3.1	Ketersediaan Pangan	Ton	6.336,00	7.369,00	11.891,26	26.328,59	24,167	DKPPP
2.3.2	Konsumsi Pangan	(Kg/Kap/Th)	88,5	85,4	105,9	87,89	89,02	DKPPP
2.4	PERTANAHAN							
2.4.1	Jumlah Tanah yang Bersertifikat	unit	3.454	3.686	4.186	4.763	4763	DPUPR & Perkim
2.4.2	Penyelesaian ijin lokasi	ijin	0	0	0	0	0	DPUPR & Perkim
2.4.3	Penyelesaian kasus pertanahan	kasus	2	1	1	0	1	DPUPR & Perkim
2.5	LINGKUNGAN HIDUP							
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	64,4	70,2	60,85	61,69	58,17	DLH



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.5.2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	%	70	100	93,24	100	93,33	DLH
2.5.3	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	%	0	100	N/A	N/A	0	DLH
2.5.4	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan, Tanah karena Produksi Biomassa	%	0	0	N/A	100	100	DLH
2.5.5	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat terhadap Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	DLH
2.5.6	Volume Sampah yang Masuk TPA	Kg/Tahun	24.804.100	25.655.830	24.686.880	22.710.970	24.098.760	DLH
2.5.7	Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	50,68	20,54	10,98	10,20	10,29	DLH
2.5.8	Ketersediaan Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan	%	40,47	66,56	62,50	67,47	72,51	DLH
2.5.9	Jumlah TPS per Satuan Penduduk	unit	1: 2.294	1 : 2.264	1 : 2407	1 : 5317	1:5284	DLH
2.5.10	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	kali	6	24	8	0	2	DLH
2.5.11	Luas Tempat Pemakaman umum per satuan Penduduk	Ha	0,23	0,23	0,21	0,21	0,23	DLH
2.5.12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	1,37	1,37	1,37	1,89	342.851,836 (dalam ton CO2 Eq)	DLH



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.5.13	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	50	46,67	46,67	47,06	46,67	DLH
2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.6.1	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	%	91.12	96.84	97	97	99,07	Dispendukpil
2.6.2	Jumlah Layanan Akta Kelahiran	orang	4.744,00	5.573,00	5.215	4.306	243.746	Dispendukpil
2.6.3	Jumlah Kepemilikan KTP	orang	160.553	171.458	172.955	173,326	176.747	Dispendukpil
2.6.4	Jumlah Kepemilikan KK	keluarga	78.568	80.325	81.299	82.827	82.635	Dispendukpil
2.6.5	Jumlah Kepemilikan KIA	Orang	52.444	46.804	46.092	46.485	49.007	Dispendukpil
2.6.6	Prosentase Kepemilikan KIA	%	80.75	71.6	70,2	73,82	75,83	Dispendukpil
2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.7.1	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	kelompok	144	141	113	112	77	Kecamatan
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.8.1	Jumlah akseptor KB	orang	35.101	35.329	24.414	27.915	27.513	Dinas Kesehatan dan PPKB



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.8.2	Jumlah pasangan usia subur PUS	orang	45.465	45.607	35.011	37.807	37.551	Dinas Kesehatan dan PPKB
2.8.3	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	77,02	77,46	69,73	73,8	73,26	Dinas Kesehatan dan PPKB
2.8.4	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	%	24,27	23,7	18,7	21,2	17,6	Dinas Kesehatan dan PPKB
2.8.5	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) (%)	%	11,32	11,11	11,6	9,17	6,13	Dinas Kesehatan dan PPKB
2.8.6	<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i> (%)	%	77,3	59,8	69,79	73,53	69	Dinas Kesehatan dan PPKB
2.8.7	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	%	2,23	2,05	2,05	2,03	2,02	Dinas Kesehatan dan PPKB
2.9	PERHUBUNGAN							
2.9.1	Panjang Jalan Kota	km	199.11	199.11	199.11	199,11	177,113	DPUPR
2.9.2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	orang	430,093	505,638	1,247,954	1.581.895	1.428.439	Dishub
2.9.3	Data Organda	organisasi	1	1	1	1	1	Dishub
2.9.4	Jumlah Angkutan Darat	unit	142,559	136,207	105,061	103.225	95.002	Dishub
2.9.5	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	430,093	505.638	1.340.483	1.581.895	1.428.439	Dishub
2.9.6	Persentase Penumpang Angkutan Umum Yang Dapat Dilayani	%	100	100	100	100	100	Dishub
2.9.7	Rasio Ijin Trayek	rasio	1.6	1.6	0,9	0,5	1	Dishub
2.9.8	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	7,932	7,882	7,133	4.955	2.410	Dishub



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.9.9	Kepemilikan KIR angkutan umum	unit	7,932	9,567	9747	9.974	10.137	Dishub
2.9.10	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	40	40	40	40	40	Dishub
2.9.11	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	30.000-40.000	30.000-40.000	30.000-40.000	30.000-40.000	0	Dishub
2.9.12	Pemasangan rambu-rambu	unit	1,198	1,198	1,247	1.282	1.317	Dishub
2.9.13	Cakupan Layanan Angkutan Umum pada jaringan jalan Kota	ruas jalan	32	32	32	32	32	Dishub
2.9.14	Ketersediaan Halte pada jalur trayek Angkutan Umum	unit	24	24	24	24	24	Dishub
2.9.15	Ketersediaan fasilitas pelengkap jalan (rambu, marka, guardrail, dll) pada jaringan jalan kota	unit	70,189	70,205	73,122	73.678	73.861	Dishub
2.9.16	Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor @ untuk minimal 4000 kendaraan	unit	1	1	1	1	1	Dishub
2.9.17	Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam kota	unit	50	50	29	16	32	Dishub
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.10.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government Terintegrasi	%	57,14	62,86	68,57	89,29	100	Diskominfo



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.10.2	Jumlah jaringan komunikasi	titik	64	N/A	60	61	76	Diskominfo
2.10.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	media	10/18	12/8	12/8	11/8	12/8	Diskominfo
2.10.4	Jumlah penyiaran radio/tv lokal	unit	5/1	3/1	2/0	2/0	2/0	Diskominfo
2.10.5	Website milik pemerintah daerah	unit	54	49	81	41	55	Diskominfo
2.10.6	Pameran/expo	kegiatan	1	1	4	4	3	Diskominfo
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
2.11.1	Jumlah koperasi aktif	koperasi	161	164	166	170	169	DKUP
2.11.2	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	koperasi	94	60	60	60	64	DKUP
2.11.3	Total Jumlah Koperasi	koperasi	255	224	226	230	124	DKUP
2.11.4	Jumlah Koperasi Sehat	koperasi	89	92	92	96	92	DKUP
2.11.5	Jumlah LKM	LKM	1	1	1	1	6	DKUP
2.11.6	Jumlah Usaha Mikro	orang	19.253	19.753	20.056	20.753	21.253	DKUP
2.11.7	Jumlah Usaha Kecil	orang	127	127	134	134	134	DKUP
2.11.8	Jumlah Usaha Menengah	orang	36	36	28	38	38	DKUP
2.11.9	Total Jumlah UMKM	orang	19.416	19.916	20.228	20.925	21.425	DKUP
2.11.10	Persentase usaha mikro yang dibina	%	4,93	10,5	27,99	28	35	DKUP
2.11.11	Jumlah usaha mikro yang mendapat bantuan permodalan	Usaha mikro	90	100	7.773	5.481	8025	DKUP
2.11.12	Jumlah Koperasi Produsen	koperasi	8	8	9	8	13	DKUP
2.11.13	Jumlah Koperasi Konsumen	koperasi	218	186	127	131	178	DKUP



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.11.14	Jumlah Koperasi Pemasaran	koperasi	2	2	2	1	2	DKUP
2.11.15	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	koperasi	5	5	5	6	6	DKUP
2.11.16	Jumlah Koperasi Jasa	koperasi	22	23	23	24	27	DKUP
2.12	PENANAMAN MODAL							
2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (Jumlah PMA/PMDN)	investor	40	100	279	259	144	DPMPTSP
2.12.2	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	Rp	6.116.025.342.540	8.394.186.131.394	11.658.513.500.445	16.549.464.253.579	18.054.544.299.111	DPMPTSP
2.12.3	Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah	Pelaku Usaha	3.004	2.949	5.847	1.068	5991	DPMPTSP
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.13.1	Jumlah Klub Olah Raga	klub	28	30	30	30	29	Dispopar
2.13.2	Jumlah Gedung Olah Raga	unit	3	5	5	5	5	Dispopar
2.13.3	Jumlah organisasi Pemuda	organisasi	13	13	28	20	18	Dispopar
2.13.4	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	28	30	30	30	44	Dispopar
2.13.5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	6	3	5	2	1	Dispopar
2.13.6	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	2	1	3	5	8	Dispopar
2.13.7	Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)	unit	0	0	0	0	0	Dispopar
2.13.8	Lapangan Olah Raga	unit	80	80	80	80	80	Dispopar
2.13.9	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	64,29	70	70	70	33,57	Dispopar



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.13.10	Persentase wirausaha muda	%	0,12	0,18	7,03	7,02	56,05	Dispopar
2.13.11	Cakupan pembinaan olahraga	%	75	83,33	83,33	88,89	88,89	Dispopar
2.13.12	Cakupan pembinaan atlet muda	%	75	83,33	83,33	88,89	41,36	Dispopar
2.13.13	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	16	116	112	114	1088	Dispopar
2.13.14	Jumlah prestasi olahraga	Medali	16	321	691	763	707	Dispopar
2.14	STATISTIKA							
2.14.1	Persentase Release data statistik tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Diskominfo
2.15	PERSANDIAN							
2.15.1	Jumlah sistem elektronik yang memanfaatkan sertifikat elektronik	sistem elektronik	26	33	40	148	150	Diskominfo
2.16	KEBUDAYAAN							
2.16.1	Jumlah sarana seni dan budaya	unit	3	3	3	3	3	Disdikbud
2.16.2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	unit	7	7	7	9	9	Disdikbud
2.16.3	Jumlah kelompok, sanggar, organisasi seni	Kelompok/ sanggar/ organisasi	218	222	224	224	224	Disdikbud
2.17	PERPUSTAKAAN							
2.17.1	Taman baca yang dibina	unit	0	1	0	0	0	Disperpusip



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.17.2	Pengunjung jumlah perpustakaan per tahun	orang	20.058	21.743	673.273	892.061	892.374	Disperpusip
2.17.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (perpustakaan umum)	buah	56.714	58.568	54.922	33.095	33.853	Disperpusip
2.17.4	Jumlah perpustakaan sekolah, kelurahan dan masyarakat yang dibina	unit	89	78	145	151	40	Disperpusip
2.17.5	Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan (jumlah pengelola perpustakaan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan)	orang	89	70	79	120	40	Disperpusip
2.18	KEARSIPAN							
2.18.1	PD yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baik	PD	35	35	35	28	28	Disperpusip
2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (jumlah pengelola arsip yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan)	orang	64	35	28	28	28	Disperpusip
2.18.3	Petugas Pengelola Arsip Kelurahan	orang	29	29	29	29	29	Disperpusip
2.18.4	Petugas Pengelola Arsip SKPD / PD	orang	35	35	35	28	44	Disperpusip
3	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
3.1	PERTANIAN							



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1	Produksi Padi	ton	12.150,60	13.492,85	12.535,18	11.639,23	34.195,00	DKPPP
3.1.2	Produksi Jagung	ton	34.993,00	34,587.82	36.901,54	34,795.49	40.336,00	DKPPP
3.1.3	Produksi Bawang Merah	ton	5.319	6.017,80	6.109,90	8,487.30	5,434,60	DKPPP
3.1.4	Luas Panen Padi	Ha	1.841,00	2.034,00	1.886,00	1,718.00	1.868,00	DKPPP
3.1.5	Luas Panen Jagung	Ha	4.999,00	4.800,00	5.196,00	4,896.00	5.315,00	DKPPP
3.1.6	Luas Panen Bawang Merah	Ha	599.00	676.00	697.00	940.00	637,5	DKPPP
3.1.7	Produksi Tembakau	ton	-	-	N/A	0	5,97	DKPPP
3.1.8	Produksi Tebu	ton	1,568.70	1,629.60	1,885,67	1.672,600	1.686,320	DKPPP
3.1.9	Produksi Kelapa	ton	12.53	16.00	5.35	0.4	0	DKPPP
3.1.10	Produksi Kapuk Randu	ton	0.08	0.04	0.03	0	0	DKPPP
3.1.11	Luas Panen Tembakau	Ha	-	N/A	N/A	0	3,5	DKPPP
3.1.12	Luas Panen Tebu	Ha	20.37	18.60	15.23	17.386	19,373	DKPPP
3.1.13	Luas Panen Kelapa	Ha	56.43	48.08	4.43	0.5	29,83	DKPPP
3.1.14	Luas Panen Kapuk Randu	Ha	2.22	2.20	0.80	0.00	1,9	DKPPP
3.1.15	Luas Lahan Pertanian							DKPPP
	1. Lahan Sawah	Ha	1,743.50	1,741.50	1741,5	1741,5	1741,5	DKPPP
	2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	Ha	913,25	906.12	905.21	905,21	905,21	DKPPP
3.1.16	Pengurangan Luasan Lahan Pertanian							
	Luas Penggunaan Lahan Pertanian : SAWAH	Ha	1.743,50	1.741,50	1.741,50	1.741,50	1.741,50	DKPPP
	Luas Penggunaan Lahan Pertanian : TEGAL	Ha	623,50	623,50	623,50	623,50	623,50	DKPPP
	Total Luas Penggunaan Lahan Pertanian :	Ha	2.367,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2646,71	DKPPP
	Pengurangan Sawah	Ha	(7,00)	(2,00)	-	-	-	DKPPP
	Pengurangan Tegal	Ha	-	-	-	-	-	DKPPP
	Jumlah Pengurangan Lahan Pertanian	Ha	(7,00)	(2,00)	-	-	-	DKPPP
3.2	PERIKANAN							



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.15	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	12,720.40	853	880.69	919,25	928,72	DKPPP
3.1.16	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	189.656.544.810	19,676,938,700.00	21,263,264,000.00	22,892,288,000	25.133.039.000	DKPPP
3.1.17	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	312,83	337,407	355,06	415,50	424,14	DKPPP
3.1.18	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Rp	7.212.934.000	7.259.795.400	9.120.594.960	12.157.624.964	12.275.564.000	DKPPP
3.3	PERINDUSTRIAN							
3.3.1	Industri agro dan kimia (IAK)	unit	1.004	1.012	968	1.001	1.041	Disperinaker
3.3.2	Industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA)	unit	166	188	253	253	256	Disperinaker
3.3.3	Industri alat transportasi, elektronika dan telematika (IATT)	unit	11	11	11	12	11	Disperinaker
3.3.4	Total Industri	unit	1.181	1.211,00	1.232	1.266	1.308	Disperinaker
3.3.5	Nilai produksi	Rp	3.604.610.739.322	3.402.301.570.112	5.851.006.690.969	5.902.604.233.165	5.952.575.508.104	Disperinaker
3.3.6	Nilai Investasi	Rp	200.088.387.807	201.889.183.297	3,296,744,990,733	3.297.173.064.758	3.298.066.012.922	Disperinaker
3.3.7	IKM yang menerima fasilitasi peningkatan keterampilan teknis produksi	Orang	75	40	150	50	45	Disperinaker
3.3.8	IKM yang menerima Fasilitas Sertifikasi HKI dan standarisasi produk	Orang	10	40	20	20	20	Disperinaker
3.3.9	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	285	285	285	286	282	Disperinaker
3.3.10	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak	Perusahaan	84	124	164	204	229	Disperinaker
3.4	PARIWISATA							
3.4.1	Jumlah obyek wisata	buah	11	11	12	12	12	Dispapar



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.4.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	orang	474.546	449.517	841.369	948.803	1.023.240	Dispapar
3.4.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	orang	69	0	235	3157	24.139	Dispapar
3.4.4	PAD Sektor Pariwisata	Rp	4.390.140.033	4.859.498.994	7.835.323.736	9.796.286.993	13.555.636.648	Dispapar
3.4.5	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	%	9	9	8	8	10	Dispapar
3.4.6	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif	orang	42	42	123	169	9485	Dispapar
3.4.7	Jumlah kelompok sadar wisata	orang	14	14	16	16	16	Dispapar
3.4.8	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	N/A	N/A	0,79	0,78	1	Dispapar
3.4.9	Kontribusi Pariwisata terhadap PAD	%	2,39	2,28	4,089	4,67	6,57	Dispapar
3.5	PERDAGANGAN							
3.5.1	Jumlah Nilai Ekspor	Milyar Rp	2,851,12	354.288,68	917,07	2.709,38	7.215,48	DKUP
3.5.2	Jumlah Nilai Impor Per Komoditi	Milyar Rp	65,08	223.901,61	410,06	753,69	1.142.01	DKUP
4	LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	66,81	67,27	68,56	76,13	85,66	Setda - Bagian Organisasi
4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,14	79,86	80,12	82,36	85,35	Setda - Bagian Organisasi
4.3	Persentase e- Government Perangkat	%	57,14	62,86	68,57	89,29	100	Diskominfo



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Daerah Yang Terintegrasi							
4.4	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
4.5	Nilai SAKIP	skor	72,68	73,22	74,02	73,25	71,91	Setda - Bagian Organisasi
4.6	Nilai LPPD	skor	3,25	3,14	3,4220	3,4220*	3,4220*	Setda - Bagian Pemerintahan
4.7	Indeks Profesionalisme Aparatur	indeks	64,25	45,73	42,08	78,02	78,02	BKPSDM
4.8	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	%	19,91	21,4	20,06	21,66	20,78	BPPKAD
4.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	Indeks	84.14	79,86	80,12	82,36	85,66	Sekretariat Daerah
4.10	Persentase Anggota DPRD yang Puas Akan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95	77,37	97	97,53	84,36	Sekretariat DPRD
4.11	Persentase anggota DPRD yang puas akan pelayanan Sekretariat DPRD	%	77,39	77,37	73,18	84,66	85,07	Sekretariat DPRD
4.12	Persentase PD yang Menyusun Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	%	100	100	100	100	100	Bappeda Litbang
4.13	Persentase Program Dengan Capaian Minimal 80%	%	85,57	85,57	78.27	98,75	89	Bappeda Litbang
4.14	Persentase hasil penelitian yang dikembangkan yang menjadi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah	%	87.58	103,5	87.21	85	100	Bappeda Litbang



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
4.15	Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal A	%	55	66,67	70	71.42	75	Inspektorat
4.16	Nilai Maturitas SPIP Kota Probolinggo	indeks	3,0375	3,389	3,389	3.243	3.249	Inspektorat
4.17	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	95,76	96,26	90,25	90,25	94.54	Inspektorat
4.18	Persentase Peningkatan Pelanggaran HAM yang terselesaikan	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Bakesbangpol
4.19	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Pemilihan Umum	%	84,92	N/A	N/A	N/A	78,23	Bakesbangpol
4.20	Persentase Jumlah Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	Bakesbangpol
4.21	Persentase Penurunan Kasus terkait Narkoba	%	5	N/A	N/A	61	N/A	Bakesbangpol

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah terkait, 2025



Secara umum kinerja aspek pelayanan umum dapat dikatakan dalam trend yang relatif baik atau mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

2.1.3.1. PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pelayanan urusan pendidikan di Kota Probolinggo merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan dalam pengelolaan urusan pendidikan. Ada pembatasan kewenangan di setiap level pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pendidikan. Pemerintah Kota Probolinggo berfokus pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan kesetaraan. Di dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan juga terdapat standar pelayanan minimal yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan arahan Kemendagri melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Bidang Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang mampu berinovasi, berkreasi dan memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Dalam 5 tahun terakhir capaian kinerja layanan Pendidikan telah mengalami beberapa peningkatan dan juga penurunan. Adapun indikator pelayanan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, fasilitas pendidikan, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan.

Data tabel 2.27 menunjukkan capaian indikator kinerja urusan pendidikan selama 5 tahun terakhir yang secara umum memiliki capaian yang fluktuatif. Adanya penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta masih tingginya angka kemiskinan di Kota Probolinggo. Beberapa wilayah di Kota Probolinggo seperti Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih memiliki daya tampung sekolah yang terbatas sehingga menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memilih pendidikan diluar daerah seperti pondok pesantren. Penurunan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi dan psikologis yaitu kurang motivasi/minat sekolah. Selain itu, terbatasnya sekolah SMA/SMK yang berstatus negeri serta sulitnya aksesibilitas dan jarak ke sekolah SMA/SMK yang cukup jauh karena SMA/SMK sebagian besar terletak di wilayah utara yaitu Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopak.

Terdapat adanya perbedaan metode perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2022-2024. Pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2020-2021 pengolahan data dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan sumber data dari Hasil Pendataan Profil dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan pada tahun 2022-2024, data capaian diperoleh berdasarkan capaian Platform Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perbedaan sumber data dimaksud



menyebabkan adanya penurunan capaian kinerja dari periode 2020-2021 ke periode 2022-2024.

Masalah utama dalam bidang pendidikan di Kota Probolinggo adalah belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu belum meratanya kualitas pendidikan dan terbatasnya akses terhadap pendidikan. Dari sisi kualitas, tantangan utama meliputi belum meratanya pemenuhan kebutuhan guru dan rendahnya proporsi guru bersertifikat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pemenuhan Guru/Indeks Distribusi Guru Pendidikan Dasar yang masih rendah. Rendahnya proporsi guru bersertifikat juga disebabkan oleh minimnya partisipasi dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Padahal, penggunaan PMM diharapkan dapat mendorong guru untuk berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selain itu, masih banyak guru PAUD yang belum berkualifikasi S1. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya regulasi yang kuat sebagai dasar intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan SDM pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga kualitas layanan PAUD belum optimal.

Dari sisi akses, masih terdapat anak usia 7–15 tahun yang belum atau tidak bersekolah. Hal ini diperburuk oleh kesenjangan daya tampung antar satuan pendidikan serta banyaknya sarana dan prasarana sekolah yang belum memenuhi standar kelayakan minimal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi faktor penyumbang, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan karakteristik wilayah. Setiap kecamatan di Kota Probolinggo memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Di wilayah selatan seperti Kedopok dan Wonoasih, pendidikan berbasis keagamaan (pondok pesantren) lebih dominan, sehingga masyarakat cenderung memilih jalur pendidikan informal. Selain itu, pernikahan usia dini masih sering terjadi. Sementara itu, di wilayah pesisir seperti Kecamatan Mayangan, masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga lebih memilih pendidikan informal.

Pemanfaatan Bantuan masih belum optimal sehingga turut menyebabkan anak-anak dari kelompok rentan tetap tidak bersekolah. serta kurangnya dukungan Infrastruktur yang menyebabkan ketimpangan daya tampung diperparah oleh distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata, serta adanya stigma terhadap sekolah unggulan akibat kebijakan zonasi. Hal ini juga didukung dengan permasalahan pemenuhan akses Jenjang SMP pada Wilayah Kecamatan Kademangan yang belum terdapat SMP Negeri, sehingga setiap tahunnya terdapat potensi Anak usia 13 - 15 tahun di wilayah Kademangan bersekolah bukan pada SMP Negeri. Di sisi lain, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara kemampuan APBD Kota Probolinggo masih terbatas. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut berdampak signifikan terhadap belum optimalnya pencapaian pendidikan di Kota Probolinggo.

Berdasarkan capaian kinerja indikator Indeks Distribusi Guru yang merepresentasikan ketersediaan pendidik per mata pelajaran di masing-masing satuan pendidikan pada tiap wilayah, kondisi di Kota Probolinggo hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai rata-rata



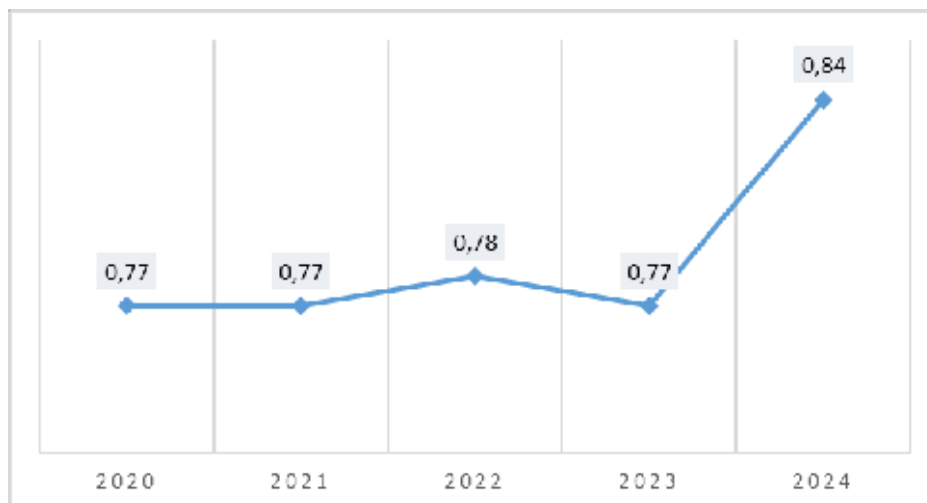
indeks distribusi guru sebesar 0,59 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan akan pendidik, terutama pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar. Akibatnya, lebih dari 30% satuan pendidikan dasar di wilayah tersebut mengalami kekurangan tenaga pendidik.

2.1.3.2. KESEHATAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan wajib dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kota Probolinggo menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta RSUD Dr. Moh. Saleh dan RSUD Ar Rozy. Pelayanan Kesehatan di Kota Probolinggo secara umum dilaksanakan oleh rumah sakit daerah dan puskesmas di setiap kecamatan, yang didukung oleh puskesmas pembantu dalam rangka pengoptimalan layanan.

Pada urusan Kesehatan terdapat standar pelayanan minimal yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Pada urusan Kesehatan terdapat 12 indikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan melalui indikator berikut:



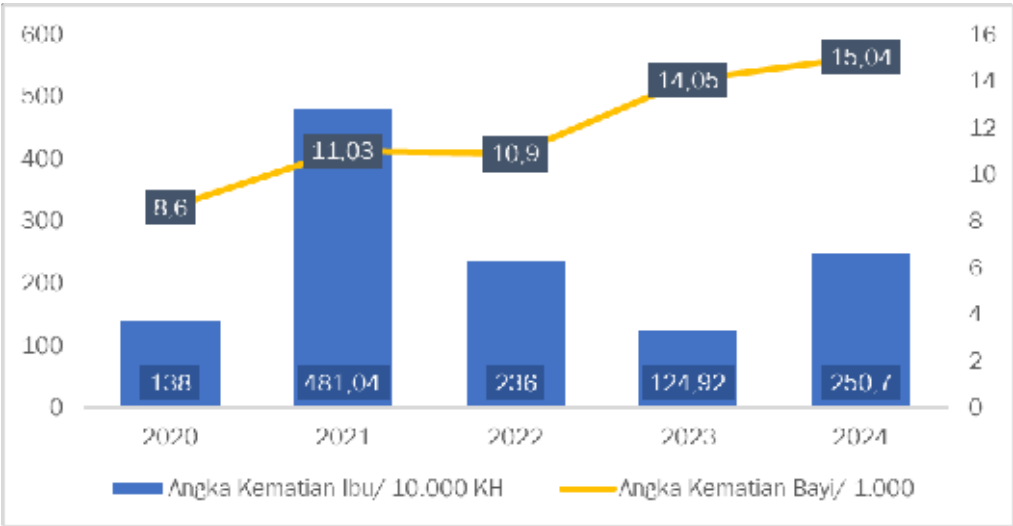
Gambar 2. 26 Indeks Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa indeks kesehatan Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir memiliki tren yang terus meningkat. Persentase peningkatan indeks kesehatan Kota Probolinggo dari tahun 2023 ke 2024 adalah sekitar 9,09%. Peningkatan signifikan ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam sektor kesehatan, baik dari sisi pelayanan, infrastruktur, maupun kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Setelah mengalami stagnasi pada 2020 dan 2021 serta sedikit peningkatan pada 2022, penurunan kembali di 2023 menunjukkan tantangan yang sempat menghambat kemajuan. Lonjakan di 2024 menjadi

indikator kuat bahwa intervensi kebijakan atau program kesehatan yang diterapkan berjalan efektif dan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Capaian Indeks Kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), karena kedua indikator tersebut merupakan komponen utama dalam penilaian kualitas layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Penurunan AKI dan AKB mencerminkan keberhasilan sistem kesehatan dalam memberikan layanan yang responsif, terutama dalam aspek kesehatan ibu dan anak seperti ketersediaan fasilitas persalinan, tenaga medis, serta akses terhadap pelayanan prenatal dan neonatal. Sebaliknya, tingginya AKI dan AKB dapat menurunkan nilai Indeks Kesehatan, karena menunjukkan adanya celah dalam sistem layanan atau kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap layanan esensial. Adapun capaian AKI dan AKB kota Probolinggo secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut



Gambar 2. 27 Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafis diatas menunjukkan capaian AKI yang sangat fluktuatif Angka Kematian Ibu (AKI) diartikan sebagai indikator yang mengukur jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan, terkait dengan kondisi kehamilan atau persalinan. AKI adalah salah satu indikator kunci dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak serta kualitas pelayanan kesehatan maternal. Penurunan AKI adalah tujuan utama dalam upaya meningkatkan perawatan maternal dan mengurangi risiko kematian maternal yang dapat terjadi selama periode kehamilan dan persalinan. AKB Kota Probolinggo juga memiliki fluktuasi yang sangat dinamis. Adapun penyebab meningkatnya AKB pada tahun tersebut disebabkan oleh belum optimalnya posyandu sebagai garda terdepan dalam menjamin tersedianya akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan kesehatan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami capaian yang kurang signifikan, mengingat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi harus diperbaiki lagi capaiannya agar tidak defisit. Pemerintah Kota Probolinggo ke depannya masih memiliki sisa kinerja yang perlu diefektifkan sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Probolinggo hingga akhir periode.



2.1.3.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Probolinggo merupakan bagian dari kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau yang biasa disingkat DPUPRPKP Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mayangan-Kanigaran Dan Perkotaan Kademangan Tahun 2023-2043. Ketersediaan dokumen rencana tata ruang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tertib ruang dan kepastian investasi di Kota Probolinggo. Salah satu substansi dalam Perda RTRW Kota Probolinggo adalah penetapan kawasan peruntukan budidaya yang meliputi: kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan. Selain kawasan peruntukan budidaya tersebut, Perda RTRW menetapkan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Mayangan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat 5 indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Probolinggo yang dapat menggambarkan kinerja DPUPRPKP (sub pekerjaan umum dan penataan ruang) selama periode 2020-2024. Kinerja pada urusan ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tren yang positif.

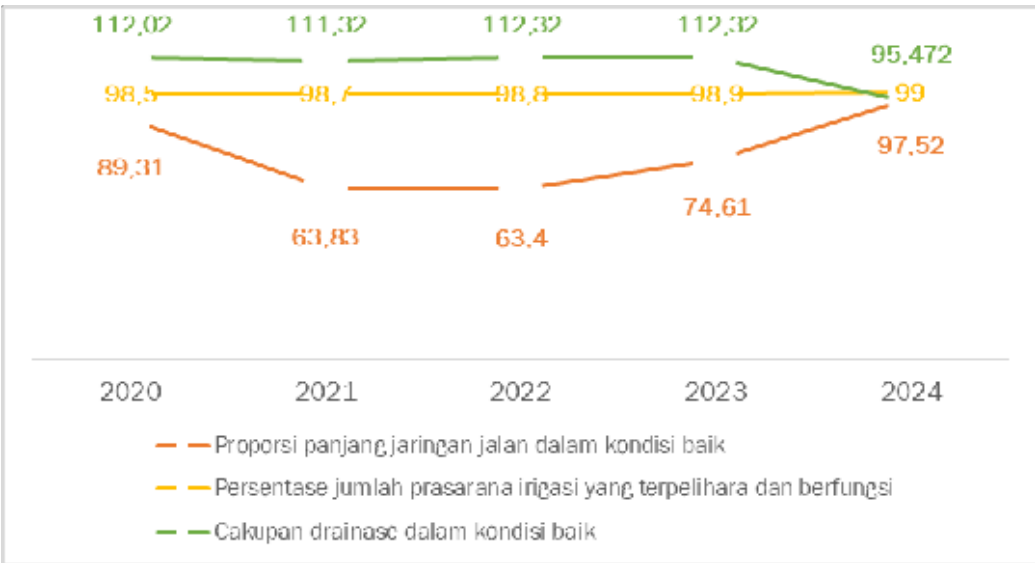
Tabel 2. 30 Ruas Jalan Menurut Fungsinya Tahun 2023

NO.	REKAPITULASI RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA	2023
1	Jumlah	
	Ruas	217
	Panjang (km)	178,92
2	Sistem Primer	
	Panjang (km) JKP 2	-
	Panjang (km) JKP 3	-
	Panjang (km) JKP 4	-
	Panjang (km) JLP	-
	Panjang J. Ling P	-
3	Sistem Sekunder	
	Panjang (km) JAS	4,03
	Panjang (km) JKS	46,91
	Panjang (km) JLS	118,91
	Panjang (km) J. Ling. S	9,05

Sumber : SKGub Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Fungsinya, 2025

Kota Probolinggo pada tahun 2023 memiliki total 217 ruas jalan dengan panjang keseluruhan mencapai 178,92 km. Komposisi panjang jalan berdasarkan sistem sekunder menunjukkan dominasi Jalur Kolektor Sekunder (JKS) dan Jalur Lokal Sekunder (JLS). JKS tercatat sepanjang 46,91 km, sedangkan JLS mendominasi jaringan jalan sekunder dengan panjang 118,91 km. Kontribusi Jalur Arteri Sekunder (JAS) dan Jalan Lingkar Sekunder (J. Ling S) relatif kecil, masing-masing sepanjang 4,03 km dan 9,05 km. Proporsi jaringan ini mencerminkan bahwa struktur jaringan jalan Kota Probolinggo masih sangat bergantung pada sistem lokal dan kolektor dalam menopang mobilitas harian. Komposisi tersebut menegaskan

pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada segmen-segmen utama untuk mendukung konektivitas kawasan perkotaan dan pelayanan logistik.

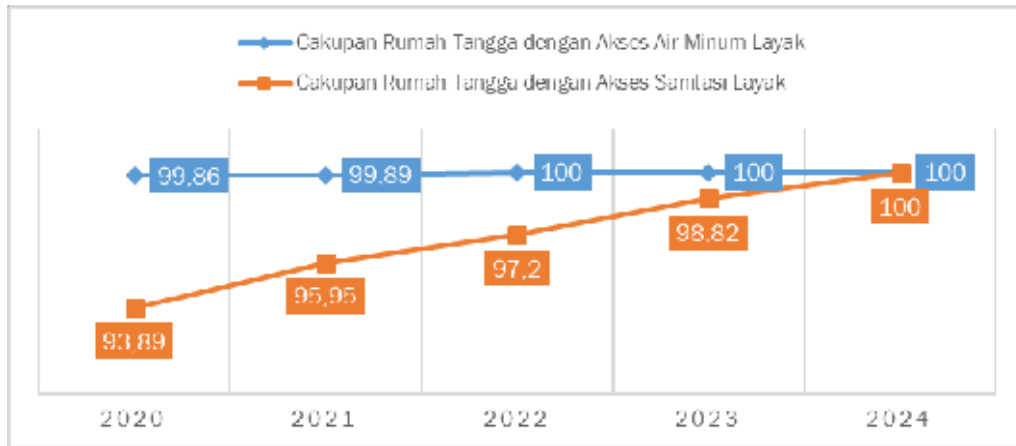


Gambar 2. 28 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Secara umum nilai capaian indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Grafik di atas menggambarkan perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Probolinggo. Bertambahnya Panjang jalan dalam kondisi baik didukung dengan ketersediaan anggaran pendanaan dari Dana Alokasi Khusus untuk jalan-jalan kota yang terhubung langsung dengan jalan nasional. Adapun permasalahan yang masih ditemukan dalam pencapaian indikator terkait dengan integrasi lintas perangkat daerah. Kegiatan pembangunan sektoral yang masih belum sinkron dengan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan jalan. Sehingga jalan yang semula sudah baik karena kebutuhan pembangunan jaringan utilitas seperti air, kabel telekomunikasi ataupun gas bumi, menjadikan turunnya kualitas jalan dikarenakan pekerjaan rekondisi yang tidak sesuai kualitas semula.

Demikian pula dengan indikator presentase jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi yang secara umum mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2024. Kinerja yang baik tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pemeliharaan prasarana irigasi ataupun pembersihan saluran irigasi. Selain itu, terdapat HIPPA dan GHIPPA yang turut menjaga dan memelihara jaringan irigasi. Indikator berikutnya yaitu cakupan drainase dalam kondisi baik yang konsisten mengalami peningkatan secara signifikan selama periode 2020-2024. Kendala terbesar dalam pencapaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga sampah-sampah tersebut menumpuk dan menyumbat aliran drainase kemudian menyebabkan pencemaran.

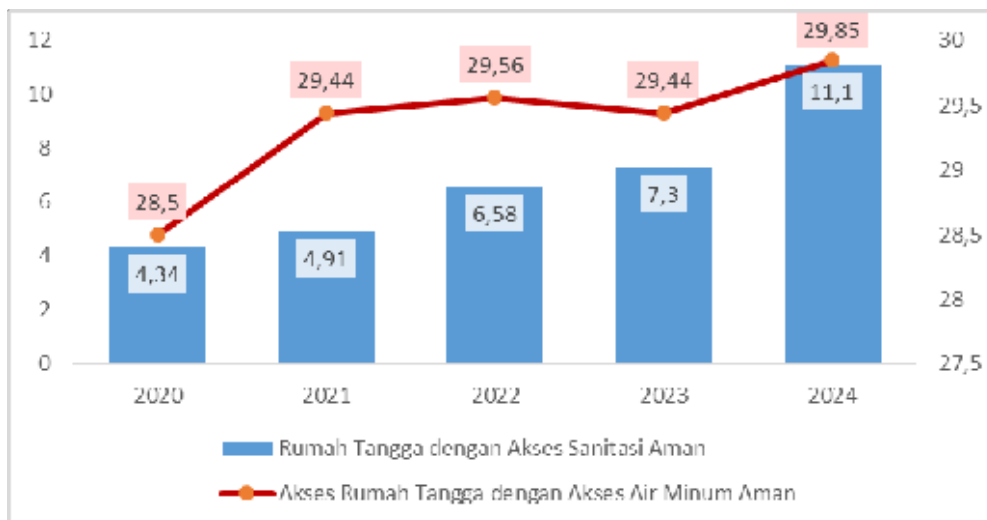


Gambar 2. 29 Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian akses layanan dasar air minum dan sanitasi layak di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif. Akses air minum layak telah mengalami peningkatan stabil dari tahun 2020 sebesar 99,86%, menjadi 99,89% pada tahun 2021, dan mencapai 100% sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan, sumber air terlindungi, serta edukasi konsumsi air minum aman.

Sementara itu, akses sanitasi layak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 93,89%, meningkat menjadi 95,95% di tahun 2021, kemudian 97,20% pada 2022, 98,82% pada 2023, dan akhirnya mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi, termasuk pembangunan septic tank individual dan komunal, serta edukasi perubahan perilaku masyarakat. Pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi layak menandai bahwa Kota Probolinggo telah memenuhi target akses universal yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Semua.



Gambar 2. 30 Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Dan Sanitasi Aman Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025



Dalam lima tahun terakhir, capaian akses rumah tangga terhadap air minum aman dan sanitasi aman di Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan akses layanan dasar secara umum. Akses rumah tangga terhadap air minum aman meningkat secara bertahap dari 28,50% pada tahun 2020 menjadi 29,44% di tahun 2021, kemudian naik sedikit menjadi 29,56% pada 2022, 29,70% di 2023, dan 29,85% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam pengelolaan sumber air, perlindungan kualitas air, dan sistem penyediaan air yang memenuhi syarat secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Dalam pemenuhan akses air minum diupayakan pemenuhan syarat air minum aman dengan pendekatan 4K, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas dan Keterjangkauan. Sementara itu, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman juga menunjukkan peningkatan dari 4,34% pada tahun 2020 menjadi 4,91% di tahun 2021, lalu naik menjadi 6,58% pada tahun 2022 dan 7,30% pada tahun 2023, serta 11,10% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penguatan dalam sistem pengelolaan lumpur tinja, pengolahan akhir limbah domestik, dan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi aman. Meski peningkatannya belum signifikan, data ini mencerminkan komitmen dan langkah awal yang positif dalam pemenuhan target akses universal terhadap layanan air minum dan sanitasi yang aman, sebagaimana diamanatkan dalam SDG 6. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan edukasi masyarakat untuk mempercepat capaian akses aman ini di tahun-tahun mendatang.

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ialah terkait Pembangunan Infrastruktur kurang Optimal. Permasalahan tersebut dikarenakan Penyedia yang kurang kompeten, Kurangnya Kesadaran Masyarakat terkait dengan pemanfaatan infrastruktur dan Potensi Kerusakan Infrastruktur yang sulit dikendalikan. Permasalahan terkait infrastruktur yang sulit dikendalikan menjadi permasalahan yang sangat kompleks, faktor seperti Masih Banyak Genangan Air yang disebabkan oleh letak geografis Kota Probolinggo serta Kondisi Iklim yang tidak menentu. Dari dua faktor tersebut menyebabkan berbagai masalah yang mengakar yaitu diantaranya perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan dan Banyak Bangunan yang didirikan di area sungai yang tidak sesuai standar.

2.1.3.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo. Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dianalisis kinerjanya berdasarkan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian. Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Kota Probolinggo tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Probolinggo. Adapun jenis pelayanan beserta target dan realisasi urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:



Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga dapat direpresentasikan oleh capaian indikator jumlah rumah tidak layak huni dan persentase penurunan luas permukiman kumuh. Dimana capaian indikator jumlah rumah tidak layak huni Kota Probolinggo tahun 2021-2024 mengalami penurunan capaian dari 634 menjadi 354. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan program rehabilitasi dan peningkatan kualitas perumahan rakyat, yang kemungkinan besar didukung oleh berbagai intervensi pemerintah, seperti bantuan renovasi rumah, program bedah rumah, serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar di permukiman. Penurunan ini mencerminkan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak dan sehat. Sedangkan capaian persentase penurunan luas permukiman kumuh Kota Probolinggo tahun 2020-2024 memiliki capaian yang fluktuatif dari 20,53 di tahun 2020 dan sempat mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 0 lalu meningkat di tahun 2022 menjadi 49,98 dan berakhir di 41,2 di tahun 2024. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika dalam program penataan kawasan kumuh, di mana efektivitas kebijakan, tingkat implementasi program, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi capaian dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan rumah tidak layak huni, masih ada tantangan dalam memastikan keberlanjutan program penataan kawasan kumuh agar tidak hanya berdampak sementara, tetapi juga memberikan perubahan yang lebih stabil dan merata dalam jangka panjang. Secara rinci capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Probolinggo terlihat melalui grafik berikut:



Gambar 2. 31 Capaian Rumah Tidak Layak Huni Dan Luasan Permukiman Kumuh
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Permukiman kumuh Kota Probolinggo mengalami penurunan luasan tiap tahunnya. Luasan permukiman kumuh pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 sebesar 53,14 ha, pada tahun 2024 luasan permukiman kumuh menurun menjadi 21,85 ha di Kelurahan Mangunharjo dan Jati. Dalam rangka penanganan permukiman kumuh, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan beberapa upaya meliputi: penyediaan PSU, peningkatan kualitas lingkungan, perbaikan dan peningkatan kondisi rumah.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Probolinggo adalah: masih terdapatnya jalan dan drainase lingkungan yang berasal dari kegiatan pengembangan kavling perumahan yang tidak dibangun dengan baik. Selain itu Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan tersebut belum dilakukan serah terima, dikarenakan tidak terlacknya pengembang kavling dan perumahan di waktu lalu yang belum melakukan serah terima PSU. Maka dengan permasalahan tersebut tantangan kedepan yaitu semakin banyaknya unit pembangunan perumahan maka harus memastikan perbaikan tentang jalan dan drainase pada pengembang perumahan.



Gambar 2. 32 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo,2025

Tingkat rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Probolinggo menunjukkan konsistensi sangat tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan kenaikan bertahap dari 99,15% menjadi 99,50%. Stabilitas angka tersebut mencerminkan capaian positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, serta menunjukkan efektivitas kebijakan penyediaan hunian yang inklusif dan berkelanjutan. Kenaikan yang meskipun relatif kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan, namun juga menjadi sinyal bahwa tantangan ke depan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif.

Permasalahan lain yang masih dalam ruang lingkup urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah terkait tingginya pelanggaran tata ruang akibat kurangnya pengawasan sebab sistem pengawasan belum terintegrasi terhadap izin perizinan. Tingkat pelanggaran tata ruang juga disebabkan oleh keberadaan sanksi berdasarkan peraturan berlaku yang belum memberikan efek jera serta rendahnya kesadaran terhadap urgensi dari tersusunnya Peraturan dan Perencanaan Tata Ruang di Kota Probolinggo. Sedangkan pada domain Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga masih tinggi, yang disebabkan struktur bangunan belum sesuai standar, sanitasi belum layak serta masih terdapat rumah yang belum terlayani air. Hal tersebut juga terkait dengan kendala layanan air akibat sumber air baku yang menurun di Kota Probolinggo.



2.1.3.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

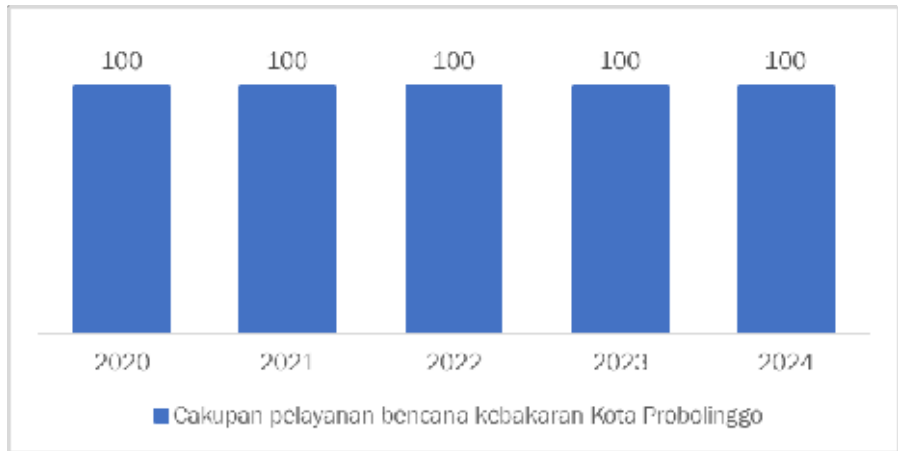
Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) terdiri atas tiga sub urusan yaitu sub ketentraman dan ketertiban umum, sub kebakaran dan sub kebencanaan. Penyelenggaraan sub urusan trantibum di Kota Probolinggo diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo yang memiliki tupoksi utama sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Representasi kinerja Satpol PP pada sub urusan tantribum Kota Probolinggo tahun 2020-2024 direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja berikut:



Gambar 2. 33 Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2025

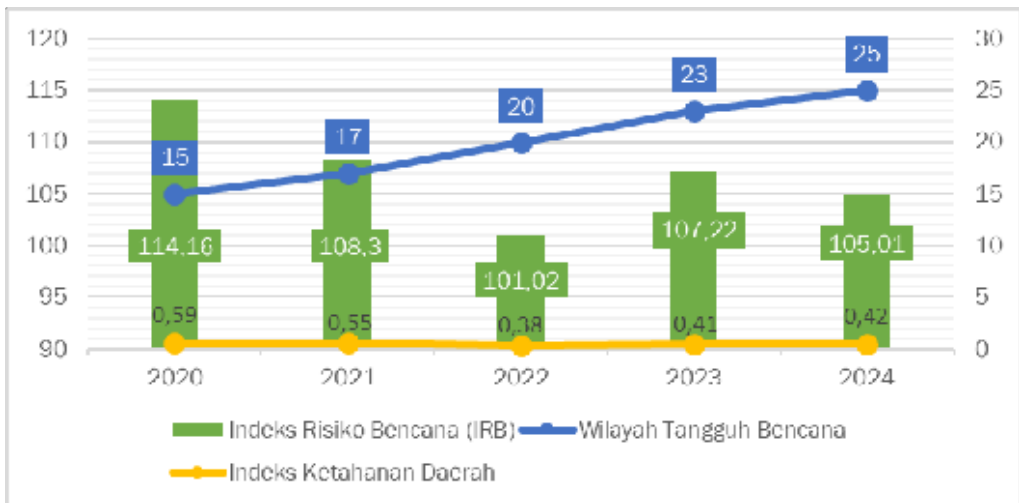
Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian indikator persatuan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan selama periode 2020-2024 memiliki capaian yang stagnan yaitu 100%. Artinya bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Satpol PP Kota Probolinggo mampu menyelesaikan 100% pelanggaran trantibum. Sementara pada indikator jumlah pelanggaran Perda mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024 secara umum mengalami penurunan capaian. Jumlah pelanggaran Perda berhasil ditekan secara signifikan dari 906 kasus pada tahun 2020 menjadi 210 kasus pada tahun 2021. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan 199 kasus pelanggaran. Meskipun demikian, masih adanya jumlah pelanggaran menunjukkan masih rendahnya kepedulian serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah akibat pengaruh lingkungan yang kurang baik dan minimnya pengetahuan sebab frekuensi sosialisasi dan edukasi terkait perda masih terbatas. Indikator selanjutnya yaitu jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kota Probolinggo yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketersediaan petugas Linmas untuk melindungi dan mengawasi masyarakat di wilayah tersebut. Tren tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan capaian dengan kecenderungan menurun. Capaian ini dipengaruhi oleh faktor adanya anggota linmas yang dibentuk saat pemilu namun kemudian tidak aktif kembali, sehingga diperlukan pendataan ulang anggota linmas yang ada di Kota Probolinggo.



Gambar 2. 34 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2025

Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah layanan bencana kebakaran yang mencakup luas wilayah kebakaran (WMK) dan penentuan lokasi pemadam yaitu seluruh cakupan luas wilayah Kota Probolinggo. Gambaran realisasi sebesar 100% artinya bahwa, Pemerintah Kota Probolinggo telah mampu mengcover seluruh area Kota Probolinggo dalam layanan penanganan kebakaran. Sehingga, tidak terdapat angka pertumbuhan/penurunan, nilai kenaikan/penurunan dan rata-rata pertumbuhan pada indikator utama sub kebakaran. Oleh karena itu, berdasarkan capaian indikator pada penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran menunjukkan adanya capaian yang positif dimana Pemerintah Kota Probolinggo mampu mempertahankan 100% coverage area layanan di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Meskipun demikian, belum terdapat upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif sehingga kejadian kebakaran masih rawan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait penanggulangan bahaya kebakaran maupun pencegahan dini kebakaran, selain itu dari segi kepemilikan APAR oleh masyarakat maupun pelaku usaha masih kurang serta belum adanya petugas inspektur muda yang menginspeksi APAR.



Gambar 2. 35 Indeks Risiko Bencana Dan Wilayah Tangguh Bencana Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, 2025



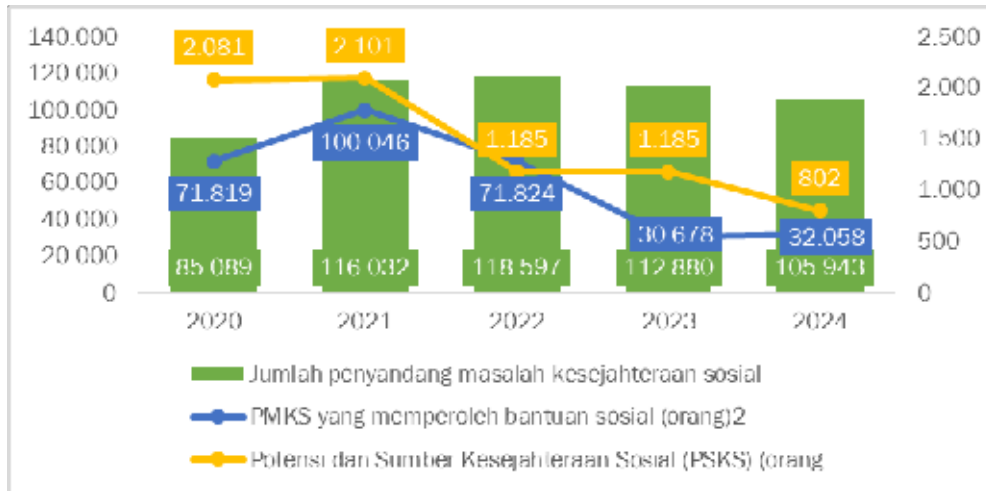
Indeks Resiko Bencana atau selanjutnya disebut IRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau potensi kerentanan wilayah Kota Probolinggo terhadap berbagai jenis bencana alam atau insiden yang dapat terjadi. IRB Kota Probolinggo menunjukkan tren penurunan dari data baseline tahun 2020 sebesar 114,16 dengan kategori kelas risiko sedang menjadi sebesar 105,01 pada Tahun 2024 dengan kategori kelas risiko sedang. Tren capaian IRB di atas masih belum diiringi pencapaian target IKD (Indeks Ketahanan Daerah) Kota Probolinggo dikarenakan faktor lemahnya mitigasi serta belum adanya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah hingga tahun 2024 serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan termasuk belum semua satuan pendidikan membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kota Probolinggo. Meskipun demikian, Kota Probolinggo telah berhasil menurunkan kelas risiko bencana yang dimiliki dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat.

Indikator selanjutnya adalah jumlah kelurahan tangguh bencana yang dibentuk di Kota Probolinggo. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, terdapat 13 kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk dari total 29 kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Meskipun demikian, kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Probolinggo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana masih rendah. Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk hampir 95% masih dalam kategori Pratama atau tingkatan paling awal dalam Kelurahan Tangguh Bencana.

2.1.3.6. SOSIAL

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan 5 standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Empat layanan tersebut meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala kab/kota; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

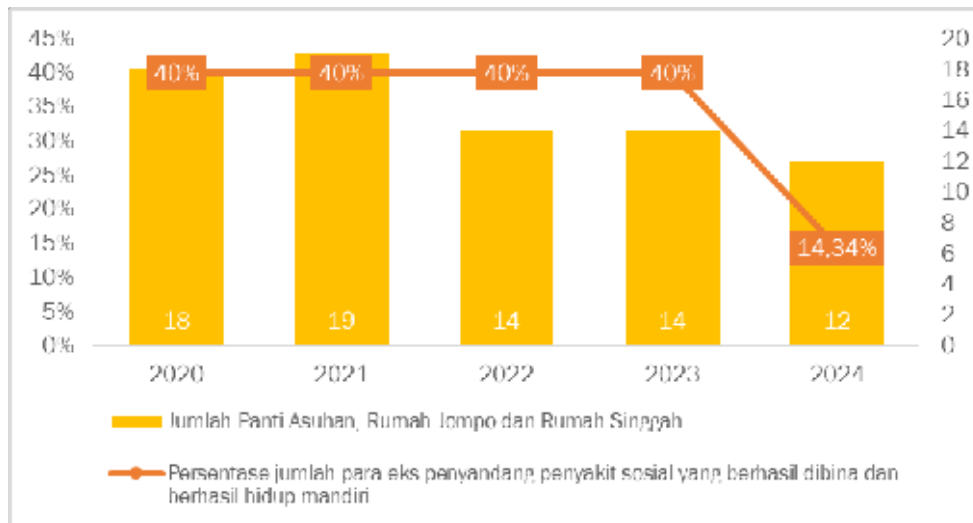
Berikut merupakan gambaran capaian indikator kinerja urusan sosial Kota Probolinggo:



Gambar 2. 36 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Serta Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2025

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Probolinggo pada awal periode tahun 2010 menghasilkan capaian kinerja sebesar 5.660 orang kemudian dalam rentan tahun berjalan atau 2023 menjadi sebesar 1590 orang, dengan capaian tertingginya terjadi pada tahun 2020 sebesar 37.575 orang. Hal ini berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah mengoptimalkan pemberian bantuan sosial kepada PMKS.



Gambar 2. 37 Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2020-2024

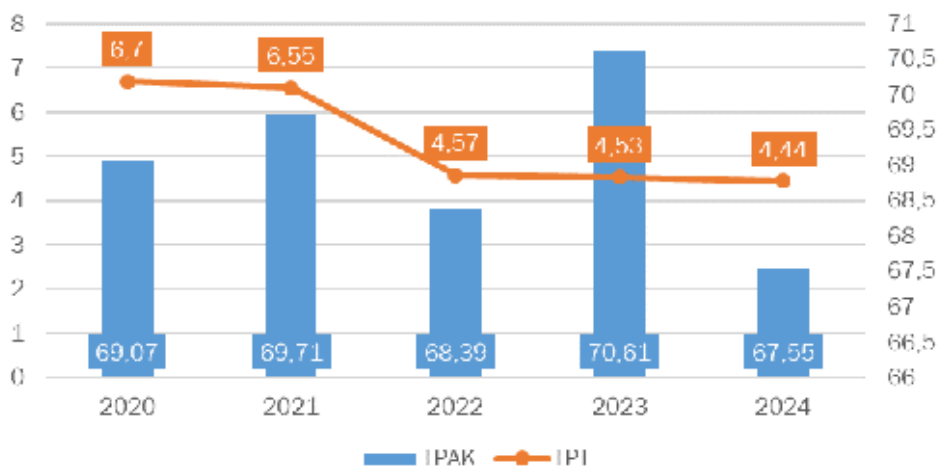
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2025

Indikator yang berkaitan dengan jumlah lembaga kesejahteraan sosial seperti Panti asuhan, rumah jompo dan rumah singgah yang aktif menjelaskan penurunan secara kuantitas dari periode awal 2020 sebanyak 18 Lembaga Kesejahteraan Sosial kemudian dalam rentang waktu tahun berjalan atau tahun 2024 turun menjadi 12 lembaga yang disebabkan karena eksistensi dari penyelenggara lembaga yang menurun sebagai akibat standarisasi lembaga kesejahteraan Sosial. Sedangkan Indikator kinerja persentase eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri capaiannya stagnan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 sebesar 40% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi

14,34%. Menurunnya eks penyandang penyakit sosial yang di bina karena sudah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

2.1.3.7. TENAGA KERJA

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu urusan ketenagakerjaan merupakan salah indikator kinerja yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan urusan ketenagakerjaan menggambarkan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemudian mempengaruhi tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah Angkatan kerja dapat diketahui dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Indikator kinerja daerah dari urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Berikut merupakan grafik yang memaparkan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dari tahun 2020-2024.



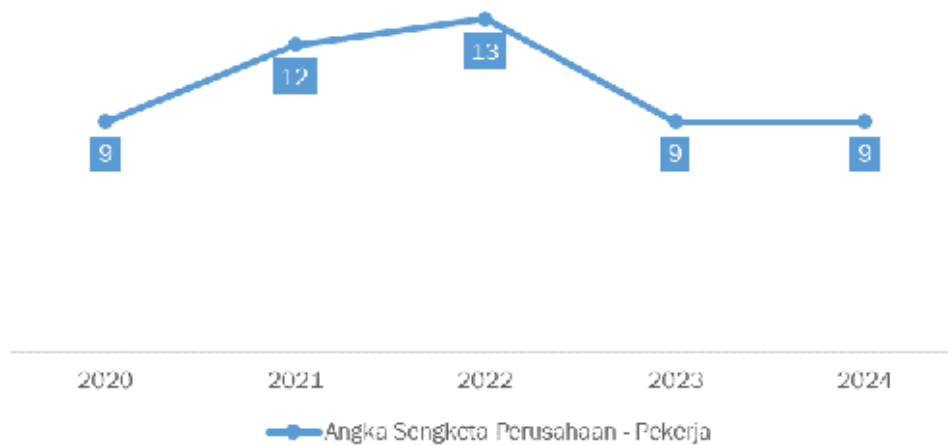
Gambar 2. 38 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi pada kedua indikator tersebut. TPAK mengalami peningkatan dari 69,07% pada tahun 2020 menjadi 69,71% pada 2021, namun menurun pada 2022 menjadi 68,39%. Pada 2023, TPAK kembali naik signifikan ke angka tertinggi sebesar 70,61%, sebelum akhirnya turun menjadi 67,55% pada 2024.

Sementara itu, TPT menunjukkan tren penurunan secara umum selama periode tersebut. Pada 2020, TPT berada di angka 6,7%, kemudian sedikit menurun menjadi 6,55% pada 2021. Penurunan signifikan terjadi pada 2022 dengan TPT turun ke angka 4,57% dan terus menurun tipis menjadi 4,53% pada 2023. Pada 2024, TPT kembali mengalami



penurunan menjadi 4,44%, mencatatkan angka terendah selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya upaya peningkatan partisipasi tenaga kerja yang disertai dengan penurunan tingkat pengangguran di Kota Probolinggo, meskipun fluktuasi masih terjadi pada TPAK sepanjang periode tersebut.



Gambar 2. 39 Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Indikator Angka Sengketa Perusahaan–Pekerja memiliki capaian yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini diartikan kasus perselisihan antara perusahaan dengan pekerja di Kota Probolinggo semakin berkurang. Pada grafik di atas menunjukkan angka sengketa antara perusahaan dan pekerja di Kota Probolinggo selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tercatat 9 kasus sengketa. Angka ini meningkat pada 2021 menjadi 12 kasus dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan 13 kasus sengketa, menunjukkan adanya peningkatan ketegangan hubungan industrial selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan signifikan dengan jumlah sengketa kembali turun menjadi 9 kasus.

2.1.3.8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

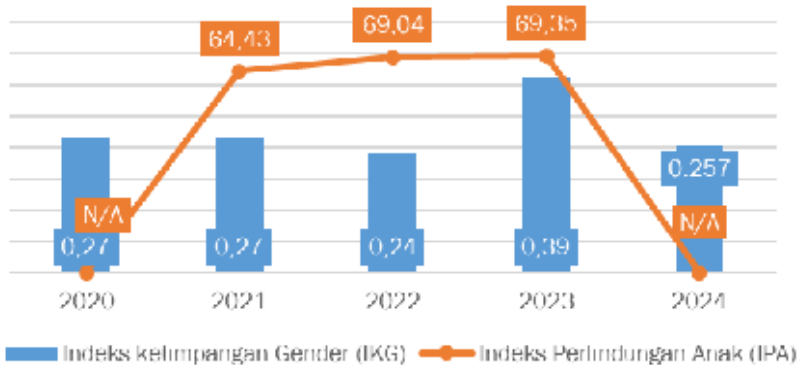
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Pemberdayaan perempuan berfokus pada peningkatan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Melalui program pelatihan keterampilan, pemberian akses ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan, perempuan didorong untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Sinergi antara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan mampu menciptakan keluarga dan masyarakat yang harmonis, sejahtera, serta ramah anak, yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan beberapa indikator yang mencerminkan capaian dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada kurun waktu 2020- 2024:

Tabel 2. 31 Kota Layak Anak Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Utama	Utama	Utama*

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2025

Status Kota Layak Anak (KLA) di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, Kota Probolinggo memperoleh predikat Madya, yang kemudian meningkat menjadi Nindya pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya serius dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Lebih lanjut, pada tahun 2022 hingga 2024, Kota Probolinggo berhasil meraih predikat Utama, yang merupakan salah satu tingkat penghargaan tinggi dalam KLA. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung hak-hak anak.



Gambar 2. 40 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik tentang Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi pada dua indikator utama, yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Secara umum, capaian IKG mengalami dinamika dari tahun ke tahun, sempat menunjukkan stabilitas pada awal periode, kemudian menurun, dan kembali meningkat secara signifikan sebelum akhirnya tidak tersedia pada tahun terakhir. Sementara itu, capaian IPA menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Perubahan capaian ini mencerminkan adanya berbagai faktor pendorong dan penghambat.

Peningkatan capaian kemungkinan didorong oleh penguatan program-program kesetaraan gender dan perlindungan anak, dukungan kebijakan yang lebih responsif, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, penurunan atau stagnasi bisa disebabkan oleh hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta tantangan dalam pengumpulan dan pelaporan data yang akurat dan berkelanjutan. Ketidaksediaan data pada tahun terakhir menjadi catatan penting yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem pemantauan dan evaluasi agar program yang telah berjalan dapat terus dipantau dan ditingkatkan efektivitasnya.



2.1.3.9. PANGAN

Urusan Pangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif. Upaya dalam bidang pangan meliputi peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan sistem distribusi yang efisien, serta pengendalian harga untuk memastikan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perhatian terhadap keamanan dan kualitas pangan menjadi prioritas guna mencegah potensi risiko kesehatan. Urusan pangan tidak hanya berfokus pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat tentang pola konsumsi sehat, pengurangan food loss dan food waste, serta penguatan cadangan pangan dalam menghadapi potensi krisis atau bencana.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator yang mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat di suatu wilayah. Skor ini menunjukkan keragaman dan keseimbangan kelompok pangan yang dikonsumsi, dengan skor maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam dan seimbang pola konsumsi pangan penduduk, yang berarti semakin baik kualitas konsumsi pangan secara keseluruhan. PPH digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan dan membantu mewujudkan ketahanan pangan serta pemenuhan gizi seimbang.



Gambar 2. 41 Ketersediaan Pangan (Ton) Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Ketersediaan pangan di Kota Probolinggo mengalami tren peningkatan signifikan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah ketersediaan pangan tercatat sebesar 6.336 ton dan mengalami kenaikan menjadi 7.369 ton di tahun 2021. Peningkatan lebih tajam terlihat pada tahun 2022 dengan ketersediaan mencapai 11.891 ton. Puncak ketersediaan pangan terjadi di tahun 2023 dengan lonjakan signifikan hingga 26.329 ton, menunjukkan adanya peningkatan produksi atau keberhasilan program ketahanan pangan di kota tersebut. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut sedikit menurun menjadi 24.167 ton, meskipun masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal.

Ketersediaan pangan daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah, serta pasokan dari luar daerah jika kebutuhan tidak terpenuhi oleh sumber-sumber tersebut. Secara sederhana, ini adalah jumlah

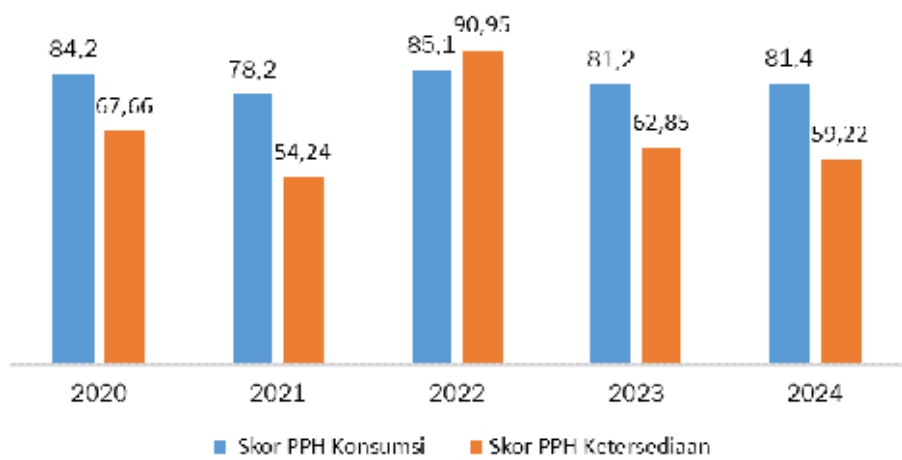


makanan yang tersedia di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya. Ketersediaan pangan daerah sangat penting karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan masyarakat di suatu daerah. Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan. Ketersediaan pangan yang baik akan mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. 42 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Tahun) Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Konsumsi pangan adalah segala jenis dan jumlah makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hayatinya. Konsumsi pangan mencakup berbagai aspek, seperti jenis makanan yang dikonsumsi, jumlahnya, frekuensi konsumsi, dan juga bagaimana makanan tersebut dipersiapkan. Konsumsi pangan di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, konsumsi pangan tercatat sebesar 88,5 kg/kapita/tahun dan mengalami sedikit penurunan menjadi 85,4 kg/kapita/tahun di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan konsumsi yang cukup tinggi hingga mencapai 105,9 kg/kapita/tahun, menjadi angka tertinggi selama periode tersebut. Tahun 2023 menunjukkan penurunan kembali ke angka 87,9 kg/kapita/tahun, mendekati tingkat konsumsi pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2024 dengan konsumsi pangan sebesar 89.02 kg/kapita/tahun melebihi besaran konsumsi pangan di tahun 2020.



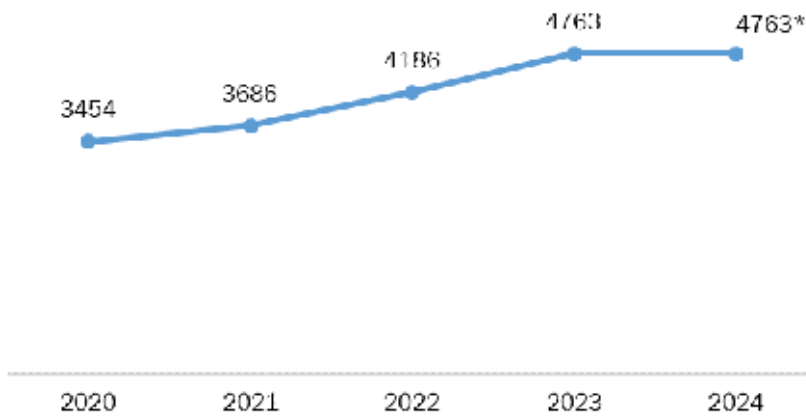
Gambar 2. 43 Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik Tren skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk konsumsi dan ketersediaan di Kota Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menggambarkan ketidakseimbangan antara pola konsumsi masyarakat dan ketersediaan pangan lokal. Skor PPH konsumsi secara umum menunjukkan nilai yang relatif stabil, berada di atas angka 78, yang mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung mengonsumsi pangan yang lebih beragam dan mendekati pola konsumsi ideal. Peningkatan skor tertinggi terjadi pada tahun 2022 (85,1), yang kemungkinan besar didorong oleh program peningkatan kesadaran gizi dan edukasi konsumsi pangan seimbang.

Sebaliknya, skor PPH ketersediaan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 (54,24), yang bisa disebabkan oleh gangguan distribusi dan produksi pangan akibat dampak pandemi serta gangguan rantai pasok. Meskipun terdapat lonjakan skor ketersediaan pada 2022 mencapai 90,95, yang mengindikasikan adanya intervensi kebijakan dalam penguatan produksi dan cadangan pangan, namun skor tersebut kembali turun di tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini menandakan tantangan dalam mempertahankan kontinuitas ketersediaan pangan, yang mungkin disebabkan oleh perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, atau kurangnya dukungan terhadap sektor pertanian lokal. Faktor pendorong capaian positif meliputi program edukasi konsumsi pangan bergizi, penguatan sistem distribusi, dan dukungan kebijakan ketahanan pangan. Sementara itu, faktor penghambat yang dominan antara lain adalah kerentanan terhadap gangguan pasokan, kurangnya diversifikasi sumber pangan lokal, dan keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan seperti Kota Probolinggo.

2.1.3.10. PERTANAHAN

Urusan pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertanahan mencakup aspek pengaturan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengendalian tanah agar sesuai dengan peruntukannya serta dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pengelolaan pertanahan yang baik dapat mendorong pemerataan akses lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi potensi konflik agraria. Selain itu, pertanahan juga berkaitan erat dengan sektor lain seperti perumahan, infrastruktur, pertanian, dan investasi. Oleh karena itu, tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum hak atas tanah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perencanaan penggunaan lahan yang tepat juga membantu mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan konservasi sumber daya alam.



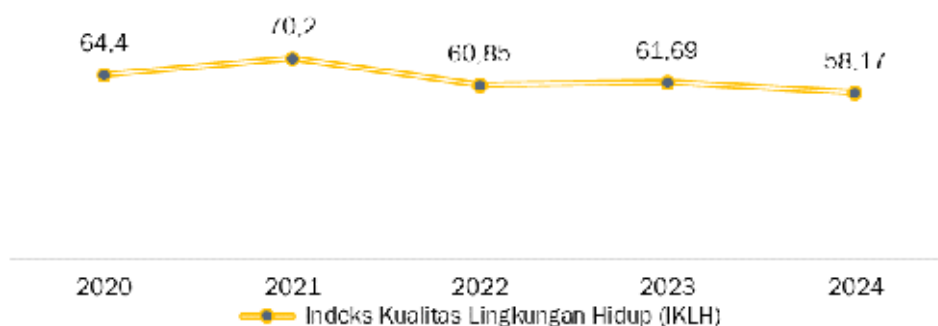
Gambar 2. 44 Capaian Indikator Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo, 2025
Keterangan: (*) Data sementara

Berdasarkan data jumlah tanah yang bersertifikat di Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah tanah bersertifikat tercatat sebanyak 3.454 bidang. Angka ini meningkat menjadi 3.686 bidang pada tahun 2021 dan terus bertambah menjadi 4.186 bidang pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan capaian 4.763 bidang tanah bersertifikat. Jumlah ini kemudian bertahan di angka yang sama, yakni 4.763 bidang, hingga tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui program sertifikasi tanah, yang berkontribusi penting terhadap ketertiban administrasi pertanahan dan peningkatan nilai ekonomi tanah masyarakat.

2.1.3.11. LINGKUNGAN HIDUP

Urusan lingkungan hidup memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan hidup mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pelestarian keanekaragaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sangat dibutuhkan, termasuk melalui program edukasi lingkungan dan gerakan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, lingkungan hidup dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

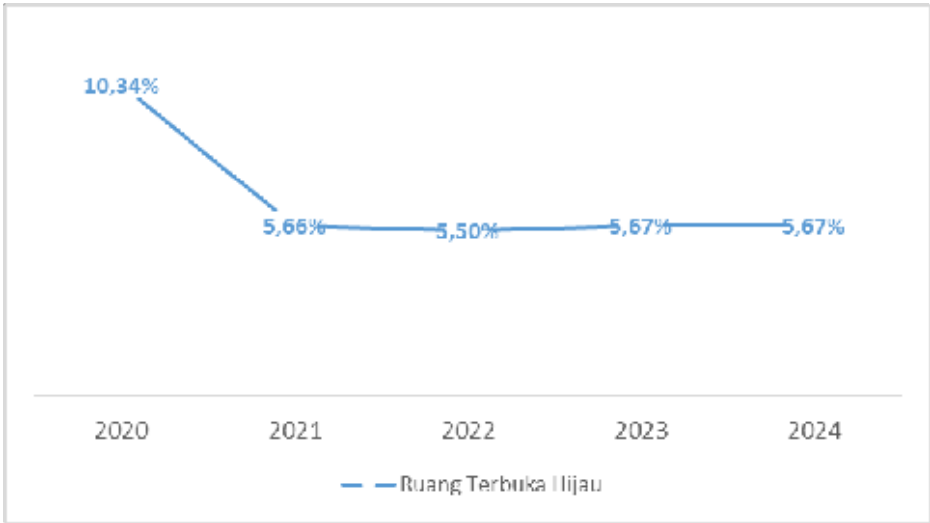


Gambar 2. 45 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Probolinggo menunjukkan fluktuasi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 64,4 dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 mencapai puncaknya di angka 70,2, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan pada tahun tersebut. Namun, mulai tahun 2022, indeks menurun tajam menjadi 60,85 dan hanya mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023 menjadi 61,69. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan skor mencapai titik terendah di angka 58,17. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan polusi, penurunan tutupan lahan hijau, atau kurangnya efektivitas program pelestarian lingkungan. Tren penurunan sejak 2021 menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Probolinggo.



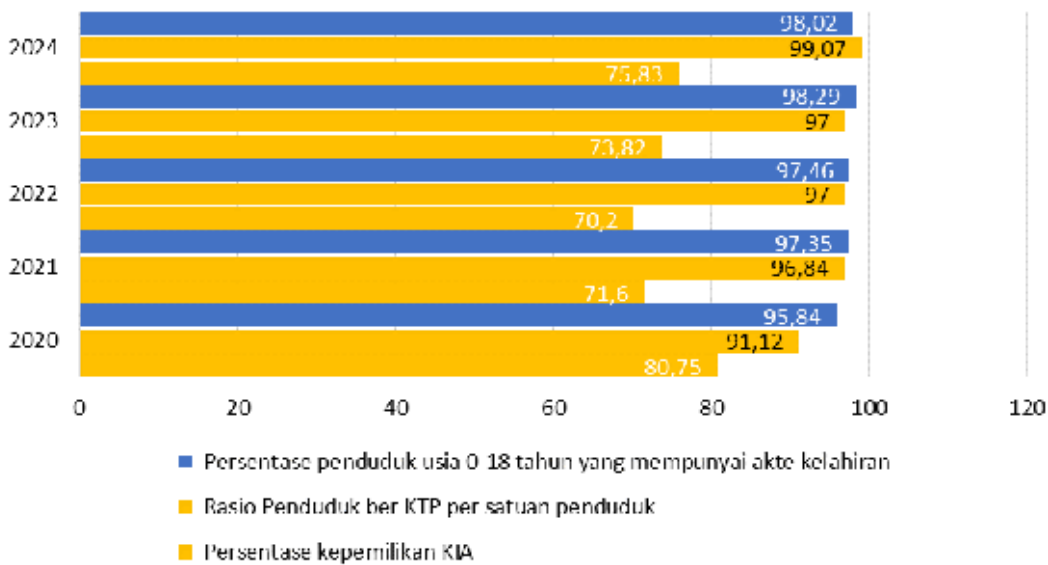
Gambar 2. 46 Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Capaian ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan tajam pada awal periode dan stagnasi di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2020 mencatat persentase tertinggi sebesar 10,34%, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 5,66%. Persentase RTH relatif tidak mengalami perubahan berarti dari tahun 2021 hingga 2024, berkisar antara 5,50% hingga 5,67%. Kondisi ini mencerminkan perlunya kebijakan dan intervensi yang lebih kuat dalam pengembangan ruang terbuka hijau, terutama untuk memenuhi target ideal minimal 30% dari luas wilayah kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH yang memadai tidak hanya mendukung kualitas lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan daya dukung kota terhadap perubahan iklim dan kenyamanan ruang publik.

2.1.3.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan data dan dokumen kependudukan secara akurat, tertib, dan terintegrasi. Urusan ini mencakup berbagai layanan dasar seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan

status kependudukan lainnya, yang menjadi landasan hukum identitas setiap warga negara. Selain itu, administrasi kependudukan juga meliputi penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Pengelolaan data kependudukan yang baik tidak hanya mendukung penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta hak-hak sipil lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. 47 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, 2025

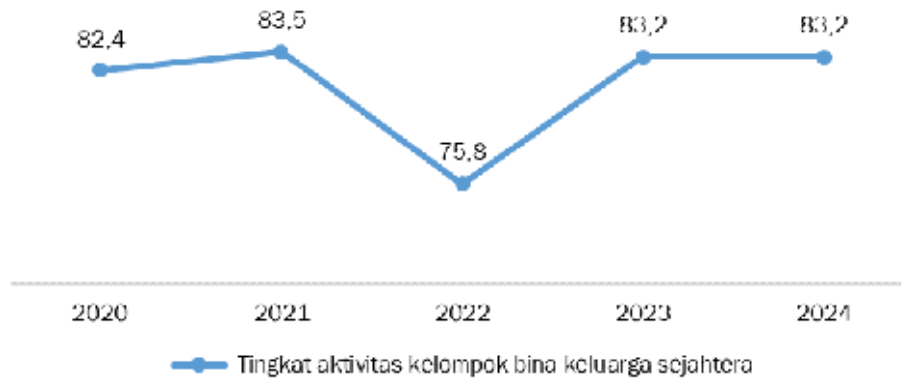
Capaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Probolinggo pada periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan di beberapa aspek. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan signifikan dari 95,84% pada tahun 2020 menjadi 98,29% pada tahun 2024. Rasio penduduk ber-KTP juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 91,12% di tahun 2020 menjadi 99,07% di tahun 2024, mencerminkan keberhasilan program administrasi kependudukan dalam memperluas cakupan kepemilikan KTP. Namun, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, angka kepemilikan KIA mencapai 80,75%, namun menurun menjadi 70,2% di tahun 2021. Setelah itu, terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 75,83% di tahun 2024. Meskipun belum kembali ke capaian awal tahun 2020, tren kenaikan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam meningkatkan kepemilikan KIA di kalangan anak-anak.

2.1.3.13. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan serta peningkatan kualitas hidup



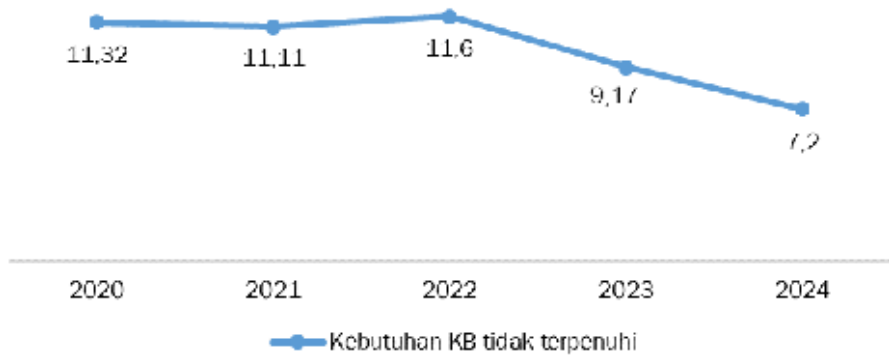
masyarakat. Program ini berfokus pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui berbagai upaya strategis seperti penyuluhan, pelayanan kontrasepsi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Pengendalian penduduk tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan keluarga yang matang. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, dukungan infrastruktur kesehatan, serta sinergi antar lembaga terkait untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2. 48 Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (%) Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data di atas mengenai Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam aktivitas kelompok selama periode tersebut. Pada tahun 2020, tingkat aktivitas kelompok BKS tercatat sebesar 82,4% dan mengalami peningkatan menjadi 83,5% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 75,8%, yang menjadi angka terendah dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, pada tahun 2023 aktivitas kelompok BKS kembali menunjukkan tren positif dengan peningkatan menjadi 83,2%, dan angka tersebut dipertahankan pada tahun 2024.

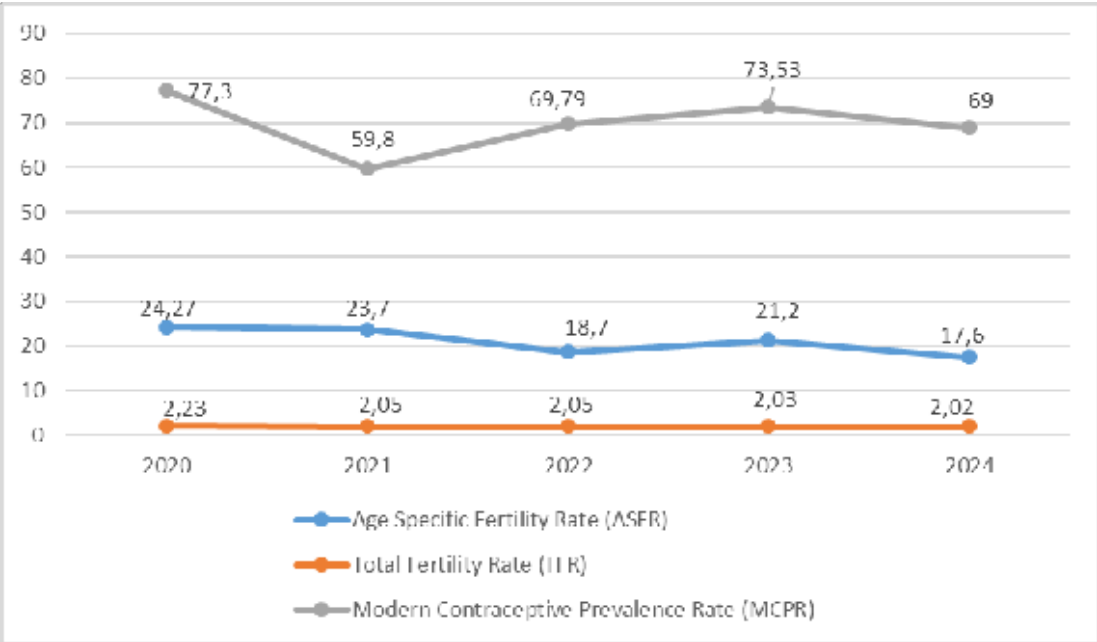
Secara umum, meskipun terdapat beberapa peningkatan, keberlanjutan aktivitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera menunjukkan tren yang tidak stabil, yang dapat mempengaruhi efektivitas program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Probolinggo. Pentingnya BKS tidak hanya sebagai pemberian bantuan materi, tetapi mereka juga sebagai katalisator perubahan sosial. BKS mempromosikan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab dalam masyarakat, membantu mengatasi ketidaksetaraan, dan membangun fondasi yang kokoh untuk keluarga yang kuat dan berdaya. Namun, tantangan masih ada. Keterbatasan sumber daya dan perubahan dalam dinamika sosial seringkali menjadi halangan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas sangatlah penting untuk memastikan kelanjutan dan efektivitas program BKS.



Gambar 2. 49 Unmeet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/Kb Yang Tidak Terpenuhi) (%) Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

Grafik tersebut menyajikan tren Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi) di Kota Probolinggo selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 11,32%, mengalami sedikit penurunan menjadi 11,11% di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 11,6%. Setelah itu, mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 9,17% di tahun 2023 dan terus menurun menjadi 7,2% di tahun 2024. Penurunan Unmet Need ini menunjukkan adanya peningkatan dalam akses dan pemenuhan kebutuhan KB di masyarakat. Hal ini bisa menjadi indikator keberhasilan program keluarga berencana yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dalam memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB. Indikator yang selanjutnya yaitu Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR, grafik terkait data dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. 50 Capaian Kinerja MCPR, TFR Dan ASFR Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

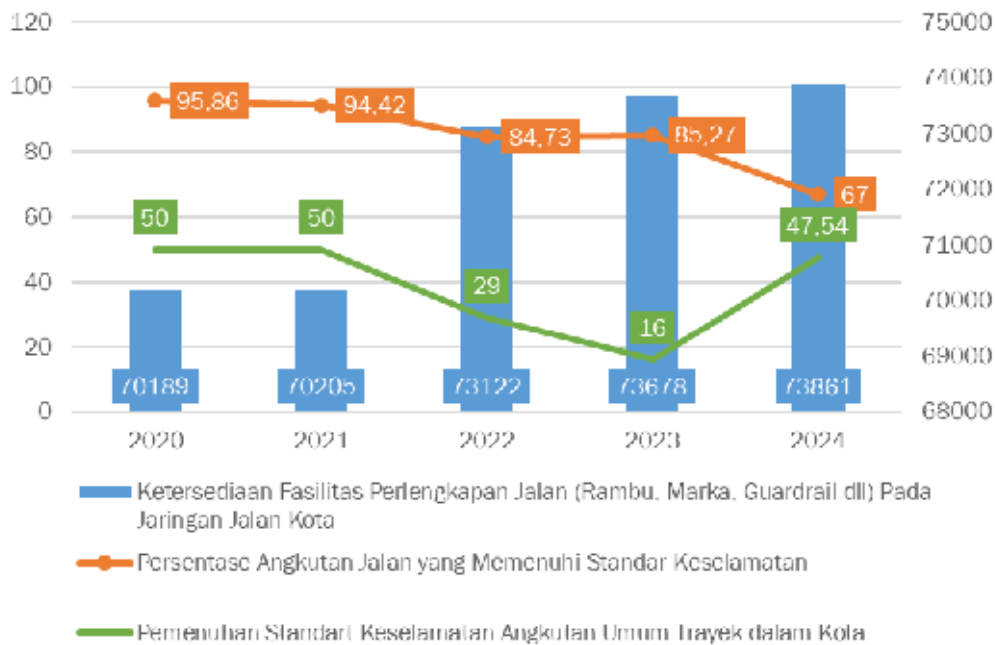
Pada tahun 2020, MCPR di Kota Probolinggo tercatat sebesar 77,3% yang merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 59,8%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan hingga mencapai angka 69,79% dan diikuti peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 73,53%. Hal ini tentunya menunjukkan adanya peningkatan kesertaan masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi modern. Meskipun demikian, di tahun 2024 angka MCPR sedikit menurun menjadi 69%. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam penggunaan kontrasepsi modern di Kota Probolinggo yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perencanaan kehidupan berkeluarga, ketersediaan alat kontrasepsi, sosialisasi program keluarga berencana, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan kontrasepsi modern.

Total Fertility Rate atau Angka Kesuburan Total merupakan indikator demografi yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR di Kota Probolinggo mengalami penurunan tiap tahunnya, pada tahun 2020 capaian TFR sebesar 2,23 dan turun menjadi 2,05 di tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2023, TFR juga mengalami penurunan menjadi 2,03 dan di tahun 2024 turun kembali menjadi 2,02. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran Masyarakat yang mulai peduli terhadap perencanaan kehidupan berkeluarga yang berpengaruh pada kualitas anak, baik dari faktor kesehatan maupun pendidikan.

Sedangkan indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran hidup per 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu dapat dilihat melalui capaian Age Specific Fertility Rate (ASFR). ASFR di Kota Probolinggo pada tahun 2020 mencapai 24,27 dan turun di tahun 2021 mencapai 23,7 hingga 18,7 di tahun 2022. Pada tahun 2023 ASFR kembali naik hingga 21,2, namun mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 17,6. Capaian ASFR yang baik ini diindikasikan karena berkurangnya angka pernikahan dini dan kehamilan di usia muda serta adanya peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan di Kota Probolinggo.

2.1.3.14. PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan memegang peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses ke berbagai layanan, serta mengurangi waktu dan biaya perjalanan. Di Kota Probolinggo, pengelolaan urusan perhubungan meliputi pengembangan infrastruktur jalan, optimalisasi transportasi umum, pengaturan lalu lintas, dan peningkatan keselamatan lalu lintas. Selain itu, upaya untuk mengurangi kemacetan, mengembangkan fasilitas transportasi ramah lingkungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi menjadi fokus utama. Kinerja urusan perhubungan sebagai gambaran kondisi transportasi di Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif baik.



Gambar 2. 51 Capaian Indikator Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, 2025

Pada periode 2020-2024, ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Probolinggo, seperti rambu, marka, dan guardrail, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Jumlah fasilitas tersebut bertambah dari 70.189 unit pada tahun 2020 menjadi 73.861 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan untuk mendukung keselamatan berlalu lintas. Namun, meskipun terjadi peningkatan fasilitas, persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan justru mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase ini berada di angka 95,86%, namun turun menjadi 84,73% di tahun 2022 sebelum sedikit membaik menjadi 85,27% di tahun 2023. Di sisi lain, pemenuhan standar keselamatan angkutan umum trayek dalam kota menunjukkan penurunan signifikan dari 50% pada tahun 2020 dan 2021 menjadi hanya 16% di tahun 2023. Meski begitu, ada sedikit perbaikan di tahun 2024 dengan peningkatan pemenuhan standar menjadi 47,54%. Data ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan belum cukup untuk menjamin keselamatan lalu lintas secara menyeluruh. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik infrastruktur, tapi juga mencakup pengawasan, peremajaan armada, dan peningkatan kompetensi pengemudi serta penegakan regulasi.

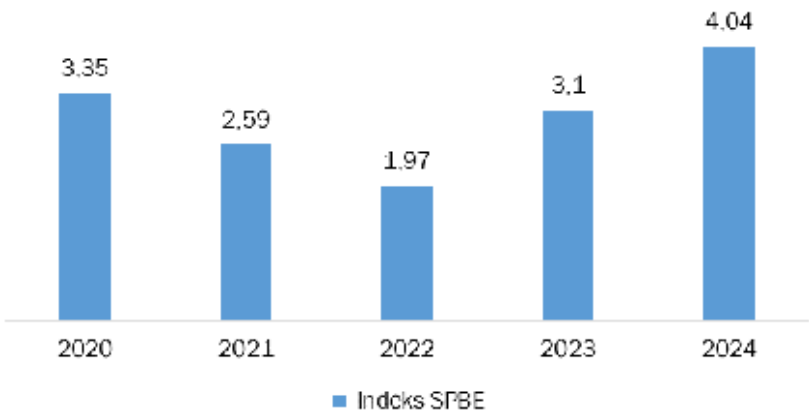
Salah satu langkah penting dalam mendukung implementasi berkelanjutan adalah penyediaan transportasi umum yang layak, aman, dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk membangun Gedung UPT PKB Kota Probolinggo yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Capaian kinerja urusan perhubungan Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan yang pesat. Pada tahun 2020, jumlah penumpang tercatat sebanyak 430.093 orang dan terus meningkat hingga mencapai

puncaknya di tahun 2023 dengan 1.581.895 penumpang, meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 menjadi 1.428.439 penumpang. Tren ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan transportasi. Kedua, indikator ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jaringan jalan kota menunjukkan tren positif. Jumlah fasilitas seperti rambu, marka, dan guardrail mengalami peningkatan dari 70.189 unit pada tahun 2020 menjadi 73.861 unit di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan yang lebih aman dan memadai bagi pengguna jalan, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan. Ketiga, pemenuhan standar keselamatan angkutan umum trayek dalam kota menjadi perhatian penting meskipun mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020 dan 2021, indikator ini berada di angka 50 unit, namun menurun drastis menjadi 16 unit di tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 32 unit. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan angkutan umum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui revitalisasi armada, peningkatan pengujian kendaraan serta pembinaan dan pengawasan terhadap operator angkutan demi menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang.

2.1.3.15. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan percepatan arus informasi di berbagai sektor pemerintahan maupun masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong pemerintah untuk terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi. Dengan pengembangan yang terarah dalam sektor komunikasi dan informatika, diharapkan tercipta konektivitas yang kuat, masyarakat yang melek teknologi, dan layanan publik yang lebih efisien dan responsif.

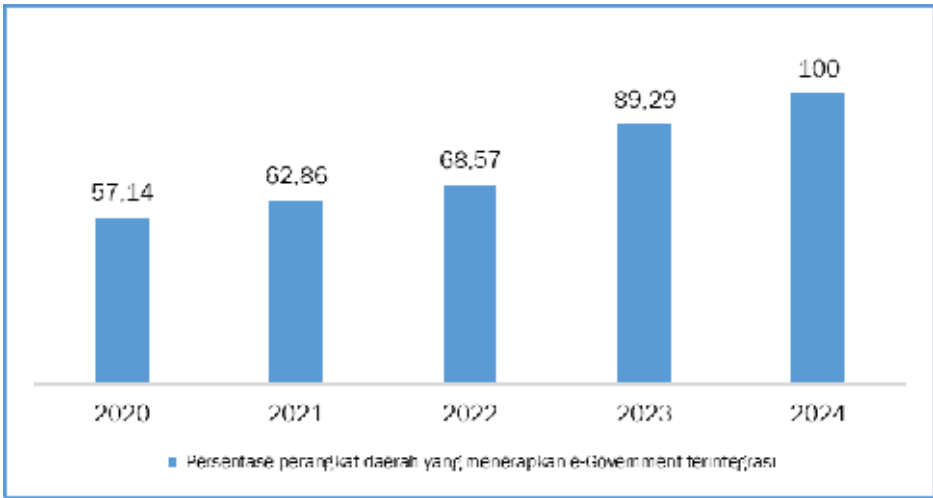


Gambar 2. 52 Indeks SPBE Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data terkait Indeks SPBE Kota Probolinggo tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat penerapan e-Government oleh perangkat daerah. Pada tahun 2020, capaian indeks tercatat sebesar 3,35, namun mengalami penurunan



berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 2,59 dan 1,97. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan transformasi digital, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya integrasi sistem antar perangkat daerah, serta belum optimalnya kompetensi aparatur sipil negara dalam mengoperasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, mulai tahun 2023, Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan upaya serius untuk membalikkan tren tersebut. Indeks meningkat menjadi 3,1 dan melonjak lebih tinggi lagi pada tahun 2024 hingga mencapai angka 4,04. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai langkah strategis, seperti penguatan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital bagi ASN, pengembangan layanan publik berbasis aplikasi, serta evaluasi dan pembenahan tata kelola sistem SPBE secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mulai berjalan secara sistematis dan berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan publik.



Gambar 2. 53 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan E-Government Terintegrasi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Pemerintahan elektronik atau e-government, yang juga dikenal sebagai e-gov, merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, serta berbagai aspek terkait pemerintahan. Persentase perangkat daerah di Kota Probolinggo yang menerapkan e-Government menunjukkan tren peningkatan signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, sebesar 57,14% perangkat daerah telah mengadopsi sistem e-Government. Angka ini terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya, mencapai 62,86% pada 2021 dan 68,57% pada 2022, mencerminkan adanya komitmen untuk memperluas digitalisasi layanan pemerintahan. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan persentase mencapai 89,29%, menunjukkan upaya akselerasi dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Akhirnya, pada tahun 2024, capaian optimal berhasil diraih dengan seluruh perangkat daerah (100%) telah menerapkan sistem e-Government. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan strategi transformasi digital Pemerintah Kota Probolinggo dalam



mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar 2. 54 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024

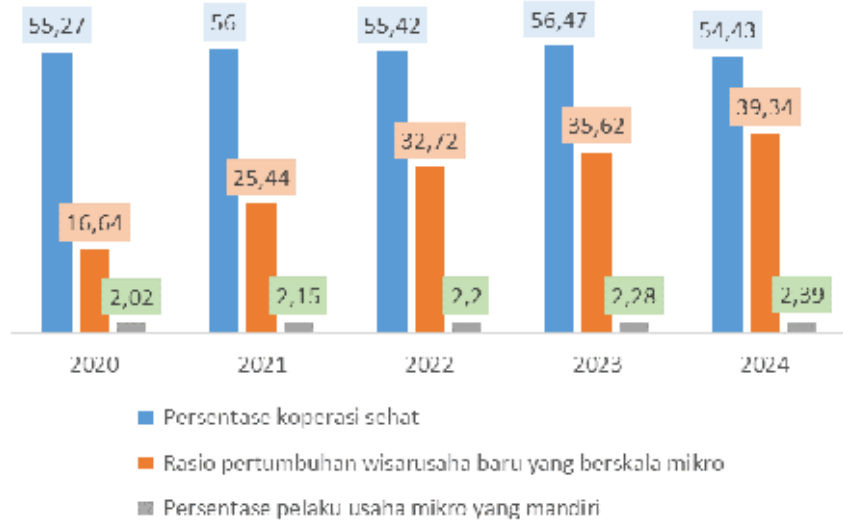
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Sebagai Indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan Kominfo, penghitungan indikator Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar disesuaikan menjadi Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya untuk memastikan bahwa Badan Publik yang meliputi perangkat daerah dan lembaga/unit teknis dibawahnya telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital pemerintahan.

2.1.3.16. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

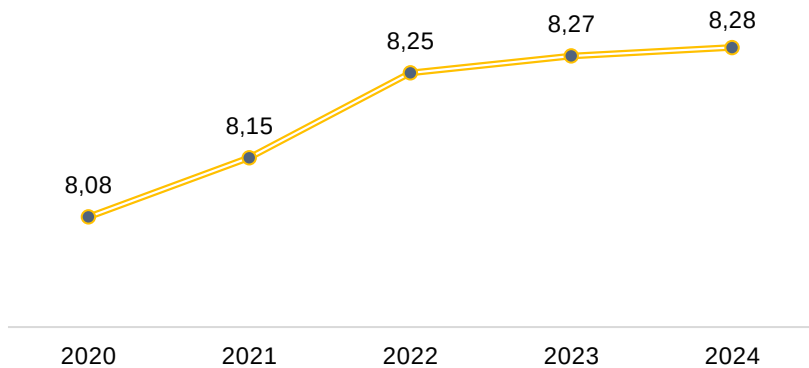
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non-dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Probolinggo. Dinas ini memiliki peran penting mencakup pelayanan perizinan usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi. Selain itu, dinas juga menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi.

Kinerja dari urusan ini dapat diukur melalui berbagai indikator capaian yang mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan. Indikator tersebut mencakup aspek pelayanan perizinan, pengawasan koperasi, peningkatan kapasitas UMKM, hingga tingkat keberhasilan pemberdayaan pelaku usaha di Kota Probolinggo.



Gambar 2. 55 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Probolinggo selama periode 2020-2024, terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan di beberapa aspek. Persentase koperasi sehat menunjukkan tren stabil dengan sedikit penurunan pada tahun terakhir, mencerminkan masih perlu adanya upaya yang konsisten dalam menjaga kesehatan dan kualitas koperasi di daerah ini. Sementara itu, rasio pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro mengalami peningkatan yang cukup signifikan sepanjang periode tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya dorongan kuat terhadap pelaku usaha mikro untuk memulai usaha baru, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh program pemberdayaan UMKM dan kemudahan akses permodalan. Di sisi lain, persentase pelaku usaha mikro yang mandiri juga menunjukkan tren positif, meskipun kenaikannya relatif lebih lambat dibandingkan indikator lainnya.



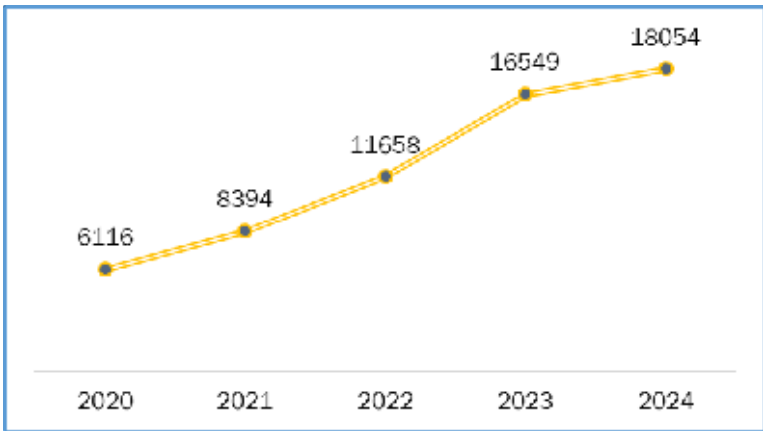
Gambar 2. 56 Rasio Kewirausahaan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Kota Probolinggo, 2025

Sejalan dengan rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, rasio kewirausahaan mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2020 sebesar 8,08% sampai tahun 2024 sebesar 8,28%. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Probolinggo, meskipun masih

terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing pelaku usaha kecil dan mikro.

2.1.3.17. PENANAMAN MODAL

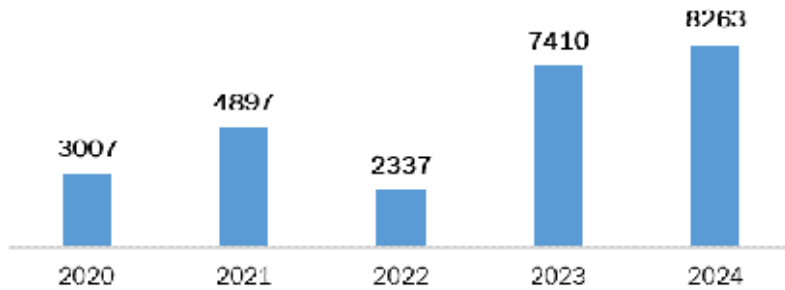
Urusan penanaman modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dari berbagai sektor. Investasi yang masuk diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah. Meski demikian, tantangan seperti persaingan antar daerah, keterbatasan infrastruktur, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM menjadi perhatian yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan investasi yang optimal dan berkelanjutan di Kota Probolinggo. Untuk memperdalam analisis terkait capaian urusan Penanaman Modal, terdapat indikator yang ditampilkan mencakup jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam satuan miliar rupiah, jumlah penerbitan perizinan dan non-perizinan penanaman modal, serta persentase pertumbuhan nilai investasi dari tahun ke tahun. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan investasi di Kota Probolinggo.



Gambar 2. 57 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp Dalam Miliar) Berdasarkan Data LKPM Dan NIB Tahun 2020-2024

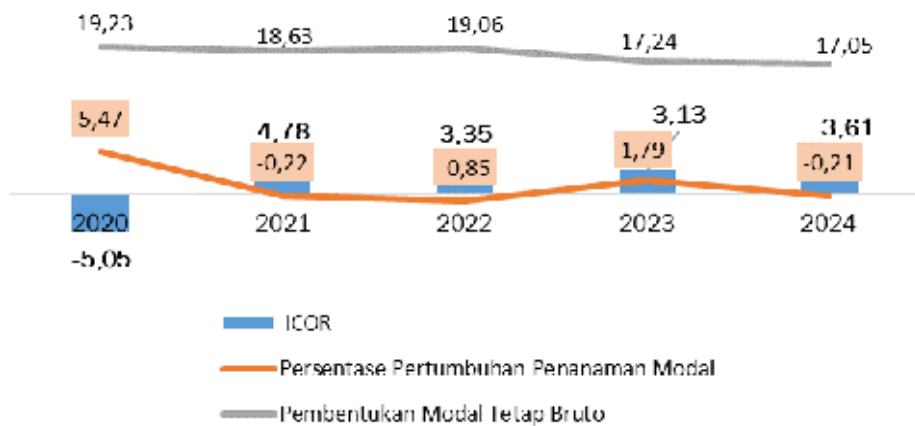
Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan Jumlah Nilai Investasi di Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan yang lumayan stabil selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pertumbuhan nilai investasi menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan investor, baik asing maupun domestik, terhadap iklim investasi di kota ini. Lonjakan terbesar terjadi menjelang tahun terakhir yang dicatat, mengindikasikan bahwa adanya pengembangan infrastruktur yang memadai dan kemudahan akses informasi terkait peluang penanaman modal. Selain itu, upaya promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan sedang diinisiasi penyusunan perda penanaman modal di juga menjadi pendorong utama tumbuhnya minat investor.



Gambar 2. 58 Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

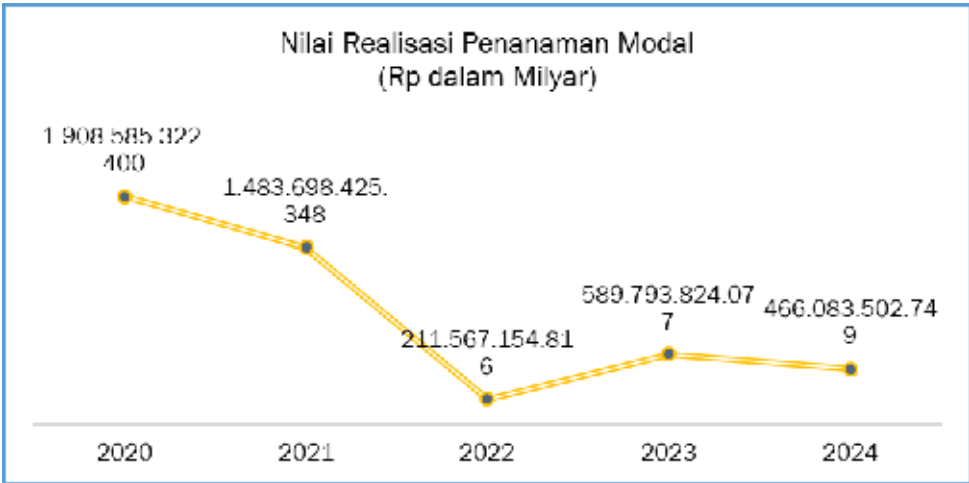
Berdasarkan grafik penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mengalami peningkatan di tahun kedua, jumlah penerbitan perizinan sempat menurun di tahun berikutnya. Namun, tren ini berubah drastis pada tahun terakhir yang dicatat, di mana terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah izin yang diterbitkan, mencapai angka tertinggi sepanjang periode tersebut. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, dinamika ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.



Gambar 2. 59 ICOR Dan Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas pertumbuhan penanaman modal secara persentase menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan positif tertinggi sebesar 5,47% pada tahun 2020 dan pertumbuhan negatif terdalam sebesar -0,85% pada tahun 2022. Sementara itu, nilai ICOR juga menunjukkan tren yang bervariasi, mencerminkan efisiensi investasi yang belum stabil dari tahun ke tahun. Fluktuasi pertumbuhan penanaman modal di Kota Probolinggo dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong di antaranya adalah adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi dan mempermudah perizinan berusaha, serta promosi potensi investasi daerah yang mulai diperluas melalui berbagai kanal. Namun demikian, faktor penghambatnya meliputi belum

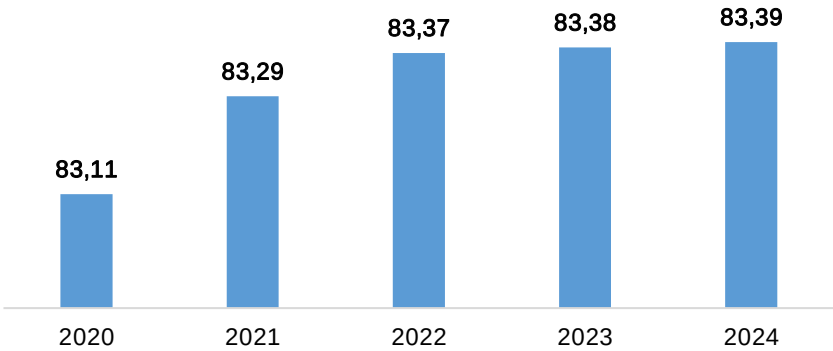
stabilnya kondisi makro ekonomi pasca pandemi COVID-19, rendahnya daya saing iklim investasi lokal, serta minimnya insentif yang menarik bagi investor. Rendahnya efisiensi investasi yang tergambar melalui tingginya nilai ICOR di beberapa tahun juga menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum menghasilkan output ekonomi yang optimal.



Gambar 2. 60 Nilai Realisasi Penanaman Modal
Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik nilai realisasi penanaman modal menunjukkan penurunan tajam pada nilai realisasi penanaman modal, dari Rp1,9 triliun lebih pada tahun 2020 menjadi hanya Rp211 miliar pada tahun 2022. Meski sempat naik menjadi Rp589 miliar di tahun 2023, nilai tersebut kembali turun menjadi Rp466 miliar pada tahun 2024. Tren ini menandakan adanya tantangan besar dalam mempertahankan minat investasi di Kota Probolinggo, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, daya tarik daerah, atau efektivitas kebijakan investasi daerah. Faktor pendorong seperti ketersediaan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta potensi sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan perikanan sebenarnya cukup menjanjikan. Namun, penghambat utamanya adalah keterbatasan promosi investasi yang terarah, keterbatasan data dan informasi investasi yang transparan, serta rendahnya koordinasi lintas sektor dalam mendorong realisasi investasi. Di sisi lain, meningkatnya kembali nilai investasi di tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam kepercayaan investor, meskipun belum berkelanjutan di tahun 2024.



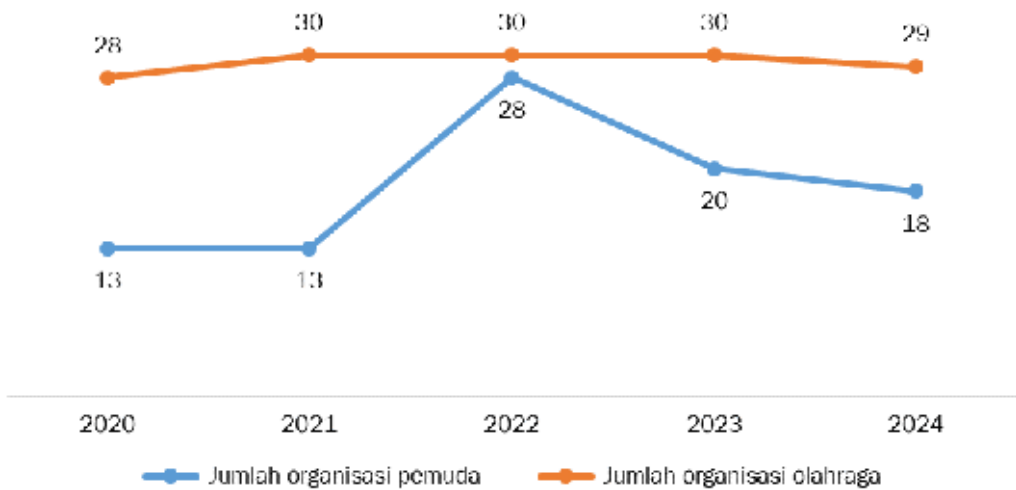
Gambar 2. 61 Indeks Kepuasan Masyarakat (IkM) Pada DPMPSTP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP memperlihatkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo justru mengalami peningkatan. Nilai IKM meningkat dari 83,11 pada tahun 2020 menjadi 83,39 pada tahun 2024. Ini mencerminkan bahwa meskipun tantangan investasi cukup besar, pelayanan publik di sektor ini tetap dijaga kualitasnya dan mampu memberikan kepuasan yang stabil bagi masyarakat. Faktor pendorongnya meliputi digitalisasi layanan perizinan melalui aplikasi atau sistem online, peningkatan kapasitas SDM pelayanan, serta penerapan standar pelayanan publik yang semakin baik. Namun, tantangan atau penghambatnya terletak pada belum meratanya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap prosedur layanan, keterbatasan literasi digital, serta kemungkinan masih adanya birokrasi yang belum sepenuhnya responsif. Meski demikian, DPMPTSP berhasil mempertahankan kepercayaan publik melalui peningkatan pelayanan yang berkelanjutan.

2.1.3.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

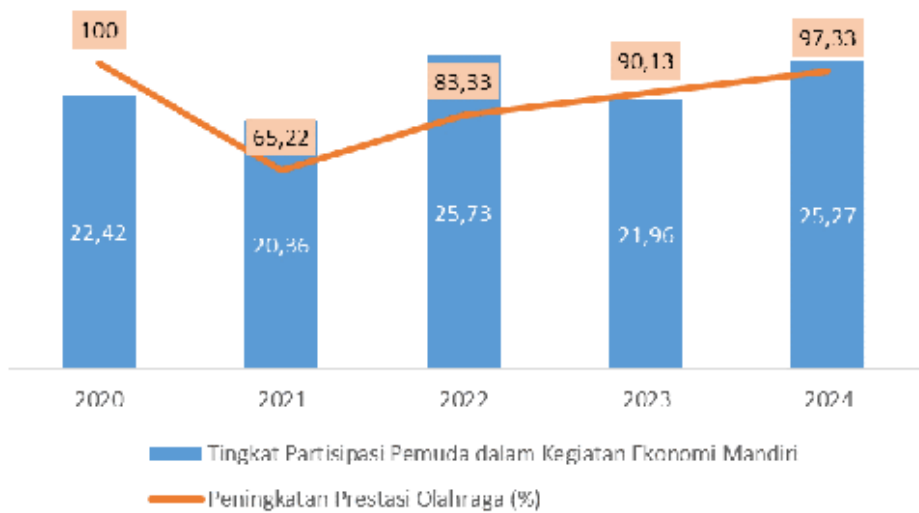
Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, serta mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif. Pemerintah Kota Probolinggo melalui dinas terkait terus berupaya mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang, seperti kepemimpinan, kewirausahaan, dan kreativitas. Berdasarkan uraian di atas, urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Probolinggo diampu oleh Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo yang diinterpretasikan melalui grafik berikut:



Gambar 2. 62 Jumlah Organisasi Pemuda Dan Olahraga Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data mengenai jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang menarik antara kedua jenis organisasi tersebut. Jumlah organisasi olahraga menunjukkan kestabilan yang cukup konsisten sepanjang tahun, tanpa mengalami fluktuasi berarti. Sementara itu, jumlah

organisasi pemuda mengalami perkembangan yang lebih dinamis. Awalnya cenderung stagnan, kemudian mencapai puncak tertingginya di pertengahan periode sebelum akhirnya mengalami penurunan di tahun berikutnya. Peningkatan yang signifikan pada periode tertentu kemungkinan dipengaruhi oleh dorongan program pemberdayaan pemuda, kemudahan pendirian organisasi, serta meningkatnya minat generasi muda untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.



Gambar 2. 63 Capaian Indikator Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Capaian indikator kepemudaan dan olahraga di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang cukup dinamis selama periode 2020–2024. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, dari 22,42% menjadi 20,36%, sebelum meningkat kembali pada 2022 dan relatif stabil hingga 2024. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan sosial dan kegiatan akibat pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak pemuda. Namun, peningkatan partisipasi di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa kegiatan kepemudaan mulai pulih dan didorong oleh program-program pemberdayaan pemuda yang semakin variatif dan inklusif.

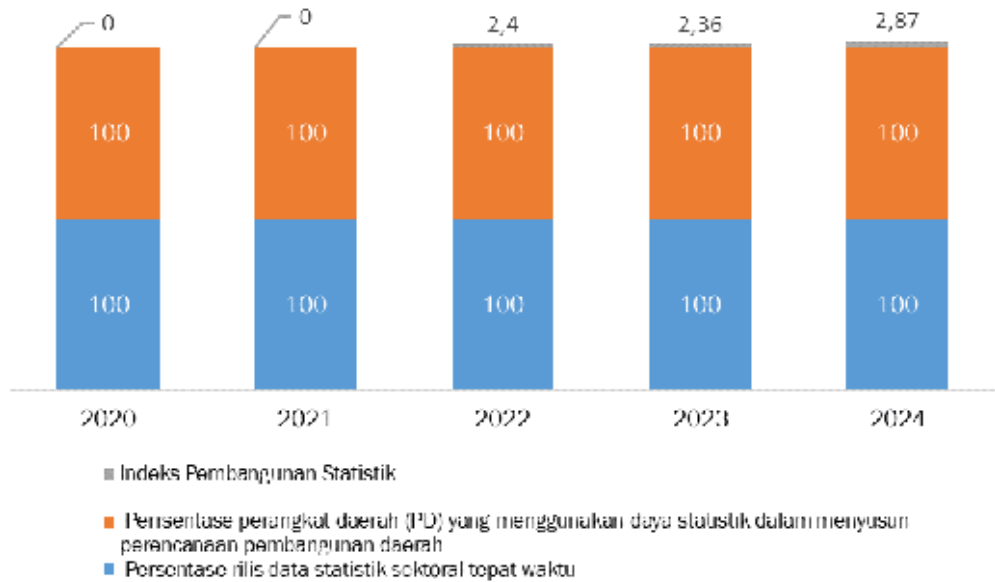
Sementara itu, peningkatan prestasi olahraga mengalami tren menurun dari 100% pada tahun 2020 menjadi 65,22% di 2021, namun terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 97,33% pada tahun 2024. Penurunan di awal masa pandemi mencerminkan terbatasnya kompetisi olahraga yang diselenggarakan, serta minimnya pelatihan dan pembinaan atlet. Adapun faktor pendorong utama perbaikan prestasi olahraga di tahun-tahun berikutnya meliputi penguatan pembinaan atlet muda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, serta dukungan pendanaan yang lebih baik.

2.1.3.19. STATISTIK

Urusan statistik memegang peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkup pemerintahan. Di Kota Probolinggo, pengelolaan urusan statistik diarahkan untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan relevan guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kegiatan statistik meliputi



pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan demografi. Melalui pengelolaan statistik yang optimal, diharapkan pemerintah Kota Probolinggo dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data yang berkualitas juga menjadi fondasi penting dalam mengidentifikasi isu strategis serta merancang program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Berikut merupakan capaian kinerja urusan statistik di Kota Probolinggo:



Gambar 2. 64 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

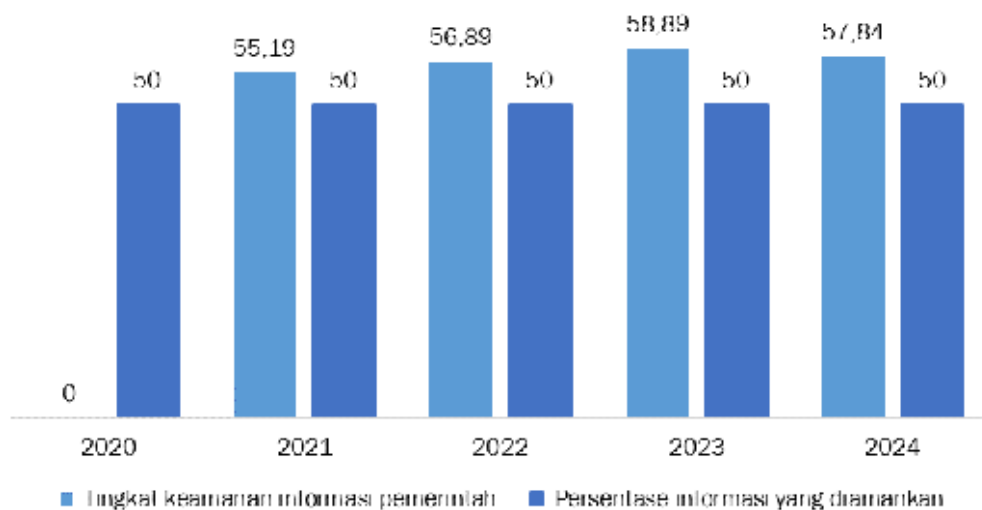
Berdasarkan grafik yang ditampilkan, indikator capaian yang mencerminkan kinerja urusan statistik di Kota Probolinggo menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan pencapaian maksimal sebesar 100%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam penerbitan dan pemanfaatan data statistik yang telah berjalan sesuai target. Namun, di balik capaian optimal tersebut, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan sistem satu data di Kota Probolinggo yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, meskipun capaian indikator kinerja statistik sudah maksimal, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem satu data melalui peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kolaborasi antar lembaga. Dengan demikian, diharapkan Kota Probolinggo dapat mengelola data statistik secara lebih efektif dan efisien demi mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

Capaian Indeks Pembangunan Statistik Kota Probolinggo cenderung fluktuatif dari Tahun 2022-2024. Perhitungan Indeks ini baru dilakukan pada Tahun 2022 bekerjasama dengan BPS Kota Probolinggo. Capaian pada Tahun 2022 sebesar 2,4 dengan kategori cukup, dan meningkat menjadi 2,87 pada Tahun 2024 dengan kategori baik.



2.1.3.20. PERSANDIAN

Urusan persandian di Kota Probolinggo memegang peranan penting dalam menjaga keamanan informasi dan data pemerintah daerah. Persandian berfungsi sebagai sistem perlindungan komunikasi dan data agar terhindar dari potensi kebocoran, penyalahgunaan, maupun serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas informasi pemerintahan. Kinerja urusan ini terlihat dari seberapa efektif upaya pengamanan sistem informasi pemerintah, termasuk pengelolaan sertifikat elektronik, implementasi tanda tangan digital, dan penerapan sistem enkripsi untuk melindungi dokumen-dokumen strategis. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan meningkatnya ancaman siber menuntut adanya inovasi dan pembaruan sistem keamanan secara berkala. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan persandian, peningkatan infrastruktur keamanan informasi, serta sosialisasi yang lebih masif tentang pentingnya perlindungan data. Dengan pengelolaan persandian yang lebih optimal, Kota Probolinggo dapat memastikan keamanan data pemerintahan terjaga dengan baik, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih aman dan terpercaya. Kinerja urusan persandian Kota Probolinggo direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar 2. 65 Capaian Indikator Urusan Persandian Tahun 2020-2024

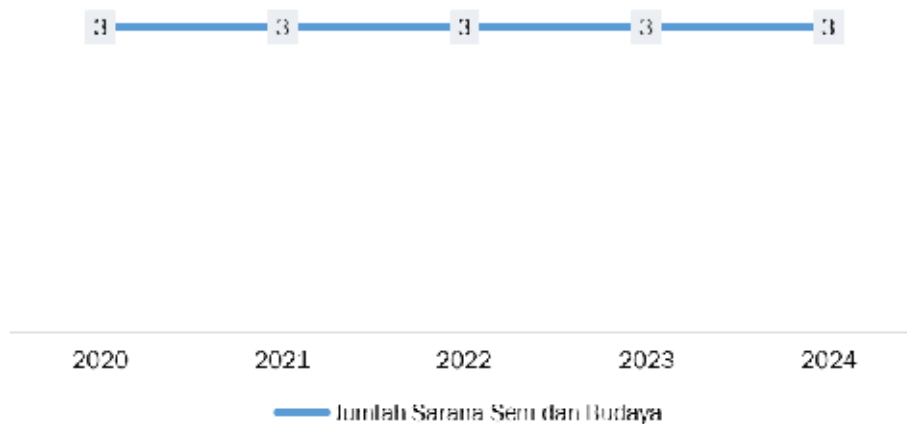
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas, tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam memperkuat sistem keamanan data, baik melalui peningkatan infrastruktur maupun penguatan kebijakan keamanan siber. Puncak capaian tertinggi terlihat pada tahun terakhir dalam grafik, menunjukkan keberhasilan strategi yang diterapkan untuk melindungi informasi pemerintahan. Sementara itu, persentase informasi yang diamankan cenderung stagnan selama periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem keamanan terus diperkuat, cakupan data yang berhasil diamankan belum mengalami perkembangan signifikan.



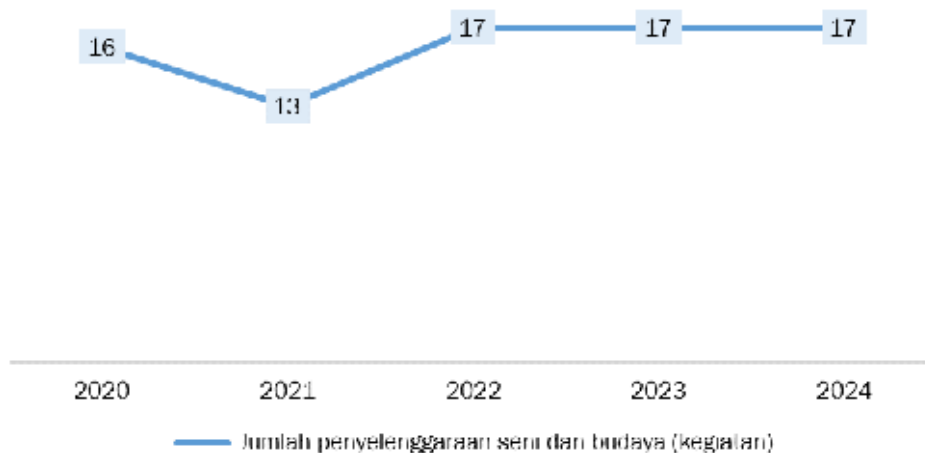
2.1.3.21. KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan memiliki peran penting dalam melestarikan identitas dan warisan lokal, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai tradisi. Pelaksanaan program kebudayaan di Kota Probolinggo difokuskan pada pelestarian seni dan budaya daerah, pengembangan kreativitas pelaku seni, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya yang melibatkan komunitas lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi program kebudayaan yang lebih menarik bagi generasi muda dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kekayaan budaya Kota Probolinggo tetap lestari dan berkembang seiring waktu.



Gambar 2. 66 Jumlah Sarana Seni Dan Budaya (Unit) Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

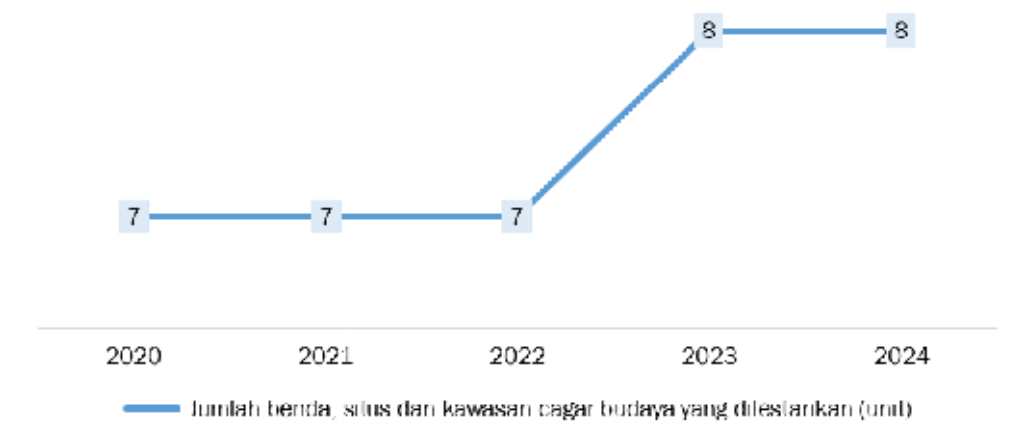
Berdasarkan data mengenai jumlah sarana seni dan budaya di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah fasilitas tersebut cenderung stagnan tanpa adanya peningkatan maupun penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, belum ada penambahan sarana baru yang dapat mendukung pengembangan aktivitas seni dan budaya di kota ini. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai, potensi sektor kebudayaan di Kota Probolinggo dapat berkembang lebih optimal di masa depan.



Gambar 2. 67 Jumlah Penyelenggara Seni Dan Budaya (Kegiatan) Tahun 2020-2024
Sumber Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

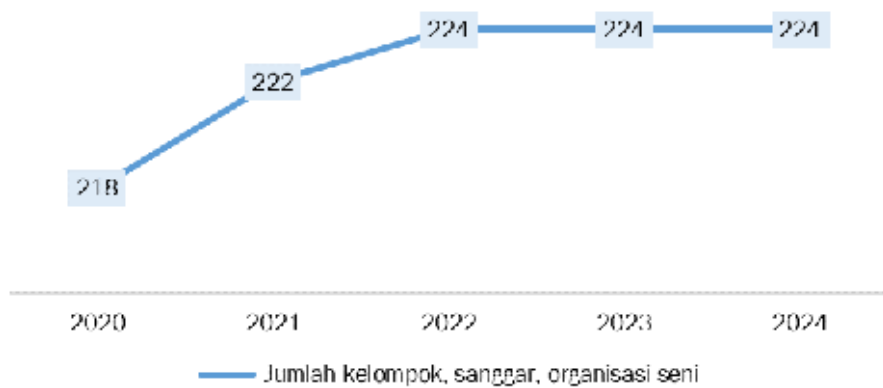


Berdasarkan data terkait jumlah penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada awal periode, jumlah kegiatan sempat mengalami penurunan. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, mencerminkan adanya upaya pemulihan dan dorongan untuk kembali menghidupkan kegiatan seni dan budaya. Kestabilan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penyelenggaraan program seni dan budaya, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya masih perlu terus diatasi guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang.



Gambar 2. 68 Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Unit)
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

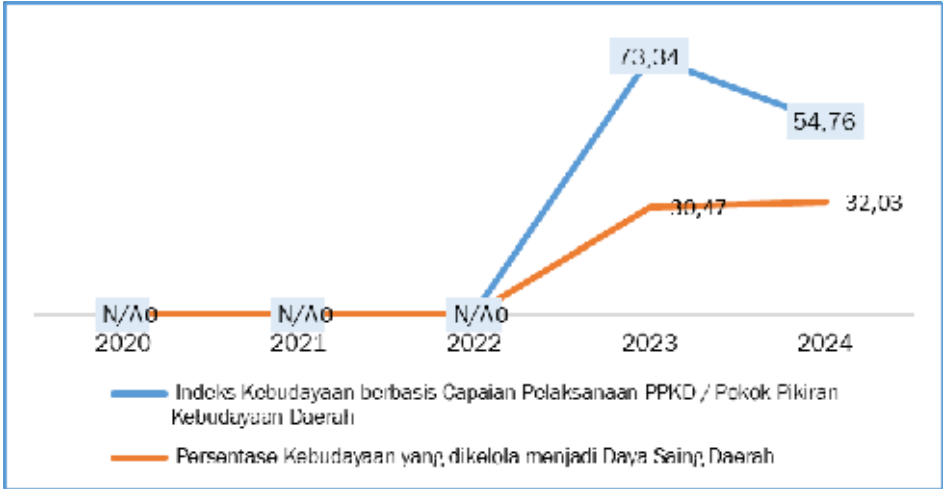
Grafik di atas menyajikan mengenai jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang relatif stabil di awal periode, sebelum akhirnya mengalami peningkatan. Selama beberapa tahun pertama, jumlah cagar budaya yang dilestarikan tidak mengalami perubahan signifikan, namun pada tahun berikutnya, terdapat peningkatan yang mencerminkan adanya upaya lebih serius dalam pelestarian warisan budaya. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya lokal serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam pelestarian cagar budaya.



Gambar 2. 69 Jumlah Kelompok, Sanggar, Organisasi Seni Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025



Jumlah kelompok, sanggar, dan organisasi seni di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan pada awal periode dan kemudian stabil pada angka tertentu. Pada tahun 2020, jumlah kelompok seni tercatat sebanyak 218, yang kemudian meningkat menjadi 222 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan jumlah mencapai 224 kelompok, dan angka tersebut tetap stabil hingga tahun 2024. Stabilitasnya jumlah kelompok seni selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya upaya pelestarian dan penguatan komunitas seni yang dilakukan secara konsisten. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan seni dan budaya lokal, sekaligus menjadi indikator keberlanjutan kegiatan seni yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi di tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2. 70 Indeks Kebudayaan Berbasis Capaian Pelaksanaan Ppkd / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Serta Persentase Kebudayaan Yang Dikelola Menjadi Daya Saing Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

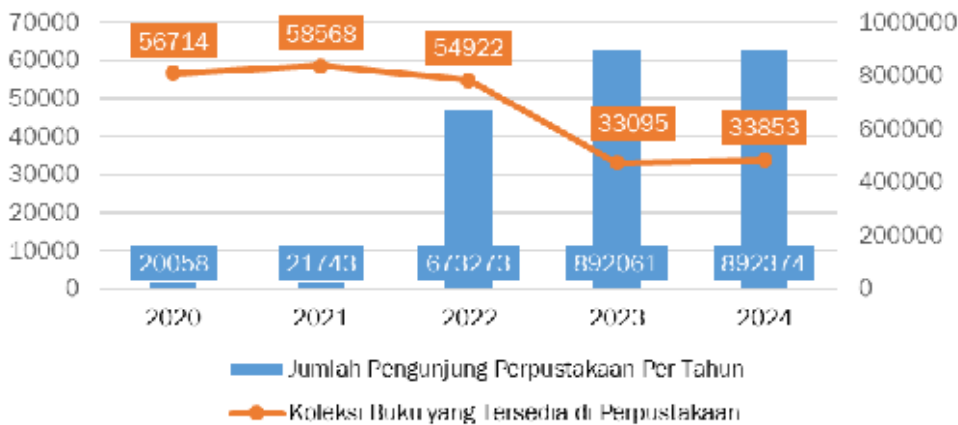
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020 hingga 2022 belum terdapat data (N/A) yang tercatat, belum dilakukan penilaian atas indikator dimaksud. Hal ini disebabkan karena penilaian evaluasi terhadap capaian PPKD di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur baru mulai dilakukan pada tahun 2022 dan hanya mencakup 10 kabupaten/kota. Penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur baru mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024 menjadi 54,76. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan prioritas kebijakan, keterbatasan anggaran pada sektor kebudayaan, serta tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem kebudayaan yang lebih terstruktur dan terukur melalui mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

2.1.3.22. PERPUSTAKAAN

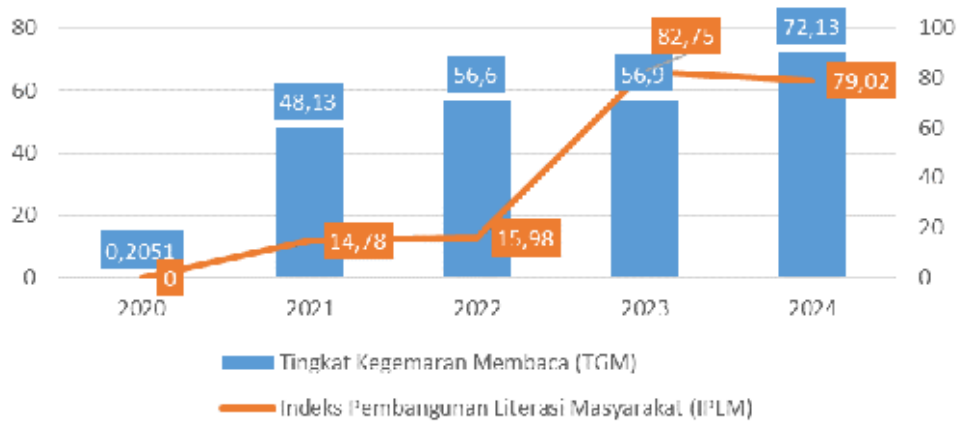
Urusan perpustakaan memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat. Minat baca masyarakat merupakan gambaran dari masa depan bangsa. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi kualitas

bangsa, karena tanpa kebiasaan membaca, masyarakat sulit mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan ketertinggalan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat minat baca masyarakat adalah jumlah pengunjung perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan modern kini dilengkapi dengan fasilitas digital dan layanan berbasis teknologi untuk memudahkan akses informasi secara lebih luas.



Gambar 2. 71 Jumlah Pengunjung Dan Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024 memiliki capaian yang fluktuatif. Jumlah pengunjung mengalami kenaikan secara perlahan hingga mencapai puncaknya di salah satu tahun dalam periode tersebut. Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan minat baca masyarakat dan berbagai program literasi yang diadakan oleh perpustakaan. Namun, setelah mencapai puncaknya, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah pengunjung di tahun 2023. Di sisi lain, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan cenderung stabil pada awal periode, namun mengalami penurunan tajam di tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan masih minimnya diversifikasi koleksi perpustakaan serta adanya perkembangan teknologi membuat adanya perubahan cara koleksi buku yang dikelola. Sehingga perpustakaan perlu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. 72 Capaian Indikator TGM Dan IPLM Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Probolinggo menunjukkan pola fluktuatif sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TGM tercatat sangat rendah sebesar 0,2051, sementara IPLM tidak menunjukkan capaian (0). Namun, pada 2021, terjadi peningkatan signifikan di mana TGM naik menjadi 48,13 dan IPLM mencapai 14,78. Tren positif berlanjut pada 2022 dengan kenaikan TGM menjadi 56,6 dan IPLM menjadi 15,98. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2024, TGM meningkat tajam menjadi 72,13, meski IPLM sedikit turun ke 79,02.

Peningkatan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, seperti penguatan program literasi yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan digital dan fisik, serta pelaksanaan berbagai kegiatan promosi budaya baca di masyarakat. Selain itu juga terdapat Faktor internal (kesadaran diri sendiri) meliputi minat ingin tahu, motivasi membaca di perpustakaan, serta kebutuhan buku untuk kegiatan mata pelajaran sekolah yang juga mempengaruhi capaian peningkatan Tingkat Gemar Membaca (TGM). Namun, capaian yang sempat fluktuatif juga dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, antara lain : *Faktor internal* yang meliputi kurangnya minat dan motivasi, kesulitan memahami bacaan, dan kurang fokus, rendahnya kesadaran literasi di sebagian kalangan masyarakat, serta *Faktor eksternal* yang meliputi akses bacaan kurang (keterbatasan infrastruktur perpustakaan di beberapa wilayah), dominasi media sosial dan hiburan, dan kurangnya literasi.

Sedangkan terkait dengan IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat), faktor pendorong peningkatan kinerja indikator ini yaitu : ketersediaan akses literasi (jumlah, koleksi, akses internet, taman baca), kualitas SDM Perpustakaan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat belum optimalnya capaian IPLM, khususnya penurunan dari Tahun 2023 ke 2024 yaitu : keterbatasan akses literasi (kurangnya taman baca / sudut baca), budaya literasi belum mengakar pada masyarakat, rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Secara umum, upaya berkelanjutan dan adaptasi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga tren peningkatan literasi di Kota Probolinggo.

Untuk indikator taman baca yang dibina dimana tahun 2021 Kota Probolinggo memiliki 1 taman baca yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 18 Probolinggo. Namun sejak tahun 2022 taman baca telah dialihfungsi menjadi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dibawah naungan Dinas Sosial PP dan PA Kota Probolinggo sehingga taman baca bergabung menjadi satu di layanan perpustakaan umum Kota Probolinggo, sehingga tidak ada realisasi taman baca yang dibina pada Tahun 2022 – 2024.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perpustakaan di Kota Probolinggo adalah masih belum optimalnya upaya membangun budaya literasi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan perpustakaan konvensional yang belum maksimal serta kurang efektifnya penyelenggaraan perpustakaan digital. Selain itu, meskipun Kota Probolinggo telah mengembangkan aplikasi perpustakaan digital bernama iProbo, pemanfaatannya masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koleksi buku digital yang tersedia serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya upaya yang lebih



terstruktur, seperti peningkatan koleksi buku digital, penyediaan fasilitas inklusif, serta program edukasi dan sosialisasi yang masif agar layanan perpustakaan, baik konvensional maupun digital, dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.23. KEARSIPAN

Urusan kearsipan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan informasi dan dokumentasi, baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan data, tetapi juga sebagai sumber informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan serta menjadi bukti akuntabilitas kinerja. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, tanggung jawab penyelenggaraan urusan kearsipan dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota, yang memiliki kewenangan, tugas, hak, dan tanggung jawab untuk mengelola arsip secara optimal. Agar pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan indikator yang mampu mengukur keberhasilan penyelenggaraan kearsipan. Indikator ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penerapan pengelolaan arsip secara baik, jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, serta tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.



Gambar 2. 73 Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baik Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Probolinggo, 2025

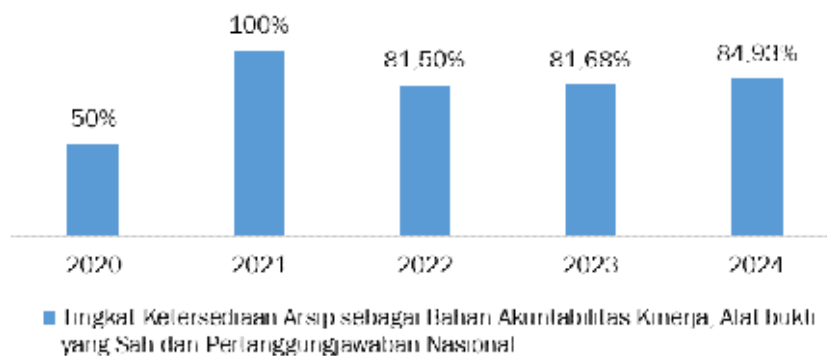
Grafik di atas menyajikan perkembangan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024. Pada awal periode, jumlah perangkat daerah yang memenuhi standar pengelolaan arsip terbilang stabil sejumlah 35 perangkat daerah. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024, jumlah perangkat daerah yang berhasil menerapkan pengelolaan arsip dengan baik tidak menunjukkan peningkatan kembali, melainkan tetap pada angka yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya sejumlah 28 perangkat daerah.



Gambar 2. 74 Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Pengelolaan
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Probolinggo, 2025

Data mengenai jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku menunjukkan tren yang cukup dinamis selama periode 2020 hingga 2024. Pada awal periode, jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku stabil yaitu sejumlah 35 SKPD, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 28 SKPD yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan arsip, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip sesuai standar, atau kendala dalam pengadaan infrastruktur pendukung.

Pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan di akhir periode sejumlah 44 SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, di mana jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku mencapai puncaknya. Peningkatan tajam ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh upaya intensif dari pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kearsipan, seperti melalui pelatihan arsiparis, penerapan kebijakan yang lebih tegas terkait pengelolaan arsip, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengarsipan. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi administrasi di lingkungan pemerintahan juga turut mendorong lebih banyak SKPD untuk memenuhi standar pengelolaan arsip yang baku.



Gambar 2. 75 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data pada grafik, terlihat adanya fluktuasi dalam capaian persentase ketersediaan arsip dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip hanya mencapai 50%, kemudian mengalami lonjakan signifikan menjadi 100% pada tahun 2021.

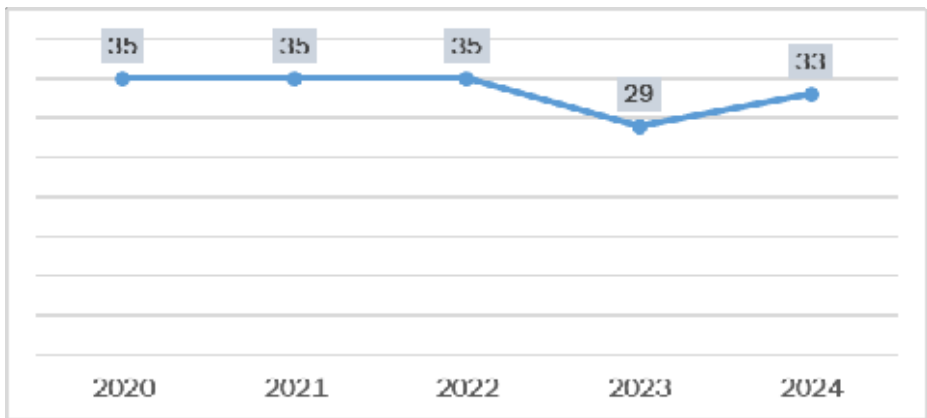
Namun, capaian ini tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, di mana terjadi penurunan menjadi 81,50% pada tahun 2022, sedikit naik menjadi 81,68% di tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 84,93% pada tahun 2024.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam manajemen kearsipan dan implementasi kebijakan pengelolaan arsip di lingkup pemerintahan Kota Probolinggo. Kenaikan drastis pada tahun 2021 dipengaruhi oleh faktor pendorong : adanya intervensi kebijakan atau program prioritas terkait reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik yang mendorong optimalisasi pengelolaan arsip, dukungan regulasi dan kebijakan, pengembangan SDM Arsiparis, pemanfaatan teknologi informasi, sinergi lembaga kearsipan dengan instansi terkait, tersedianya infrastruktur kearsipan, dan pengawasan kearsipan yang berkelanjutan. Di sisi lain, penurunan setelah 2021 bisa disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti : keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan arsip, kurangnya anggaran untuk digitalisasi dan pemeliharaan arsip, belum optimalnya sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, lemahnya regulasi dan implementasi kebijakan, keterbatasan sarpras kearsipan, tantangan pengelolaan arsip elektronik, serta kurangnya koordinasi dan sinergi (ego sektoral).

2.1.3.24. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah tertentu dengan melihat kondisi geografisnya juga mampu mengurus kelautan dan perikanan. Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah dengan kondisi geografis dengan memiliki Kawasan laut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan perangkat daerah yang mampu mengurus beberapa urusan.

Cakupan bina kelompok nelayan dapat mendukung kesejahteraan nelayan serta mendorong keberlanjutan sektor perikanan. Di Kota Probolinggo, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan berupaya melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan sebagai upaya meningkatkan kapasitas nelayan dalam berbagai aspek seperti pengelolaan hasil tangkapan, teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta manajemen usaha perikanan yang lebih baik. Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, cakupan pembinaan terhadap kelompok nelayan ini mengalami perubahan yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

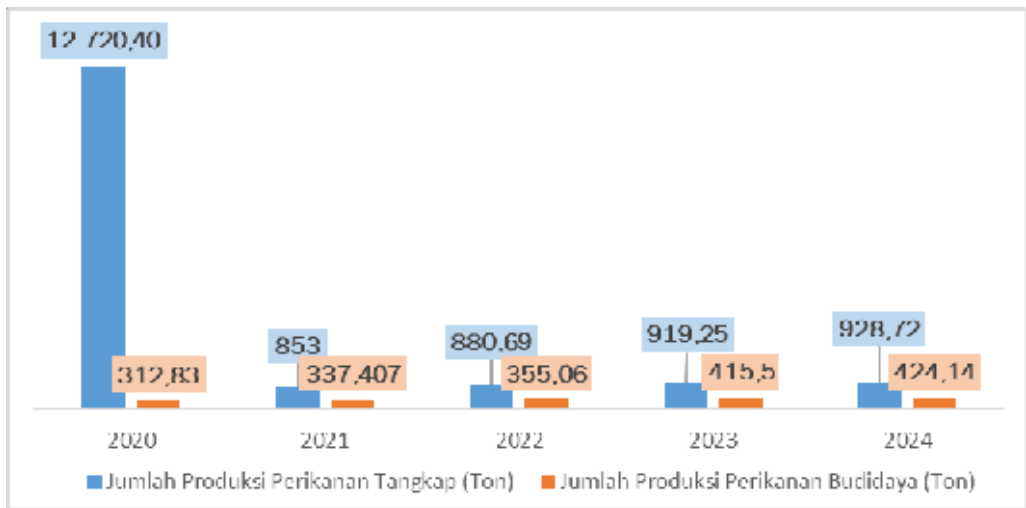


Gambar 2. 76 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025



Selama tiga tahun pertama, yaitu tahun 2020 hingga 2022, cakupan bina kelompok nelayan relatif stabil dengan angka sebanyak 35 kelompok setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kegiatan pembinaan dengan konsisten dalam periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan binaan menjadi 29 kelompok. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diidentifikasi dan diatasi, seperti kemungkinan kurangnya pendampingan secara intensif, keterbatasan anggaran, atau menurunnya antusiasme kelompok nelayan dalam mengikuti program pembinaan. Penurunan cakupan bina kelompok nelayan di tahun 2023 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi program dan pendekatan yang digunakan. Diperlukan upaya perbaikan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas program pembinaan, pemberian insentif kepada kelompok nelayan, maupun penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, swasta, dan komunitas nelayan lokal. Pada tahun 2024 Cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan peningkatan menjadi 33 Kelompok binaan dimana upaya perbaikan yang efektif telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina kelompok nelayan. Untuk menjaga konsistensi cakupan bina kelompok nelayan diperlukan adanya saling komitmen antara pemerintah dan Kelompok binaan. Dengan demikian, ke depannya pembinaan kelompok nelayan dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendukung keberlanjutan perikanan di Kota Probolinggo.

Produksi perikanan di Kota Probolinggo terbagi dalam dua sektor utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua sektor ini menjadi penopang penting dalam perekonomian lokal serta sumber utama pendapatan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan maupun petani ikan. Berdasarkan data periode 2020-2024, terjadi perubahan signifikan yang menggambarkan dinamika produksi perikanan di Kota Probolinggo.



Gambar 2. 77 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Kota Probolinggo 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 12.720,40 ton, jumlah ini merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, angka produksi mengalami penurunan tajam di tahun-tahun selanjutnya, menjadi hanya 853

ton pada tahun 2021, kemudian meningkat perlahan menjadi 880,69 ton pada 2022, 919,25 ton pada 2023, dan sedikit turun menjadi 913,93 ton pada 2024. Penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan laut, peralihan jenis ikan yang ditangkap, maupun kebijakan penangkapan ikan yang berdampak langsung pada hasil tangkapan.

Produksi perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Tahun 2020, produksi perikanan budidaya hanya sebesar 312,83 ton. Angka ini terus meningkat secara konsisten menjadi 337,407 ton di tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 355,06 ton di tahun 2022, meningkat menjadi 415,5 ton pada tahun 2023, dan melonjak drastis mencapai 14.790 ton di tahun 2024. Peningkatan luar biasa pada tahun 2024 mengindikasikan adanya program atau investasi yang signifikan dalam sektor budidaya perikanan oleh pemerintah maupun swasta, serta potensi ekonomi yang sangat tinggi dalam perikanan budidaya di Kota Probolinggo.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan mereka. NTN juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga ikan, biaya operasional penangkapan, dan harga sembako. Nilai tukar nelayan (NTN) memiliki kriteria interpretasi untuk menilai tingkat kesejahteraan nelayan. NTN diukur dengan membandingkan indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Jika NTN lebih kecil dari 100, artinya nelayan memiliki daya beli lebih rendah dan berpotensi mengalami defisit anggaran rumah tangga. Sebaliknya, jika NTN lebih besar dari 100, nelayan memiliki pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kriteria Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mengukur kemampuan tukar hasil budidaya ikan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan pembudidaya, baik untuk produksi maupun konsumsi. Secara sederhana, NTPi menunjukkan apakah harga ikan yang diterima pembudidaya cukup untuk menutupi biaya produksi dan konsumsi rumah tangganya. NTPi adalah alat ukur yang penting untuk mengetahui kesejahteraan pembudidaya ikan dan daya saing budidaya ikan. Pembudidaya dapat memanfaatkan NTPi untuk mengoptimalkan kegiatan budidaya mereka dan meningkatkan pendapatan.

Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

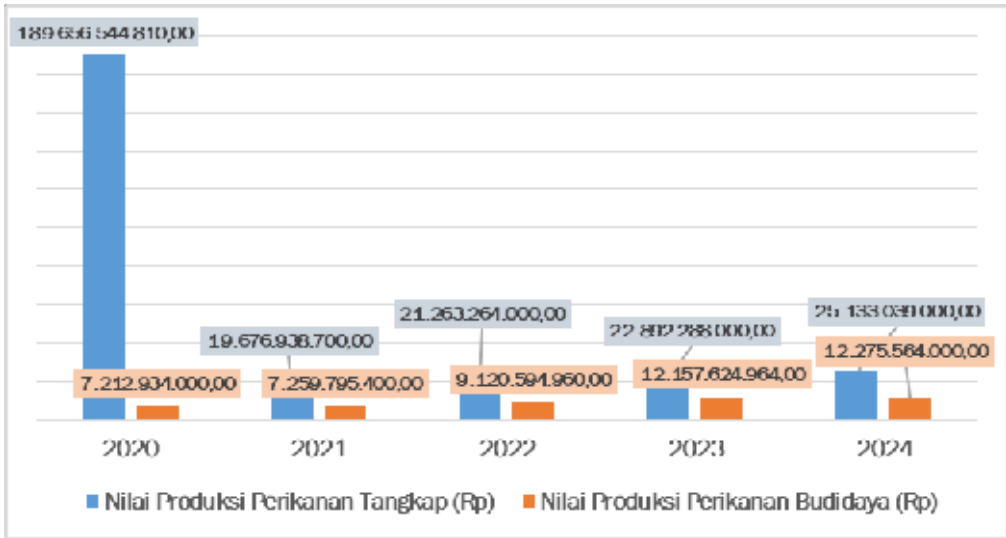
INDIKATOR KINERJA KUNCI	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Nelayan	0,74	0,78	0,82	0,84	97,18
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	1,1	1,16	1,19	1,17	94,93
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	-28,19	-90,89	3,81	8,01	1,36
Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	0,76	3	4	4,07	6,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2025

Nilai tukar nelayan Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 - 2024. Pada Tahun 2020 NTN sebesar 0,74 dan terus meningkat sampai pada tahun 2024 sebesar 97,18. Kenaikan NTN mencerminkan peningkatan kesejahteraan nelayan yang kemungkinan didorong oleh perbaikan harga jual hasil tangkapan atau efisiensi biaya operasional. Nilai tukar nelayan adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan

masyarakat nelayan. Kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan mereka. NTN juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga ikan, biaya operasional penangkapan, dan harga sembako. Nilai tukar pembudidaya ikan Kota Probolinggo cenderung fluktuatif, meningkat secara bertahap hingga 1,19 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan tajam menjadi 94,93 di tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tekanan pada biaya produksi atau perubahan harga pasar komoditas budidaya. Pada Tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan pada NTN dan NTPi. Namun demikian NTN dan NTPi pada Tahun 2024 masih dapat dibandingkan dengan perhitungan pada tahun sebelumnya dengan mengalikan NTN dan NTPi sebelum Tahun 2024 dengan 100. Selanjutnya pada Persentase peningkatan produksi perikanan sangat fluktuatif, sempat mengalami kontraksi tajam hingga -90,89% pada 2021 sebelum berbalik positif di tahun-tahun berikutnya, meskipun dengan tren melambat pada 2024. Nilai tambah produk hasil perikanan justru menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 0,76% pada 2020 menjadi 6,1% di 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam mendorong hilirisasi produk perikanan, meskipun tantangan masih terjadi pada sisi produksi dan stabilitas pendapatan pembudidaya.

Di Kota Probolinggo, nilai produksi dari perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 189,65 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun berikutnya, yaitu hanya sebesar 19,67 miliar rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya, nilai produksi perikanan tangkap mulai pulih secara bertahap menjadi 21,26 miliar rupiah di tahun 2022, meningkat lagi menjadi 22,89 miliar rupiah di tahun 2023, dan mencapai 24,74 miliar rupiah pada tahun 2024.



Gambar 2. 78 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

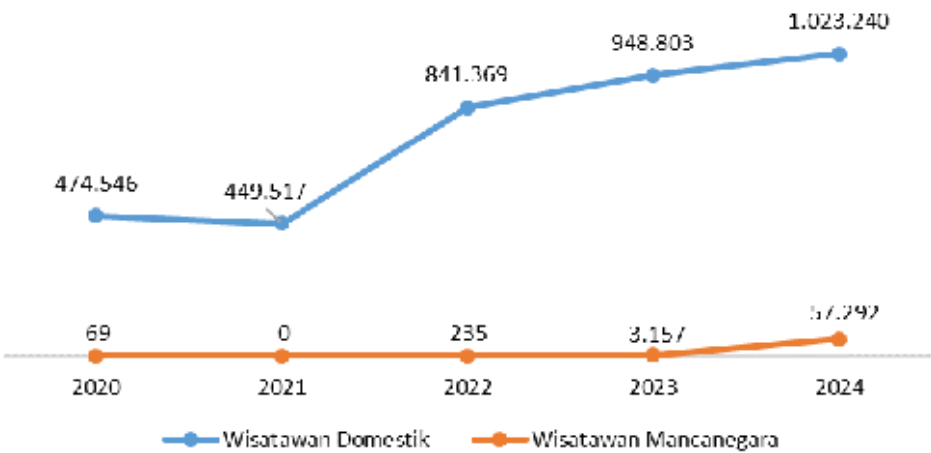
Nilai produksi dari sektor perikanan budidaya mengalami pertumbuhan stabil dan positif selama kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2020, nilai produksi budidaya tercatat sebesar 7,21 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 berturut - turut mengalami peningkatan menjadi 7,25 miliar rupiah, 9,12 miliar rupiah 12,15 miliar rupiah dan 12.27 miliar rupiah . Angka Peningkatan Nilai produksi sektor budidaya perikanan ini

menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya di Kota Probolinggo memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, sekaligus menunjukkan keberhasilan berbagai intervensi kebijakan dan investasi yang dilakukan pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Meskipun mengalami penurunan tajam pasca tahun 2020, sektor perikanan tangkap tetap menunjukkan pemulihan yang stabil. Penurunan tajam ini terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan Kabupaten/Kota pada sektor perikanan. Sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya memiliki potensi pertumbuhan nilai produksi yang positif dimana setiap tahunnya selama periode 2020 - 2024 mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan produksi perikanan budidaya, serta memperhatikan sektor perikanan tangkap dan budidaya dengan meningkatkan manajemen sumber daya laut, pengelolaan perikanan budidaya serta memperkuat kapasitas nelayan dan pembudidaya agar kedua sektor perikanan ini mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah.

2.1.3.25. **PARIWISATA**

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo memegang peran strategis dalam mengelola dua bidang utama, yaitu urusan pemuda dan olahraga, serta urusan pariwisata. Dalam konteks pariwisata, dinas ini bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kota Probolinggo agar mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengelolaan destinasi wisata, promosi pariwisata, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, Dinas Pariwisata juga berperan dalam melibatkan masyarakat setempat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pelatihan di sektor pariwisata, sehingga tercipta ekosistem wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat 3 indikator kinerja urusan pariwisata Kota Probolinggo yang merepresentasikan capaian kinerja urusan pariwisata berikut:



Gambar 2. 79 Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

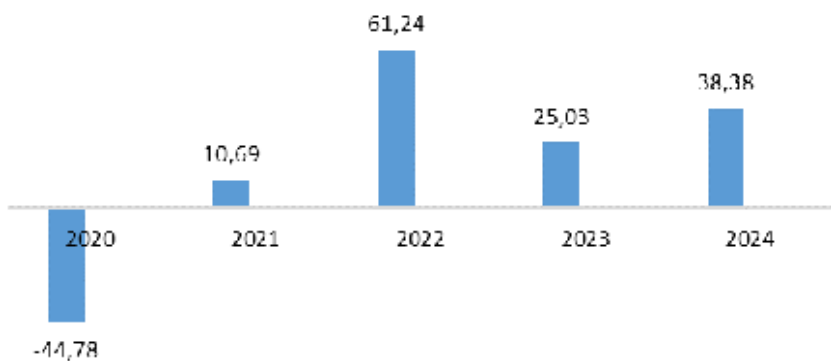
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Grafik jumlah kunjungan wisatawan di Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada segmen wisatawan domestik, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 474.546 pada tahun 2020, kemudian mengalami sedikit

penurunan menjadi 449.517 di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 841.369 kunjungan, yang terus meningkat menjadi 948.803 di tahun 2023 dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan jumlah 1.023.240 kunjungan. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan yang mencolok. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 69 kunjungan, tetapi di tahun 2021 jumlah ini turun drastis menjadi 0 akibat pembatasan perjalanan internasional selama pandemi. Mulai tahun 2022, jumlah wisatawan asing kembali meningkat dengan 235 kunjungan, lalu melonjak menjadi 3.157 di tahun 2023, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan jumlah 57.292 kunjungan.

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Probolinggo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan stagnan, yakni hanya berkisar antara 0,78 hingga 0,79 hari atau kurang dari satu hari. Capaian ini mengindikasikan bahwa kunjungan wisatawan sebagian besar bersifat transit atau kunjungan singkat, tanpa berlanjut pada aktivitas inap. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan atraksi, fasilitas, dan paket wisata yang mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal. Persentase peningkatan angka kunjungan wisatawan selama lima tahun terakhir cenderung tidak stabil. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan dampak langsung dari pembatasan mobilitas akibat pandemi. Kebangkitan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan lonjakan signifikan sebesar 87,17%, menandai mulai pulihnya sektor pariwisata. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023, kemudian disusul peningkatan moderat pada tahun 2024.

Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata mulai pulih, keberlanjutan dan konsistensi pertumbuhan masih menjadi tantangan yang memerlukan strategi promosi dan pengelolaan destinasi yang lebih optimal. Pemerintah Kota Probolinggo juga berperan besar dalam mendorong sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event dan festival sebagai daya tarik wisata (DTW). Beragam acara budaya, festival kuliner, dan event olahraga yang diadakan setiap tahunnya turut meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dengan strategi ini, Kota Probolinggo semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

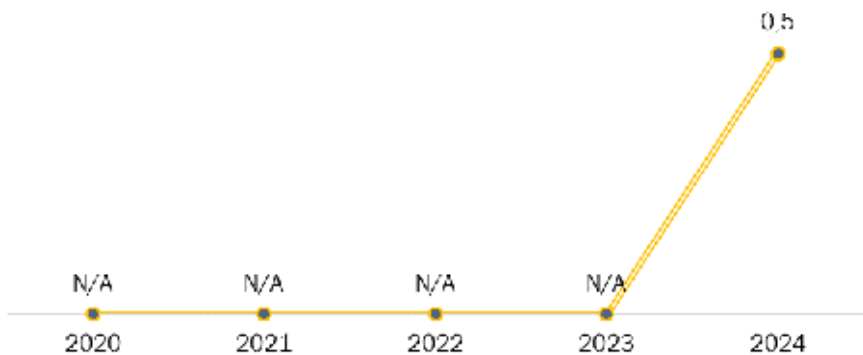


Gambar 2. 80 Capaian Indikator Rasio Pad Sektor Pariwisata Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Grafik Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam hingga mencapai angka negatif sebesar -44,78. Penurunan drastis ini diduga kuat akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas wisata, penutupan objek wisata, dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan secara drastis.

Pada tahun 2024, rasio PAD kembali meningkat menjadi 38,38. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan yang kembali stabil, berkat penguatan strategi digitalisasi promosi pariwisata, peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha wisata, serta pengembangan destinasi baru yang lebih menarik dan inklusif. Secara umum, tren ini mencerminkan bahwa meskipun sektor pariwisata sempat terpuruk akibat pandemi, melalui berbagai langkah strategis dan adaptif, Pemerintah Kota Probolinggo berhasil mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor ini secara bertahap.



Gambar 2. 81 Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

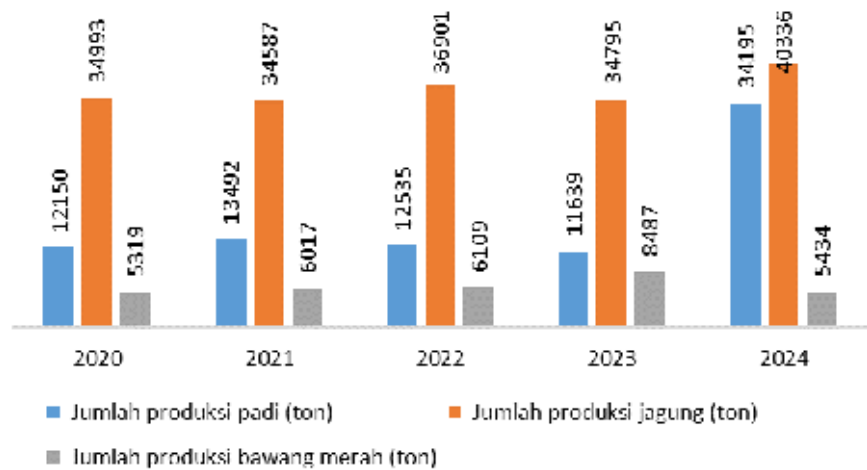
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik persentase peningkatan usaha ekonomi kreatif di Kota Probolinggo tahun 2020–2024, terlihat bahwa tidak terdapat data atau pencatatan yang tersedia (N/A) dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut belum dilakukan pengukuran atau pelaporan resmi terkait perkembangan usaha ekonomi kreatif di daerah tersebut. Namun, pada tahun 2024 mulai terlihat adanya kemajuan dengan tercatatnya peningkatan sebesar 0,5 persen. Meskipun angka ini masih tergolong kecil, kehadirannya menandakan langkah awal yang positif dalam upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kemungkinan besar, pencapaian ini merupakan hasil dari mulai diterapkannya kebijakan pendataan, pelatihan kewirausahaan berbasis kreativitas, serta dukungan terhadap pelaku usaha kreatif melalui fasilitasi promosi, pembiayaan, maupun akses pasar. Peningkatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi kreatif yang lebih terarah dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

2.1.3.26. PERTANIAN

Urusan pertanian menjadi salah satu urusan pemerintahan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Di Kota Probolinggo, sektor

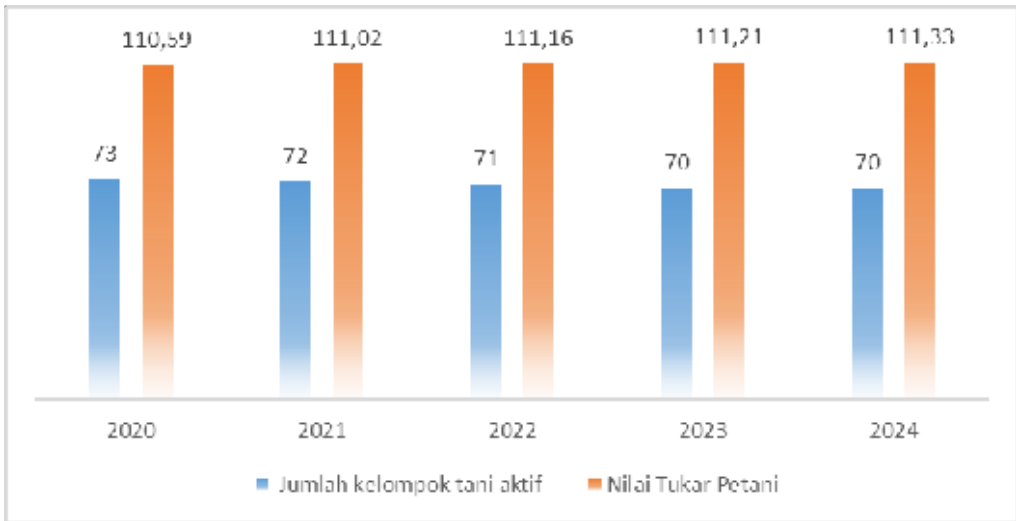
pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk mengelola urusan pertanian secara optimal dengan berbagai program yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas hasil pertanian, dan kesejahteraan petani. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga stabilitas pangan di Kota Probolinggo.



Gambar 2. 82 Produksi Padi, Jagung, Dan Bawang Merah Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Grafik di atas menyajikan data Produksi padi, jagung, dan bawang merah di Kota Probolinggo pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Produksi padi sempat fluktuatif pada tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai 34.195 ton, hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi jagung cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, diawali dengan 34.993 ton pada 2020 dan mencapai puncaknya pada 2024 sebesar 40.336 ton. Sebaliknya, produksi bawang merah mengalami kenaikan bertahap dari 5.319 ton pada 2020 menjadi 8.487 ton pada 2023, namun turun kembali menjadi 5.434 ton pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi padi dan jagung di Kota Probolinggo cukup berhasil, meskipun terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas produksi bawang merah. Variasi hasil produksi ini mencerminkan pengaruh berbagai faktor, baik dari segi iklim, kebijakan pertanian, maupun teknologi budidaya yang diterapkan selama periode tersebut.

Peningkatan produktivitas ini dapat dikaitkan dengan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo, seperti penyediaan sarana produksi pertanian, pelatihan bagi petani, serta pengembangan sistem irigasi yang lebih baik.



Gambar 2. 83 Jumlah Kelompok Tani Aktif Dan Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Jumlah kelompok tani aktif di Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun, dari 73 kelompok pada tahun 2020 menjadi 70 kelompok pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan tantangan dalam regenerasi petani, minat generasi muda terhadap sektor pertanian, atau konsolidasi kelembagaan tani yang tidak diimbangi dengan pembentukan kelompok baru. Di sisi lain, nilai tukar petani mengalami peningkatan secara konsisten, dari 110,59 pada tahun 2020 menjadi 111,33 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan dalam daya beli petani dan efisiensi dalam produksi pertanian, meskipun jumlah kelompok yang aktif justru menurun. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan kelembagaan petani agar capaian ekonomi yang membaik dapat diimbangi dengan keberlangsungan organisasi petani sebagai aktor utama dalam pembangunan pertanian.

Tabel 2. 33 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020-2024

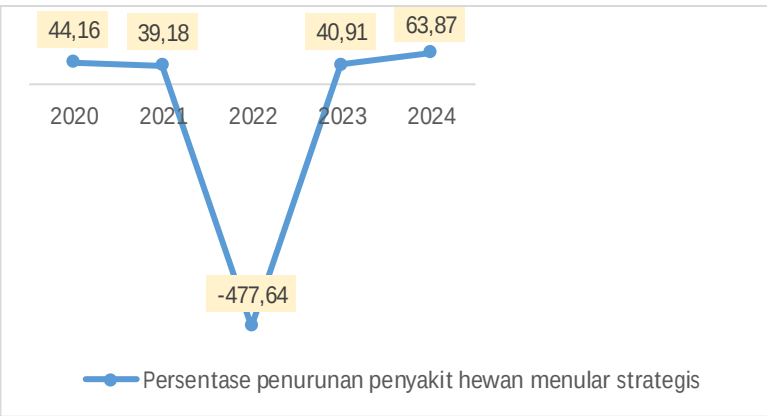
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	kg	422.340	372.563	362.628	473.105	471.913
Kambing	kg	37.542	37.675	31.279	35.705	33.183
Domba	kg	149.332	164.462	165.969	159.424	178.346
Ayam Buras	kg	96.027	110.686	140.570	161.095	152.184
Ayam Ras Petelur	kg	6.003	5.544	4.375	14.940	10.612
Ayam Ras Broiler	kg	1.398.176	1.724.393	1.820.710	1.961.386	2.128.900
Itik	kg	25.668	26.108	27.214	29.475	30.369

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Produksi hasil peternakan di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang bervariasi pada setiap komoditas. Produksi sapi potong mengalami penurunan berturut - turut dari 422.340 kg pada 2020 menjadi 372.653 kg pada 2021 dan 362.628 pada tahun 2022, namun kembali meningkat hingga 473.105 kg pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 471.913 kg pada 2024. Produksi kambing mengalami penurunan yang cukup drastis dari 37.675 kg pada 2021 menjadi 31.279 kg pada 2022 namun relatif stabil pada dua tahun berikutnya. Penurunan Produksi pada tahun 2022 yang terjadi pada produksi ternak sapi dan kambing merupakan dampak merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku



(Foot and Mouth Disease) yang terjadi di Kota Probolinggo. Sedangkan Komoditas domba mengalami peningkatan berturut - turut pada periode 2020-2022 (149.332 kg; 164.462 kg; 165.969 kg) dan sempat menurun pada tahun 2023 (159.424 kg) namun meningkat kembali pada tahun 2024 (178.346 kg), meskipun sempat menurun pada 2021. Produksi ayam buras juga mengalami kenaikan dari 96.027 kg pada 2020 menjadi puncaknya di 161.095 kg pada 2023, namun turun sedikit menjadi 152.184 kg pada 2024. Sementara itu, ayam ras petelur mengalami fluktuasi cukup tajam, dengan produksi terendah 4.375 kg pada 2022 dan tertinggi 14.940 kg pada 2023. Ayam ras broiler menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 1.398.176 kg pada 2020 menjadi 2.128.900 kg pada 2024. Komoditas itik juga mengalami kenaikan produksi dari 25.668 kg pada 2020 menjadi 30.369 kg pada 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perkembangan positif pada beberapa komoditas peternakan, meskipun beberapa komoditas lainnya masih menghadapi fluktuasi.



Gambar 2. 84 Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

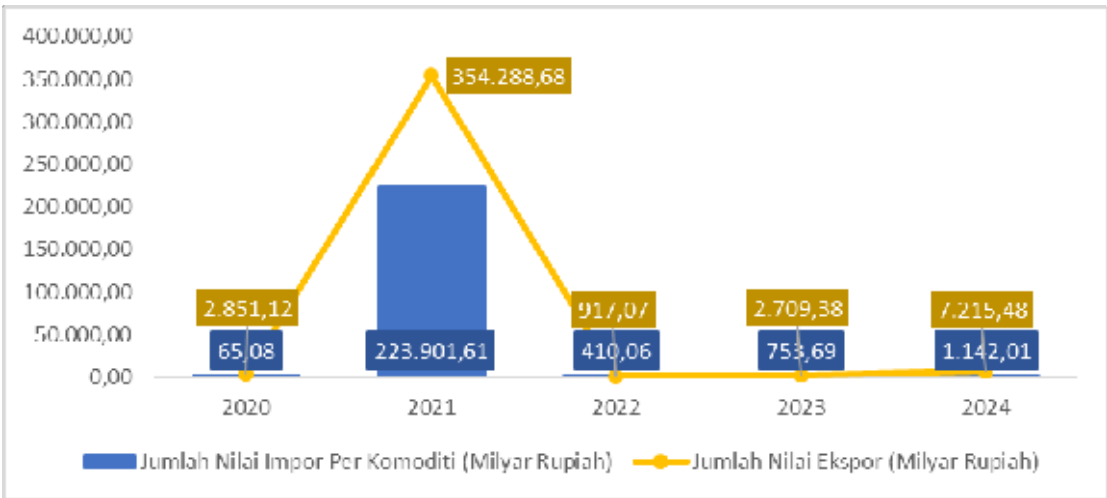
Persentase penurunan penyakit hewan menular strategis di Kota Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif. Tahun 2020 hingga 2021 mencatat penurunan yang masih dalam kisaran wajar, yaitu masing-masing sebesar 44,16% dan 39,18%. Tahun 2022 terjadi lonjakan negatif ekstrem sebesar -477,64% yang menandakan adanya peningkatan kasus penyakit secara tajam dan signifikan. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 2022 merupakan puncak merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada hewan ternak berkuku belah (Sapi, Kambing, Domba). Tahun 2023 situasi mulai terkendali dengan kembali tercapainya penurunan sebesar 40,91%. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dengan capaian penurunan sebesar 63,87%, mengindikasikan keberhasilan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan penyakit secara lebih efektif. Fluktuasi ini mencerminkan pentingnya konsistensi dalam kebijakan kesehatan hewan dan respons cepat terhadap potensi wabah.

Secara umum, capaian kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif. Meski demikian, tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan pencapaian tersebut melalui pemanfaatan dan percepatan optimal sumber daya pertanian, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Fokus pada penerapan teknologi

pertanian dan perkebunan yang sudah ada juga menjadi kunci dalam mendorong produktivitas. Salah satu permasalahan klasik yang masih sering dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah ketersediaan air irigasi, yang menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

2.1.3.27. PERDAGANGAN

Perdagangan atau jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2022, mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo khususnya penyelenggaraan urusan perdagangan mempunyai tugas perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan sarana distribusi Perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri. Adapun capaian kinerja urusan perdagangan Kota Probolinggo dapat tergambar melalui grafik berikut:



Gambar 2. 85 Jumlah Nilai Impor Dan Ekspor Kota Probolinggo Tahun 2021-2024
Sumber: DKUP Kota Probolinggo, 2025

Nilai impor Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 65,08 miliar pada 2020 menjadi 1.142,01 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan bahan baku atau barang modal untuk mendukung sektor industri dan perdagangan di daerah tersebut. Peningkatan impor ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan industri manufaktur, ekspansi usaha, atau ketergantungan terhadap produk luar negeri yang masih tinggi. Meskipun kenaikan impor dapat menjadi indikasi peningkatan aktivitas ekonomi, tingginya nilai impor juga perlu diimbangi dengan penguatan industri dalam negeri agar ketergantungan terhadap barang impor tidak terlalu besar, yang berpotensi mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan daerah.

Sementara itu, nilai ekspor mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Dari 2.851,12 miliar pada 2020, ekspor sempat menurun menjadi 917,07 miliar pada 2022, sebelum

kembali meningkat secara drastis hingga mencapai 7.215,48 miliar pada 2024. Penurunan pada 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan global, gangguan rantai pasok, atau kendala produksi di sektor ekspor utama. Namun, lonjakan ekspor pada 2024 menunjukkan adanya pemulihan yang kuat, didorong oleh peningkatan daya saing produk lokal, kebijakan ekspor yang lebih mendukung, atau pulihnya pasar global.

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Perdagangan	25,71	26,35	26,48	26,22	26,20
Peningkatan Nilai Perdagangan	2.669,90 (Milyar)	127.600,99 (Milyar)	-129.880,05 (Milyar)	1.448,67 (Milyar)	4.117,78 (Milyar)
Persentase Peningkatan Ekspor	9,74%	123%	-0,99%	1,95%	1,66%

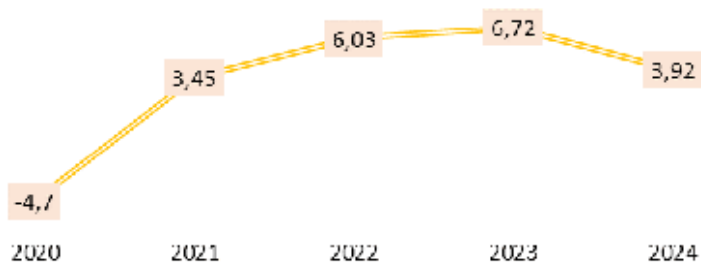
Sumber: DKUP Kota Probolinggo, 2025

Persentase peningkatan nilai ekspor Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Tahun 2021 mencatat lonjakan tertinggi sebesar 123%, menunjukkan momentum kuat sektor ekspor pasca pandemi. Tahun 2022 terjadi kontraksi sebesar -0,99% yang mengindikasikan adanya hambatan eksternal maupun penyesuaian pasar. Tahun 2023 dan 2024 mengalami pemulihan bertahap meskipun angkanya cenderung moderat. Rasio PDRB sektor perdagangan selama periode yang sama mencerminkan kontribusi yang konsisten dengan kecenderungan meningkat, meski sempat sedikit menurun pada dua tahun terakhir. Data ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan tetap menjadi pilar utama perekonomian kota.

Peningkatan nilai perdagangan mengalami fluktuasi tajam dengan capaian luar biasa pada tahun 2021, disusul penurunan drastis di tahun 2022 yang mencapai nilai negatif. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren perbaikan meskipun belum setara dengan lonjakan sebelumnya. Fluktuasi ini memperlihatkan tingginya sensitivitas sektor perdagangan terhadap dinamika pasar global dan domestik. Secara keseluruhan, kestabilan dan keberlanjutan ekspor dan perdagangan memerlukan strategi yang adaptif serta dukungan terhadap pelaku usaha, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan meningkatkan diversifikasi produk ekspor unggulan.

2.1.3.28. PERINDUSTRIAN

Urusan perindustrian di Kota Probolinggo dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor industri lokal. Berbagai kebijakan dan program diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya upaya ini, diharapkan sektor perindustrian dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.



Gambar 2. 86 Persentase Pertumbuhan Pdrb Kategori Perindustrian (%)Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

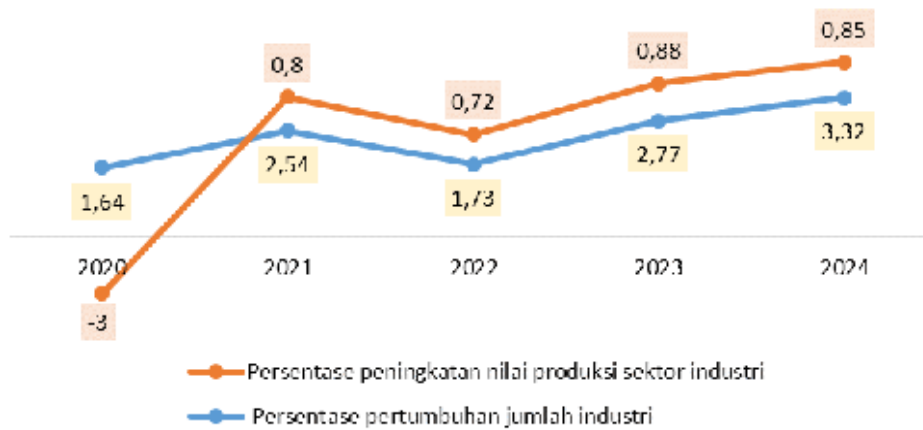
Berdasarkan data persentase pertumbuhan PDRB kategori perindustrian di Kota Probolinggo, terlihat adanya tren positif selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, sektor perindustrian mengalami kontraksi signifikan dengan pertumbuhan negatif sebesar -4,7%, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi. Namun, pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,45%, diikuti oleh peningkatan signifikan menjadi 6,03% pada 2022. Tren positif ini berlanjut hingga 2023, dengan pertumbuhan mencapai 6,72%. akan tetapi pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB kategori Perindustrian mencapai : 3,92. Data ini menunjukkan bahwa sektor perindustrian di Kota Probolinggo pada tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga.

TABEL 2. 35 Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

NO	TAHUN	NILAI PRODUKSI SEKTOR INDUSTRI (RUPIAH)
1	2020	3.604.610.739.322
2	2021	3.402.301.570.112
3	2022	5.851.006.690.969
4	2023	5.902.604.233.165
5	2024	5.952.575.508.104

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data nilai produksi sektor industri di Kota Probolinggo selama periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, nilai produksi tercatat sebesar Rp3.375.299.176.698. Angka ini mengalami kenaikan tipis pada 2021 menjadi Rp3.402.301.570.112. Namun, lonjakan besar terjadi di tahun 2022 dengan nilai produksi mencapai Rp5.851.006.690.969, mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi. Peningkatan terus berlanjut pada 2023 dengan nilai produksi sebesar Rp5.902.604.233.165, dan diproyeksikan mencapai Rp5.952.575.508.104 di tahun 2024. Data ini menunjukkan pertumbuhan sektor industri yang stabil dan positif, mencerminkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian Kota Probolinggo.



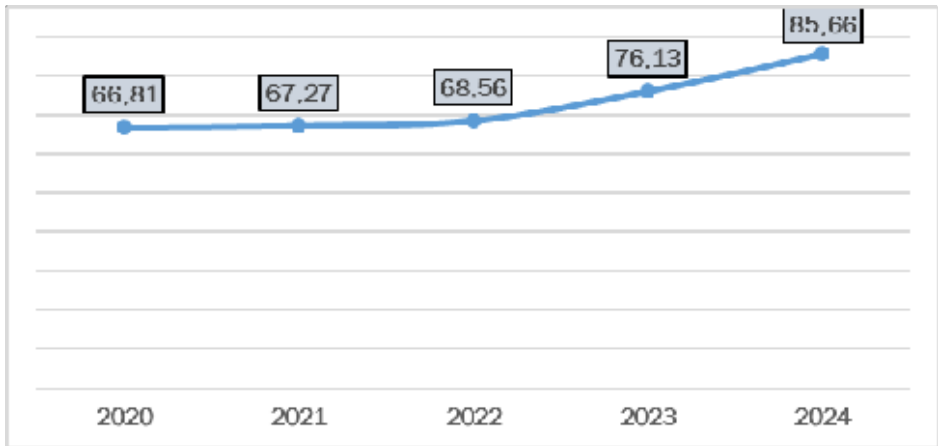
Gambar 2. 87 Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Dan Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan stabil pada level rendah. Tahun 2020 mencatat kontraksi sebesar -3% yang menandakan dampak signifikan pandemi terhadap sektor ini. Tahun-tahun berikutnya mencatatkan pertumbuhan positif namun terbatas, berkisar antara 0,72% hingga 0,88%, yang mencerminkan pemulihan bertahap namun belum menunjukkan lonjakan signifikan dalam produktivitas industri. Sementara itu, jumlah industri di Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dengan fluktuasi ringan. Pada tahun 2023 jumlah industri sebesar 2,77%, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 3,32. Peningkatan jumlah industri yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan nilai produksinya mengindikasikan adanya ekspansi kuantitas tanpa diiringi peningkatan signifikan pada nilai tambah produksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dalam peningkatan kualitas produksi, inovasi industri, serta efisiensi proses untuk mengangkat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.

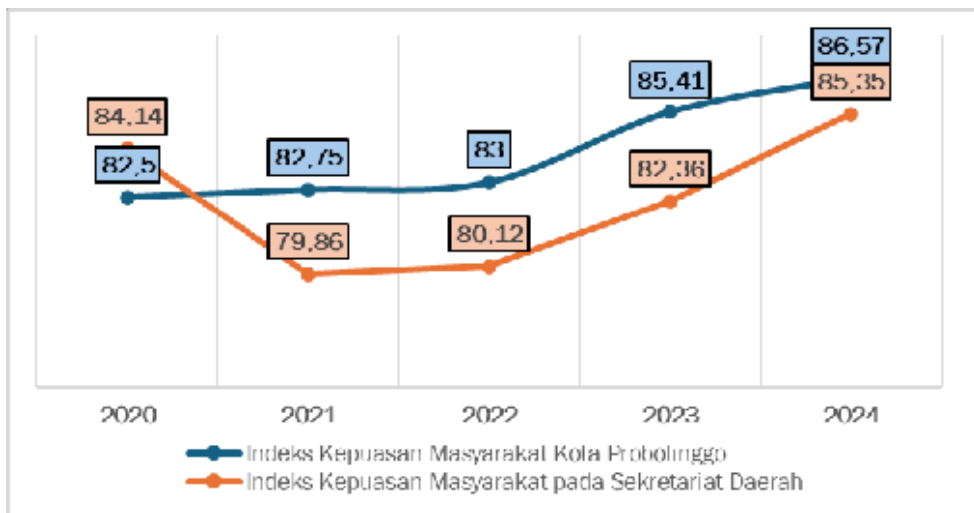
2.1.3.29. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berfungsi dalam koordinasi administrasi, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan tugas kepala daerah, Sekretariat Daerah bertanggungjawab dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kinerja Sekretariat Daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah, serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Gambar 2. 88 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, 2025

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo tahun 2020-2024, terlihat tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 66,81, mengalami sedikit peningkatan menjadi 67,27 di tahun 2021, dan meningkat lebih lanjut menjadi 68,56 pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 85,66. Meski terus meningkat namun capaian ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan konsistensi reformasi birokrasi yang telah dicapai sebelumnya. Tidak hanya dilihat dari indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam capaian kinerja sekretariat daerah. Berikut merupakan grafik capaian kepuasan masyarakat terhadap Sekretariat Daerah.



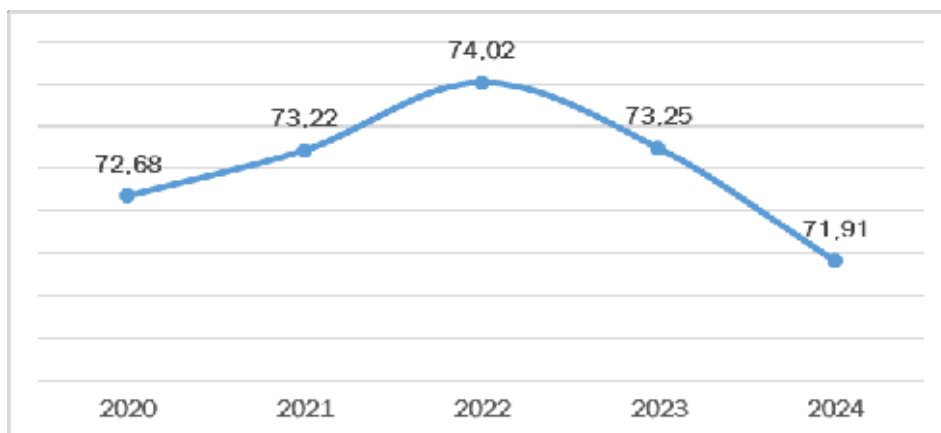
Gambar 2. 89 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, 2025

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo dalam periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum berada di angka 82,5 pada tahun 2020, mengalami peningkatan bertahap menjadi 82,75 di tahun 2021, 83 di tahun 2022, dan melonjak lebih tinggi di tahun 2023 dengan nilai 85,41, hingga akhirnya mencapai 86,57 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan publik serta responsivitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah mengalami fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, indeks ini mencatat nilai 84,14, namun mengalami



penurunan cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 79,86. Tren ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan layanan pada tahun tersebut. Namun, perlahan-lahan terjadi peningkatan pada tahun 2022 dengan nilai 80,12, yang terus berlanjut hingga 82,36 di tahun 2023 dan mencapai 85,35 pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan adanya peningkatan kualitas layanan, baik dari aspek efisiensi, efektivitas, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah.

Terlihat kinerja Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat mengalami perkembangan positif, khususnya dalam dua tahun terakhir. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum menunjukkan bahwa masyarakat semakin merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mempertahankan stabilitas dan memastikan bahwa peningkatan ini berkelanjutan. Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah pada tahun 2021 dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Kemungkinan besar, faktor-faktor seperti keterbatasan akses layanan, perubahan kebijakan, atau transisi sistem administrasi dapat menjadi penyebab dari penurunan tersebut. Namun, dengan adanya tren pemulihan dalam beberapa tahun berikutnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah perbaikan yang efektif.



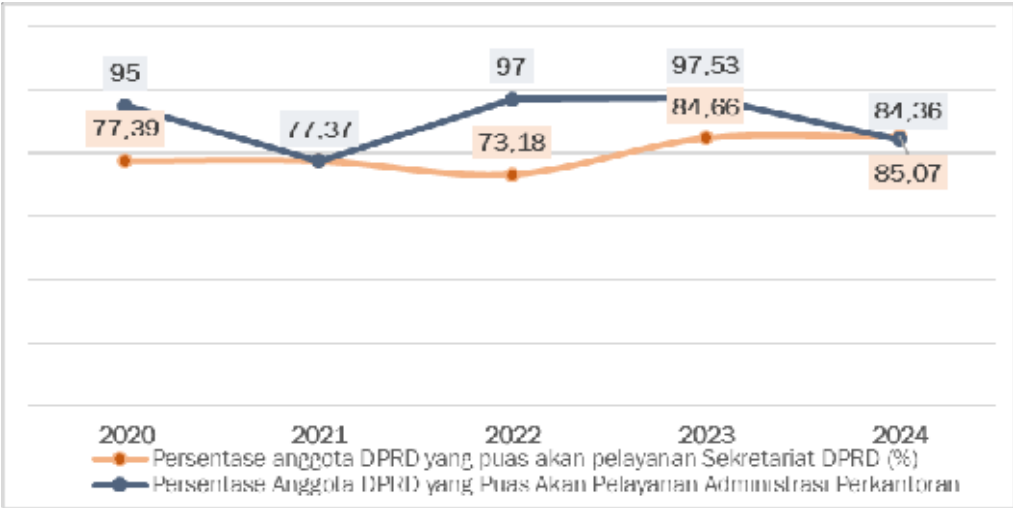
Gambar 2. 90 Nilai SAKIP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, 2025

Nilai SAKIP Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pada tahun 2020, nilai SAKIP berada pada angka 72,68, mengalami peningkatan menjadi 73,22 pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 74,02. Namun, pada tahun 2023, nilai ini sedikit menurun menjadi 73,25, dan mengalami penurunan lebih lanjut pada tahun 2024 dengan nilai 71,91. Tren ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan. Faktor-faktor seperti efektivitas perencanaan strategis, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah mungkin menjadi penyebab utama dari fluktuasi nilai SAKIP ini.

2.1.3.30. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Sekretariat DPRD Kota Probolinggo berperan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi utama Sekretariat DPRD adalah

menyediakan layanan administratif, teknis, dan operasional guna menunjang efektivitas tugas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur melalui tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan yang diberikan, termasuk aspek pelayanan administratif dan dukungan kesekretariatan. Adapun capaian indikator urusan sekretariat dewan dapat dilihat melalui grafik berikut:



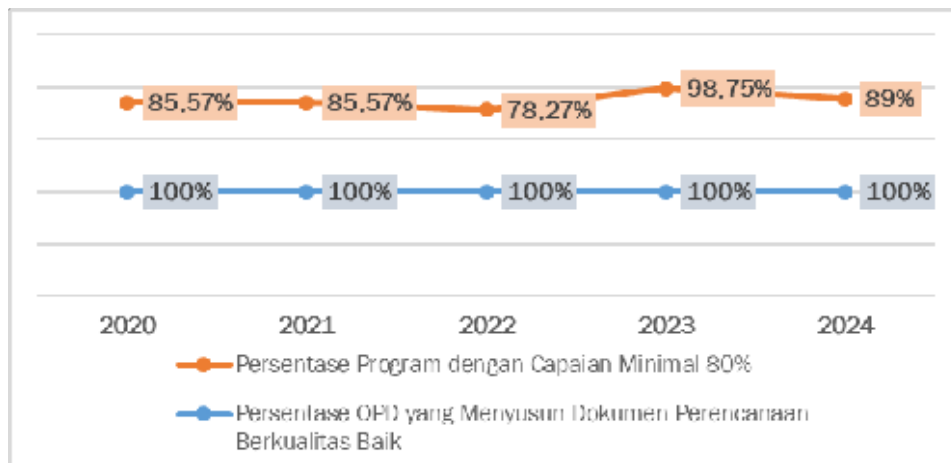
Gambar 2. 91 Persentase Anggota DPRD Yang Puas Akan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Dprd Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, tingkat kepuasan anggota DPRD berada pada angka 95%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 77,37%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan sistem administrasi atau kendala operasional yang terjadi pada tahun tersebut. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 97%, menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan yang diberikan. Puncak kepuasan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 97,53%, yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD merasa puas terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan. Namun, pada tahun 2024, kembali terjadi penurunan menjadi 84,36%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas layanan secara konsisten. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi perkantoran juga menunjukkan pola yang hampir serupa. Pada tahun 2020, indeks ini berada di angka 77,39%, sedikit menurun menjadi 73,18% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dengan capaian 84,66%, yang berlanjut ke tahun 2024 dengan kenaikan menjadi 85,07%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pelayanan administrasi yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD.



2.1.3.31. PERENCANAAN



Gambar 2. 92 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

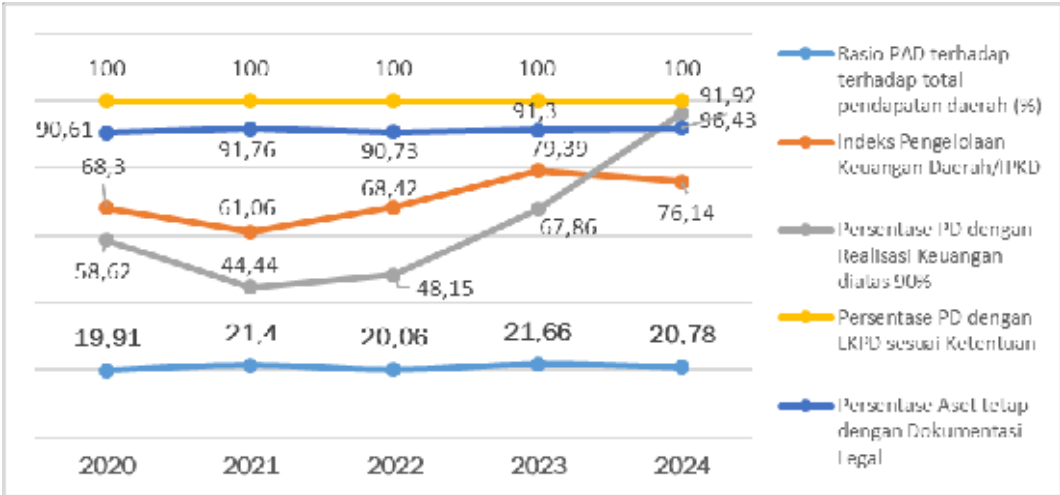
Keberhasilan perencanaan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu persentase program yang mencapai target minimal 80%, serta persentase OPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik. Persentase Program Dengan Capaian Minimal 80% mengukur efektivitas pelaksanaan program yang mencapai minimal 80% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian indikator ini stabil di angka 85,57%, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 78,27%. Tren ini kembali membaik pada tahun 2023 dengan kenaikan signifikan ke 98,75%, meskipun sedikit menurun menjadi 89% pada tahun 2024. Penurunan di tahun 2022 menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, sementara peningkatan pada tahun 2023 mencerminkan adanya perbaikan dalam efektivitas program pembangunan. Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh OPD di Kota Probolinggo. Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator ini tetap berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menyusun dokumen perencanaan dengan standar yang baik. Stabilitas capaian ini menandakan keberhasilan Bappeda Litbang dalam mendorong peningkatan kapasitas perencanaan di tingkat OPD.

Secara keseluruhan, kinerja Bappeda Litbang Kota Probolinggo dalam urusan perencanaan pembangunan daerah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam efektivitas program pembangunan, dan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas. Namun tantangan seperti ketidakstabilan capaian program masih menjadi perhatian utama. Dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi serta optimalisasi koordinasi dengan OPD, Bappeda Litbang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Probolinggo yang lebih baik di masa depan.

2.1.3.32. KEUANGAN

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Probolinggo berperan sebagai pengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai perangkat daerah yang menangani pendapatan asli daerah (PAD),

perencanaan anggaran, serta pengelolaan aset daerah, BPKAD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan stabilitas dan efektivitas keuangan daerah. Salah satu indikator kinerja utama dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, dan juga opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Probolinggo, yang mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap keseluruhan keuangan daerah.



Gambar 2. 93 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Probolinggo, 2025

Rasio PAD terhadap total pendapatan Kota Probolinggo dalam periode 2020-2024, terlihat adanya pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika kemandirian fiskal daerah. Pada tahun 2020, rasio PAD berada di angka 19,91%, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 21,4%. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun, pada tahun 2022, rasio PAD mengalami penurunan menjadi 20,06%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan penerimaan daerah. Kemungkinan penyebabnya bisa berasal dari faktor eksternal seperti kebijakan fiskal nasional, perlambatan ekonomi, atau perubahan regulasi pajak daerah. Pada tahun 2023, rasio PAD kembali meningkat secara signifikan ke angka 21,66%, menunjukkan keberhasilan strategi peningkatan PAD yang diterapkan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah. Namun, di tahun 2024, rasio PAD mengalami sedikit penurunan kembali menjadi 20,78%, yang mengindikasikan bahwa tantangan dalam mempertahankan tren peningkatan PAD masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Fluktuasi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada beberapa tahun, upaya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan PAD masih menghadapi berbagai tantangan. Tren ini mencerminkan bahwa strategi peningkatan PAD yang diterapkan pada tahun 2021 dan 2023 cukup efektif, namun belum mampu menjamin konsistensi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi PAD di antaranya adalah dinamika perekonomian daerah, kebijakan fiskal nasional, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas usaha dapat berdampak pad penerimaan

pajak dan retribusi daerah. Selain itu, adanya perubahan kebijakan transfer fiskal dari pusat juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengukur enam dimensi utama: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi belanja, penyerapan anggaran, serta inovasi pengelolaan keuangan daerah. Capaian IPKD Kota Probolinggo pada tahun 2020 sebesar 68,3 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 61,06. Capaian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 68,42, lalu melonjak di tahun 2023 menjadi 79,39. Namun, pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 76,14. Secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan capaian IPKD.

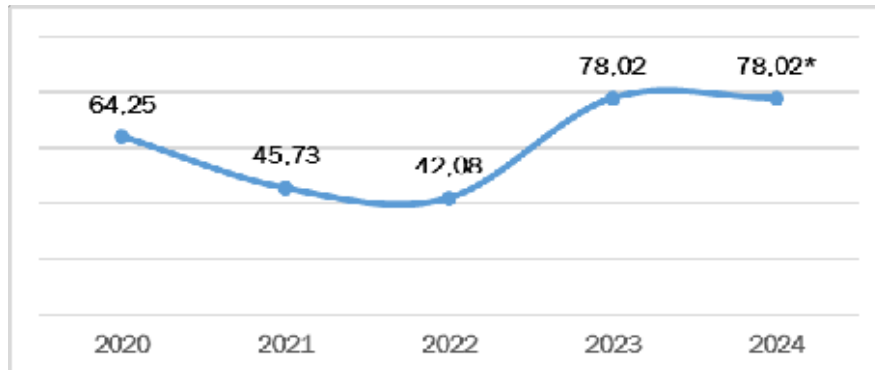
Persentase kenaikan PAD di Kota Probolinggo tiap tahun nya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 capaian sebesar 4,31 persen dan tahun 2021 meningkat menjadi 13,7 persen. Pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga -11,09 persen. Di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hingga 8,67 persen namun di tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga -1,67.

Adapun Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo menunjukkan capaian yang membanggakan, yakni memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 kali berturut-turut hingga tahun 2024. Di sisi lain, persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyusun LKPD sesuai ketentuan juga mencapai 100% secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan tingginya komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Dengan capaian ini, Kota Probolinggo diharapkan dapat terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang berkualitas dan berbasis kinerja. Sedangkan capaian atas persentase asset tetap dengan dokumentasi legal untuk fluktuasinya dipengaruhi oleh penambahan dari jumlah bidang tanah dan penambahan jumlah peralatan dan mesin sebagai hasil pengadaan tahun berjalan, serta hasil sertifikasi atas penambahan jumlah bidang tanah (tanah fasum dan jalan lingkungan)

2.1.3.33. KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo berperan dalam membangun kapasitas aparatur pemerintah yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta pembinaan aparatur sipil negara (ASN), BKPSDM berupaya untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang mencerminkan tingkat kompetensi, integritas, dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut didukung oleh indikator kinerja yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2. 94 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Kota Probolinggo, 2025

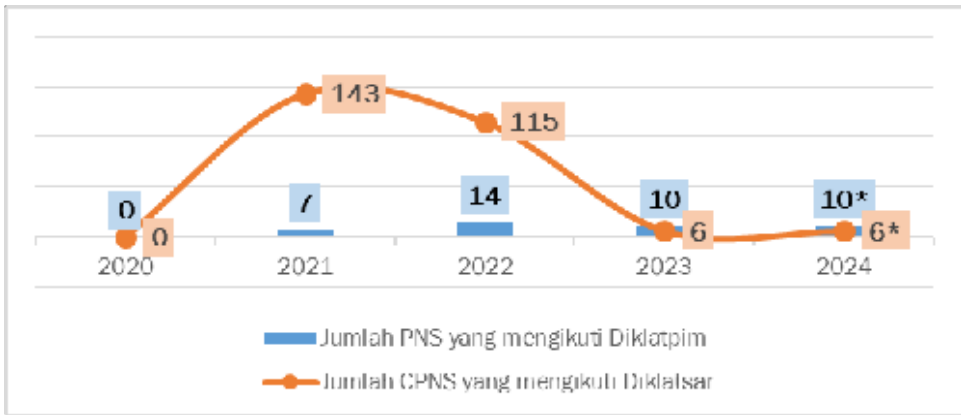
Berdasarkan Data Indeks Profesionalitas Aparatur Kota Probolinggo dalam periode 2020-2024, terlihat adanya tren fluktuatif yang mencerminkan dinamika peningkatan kapasitas ASN. Pada Tahun 2020, indeks ini berada pada angka 64,25 dengan kategori rendah. Namun pada Tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 45,73 dengan kategori sangat rendah, yang kemudian pada Tahun 2022 semakin menurun pada titik terendah dengan nilai 42,08 dengan kategori yang masih sama yaitu sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 dan 2022 terdapat penyetaraan jabatan fungsional yang menyebabkan banyaknya sertifikat yang sudah tidak bisa diakui lagi dalam perhitungan kompetensi. Sertifikat-sertifikat yang dulunya mendukung kompetensi ASN pada jabatan struktural, kini tidak bisa lagi diakui karena sudah beralih pada jabatan fungsional. Hal ini yang menyebabkan penurunan pada Indeks Profesionalitas Aparatur, khususnya pada komponen Kompetensi. Tidak hanya itu, terdapat beberapa ASN yang tidak segera memperbaharui ataupun mengunggah sertifikat-sertifikat yang baru diperoleh. Pada Tahun 2023, Indeks Profesionalitas Aparatur kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam ke angka 78,02 dengan kategori sedang, nilai ini dirilis secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara dan menjadi angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan pada formulasi perhitungan pada komponen Kualifikasi dan Kompetensi. Nilai tersebut masih sama sampai dengan Tahun 2024, jadi nilai Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024 yaitu sebesar 78,02 merupakan nilai sementara yang ditarik secara real time pada Aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara).

Terdapat tantangan yang dihadapi BKPSDM Kota Probolinggo dalam meningkatkan profesionalitas aparatur antara lain adalah ketidakstabilan tingkat profesionalisme ASN, yang terlihat dari penurunan indeks secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu, ketersediaan program pelatihan yang relevan dan berbasis kompetensi masih menjadi tantangan, karena peningkatan profesionalisme ASN sangat bergantung pada efektivitas program pengembangan yang diberikan. Implementasi sistem merit yang lebih ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses promosi dan pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan berbasis kinerja, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan profesionalitas aparatur. kinerja BKPSDM Kota Probolinggo dalam meningkatkan profesionalitas aparatur telah menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam dua tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, tren peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 menandakan bahwa berbagai kebijakan dan program pengembangan ASN telah berjalan

dengan baik. Untuk menjaga momentum ini, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam pengelolaan SDM aparatur, termasuk penguatan sistem pelatihan berbasis digital, peningkatan manajemen talenta ASN, serta penerapan kebijakan yang mendukung profesionalisme dan integritas ASN dalam jangka panjang.

2.1.3.34. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan pendidikan dan pelatihan merupakan urusan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. BKPSDM ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja dari urusan pendidikan dan pelatihan adalah:



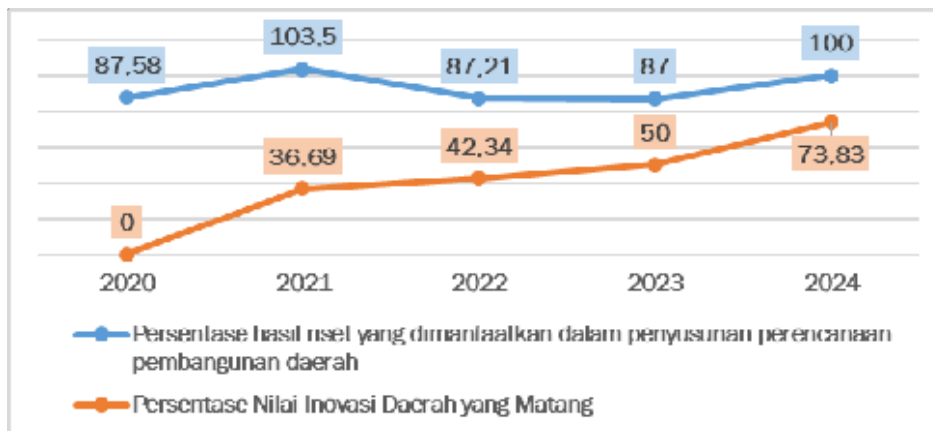
Gambar 2. 95 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data selama Tahun 2020-2024, indikator jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan di Kota Probolinggo mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Tahun 2020 tidak ada PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, kemudian meningkat menjadi 7 orang pada Tahun 2021, lalu meningkat lagi menjadi 14 orang di Tahun 2022, namun mengalami penurunan menjadi 10 orang pada Tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan karena pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan berdasarkan jumlah PNS yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan kompetensi baik Nasional, Administrator, maupun Pengawas. Sedangkan pada indikator jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Latsar terjadi dinamika yang fluktuatif juga dikarenakan jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Latsar ditentukan berdasarkan Jumlah Formasi yang dibutuhkan dalam Pengadaan CPNS. Pada Tahun 2020 tidak ada CPNS yang mengikuti Diklat Latsar dikarenakan tidak ada Seleksi Penerimaan CPNS pada tahun sebelumnya. Terdapat lonjakan pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 143 orang dan 115 orang pada Tahun 2022 dikarenakan terdapat Seleksi Penerimaan CPNS dengan Jumlah Formasi yang dibutuhkan dengan jumlah tersebut. Sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 6 orang dan 2024 sebanyak 5 orang yang mengikuti Diklat Latsar dikarenakan tidak ada Seleksi Penerimaan CPNS pada tahun sebelumnya. Sebanyak 6 orang CPNS yang mengikuti Diklat Latsar pada Tahun 2023 dan 5 orang CPNS pada Tahun 2024 tersebut merupakan CPNS yang berasal dari sekolah kedinasan.

2.1.3.35. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menciptakan produk baru serta menguji efektivitas dari produk yang telah dihasilkan. Metode ini mencakup proses riset secara sistematis untuk menciptakan inovasi serta mengevaluasi keefektifan dari hasil yang telah dikembangkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BappedaLitbang) Kota Probolinggo memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada data dan riset. BappedaLitbang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program pembangunan tersusun secara sistematis, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di Kota Probolinggo, urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Sesuai amanat Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan berdasarkan hasil riset serta pengembangan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.



Gambar 2. 96 Capaian Kinerja Urusan Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

Indikator Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah menggambarkan sejauh mana hasil penelitian dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2020, persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di angka 87,58% yang menunjukkan bahwa hasil penelitian belum dimanfaatkan secara penuh dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kemudian nilai persentase ini mengalami peningkatan pada tahun 2022, yakni 103,50%. Hal ini menunjukkan adanya optimalisasi riset yang dimanfaatkan. Namun pada tahun 2022 dan 2023, persentasenya menurun di angka 87,21% dan 87%. Kemudian pada tahun 2024, indikator ini mencapai 100%, yang menandakan seluruh hasil penelitian telah dimanfaatkan secara penuh dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Nilai inovasi daerah yang matang mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk secara efektif dan efisien mengembangkan dan menerapkan inovasi kedalam berbagai aspek yakni: tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian nilai



inovasi daerah yang matang di Kota Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 36,69 persen dan naik menjadi 42,34 persen. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 50 persen dan tahun 2024 menjadi 73,83 persen. Peningkatan nilai inovasi daerah yang matang ini mengindikasikan bahwa Kota Probolinggo sangat mendukung lahirnya inovasi baik dari adanya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah serta adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan Masyarakat.

2.1.3.36. PENGAWASAN

Inspektorat yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Kinerja Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti persentase perangkat daerah (PD) yang memperoleh nilai SAKIP minimal A, persentase penanganan hasil temuan pemeriksaan, serta tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indikator-indikator ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

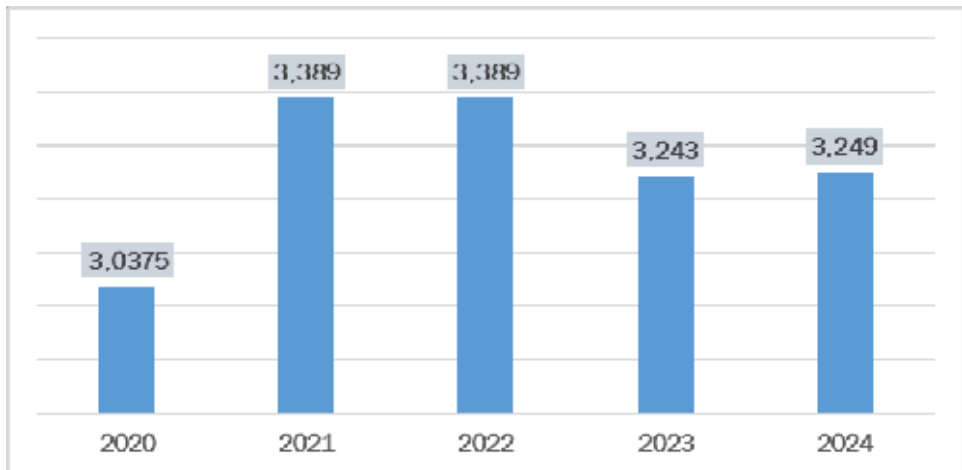


Gambar 2. 97 Capaian Kinerja Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Inspektorat Kota Probolinggo, 2025

Indikator persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal A menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 55% pada tahun 2020 menjadi 66,67% pada tahun 2021, kemudian berturut-turut meningkat hingga mencapai 75% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat akuntabilitas dan perencanaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo semakin membaik dari tahun ke tahun. Sementara itu, indikator persentase penanganan hasil temuan pemeriksaan menunjukkan capaian yang fluktuatif, yakni 95,76% pada tahun 2020 meningkat sedikit pada 2021 menjadi 96,26%, namun kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya hingga stagnan pada angka 90,25% akan tetapi kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 94,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan dalam percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah.

Indikator yang menjadi perhatian lebih adalah tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian dalam mencegah risiko penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2020, tingkat maturitas SPIP berada pada angka 3,0375, yang kemudian meningkat signifikan menjadi

3,389 pada tahun 2021 dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, indikator ini mengalami sedikit penurunan menjadi 3,243, sebelum kembali mengalami peningkatan kecil ke 3,249 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan efektivitasnya secara konsisten.



Gambar 2. 98 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2024
Sumber: Inspektorat Kota Probolinggo, 2025

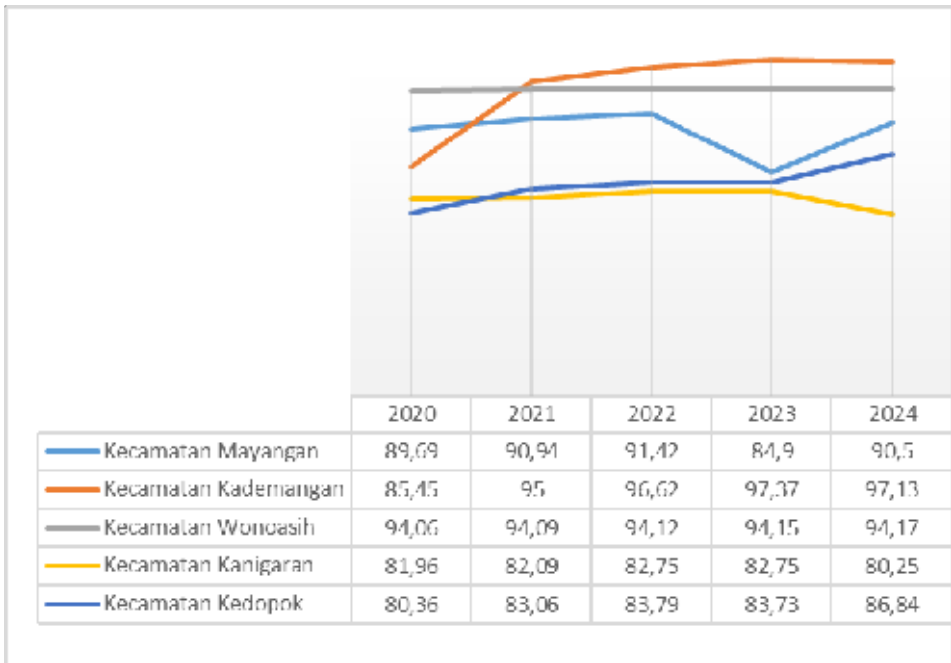
Inspektorat Kota Probolinggo menghadapi tantangan dengan adanya perangkat daerah yang belum mencapai nilai SAKIP minimal A, yang menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja masih perlu diperkuat. Selain itu, stagnasi dalam penanganan hasil temuan pemeriksaan mengindikasikan perlunya strategi yang lebih agresif dalam menindaklanjuti hasil audit dan pemeriksaan agar tidak terjadi akumulasi permasalahan yang belum terselesaikan. Tantangan lainnya adalah ketidakstabilan dalam tingkat maturitas SPIP, yang menunjukkan perlunya penguatan dalam pengendalian internal agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan kebijakan dan risiko yang dihadapi pemerintah daerah. Kinerja Inspektorat Kota Probolinggo dalam pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama dalam peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah dan efektivitas sistem pengendalian internal. Namun, tantangan dalam penyelesaian hasil temuan pemeriksaan dan konsistensi penguatan pengendalian internal masih perlu menjadi perhatian. Dengan strategi yang lebih sistematis, seperti penguatan mekanisme pengawasan berbasis risiko, percepatan tindak lanjut hasil audit, serta optimalisasi sistem pengendalian internal berbasis teknologi, Inspektorat Kota Probolinggo diharapkan dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah secara lebih efektif.

2.1.3.37. KEWILAYAHAN

Kota Probolinggo memiliki lima kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kanigaran, dan Kecamatan Kedopok. Setiap kecamatan memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara langsung di tingkat wilayah. Dalam menjalankan peran tersebut, tingkat keberhasilan kecamatan dapat diukur melalui indikator



penting seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh masing-masing kecamatan.



Gambar 2. 99 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 5 Kecamatan Di Kota Probolinggo 2020-2024

Sumber : Semua Kecamatan Di Kota Probolinggo, 2025

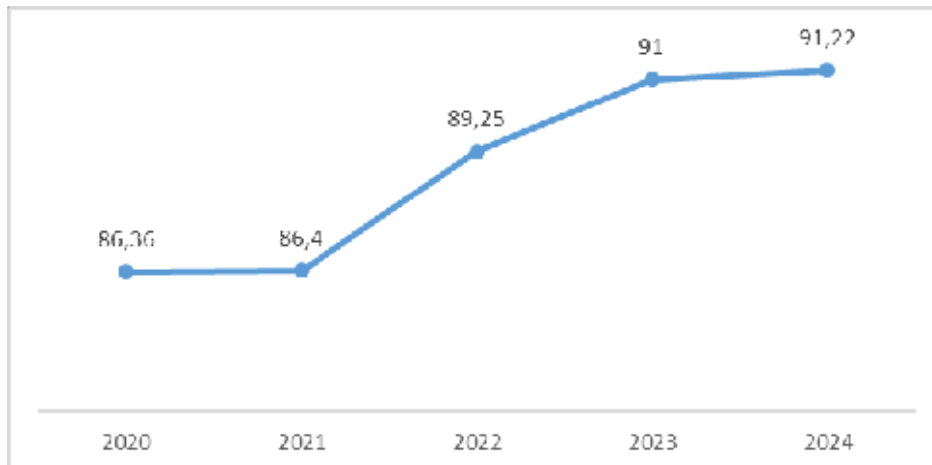
Berdasarkan data grafik di atas, terlihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari kelima kecamatan di Kota Probolinggo menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Kecamatan Mayangan mengalami penurunan kinerja pada Tahun 2023 menjadi 84,9. Namun pada Tahun 2024 IKM Kecamatan Mayangan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 90,5. Sedangkan untuk Kecamatan Kanigaran menunjukkan trend penurunan dari 81,96 pada Tahun 2020 menjadi 80,25 pada Tahun 2024. Capaian IKM ini menunjukkan adanya tantangan dan karakteristik yang berbeda di setiap kecamatan, seperti kondisi sarana dan prasarana yang kurang merata, kualitas sumber daya aparatur yang berbeda-beda, serta karakteristik masyarakat yang beragam. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi pelayanan publik agar lebih efektif dan merata. Dengan memperhatikan perbedaan karakteristik tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan serta menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif, responsif, dan berkualitas di seluruh kecamatan yang ada di Kota Probolinggo.

2.1.3.38. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan penyelenggaraan pemerintahan umum berada di bawah tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Probolinggo. Urusan ini diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu persentase jumlah potensi konflik sosial masyarakat yang terselesaikan serta kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP. Indikator persentase jumlah potensi konflik sosial yang terselesaikan menunjukkan capaian yang konsisten sebesar 100%, baik pada tahun 2020 maupun tahun 2024, yang berarti seluruh potensi konflik sosial yang muncul di Kota Probolinggo telah mampu diselesaikan secara



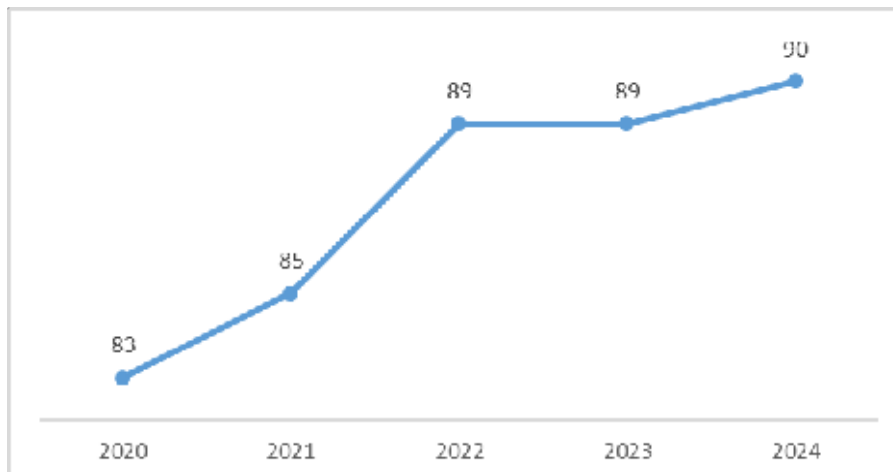
tuntas. Selanjutnya diukur pula menggunakan survei kepuasan masyarakat. Dan persentase orkemas yang aktif



Gambar 2. 100 Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, 2025

Capaian survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, skor kepuasan masyarakat tercatat sebesar 86,36, yang kemudian meningkat tipis menjadi 86,4 pada tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana indeks mencapai 89,25, dan kembali melonjak menjadi 91 pada tahun 2023. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 91,22. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pelayanan, peningkatan efektivitas komunikasi publik, serta peningkatan aksesibilitas layanan yang diberikan oleh Kesbangpol kepada masyarakat luas. Disamping itu perhitungan kinerja kesbangpol juga dilihat dengan persentase orkesmas yang aktif di Kota Probolinggo.



Gambar 2. 101 Jumlah Orkesmas Aktif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, 2025

Jumlah Orkesmas aktif menunjukkan tren yang relatif stabil dan meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 83 Orkesmas yang aktif, kemudian meningkat menjadi 85 pada tahun 2021. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 89 Orkesmas aktif, yang bertahan hingga tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 90 Orkesmas. Stabilitas dan kenaikan jumlah organisasi ini menunjukkan bahwa ekosistem organisasi masyarakat di Kota Probolinggo cenderung sehat dan berkembang, serta menunjukkan potensi partisipasi warga yang semakin

aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kebangsaan. Terlepas daripada itu terdapat satu capaian terkait pemilu yang baru dilakukan pada tahun 2024 lalu yakni Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Umum sebanyak 78,7% di Kota Probolinggo

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan positif dan jumlah organisasi kemasyarakatan (Orkesmas) aktif mengalami pertumbuhan stabil, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dampaknya lebih substantif terhadap kualitas kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya legalitas dan pembaruan data kelembagaan Orkesmas yang dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, sebagian Orkesmas masih beroperasi secara seremonial dan belum menunjukkan kontribusi nyata dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan maupun partisipasi pembangunan. Selain itu, pelayanan publik Kesbangpol masih menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat secara bermakna, di mana komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil belum sepenuhnya bersifat dua arah dan responsif. Isu lain yang mengemuka adalah terbatasnya pelibatan masyarakat rentan dan kurang maksimalnya respon terhadap potensi konflik sosial di akar rumput. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Orkesmas, perbaikan mekanisme pembinaan yang lebih partisipatif, serta transformasi pelayanan publik yang inklusif menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas Kesbangpol dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lokal.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1.Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Iklim Investasi

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi. Secara terperinci, realisasi kinerja aspek daya saing Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 36 Realisasi Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI KINERJA					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu Rupiah / Tahun	12.180	12.245	12.571	12.999	13.405	BPS
2	Nilai Tukar Petani	Skor	110,36	111,02	111,16	111,21	111,33	Disperta KP & Perikanan
3	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	0,74	0,78	0,82	0,84	97,18	Disperta KP & Perikanan
4	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	0,4	0,37	0,389	0,419	0,09	DPMPPTSP & Naker
5	Persentase Penurunan Kriminalitas	%	31.32	13	N/A	N/A	N/A	Bakesbangpol & Satpol PP
6	Persentase Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Baik	%	72,12	73,09	72,81	74,07	74,34	Bappeda Litbang
7	Persentase ketersediaan infrastruktur dasar	%	75,16	77,61	77,00	76.72	74,98	Bappeda Litbang

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah terkait, 2025



Secara umum realisasi kinerja aspek daya saing Kota Probolinggo pada tahun 2024 relatif baik dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Realisasi indikator-indikator dalam aspek daya saing daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Indikator-indikator dengan **peningkatan realisasi** dibandingkan tahun 2023 yang meliputi:
 - Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.
 - Nilai Tukar Petani.
 - Nilai Tukar Nelayan.
 - Persentase Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Baik
- b. Indikator dengan **penurunan realisasi** dibandingkan Tahun 2023 yaitu:

Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN

Persentase realisasi pertumbuhan nilai investasi Kota Probolinggo 2024 sebesar 0,09% dengan target sebesar 0,41%. Capaian pertumbuhan nilai investasi sebesar 21,95% dengan nilai investasi sebesar Rp 18.054.544.299.111,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, nilai investasi tahun 2024 bertambah sebesar Rp 1.505.080.045.532,00. Pertambahan nilai investasi 2024 terbesar berasal dari investasi Penanaman Modal Asing pada sektor perindustrian yaitu sebesar Rp 75.200.000.000,00. Capaian pertumbuhan nilai investasi 2024 tidak dapat memenuhi target. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1. Tahun 2024 merupakan Tahun Politik PEMILU 2024 sehingga berdampak kepada para investor untuk berinvestasi (wait and see)
2. Terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Probolinggo (luas wilayah) yang sesuai untuk peruntukan pengembangan industri

Persentase ketersediaan infrastruktur dasar

Target Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 80,05% dengan realisasi sebesar 74,98% sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 93,67% (kategori sangat tinggi). Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,02% dari tahun 2023 yang sebesar 77%.

Ditinjau dari komponen penyusun Persentase Ketersediaan Infrastruktur, terdapat beberapa indikator yang belum melampaui target yaitu:

1. Prosentase sampah masuk TPA. Prosentase sampah masuk TPA dengan capaian 72.44%. Hal tersebut disebabkan terdapat perubahan metode penghitungan berupa perubahan koefisien timbulan sampah yang sebelumnya menggunakan 0,4 menjadi 0,5
2. Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah. Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah dengan capaian 60.95%. Hal tersebut disebabkan terdapat perubahan metode penghitungan berupa perubahan koefisien timbulan sampah yang sebelumnya menggunakan 0,4 menjadi 0,5
3. Prosentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan (UU No. 22 Tahun 2009). Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan dengan capaian 68.37%. Pada tahun 2024 banyak kendaraan khususnya angkutan



barang yang masih proses penyesuaian dimensi kendaraan terkait penerapan regulasi zero odol dan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (penghapusan retribusi PKB) sehingga tidak ada denda bagi kendaraan yang tidak melaksanakan uji serta pengawasan di lapangan yang menurun.

2.1.4.2.Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pusat pembangunan yang proses dan hasilnya harus dilakukan secara terencana dan terpadu demi mendapatkan hasil sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk senantiasa melaksanakan pembangunan yang seimbang, antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Pembangunan manusia di Kota Probolinggo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Kota Probolinggo rata-rata meningkat sebesar 1,32 persen per tahun, dari 74,81 pada tahun 2020 menjadi 77,79 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh seluruh dimensi penyusunnya, terutama dimensi pengetahuan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,82 persen.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Probolinggo adalah 73,52 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,31 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024, memiliki harapan hidup selama 74,31 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS tahun 2024 sebesar 13,98 tahun, meningkat 0,25 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2. Sementara RLS tahun 2024 sebesar 9,72 tahun, meningkat 0,16 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kota Probolinggo



mencapai 13.405 ribu Rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 406 ribu Rupiah dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 37 Realisasi IPM Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	IPM	Indeks	74,81	75,2	76,08	76,93	77,79
2.	Indeks Pendidikan	Indeks	0.67	0.68	0,69	0,7	0,71
3.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84

Sumber : BPS Kota Probolinggo, Tahun 2025

2.1.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya pencapaian SPM di Kota Probolinggo, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027, yang mana di dalam dokumen tersebut telah disampaikan upaya peningkatan capaian SPM antara lain :

1. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen Perencanaan Daerah baik RPJMD, RKPD, sampai Renstra Perangkat Daerah;
2. Memprioritaskan pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan Mengintegrasikan SPM ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Menyusun Rencana Strategi Pemenuhan Pelayanan Dasar;
4. Penyediaan Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan rancangan APBD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan pelayanan dasar setiap tahun.
5. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan dasar yang telah dianggarkan dan dilaksanakan dengan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan SPM secara internal dan berkala yang dilakukan pada program dan kegiatan pelayanan dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:

- a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

2.1.5.1. Capaian SPM Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai hak mutlak yang dimiliki setiap warga negara, pelaksanaan urusan pendidikan diatur melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disebut SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Dalam konteks Kota Probolinggo di Tingkat daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar urusan pendidikan terdiri atas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yang realisasi dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 38 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022-2024

NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Capaian			Kategori Indeks
		Indikator	Target (%)	2022	2023	2024	2024
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	93,51%	99,20%	99,54%	TUNTAS UTAMA
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	92,91%	99,85%	99,89%	
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	94,81%	99,99%	99,89%	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan Data Indeks Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024, secara keseluruhan mencapai TUNTAS UTAMA. Adapun capaian dari masing-masing Jenis Layanan Dasar, untuk Indeks Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024 mencapai 99,54%. Merupakan 80% capaian dari penerima Layanan Dasar PAUD mencapai 98%, dan pencapaian mutu minimal layanan dasar PAUD mencapai 99,89%. Adapun pencapaian mutu minimal layanan dasar PAUD dari unsur Capaian mutu minimal layanan dasar PAUD berupa



pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yaitu buku gambar dan alat mewarnai mencapai 100% dimana dari sejumlah 7.133 peserta didik mendapatkan perlengkapan dasar dari masing-masing satuan PAUD. Kemudian dari unsur capaian Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dari total 205 Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi sejumlah 194 orang sehingga tercapai sebesar 99,89%, sedangkan dari unsur kualitas Tenaga Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV dari sejumlah 638 Tenaga Pendidik sejumlah 456 orang telah memenuhi kualifikasi tersebut sehingga tercapai sebesar 71,47%.

Adapun faktor pendukung capaian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini antara lain: Kebijakan Prioritas Pendidikan Pemerintah Kota Probolinggo diantaranya adalah Pemenuhan BOP PAUD Daerah sebagai unsur peran serta dan tanggung jawab pendanaan Pendidikan Kota Probolinggo selain dari Dana Khusus yaitu BOP PAUD DAK Non Fisik tahun 2024. Pemenuhan BOP PAUD diprioritaskan untuk membantu peningkatan mutu layanan PAUD utamanya pembelajaran, peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN, serta operasional Pendidikan pada Satuan PAUD di Kota Probolinggo. Selain BOP PAUD juga didukung oleh pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan Kurikulum serta Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam rangka untuk mendukung capaian SPM Pendidikan khususnya SPM Pendidikan Anak Usia Dini.

Yang kedua Capaian Layanan Pendidikan Dasar mencapai 99,89%, capaian Layanan Pendidikan Dasar diperoleh dari capaian penerima layanan Dasar Jenjang Pendidikan Dasar mencapai 97%, dan capaian mutu pelayanan dasar yang terdiri dari unsur pemenuhan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar mencapai 100%, sedangkan dari unsur kualitas tenaga Kependidikan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 89,57%, dari unsur kualitas tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 47,44%, dari unsur kualitas tenaga penunjang yang memenuhi kualifikasi mencapai 92,29%, dari unsur kualitas jumlah rombongan belajar satuan Pendidikan dasar mencapai 100%, dan dari unsur Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi minimal C mencapai 97,50%

Adapun faktor pendukung capaian Layanan Pendidikan Dasar antara lain kebijakan Pendidikan Gratis bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Pendidikan Murah berkualitas bagi Satuan Pendidikan Dasar Swasta, berupa pemenuhan Operasional Satuan Pendidikan melalui BOSDA SD/MI dan BOSDA SMP/MTs. Hal ini sebagai upaya untuk peningkatan mutu dan akses pelayanan Pendidikan dasar di Kota Probolinggo dan juga sebagai upaya tanggung jawab pendanaan Pendidikan di daerah selain dari BOS Reguler dan BOS Kinerja dari Kemendikud Ristek RI. Selain itu dalam rangka peningkatan Layanan Pendidikan yang berkualitas didukung dari alokasi DAK Fisik SD dan SMP walaupun dalam pelaksanaannya tidak maksimal pada tahun 2024. Selain itu juga didukung oleh program kegiatan dan sub kegiatan pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dan SMP.



Ketiga capaian layanan Pendidikan Kesetaraan mencapai 99,89%, merupakan terdiri dari capaian penerima layanan dasar Pendidikan Kesetaraan mencapai 100%, dari capaian mutu minimal layanan Pendidikan Kesetaraan dari unsur pemenuhan modul belajar dan perlengkapan belajar mencapai 100%, pemenuhan rombongan belajar satuan Pendidikan kesetaraan mencapai 100% dari kebutuhan 32 rombongan belajar tercukupi 32 rombongan belajar, selanjutnya dari unsur kualitas pendidik yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV mencapai 50,00%, dari capaian unsur kualitas tenaga Pendidikan (Kepala Sekolah) yang sudah berkualifikasi S1 / D-IV mencapai 100% dari 6 Kepala Sekolah semua sudah memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Dari unsur kualitas Tenaga Pendukung mencapai 92,31% dari 13 Tenaga Pendukung yang sudah memenuhi sejumlah 12 orang. Dari unsur Satuan Pendidikan Kesetaraan yang sudah terakreditasi minimal C mencapai 50%.

Faktor pendukung capaian indeks Layanan Pendidikan Kesetaraan didukung antara lain kebijakan prioritas kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan akses Pendidikan serta untuk peningkatan profesionalitas satuan Pendidikan non formal berupa pelaksanaan keaksaraan fungsional, pelaksanaan asesmen ANBK Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan, peningkatan profesionalitas Pembimbing / Tutor, peningkatan layanan satuan Pendidikan melalui BOP Kesetaraan yang bersumber DAK Non Fisik, BOSDA MADIN.

Permasalahan dan solusi/rencana tindak lanjut dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan pada Tahun 2024 dan rencana tindak lanjut pemenuhan SPM Pendidikan pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data :

Pengumpulan Data masih dilaksanakan pada Triwulan 2 Tahun 2024, sehingga butuh waktu untuk pengelolaan data untuk mendapatkan hasil capaian SPM Triwulan 2 Tahun 2024

Beberapa capaian SPM Pendidikan pada platform pendataan sudah tidak sesuai lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2024

b. Penghitungan Kebutuhan :

Masih kurang akuratnya data dari satuan pendidikan

c. Perencanaan dan Penganggaran :

Perencanaan dan Penganggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2018 dan Kepmendagri 050 Tahun 2019, sehingga kita mengintegrasikan program kegiatan dan sub Kegiatan yang sudah direncanakan sesuai RKPD untuk pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024;

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pendataan SPM baru dilaksanakan pada Triwulan 3 Tahun 2024

Terbatasnya anggaran untuk pendataan SPM bagi Satuan Pendidikan

e. Lain-lain

Perlunya Inisiasi dan Kerjasama lintas Sektoral dengan Kementerian Agama Kota Probolinggo untuk capaian Pendataan SPM Tahun 2024

Perlunya penyesuaian platform pelaporan SPM Kemendagri dengan Permendagri 59 Tahun 2021 dan Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 2024

Beberapa capaian SPM Pendidikan jika disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 2024 masih belum bisa dipenuhi disebabkan untuk pendidikan masih perlunya perbaikan pada Platform Rapor Pendidikan yang merupakan kewenangan dari Kemendikbud Ristek RI

Sub Kegiatan pendukung SPM tidak bisa dihitung berdasarkan Sub Kegiatan yang ada pada menu Sub Kegiatan Pendukung SPM pada aplikasi, penyusunan sub kegiatan berdasarkan Permendagri 90 / 2019

Kurangnya pemahaman para pengampu kegiatan dan sub kegiatan untuk penyusunan , perencanaan dan penganggaran sub kegiatan pendukung sebagai rencana aksi pendukung capaian SPM

2.1.5.2. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini. Karena kondisi tubuh yang sakit, akan membuat seseorang menjadi tidak produktif dan bisa mendapatkan risiko kematian. Untuk itu maka hadir yang dinamakan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Berikut merupakan target dan realisasi Kota Probolinggo di urusan Kesehatan:

Tabel 2. 39 Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (%)			Kategori Indeks
		Indikator	Target (%)	2022	2023	2024	2024
	KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	94,85%	92%	86,84%	TUNTAS UTAMA
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	92,83%	86%	82,93	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	91,16%	83%	85.75%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	88,09%	90%	91.12%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan.	100%	93,35%	97,44%	99.41%	



NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (%)			Kategori Indeks
		Indikator	Target (%)	2022	2023	2024	2024
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah warga negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	84,53%	88,49%	100%	
7	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	84,32%	87,42%	99.60%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	60,84%	50,96%	94.51%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	98,75%	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan Jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	74,43%	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	Jumlah Warga negara terduga Tuberculosis yang mendapat Layanan Kesehatan	100%	97,60%	100%	100%	
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya Tahan tubuh Manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya Tahan tubuh Manusia (HIV) Yang mendapat layanan kesehatan	100%	100%	100%	95.27%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian SPM Bidang Kesehatan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 rata – rata dari keseluruhan indikator sudah mencapai 85-98%, untuk pelayanan kesehatan rata – rata pencapaian 94,62% tetapi jika dibandingkan dengan target nasional masih perlu dilakukan akselerasi karena target SPM bidang kesehatan adalah 100%.

Pada tahun 2024 ini indikator yang melebihi capaian 100% adalah Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya Tahan tubuh Manusia (HIV). Hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB bersama fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta jejaring.

Ada 5 (lima) indikator bidang SPM Kesehatan yang capaian antara 85%-98% yaitu indikator pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif, dan pelayanan kesehatan orang terduga

Tuberkulosis. Terdapat 2 (dua) indikator SPM yang capaiannya rendah dibawah 80% yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat. Capaian ini rendah dikarenakan pelaksanaan deteksi penderita hipertensi dan ODGJ di lapangan kurang maksimal karena masa transisi dari pandemik ke endemik covid 19 sehingga kegiatan posbindu belum berjalan lancar. Dengan minimnya pelacakan/tracing pasien Hipertensi dan ODGJ oleh petugas dan kader Hipertensi dan Keswa, maka angka penemuan kasus aktif (active case finding) pasien Hipertensi dan ODGJ rendah. Seringnya pergantian petugas PTM yang sudah terlatih di Puskesmas diganti sehingga petugas baru belum paham tentang Pelayanan Kesehatan Hipertensi dan ODGJ.

Permasalahan dan solusi/rencana tindak lanjut dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan pada Tahun 2024 dan rencana tindak lanjut pemenuhan SPM Kesehatan pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data :

Kurangnya SDM administrasi/program pada FKTP menyebabkan double job pada SDM kesehatannya, sehingga kurang maksimal dalam perekaman data SPM;

b. Pelaksanaan :

Seringnya pergantian petugas PTM yang sudah terlatih di Puskesmas diganti sehingga petugas baru belum paham tentang Pelayanan Kesehatan penunjang SPM;

Pelaksanaan deteksi di lapangan kurang maksimal karena masa transisi dari pandemic ke endemik covid 19 sehingga kegiatan kader kesehatan belum berjalan lancar;

Tim Posbindu dan Keswa belum berjalan maksimal

c. Penghitungan Kebutuhan :

Masih kurang akuratnya data penghitungan kebutuhan dari FKTP

Kurangnya pemahaman para pengampu sub kegiatan untuk penyusunan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran pendukung capaian SPM

d. Perencanaan dan Penganggaran :

Karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari DAU, penganggaran sub kegiatan untuk pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2024 lebih banyak menggunakan anggaran bersumber dana khusus yaitu Pajak Rokok dan DAK, dimana peruntukan dana khusus diatur secara khusus atau sesuai juknisnya, sehingga kurang maksimal dalam menunjang pencapaian SPM.

Solusi :

a. pelatihan/bimtek/pembinaan pada petugas/nakes untuk perencanaan, penganggaran terkait penghitungan kebutuhan serta perekaman SPM

b. pelatihan untuk kader pendamping/kader kesehatan PTM / Posbindu, Posyandu, serta kader keswa pada FKTP, Rumah sakit dan Klinik.

2.1.5.3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar dalam bidang pekerjaan umum adalah

penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Probolinggo. Adapun yang menjadi target dan realisasinya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 40 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (%)		
		Indikator	Target (%)	2022	2023	2024
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100	100	100
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	97.06	98.52	98,69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kedua jenis pelayanan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Probolinggo tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan capaian. Jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2022-2024 berhasil memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, dimana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standard baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tabel atas capaian pada tahun 2022 masih berada pada angka 97,06% dengan indikasi bahwa pengolahan air limbah domestik masih belum terlaksana dengan baik. Namun pada tahun-tahun berikutnya terdapat peningkatan capaian hingga mendekati target pelaksanaan program yakni 100%. Perlu adanya perhatian khusus dikarenakan jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik meski belum mampu mencapai target yang sudah ditetapkan namun setiap tahunnya berhasil meningkatkan capaian realisasinya.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum pada Tahun 2024 dan rencana tindak lanjut pemenuhan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Kesulitan dalam Pengumpulan data sehingga belum memiliki data By Name By Address (BNBA)
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk buang air besar di sarana prasarana sanitasi
- c. Masyarakat enggan untuk berlangganan air minum dari Perumdam Bayuangga, dikarenakan kualitas air tanah yang masih baik.

2.1.5.4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian. Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Kota Probolinggo tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR- PKP) Kota Probolinggo. Adapun jenis pelayanan beserta target dan realisasi urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (%)					Kategori Indeks
		Indikator	Target (%)	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Daerah Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kota yang Memperoleh Fasilitasi Rumah yang Layak Huni	100%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	100%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Capaian indikator pelayanan bidang perumahan rakyat 100% dengan rincian yang pertama Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah dengan capaian 100% dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dengan capaian 100%. Pada tahun 2024 terdapat 1 Rumah Bencana dan sudah tertangani

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 dan solusi pemenuhannya antara lain belum adanya anggaran yang melekat pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penganggaran Pemenuhan SPM. Solusi yaitu pada tahun 2024 sudah dianggarkan terkait anggaran Pemenuhan SPM.



2.1.5.5. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Probolinggo mencakup beberapa aspek utama yang dirancang untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Pertama-tama, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum mencakup aspek penegakan hukum, penanganan konflik, dan strategi pencegahan kriminal guna menciptakan lingkungan yang aman dan teratur di seluruh kota.

Kemudian, pelayanan informasi rawan bencana merujuk pada upaya menyediakan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan potensi risiko bencana yang dapat mempengaruhi Kota Probolinggo. Ini melibatkan sistem informasi publik yang efektif untuk memberikan peringatan dini dan panduan kepada warga, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Selanjutnya, dalam konteks pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, SPM akan mencakup program edukasi masyarakat, latihan evakuasi, serta penyediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan meningkatkan respon cepat dalam situasi darurat.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana akan memfokuskan pada respons darurat yang efisien, koordinasi antar instansi, dan penyediaan fasilitas evakuasi yang aman bagi warga yang terdampak. Hal serupa juga berlaku dalam konteks pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan penekanan pada upaya pemadam kebakaran, evakuasi korban, dan strategi untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.

Melalui penerapan SPM ini di Kota Probolinggo, diharapkan bahwa pemerintah setempat dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau kebakaran. Keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, akan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan ini.

Setiap pelayanan memiliki indikator ketercapaian untuk memberikan gambaran kinerja pelayanan setiap tahunnya. Berikut ini adalah indikator setiap pelayanan dan kinerjanya mulai tahun 2020 hingga 2024.



Tabel 2. 42 Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)					Kategori Indeks	
		Indikator	Target (%)	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN									
	Sub Urusan Trantibum									
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	40.5	100	100	100	100	Tuntas Paripurna	
	Sub Urusan Kebencanaan									
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	83.632	83.632	96	100	100		Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	83.632	83.632	100	100	100		
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	87.26	87.216	96	92	100		
	Sub Urusan Pemadam Kebakaran									
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, 2025

Capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Probolinggo dalam 3 tahun terakhir secara umum telah optimal dengan capaian 100% di setiap tahunnya kecuali pelayanan informasi rawan bencana serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang memiliki capaian diatas 90%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi geografis dan iklim di Kota Probolinggo menjadi faktor utama penurunan kinerja. Potensi risiko bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem, dapat meningkatkan tantangan dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, terutama jika terdapat peningkatan frekuensi atau intensitas bencana. Selanjutnya adanya keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun peralatan, keterlibatan TRC dan relawan BPBD yang belum optimal akibat faktor keaktifan relawan yang dinamis serta kapasitas SDM relawan yang kurang sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan tersebut serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan kesiapsiagaan juga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi.



Dari tabel capaian indikator pelayanan bidang Trantibum Linmas diketahui bahwa:

1. Tidak adanya warga kota probolinggo yang terdampak kerugian akibat dari penegakan Perda dan Perkada,
2. Warga Kota Probolinggo mendapatkan pelayanan penuh dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara responsife time;
3. Masih ada beberapa mutu barang/jasa/SDM yang tersedia belum memenuhi mutu barang/jasa/SDM yang dibutuhkan

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Trantibumlinmas pada Tahun 2024 dan solusi pemenuhannya antara lain sebagai berikut :

1. Sub urusan Trantibum dan Kebakaran

Permasalahan :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan Ketentraman dan Ketertiban
- b. Kurangnya Aparatur Penegak Perda Perkada
- c. Semakin kuat pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan Trantibum
- d. Belum tersusunnya SOP sinergitas penyelesaian pelanggaran Perda Perkada
- e. Kurangnya sarana prasarana dalam penyelamatan pemadam kebakaran

Solusi :

- a. Memberikan Sosialisasi Perda Perkada untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat
- b. Memberikan Penguatan SDM Aparatur Penegakan Perda Perkada
- c. Memberikan Penguatan SDM Aparatur Penegakan Perda Perkada
- d. Perlu Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang Trantibum dengan pihak terkait
- e. Pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelamatan pemadam kebakaran

2. Sub urusan Kebencanaan

Permasalahan :

- a. Pengumpulan Data : Belum adanya data dasar jumlah penduduk yang berada dalam daerah rawan bencana per jenis bencana
- b. Penghitungan Kebutuhan : Karena belum ada data dasar maka kami juga kesulitan untuk melakukan penghitungan kebutuhan secara tepat
- c. Perencanaan dan Penganggaran : dibutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi pengadaan Dokumen Penanggulangan Bencana dan Sarana PB.
- d. Pelaksanaan : Koordinasi di lapangan masih belum optimal
- e. Pelaporan : Adanya sistem pelaporan baru Aplikasi SPM Bangda dan permendagri No 59 Tahun 2021 membuat kita harus cepat menyesuaikan

Solusi :

- a. Menggunakan data Estimasi dalam menentukan jumlah penerima layanan dasar
- b. Menggunakan Estimasi Penghitungan Kebutuhan



- c. Menjajagi sumber pembiayaan melalui Usulan kepada BNPB, BPBD Provinsi dan NGO yang bergerak di bidang Kebencanaan, serta bekerjasama dengan pihak akademisi untuk memperingan biaya penyusunan dokumen yang dimaksud
- d. Meningkatkan koordinasi sesuai dengan tupoksi masing – masing.
- e. Terus update pengetahuan dan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan selaku leading sektor Pelaporan SPM

2.1.5.6. Capaian SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar di bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan instansi pelaksana standar pelayanan minimal urusan sosial di Kota Probolinggo. Adapun target dan realisasi dari pelaksanaan standar pelayanan minimal Kota Probolinggo urusan sosial secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 43 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi			Capaian			Kategori Indeks
		Indikator	Target	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2024
BIDANG SOSIAL										
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	98.67%	100%	100%	98.67%	100%	100%	



NO	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi			Capaian			Kategori Indeks
		Indikator	Target	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2024
BIDANG SOSIAL										
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	98.67%	100%	100%	98.67%	100%	100%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	74.80%	100%	100%	74.80 %	100%	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2025

Capaian indikator pelayanan bidang sosial 100 % atau TUNTAS PARIPURNA. Pada 3 (tiga) Jenis Layanan Dasar standart pelayanan minimal mencapai 100%. Namun ada 2 (dua) Layanan Dasar yang hanya mencapai 100 %. Jenis layanan dasar tersebut adalah Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. Capaian tidak sampai 100% karena di Kategori Indeks Pencapaian SPM pada Akses ke layanan pendidikan tidak ada yang terlayani.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Sosial dan solusi pada Tahun 2025 pemenuhan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Permasalahan :

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;
- b. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, Pemberdayaan PMKS, dan Peran Aktif masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2.1.6. REALISASI RPJMD

Sub bab ini akan menyajikan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dengan asumsi bahwa realisasi kinerja IKU dan IKD adalah realisasi Tahun 2024 yang masih mengacu pada target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, terdapat 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 22 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Probolinggo. Pencapaian indikator kinerja menjadi cerminan kemajuan pembangunan daerah serta menjadi penting bagi publik dalam konteks mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah.

2.1.6.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 terdapat 6 IKU Kota Probolinggo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 44 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2023	2024		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,04	4-5	5,15	114,44%
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,93	74,47	77,79	104,46%
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,48	7,3	6,18	115.34%
4.	Indeks Infrastruktur	Indeks	75,53	77,28	74,66	96,61%
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,69	65,19	58,17	89,23%
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,13	73	85,85	117,6%

Sumber : Bappeda Litbang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama / IKU yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 pada tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. 4 indikator telah melampaui target atau capaian di atas 100% meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Pertumbuhan ekonomi

Menurut data BPS Kota Probolinggo Tahun 2024 secara umum terjadi laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Meskipun begitu ternyata ada beberapa kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tertinggi selama 2024 dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,66%, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 8,27%, selanjutnya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,64%. Adapun yang mengalami penurunan paling besar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontraksi sebesar 3,87%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan iklim dengan terjadinya fenomena El Nino selama tahun 2024 sehingga mempengaruhi besarnya produksi pertanian. Pencapaian kinerja utama dalam persentase pertumbuhan ekonomi didukung oleh tiga indikator kinerja daerah, yaitu persentase pertumbuhan nilai investasi, persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dan persentase pertumbuhan PDRB sektor perindustrian.

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Probolinggo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Kota Probolinggo rata-rata meningkat sebesar 1,32 persen per tahun, dari 74,81 pada tahun 2020 menjadi 77,79 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh seluruh dimensi penyusunnya, terutama dimensi pengetahuan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,82 persen.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020–2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Probolinggo adalah 73,52 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,31 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024, memiliki harapan hidup selama 74,31 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS tahun 2024 sebesar 13,98 tahun, meningkat 0,25 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2. Sementara RLS tahun 2024 sebesar 9,72 tahun, meningkat 0,16 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kota Probolinggo mencapai 13.405 ribu Rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 406 ribu Rupiah dari tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Probolinggo diantaranya :

- a. Pendidikan gratis; Pemerintah Daerah menggratiskan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Dengan adanya Pendidikan gratis ini diharapkan tidak ada lagi anak sekolah yang putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, sehingga angka rata-rata lama sekolah meningkat;
- b. Pemberian seragam gratis



- c. Beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan Penghargaan hafidz/hafidzah
- d. Pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C); Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi kewenangan dinas pendidikan sesuai kewenangan masing-masing memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang putus sekolah;
- e. Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Mengingat bahwa faktor penyebab putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga faktor perhatian orangtua, budaya, kurangnya minat bersekolah, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, dan sebagainya, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan;
- f. Penambahan jumlah guru; Pemerintah Daerah melakukan penambahan jumlah guru dengan cara pengadaan guru, baik PNS maupun Non-PNS, sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Pelatihan dan sertifikasi guru:
- h. Pemberian tambahan tunjangan guru/tenaga pendidik: Pemerintah memberi tambahan tunjangan bagi guru, baik guru PNS terlebih lagi bagi guru non-PNS.
- i. Dari sisi sarana/prasarana pendidikan: melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat, dilakukan dengan kegiatan Merehabilitasi dan melengkapi sarana/prasarana sekolah, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan atau rehabilitasi sekolah-sekolah dan melengkapi sarana/prasarana belajar. Banyak sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak dan kurang layak untuk digunakan dalam proses belajar-mengajar, dan tak jarang beberapa sekolah tidak dapat melaksanakan proses belajar-mengajar pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan misalnya dimana sekolah bocor, banjir dan khawatir ada yang ambruk, dan sebagainya;
- j. Pengembangan Perpustakaan Keliling (Pusling) sejak 2019 keliling ke sekolah
- k. POCADI - pojok baca digital - scan barcode buku digital di perpustakaan
- l. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Baru (Ar Rozy) Dan Sarana Prasarana Pendukung Dan Tenaga Medis-non Medis Untuk Mendukung Operasional Ar Rozy Termasuk Ambulans Siaga Di 29 Kelurahan Ditambah Dengan 6 Ambulans Darurat Jantung Yang Dilengkapi Alat Automatic External Defibrilator (AED).
- m. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan Pengembangan Aplikasi Go PMB (Praktek Mandiri Bidan dan Profil terkini Siskia Pro Cantik (aplikasi KIA untuk Ibu hamil). Tenaga Kesehatan yang sudah terorientasi Kegawatdaruratan pada Maternal sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat langsung tertangani dengan baik. Peningkatan pengetahuan ibu hamil,



- keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan kelas ibu hamil mengenai faktor-faktor resiko dan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga pengambilan keputusan tidak terlambat. Rujukan kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat langsung mengakses sehingga komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat tertangani dengan baik.
- n. Terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui BPJS memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Tahun 2023 Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Mencapai 100 Persen Dari Jumlah Masyarakat Kota Probolinggo
 - o. BPJS ketenagakerjaan bagi guru ngaji/guru sekolah minggu/ pasraman, dan klenteng
 - p. Pemberian makanan tambahan pada kegiatan posyandu,
 - q. Kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan sambang PAUD, sambang Posyandu
 - r. Pelayanan kesehatan menggunakan kendaraan reaksi cepat - mobil kecil dan motor untuk menjangkau area tertentu yang terintegrasi dengan Call Center 112

Persentase penduduk Miskin

Berbagai program diluncurkan untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin dan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang merupakan target utama pemerintah, selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program-program pengentasan kemiskinan antara lain program beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan modal usaha dan sebagainya.

Nilai realisasi pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan target 2024, yakni 7,3 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan yang ditargetkan, sebesar 0,3 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 15,86 ribu jiwa dan pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 15,24 ribu jiwa. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 telah berkurang sebanyak 620 jiwa dibandingkan dengan Jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo pada tahun 2023. Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index merupakan ukuran rata - rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P1 pada tahun 2020 sebesar 1,19 kemudian mengalami fluktuasi

turun menjadi 0,90 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai P1 naik kembali menjadi 1,04 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan P1 menjadi 0,98.

Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai P2 pada tahun 2020 sebesar 0,28 mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai P2 kembali meningkat menjadi 0,23 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan P2 menjadi 0,24. Hingga pada tahun 2024 turun menjadi 0,21.

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Dalam hal peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi misalnya, bisa dilihat dari indeks reformasi birokrasi.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 85,85 (angka sementara) sehingga tercapai 117,6%. Namun selama 2024, terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya :

1. Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan;
2. Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran;
3. Terdapat target Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dalam target Output Rencana Aksi;
4. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.

Demi menjaga kualitas dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi tersebut diperlukan perbaikan – perbaikan pada hal-hal di bawah ini, dengan catatan sebagai berikut:

1. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama;
2. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran;
3. Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama;
4. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.

- b. 2 indikator yang belum melampaui target yaitu:

Indeks Infrastruktur.

Target Indeks Infrastruktur Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 77,28 dengan realisasi sebesar 74,66 sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 96,61% (kategori sangat tinggi). Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,87 dari tahun 2023 yang sebesar 75.53.

Penurunan realisasi Indeks Infrastruktur disebabkan oleh penurunan realisasi persentase ketersediaan infrastruktur sebagai salah satu pembentuk Indeks Infrastruktur dari 77 pada tahun 2023 menjadi 74,98 pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2,02. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya peningkatan akses dan kualitas infrastruktur guna meningkatkan capaian di tahun mendatang seperti peningkatan pemenuhan layanan dasar (air minum, sanitasi) serta pemerataan penyediaan layanan ke seluruh wilayah.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Realisasi capaian IKLH untuk tahun 2024 sebesar 58.17 dari target sebesar 65,19 atau tercapai sebesar 89.23%, dengan kriteria kualitas "Sedang". Perhitungan IKLH tahun 2024 dilakukan oleh sistem aplikasi dari IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Capaian IKLH Tahun 2024 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 61.69

Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat mencapai target dikarenakan untuk Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak dapat mencapai target. Berdasar dari hasil perhitungan, Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Probolinggo tahun 2024 memiliki nilai sebesar 41,43 yang berada pada kategori dengan entitas "tercemar sedang", dimana untuk kategori kurang ini skornya adalah antara $25 \leq x \leq 50$. Pengujian Kualitas Air dilakukan sebanyak 14 (empat belas) data hasil uji diperoleh data rata-rata air sungai tercemar sedang oleh nitrat dan Fecal Coli. Adapun IKL Kota Probolinggo tahun 2024 tidak dapat mencapai target dikarenakan sebagian RTH yang ada tidak didominasi tutupan vegetasi pepohonan dengan tinggi minimal 2 meter, serta memiliki kerapatan yang kurang sehingga pada saat dilaksanakan verifikasi dengan menggunakan system Geograpic Information System (GIS) tutupan lahan tidak dapat terdeteksi sehingga usulan tutupan lahan tidak terverifikasi.

Solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain:

- Melakukan koordinasi yang intensif antar OPD terkait guna mengurangi pencemaran air sungai;
- Melakukan upaya pemulihan lingkungan secara periodik seperti melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha, pemasangan trashbum, memperbanyak aksi cleanup.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan mengeluarkan asap;
- Melakukan sosialisasi tidak membakar sampah atau limbah padat lainnya

- e. Perlu dilakukan penambahan Luas Lahan baru untuk Hutan Kota, RTH, kawasan lindung RTH RT/RW;
- f. Melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

2.1.6.2. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 terdapat 22 IKD Kota Probolinggo dengan capaian pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 45 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2023	2024		
			KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,42	0,41	0,09	21,95%
2.	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	5,43	6,3	4,82	76,5%
3.	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	%	6,72	2,3	3,92	170,43%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,53	5,17	4,44	114,12%
5.	Persentase PMKS	%	46,28	33	43,46	131,70%
6.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	81,2	85	81,4	95,76%
7.	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	%	1,46	2	2	100%
8.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	68,74	68,45	76,80	112%
9.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,7	0,7	0,71	101,43%
10.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,83	0,79	0,84	106,33%
11.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	%	77	80,05	74,98	93,66%
12.	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	%	74,07	74,5	74,34	99,79%
13.	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	51,5	41,43	80,45%
14.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,64	90,6	90,74	100,15%
15.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	26,36	41,7	26,66	63,93%
16.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	107,22	111	105,01	105%
17.	Nilai SAKIP	Skor	73,25	82	71,91	87,70%
18.	Nilai LPPD	Skor	N/A	3,27	N/A	N/A
19.	Indeks SPBE	Indeks	3,1	3,6	4,04	112,22%
20.	Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	100%
21.	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	64,04	65	78,02	120,03%
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,41	84,25	86,57	102,75%

Sumber : Bappeda Litbang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Daerah/IKD yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 pada tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. **11 indikator telah melampaui target** atau capaian di atas 100% meliputi: Persentase PDRB Sektor Perindustrian, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase PMKS, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Kualitas Udara, Indeks Risiko Bencana, Indeks

SPBE, Indeks Profesionalitas Aparatur, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

1) Persentase PDRB Sektor Perindustrian

Dalam pelaporan kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,92% yang berarti terjadi penurunan 2,8% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Di kategori industri ini ada 16 sub kategori, ada beberapa sub kategori yang mengalami peningkatan sehingga mendongkrak pertumbuhan kategori industri. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan industri yaitu banyaknya momen pameran IKM lewat ajang SEMIPRO, refleksi kepemimpinan walikota dan event-event lain yang mendorong pelaku IKM agar terdongkraknya produksinya. Namun pada sub kategori industri kayu dan tekstil mengalami penurunan produksi sehingga secara umum pertumbuhan sektor lapangan usaha industri pengolahan mengalami perlambatan dibandingkan 2023.

Dalam rangka meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB kategori perindustrian di Kota Probolinggo, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

Penguatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha dengan memberikan kemudahan pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko;

Digitalisasi dan Transformasi Industri 4.0 dengan mendorong adopsi teknologi digital dan otomasi dalam industri pengolahan, serta mengembangkan ekosistem inovasi melalui inkubator bisnis dan klinik IKM;

Penguatan SDM dan Ketenagakerjaan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan berbasis industri;

Peningkatan Daya Saing Produk dengan memberikan fasilitasi branding kemasan dan sertifikasi produk;

Mendorong industri untuk fokus pada hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah produk dan mengembangkan industri berbasis bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor ;

Mendorong pelaksanaan industri hijau yang ramah lingkungan.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tren tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, Pada tahun 2023 yakni 4,53 dan tahun 2024 menjadi 4,44 persen. Semakin besar persentase TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), maka semakin besar jumlah pengangguran yang ada. Nilai realisasi tahun 2024 (4,44 persen) sudah lebih rendah dari target yang ditentukan yakni 5,17 dengan nilai capaian 114,12%. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka sudah menurun dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan kesempatan kerja. Akan tetapi perlu dilihat lagi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka TPT tersebut. Beberapa program kegiatan telah dilaksanakan Pemerintah Kota Probolinggo, antara lain:



Kegiatan Job Market Fair. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui JOB MARKET FAIR, yang bertujuan untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja dalam proses penempatan tenaga kerja;

Millenial Job Center, berupa kegiatan sosialisasi kepada Pelajar dan Mahasiswa, MJC sebagai wadah pertukaran informasi dan jaringan di antara klien, mentor dan talent, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem freelance yang kompetitif dan kondusif;

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dalam upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja telah dilaksanakan pelatihan dalam satu tahun sebanyak 56 pelatihan.

Beberapa penyebab timbulnya pengangguran di Kota Probolinggo menurut RPJMD 2019-2024, yakni diindikasikan bersumber dari banyaknya lulusan SMK baru yang tidak tertampung di lapangan kerja yang tersedia dikarenakan keterbatasan lapangan kerja yang ada di Kota Probolinggo serta ketidaksesuaian kompetensi ataupun spesifikasi tenaga kerja dengan lapangan kerja yang ada.

3) Persentase PMKS

Dari target RPJMD yang telah ditetapkan yaitu sebesar 33 persen, persentase PMKS terealisasi sebesar 43,46 persen. Pemerintah Kota Probolinggo sudah mampu menurunkan persentase PMKS sebesar 2,82 persen dari tahun 2023. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanganan dan pemberdayaan sosial. Namun, angka tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program-program intervensi telah menunjukkan hasil positif, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Optimalisasi strategi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta alokasi sumber daya yang lebih efektif menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target penurunan PMKS sesuai dengan RPJMD.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bersumber dari 3 pendanaan antara lain :

Bantuan APBD berupa penyaluran bantuan sosial sembako bagi fakir miskin, anak yatim/piatu/yatim piatu, eks napi, rantang sehat lansia, bantuan alat bantu disabilitas dan lansia, bantuan peralatan usaha bagi fakir miskin, bantuan langsung tunai dbhcht bagi PMKS dan stunting;

Bantuan Provinsi berupa bantuan peralatan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha bersama, bantuan pasang listrik;

Bantuan APBN berupa bantuan peralatan usaha, alat bantu disabilitas dan lansia dari UPT. sentra paramita mataram, BPNT, PKH, PENA.

Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam mendukung program penanganan PMKS menjadi kendala dalam upaya penanganan dan pemberdayaan



sosial. Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengatasi hal tersebut adalah :

Evaluasi efektivitas program sosial yang sudah berjalan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan;

Libatkan dunia usaha melalui program CSR yang mendukung pemberdayaan PMKS;

Gunakan data untuk menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran

4) Indeks Pendidikan

Berdasarkan tabel diatas, indeks pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2024 sudah melampaui target menjadi 0,71. Indeks pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS tahun 2024 sebesar 13,98 tahun, meningkat 0,25 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2. Sementara RLS tahun 2024 sebesar 9,72 tahun, meningkat 0,16 tahun dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata penduduk Kota Probolinggo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I)

Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo melakukan upaya dalam rangka peningkatan indeks pendidikan diantaranya :

Membentuk ULD (Unit Layanan Disabilitas) untuk pendampingan anak2 disabilitas dan kelas inklusi;

Membentuk Gas PRO CETAR PERKASA yaitu mendirikan Satuan Tugas Kota Probolinggo Cegah dan Tangani Perundungan dan Kekerasan pada Pendidikan yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perundungan serta kekerasan di sekolah-sekolah Kota Probolinggo;

Pendidikan gratis; Pemerintah Daerah menggratiskan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Dengan adanya Pendidikan gratis ini diharapkan tidak ada lagi anak sekolah yang putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, sehingga angka rata-rata lama sekolah meningkat;

Pemberian seragam gratis;

Penghargaan hafidz/hafidzah;

Pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C); Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi kewenangan dinas pendidikan sesuai kewenangan masing-masing memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang putus sekolah;

Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat.(PPDB).Penerimaan Peserta Didik Baru. Mengingat bahwa faktor penyebab putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga faktor perhatian orangtua, budaya, kurangnya minat bersekolah, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, dan sebagainya, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan;



Penambahan jumlah guru; Pemerintah Daerah melakukan penambahan jumlah guru dengan cara pengadaan guru, baik PNS maupun Non-PNS, sesuai dengan kebutuhannya;

Pelatihan dan sertifikasi guru;

Pemberian tambahan tunjangan guru/tenaga pendidik: Pemerintah memberi tambahan tunjangan bagi guru, baik guru PNS terlebih lagi bagi guru non-PNS.

Dari sisi sarana/prasarana pendidikan: melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat, dilakukan dengan kegiatan Merehabilitasi dan melengkapi sarana/prasarana sekolah, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan atau rehabilitasi sekolah-sekolah dan melengkapi sarana/prasarana belajar. Banyak sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak dan kurang layak untuk digunakan dalam proses belajar-mengajar, dan tak jarang beberapa sekolah tidak dapat melaksanakan proses belajar-mengajar pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan misalnya dimana sekolah bocor, banjir dan khawatir ada yang ambruk, dan sebagainya;

Pengembangan Perpustakaan Keliling (Pusling) sejak 2019 keliling ke sekolah;

POCADI - pojok baca digital - scan barcode buku digital di perpustakaan.

5) Indeks Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi pembangunan manusia. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan people centered development. Mengingat peran sangat penting kesehatan dalam pembangunan manusia serta dalam upaya mewujudkan people centered development, maka investasi sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup (lifecycle approach), yang dimulai sejak sebelum bayi itu lahir sampai dengan tumbuh menjadi calon generasi yang sehat. Status kesehatan memberikan suatu kemampuan kepada seseorang untuk menjadi lebih produktif, dan dengan demikian mempunyai daya saing dalam pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Kesehatan yang rendah tidak akan memberikan sumbangan terhadap produktivitas dan daya saing sebagai pekerja. Jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan, besar kemungkinan penduduk yang produktif menjadi tidak produktif, bahkan menjadi beban. Bahkan beban ini semakin besar, jika yang benar-benar produktif hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka akan berdampak pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan kesehatan bukan semata membangun fasilitas kesehatan, namun perlu diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan. Kualitas kesehatan yang baik tidak hanya ditunjang oleh ketersediaan pendanaan yang memadai, namun juga oleh ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas.

Indeks Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2024 telah mencapai target sebesar 0,84 dengan capaian 106,33%. Indeks Kesehatan tersebut diukur dari indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup tinggi akan



dicapai jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik. Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Probolinggo, dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Umur Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 73,52 tahun dan meningkat menjadi 74,31 tahun pada tahun 2024. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa setiap tahun derajat kesehatan penduduk Kota Probolinggo meningkat.

Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian indeks kesehatan, yaitu:

Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan (Community Involment dan Empowerment) dan pelibatan multistakeholder;

Percepatan akreditasi Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta, peningkatan peran Rumah sakit dalam penurunan Kematian Maternal dan Perinatal;

Pemenuhan pemenuhan SDM Kesehatan di Rumah sakit dan puskesmas sesuai standar, khususnya untuk pemenuhan program prioritas;

Penguatan perencanaan obat, penguatan e-catalog, penjaminan ketersediaan obat esensial education penggunaan obat rasional;

Peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor risiko penyakit Tidak menular dan peningkatan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular di FKTP dan jejaringnya;

Melaksanakan kegiatan-kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan kerja di dalam gedung maupun di luar gedung dengan menerapkan protokol kesehatan;

Peningkatan kualitas pelayanan Regulasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan berfokus pada keselamatan pasien, kebutuhan masyarakat maupun stakeholder serta menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku;

Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah;

Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, khususnya berkenaan dengan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti : Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan peralatan kesehatan dan peralatan pendukungnya;

Perlu diupayakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi program secara terpadu dengan instansi terkait, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik;

Antisipasi serta persiapan peningkatan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana alam secara cepat dan tepat;

Kerjasama dengan lintas sektor, LSM, kelompok masyarakat dan institusi non pemerintah lain dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo.



6) Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Probolinggo tahun 2024 adalah 90,74 dengan capaian 100,15% yang diartikan bahwa kondisi kualitas udara pada posisi Sangat Baik. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) ini diperoleh berdasarkan data hasil uji Kualitas Udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim di Empat (4) Titik yaitu :

- Untuk kawasan transportasi dilakukan di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo;
- Untuk Kawasan Permukiman dilakukan di Perumahan Sumber Taman Indah;
- Untuk Kawasan Perindustrian dilakukan di PT Southern Marine Product (PT.SMP);
- Untuk Kawasan Perkantoran dilakukan di Komplek Kantor Walikota Probolinggo

Adapun proses pengujian serta pengambilan sampel difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan DLH Kota Probolinggo hanya melakukan pendampingan pada saat pemasangan dan pengambilan alat sampling Udara. Adapun perolehan IKU Tahun 2024 sebesar 90,74 diartikan bahwa kondisi kualitas udara pada posisi Unggul, hal tersebut diperoleh sumber dari Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan cuaca dimana sepanjang tahun 2024 adanya angin yang bertiup cukup kencang sehingga polutan tidak terakumulasi di udara Kota Probolinggo. Selain itu mengingat Kota Probolinggo merupakan kota yang berada di posisi pesisir pantai, sehingga secara otomatis mempunyai tiupan angin yang berhembus kencang sehingga dapat mengakibatkan terjadi pembersihan polutan udara secara alami. Disamping itu kota Probolinggo juga merupakan kota yang terdapat kawasan industri yang relatif taat dalam pengendalian pencemaran udara. Selain itu Probolinggo juga mengontrol asap/ emisi dari moda transportasi melalui Uji KIR. Kota Probolinggo juga memperbanyak penanaman bersama dengan pemerintah kota, masyarakat, komunitas peduli lingkungan serta perusahaan. Sehingga hal - hal tersebut dapat menjadi pendukung atas pencapaian IKU yang masuk dalam kategori unggul

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, nilai Indeks Kualitas Udara memang mengalami penurunan sebesar 0,9. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) turun karena pada saat pengambilan sampel udara di Semester 1 dan Semester 2 belum pernah terjadi hujan sehingga hasil uji sampel udara di dua semester tersebut sama. Dimana jika terjadi hujan maka polusi udara akan larut bersama dengan air hujan. Namun capaian nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2024 telah mencapai target yaitu sebesar 100,15%. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan mengeluarkan asap;
- Melakukan sosialisasi tidak membakar sampah atau limbah padat lainnya

7) Indeks Risiko Bencana

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, Pencapaian besaran Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024 dengan nilai 105,01 menunjukkan capaian ini melampaui dari target penurunan awal yang sebesar 111. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini diwakili BPBD sudah mampu mengoptimalkan peranannya khusus dalam



peningkatan 2 prioritas pada perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Disamping itu juga dengan adanya pola perhitungan IRB berbasis kolaborasi dengan IRB Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan perbandingan 60% (Kab./Kota) : 40% (Provinsi) turut mendorong capaian IRB menjadi lebih meningkat.

Keberhasilan capaian IRB pada tahun 2024 ditunjang oleh beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Stake holder kebencanaan di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo

Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Peningkatan kapasitas relawan PB

Gladi lapang / Simulasi Bencana

Pelaksanaan Jitupasna

Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya dokumen-dokumen kebencanaan yang ada di Kota Probolinggo masih tetap belum di reviu kembali meski telah melampaui batas masa berlakunya dan itu menjadi indikator prioritas yang menyebabkan nilai pengukuran IKD semakin sulit ditingkatkan.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya adalah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang diharapkan akan mampu mendorong capaian IKD pada Tahun 2025 dan Tren pengarusutamaan pelaksanaan pelayanan dasar di bidang kebencanaan semakin meningkat. Tidak terkecuali pula adanya jenis dan jumlah ancaman bencana yang meningkat di semua tempat, seiring dengan perubahan iklim global pada saat ini. Disamping itu akan melakukan pembenahan internal dalam hal pemenuhan dan perbaikan Standart Operating Procedure (SOP) dari setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah ada.

8) Indeks SPBE

Berdasarkan Keputusan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Kota Probolinggo mengalami kenaikan dari 3,10 menjadi 4,04. Kenaikan tersebut mencapai 112% dari target 3,60 pada tahun 2024. Keempat domain; Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE dan Manajemen SPBE rata-rata mengalami kenaikan. Domain Layanan SPBE merupakan domain yang signifikan capaiannya dari 3 (tiga) domain yang lain, yakni sebesar 4,63. Hal ini merupakan dukungan dari aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Dalam menunjang keberhasilan tersebut, adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pada setiap indikator penilaian indeks SPBE;
- b. Memperkuat koordinasi dan peran tim teknis SPBE.

Meskipun realisasi Indeks SPBE sudah mencapai target, namun terdapat kendala yang dialami pada tahun 2024 yaitu kurangnya koordinasi dan pemahaman terkait pemenuhan indikator penilaian dalam SPBE. Untuk mengatasi hal tersebut maka solusi kedepannya akan diadakan rapat koordinasi bersama tim teknis, Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah, melaksanakan sosialisasi dan bimtek internal serta mendatangkan narasumber dari KEMENPAN RB.

9) Indeks Profesionalitas Aparatur,

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur diamanatkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN sebagaimana yang dimaksud, maka diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo Tahun 2024, dari target awal yang telah ditetapkan yaitu 65 terealisasi sebesar 78,02 (kategori sedang) untuk Jenis Pegawai ASN berdasarkan hasil perhitungan dari Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional yang ditarik secara real time pada bulan September 2024.

Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 nilai Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan perumusan perhitungan Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024.

Meskipun perolehan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024 sudah melebihi target, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengoptimalan Indeks Profesionalitas Aparatur yaitu antara lain :

Belum adanya prioritas pengelolaan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan intensitas yang tinggi bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Kurangnya kesadaran para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Kualifikasi Pendidikan;

Rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengakibatkan jumlah pelaksana yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juga rendah.



Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 893/927/425.203/2021 tanggal 11 Februari 2022 perihal Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan sekaligus peningkatan kualifikasi pendidikan serta untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Selain meluncurkan surat edaran dan Perwali, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pada tahun 2024 adalah dengan melaksanakan Inovasi BKPSDM Kota Probolinggo, yaitu giat DOU ASN (Dari Oleh Untuk ASN) yang mana tidak ada batasan jumlah peserta karena bisa diikuti secara daring serta giat pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas ASN. Selain DOU ASN yang juga merupakan inovasi kebanggaan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, terdapat juga upaya untuk mendongkrak kualifikasi Pendidikan dengan mengakui ijazah terakhir melalui Penyesuaian Ijazah.

10) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) disusun berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknis, dan sumbangan pendapatan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Berdasarkan data realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 belum rilis.

Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengoptimalan pengarusutamaan gender pada lembaga swasta;
- b. Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG).

11) Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam mengukur Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik maka Survey kepuasan masyarakat wajib disusun oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dan juga sebagai evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik kedepannya.



Pada tahun 2024 nilai IKM Kota Probolinggo ada kenaikan dari 85,41 menjadi 86,57 ini dikarenakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat selaku pengguna layanan terhadap penyelenggara pelayanan yang ada di Kota Probolinggo tinggi.

Beberapa faktor yang menyebabkan IKM Kota Probolinggo mengalami kenaikan diantaranya :

- a. Faktor Pelayanan : Peningkatan kualitas pelayanan, Pengurangan waktu tunggu, Peningkatan aksesibilitas;
- b. Faktor Komunikasi : Peningkatan transparansi, Penggunaan media sosial, Peningkatan umpan balik;
- c. Faktor Infrastruktur : Peningkatan kualitas infrastruktur, Pengembangan teknologi;
- d. Faktor Lainnya : Peningkatan partisipasi masyarakat, Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target adalah melakukan koordinasi serta meningkatkan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait Pelaporan IKM (Semester I dan Semester II), melakukan pendampingan serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Meskipun realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sudah mencapai target, namun terdapat kendala yang dialami pada tahun 2024 meliputi :

- a. Kendala Teknis : keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses, keterbatasan teknologi;
- b. Kendala Non-Teknis : kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan pengetahuan, bias responden;
- c. Kendala Analisis : keterbatasan data, keterbatasan metode analisis.

Solusi yang harus dilakukan dari kendala yang dialami, antara lain seperti di bawah ini:

- a. Solusi Teknis : menggunakan teknologi survei online, menggunakan aplikasi survei mobile, menggunakan metode pengambilan sampel yang tepat
- b. Solusi Non-Teknis : meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat, menggunakan bahasa yang sederhana
- c. Solusi Analisis : menggunakan metode analisis yang tepat, menggunakan software analisis yang tepat, menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat

b. **5 indikator dengan capaian 90% - 100%** yaitu:

(1) Skor Pola Pangan Harapan

Realisasi skor PPH Konsumsi Tahun 2024 adalah 81,4 belum mencapai target RPJMD yaitu 85, sehingga capaiannya adalah 95,76 persen. Dari capaian tersebut konsumsi padi-padian, minyak dan lemak telah mencapai standar maksimal. Sedangkan konsumsi umbi - umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih di bawah skor maksimal. Diharapkan konsumsi umbi-umbian dapat ditingkatkan sebagai pengganti konsumsi padi-padian. Umbi-umbian masih memberi sumbangan energi yang kecil. Hal ini



menjadi tugas dari Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo untuk lebih mensosialisasikan konsumsi umbi-umbian yang merupakan pangan lokal. Skor konsumsi pangan hewani masih di bawah skor maksimal sehingga diharapkan produksi pangan hewani dapat dipacu lebih banyak lagi dan harga ditekan lebih rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Diperlukan juga upaya diversifikasi pangan hewani dari sumber-sumber lain yang belum diupayakan secara maksimal seperti budidaya kelinci, bebek, burung puyuh dan lain - lain. Dengan garis pantai hampir 12 km, maka Kota Probolinggo adalah penghasil ikan. Dengan sosialisasi gemar makan ikan, diharapkan konsumsi ikan masyarakat dapat bertambah. Skor Konsumsi kacang-kacangan juga belum mencapai skor yang diharapkan, hanya memperoleh skor 7,8 dari skor maksimal yang diharapkan yaitu 10,0. Sehingga tetap diperlukan langkah-langkah agar konsumsi kacang-kacangan tetap stabil sepanjang tahun dengan penyediaan produksi yang mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menekan harga. Edukasi kepada masyarakat tetap harus terus dilakukan tentang manfaat kacang-kacangan sebagai salah satu sumber zat gizi yang diperlukan tubuh antara lain sebagai sumber asam lemak esensial dan sebagai sumber mikro mineral penting lainnya. Skor sayur dan buah juga masih di bawah skor maksimal. Peningkatan konsumsi sayur dan buah harus menjadi prioritas utama kegiatan di semua dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kesehatan P2KB, Sekolah Dasar dan Menengah karena sayur dan buah sumber mineral dan vitamin yang merupakan zat gizi mikro yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sejak usia balita, anak harus dibiasakan mengkonsumsi buah dan sayur agar tumbuh kembang dan kesehatan anak menjadi normal.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) diperoleh pengeluaran rata-rata perkapita sebulan suatu wilayah baik pengeluaran makanan maupun non makanan. Pengeluaran rata - rata per kapita per bulan di Kota Probolinggo di kelompok makanan sebanyak 39,69 persen dan pengeluaran terbesar kelompok makanan adalah kelompok makanan/minuman jadi sebesar 14,86 persen sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat cenderung tidak beragam bergizi seimbang dan aman.

Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Peningkatan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA) melalui sosialisasi, pelatihan olahan, kampanye makan B2SA, Lomba Cipta Menu Olahan B2SA, demo memasak B2SA dengan pelibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, pihak swasta, akademisi, pemerintahan;

Pelatihan Olahan Pangan Lokal B2SA dengan peserta dari Kelompok Wanita Tani/kader PKK;



Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA dengan peserta dari Kelompok Wanita Tani/kader PKK;

Edukasi B2SA dengan peserta perwakilan siswa;

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan;

Pelatihan hidroponik sebagai bagian dari pertanian perkotaan (urban farming);

Pelatihan budidaya tanaman pangan (padi organik) dan pasca panen;

Sekolah Lapang (SL) Budidaya Lele;

Pelayanan posyandu ternak berupa : pemberian vitamin, vaksinasi PMK, pemberian obat cacing, pengobatan penyakit, penanganan gangguan reproduksi, pemeriksaan kebuntingan dan penyuluhan peternakan untuk menjaga populasi ternak, mengurangi potensi terserang penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan hewan.

(2) Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban

Realisasi persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sama dengan target yang ditentukan . Hal ini menunjukkan bahwa capaian persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban adalah sebesar 100 persen. Dari jumlah pelanggaran perda dan perkara untuk tahun 2023 sebesar 203 kasus, turun menjadi 199 tahun 2024, disebabkan oleh banyaknya langkah yang telah diambil guna mengurangi kasus pelanggaran seperti peningkatan pemahaman masyarakat akan Perda Perkada.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam penurunan kasus trantibum antara lain :

Peningkatan Kewaspadaan aparat Satpol PP, TNI/Polri dalam mengawasi dan menangani pelanggaran ketertiban umum;

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketertiban dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari melalui media massa, online platform digital;

Mengajak masyarakat untuk aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan mereka melalui berbagai forum, seperti pos keamanan lingkungan (poskamling);

Pemerintah Kota Probolinggo sudah menyusun Perda Perkada yang mendukung terciptanya ketertiban umum;

Melaksanakan pengawasan dengan Deteksi dan cegah dini melalui kegiatan patroli;

Melaksanakan kolaborasi dengan jajaran samping TNI/Polri dengan melaksanakan operasi gabungan.

Walaupun telah mencapai target namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam upaya penurunan kasus ketentraman dan ketertiban yaitu :

Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan PKL;

Kurangnya SDM dalam penegakan Perda Perkada (anggota PPNS);
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Untuk menurunkan kasus Trantibum (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat), ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah :

Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan;
Memberikan pelatihan bagi petugas aparat terkait untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan tertib;
Memberikan tindakan tegas kepada pelanggar guna memberikan efek jera bagi pelanggar;
Adanya penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran;
Pengaturan kawasan publik, seperti pasar, ruang terbuka, dan jalan-jalan utama;
Pengawasan yang lebih ketat bisa mencegah gangguan ketertiban;
Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Ketertiban misalnya, lampu jalan yang cukup, fasilitas parkir yang memadai, serta trotoar yang aman untuk pejalan kaki akan mengurangi gangguan ketertiban dan meningkatkan kenyamanan masyarakat;
Menghidupkan kembali keamanan lingkungan siskamling serta peran Tokoh Masyarakat dan agama berperan penting dalam memberi contoh yang baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban

(3) Persentase Ketersediaan Infrastruktur

Target Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 80,05% dengan realisasi sebesar 74,98% sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 93,67% (kategori sangat tinggi). Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,02% dari tahun 2023 yang sebesar 77%.

Ditinjau dari komponen penyusun Persentase Ketersediaan Infrastruktur, terdapat beberapa indikator yang belum melampaui target yaitu:

a. Prosentase sampah masuk TPA

Prosentase sampah masuk TPA dengan capaian 72.44%. Hal tersebut disebabkan terdapat perubahan metode penghitungan berupa perubahan koefisien timbulan sampah yang sebelumnya menggunakan 0,4 menjadi 0,5

b. Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah

Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah dengan capaian 60.95%. Hal tersebut disebabkan terdapat perubahan metode penghitungan berupa perubahan koefisien timbulan sampah yang sebelumnya menggunakan 0,4 menjadi 0,5

c. Prosentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan (UU No. 22 Tahun 2009)

Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan dengan capaian 68.37%. Pada tahun 2024 banyak kendaraan khususnya angkutan barang yang masih proses penyesuaian dimensi kendaraan terkait penerapan regulasi zero odol dan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (penghapusan retribusi PKB) sehingga tidak ada denda bagi kendaraan yang tidak melaksanakan uji serta pengawasan di lapangan yang menurun.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengatasi hal tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan layanan persampahan terpadu (hulu - hilir) melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan RDF, peningkatan peran serta masyarakat;
- b. Peningkatan pengawasan terhadap kendaraan khususnya angkutan barang.

Meskipun capaian persentase ketersediaan infrastruktur belum mencapai target namun Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan beberapa upaya terkait pengelolaan sampah diantaranya:

Telah melaksanakan penyediaan sarpras berupa kontainer sampah sebanyak 3 unit;

Telah melaksanakan pengadaan sarpras berupa gerobak sampah sebanyak 24 unit;

Telah melaksanakan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kepada 4 kelompok masyarakat;

Telah membentuk satgas penanganan sampah liar dan pembakaran sampah.

(4) Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Target Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 74,50% dengan realisasi sebesar 74,34% sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 99,79% (kategori sangat tinggi). Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,27% dari tahun 2023 yang sebesar 74,07%.

Indikator-indikator pembentuk persentase infrastruktur berkualitas baik menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian di atas 90% bahkan di atas 100% (melampaui target). Indikator-indikator dengan capaian di bawah 100% meliputi:

Tingkat pelayanan irigasi dengan capaian 98.36%. Capaian dipengaruhi adanya bencana hidrometeorologi genangan dan sedimentasi.

Panjang Jalan lingkungan yang ditangani dengan capaian 99.44%

Panjang Drainase lingkungan yang ditangani dengan capaian 98.51%

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan ketersediaan infrastruktur antara lain:

Mempertahankan kinerja indikator agar tetap dalam tren positif di masa datang



Meningkatkan kinerja indikator terkait perumahan dan kawasan permukiman (jalan lingkungan dan drainase lingkungan) khususnya dalam rangka pengentasan kawasan kumuh

Pemantapan infrastruktur jalan melalui pemeliharaan pada ruas jalan prioritas

Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui penanganan di lokasi-lokasi prioritas, khususnya kawasan kumuh

Untuk akses air bersih di Kota Probolinggo sudah 100% , data berdasarkan SKAMRT (Surveilans Kualitas Air minum Rumah Tangga)

(5) Opini BPK Terhadap LKPD

Tahun 2024 Pemerintah Kota Probolinggo kembali meraih WTP atas Opini BPK terhadap LKPD Kota Probolinggo. Opini atas Laporan Keuangan dinyatakan setelah pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Dalam menjaga Opini BPK Terhadap LKPD, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;
- c. Memberikan pemantapan pemahaman bagi penyusun laporan keuangan SKPD (LK-SKPD) Tahun Anggaran 2024 secara berkala;
- d. Melaksanakan Pendampingan finalisasi penyusunan LK-SKPD TA 2024 dan konsolidasi LK SKPD;
- e. Melaksanakan percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 dengan menyusun time schedule dan Surat Edaran Nomor : 100.3.4.3/1459/425.209/2024 tentang Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024;
- f. Melaksanakan Rekonsiliasi Dana Non RKUD secara berkala;
- g. Melaksanakan pendampingan terkait tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota Probolinggo terkait Penghapusan Piutang dan Penertiban Administrasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

Dalam penyusunan LKPD TA 2024 terdapat beberapa hal yang menjadikan perhatian khusus, antara lain:

- a. Penerapan SIPD dalam penyusunan LKPD;
- b. Penerapan Laporan SIASAD sesuai Permendagri 47;
- c. Penerapan Kebijakan Properti Investasi.

Beberapa kegiatan yang mendukung Opini BPK :



- a. Melakukan Rekonsiliasi Data Akuntansi, Kas dan Persediaan;
- b. Melakukan verifikasi atas Laporan Keuangan SKPD;
- c. Melakukan koordinasi dan pendampingan mengenai hasil reuiu LK SKPD Unaudited untuk segera dilakukan tindak lanjut;
- d. Melakukan konsolidasi atas LK SKPD Unaudited untuk disusun menjadi LKPD Kota Probolinggo;
- e. Memberikan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penerapan SIPD dalam Penyusunan LK SKPD.

c. **5 indikator dengan capaian di bawah 90%** yaitu:

(1) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Persentase realisasi pertumbuhan nilai investasi Kota Probolinggo 2024 sebesar 0,09% dengan target sebesar 0,41%. Capaian pertumbuhan nilai investasi sebesar 21,95% dengan nilai investasi sebesar Rp 18.054.544.299.111,00. Dibandingkan dengan tahun 2023, nilai investasi tahun 2024 bertambah sebesar Rp 1.505.080.045.532,00. Pertambahan nilai investasi 2024 terbesar berasal dari investasi Penanaman Modal Asing pada sektor perindustrian yaitu sebesar Rp 75.200.000.000,00.

Dalam rangka peningkatan investasi di Kota Probolinggo, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan perizinan, sosialisasi, bimtek, dan pendampingan kepada para pelaku usaha. memberikan kemudahan perizinan dan promosi online dan offline (mengikuti Kegiatan).

Namun, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo tersebut, capaian pertumbuhan nilai investasi 2024 tidak dapat memenuhi target. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

Tahun 2024 merupakan Tahun Politik PEMILU 2024 sehingga berdampak kepada para investor untuk berinvestasi (wait and see)

Terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Probolinggo (luas wilayah) yang sesuai untuk peruntukan pengembangan industri

Adapun solusi maupun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan mengembangkan sistem promosi investasi berbasis teknologi serta memberikan insentif kemudahan untuk berinvestasi di Kota Probolinggo kepada investor.

(2) Persentase PDRB Sektor Perdagangan

Dalam pelaporan kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,82% dengan capaian sebesar 76,51% atau turun 0,61% dibandingkan tahun 2023. Salah satu penyebab adalah daya beli masyarakat yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Selama kurun waktu 5 tahun lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Probolinggo. Kontribusi kategori ini mencapai 4.028,61 milyar



rupiah atau sekitar 26,20% terhadap PDRB Kota Probolinggo pada tahun 2024. Secara umum, laju pertumbuhan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berfluktuasi selama periode 2018-2024. Laju pertumbuhan sebesar 6,57 persen di tahun 2018 naik menjadi 6,93 persen di tahun 2019, kemudian mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,74 persen pada 2020, dan relatif stabil di angka 6,08 pada 2022. Selanjutnya di tahun 2023 mengalami kontraksi yaitu 5,43 % dan terkontraksi kembali di tahun 2024 sebesar 4,82 %.

Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Pertumbuhan PDRB Perdagangan melalui :

Peningkatan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan sesuai standard guna menjamin stabilitas daerah;

Pengembangan kapasitas SDM pelaku usaha dalam mendukung peningkatan nilai ekspor daerah;

Peningkatan daya saing produk unggulan usaha mikro.

Dalam mendukung strategi dan arahan kebijakan tersebut, program dan kegiatan yang dilakukan antara lain :

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pemeliharaan Bangunan Gedung Pasar, Pujasera dan Sentra PKL & UMKM demi Peningkatan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;

Koordinasi dan Sosialisasi dalam Rangka Pembinaan dan Pengendalian PKL Baik di Pujasera maupun Sentra;

Revitalisasi Pasar dan Pelayanan UPT Pasar.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;

Pengendalian Inflasi Daerah melalui Operasi Pasar dan Warung TPID;

Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;

Monitoring Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Program Pengembangan Ekspor

Koordinasi dan Sosialisasi Dalam Rangka Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah;

Monitoring Data Industri/Potensi Ekspor.

Mengikuti Misi Dagang dan Pameran bagi Pelaku Usaha Skala Ekspor

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP;

Pengawasan UTTP dan BDKT;

Verifikasi Standart Ukur Metrologi Legal;

Sosialisasi Metrologi Legal Dalam Rangka Hari Konsumen Nasional.

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, mengalami sedikit kontraksi atau penurunan yang cukup besar dibandingkan Tahun 2022. Namun di sisi lain perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan.

(3) Indeks Kualitas Air

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Kota Probolinggo tahun 2024 memiliki nilai sebesar 41,43. Hal ini diantaranya disebabkan karena kualitas air sungai di Kota Probolinggo mengalami pencemaran terutama oleh kandungan Fecal Coli serta memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi kualitas air sungai dan membutuhkan keterlibatan dari OPD terkait.

Capaian IKA sebesar 80,45% tersebut tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Ketidak tercapaian target ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya :

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah;

Meningkatnya limbah domestik rumah tangga yang masuk ke badan air akan berakibat menurunnya kualitas air;

Limbah dari pertanian dan peternakan diantaranya sisa penggunaan pupuk kimia berlebih, pembuangan kotoran hewan yang di buang langsung ke sungai;

Kualitas air sungai di Kota Probolinggo mengalami pencemaran terutama oleh kandungan Fecal Coli;

Pengambilan sampel uji kualitas air dilakukan pada bulan maret- oktober, dimana pada bulan – bulan tersebut kondisi iklimnya masih berada pada kondisi kemarau dan belum terjadi hujan sama sekali. Sehingga debit air sungainya kecil.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

Melakukan koordinasi yang intensif antar OPD terkait guna mengurangi pencemaran air sungai;

Melakukan upaya pemulihan lingkungan secara periodik seperti melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha, pemasangan trashbum, memperbanyak aksi cleanup.

(4) Indeks Kualitas Lahan

Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 26,66 dan mengalami kenaikan sebesar 0,3 dari tahun 2023 yang terletak pada penambahan perhitungan luasan hutan kota sebesar 15 hektar. Adapun IKLH Kota Probolinggo tahun 2024 tidak dapat mencapai target dikarenakan sebagian RTH yang ada tidak didominasi tutupan vegetasi pepohonan dengan tinggi minimal 2 meter, serta memiliki kerapatan yang kurang sehingga pada saat dilaksanakan verifikasi dengan menggunakan system Geographic Information System (GIS) tutupan lahan tidak dapat terdeteksi sehingga usulan tutupan lahan tidak terverifikasi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo antara lain:

Perlu dilakukan penambahan Luas Lahan baru untuk Hutan Kota, RTH, kawasan lindung RTH RT/RW;

Melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

(5) Nilai SAKIP

Data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo belum berhasil secara sempurna dalam mencapai realisasi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan belum optimal, dan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan nilai sebesar 71,91 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh Perangkat Daerah. Namun, masih terdapat catatan pada evaluasi AKIP internal sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi AKIP internal belum menyajikan catatan dan rekomendasi yang tajam sesuai dengan kondisi implementasi SAKIP PD, utamanya pada aspek kualitas dan pemanfaatan, sehingga hasil evaluasi belum mampu memberikan perbaikan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP oleh PD;
- b. Belum terdapat kebijakan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai pemberian reward and punishment sehingga hasil evaluasi belum cukup untuk mendorong peningkatan komitmen setiap PD dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Desk IKU semua Perangkat Daerah
- b. Melaksanakan Desk IKU semua Perangkat Daerah
- c. Melaksanakan reuiu POKIN
- d. Melaksanakan reuiu POKIN
- e. Melaksanakan Desk IKU semua Perangkat Daerah
- f. Rapat koordinasi antara diskominfo, bppkad, bagian organisasi
- g. Desk LKJIP
- h. Desk LKJIP
- i. Diklat dan Bimtek terkait Evaluasi AKIP
- j. Penyusunan perwali tentang pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk dijadikan dasar pemberian reward and punishment sehingga dapat mendorong



perbaikan kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih terdapat beberapa kendala dalam hal :

1. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya memperbaiki kualitas perencanaan, utamanya perbaikan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Namun demikian, masih terdapat catatan dalam perencanaan yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan penetapan sasaran strategis pada perjanjian kinerja (PK) kepala PD yang belum sesuai dengan kondisi/kinerja yang ingin dicapai, misalnya sasaran strategis "Meningkatnya Manajemen Perkantoran" yang terdapat pada sebagian besar PK PD;
- b. Masih ditemukan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, utamanya relevan, dan cukup pada level PD, misalnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat" yang diukur dengan indikator "Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan" dan "Total Fertility Rate (TFR)";
- c. Pohon kinerja, utamanya pada level PD, belum seluruhnya disusun secara logis dengan mempertimbangkan seluruh critical success factor (CSF) yang mendukung pencapaian kinerja sehingga hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat belum dibangun dengan baik;
- d. Pohon kinerja yang telah disusun belum dituangkan dengan baik ke dalam dokumen perencanaan sehingga terdapat ketidakselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan, utamanya pada level PD. Hal tersebut juga berpengaruh pada penetapan sasaran pada perjanjian kinerja level Eselon III dan IV, misalnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala tiap triwulan melalui aplikasi SINERGI HANDAL dan melakukan perbaikan IKU dengan menyempurnakan indikator serta formulasi dan definisi operasionalnya. Namun, masih terdapat catatan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Beberapa indikator kinerja dalam dokumen IKU yang telah disusun belum seluruhnya dilengkapi dengan formulasi dan definisi operasional yang tepat menggambarkan tercapainya kondisi/sasaran strategis
- b. Hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara triwulanan pada aplikasi SINERGI HANDAL belum dimanfaatkan seluruhnya untuk perbaikan strategi pada triwulan selanjutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian



kinerja triwulanan yang masih rendah pada beberapa PD, misalnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Upaya yang dilakukan kedepannya agar nilai SAKIP mencapai target diantaranya:

- a. Melakukan reviu kembali untuk memastikan setiap sasaran strategis pada dokumen perencanaan telah sesuai dengan kondisi/kinerja yang ingin diwujudkan;
- b. Melakukan reviu pada indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART dan cukup sehingga indikator kinerja dapat menggambarkan ketercapaian kondisi/kinerja yang ingin diwujudkan;
- c. Melakukan reviu kembali terhadap pohon kinerja pada level perangkat daerah agar memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat secara logis dan critical success factor (CSF) dalam menjawab kondisi kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja taktikal sampai kinerja operasional;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan pohon kinerja baik di level pemerintah daerah dan level PD dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan sehingga meningkatkan keselarasan sasaran kinerja, khususnya pada level kinerja taktikal dan kinerja operasional;
- e. Melakukan perbaikan IKU pada beberapa PD agar memiliki formulasi dan definisi operasional yang tepat sehingga indikator menjadi selaras dengan sasaran kinerja yang diukur;
- f. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja triwulanan dalam aplikasi SINERGI HANDAL sebagai pertimbangan dalam melakukan perubahan strategi untuk mencapai target kinerja di tahun berjalan;
- g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memberikan hasil analisis yang konkret dan mendalam terkait faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja;
- h. Mendorong pemanfaatan laporan kinerja PD secara optimal sebagai bahan pertimbangan perencanaan ke depan, utamanya dalam penetapan strategi dan target kinerja;
- i. Mendorong APIP untuk memberikan catatan dan rekomendasi yang tajam pada laporan hasil evaluasi AKIP internal sehingga PD dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang konkret sesuai dengan kondisi yang ada;
- j. Mendorong adanya kebijakan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal untuk dijadikan dasar pemberian reward and punishment sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

d. **1 indikator yang masih menunggu rilis data** yaitu: Nilai LPPD.



2.2. EVALUASI PROGRAM KEGIATAN RKPD

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan telaah dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dan realisasi RPJMD Tahun 2024. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah .

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, diampu oleh :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sebesar Rp. 227.282.889.144,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 216.953.359.043,00 atau sebesar (95,45%) dan realisasi kinerja sebesar 87,61%
2. Urusan Kesehatan diampu oleh :
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024 sebesar Rp. 327.079.854.581 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 304.865.957.251 atau sebesar (93.20%) sedangkan realisasi kinerja sebesar 117,96%.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu oleh :
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebesar Rp. 55.312.388.894 realisasi keuangan sebesar Rp. 53.038.429.474 atau sebesar 95,88% sedangkan realisasi kinerja sebesar 83,20%
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh:
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.531.704.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.298.309.628 sedangkan realisasi kinerja 100%
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebesar Rp. 16.137.868.189 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.577.730.320 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%.
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 4.036.262.343 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.904.309.139 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%.
6. Urusan Sosial, diampu oleh
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 15.161.158.504 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.661.252.633 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai berikut :



1. Urusan Tenaga Kerja, diampu oleh
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebesar Rp 11.824.456.723 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.427.041.814 sedangkan realisasi kinerja sebesar 131,09%.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diampu oleh
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebesar Rp. 1.129.358.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 674.422.168 dan realisasi kinerja sebesar 93,80%.
3. Urusan Pangan, diampu oleh
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp. 13.476.444.882 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.975.697.991 atau sebesar 96,28% sedangkan realisasi kinerja sebesar 103,09%.
4. Urusan Pertanahan, diampu oleh
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebesar Rp. 189.112.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.758.554 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%.
5. Urusan Lingkungan Hidup, diampu oleh
Dinas Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar Rp. 31.505.300.430 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.877.701.231 atau sebesar 94,83% sedangkan realisasi kinerja sebesar 90,04%.
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diampu oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp. 5.629.936.406 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.217.366.979 atau sebesar 92,67% sedangkan realisasi kinerja sebesar 105,03%.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diampu oleh
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 5 Kecamatan. Alokasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebesar Rp. 974.950.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 258.628.400 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran Kecamatan Mayangan sebesar 1.778.144.222 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.736.693.996 dengan realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran Kecamatan Kanigaran sebesar 2.221.176.104 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.166.803.100 dengan realisasi kinerja 100%.



- Alokasi anggaran Kecamatan Kademangan sebesar Rp. 2.182.872.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 888.452.470 dengan realisasi kinerja 100%. Alokasi anggaran Kecamatan Kedopok sebesar Rp. 2.274.518.948 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 892.371.743 dengan realisasi kinerja 93,75%. Alokasi anggaran Kecamatan Wonoasih sebesar Rp 2.361.487.698 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.108.256.909 dengan realisasi kinerja 91,03%.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diampu oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024 sebesar Rp. 4.950.875.320 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.200.401.111 sedangkan realisasi kinerja sebesar 124,74%.
 9. Urusan Perhubungan, diampu oleh Dinas Perhubungan. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp. 28.029.846.738 sampai dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.667.176.781 sedangkan realisasi kinerja sebesar 106,36%
 10. Urusan Komunikasi dan Informatika, diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebesar Rp. 10.302.497.184 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.937.371.688 sedangkan realisasi kinerja sebesar 97,75%.
 11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Alokasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 sebesar Rp. 10.134.946.354 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.948.433.830 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100,11%
 12. Urusan Penanaman Modal, diampu oleh Dinas Penanaman Modal PTSP. Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal PTSP Tahun 2024 sebesar Rp. 10.403.662.989 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.729.842.219 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100,77%.
 13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, diampu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 sebesar Rp. 13.314.219.417 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.592.843.750 sedangkan realisasi kinerja sebesar 81,94%.
 14. Urusan Statistik, diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024 sebesar Rp. 54.961.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.007.800 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%.
 15. Urusan Persandian, diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebesar Rp. 54.961.200 sampai realisasi keuangan



sebesar Rp. 54.007.800 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%.

16. Urusan Kebudayaan, diampu oleh
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.248.473.334 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.217.716.615 sedangkan realisasi kinerja sebesar 95,77%.
17. Urusan Perpustakaan, diampu oleh
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024 sebesar Rp. 5.985.047.659 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.873.986.974 sedangkan realisasi kinerja sebesar 93,75%.
18. Urusan Kearsipan, diampu oleh
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 120.814.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 116.859.044 sedangkan realisasi kinerja sebesar 100%.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut :

1. Urusan Perikanan diampu oleh
 - a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp. 2.346.290.885 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.282.314.806 sedangkan realisasi kinerja sebesar 103,03%.
2. Urusan Pariwisata, diampu oleh
 - a. Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 sebesar Rp. 2.240.206.106 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.110.156.989 sedangkan realisasi kinerja sebesar 89,84%.
3. Urusan Pertanian, diampu oleh
 - a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp. 6.592.400.529 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.276.711.246 sedangkan realisasi kinerja sebesar 107,54%.
4. Urusan Perdagangan, diampu oleh
 - a. Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Alokasi anggaran Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Tahun 2024 sebesar Rp 1.853.056.221dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.811.942.697 sedangkan realisasi kinerja sebesar 102,5%.
5. Urusan Perindustrian, diampu oleh
 - a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebesar Rp. 50.746.274.385 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.107.303.821 sedangkan realisasi kinerja sebesar 96,66%.



Total rata-rata capaian kinerja dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan keuangan dari seluruh urusan pada program sebesar 100% dan anggaran sebesar 91% dengan jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 164 program, 470 kegiatan dan 1.203 sub kegiatan. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat permasalahan pada Perangkat Daerah dalam pencapaian realisasi kinerja maupun anggaran antara lain :

- a. Inisiasi pelaksanaan Kegiatan Prioritas dengan pendampingan pihak APH Kejaksan melalui Bagian Hukum serta Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu rekomendasi dari pihak APH
- b. Adanya pengusulan pelaksanaan perubahan pergeseran APBD terhadap rekening belanja yang diindikasi tidak tepat dan dialihkan untuk prioritas belanja serta penyesuaian sesuai Perwali Kota Probolinggo No 86 Tahun 2023
- c. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
- d. Adanya Penyesuaian Anggaran pada triwulan II menyebabkan adanya penyesuaian kembali pada rencana pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan pada triwulan III dan IV mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu

Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 untuk realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana dalam mencapai kinerja per urusan dalam setiap PD dalam penyerapan anggaran sebagaimana Lampiran Tabel Bab II (setelah subbab pembahasan permasalahan pembangunan daerah) dengan Format Tabel T-C.19 sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024

No	Aspek	Permasalahan	Indikasi
1.	Aspek Daya Saing Daerah	Inefisiensi dalam Kawasan Perkotaan dan Metropolitan	Kota Probolinggo memiliki potensi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di pesisir utara Jawa Timur, inefisiensi masih terlihat dalam pelayanan perkotaan. Misalnya, integrasi transportasi umum antarwilayah belum optimal, sehingga pergerakan penduduk dan distribusi barang sering kali terhambat. Dampak dari ketidakterhubungan sistem transportasi ini



No	Aspek	Permasalahan	Indikasi
			diperparah oleh terbatasnya ruang terbuka hijau, yang berpengaruh pada kualitas lingkungan dan kenyamanan kota. Jika tidak segera diatasi, inefisiensi ini dapat mengurangi daya saing Kota Probolinggo sebagai destinasi investasi dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat perkotaan di sekitarnya serta distribusi barang dan jasa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota.
		Kesenjangan Infrastruktur Logistik dan Ketersediaan Infrastruktur Sosial	Pelabuhan Tanjung Tembaga andalan Kota Probolinggo sebagai simpul utama logistik, namun infrastruktur pendukung seperti akses jalan penghubung antar-kawasan dan fasilitas bongkar muat masih perlu peningkatan. Kesenjangan ini menyebabkan biaya distribusi barang cenderung tinggi, terlebih ketika pasokan komoditas pertanian atau hasil laut membutuhkan penanganan rantai dingin (<i>cold chain</i>) yang memadai. Selain itu, keterbatasan fasilitas sosial seperti terminal terpadu, area pergudangan, dan layanan kesehatan di area pelabuhan menjadikan Kota Probolinggo kurang maksimal dalam menarik investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian selatan maupun kawasan lain yang terhubung dengan kota Probolinggo sebagai pusat kegiatan wilayah dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur khususnya untuk Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.
		Kerentanan Terhadap Bencana Alam	Meskipun Kota Probolinggo tidak berada di pesisir selatan Jawa yang rawan gempa bumi dan tsunami, risiko bencana tetap menghantui wilayah ini dalam bentuk banjir, penurunan muka tanah, dan dampak erupsi gunung berapi di sekitarnya. Bencana banjir dapat menghambat aktivitas ekonomi khususnya jika terjadi banjir rob di wilayah pesisir utara yang lebih rendah, di wilayah pelabuhan sebagai simpul transportasi dan ekonomi, serta merusak infrastruktur strategis di kawasan pesisir. Oleh sebab itu, penataan ruang kota yang mempertimbangkan peta rawan bencana serta upaya penanganan perubahan iklim perlu diprioritaskan untuk meminimalisir dampak kerugian.
2.	Aspek Pelayanan Umum	Kesenjangan Keterampilan dan Ketidaksesuaian Pendidikan-Industri	Ketimpangan antara keterampilan lulusan SMA/SMK dan kebutuhan industri masih sering ditemui. Sektor perikanan, jasa, dan pengolahan hasil laut yang menjadi andalan kota acap kali kesulitan



No	Aspek	Permasalahan	Indikasi
			mendapatkan tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan peralatan modern atau memahami prosedur ekspor-impor. Di lain pihak, lulusan SMK dan SMA justru kesulitan memperoleh pekerjaan karena belum dibekali kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal dan dunia usaha. Akibatnya angka pengangguran tetap tinggi, sehingga memerlukan sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengatasi mismatch ini.
		Prevalensi <i>Stunting</i> , <i>Wasting</i> , dan <i>Underweight</i> yang Masih Tinggi	Kota Probolinggo merupakan daerah perkotaan dengan akses pangan lebih terbuka, persoalan gizi buruk seperti <i>stunting</i> , <i>wasting</i> , dan <i>underweight</i> masih ditemukan. Faktor pemicunya beragam, mulai dari rendahnya pengetahuan gizi pada keluarga, pola konsumsi yang tidak seimbang, hingga terbatasnya akses terhadap makanan bernutrisi di area kantong kemiskinan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperkuat program intervensi gizi, promosi kesehatan di posyandu, serta penyuluhan pola asuh anak di lingkungan padat penduduk agar tumbuh kembang anak lebih optimal.
		Beban Kasus Tuberkulosis (TBC) yang Tinggi	Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat, Probolinggo juga menghadapi tantangan beban kasus TBC (Tuberkulosis). Permukiman padat dan kurangnya sirkulasi udara yang sehat dapat mempercepat penularan penyakit menular ini. Meski telah ada upaya screening dan pengobatan gratis di puskesmas, masih diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan tuntas. Keterlibatan kader kesehatan dan edukasi berbasis komunitas menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi TBC, sehingga masyarakat Kota Probolinggo dapat hidup lebih sehat dan produktif.
3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi	Tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo relatif lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa, namun masih terdapat kantong-kantong kemiskinan, khususnya di kawasan pesisir dan permukiman informal. Program pengurangan kemiskinan yang bersifat top-down kerap kurang tepat sasaran karena tidak terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal, seperti pengolahan hasil laut dan usaha kreatif. Untuk itu, diperlukan inovasi pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi lintas sektor, misalnya



No	Aspek	Permasalahan	Indikasi
			melalui pembentukan klaster UMKM berbasis komunitas atau pelatihan kewirausahaan yang menasar kelompok rentan, agar program penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan berkelanjutan.

2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dinilai berdasarkan permasalahan yang terkait penyelenggaraan tiap urusan pemerintahan yang diampu oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar, Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Fokus Layanan Urusan Pilihan serta Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 2.24 dibawah ini. Identifikasi permasalahan ini berdasarkan masalah yang dihadapi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pada penyelenggaraan usulan pemerintah daerah Tahun 2024 dan digunakan sebagai acuan kebutuhan solusi yang perlu diakomodir dalam perencanaan program dan kegiatan Tahun 2026.



**Tabel 2. 47 Permasalahan Pembangunan Daerah
(Penyelenggaraan Urusan) Kota Probolinggo Tahun 2024**

No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
A	URUSAN WAJIB		
A.1	Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	a. Belum meratanya kualitas pengelolaan pada satuan pendidikan; b. Belum meratanya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan, sehingga mempengaruhi capaian SPM Pendidikan; c. Akses pendidikan yang belum merata, khususnya untuk akses pendidikan usia 13-15 tahun / Jenjang SMP pada wilayah Kecamatan Kademangan; d. Belum optimalnya penanganan ATS, khususnya ATS diluar pada satuan pendidikan yang diluar kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo; e. Belum meratanya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan; f. Belum meratanya kualitas Pendidik, yang antara lain disebabkan belum maksimalnya pemenuhan dan distribusi Pendidik pada satuan pendidikan; g. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan, dan membutuhkan rehabilitasi; h. Kualitas PAUD yang belum merata,hal ini disebabkan kondisi kelembagaan PAUD yang 99% merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan PAUD.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	a. Belum lengkap ketersediaan sarana prasarana penunjang kesehatan b. Ketersediaan dan kualitas Tenaga Kesehatan yang belum merata c. Masih ditemukannya Masyarakat yang belum mendapat jaminan kesehatan masyarakat baik promotif maupun preventif d. Kualitas kesehatan Ibu, bayi, balita belum mencapai standar, dengan masih ditemukannya kasus ibu hamil dengan resiko tinggi, masih ditemukannya balita stunting, dan masih kurangnya capaian IDL e. Penyakit tidak menular (PTM) di Kota Probolinggo masih mendominasi dengan risiko kematian yang tinggi f. Prevalensi tinggi dalam masalah kesehatan jiwa g. Beberapa penyakit menular masih menjadi permasalahan yaitu tuberculosis, DBD, HIV, Leptospirosis, ISPA h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) i. Jumlah SDM kurang memenuhi rasio	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		kebutuhan j. Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal k. Laboratorium kesehatan daerah belum terintegrasi secara maksimal	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Regulasi terkait rencana tata ruang yang ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2020 tentang RTRW 2020 - 2040, baru memiliki RDTR untuk 3 wilayah Kecamatan, yaitu Mayangan, Kanigaran dan Kademangan b. Masih terdapatnya bangunan gedung yang memerlukan pemeliharaan untuk mengatasi kerusakan dan sesuai dengan standar konstruksi c. Masih terdapat beberapa ruas jalan yang rusak, meskipun target kinerja telah tercapai d. Masih terdapatnya kondisi prasarana sumber daya air yang perlu dilakukan pemeliharaan, agar meningkatkan kualitas jaringan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Pelaksanaan pembangunan di lokasi kumuh masih terkendala pada status lahan, yang sebagian besar berada di sempadan sungai maupun tanah aset milik BUMN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban b. Kurang terpenuhinya jumlah SDM Aparatur Penegak Perda Perkada c. Semakin kuat pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan trantibum d. Belum tersusunnya SOP sinergitas penyelesaian pelanggaran Perda Perkada Lemahnya mitigasi dan perencanaan kebencanaan, serta peran dan kesadaran masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana	- Satuan Polisi Pamong Praja BPBD



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
6.	Sosial	b. Untuk meningkatkan persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, perlu dilakukan upaya perbaikan dari sisi pendataan, peningkatan akses layanan, pemberdayaan ekonomi, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan c. Tidak adanya data yang valid dan terintegrasi mengenai jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti d. Mobilitas tinggi anak terlantar menyebabkan mereka sulit dilacak dan didokumentasikan dengan baik e. Anggaran untuk rehabilitasi sosial lansia terlantar masih terbatas sehingga layanan yang diberikan tidak optimal f. Mobilitas tinggi dari kelompok ini membuat mereka sulit dilacak dan dikontrol dalam program rehabilitasi g. Perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
A.2	Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
7.	Tenaga Kerja	a. masih adanya kasus dimana kedua belah tidak ada kesepakatan karena tuntutan salah satu pihak tidak terpenuhi b. Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjaanya kedalam program jamsostek c. jumlah lulusan sekolah tidak sebanding dengan lowongan kerja dan kesempatan kerja yang ada d. Kapasitas peserta sosialisasi/pembinaan yang di laksanakan DISPERINAKER kurang maksimal e. masih adanya pengaduan kasus perselisihan hubungan industrial	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kurangnya integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan b. Banyak korban enggan melaporkan karena takut, malu, atau tekanan dari keluarga dan lingkungan c. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	a. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang belum B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) b. Produksi Pertanian menurun karena alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
10.	Pertanahan	a. Belum optimalnya pendataan dan fasilitasi sertifikasi tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
11.	Lingkungan Hidup	a. Laboratorium Lingkungan yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo sejak terakreditasi tahun 2016 kurang berkembang secara signifikan b. Terbatasnya pelayanan laboratorium yang bisa diberikan kepada masyarakat c. Pengelolaan limbah domestik rumah tangga dan limbah industri ke badan air akan berakibat menurunnya kualitas air; d. Masih adanya industri besar maupun UKM yang belum memiliki IPAL atau spesifikasi IPAL yang belum memenuhi syarat untuk membuang limbahnya ke badan air. e. Belum adanya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). f. Tidak bisa memberikan sanksi administratif kepada Kegiatan usaha yang izin lingkungannya kewenangan Pusat atau Provinsi, sehingga menghambat proses pengendaliannya dan sengketa lingkungannya g. Perlunya peningkatan kapasitas terhadap beberapa mitra yang saat ini kondisinya mati suri untuk tetap bekerja sama menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan dan mewujudkan kota probolinggo yang bersih indah nyaman dan lestari h. Kurangnya dukungan dan komitmen Pimpinan Pondok Pesantren dalam mengimplementasikan Eco Pesantren di Kota Probolinggo. i. Pimpinan, pengurus dan santri kurang memahami terkait pengelolaan lingkungan yang perlu dilakukan di lingkup pesantren sehingga diharapkan kesadaran lingkungan di lingkup pesantren meningkat j. Pembinaan dan koordinasi untuk mendukung pengelolaan lingkungan Pondok Pesantren melalui sinergi DLH, Kemenag, Bagian Kesra dan Bappeda perlu lebih ditingkatkan	Dinas Lingkungan Hidup



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		k. Penilaian Kinerja Masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan untuk Masyarakat bisa melalui penilaian dan pembinaan Eco Pesantren sedangkan penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum terfasilitasi melalui kegiatan penilaian Eco Office pada tahun 2024. Diharapkan Pembinaan dan penilaian Eco Office dapat juga dilakukan kepada karyawan di instansi Pemerintah Kota Probolinggo sebagai salah satu pendukung Pelayanan Publik l. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim; juga sulitnya masyarakat menerima perubahan / merubah kebiasaan yang lebih ramah lingkungan m. Kesadaran tentang pentingnya mengelola lingkungan dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih rendah n. Belum optimalnya peran perangkat kelurahan/ leadership dari pemangku wilayah sangatlah penting dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan o. Rendahnya capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang dikarenakan belum ada penambahan RTH Publik p. Belum terlaksananya sesuai Masterplan pengembangan Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) yang diharapkan dapat menjadi salah satu sarana konservasi keanekaragaman hayati dan sarana rekreasi q. Adanya perubahan kriteria penilaian Indeks Kualitas Lahan yang berbasis GIS dengan vegetasi lebar tajuk tanaman dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter, sehingga perlu penambahan luas RTH r. Kurangnya sinergitas dan komitmen OPD terhadap lingkungan khususnya RTH s. Perlu adanya revitalisasi keberlanjutan Taman-taman pedestrian untuk mengembalikan ikon Kota Seribu Taman t. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana taman kota sebagai pendukung RBRA. Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman-Taman karena mendukung Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) u. Belum adanya Masterplan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		v. Terjadinya alih fungsi lahan yang seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar papan/ perumahan dan semakin berkembangnya kegiatan pembangunan kota yang ada; w. Adanya pembangunan kawasan industri membutuhkan lahan yang luas, sehingga seringkali mengorbankan lahan pertanian atau hutan; x. Pembangunan jalan tol di Kota Probolinggo juga turut serta meningkatkan perekonomian dan investasi yang juga menyebabkan alih fungsi lahan untuk sektor perdagangan jasa dan atau industri. y. Kondisi TPA sudah overload sehingga perlu adanya perluasan lahan untuk Pembangunan Shell Sanitary Landfill baru z. Belum ada adanya penerapan teknologi baru dalam pengelolaan persampahan; aa. Menurunnya bank sampah aktif bb. Rencana lahan yang akan digunakan untuk perluasan TPA saat ini sedang dikuasai oleh 8 (delapan) warga untuk tambak dan tempat tinggal (bangunan semi permanen) cc. Meningkatnya pembuangan sampah liar dan pembakaran sampah di wilayah Kota Probolinggo dd. Tidak meratanya fasilitas penanganan sampah di wilayah Kota Probolinggo ee. Kurangnya sarana prasarana untuk penanganan sampah ff. Komposisi sampah masuk TPA Bestari Kota Probolinggo adalah 60% sampah organik yang belum dikelola oleh masyarakat gg. Tingginya gas methan di TPA Bestari Kota Probolinggo yang rentan menyebabkan kebakaran hh. Diperlukan dokumen pendampingan untuk rencana perluasan TPA Bestari Kota Probolinggo ii. Tidak adanya sarana-prasarana pengelolaan sampah sebanyak 65ton/hari yang dihasilkan warga Kota Probolinggo jj. Sulitnya Penarikan Retribusi persampahan/kebersihan untuk kategori perumahan/permukiman dikarenakan banyaknya jumlah perumahan/permukiman dan keterbatasan petugas penarik retribusi kk. Kurang efektifnya proses pemilahan sampah anorganik pada Bank Sampah Induk	



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		ll. Jumlah penduduk terus meningkat menyebabkan meningkatnya timbunan sampah; mm. Gaya hidup konsumtif masyarakat mendorong peningkatan produksi sampah, terutama sampah kemasan; nn. Kurangnya sarpras pewadahan sampah (Kontainer) di wilayah selatan Kota Probolinggo;	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Setiap tahun ada penduduk yang baru berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memenuhi syarat untuk memiliki KTP-el. Proses perekaman data dan pencetakan KTP-el membutuhkan waktu, sehingga tidak semua langsung terdaftar b. Lansia, penyandang disabilitas, atau orang dengan keterbatasan tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam mengurus KTP-el, meskipun pemerintah menyediakan layanan jemput bola." c. Anak yang lahir di luar fasilitas kesehatan, seperti di rumah tanpa bantuan tenaga medis, sering kali tidak langsung mendapatkan surat keterangan kelahiran yang dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang macam macam alat dan obat kontrasepsi KB b. Masih kurangnya kepesertaan KB MKJP metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOW, MOP) c. Penggunaan Sarana dan Prasarana pada PP dan KB belum maksimal d. Validitas data dan informasi pada PPKB masih kurang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Perhubungan	a. Tidak melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan dikarenakan regulasi dari Kepolisian yang menghapus penindakan tilang manual dan Dinas Perhubungan tidak boleh mengadakan Operasi Penertiban secara individual (berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) guna mengurangi unsur pemungutan liar di lapangan b. Pada tahun 2024 banyak kendaraan khususnya angkutan barang yang masih proses penyesuaian dimensi kendaraan terkait penerapan regulasi zero odol sehingga tidak ada denda bagi kendaraan yang tidak melaksanakan uji, serta pengawasan di lapangan yang menurun	Dinas Perhubungan



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
15.	Komunikasi dan Informatika	a. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah	a. Masih adanya sejumlah koperasi yang teridentifikasi sebagai koperasi yang tidak aktif baik secara kelembagaan maupun manajemen usahanya, masih adanya Koperasi yang belum berstandar sehat dan Dana Bergulir sebagai penguatan akses pembiayaan / permodalan pengembangan usaha masih belum bisa diakses pelaku usaha dan koperasi dikarenakan Perwali belum terbit b. Masih belum optimalnya Pendataan melalui Kartu E-UMKM, jumlah pelaku usaha mikro di Kota Probolinggo pada Tahun 2024 sebesar 21.253 sedangkan yang memiliki Kartu E-UMKM hanya 9.508 pelaku usaha, hal ini mempersulit pendataan baik data produksi, data usaha dan data permasalahan yang dihadapi usaha mereka sebagai dasar untuk melakukan Kebijakan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan usaha UMKM di kota probolinggo. Masih minimnya UMKM yang melakukan kemitraan usaha.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
17.	Penanaman Modal	a. Belum terbentuknya regulasi penanaman modal, penetapan fasilitasi insentif/kemudahan investasi di Kota Probolinggo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Adanya organisasi kepemudaan yang tidak aktif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
19.	Statistik	a. Belum terstandarnya data spasial sehingga masih sulit untuk dibagipakaikan b. Belum optimalnya pengelolaan satu data Kota Probolinggo	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.	Persandian	a. Terbatasnya kualitas SDM dan Sarpras Keamanan informasi persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Kebudayaan	a. Minimnya regenerasi penerus seni budaya lokal; b. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian seni budaya lokal; c. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Cagar Budaya d. Rendahnya pemahaman generasi muda terhadap pengetahuan budaya lokal dan tradisonal kuliner khas Kota Probolinggo, dan Kerajinan tradisional ; e. Minimnya pelaku seni ; f. Belum optimalnya manajemen / pengelolaan pada lembaga Seni Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
22.	Perpustakaan	a. Masih minimnya diversifikasi koleksi bacaan dan kelembagaan perpustakaan di Instansi Swasta/Pemerintah serta Pondok Pesantren/rumah ibadah untuk mendukung peningkatan literasi. b. Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan tenaga pengelola perpustakaan c. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan khususnya Mobil Perpustakaan Keliling.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Kearsipan	a. Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana kearsipan khususnya sarana depo arsip serta Mobil Layanan Kearsipan untuk mendukung usaha tertib arsip dan layanan restorasi arsip masyarakat b. Belum optimalnya kompetensi tenaga pengelola arsip. Hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan arsip secara baku.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	b. Minimnya fasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
B	URUSAN PILIHAN		
25.	Kelautan dan Perikanan	a. Masih rendahnya kesadaran nelayan kecil yang memiliki kapal < 5GT untuk mengurus perizinan b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan Sumberdaya Ikan yang berbasis kelestarian lingkungan c. Semakin menurunnya ketersediaan Sumberdaya Ikan yang semakin menurun baik di laut maupun di perairan umum darat d. Adanya tumpang tindih kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir Kota Probolinggo e. Terbatasnya ketersediaan induk dan benih ikan unggul f. Terbatasnya kemampuan penyediaan pakan alami untuk pembenihan ikan g. Mahalnya harga pakan ikan pabrikan (hampir 80 % biaya produksi digunakan untuk pembelian pakan) h. Penurunan Produktivitas Budidaya Air Payau sistem tradisional yang hanya mengandalkan Faktor alam i. Masih rendahnya produk hasil perikanan yang mendapat sertifikasi keamanan pangan j. Peralatan pengolahan yang digunakan masih tradisional k. Kurangnya kesadaran bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam menerapkan penanganan ikan yang baik	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		l. Belum banyak produk hasil perikanan yang sudah di uji nutrisi m. Rendahnya keanekaragaman (diversifikasi) produk perikanan n. Tidak stabilnya produk hasil perikanan dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas o. Kurangnya akses bahan baku p. Kurangnya akses pasar dan promosi produk perikanan q. Kurangnya jejaring kemitraan antara stakeholder perikanan r. Rendahnya kapasitas pembudidaya ikan/pokdakan dalam meningkatkan kemandirian s. Kurangnya sediaan bahan uji untuk pengujian kualitas air, obat-obatan dan vitamin untuk ikan	
26.	Pariwisata	a. Kondisi sarana dan prasarana obyek wisata yang kurang layak	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
27.	Pertanian	a. Luas lahan pertanian di Kota Probolinggo mengalami penurunan setiap tahunnya b. Banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti pertokoan, permukiman, dan perkantoran. c. Ketergantungan petani pada penggunaan pupuk kimia d. Lahan pertanian mengalami degradasi dan penurunan kualitas akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di tingkat petani e. Jumlah anggur dan mangga asli Kota Probolinggo semakin berkurang f. Jumlah warga yang menanam pohon mangga dan anggur semakin berkurang karena sempitnya lahan di area permukiman g. Perubahan iklim mempengaruhi tingkat produksi dan kualitas buah anggur b. Pasca wabah PMK tahun 2022, usaha pemulihan ekonomi dilakukan oleh pemerintah melalui program vaksinasi sehingga ada perbaikan kondisi peternakan dimana terjadi kenaikan harga di tingkat peternak dan peningkatan konsumsi di tingkat konsumen. Alur distribusi juga sudah mulai lancar. akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama dikarenakan pada tahun 2024 kembali munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit Lumpy SKin Disease (LSD) yang penyebarannya begitu cepat. Kondisi ini menyebabkan harga ternak sapi menjadi turun drastis. Penjualan dilakukan secara cepat dengan harga yang sangat rendah (panic selling). Situasi tersebut menyebabkan populasi ternak menurun karena peternak menjual rugi ternaknya dan tidak segera membeli ternak lagi sambil menunggu kondisi perkembangan wabah PMK dan LSD. Selain turunnya populasi, wabah PMK juga menyebabkan turunnya minat peternak untuk bertransaksi di Pasar hewan dikarenakan khawatir ternak yang dibeli justru membawa wabah PMK dan LSD ke kandangnya. sehingga terjadi penurunan omset transaksi di pasar hewan karena ternak yang masuk berkurang.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
28.	Perdagangan	a. Belum optimalnya Revitalisasi pada Pasar Tradisional, hanya 3 dari 11 Pasar di Kota Probolinggo yang telah Di Revitalisasi Pasar menuju Pasar SNI b. Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan daerah beroriented ekspor c. Naik Turunnya daya beli masyarakat yang berimplikasi terhadap sektor perdagangan di Kota Probolinggo	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
29.	Perindustrian	a. Masih kurangnya keterampilan teknis produksi pelaku usaha industry b. Keterbatasan kemampuan industri untuk memenuhi sertifikasi HKI dan standardisasi produk	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
C	PENUNJANG		
C.1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
30.	Unsur Staf	a. Mengalami kenaikan karena terdapat aspek penilaian baru yaitu RB Tematik b. Penerapan SAKIP di Kota Probolinggo sudah cukup baik, namun masih terdapat permasalahan pada aspek: perencanaan kinerja,pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal" c. Nilai IKM Kota berasal dari Nilai IKM PD yang dijumlah dan diambil secara rata rata, kebanyakan PD melaksanakan SKM secara mandiri dengan menyebar kuesioner kepada penerima pelayanan, ketika PD melaksanakan SKM secara mandiri dan manual kebanyakan melewati beberapa tahapan sehingga hasil pengolahan data survei ditengarai kurang obyektif yang berdampak pada hasil nilai IKM PD banyak yang memperoleh nilai IKM tinggi; d. Dan Ketika SKM melibatkan pihak ke tiga biasanya metode yang dilaksanakan lebih obyektif, lebih terencana dan terstruktur, bagaimana menentukan lokus, responden, kuesioner dan ruang lingkup survei lebih matang akan tetapi membutuhkan anggaran yang besar. e. Penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik saat ini masih fokus pada PD tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian PANRB, sehingga kinerja PD yang menjadi lokus yang hanya dievaluasi sedangkan PD yang lain masih belum di evaluasi karena keterbatasan SDM, Anggaran, f. Pada Bagian Hukum tidak Memiliki Jabatan Fungsional Perancang	Sekretariat Daerah



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
	Unsur Staf	g. Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD h. Peran ganda yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sebagai OPD yang berdiri sendiri di bawah Kepala Daerah (Wali Kota) dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai Badan Pembentukan Perda dan sebagai eksekutif akan menjadikan posisi Sekretariat DPRD harus bisa menjadi mediator untuk menyesuaikan kepentingan kedua lembaga tersebut i. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak dapat diseragamkan. j. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu disosialisasikan kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi. k. Belum maksimalnya penerapan SOP dalam pelayanan terhadap DPRD"	Sekretariat Dewan
C.2	FUNGSI PENGAWASAN		
31.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a. Keterbatasan sumber daya untuk menangani temuan yang lebih kompleks serta kecenderungan terjadinya temuan berulang akibat kelemahan dalam implementasi rekomendasi. Selain itu, temuan pemeriksaan yang memerlukan perbaikan struktural dan perubahan kebijakan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, sehingga dapat menghambat pencapaian target yang lebih tinggi. b. Peningkatan target yang signifikan pada tahun 2025 dan 2026 hingga 85% menjadi tantangan besar. Hambatan utama dalam pencapaian target tersebut adalah kurangnya perbaikan berkelanjutan dalam aspek koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya efektivitas pengawasan internal. Selain itu, ketidakmampuan perangkat daerah dalam melaksanakan perbaikan sesuai dengan temuan evaluasi kinerja dapat menyebabkan penurunan kinerja dan menghambat pencapaian target yang lebih tinggi.	Inspektorat



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		c. Stagnasi dalam peningkatan level menjadi tantangan utama, meskipun level 3 telah tercapai pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini disebabkan oleh kurangnya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem SPIP serta minimnya dukungan dari perangkat daerah dalam meningkatkan mutu dan implementasi pengendalian internal. Selain itu, kurangnya integrasi antara sistem pengendalian intern dengan proses bisnis di instansi pemerintah serta ketiadaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pencapaian maturitas SPIP d. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi kualitas penanganan pengaduan dalam jangka panjang. Pengaduan yang lebih kompleks dan memerlukan koordinasi lintas sektor berpotensi menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyelesaian. Selain itu, peningkatan jumlah pengaduan dari waktu ke waktu serta keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penyelesaian pengaduan	
C.3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
32.	Perencanaan	a. Belum optimalnya capaian kinerja program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
33.	Kuangan	a. Terdapat penurunan Realisasi PAD dari Lain-Lain PAD yang Sah karena • Pembayaran BPJS pada bulan Desember 2024 hanya satu kali • Menurunnya penempatan besaran Dana Deposito Pemerintah Kota Probolinggo b. Intinya Perhitungan perdin DPRD masih menggunakan Lumsump, dan banyak Kegiatan DPRD yang tidak terlaksana karena banyaknya Kegiatan DPRD c. Semua SKPD sudah melaksanakan proses inventarisasi secara tepat dan menyeluruh (Kesesuaian keberadaan, lokasi, kondisi dan pemanfaatan)	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
34.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	a. masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengoptimalan Indeks Profesionalitas Aparatur yaitu antara lain : Belum adanya prioritas pengelolaan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan intensitas yang tinggi bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		Kurangnya kesadaran para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Kualifikasi Pendidikan; Rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengakibatkan jumlah pelaksana yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juga	
35.	Penelitian dan Pengembangan	a. Kurang pemanfaatan terhadap hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
36.	Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum; b. Perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat terutama para pemilih pemula dalam hal etika dan budaya politik demokrasi sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat. c. Belum maksimalnya Ormas/LSM melaporkan aktifitasnya; d. Semakin beragamnya sumber – sumber potensi konflik.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
C.4	Fungsi Koordinasi		



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
37.	Fungsi Koordinasi dan Kewilayahan Kecamatan	a. Kurangnya akses untuk memperoleh pelatihan dan fasilitasi peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan baik di Kantor Kecamatan ataupun Kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. c. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kelurahan dan kecamatan d. Belum optimalnya penanganan kasus gangguan keamanan dan ketertiban umum tingkat kelurahan dan kecamatan e. Belum efektifnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan dari aspek kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung f. Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode Renstra 2020-2024 tidak dapat mencapai 100% g. Pelayanan tentang masalah pengaduan masyarakat, trantibum dan pemberdayaan masyarakat masih belum terakomodir dalam Pengukuran IKM pada aplikasi Portal Emas h. Sarana dan prasarana kelurahan belum optimal dalam mendukung pelayan berbasis Android i. Pengelolaan data yang ada di Kelurahan dan Kecamatan masih secara konvensional dan belum up to date j. Minimnya kapasitas SDM pengelola data pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan k. Kurangnya kapasitas SDM Pokmas pelaksana dana kelurahan yang bersifat pekerjaan fisik l. Cakupan pemberdayaan masyarakat belum secara menyeluruh dirasakan oleh masyarakat m. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maupun feedback terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan dan Kecamatan n. Belum optimalnya peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan tingkat kelurahan/kecamatan o. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh kelompok dan lembaga masyarakat p. Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai e-Governance sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi q. Belum meningkatnya intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi	Kecamatan



No	Urusan	Permasalahan	PD Penanggungjawab
		UMKM, Fasilitas dan Sosialisasi Lomba Kelurahan r. Belum dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media s. Kurangnya upaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan t. Kurangnya system keamanan terpadu di Kecamatan u. Kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas baik di Kecamatan maupun di Kelurahan	

Sumber : Data Diolah, 2025



2.1.	KONDISI UMUM DAERAH	1
2.1.1.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	1
2.1.1.1.	Administrasi Wilayah.....	1
2.1.1.2.	Topografi	2
2.1.1.3.	Geologi	3
2.1.1.4.	Jenis Tanah.....	4
2.1.1.5.	Hidrologi.....	4
2.1.1.6.	Kedalaman Air Tanah	7
2.1.1.7.	Penggunaan Lahan.....	7
2.1.1.8.	Potensi Pengembangan Wilayah	11
2.1.1.9.	Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan	17
2.1.1.10.	Kawasan Rawan Bencana.....	21
2.1.1.11.	Aspek Demografi	26
2.1.1.12.	Aspek Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.....	29
2.1.2.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	29
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	29
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	32
2.1.2.3.	Fokus Pemerintahan.....	37
2.1.2.4.	Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga	37
2.1.3.	ASPEK PELAYANAN UMUM	40
2.1.3.1.	PENDIDIKAN	62
2.1.3.2.	KESEHATAN	64
2.1.3.3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66
2.1.3.4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	69
2.1.3.5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	72
2.1.3.6.	SOSIAL	74
2.1.3.7.	TENAGA KERJA	76
2.1.3.8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	77
2.1.3.9.	PANGAN	79
2.1.3.10.	PERTANAHAN	81
2.1.3.11.	LINGKUNGAN HIDUP	82
2.1.3.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	83
2.1.3.13.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	84
2.1.3.14.	PERHUBUNGAN	87
2.1.3.15.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89
2.1.3.16.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	91
2.1.3.17.	PENANAMAN MODAL	93
2.1.3.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	96
2.1.3.19.	STATISTIK.....	97
2.1.3.20.	PERSANDIAN.....	99
2.1.3.21.	KEBUDAYAAN	100
2.1.3.22.	PERPUSTAKAAN.....	102
2.1.3.23.	KEARSIPAN	105
2.1.3.24.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	107
2.1.3.25.	PARIWISATA.....	111
2.1.3.26.	PERTANIAN	113
2.1.3.27.	PERDAGANGAN	117
2.1.3.28.	PERINDUSTRIAN	118
2.1.3.29.	SEKRETARIAT DAERAH	120
2.1.3.30.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	122
2.1.3.31.	PERENCANAAN.....	124
2.1.3.32.	KEUANGAN.....	124
2.1.3.33.	KEPEGAWAIAN	126
2.1.3.34.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	128
2.1.3.35.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	129
2.1.3.36.	PENGAWASAN	130
2.1.3.37.	KEWILAYAHAN.....	131



2.1.3.38.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	132
2.1.4.	ASPEK DAYA SAING DAERAH	134
2.1.4.1.	Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Iklim Investasi	134
2.1.4.2.	Fokus Sumber Daya Manusia	136
2.1.5.	CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAERAH	137
2.1.5.1.	Capaian SPM Bidang Pendidikan	138
2.1.5.2.	Capaian SPM Bidang Kesehatan	141
2.1.5.3.	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	143
2.1.5.4.	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	145
2.1.5.5.	Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	146
2.1.5.6.	Capaian SPM Bidang Sosial.....	149
2.1.6.	REALISASI RPJMD	151
2.1.6.1.	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)	151
2.1.6.2.	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)	157
2.2.	EVALUASI PROGRAM KEGIATAN RKPD	179
2.3.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	183
2.3.1	PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	183
2.3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH.....	186
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo	1
Tabel 2. 1	Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	2
Gambar 2. 2	Peta Topografi Kota Probolinggo.....	2
Gambar 2. 3	Persentase luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi	3
Tabel 2. 2	Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	3
Gambar 2. 4	Peta Geologi Kota Probolinggo.....	3
Tabel 2. 3	Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	4
Gambar 2. 5	Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo	4
Tabel 2. 4	Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo	5
Tabel 2. 5	Sumber Mata Air di Kota Probolinggo	6
Gambar 2. 6	Peta Hidrologi Kota Probolinggo	6
Tabel 2. 6	Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan.....	7
Gambar 2. 7	Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo.....	7
Tabel 2. 7	Data Penggunaan Lahan di Kota Probolinggo Tahun 2024.....	8
Gambar 2. 8	Peta Tutupan Vegetasi Tahun 2024.....	9
Gambar 2. 9	Kawasan Pelabuhan.....	9
Tabel 2. 8	Kemampuan Lahan Menurut Kecamatan Kota Probolinggo	10
Gambar 2. 10	Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo	11
Gambar 2. 11	Peta Hinterland Kota Probolinggo	12
Gambar 2. 12	Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo	12
Gambar 2. 13	Rencana Pola Ruang Kota Probolinggo	14
Gambar 2. 14	Kawasan Pelabuhan.....	15
Gambar 2. 15	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	16
Gambar 2. 16	Rasio Konektivitas Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	17
Tabel 2. 9	Daya Dukung Pangan Kota Probolinggo Tahun 2023.....	18
Gambar 2. 17	Indeks Ketahanan Pangan Kota Probolinggo	19
Gambar 2. 18	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Probolinggo.....	21
Gambar 2. 19	Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Probolinggo	22
Tabel 2. 11	Luasan Kawasan Banjir Lahar Berdasarkan Kecamatan.....	23
Gambar 2. 20	Peta Kawasan Rawan Banjir Lahar Kota Probolinggo.....	23
Gambar 2. 21	Peta Kawasan Rawan Puting Beliung Kota Probolinggo	24
Gambar 2. 22	Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kota Probolinggo	25
Gambar 2. 23	Peta Kawasan Rawan Kebakaran Kota Probolinggo	26
Tabel 2. 15	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (dalam ribu jiwa)	27



Tabel 2. 16 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kota Probolinggo Tahun 2024.....27

Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....28

Tabel 2. 17 Angka Kelahiran Berdasarkan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024.....28

Tabel 2. 18 Angka Kematian Berdasarkan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2024.....28

Gambar 2. 25 Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Probolinggo29

Tabel 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024.....30

Tabel 2. 20 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..30

Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024.....33

Tabel 2. 22 Persentase penduduk miskin Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024.....33

Tabel 2. 23 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 202433

Tabel 2. 24 Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024.....33

Tabel 2. 25 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2020-202434

Gambar 2. 26 Indeks Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020-202464

Gambar 2. 27 Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024.....65

Tabel 2. 30 Ruas Jalan Menurut Fungsinya Tahun 202366

Gambar 2. 28 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024.....67

Gambar 2. 29 Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Tahun 2020-2024.....68

Gambar 2. 30 Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Dan Sanitasi Aman Tahun 2020-2024.....68

Gambar 2. 31 Capaian Rumah Tidak Layak Huni Dan Luasan Permukiman Kumuh70

Gambar 2. 32 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan Tahun 2020-202471

Gambar 2. 33 Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-202472

Gambar 2. 34 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....73

Gambar 2. 35 Indeks Risiko Bencana Dan Wilayah Tangguh Bencana Tahun 2020-202473

Gambar 2. 36 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Serta Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024.....75

Gambar 2. 37 Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2020-202475

Gambar 2. 38 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2020-202476

Gambar 2. 39 Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Tahun 2020-202477

Tabel 2. 31 Kota Layak Anak Tahun 2020-202478

Gambar 2. 40 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....78

Gambar 2. 41 Ketersediaan Pangan (Ton) Tahun 2020-2024.....79

Gambar 2. 42 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Tahun) Tahun 2020-202480

Gambar 2. 43 Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2020-2024.....80

Gambar 2. 44 Capaian Indikator Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Tahun 2020-202482

Gambar 2. 45 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....82

Gambar 2. 46 Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....83

Gambar 2. 47 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....84

Gambar 2. 48 Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (%) Tahun 2020-202485



Gambar 2. 49 Unmeet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/Kb Yang Tidak Terpenuhi) (%) Tahun 2020-2024.....	86
Gambar 2. 50 Capaian Kinerja MCPR, TFR Dan ASFR Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	86
Gambar 2. 51 Capaian Indikator Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	88
Gambar 2. 52 Indeks SPBE Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	89
Gambar 2. 53 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan E-Government Terintegrasi Tahun 2020-2024	90
Gambar 2. 54 Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024	91
Gambar 2. 55 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020-2024.....	92
Gambar 2. 56 Rasio Kewirausahaan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	92
Gambar 2. 57 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp Dalam Milyar) Berdasarkan Data LKPM Dan NIB Tahun 2020-2024.....	93
Gambar 2. 58 Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Tahun 2020-2024.....	94
Gambar 2. 59 ICOR Dan Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	94
Gambar 2. 60 Nilai Realisasi Penanaman Modal	95
Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	95
Gambar 2. 61 Indeks Kepuasan Masyarakat (IkM) Pada DPMPTSP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	95
Gambar 2. 62 Jumlah Organisasi Pemuda Dan Olahraga Tahun 2020-2024	96
Gambar 2. 63 Capaian Indikator Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2020-2024.....	97
Gambar 2. 64 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2020-2024	98
Gambar 2. 65 Capaian Indikator Urusan Persandian Tahun 2020-2024.....	99
Gambar 2. 66 Jumlah Sarana Seni Dan Budaya (Unit) Tahun 2020-2024	100
Gambar 2. 67 Jumlah Penyelenggara Seni Dan Budaya (Kegiatan) Tahun 2020-2024...100	
Gambar 2. 68 Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Unit)	101
Gambar 2. 69 Jumlah Kelompok, Sanggar, Organisasi Seni Tahun 2020-2024	101
Gambar 2. 70 Indeks Kebudayaan Berbasis Capaian Pelaksanaan Ppkd / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Serta Persentase Kebudayaan Yang Dikelola Menjadi Daya Saing Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	102
Gambar 2. 71 Jumlah Pengunjung Dan Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Tahun 2020-2024.....	103
Gambar 2. 72 Capaian Indikator TGM Dan IPLM Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..103	
Gambar 2. 73 Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baik Tahun 2020-2024.....	105
Gambar 2. 74 Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Pengelolaan.....	106
Gambar 2. 75 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024.....	106
Gambar 2. 76 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024	107
Gambar 2. 77 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Kota Probolinggo 2020-2024	108
Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	109
Gambar 2. 78 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	110
Gambar 2. 79 Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	111
Gambar 2. 80 Capaian Indikator Rasio Pad Sektor Pariwisata Di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	112
Gambar 2. 81 Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....	113
Gambar 2. 82 Produksi Padi, Jagung, Dan Bawang Merah Tahun 2020-2024.....	114
Gambar 2. 83 Jumlah Kelompok Tani Aktif Dan Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024....115	



Tabel 2. 33 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020-2024115

Gambar 2. 84 Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2020-2024116

Gambar 2. 85 Jumlah Nilai Impor Dan Ekspor Kota Probolinggo Tahun 2021-2024.....117

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024118

Gambar 2. 86 Persentase Pertumbuhan Pdrb Kategori Perindustrian (%) Tahun 2020-2024.....119

Tabel 2. 35 Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian.....119

Gambar 2. 87 Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Dan Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri Tahun 2020-2024120

Gambar 2. 88 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....121

Gambar 2. 89 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024121

Gambar 2. 90 Nilai SAKIP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....122

Gambar 2. 91 Persentase Anggota DPRD Yang Puas Akan Pelayanan Sekretariat Dprd Kota Probolinggo Tahun 2020-2024123

Gambar 2. 92 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024.....124

Gambar 2. 93 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024125

Gambar 2. 94 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo127

Gambar 2. 95 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2020-2024...128

Gambar 2. 96 Capaian Kinerja Urusan Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....129

Gambar 2. 97 Capaian Kinerja Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024130

Gambar 2. 98 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2024131

Gambar 2. 99 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 5 Kecamatan Di Kota Probolinggo 2020-2024132

Gambar 2. 100 Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo Tahun 2020-2024133

Gambar 2. 101 Jumlah Orkesmas Aktif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024.....133

Tabel 2. 38 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022-2024138

Tabel 2. 39 Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan141

Tabel 2. 40 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....144

Tabel 2. 41 Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat145

Tabel 2. 43 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial149

Tabel 2. 44 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2024151

Tabel 2. 45 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2024157

Tabel TC. 19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Probolinggo Tahun 2024

Urusan : Pendidikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran P. RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					100	650.433.158.818,31	100	578.469.771.969,00	100	227.282.889.144,00	95,46	216.953.359.043,00	95,46	95,46	195,46	795.423.131.012,00	195,46	122,29		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar	%	100	209.384.412.880,00	83,7	188.539.930.810,00	100	75.469.694.468	97,69	66.669.601.686,00	97,69	88,34	181,39	255.209.532.496,00	181,39	121,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD dan Nonformal	%	100		100		100		90,72		90,72		190,72		190,72			
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI	%	100	111.375.276.240,00	98,26	96.416.976.815,00	100	37.208.413.719,00	99,68	32.042.164.129,00	99,68	86,12	197,94	128.459.140.944,00	197,94	115,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	65,56		64,85		65,56		82,54		125,9		147,39		224,82			
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49,4		48,11		49,4		70,28		142,27		118,39		239,66			
			Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persenta se	100		99,69		100		99,51		99,51		199,2		199,2			
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	750.000.000,00	0	6.564.000,00	3	254.182.000	3	224.778.700,00	100	88,43	3	231.342.700,00	100	30,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	9	750.000.000,00	0	3.888.600,00	1	133.452.000	1	119.466.000,00	100	89,52	1	123.354.600,00	11,11	16,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	100.000.000,00	0	0	1	84.788.000	1	72.303.167,00	100	85,28	1	72.303.167,00	100	72,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	75.000.000,00	0	0	1	80.000.000	1	64.408.165,00	100	80,51	1	64.408.165,00	100	85,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	75.000.000,00	0	0	4	360.000.000	4	346.804.668,00	100	96,33	4	346.804.668,00	400	462,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	750	988.800.000,00	200	176.602.600,00	50	183.975.000	57	155.320.000,00	114	84,42	257	331.922.600,00	34,27	33,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	600	1.150.000.000,00	250	147.779.440,00	150	93.265.000	150	36.686.793,00	100	39,34	400	184.466.233,00	66,67	16,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	862	594.000.000,00	0	0	150	14.925.000	150	13.469.000,00	100	90,24	150	13.469.000,00	17,4	2,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naikna Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	862	450.000.000,00	300	198.600.290,00	150	30.500.000	150	19.052.000,00	100	62,47	450	217.652.290,00	52,2	48,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	345	9.773.155.240,00	115	7.507.899.371,00	115	5.217.120.000,00	115	5.162.880.000,00	100	98,96	230	12.670.779.371,00	66,67	129,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI CURAHGRINTING 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	300.115.200,00	2	279.139.000,00	1	51.030.000,00	1	43.603.000,00	100	85,45	3	322.742.000,00	100	107,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI CURAHGRINTING 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	228.577.200,00	2	214.401.650,00	1	66.999.510,00	1	36.397.000,00	100	54,32	3	250.798.650,00	100	109,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JATI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	1.175.863.200,00	2	804.161.675,00	1	286.370.540,00	1	128.958.656,00	100	45,03	3	933.120.331,00	100	79,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JATI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	248.605.200,00	2	235.658.325,00	1	67.971.510,00	1	54.415.700,00	100	80,06	3	290.074.025,00	100	116,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KIDUL	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	430.105.200,00	2	413.164.630,00	1	111.763.740,00	1	88.310.000,00	100	79,01	3	501.474.630,00	100	116,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KULON 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	484.492.200,00	2	429.306.197,00	1	100.183.510,00	1	40.548.064,00	100	40,47	3	469.854.261,00	100	96,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KULON 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	451.112.700,00	2	401.669.400,00	1	107.279.010,00	1	71.430.944,00	100	66,58	3	473.100.344,00	100	104,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	700.027.200,00	2	638.991.000,00	1	148.728.760,00	1	130.442.564,00	100	87,71	3	769.433.564,00	100	109,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		803.638.200,00	2	795.087.938,00	1	149.271.260,00	1	128.940.542,00	100	86,38	3	924.028.480,00	100	114,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		352.870.200,00	2	334.230.920,00	1	107.755.020,00	1	95.016.084,00	100	88,18	3	429.247.004,00	100	121,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG WETAN	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		384.679.200,00	2	336.253.620,00	1	100.471.740,00	1	86.090.100,00	100	85,69	3	422.343.720,00	100	109,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		495.292.200,00	2	436.282.520,00	1	109.323.010,00	1	34.003.614,00	100	31,1	3	470.286.134,00	100	94,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		466.363.200,00	2	368.830.880,00	1	120.973.020,00	1	49.746.320,00	100	41,12	3	418.577.200,00	100	89,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		444.109.200,00	2	360.076.490,00	1	119.552.520,00	1	60.903.408,00	100	50,94	3	420.979.898,00	100	94,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KANIGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		1.376.473.200,00	2	994.033.650,00	1	299.216.280,00	1	221.431.550,00	100	74	3	1.215.465.200,00	100	88,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KANIGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		981.340.200,00	2	813.658.510,00	1	238.968.540,00	1	130.517.500,00	100	54,62	3	944.176.010,00	100	96,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KANIGARAN 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		773.464.200,00	2	676.747.672,00	1	167.023.740,00	1	50.630.880,00	100	30,31	3	727.378.552,00	100	94,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KARENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		424.081.200,00	2	425.814.526,00	1	126.788.250,00	1	105.224.000,00	100	82,99	3	531.038.526,00	100	125,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KARENG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		346.519.200,00	2	322.186.830,00	1	91.299.510,00	1	40.150.500,00	100	43,98	3	362.337.330,00	100	104,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI KULON 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		876.748.200,00	2	767.231.423,00	1	233.440.270,00	1	170.315.500,00	100	72,96	3	937.546.923,00	100	106,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI KULON 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		1.207.999.200,00	2	1.040.460.466,00	1	281.927.540,00	1	116.039.354,00	100	41,16	3	1.156.499.820,00	100	95,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI KULON 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		432.982.200,00	2	423.441.880,00	1	95.532.510,00	1	54.484.500,00	100	57,03	3	477.926.380,00	100	110,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		246.052.200,00	2	233.069.300,00	1	66.513.510,00	1	53.055.800,00	100	79,77	3	286.125.100,00	100	116,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		252.403.200,00	2	192.928.980,00	1	55.821.510,00	1	30.970.914,00	100	55,48	3	223.899.894,00	100	88,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDOPOK 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		368.773.200,00	2	337.914.172,00	1	97.131.510,00	1	77.671.714,00	100	79,97	3	415.585.886,00	100	112,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDOPOK 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		390.373.200,00	2	389.058.150,00	1	138.763.480,00	1	113.729.900,00	100	81,96	3	502.788.050,00	100	128,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGASEM 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		725.422.200,00	2	708.926.038,00	1	203.548.760,00	1	142.404.244,00	100	69,96	3	851.330.282,00	100	117,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGASEM 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		470.488.200,00	2	472.480.144,00	1	129.869.520,00	1	99.806.890,00	100	76,85	3	572.287.034,00	100	121,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGGALENG	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		399.601.200,00	2	376.799.160,00	1	114.073.020,00	1	112.523.999,00	100	98,64	3	489.323.159,00	100	122,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		388.801.200,00	2	364.624.397,00	1	118.381.750,00	1	59.728.100,00	100	50,45	3	424.352.497,00	100	109,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		488.617.200,00	2		459.860.800,00	1		119.707.020,00	1		80.950.300,00	100	67,62	3		540.811.100,00	100	110,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		446.662.200,00	2		284.047.250,00	1		77.045.000,00	1		11.789.000,00	100	15,3	3		295.836.250,00	100	66,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		513.422.700,00	2		428.693.070,00	1		99.454.260,00	1		37.533.500,00	100	37,74	3		466.226.570,00	100	90,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		355.423.200,00	2		340.502.600,00	1		61.236.000,00	1		55.242.000,00	100	90,21	3		395.744.600,00	100	111,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 12	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		450.787.200,00	2		402.804.952,00	1		142.886.530,00	1		84.750.071,00	100	59,31	3		487.555.023,00	100	108,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		624.691.200,00	2		500.089.857,00	1		123.375.510,00	1		96.863.000,00	100	78,51	3		596.952.857,00	100	95,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		346.519.200,00	2		347.923.830,00	1		105.263.250,00	1		96.364.258,00	100	91,55	3		444.288.088,00	100	128,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 5	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		406.279.200,00	2		338.184.963,00	1		116.017.020,00	1		62.605.480,00	100	53,96	3		400.790.443,00	100	98,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		426.634.200,00	2		419.190.246,00	1		121.202.520,00	1		108.055.450,00	100	89,15	3		527.245.696,00	100	123,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		852.595.200,00	2		794.228.260,00	1		208.329.480,00	1		111.733.000,00	100	53,63	3		905.961.260,00	100	106,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MAYANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		461.911.200,00	2		409.790.800,00	1		113.169.510,00	1		50.740.064,00	100	44,84	3		460.530.864,00	100	99,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MAYANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		1.159.042.200,00	2		1.068.615.900,00	1		273.560.530,00	1		136.449.692,00	100	49,88	3		1.205.065.592,00	100	103,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MAYANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		286.435.200,00	2		253.678.820,00	1		38.880.000,00	1		17.412.000,00	100	44,78	3		271.090.820,00	100	94,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PILANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		412.954.200,00	2		411.996.850,00	1		109.705.740,00	1		55.544.703,00	100	50,63	3		467.541.553,00	100	113,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PAKISTAJI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		414.853.200,00	2		402.541.990,00	1		110.191.740,00	1		80.487.500,00	100	73,04	3		483.029.490,00	100	116,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PILANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		422.182.200,00	2		403.386.600,00	1		105.733.740,00	1		32.237.000,00	100	30,49	3		435.623.600,00	100	103,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PILANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		251.483.700,00	2		247.881.712,00	1		50.544.000,00	1		15.918.000,00	100	31,49	3		263.799.712,00	100	104,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI PILANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		326.164.200,00	2		317.654.328,00	1		74.234.460,00	1		19.968.000,00	100	26,9	3		337.622.328,00	100	103,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		246.379.200,00	2		249.986.747,00	1		77.283.510,00	1		56.247.564,00	100	72,78	3		306.234.311,00	100	124,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		457.135.200,00	2		448.886.949,00	1		108.309.510,00	1		97.999.000,00	100	90,48	3		546.885.949,00	100	119,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		907.903.200,00	2		814.068.669,00	1		224.378.760,00	1		119.443.920,00	100	53,23	3		933.512.589,00	100	102,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		511.198.200,00	2		394.614.720,00	1		118.029.510,00	1		42.540.500,00	100	36,04	3		437.155.220,00	100	85,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		1.827.568.200,00	2		1.406.894.558,00	1		384.788.990,00	1		70.787.500,00	100	18,4	3		1.477.682.058,00	100	80,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		996.590.700,00	2	945.098.500,00	1	228.028.760,00	1	145.672.500,00	100	63,88	3	1.090.771.000,00	100	109,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		419.956.200,00	2	408.008.560,00	1	91.299.510,00	1	76.452.500,00	100	83,74	3	484.461.060,00	100	115,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKABUMI 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		402.154.200,00	2	388.486.800,00	1	96.645.510,00	1	55.195.914,00	100	57,11	3	443.682.714,00	100	110,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKOHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		930.157.200,00	2	841.672.024,00	1	213.703.020,00	1	121.583.228,00	100	56,89	3	963.255.252,00	100	103,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKOHARJO 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		723.526.200,00	2	622.518.050,00	1	194.040.440,00	1	165.864.590,00	100	85,48	3	788.382.640,00	100	108,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUKOHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		444.109.200,00	2	426.812.140,00	1	98.103.510,00	1	85.828.400,00	100	87,49	3	512.640.540,00	100	115,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBER WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		595.108.200,00	2	586.278.800,00	1	123.092.460,00	1	92.381.800,00	100	75,05	3	678.660.600,00	100	114,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBER WETAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		431.083.200,00	2	435.157.969,00	1	116.989.020,00	1	101.278.200,00	100	86,57	3	536.436.169,00	100	124,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBERTAMAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		473.038.200,00	2	393.287.953,00	1	113.169.510,00	1	85.103.064,00	100	75,2	3	478.391.017,00	100	101,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI SUMBERTAMAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		804.292.200,00	2	776.593.750,00	1	184.206.250,00	1	105.333.830,00	100	57,18	3	881.927.580,00	100	109,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TISNONEGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		956.533.200,00	2	696.792.491,00	1	226.644.040,00	1	119.253.600,00	100	52,62	3	816.046.091,00	100	85,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TISNONEGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		916.150.200,00	2	683.398.110,00	1	230.740.040,00	1	155.976.998,00	100	67,6	3	839.375.108,00	100	91,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		497.518.200,00	2	414.542.700,00	1	116.291.240,00	1	31.156.600,00	100	26,79	3	445.699.300,00	100	89,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		430.756.200,00	2	380.275.200,00	1	106.851.510,00	1	41.605.290,00	100	38,94	3	421.880.490,00	100	97,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		466.036.200,00	2	318.770.800,00	1	121.459.020,00	1	43.966.128,00	100	36,2	3	362.736.928,00	100	77,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		483.838.200,00	2	473.204.635,00	1	97.912.230,00	1	93.685.175,00	100	95,68	3	566.889.810,00	100	117,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		286.435.200,00	2	230.326.350,00	1	54.918.000,00	1	13.499.000,00	100	24,58	3	243.825.350,00	100	85,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		408.832.200,00	2	364.120.480,00	1	87.966.000,00	1	23.511.500,00	100	26,73	3	387.631.980,00	100	94,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WIROBORANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		1.165.390.200,00	2	1.169.477.463,00	1	252.940.530,00	1	158.596.070,00	100	62,7	3	1.328.073.533,00	100	113,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WIROBORANG 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		357.973.200,00	2	351.482.300,00	1	67.006.230,00	1	18.831.500,00	100	28,1	3	370.313.800,00	100	103,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WONOASIH 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		495.292.200,00	2	362.542.100,00	1	116.571.510,00	1	43.878.500,00	100	37,64	3	406.420.600,00	100	82,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WONOASIH 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3		455.236.200,00	2	432.395.850,00	1	131.083.020,00	1	79.889.000,00	100	60,95	3	512.284.850,00	100	112,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidik an	258		46.461.600.000,00	172		49.309.355.405,00	86		16.929.150.919,00		86		16.747.352.611,00		100		98,93		258		66.056.708.016,00		100		142,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	516		450.000.000,00	344		169.187.660,00	172		301.560.000,00		172		251.275.000,00		100		83,33		516		420.462.660,00		100		93,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	2		450.000.000,00	0		5.777.550,00	3		701.520.000,00		3		651.023.100,00		100		92,8		3		656.800.650,00		150		145,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	36		105.000.000,00	12		597.850.240,00	15		692.670.000,00		15		520.371.694,00		100		75,13		27		1.118.221.934,00		75		1.064,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	paket	20		500.000.000,00	0		0	20		500.000.000,00		20		429.038.850,00		100		85,81		20		429.038.850,00		100		85,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	3947		4.738.500.000,00	1136		322.949.150,00	750		551.520.000,00		702		458.893.151,00		93,6		83,21		1.838,00		781.842.301,00		46,57		16,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidik an	258		1.600.000.000,00	172		537.125.470,00	86		940.825.000,00		86		741.345.000,00		100		78,8		258		1.278.470.470,00		100		79,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SMP/MTs	Persenta se	100		65.746.296.640,00	96,59		56.819.878.256,00	100		22.731.848.509,00		99,12		19.545.517.862,00		99,12		85,98		195,71		76.365.396.118,00		195,71		116,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,86			75			76,86				82,79					107,72		157,79				205,3				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,66			64,8			72,66				77,06					106,06		141,86				195,24				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persenta se	100			99,69			100				99,51					99,51		199,2				199,2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	3		640.000.000,00	1		17.204.000,00	1		346.000.000,00		1		285.942.400,00		100		82,64		2		303.146.400,00		66,67		47,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	500		750.000.000,00	200		39.535.000,00	29		108.875.000,00		29		65.400.000,00		100		60,07		229		104.935.000,00		45,8		13,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	225		575.000.000,00	75		90.149.000,00	75		39.950.000,00		75		28.195.000,00		100		70,58		150		118.344.000,00		66,67		20,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1228		438.000.000,00	300		24.000.000,00	150		11.250.000,00		150		6.650.000,00		100		59,11		450		30.650.000,00		36,64		7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1228		300.000.000,00	0		0	150		58.700.000,00		125		29.232.000,00		83,33		49,8		125		29.232.000,00		10,18		9,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	141		12.016.226.640,00	47		10.939.796.333,00	35		5.398.600.000,00		35		5.398.600.000,00		100		100		82		16.338.396.333,00		58,16		135,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 1	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		2.059.575.600,00	2		1.759.254.620,00	1		575.814.080,00		1		273.807.500,00		100		47,55		3		2.033.062.120,00		100		98,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 10	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		2.116.692.600,00	2		1.831.564.851,00	1		566.718.320,00		1		390.982.420,00		100		68,99		3		2.222.547.271,00		100		105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 2	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		1.645.185.600,00	2		1.448.294.726,00	1		467.125.570,00		1		277.812.670,00		100		59,47		3		1.726.107.396,00		100		104,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 3	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		2.010.141.600,00	2		1.724.906.945,00	1		537.165.540,00		1		247.458.400,00		100		46,07		3		1.972.365.345,00		100		98,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 4	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		2.120.475.600,00	2		1.722.439.787,00	1		565.810.560,00		1		220.187.080,00		100		38,92		3		1.942.626.867,00		100		91,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 5	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		2.066.922.600,00	2		1.882.853.450,00	1		491.818.280,00		1		359.675.450,00		100		73,13		3		2.242.528.900,00		100		108,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 6	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		1.761.087.600,00	2		1.402.631.200,00	1		453.185.630,00		1		414.451.700,00		100		91,45		3		1.817.082.900,00		100		103,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 7	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		2.006.358.600,00	2		1.556.078.900,00	1		458.467.040,00		1		240.775.200,00		100		52,52		3		1.796.854.100,00		100		89,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 8	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		1.925.307.600,00	2		1.512.567.364,00	1		445.088.210,00		1		318.509.490,00		100		71,56		3		1.831.076.854,00		100		95,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 9	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidik an	3		2.059.572.600,00	2		1.599.848.552,00	1		487.705.040,00		1		352.999.870,00		100		72,38		3		1.952.848.422,00		100		94,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidik an	27		21.532.500.000,00	27		28.166.275.156,00	25		10.065.086.239,00		25		9.711.589.064,00		100		96,49		52		37.877.864.220,00		192,59		175,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	324		240.000.000,00	162		45.547.000,00	90		110.015.000,00		81		71.450.000,00		90		64,95		243		116.997.000,00		75		48,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	75		800.000.000,00	50		299.257.000,00	25		453.799.000,00		23		89.369.522,00		92		19,69		73		388.626.522,00		97,33		48,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik	27606		2.240.000.000,00	18404		491.982.490,00	8669		369.775.000,00		8.627,00		303.807.500,00		99,52		82,16		27.031,00		795.789.990,00		97,92		35,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	4315		6.443.250.000,00	1136		265.691.882,00	902		720.900.000,00		691		458.622.596,00		76,61		63,62		1.827,00		724.314.478,00		42,34		11,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persenta se	71,14	27.444.900.000,00	70,83	24.982.553.203,00	71,14	13.509.257.740,00	70,83	13.172.505.629,00	99,56	97,51	141,66	38.155.058.832,00	199,13	139,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persenta se	100		89,64		100		89,64		89,64		179,28		179,28		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik	23520	235.000.000,00	15680	4.149.141.174,00	7840	1.041.932.826,00	7.861,00	815.170.280,00	100,27	78,24	23.541,00	4.964.311.454,00	100,09	2.112,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	2436	911.600.000,00	400	246.357.290,00	150	6.400.000,00	150	6.300.000,00	100	98,44	550	252.657.290,00	22,58	27,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2436	189.300.000,00	450	41.509.500,00	200	48.725.000,00	200	26.796.000,00	100	54,99	650	68.305.500,00	26,68	36,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidik an	741	11.025.000.000,00	494	6.877.402.892,00	236	7.199.769.914,00	236	7.178.977.041,00	100	99,71	730	14.056.379.933,00	98,52	127,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidik an	663	14.859.000.000,00	442	13.608.334.527,00	225	5.121.600.000,00	225	5.076.636.200,00	100	99,12	667	18.684.970.727,00	100,6	125,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dokumen	36	225.000.000,00	24	59.807.820,00	20	90.830.000,00	20	68.626.108,00	100	75,55	44	128.433.928,00	122,22	57,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	4.817.940.000,00	33,43	10.320.522.536,00	100	2.020.174.500,00	74,91	1.909.414.066,00	74,91	94,52	108,34	12.229.936.602,00	108,34	253,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	orang	96	100.000.000,00	30	28.771.700,00	32	6.825.000,00	32	6.777.000,00	100	99,3	62	35.548.700,00	64,58	35,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	96	195.000.000,00	30	25.384.800,00	36	12.750.000,00	36	11.350.000,00	100	89,02	66	36.734.800,00	68,75	18,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidik an	270	1.958.940.000,00	180	838.112.660,00	75	988.990.000,00	73	980.360.000,00	97,33	99,13	253	1.818.472.660,00	93,7	92,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidik an	18	1.614.000.000,00	12	1.373.150.000,00	4	600.100.000,00	4	545.513.400,00	100	90,9	16	1.918.663.400,00	88,89	118,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidik an	18	200.000.000,00	12	904.672.500,00	6	47.381.500,00	6	41.589.366,00	100	87,78	18	946.261.866,00	100	473,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	2250	750.000.000,00	1144	7.150.430.876,00	750	364.128.000,00	729	323.824.300,00	97,2	88,93	1.873,00	7.474.255.176,00	83,24	996,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													103,99	91,03						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	%	100	750.000.000,00	100	140.069.450,00	100	18.580.000,00	100	16.365.000,00	100	88,08	200	156.434.450,00	200	20,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	%	100		100		100		100		100		200		200		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	%	100	300.000.000,00	100	91.787.700,00	100	15.580.000,00	100	13.365.000,00	100	85,78	200	105.152.700,00	200	35,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	6	300.000.000,00	4	91.787.700,00	2	15.580.000,00	2	13.365.000,00	100	85,78	6	105.152.700,00	100	35,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	Persenta se	100	450.000.000,00	100	48.281.750,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	100	200	51.281.750,00	200	11,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	6	450.000.000,00	4	48.281.750,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	100	100	6	51.281.750,00	100	11,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	88,08						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan ketentuan	%	100	1.500.000.000,00	90	1.090.027.010,00	100	1.101.960.000,00	85,18	938.702.662,00	85,18	62,58	175,18	2.028.729.672,00	175,18	184,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan	%	100	1.500.000.000,00	78,51	1.090.027.010,00	100	1.101.960.000,00	78,51	938.702.662,00	78,51	85,18	157,02	2.028.729.672,00	157,02	135,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	86,81		85,71		86,81		85,71		98,73		171,42		197,47		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	15	750.000.000,00	10	433.502.042,00	4	60.155.000,00	4	54.131.124,00	100	89,99	14	487.633.166,00	93,33	65,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Laporan	15	750.000.000,00	10	656.524.968,00	7	1.041.805.000,00	7	884.571.538,00	100	84,91	17	1.541.096.506,00	113,33	205,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												88,62	85,18							
Predikat Kinerja												Tinggi	Tinggi							
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan	%	100	100.000.000,00	100	10.170.000,00	100	13.000.000,00	65,38	8.500.000,00	65,38	65,38	165,38	18.670.000,00	165,38	18,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	%	100	50.000.000,00	100	7.630.000,00	100	10.000.000,00	55	5.500.000,00	55	55	155	13.130.000,00	155	26,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Dokumen	12	50.000.000,00	4	7.630.000,00	4	10.000.000,00	4	5.500.000,00	100	55	8	13.130.000,00	66,67	26,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	Persenta se	100	50.000.000,00	100	2.540.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	100	200	5.540.000,00	200	11,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	50.000.000,00	4	2.540.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	100	100	8	5.540.000,00	66,67	11,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												77,5	77,5							
Predikat Kinerja												Tinggi	Tinggi							
6	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	438.698.745.938,31	88,89	388.689.574.699,00	100	150.679.654.676,00	99,1	149.320.189.695,00	99,1	99,1	187,99	538.009.764.394,00	187,99	357,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	2.355.000.000,00	91,7	961.323.650,00	100	572.596.102,00	90,14	516.150.050,00	90,14	90,14	181,84	1.477.473.700,00	181,84	258,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21	205.000.000,00	5	29.743.250,00	5	116.814.400,00	5	113.885.000,00	100	97,49	10	143.628.250,00	47,62	70,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	75	2.150.000.000,00	25	931.580.400,00	25	455.781.702,00	22	402.265.050,00	88	88,26	47	1.333.845.450,00	62,67	62,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	100	426.943.745.938,31	97,43	382.153.876.948,00	100	147.586.736.093,00	99,31	146.569.205.736,00	99,31	99,31	196,74	528.723.082.684,00	196,74	358,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56742	425.159.606.338,31	34916	380.596.375.252,00	17458	147.332.539.593,00	17.458,00	146.339.863.778,00	100	99,33	52.374,00	526.936.239.030,00	92,3	123,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	1.784.139.600,00	10	1.557.501.696,00	4	254.196.500,00	4	229.341.958,00	100	90,22	14	1.786.843.654,00	93,33	100,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	100	555.000.000,00	100	180.843.608,00	100	6.400.000,00	100	4.350.000,00	100	67,97	200	185.193.608,00	200	2.893,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	555.000.000,00	8	180.843.608,00	4	6.400.000,00	4	4.350.000,00	100	67,97	12	185.193.608,00	100	33,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kevenangan PD Sesuai Ketentuan	%	100	105.000.000,00	100	14.475.000,00	100	11.025.000,00	100	10.050.000,00	100	91,16	200	24.525.000,00	200	222,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	105.000.000,00	4	14.475.000,00	3	11.025.000,00	3	10.050.000,00	100	91,16	7	24.525.000,00	58,33	23,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	2.190.000.000,00	100	1.494.426.240,00	100	800.140.647,00	88,34	706.842.047,00	88,34	88,34	188,34	2.201.268.287,00	188,34	275,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	225.000.000,00	8	142.379.500,00	18	452.883.000,00	18	370.121.000,00	100	81,73	26	512.500.500,00	216,67	227,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	75.000.000,00	8	33.685.600,00	6	13.537.647,00	6	13.459.000,00	100	99,42	14	47.144.600,00	116,67	62,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	240.000.000,00	4	135.075.000,00	1	25.500.000,00	1	26.764.000,00	100	104,96	5	161.839.000,00	41,67	67,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	150.000.000,00	24	4.723.500,00	12	170.687.500,00	12	159.421.400,00	100	93,4	36	164.144.900,00	100	109,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	1.500.000.000,00	24	1.178.562.640,00	12	137.532.500,00	12	137.076.647,00	100	99,67	36	1.315.639.287,00	100	87,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	5.850.000.000,00	100	3.476.776.631,00	100	1.210.007.731,00	90,56	1.095.829.242,00	90,56	90,56	190,56	4.572.605.873,00	190,56	377,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	2.250.000.000,00	24	1.799.588.045,00	12	533.232.580,00	12	446.167.244,00	100	83,67	36	2.245.755.289,00	100	99,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	3.600.000.000,00	24	1.677.188.586,00	12	676.775.151,00	12	649.661.998,00	100	95,99	36	2.326.850.584,00	100	64,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang terpelihara	%	100	700.000.000,00	100	407.852.622,00	100	492.749.103,00	91,65	417.762.620,00	91,65	84,78	191,65	825.615.242,00	191,65	167,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	156	250.000.000,00	104	235.422.537,00	52	171.249.103,00	50	121.656.755,00	96,15	71,04	154	357.079.292,00	98,72	142,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	225.000.000,00	60	76.371.085,00	20	9.000.000,00	19	8.711.000,00	95	96,79	79	85.082.085,00	87,78	37,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	225.000.000,00	1	96.059.000,00	2	312.500.000,00	2	287.394.865,00	100	91,97	3	383.453.865,00	100	170,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													94,29	87,47						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											227.282.889.144,00	95,46	216.953.359.043,00							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													87,61	78,85						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a. Sub Kegiatan yang bersumber DAK Fisik dan DAK Non Fisik masih mengalami perubahan pergeseran anggaran pada APBD menyesuaikan Juknis Kemendikbud Ristek dan Perpres
- b. Kebijakan realisasi Belanja Barang dan Jasa , Modal pada BOSDA Sub Unit dengan menggunakan aplikasi SIPLAH, sampai saat ini menunggu integrasi dengan Sistem pada Kemendikbud Ristek RI
- c. Beberapa kegiatan DAK Fisik masih proses realisasi pada aplikasi OMSPAN
- d. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Seragam Peserta Didik Tidak Mampu masih proses pemedanan data

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan : Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2020 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2020 s.d 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	172.435.790.754	100	174.724.423.763	100	217.255.041.709	100	207.456.381.478	100	95,5	200	382.180.805.241	200	221,6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	0		100	111.519.000	95	36.287.400	100	33.912.800	105,3	93,5	200	145.431.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			9	107.535.000	9	25.662.400	9	23.632.800	100	92,1	18	131.167.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			15	3.984.000	19	10.625.000	19	10.280.000	100	96,8	34	14.264.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	60.722.115.313	100	74.974.106.573	100	73.122.877.771	100	97,5	200	133.844.993.084	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan			727	60.291.425.913	803	74.912.728.773	803	73.077.149.571	100	97,5	1.530	133.368.575.484	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			1	400.274.400	1	35.240.300	1	26.550.500	100	75,3	2	426.824.900	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Laporan			13	30.415.000	13	26.137.500	13	19.177.700	100	73,4	26	49.592.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.2.1.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%			90	728.041.163	90	24.000.000	100	23.600.000	111,1	98,3	190	751.641.163	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			12	728.041.163	12	24.000.000	12	23.600.000	100	98,3	24	751.641.163	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.2.1.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			80	605.983.703	80	583.600.000	100	540.793.255	125	92,7	180	1.146.776.958	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			8	46.847.600	5	85.110.000	5	78.585.100	100	92,3	13	125.432.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Paket			4	147.946.500	3	15.000.000	3	14.153.000	100	94,4	7	162.099.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			4	3.120.000	1	3.240.000	3	3.120.000	300	96,3	7	6.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	11.404.000	12	11.250.000	12	10.737.000	100	95,4	24	22.141.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			220	201.661.050	160	250.000.000	164	247.600.003	102,5	99	384	449.261.053	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			7	195.004.553	5	219.000.000	5	186.598.152	100	85,2	12	381.602.705	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%			91	167.645.000	95	3.112.400.000	100	2.863.504.000	105,3	92	191	3.031.149.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit				5	631.500.000	5	556.520.000	100	88,1	5	556.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		8	167.645.000	161	2.480.900.000	161	2.306.984.000	100	93	169	2.474.629.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.2.1.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%		100	2.193.785.811	100	2.149.179.561	90	1.976.085.507	90	91,9	190	4.169.871.318	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		2	1.000.000	2	1.000.000	2	990.000	100	99	4	1.990.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	377.534.711	12	332.928.461	12	278.095.467	100	83,5	24	655.630.178	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.815.251.100	12	1.815.251.100	12	1.697.000.040	100	93,5	24	3.512.251.140	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%		100	955.220.000	100	880.470.000	100	773.070.102	100	87,8	200	1.728.290.102	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		135	452.921.400	130	389.171.400	135	368.112.536	103,8	94,6	270	821.033.936	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		130	227.298.600	130	216.298.600	103	131.440.443	79,2	60,8	233	358.739.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit		2	275.000.000	1	275.000.000	3	273.517.123	300	99,5	5	548.517.123	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.2.1.2.1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas / RSUD	indeks		81	122.090.000.000	85	135.494.998.175	90,32	128.122.538.043	106,3	94,6	171	250.212.538.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit		7	122.090.000.000	7	135.494.998.175	7	128.122.538.043	100	94,6	14	250.212.538.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											105,4	93,5							
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	61.525.041.283	100	80.494.881.368	100	103.618.105.812	100	92.225.646.575,00	100	89	200	172.720.527.943	200	280,7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.01.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang sesuai standar	%		100	39.117.064.149	65	42.021.528.211	100	39.496.017.506,00	153,8	94	200	78.613.081.655	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	unit		5	5.675.009.343	5	7.930.995.331	3	6.031.477.379,00	60	76	8	11.706.486.722	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit		77	15.526.622.242	45	24.197.700.000	15	24.029.284.508,00	33,3	99,3	92	39.555.906.750	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit		525	1.130.111.800	74	2.125.922.000	75	2.051.399.088,00	101,4	96,5	600	3.181.510.888	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket				5	7.766.910.880	5	7.383.856.531,00	100	95,1	5	7.383.856.531	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang terlaksana sesuai standar	%		100	38.609.075.816	100	57.530.219.041	100	50.404.011.315,00	100	87,6	200	89.013.087.131	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang		3601	253.473.435	4013	250.228.560	1559	201.391.634,00	38,8	80,5	5160	454.865.069	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		3211	23.924.000	3970	128.970.000	1336	95.009.000,00	33,7	73,7	4547	118.933.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		2961	7.360.000	3643	97.000.000	1316	53.606.000,00	36,1	55,3	4277	60.966.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		16576	33.875.000	18646	66.500.000	10036	38.100.000,00	53,8	57,3	26612	71.975.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		31833	67.065.000,00	34532	84.700.000	7623	70.910.000,00	22,1	83,7	39456	137.975.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		141474	48.780.000	159.974	40.550.000	73450	30.952.800,00	45,9	76,3	214924	79.732.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		26736	751.170.000,00	28152	776.232.000	14205	736.460.200,00	50,5	94,9	40941	1.487.630.200	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		

1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			31158	9.704.400,00	61.168	20.000.000	7775	11.357.000,00	12,7	56,8	38933	21.061.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			8647	223.342.832	8.766	299.883.620	7197	281.633.000,00	82,1	93,9	15844	504.975.832	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang			446	23.205.000	786	132.155.000	473	119.270.000,00	60,2	90,3	919	142.475.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			4968	23.175.000	4800	549.890.000	2410	407.988.000,00	50,2	74,2	7378	431.163.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang			5552	85.800.000	4500	170.887.500	4096	141.587.500,00	91	82,9	9648	227.387.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	dokumen			4	49.818.000	1	35.000.000	1	33.146.000,00	100	94,7	5	82.964.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen			8	6.915.000	8	20.950.000	8	17.350.000,00	100	82,8	16	24.265.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen			12	2.030.691.000	127	1.386.404.000	127	1.126.360.750,00	100	81,2	139	3.157.051.750	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			6	46.899.500	1	20.000.000	2	19.047.500,00	200	95,2	8	65.947.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen			9	435.943.200	64	168.812.000	64	162.141.500,00	100	96	73	598.084.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen			14	191.303.200	1	115.295.000	1	99.385.000,00	100	86,2	15	290.688.200	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen			6	4.920.000	6	15.700.000	7	15.259.000,00	116,7	97,2	13	20.179.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans kesehatan	Dokumen			16	10.400.000	54	291.720.000	54	255.245.000,00	100	87,5	70	265.645.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang			1408	21.125.000,00	1	28.500.000	0	24.000.000,00	-	84,2	1408	45.125.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			51	1.665.791.494	7	2.122.417.800	7	1.777.419.150,00	100	83,7	58	3.443.210.644	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen			1	31.569.076.300	1	37.758.676.600	1	33.368.042.800,00	100	88,4	2	64.937.119.100	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang			144	11.588.000	528	16.600.000	528	12.600.000,00	100	75,9	672	24.188.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket			0	0	1	55.358.000	1	13.135.000,00	100	23,7	1	13.135.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen			1	47.042.500	1	48.400.000	2	46.952.000,00	200	97	3	93.994.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit	Dokumen					2	11.283.626.561	2	10.041.999.224,00	100	89	2	10.041.999.224	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			56	524.263.621	6	567.729.400	6	420.764.184,00	100	74,1	62	945.027.805	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			1	42.179.000	4	85.007.000	4	64.219.198,00	100	75,5	5	106.398.198	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang sudah terakreditasi atau Re-Akreditasi	unit			1	329.370.334,00	8	390.200.000	8	291.204.875,00	100	74,6	9	620.575.209	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan			0	0	15	10.350.000	2	3.625.000,00	13,3	35	2	3.625.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen			2	5.000.000	1	20.000.000	1	17.100.000,00	100	85,5	3	22.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit			1	45.600.000	1	70.000.000	1	67.725.000,00	100	96,8	2	113.325.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang			530	5.475.000	978	21.200.000	485	17.600.000,00	49,6	83	1015	23.075.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

	.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang					8	4.625.000	200	1.275.000,00	2.500,00	27,6	200	1.275.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					31	55.985.000	31	46.285.000,00	100	82,7	31	46.285.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					221	320.666.000	221	273.865.000,00	100	85,4	221	273.865.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	%				0	100	271.000.000	100	244.327.500,00	100	90,2	100	244.327.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen				1	271.000.000	271.000.000	1	244.327.500,00	100	90,2	1	244.327.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.04.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%			100	2.768.741.403,00	100	3.795.358.560	100	2.081.290.254,00	100	54,8	200	4.850.031.657	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit			10	2.875.000	10	8.580.000	10	5.782.000,00	100	67,4	20	8.657.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit			18	2.765.866.403	9	3.671.153.560	9	1.960.797.754,00	100	53,4	27	4.726.664.157	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen				0	1	115.625.000	1	114.710.500,00	100	99,2	1	114.710.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													113,5	81,6						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
	01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	85	50.417.300	100	888.183.611	80	1.447.961.200	100	912.637.844,00	125	63	200	1.800.821.455	235,2941176	3,571,80	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.01.	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%			100	3.925.000	90	4.016.250	100	3.350.000,00	111,1	83,4	200	7.275.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			481	3.925.000	465	4.016.250	545	3.350.000,00	111,1	83,4	1.026	7.275.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.02.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Penempatan SDM Kesehatan sesuai standart	%			95	56.444.000	80	408.966.100	100	316.969.450,00	125	77,5	195	373.413.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			1	4.700.000	1	8.092.500	1	6.391.000,00	100	79	2	11.091.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasyankes)	Orang			12	30.950.000	40	104.000.000	40	98.387.300,00	100	94,6	52	129.337.300	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen			7	20.794.000	3	296.873.600	3	212.191.150,00	100	71,5	10	232.985.150	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.03.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional sesuai kompetensinya	%			95	827.814.611	80	1.034.978.850	100	592.318.394,00	125	57,2	195	1.420.133.005	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.03.2.02.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang Ditingkatkan Mutu dan kompetensinya				153	827.814.611	124	1.034.978.850	64	592.318.394,00	51,6	57,2	217	1.420.133.005	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													120,37	72,72						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sedang						
	01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Perijinan Sarana Kefarmasian, Toko Alkes, Optik, UMOT, Produksi serta Pengelolaan Makanan dan Minuman yang terlaksana sesuai standar	%	90	528.389.973	100	422.646.050	85	587.651.000	100	542.743.300,00	117,6	92,4	200	965.389.350	222,2222222	182,7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.04.2.01.	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%			100	72.440.450	90	14.450.000	100	14.165.000,00	111,1	98	200	86.605.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen			50	14.032.950	50	14.450.000	50	14.165.000,00	100	98	100	28.197.950	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

1.02.04.2.03.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	%			85	199.865.500	85	321.210.000	100	294.587.000,00	117,6	91,7	185	494.452.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen			1	199.865.500	1	321.210.000	1	294.587.000,00	100	91,7	2	494.452.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.04.2.04.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi TPM dan DAM yang diterbitkan sesuai ketentuan	%			90	6.885.000	85	5.000.000	100	4.496.000,00	117,6	89,9	190	11.381.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen			1	6.885.000	1	5.000.000	1	4.496.000,00	100	89,9	2	11.381.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.04.2.06.	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengawasan	%			95	143.455.100	85	246.991.000	100	229.495.300,00	117,6	92,9	195	372.950.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit			6	143.455.100	6	246.991.000	6	229.495.300,00	100	92,9	12	372.950.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												116,01	93,14						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Puri di Kota Probolinggo	%	65	2.554.944.248	75,8	4.241.352.530	65	4.171.094.860	87,21	3.940.125.554,00	134,2	94,5	163,01	8.181.478.084	250,7846154	320,2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.05.2.01.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan Ormas yang menerapkan kebijakan Gernas sesuai ketentuan	%			95	113.820.500	80	188.755.500	100	156.377.500,00	125	82,8	195	270.198.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (BOK)	Dokumen			3	113.820.500	6	188.755.500	6	156.377.500,00	100	82,8	9	270.198.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.05.2.02.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan GERMAS yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%			95	85.511.000	80	58.000.000	100	55.200.000,00	125	95,2	195	140.711.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen			72	85.511.000	72	58.000.000	72	55.200.000,00	100	95,2	144	140.711.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.05.2.03.	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang aktif	%			100	4.042.021.030	65	3.924.339.360	100	3.728.548.054,00	153,8	95	200	7.770.569.084	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen			30	4.042.021.030	28	3.924.339.360,00	28	3.728.548.054,00	100	95	58	7.770.569.084	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												134,62	91,01						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									327.079.854.581		304.865.957.251								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												117,96	86,41						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
b.

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RPKD tahun lalu (2020 s.d 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan	01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	80	1.507.457.600	84	1.606.116.715	85	55.192.346.894	85	52.940.499.420	100,00	96,27					DPUPRPKP	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	km			1	1.569.732.635	12	2.843.218.000	10	2.737.277.831	83,33	96,27					DPUPRPKP	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km			0,75	617.115.490	0,75	2.130.240.000	0,75	2.047.904.295	100,00	96,13					DPUPRPKP	
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	lembaga					20	50.142.000	16	46.125.054	80,00	91,99					DPUPRPKP	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	km					5	583.786.000	5,2	564.968.482	104,00	96,78					DPUPRPKP	
	1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI					16	79.050.000	16	78.280.000	100,00	99,03					DPUPRPKP	
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)												83,33	96,27						
	Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi						
	01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Jaringan SPAM Perpipaan	%	67,34	115.798.000	73,00	1.722.831.760	15	1.003.275.000	15	995.410.108	100,00	99,22					DPUPRPKP	
	1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi baik	%			130	1.722.831.760	15	1.003.275.000	15	995.410.108	100,00	99,22					DPUPRPKP	
	1.03.03.2.01.03	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	liter/detik			130	357.238.100	275	180.400.000	275	179.244.000	100,00	99,36					DPUPRPKP	
	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit			200	142.950.660	140	112.184.000	117	109.161.108	83,57	97,31					DPUPRPKP	
	1.03.03.2.01.07	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Tertentu	SR			377	1.222.643.000	150	710.691.000	151	707.005.000	100,67	99,48					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	99,22							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Layanan Air Limbah Domestik	%	93,49	6.615.496.000	98,29	1.240.015.160	100	1.723.500.000	100	1.714.213.108	100,00	99,46					DPUPRPKP	
	1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara	Unit			8	1.240.015.160	14	1.723.500.000	14	1.714.213.108	100,00	99,46					DPUPRPKP	
	1.03.05.2.01.05	Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	m3/hari					5	152.584.000	5	147.443.108	100,00	96,63					DPUPRPKP	
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit			1	306.219.000	13	111.000.000	13	110.945.000	100,00	99,95					DPUPRPKP	
	1.03.05.2.01.12	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	rumah tangga					164	1.459.916.000	167	1.455.825.000	101,83	99,72					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	99,46							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Mantap	%	79	319.093.000	81	5.686.414.121	82	1.538.543.193	82	1.515.430.949	99,88	98,50					DPUPRPKP	
	1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pematasan / Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	m			2	5.686.414.121	7.000	1.538.543.193	7.010	1.515.430.949	100,14	98,50					DPUPRPKP	
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m			100	4.581.148.573	0	879.161.693	0	878.811.691	0,00	99,96					DPUPRPKP	
	1.03.06.2.01.09	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m			800	1.105.265.548	7.000	659.381.500	7.010	636.619.258	100,14	96,55					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,14	98,50							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

1.3.2008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Fasilitas Umum Sesuai Standar Jasa Konstruksi	%	87	57.086.164.000	79	48.358.659.273	90	28.757.909.646	90	27.141.373.919	99,44	94,38					DPUPRPKP	
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	bangunan			8	48.358.659.273	11	28.757.909.646	11	27.141.373.919	100,00	94,38					DPUPRPKP	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen			78	125.779.800	240	108.180.000	412	106.760.000	171,67	98,69					DPUPRPKP	
1.03.08.2.01.02	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			6	44.252.756.486	10	27.032.687.381	10	25.475.163.919	100,00	94,24					DPUPRPKP	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	unit			9	3.980.122.987	8	1.617.042.265	8	1.559.450.000	100,00	96,44					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	94,38						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.3.2009	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase IMB yang Terealisasi Tepat Waktu	%	82	218.477.500	74	654.211.373	85	188.839.000	85	186.898.449	100,00	98,97					DPUPRPKP	
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IMB yang Terealisasi Tepat Waktu	%			74	654.211.373	85	188.839.000	85	186.898.449	100,00	98,97					DPUPRPKP	
1.03.09.2.01.03	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			3	654.211.373	1	188.839.000	1	186.898.449	100,00	98,97					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	98,97						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	79	10.519.471.000	81	19.821.401.185	82	7.321.711.489	82,00	7.274.234.639	100,00	99,35					DPUPRPKP	
1.03.10.2.01.09	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun dan terpelihara dengan Baik	km			18	19.821.401.185	20,41	7.321.711.489	20,10	7.274.234.639	98,48	99,35					DPUPRPKP	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	km			1	8.746.703.693	1	2.683.622.424	1	2.644.617.158	100,00	98,55					DPUPRPKP	
1.03.10.2.01.12	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	km			18	8.630.864.945	20,41	2.056.839.065	20,10	2.051.843.098	98,48	99,76					DPUPRPKP	
1.03.11.2.04.03	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	m			1	99.523.787	10	50.000.000	10	49.975.000	100,00	99,95					DPUPRPKP	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	m			1	98.361.540	15	2.531.250.000	15	2.527.799.383	100,00	99,86					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												98,48	99,35						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.03.12.2.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang terselesaikan Tepat Waktu	%	87	100.000.000			85	2.450.000	0	0	0,00	0,00					DPUPRPKP	
1.03.12.2.04.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Ketentuan	%					85	2.450.000	0	0	0,00	0,00					DPUPRPKP	
01.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	dokumen					60	2.450.000	0	0	0,00	0,00					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0,00	0,00						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.4.2002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	82	304.160.000	84	178.674.080	100	149.942.000	100	122.030.054	100,00	81,38					DPUPRPKP	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana tata Ruang yang Disusun sesuai Ketentuan	dokumen			5	147.374.080	0	120.042.000	0	97.930.054	0,00	81,58					DPUPRPKP	
1.3.10.2.01.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW kabupaten/kota	dokumen			5	147.374.080	0	120.042.000	0	97.930.054	0,00	81,58					DPUPRPKP	
1.03.10.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan tata ruang yang difasilitasi melalui TKPRD	%			84	31.300.000	100	29.900.000	100	24.100.000	100,00	80,60					DPUPRPKP	
1.03.10.2.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	dokumen			1	31.300.000	4	29.900.000	4	24.100.000	100,00	80,60					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50,00	81,09						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Tinggi						
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	%	80	6.531.384.892	80	12.067.900.438	100	11.662.958.566	100	11.253.630.363	100,00	96,49					DPUPRPKP	
1.3.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%					100	8.940.233.392	100	8.639.342.467	100,00	96,63					DPUPRPKP	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln			100	8.391.211.596	888	8.548.366.652	888	8.278.010.115	100,00	96,84					DPUPRPKP	

	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan PenataUsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen				80	672.457.450	12	391.866.740	12	361.332.352	100,00	92,21							DPUPRPKP	
	1.3.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi PD sesuai Ketentuan	%				80	1.529.457.676	100	1.437.532.774	100	1.364.852.412	100,00	94,94							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket				4	42.765.500	4	34.016.000	4	31.176.750	100,00	91,65							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket				4	149.185.000	12	123.214.800	12	117.445.000	100,00	95,32							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket				12	267.646.122	12	303.730.574	12	285.965.357	100,00	94,15							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket				4	144.792.850	12	172.660.000	12	171.433.900	100,00	99,29							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen				12	1.650.000	12	3.900.000	12	2.900.000	100,00	74,36							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket				12	114.913.100	12	109.903.500	12	108.891.400	100,00	99,08							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan				12	130.011.900	4	99.011.900	4	74.416.025	100,00	75,16							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan				12	460.491.982	12	480.061.000	12	478.911.223	100,00	99,76							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen				12	96.605.622	12	111.035.000	12	93.712.757	100,00	84,40							DPUPRPKP	
	1.3.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%				80	565.584.313	100	657.413.500	100	639.971.794	100,00	97,35							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan				12	358.630.843	12	348.030.000	12	341.970.416	100,00	98,26							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan				12	104.146.320	1	309.383.500	1	298.001.378	100,00	96,32							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terpenuhi	%				80	793.119.163	100	627.778.900	100	609.463.690	100,00	97,08							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit				1	14.269.500	1	16.500.000	1	8.804.885	100,00	53,36							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit				23	286.225.300	37	265.948.900	37	260.709.400	100,00	98,03							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit				89	232.034.700	80	216.780.000	80	216.033.750	100,00	99,66							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit				2	155.898.663	1	44.650.000	1	44.650.000	100,00	100,00							DPUPRPKP	
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit				2	50.000.000	3	83.900.000	3	79.265.655	100,00	94,48							DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100,00	96,50								
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									55.312.388.894		53.038.429.474												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														83,20	86,37								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Tinggi	Tinggi								

Faktor Penghambat :

- a.
b.

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		900,00%		10		1100,00%		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										3.750.005.876	0	3.441.209.332		0,92						
	1.04.02.2.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ijin Site Plan yang terselesaikan Tepat Waktu	%					85	1.531.704.000	85	1.298.309.628	100,00	84,76	85	1.298.309.628	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	1.04.02.2.05.01	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan fasilitas Rehabilitasi atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%					100	225.000.000	0	33.400.000	0,00	14,84	0	33.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	1.04.02.2.06.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit/rumah					5	225.000.000	0	33.400.000	0,00	14,84	0	33.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	1.04.02.2.06.03	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Fasilitas Rumah susun Dalam Kondisi baik	%					90	1.258.504.000	90	1.216.854.628	100,00	96,69	90	1.216.854.628	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	

	01.04.05	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan						12	1.258.504.000	12	1.216.854.628	100,00	96,69	12	1.216.854.628	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	1.4.5.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Persentase Ijin Site Plan yang sesuai Ketentuan	%						85	48.200.000	85	48.055.000	100,00	99,70	85	48.055.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	1.04.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan						20	48.200.000	20	48.055.000	100,00	99,70	20	48.055.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	2.10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU	%						85	501.120.000	85	489.653.104	100,00	97,71	85	489.653.104	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	2.10.2002	URUSAN Penyelenggaraan PSU PERUMAHAN	Persentase PSU Perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota	%						85	501.120.000	85	489.653.104	100,00	97,71	85	489.653.104	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	2.10.02.2.01.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	PSU						100	501.120.000	100	489.653.104	100,00	97,71	100	489.653.104	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
	1.3.2007	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Mantap	%		75	45.000.000	0		85	1.717.181.876	85	1.653.246.600	100,00	96,28					DPUPRPKP	
	1.03.07.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin site plan yang sesuai dengan ketentuan	%						100	176.400.000	100	150.240.000	100,00	85,17					DPUPRPKP	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	laporan						10	176.400.000	10	150.240.000	100,00	85,17					DPUPRPKP	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	m						2.500	1.540.781.876	2.070	1.503.006.600	82,80	97,55					DPUPRPKP	
	1.03.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan						15	1.540.781.876	15	1.503.006.600	100,00	97,55					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														75,00	77,24						
Predikat Kinerja														Sedang	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.531.704.000		1.298.309.628								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														100,00	84,76						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
b.

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
b.

Urusan : Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																				
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program	%	90	8.206.847.640	80	8.319.087.926,00	90	9.027.237.197,00	90	8.837.071.986	100	98	180	17.156.159.912,00	2	2,09	Satpol PP	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	90	73.799.800	100	58.520.150,00	90	16.600.000,00	90	13.200.000	100	80	180	71.720.150,00	2	0,97	Satpol PP	
	1.05.01.2.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	14.780.000	2	6.000.000,00	2	11.400.000	2	10.600.000,00	100	93	4	16.600.000,00	2	1,12	Satpol PP	
	1.05.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	59.019.800	4	52.520.150,00	4	5.200.000	1	2.600.000	25	50	5	55.120.150,00	1,25	0,93	Satpol PP	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	6.764.775.028	100	6.845.519.733,00	100	7.657.502.150	100	7.549.386.642	100	99	200	14.394.906.375,00	2	2,13	Satpol PP	
	1.05.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang	60	6.339.889.388	100	6.274.701.551,00	60	7.245.829.284	240	7.144.847.383	400	99	60	13.419.548.934,00	1	2,12	Satpol PP	
	1.05.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	424.885.640	15	447.956.182,00	15	411.672.866	15	404.539.259	100	98	30	852.495.441,00	2	2,01	Satpol PP	
	1.05.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	80	18.825.000	80	12.352.100,00	80	19.642.250	80	19.250.000,00	100	98	160	31.602.100,00	2	1,68	Satpol PP	
	1.05.01.2.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	235	18.825.000	60	12.352.100,00	235	19.642.250	60	19.250.000,00	26	98	295	31.602.100,00	1,26	1,68	Satpol PP	
	1.05.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	80	360.859.100	100	555.072.898,00	80	323.214.500	80	308.456.180	100	95	160	863.529.078,00	2	2,39	Satpol PP	
	1.05.01.2.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	108.032.100	12	371.150.050,00	12	116.310.000	12	104.049.995	100	89	92	475.200.045,00	7,67	4,4	Satpol PP	
	1.05.01.2.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	37.402.000	10	22.466.300,00	12	42.024.500	12	41.943.000	100	100	24	64.409.300,00	2	1,72	Satpol PP	

	1.05.01.2.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	15.425.000	12	13.090.000,00	10	16.075.000	10	15.902.000	100	99	20	28.992.000,00	2	1,88	Satpol PP	
	1.05.01.2.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	3.600.000,00	12	2.400.000	12	2.250.000	100	94	24	5.850.000,00	2	3,25	Satpol PP	
	1.05.01.2.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	42.000.000	12	8.990.000,00	15	24.500.000	15	24.345.000	100	99	30	33.335.000,00	2	0,79	Satpol PP	
	1.05.01.2.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	156.200.000	65	135.776.548,00	65	121.905.000	65	119.966.185	100	98	130	255.742.733,00	2	1,64	Satpol PP	
	1.05.01.2.05	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%	80	311.308.800	100	168.983.203,00	80	336.453.196	80	306.382.428	100	91	160	475.365.631,00	2	1,53	Satpol PP	
	1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.180.000	12	100.067.603,00	12	230.700.000	12	200.919.928	100	87	24	300.987.531,00	2	1,67	Satpol PP	
	1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	131.128.800	12	68.915.600,00	12	105.753.196	12	105.462.500	100	100	24	174.378.100,00	2	1,33	Satpol PP	
	1.05.01.2.06	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	80	677.279.912	100	678.639.842,00	80	673.825.101	80	640.396.736	100	95	160	1.319.036.578,00	2	1,95	Satpol PP	
	1.05.01.2.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	448.514.412	25	506.916.592,00	36	344.852.681	24	316.339.726	67	92	60	823.256.318,00	1,67	1,84	Satpol PP	
	1.05.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	29.437.500	50	83.993.250,00	72	79.737.500	72	76.400.210	100	96	144	160.393.460,00	2	5,45	Satpol PP	
	1.05.01.2.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	199.328.000	1	87.730.000,00	3	249.234.920	3	247.656.800	100	99	6	335.386.800,00	2	1,68	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	92,94							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	1.05.02	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	7.253.391.628	100	7.057.454.179	100	6.508.524.129	100	6.161.841.833	100	95	200	13.219.296.012	2	1,82	Satpol PP	
	1.05.02.2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	4.729.338.728	100	4.197.923.350	100	4.645.461.529	100	4.579.526.503	100	99	200	8.777.449.853	2	1,86	Satpol PP	
	1.05.02.2.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	kasus	1369	1.269.718.000	1369	463.015.000	1369	1.256.218.000	1711	1.222.389.500	125	97	3080	1.685.404.500	2,25	1,33	Satpol PP	
	1.05.02.2.01	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus	203	3.176.615.440	203	3.457.503.700	203	3.146.603.051	301	3.115.213.725	148	99	504	6.572.717.425	2,48	2,07	Satpol PP	
	1.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	36.425.900	12	35.430.960	12	28.151.000	12	27.851.000	100	99	24	63.281.960	2	1,74	Satpol PP	
	1.05.02.2.01	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	32.242.200	12	76.250.000	12	32.742.200	12	32.330.000	100	99	24	108.580.000	2	3,37	Satpol PP	
	1.05.02.2.01	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dokumen	12	187.734.188	221	149.493.690	12	181.747.278	12	181.742.278	100	100	24	331.235.968	2	1,76	Satpol PP	
	1.05.02.2.01	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	26.603.000	12	16.230.000	12	26.603.000	0	0	0	0	12	16.230.000	1	0,61	Satpol PP	
	1.05.02.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan Perda dan perkada yang terselesaikan	%	80	2.524.052.900	80	2.859.530.829	80	1.863.062.600	80	1.582.315.330	100	85	160	4.441.846.159	2	1,76	Satpol PP	
	1.05.02.2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	12	1.077.900.000	12	1.615.093.560	12	501.890.860	12	484.325.000	100	97	24	2.099.418.560	2	1,95	Satpol PP	
	1.05.02.2.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	1.446.152.900	11	1.244.437.269	12	1.446.152.900	12	1.097.990.330	100	76	24	2.342.427.599	2	1,62	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	91,76							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	%	100	636.107.120	100	615.100.250	100	602.106.863	100	578.816.501	100	96	200	1.193.916.751	2	1,88	Satpol PP	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani	%	100	524.057.120	100	504.450.250	100	490.056.863	100	468.776.501	100	96	200	973.226.751	2	1,86	Satpol PP	

1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	5		492.057.120	5		472.550.250	5		454.056.863	5		433.201.501	100	95	10	905.751.751	2	1,84	Satpol PP	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	105		12.000.000	105		19.675.000	105		16.000.000	117		15.925.000	111	100	222	35.600.000	2,11	2,97	Satpol PP	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	177		20.000.000	177		12.225.000	177		20.000.000	189		19.650.000	107	98	366	31.875.000	2,07	1,59	Satpol PP	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang ditangani	%	100		4.000.000	100		9.950.000	100		10.000.000	100		9.850.000,00	100	99	200	19.800.000	2	4,95	Satpol PP	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		109	109	4.000.000	109		9.950.000	109		10.000.000	100		9.850.000,00	92	99		19.800.000	0	4,95	Satpol PP	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase penanganan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penangulangan kebakaran setiap tahunnya	%	100		108.050.000	100		100.700.000	100		102.050.000	100		100.190.000	100	98		200.890.000	0	1,86	Satpol PP	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	300		108.050.000	300		100.700.000	300		102.050.000	100		100.190.000	33	98		200.890.000	0	1,86	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00	97,44						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												16.137.868.189		15.577.730.320									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																100,00	94,05						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

a.

b.

Faktor Pendukung :

a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b.

Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana dan Kebakaran)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					0,63	4.036.262.343	0,43	3.904.309.139	68,25	96,73
	01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	14.154.950.368	80	3.017.597.643	80	2.909.226.439	100	96,41
	1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			80	4.135.000	80	3.900.000	100	94,32
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			2	2.067.500	2	2.027.500	100	98,07
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	2.067.500	1	1.872.500	100	90,57
	1.5.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%			80	2.439.935.969	80	2.369.824.348	100	97,13
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			18	2.292.839.874	18	2.223.294.872	100	96,97
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	143.569.595	12	143.052.476	100	99,64
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			2	3.526.500	2	3.477.000	100	98,6
	1.5.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			80	274.109.174	80	269.499.854	100	98,32
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			12	49.115.050	12	47.523.200	100	96,76
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12	20.193.484	12	18.393.500	100	91,09
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			12	0	0	0	-	#DIV/0!
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	175.370.640	12	174.985.462	100	99,78

1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					12	29.430.000	12	28.597.692	100	97,17	12	28.597.692	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%					80	25.000.000	80	24.612.792	100	98,45	80	24.612.792	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	25.000.000	1	24.612.792	100	98,45	1	24.612.792	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%					80	75.710.000	80	73.179.140	100	96,66	80	73.179.140	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	75.710.000	12	73.179.140	100	96,66	12	73.179.140	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%					80	198.707.500	80	168.210.305	100	84,65	80	168.210.305	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	28.120.000	1	27.873.850	100	99,12	1	27.873.850	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					10	103.439.500	10	79.125.656	100	76,49	10	79.125.656	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					42	46.970.000	42	41.292.959	100	87,91	42	41.292.959	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	20.178.000	1	19.917.840	100	98,71	1	19.917.840	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	94,92		0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1.5.2003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	%	90	2.278.615.527	90		90	1.018.664.700	90	995.082.700	100	97,69	180	995.082.700	200	43.67049589	BPBD	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%					100	21.853.000	100	21.472.000	100	98,26	100	21.472.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang					60	21.853.000	60	21.472.000	100	98,26	60	21.472.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%					100	268.558.800	100	265.432.300	100	98,84	100	265.432.300	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan					2	69.819.300	2	67.334.300	100	96,44	2	67.334.300	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang					29	129.100.000	29	129.100.000	100	100	29	129.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang					200	31.250.000	200	30.665.000	100	98,13	200	30.665.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Pelugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit					1	12.600.000	1	12.600.000	100	100	1	12.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang					200	17.419.500	200	17.385.000	100	99,8	200	17.385.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan					12	8.370.000	12	8.348.000	100	99,74	12	8.348.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.5.3.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	%					100	45.890.000	100	44.701.000	100	97,41	100	44.701.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen					1	45.890.000	1	44.701.000	100	97,41	1	44.701.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tepat waktu	%					100	682.362.900	100	663.477.400	100	97,23	100	663.477.400	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen					1	22.151.900	1	21.205.600	100	95,73	1	21.205.600	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan					12	39.361.000	12	26.821.800	100	68,14	12	26.821.800	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	

1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana JTUPASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang						100	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD		
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga						12	620.850.000	12	615.450.000	100	99,13	12	615.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	97,93		0					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		0					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.036.262.343		3.904.309.139				3904309139					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	96,43		0					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		0					

Faktor Penghambat :

- a.
- b.
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Sosial

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1																				
	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	%			100	5.714.759.308	100	5.891.809.129	100	5.739.254.151	100	97	200	11.454.013.459	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Minimal 80%	%			100	54.245.880	100	36.170.000	100	34.720.590	100	96	200	88.966.470	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			5	4.364.800	5	8.750.000	5	7.845.000	100	90	10	12.209.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			4	49.881.080	4	27.420.000	4	26.875.590	100	98	8	76.756.670	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	4.748.818.575	100	4.944.376.479	100	4.820.495.750	100	97	200	9.569.314.325	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln			42	4.587.713.895	36	4.905.558.979	36	4.783.586.412	100	98	78	9.371.300.307	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			3	68.512.680	17	38.817.500	17	36.909.338	100	95	20	105.422.018	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	1.109.800	100	510.000	100	510.000	100	100	200	1.619.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			1	1.109.800	1	510.000	1	510.000	100	100	2	1.619.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			100	260.831.012	100	230.405.250	100	229.455.217	100	100	200	490.286.229	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			4	29.610.100	4	29.559.000	4	29.551.000	100	100	8	59.161.100	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			4	8.215.000	4	8.460.000	4	8.394.500	100	99	8	16.609.500	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen			12	1.950.000	12	1.560.000	12	1.560.000	100	100	24	3.510.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			6	10.000.000	6	9.000.000	6	8.998.000	100	100	12	18.998.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			24	159.382.200	24	131.796.250	24	131.246.188	100	100	48	290.628.388	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			12	42.642.212	12	50.030.000	12	49.705.529	100	99	24	92.347.741	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	%			100	40.060.000	100	35.550.000	100	35.335.000	100	99	200	75.395.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					5	20.250.000	5	20.250.000	100	100	5	20.250.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			7	40.060.000	10	15.300.000	10	15.085.000	100	99	17	55.145.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	%			100	137.567.941	100	366.439.380	100	356.636.784	100	97	200	494.204.725	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	

1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			4	2.851.000	4	1.000.000	4	1.000.000	100	100	8	3.851.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	100.886.941	12	122.572.500	12	116.404.225	100	95	24	217.291.166	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			1	21.830.000	1	15.555.000	1	15.536.000	100	100	2	37.366.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	12.000.000	12	227.311.880	12	223.696.559	100	98	24	235.696.559	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			100	268.206.465	100	278.358.020	100	262.100.810	100	94	200	530.307.275	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			1	32.066.064	1	34.475.600	1	32.113.559	100	93	2	64.179.623	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			29	116.310.801	26	118.402.920	26	105.180.414	100	89	55	221.491.215	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			2	6.900.000	30	10.000.000	30	10.000.000	100	100	32	16.900.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			82	48.575.000	82	41.493.500	82	41.358.037	100	100	164	89.933.037	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4	64.354.600	4	73.986.000	4	73.448.800	100	99	8	137.803.400	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	98,00						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.6.2002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	80	92.772.928	80	76.800.180	80	52.264.600	80	50.825.000	100	97	160	127.625.180	200	137,57	Dinas Sosial P3A	
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	persen			80	76.800.180	80	52.264.600	80	50.825.000	100	97	160	127.625.180	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang			29	7.715.100	29	4.121.000	29	4.120.900	100	100	58	11.836.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang			5	64.730.080	5	43.243.600	5	41.859.100	100	97	10	106.589.180	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga			13	2.855.000	14	3.400.000	14	3.360.000	100	99	27	6.215.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat			5	1.500.000	1	1.500.000	1	1.485.000	100	99	6	2.985.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	97,00						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.6.2004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	persen	85	1.037.201.332	85	885.422.865	85	1.273.095.214	85	1.197.686.684	100	94	170	2.083.109.549	200	200,84	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen			80	776.568.200	80	1.045.673.114	80	1.002.011.120	100	96	160	1.778.579.320	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			140	717.253.700	99	750.748.114	99	727.753.000	100	97	239	1.445.006.700	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.01.03	Penyedian Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			28	59.314.500	10	37.325.000	6	27.710.000	60	74	34	87.024.500	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang					50	192.050.000	50	181.286.670	100	94	50	181.286.670	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendaotkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/kota	Orang					5	65.550.000	5	65.261.450	100	100	5	65.261.450	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Pantli Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen			80	108.854.665	80	227.422.100	80	195.675.564	100	86	160	304.530.229	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			80	21.477.800	300	18.550.000	300	16.745.000	100	90	380	38.222.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			100	87.376.865	100	78.447.100	100	73.585.484	100	94	200	160.962.349	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
1.06.04.2.02.05	Penyedian Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					14	107.400.000	8	86.464.000	57	81	8	86.464.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	

	1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					25	4.350.000	25	4.243.580	100	98	25	4.243.580	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					20	4.550.000	20	4.529.650	100	100	20	4.529.650	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					20	6.250.000	20	3.707.000	100	59	20	3.707.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen					2	7.875.000	2	6.400.850	100	81	2	6.400.850	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	91,00						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
	1.6.2005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	40	408.200.882	30	5.322.704.210	30	7.341.173.300	30	6.420.894.217	100	87	60	11.743.598.427	150	2.876,92	Dinas Sosial P3A	
	1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	persen			50	5.322.704.210	50	7.341.173.300	50	6.420.894.217	100	87	100	11.743.598.427	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	Orang			5977	321.790.360	800	328.108.200	1804	322.586.988	226	98	7781	644.377.348	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga			1691	4.925.303.870	2200	6.942.355.400	6503	6.036.284.475	296	87	8194	10.961.588.345	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			117	75.609.980	97	70.709.700	97	62.022.754	100	88	214	137.632.734	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	87,00						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
	1.6.2006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	persen	80	603.509.496	80	191.355.250	80	185.129.120	80	174.479.750	100	94	160	365.835.000	200	60.61793599	Dinas Sosial P3A	
	1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	persen			80	191.355.250	80	185.129.120	80	174.479.750	100	94	160	365.835.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			134	191.355.250	130	185.129.120	130	174.479.750	100	94	264	365.835.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	94,00						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	1.6.2007	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang dikelola	persen	85	99.730.897	81	95.378.480	85	135.949.000	85	134.492.054	100	99	166	229.870.534	195,2941176	230,4907916	Dinas Sosial P3A	
	1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	persen			90	95.378.480	90	135.949.000	90	134.492.054	100	99	180	229.870.534	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen			1	14.934.000	1	8.750.000	1	8.633.400	100	99	2	23.567.400	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam			70	11.618.000	8	30.400.000	8	30.233.400	100	99	78	41.851.400	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan			36	68.826.480	36	96.799.000	36	95.625.254	100	99	72	164.451.734	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	99,00						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										15.161.158.504		11.661.252.633								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	95,00						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan : Tenaga Kerja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Tenaga Kerja																		
	02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	%			100	Rp3.481.252.005	93,3	Rp3.801.433.599	226	3.405.990.122	2,42	89,6	326	6.887.242.127	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	

	2.07.03.2.01	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	%		0		576	Rp3.481.252.005	556	Rp3.801.433.599	540	3.405.990.122	97,12	89,6	1116	6.887.242.127	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang dilaksanakan	Orang		0		576	Rp3.296.312.832	544	Rp3.632.348.079	528	3.251.989.947	97,06	89,53	1104	6.548.302.779	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kali		0		9	Rp184.939.173	12	Rp169.085.520	12	154.000.175	100	91,08	21	338.939.348	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														97,12	89,60						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi						
	02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	%						89	Rp98.671.500	354,06	98.324.654	84	99,65	354	98.324.654	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
	2.07.04.2.01	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	Orang			0		875	Rp86.686.500	1.336	86.379.554	84	99,65	1336	86.379.554	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Orang			800	Rp29.494.670	850		1.315	0	164,38	0	2115	29.494.670	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang			20	Rp58.596.000	25	Rp86.686.500	21	86.379.554	84	99,65	41	144.975.554	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.04.2.03	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	%			0		80	Rp11.985.000	103	11.945.100	103	99,67	103	11.945.100	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair	Orang			125	Rp9.032.250	125	Rp11.985.000	129	11.945.100	129	99,67	254	20.977.350	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.04.2.04	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DIDAERAH KABUPATEN / KOTA					0		0	Rp0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Peserta Sosialisasi AKAN				0		Rp0	0	Rp0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														84,00	99,66	98,33	55317634,67				
Predikat Kinerja														Tinggi	Sangat Tinggi						
	02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%			100		70	Rp99.175.600	51	97.695.884	111,8	98,51	151	97.695.884	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.05.2.01	PENGSAHAAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyatan kerja	%			100	Rp45.869.500	0	Rp18.099.800	112	17.355.000	111,8	95,89	212	63.224.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah			80	Rp45.869.500	100	Rp18.099.800	112	17.355.000	111,8	95,89	192	63.224.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.05.2.02	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	%			100	Rp118.875.080	79	Rp81.075.800	79	80.340.884	410,83	99,09	179	199.215.964	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	Jumlah			9	Rp118.875.080	12	Rp81.075.800	49	80.340.884	410,83	99,09	58	199.215.964	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														261,32	97,49						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%			100		100	8.417.724.393	128	5.825.031.154	128,04	69,20	228	5.825.031.154	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			100		100	31.721.500	85	29.682.242	85,34	93,57	185	33.676.484	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen			10	Rp40.185.475	12	20.721.500	12	20.706.242	100	99,93	22	60.121.959	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen			10	Rp8.000.000	12	11.000.000	12	8.976.000	100	81,60	22	21.740.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	7.478.443.894	145	7.133.899.780	145,11	95,39	145	11.066.727.572	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	%			95,15	Rp6.509.886.115	12	7.470.864.894	246	7.126.348.280	2050,58	95,39	341	17.569.062.187	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	%			93,48	Rp95.100.900	12	5.579.000	174	5.557.000	1448,83	99,61	267	100.657.900	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trhwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan			12	Rp8.625.000	12	2.000.000	12	1.994.500	100	99,73	24	10.619.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		
	3.31.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	450.000	0	450.000	0	100,00	0	450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER		

3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan			20	Rp2.000.000	12	450.000	12	450.000	100	100,00	32	2.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	2.500.000	0	2.400.000	0	96,00	0	2.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monev dan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	Laporan			36	Rp1.700.000	12	2.500.000	12	2.400.000	100	96,00	48	4.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	186.074.319	64	180.293.910	63,69	96,89	64	293.023.290	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			9	Rp39.599.800	12	31.313.520	12	30.936.700	100	98,80	21	#REF!	#DIV/0!	#REF!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laoran			6	Rp6.646.400	12	7.000.000	12	6.972.500	100	99,61	18	16.743.900	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan			72	Rp1.820.000	12	3.120.000	12	3.120.000	100	100,00	84	7.020.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			6	Rp3.000.000	12	5.000.000	12	4.953.000	100	99,06	18	11.916.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			50	Rp82.746.245	12	118.503.299	12	114.203.299	100	96,37	62	254.769.394	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan			100	Rp2.716.800	12	3.000.000	12	2.528.000	100	84,27	112	7.772.800	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan			12	Rp6.803.109	12	18.137.500	12	17.580.411	100	96,93	24	36.710.350	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%			100	Rp194.425.000	100	164.600.000	92	158.400.000	91,78	96,23	192	429.925.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan			33	Rp194.425.000	3	164.600.000	3	158.400.000	100	96,23	36	429.925.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%					100	343.592.648	63	336.476.295	63	97,93	63	563.930.532	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	Rp50.478.736	12	78.560.000	12	72.893.665	100	92,79	24	173.934.564	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			18	Rp179.203.040	12	265.032.648	12	263.582.630	100	99,45	30	619.677.744	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	%					100	210.342.032	20	201.246.731	20	95,68	20	256.680.844	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya serta bbm	Laporan			14	Rp74.046.595	12	75.572.032	12	67.751.081	100	89,65	26	182.681.739	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Laporan			100	Rp27.370.000	12	29.770.000	12	28.900.000	100	97,08	112	66.590.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	Paket			1	Rp33.361.054	2	105.000.000	2	104.595.650	100	99,61	3	142.186.754	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNAKER	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												94,91	96,46						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									11.824.456.723		9.427.041.814								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												131,09	87,50						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
02.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen	52	246.710.312	51	317.397.280	51	153.542.000	51	151.890.554	100	98,92	102	469.287.834,00	196	190	Dinas Sosial P3A	
2.08.02.2.01.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	persen			52	42.168.500	55	41.800.000	55	41.362.500	100	98,95	107	83.531.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.02.2.01.03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangka t Daerah			60	16.311.000	35	22.650.000	35	22.450.000	100	99,12	95	38.761.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.02.2.01.07		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan			15	25.857.500	2	19.150.000	2	18.912.500	100	98,76	17	44.770.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	

	2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	persen				6	275.228.780	6	111.742.000	6,1	110.528.054	101,67	98,91	45.424,50	385.756.834,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				2	17.840.000	2	56.000.000	2	55.155.000	100	98,49	4	72.995.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi				23	257.388.780	23	55.742.000	23	55.373.054	100	99,34	46	312.761.834,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100,83	98,93						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	2.8.2003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	persen	100		79.335.227	100	139.800.000	100	224.783.000	69	198.181.025	69	88,17	169	337.981.025,00	169	426	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	persen				100	92.250.000	100	46.800.000	100	46.400.000	100	99,15	200	138.650.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				2	47.550.000	2	46.800.000	2	46.400.000	100	99,15	4	93.950.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	persen				100	60.700.000	100	148.367.000	100	123.666.525	100	83,35	200	184.366.525,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				24	24.000.000	24	62.867.000	17	62.674.904	70,83	99,69	41	86.674.904,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				26	36.700.000	25	85.500.000	26	60.991.621	104	71,34	52	97.691.621,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen				100	19.045.900	100	29.616.000	7	28.114.500	7	94,93	107	47.160.400,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang				41	19.045.900	41	29.616.000	3	28.114.500	7,32	94,93	44	47.160.400,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														69,00	92,48						
Predikat Kinerja														Sedang	Sangat Tinggi						
	02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	persen	40		18.686.396	30	250.000	30	3.500.000	30	3.495.000	100	99,86	60	3.745.000,00	150	20	Dinas Sosial P3A	
	2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	persen	30		250.000	30	250.000	30	3.500.000	30	3.495.000	100	99,86	60	3.745.000,00	200	1498	Dinas Sosial P3A	
	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1		250.000	1	250.000	1	3.500.000	1	3.495.000	100	99,86	2	3.745.000,00	200	1498	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100,00	99,86						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	2.8.2006	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	persen	90		237.677.848	80	256.856.280	90	483.949.000	90	476.499.612	100	98,46	170	733.355.892,00	189	309	Dinas Sosial P3A	
	2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	persen				70	91.982.450	70	30.970.000	70	27.105.250	100	87,52	140	119.087.700,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi				32	17.850.000	10	12.025.000	10	8.450.000	100	70,27	42	26.300.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				41	74.132.450	2	18.945.000	2	18.655.250	100	98,47	43	92.787.700,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	persen				80	164.873.830	80	452.979.000	80	449.394.362	100	99,21	160	614.268.192,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	

2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				29	27.400.000	29	28.575.000	29	28.505.500	100	99,76	58	55.905.500,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3	85.694.750	3	352.000.000	3	348.520.700	100	99,01	6	434.215.450,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				34	51.779.080	1	72.404.000	1	72.368.162	100	99,95	35	124.147.242,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	93,36							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
2.8.2007	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	persen	100	25.243.027		100	281.204.500	100	244.084.000	100	206.994.137	100	84,8	200	488.198.637,00	200	1934	Dinas Sosial P3A	
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen				100	55.295.000	100	54.700.000	100	51.337.500	100	93,85	200	106.632.500,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Orang				20	54.700.000		54.700.000	35	51.337.500	175	93,85	35	51.337.500,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen				100	154.629.500	100	149.980.000	100	116.831.637	100	77,9	200	271.461.137,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang				43	134.394.500	15	149.980.000	26	116.831.637	173,33	77,9	69	251.226.137,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen				100	71.280.000,00	100	39.404.000,00	100	38.825.000,00	100	98,53	200	110.105.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	Orang				20	39.404.000,00		39.404.000,00	70	38.825.000,00	350	98,53	70	38.825.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	90,09							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.129.358.000		674.422.168									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												93,80	94,95							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Faktor Penghambat :

- a. Terdapat perubahan ketentuan persyaratan untuk mengikuti pelatihan yang tersertifikasi

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan : Pangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (%)	%	95	17.207.740.705,00	93	12.317.164.462,00	95	13.286.891.942,00		2.734.479.418,00							
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% (%)	%	95	250.000.000,00	92	115.216.594,00	95	86.227.475,00	100	85.525.070,00	105,26	99,19	182	134.716.408,00	191,58	97,6	DKPPP
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	7	90.000.000,00	7	21.897.910,00	7	17.680.975,00	7	17.266.600,00	100	97,66	7	27.565.910,00	100	30,63	DKPPP
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	4	160.000.000,00	4	93.318.684,00	4	68.546.500,00	4	68.258.470,00	100	99,58	4	107.150.498,00	100	66,97	DKPPP
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	%	95	13.018.740.705,00	100	10.672.129.599,00	95	11.489.010.702,00	100	11.235.371.485,00	105,26	97,79	200	13.113.555.112,00	210,53	198,39	DKPPP
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan		13.106.664.765,00	83	10.336.722.291,00	88	11.317.703.702,00	87	11.064.986.721,00	98,86	97,77	83	12.744.746.076,00	#DIV/0!	97,24	DKPPP
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen		435.352.000,00	1102	321.247.408,00	600	163.807.000,00	1.178,00	162.958.764,00	196,33	99,48	1.102,00	353.496.136,00	#DIV/0!	81,2	DKPPP

	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	19	76.730.000,00	18	14.159.900,00	18	7.500.000,00	18	7.426.000,00	100	99,01	18	15.312.900,00	94,74	19,96	DKPPP		
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	%	0	-	0	-	100	10.000.000,00	100	9.879.000,00	100	98,79	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DKPPP		
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	0	-	0	-	1	10.000.000,00	1	9.879.000,00	100	98,79	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DKPPP		
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	%	95	740.000.000,00	95	394.189.832,00	95	374.036.545,00	95	373.720.689,00	100	99,92	185	441.601.958,00	194,74	198,23	DKPPP		
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	40	190.000.000,00	7	117.298.840,00	5	103.826.100,00	16	103.709.800,00	320	99,89	7	129.366.840,00	17,5	68,09	DKPPP		
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket		50.000.000,00	8	27.426.000,00	2	26.010.000,00	7	25.999.000,00	350	99,96	8	37.606.000,00	#DIV/0!	75,21	DKPPP		
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan		500.000.000,00	12	249.464.992,00	12	244.200.445,00	12	244.011.889,00	100	99,92	12	274.629.118,00	#DIV/0!	54,93	DKPPP		
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi (%)	%	95	1.000.000.000,00	95	773.165.011,00	95	732.311.007,00	100	725.110.526,00	105,26	99,02	185	923.128.243,00	194,74	184,63	DKPPP		
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan		500.000.000,00	12	314.905.731,00	12	302.915.499,00	12	300.979.958,00	100	99,36	12	392.722.929,00	#DIV/0!	78,54	DKPPP		
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan		500.000.000,00	12	458.259.280,00	12	429.395.508,00	12	424.130.568,00	100	98,77	12	530.405.314,00	#DIV/0!	106,08	DKPPP		
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	%	95	1.000.000.000,00	95	327.863.426,00	95	393.371.500,00	95	386.011.249,00	100	98,13	185	315.228.515,00	194,74	132,61	DKPPP		
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	150.000.000,00	8	84.460.461,00	1	58.770.000,00	1	58.570.094,00	100	99,66	8	92.248.961,00	800	61,5	DKPPP		
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit		300.000.000,00	56	116.500.900,00	56	192.300.000,00	56	188.727.255,00	100	98,14	56	155.372.539,00	#DIV/0!	51,79	DKPPP		
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit		350.000.000,00	55	52.149.065,00	55	71.841.500,00	55	69.276.400,00	100	96,43	55	67.607.015,00	#DIV/0!	19,32	DKPPP		
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit					3	70.460.000,00	3	69.437.500,00	100	98,55					DKPPP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													102,63	98,80							
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan Pangan	Skor	0,62	48.836.916,00	0,86	153.111.742,00	0,62	134.456.000,00	0,57	133.254.972,00	91,94	99,11	0,86	80.243.196,00	#VALUE!	#DIV/0!	DKPPP		
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat	kg/kap/t hn	177	48.836.916,00	0	-	177	87.962.000,00	193	87.275.472,00	109,04	99,22	-	12.741.144,00	-	#DIV/0!	DKPPP		
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	4	40.736.916,00	0	0	4	51.107.000,00	4	50.669.418,00	100	99,14	-	7.304.316,00	-	17,93	DKPPP		
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen			0	0	12	13.060.000,00	12	12.823.000,00	100	98,19	-	349.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	DKPPP		
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Pangan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	Dokumen			0	0	2	23.795.000,00	2	23.783.054,00	100	99,95	-	5.087.828,00	#DIV/0!	#DIV/0!	DKPPP		
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tingkat Konsumsi Energi terhadap standart konsumsi energi	% dari 2.100 kkal/kap /hari	100	8.100.000,00	88,47	66.932.552,00	80	46.494.000,00	88,33	45.979.500,00	110,41	98,89	88,47	67.502.052,00	88,47	833,36	DKPPP		
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	2100	8.100.000,00	1	66.932.552,00	1	46.494.000,00	1	45.979.500,00	100	98,89	1	67.502.052,00	0,05	833,36	DKPPP		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													109,73	99,06							
PREDIKAT KINERJA													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	6.503.692,00	100	6825000	100	18.775.000,00	100	18.775.000,00	100	100	100	6.825.000,00	100	104,94	DKPPP		
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Lokasi	5	6.503.692,00	4	6825000	5	18.775.000,00	5	18.775.000,00	100	100	4	6.825.000,00	80	104,94	DKPPP		
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	6.503.692,00	1	6825000	2	18.775.000,00	2	18.775.000,00	100	100	1	6.825.000,00	100	104,94	DKPPP		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	100,00							
PREDIKAT KINERJA													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi syarat	%	80	24.388.844,00	82,35	5923750	80	8.050.000,00	96,67	8.050.000,00	120,84	100	82,35	750.000,00	102,94	3,08	DKPPP		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok yang mendapat pengawasan keamanan pangan segar	%	8	24.388.844,00	0	0	8	8.050.000,00	8	8.050.000,00	100	100	6	750.000,00	75	3,08	DKPPP		

	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	50	24.388.844,00	0	0	1	8.050.000,00	1	8.050.000,00	100	100	-	750.000,00	-	3,08	DKPPP		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00	100,00							
PREDIKAT KINERJA													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										13.476.444.882		12.975.697.991				2734479418					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													103,09	99,47							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Faktor Penghambat :

- a. Belum semua indikator kinerja terealisasi karena proses perhitungan bersifat tahunan
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan : Pertanahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										189.112.000	0	103.758.554								
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	%	90	144.502.000	94	63.522.660	95	189.112.000	85	103.758.554	89,47	54,87	179	167.281.214	198,9	115,8	DPUPR dan KP	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi	Permasalahan			2	63.522.660	2	189.112.000	2	103.758.554	100	54,87	4	167.281.214			DPUPR dan KP	
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara			2	63.522.660	2	189.112.000	2	103.758.554	100	54,87	4	167.281.214			DPUPR dan KP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	54,87						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										xxxx		103.758.554								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	54,87						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Rendah						

Faktor Penghambat :

- a. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen			88,89	15.140.995.330	85	15.923.608.602	77,78	15.470.686.065	91,5	97,2	166,67	30.611.681.395			DLH	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen			95	104.273.010	85	105.239.500	93,75	101.990.638	110,29	96,9	188,75	206.263.648			DLH	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			8	54.145.130	8	47.602.500	8	46.655.454	100	98,01	16	100.800.584			DLH	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			13	50.127.880	14	57.637.000	14	55.335.184	100	96,01	27	105.463.064			DLH	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen			100	12.171.643.794	95	13.351.305.812	99,45	12.979.971.838	104,68	97,2	199,45	25.151.615.632			DLH	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			122	11.866.580.034	121	13.230.135.812	119	12.867.442.876	98,35	97,26	241	24.734.022.910			DLH	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	291.823.240	12	96.210.000	12	95.268.962	100	99,02	24	387.092.202			DLH	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			14	13.240.520	14	24.960.000	14	17.260.000	100	69,15	28	30.500.520			DLH	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen			100	8.200.000	0	0	0	0	0	0	100	8.200.000			DLH	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			1	8.200.000	0	0	0	0	0	0	1	8.200.000			DLH	

	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen			100	714.851.880	90	581.176.750	100,75	569.615.716	111,94	98	200,75	1.284.467.596			DLH	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			5	105.977.800	5	105.093.000	5	101.124.900	100	96,22	10	207.102.700			DLH	
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	11.364.500	2	16.730.200	2	15.079.000	100	90,13	3	26.443.500			DLH	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	23.984.900	2	24.650.000	2	22.708.250	100	92,12	4	46.693.150			DLH	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			60	524.158.480	80	380.138.000	83	379.685.815	103,75	99,88	143	903.844.295			DLH	
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			12	49.366.200	12	54.565.550	12	51.017.751	100	93,5	24	100.383.951			DLH	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen			100	185.664.000	100	43.000.000	87,5	41.450.000	87,5	96,4	187,5	227.114.000			DLH	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			22	185.664.000	8	43.000.000	7	41.450.000	87,5	96,4	29	227.114.000			DLH	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen			97,22	1.631.453.028	90	1.527.893.560	97,22	1.500.634.051	108,02	98,2	194,44	3.132.087.079			DLH	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	141.445.374	12	191.927.500	12	183.608.465	100	95,67	24	325.053.839			DLH	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			5	40.913.500	12	32.421.300	12	27.784.200	100	85,7	17	68.697.700			DLH	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			11	1.449.094.154	12	1.303.544.760	11	1.289.241.386	91,67	98,9	22	2.738.335.540			DLH	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen			100	324.909.618	100	314.992.980	100	277.023.822	100	87,9	200	601.933.440			DLH	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			12	62.218.158	10	92.427.960	10	90.703.355	100	98,13	22	152.921.513			DLH	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			10	141.365.150	35	170.939.500	35	135.528.294	100	79,28	45	276.893.444			DLH	
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			0	0	5	2.500.000	5	2.500.000	100	100	5	2.500.000			DLH	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	116.826.310	1	47.125.520	1	46.592.173	100	98,87	3	163.418.483			DLH	
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	4.500.000	3	2.000.000	3	1.700.000	100	85	4	6.200.000			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													88,92	82,10						
Predikat Kinerja													Tinggi	Tinggi						
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan atau Usaha Berijin yang Mempunyai Dokumen Lingkungan	Persen			100	370.112.700	72	39.800.000	67,15	39.012.500	93,3	98	167,147	409.125.200			DLH	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan Kajian Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Teknis	Persen			100	30.340.000	100	39.800.000	100	39.012.500	100	98	200	69.352.500			DLH	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen			1	30.340.000	1	39.800.000	1	39.012.500	100	98,02	2	69.352.500			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	98,00						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Mutu Air Dan Udara Dengan Kualitas Baik	Persen			100,94	1.032.993.795	85	1.196.019.330	89,5	1.184.995.163	105,3	99,1	190,44	2.217.988.958			DLH	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen			102,82	900.868.635	85	975.439.330	121,43	971.131.225	142,86	99,6	224,25	1.871.999.860			DLH	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen					3	28.525.000	3	28.125.000	100	98,6	3	28.125.000			DLH	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen			2	87.191.450	3	143.610.000	3	142.863.398	100	99,48	5	230.054.848			DLH	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen			581	813.677.185	370	803.304.330	402	800.142.827	108,65	99,61	983	1.613.820.012			DLH	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen			100	121.725.160	85	189.430.000	68	184.938.938	80	97,6	168	306.664.098			DLH	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan			4	86.625.160	5	154.230.000	5	150.438.938	100	97,54	9	237.064.098			DLH	
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik			4	35.100.000	1	35.200.000	1	34.500.000	100	98,01	5	69.600.000			DLH	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Wilayah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen			100	10.400.000	85	31.150.000	75	28.925.000	88,24	92,9	175	39.325.000			DLH	

	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan					1	31.150.000	1	28.925.000	100	92,86	1	28.925.000			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													103,7	96,68						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan Publik	Persen			5,66	8.625.919.769	20	5.430.342.966	5,66	5.104.357.079	28,3	94	11,32	13.730.276.848			DLH	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Pengelolaan Konservasi Kehati	Persen			100	8.625.919.769	100	5.430.342.966	100	5.104.357.079	100	94	200	13.730.276.848			DLH	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha			42	6.520.744.491	42	2.975.491.900	42	2.887.830.632	100	97,05	84	9.408.575.123			DLH	
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang			225	44.094.700	459	20.599.900	459	18.107.500	100	87,9	684	62.202.200			DLH	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit			5	247.331.976	5	491.886.816	5	329.135.740	100	66,91	10	576.467.716			DLH	
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit					1	1.882.106.150	1	1.810.728.207	100	96,21	1	1.810.728.207			DLH	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit					1	60.258.200	1	58.555.000	100	97,17	1	58.555.000			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	94						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota	Persen			100	56.944.520	80	15.534.000	80	13.814.000	100	88,9	180	70.758.520			DLH	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	Persen			100	56.944.520	90	15.534.000	90	13.814.000	100	88,9	190	70.758.520			DLH	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen			1	56.944.520	1	15.534.000	1	13.814.000	100	88,93	2	70.758.520			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	88,9						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen			100	86.993.040	80	129.470.000	80	122.469.162	100	94,6	180	209.462.202			DLH	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen			100	86.993.040	90	129.470.000	85	122.469.162	94,44	94,6	185	209.462.202			DLH	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen			1	14.078.140	1	22.025.000	1	21.430.000	100	97,3	2	35.508.140			DLH	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha					200	107.445.000	170	101.039.162	85	94,04	170	101.039.162			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													94,44	94,6						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Lingkungan	Persen			100	177.253.340	55	164.184.000	54,29	137.040.564	98,7	83,5	154,29	314.293.904			DLH	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup	Persen			100	177.253.340	55	164.184.000	54,29	137.040.564	98,71	83,5	154,29	314.293.904			DLH	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen			4	29.625.000	4	50.000.000	4	38.092.500	100	76,19	8	67.717.500			DLH	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang			300	29.825.000	320	37.544.000	513	36.824.750	160,31	98,08	813	66.649.750			DLH	

	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga					4	76.640.000	4	62.123.314	100	81,06	4	62.123.314			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													98,71	83,47						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen			100	36.095.500	65	117.150.000	58,82	117.084.900	90,5	99,9	158,82	153.180.400			DLH	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen			100	36.095.500	65	117.150.000	90	117.084.900	138,46	99,9	190	153.180.400			DLH	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas			11	36.095.500	25	117.150.000	25	117.084.900	100	99,94	36	153.180.400			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													138,46	99,9444						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup Masyarakat yang Tertangani	Persen			90	54.713.700	80	31.635.000	100	23.624.000	125	74,7	190	78.337.700			DLH	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen			100	54.713.700	90	31.635.000	83,33	23.624.000	92,59	74,7	183,33	78.337.700			DLH	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengadu an					15	12.900.000	15	11.436.000	100	88,65	15	11.436.000			DLH	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara					5	18.735.000	5	12.188.000	100	65,05	5	12.188.000			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													92,59	74,7						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sedang						
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah Yang Terlayani	Persen			64,1	7.999.554.971	80	8.550.758.445	54,29	7.664.617.798	67,9	89,6	118,39	15.664.172.769			DLH	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Dan Terolah	Persen			59,33	5.374.092.561	80	8.550.758.445	50,58	7.664.617.798	63,23	89,6	109,91	13.038.710.359			DLH	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok			4	39.460.400	5	22.261.100	5	9.400.000	100	42,23	9	48.860.400			DLH	
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen					2	10.000.000	2	9.992.500	100	99,93	2	9.992.500			DLH	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton					22550	3.105.997.800	22441,95	2.559.197.538	99,52	82,4	22441,95	2.559.197.538			DLH	
	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit					36	413.616.500	26	526.959.642	72,22	127,4	26	526.959.642			DLH	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan					4	2.430.958.000	4	2.353.042.012	100	96,79	4	2.353.042.012			DLH	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton					125	856.372.645	130,66	844.903.281	104,53	98,66	130,66	844.903.281			DLH	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton					25000	1.711.552.400	24098,76	1.361.122.825	96,4	79,53	24098,76	1.361.122.825			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													63,23	89,60						
Predikat Kinerja													Rendah	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										31.505.300.430		29.877.701.231								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													90,04	91,95						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :
a. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

b.

Faktor Pendukung :
a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b.

Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	500	23.610.688.327	100	4.194.051.931	100	4.698.953.374	100	4.297.861.031	100	91,46	200	8.491.912.962	40	35,97	Dispendukcapil	
2.12.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	0	0	100	16.546.000	100	16.590.000	100	16.495.000	100	99,43	200	33.041.000	0	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	0	0	4	8.273.000	4	8.070.000	4	8.025.000	100	99,44	8	16.298.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	5	8.273.000	4	8.520.000	4	8.470.000	100	99,41	9	16.743.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	0	0	100	3.249.319.853	95	3.774.375.171	100	3.408.664.801	105,26	90,31	200	6.657.984.654	0	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan	0	0	25	3.244.404.853	26	3.768.325.171	26	3.402.939.801	100	90,3	51	6.647.344.654	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	2	4.915.000	2	6.050.000	2	5.725.000	100	94,63	4	10.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100	4.720.000	100	4.820.000	100	4.670.000	100	96,89	200	9.390.000	0	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	4.720.000	1	4.820.000	1	4.670.000	100	96,89	2	9.390.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100	182.388.603	100	190.959.175	100	182.016.023	100	95,32	200	364.404.626	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	12	56.009.500	4	60.827.675	4	58.867.000	100	96,78	16	114.876.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	2	3.849.500	2	10.166.500	2	7.971.700	100	78,41	4	11.821.200	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	5	10.200.000	5	11.510.000	4	8.198.000	80	71,23	9	18.398.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	752	3.948.000	730	4.380.000	730	4.380.000	100	100	1482	8.328.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	2	1.788.000	12	650.000	12	650.000	100	100	14	2.438.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	24	106.593.603	24	103.425.000	24	101.949.323	100	98,57	48	208.542.926	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	0	0	100	296.400.000	100	148.000.000	100	146.015.000	100	98,66	200	442.415.000	0	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	9	296.400.000	4	130.000.000	4	128.015.000	100	98,47	13	424.415.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	1	18.000.000	1	18.000.000	100	100	1	18.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	0	0	100	275.557.824	100	456.799.228	100	439.873.144	100	96,29	200	715.430.968	0	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	8	1.050.308	10	2.000.000	9	874.144	90	43,71	17	1.924.452	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0	0	12	274.507.516	12	194.932.500	12	182.634.590	100	93,69	24	457.142.106	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	16	259.866.728	16	256.364.410	100	98,65	16	256.364.410	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	0	0	100	169.119.651	100	107.409.800	100	100.127.063	100	93,22	200	269.246.714	0	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	9	60.154.651	9	70.569.800	9	64.757.063	100	91,76	18	124.911.714	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
2.12.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	50	108.965.000	50	36.840.000	50	35.370.000	100	96,01	100	144.335.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,75	95,73	0					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0					
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	500	2.637.685.389	97,51	486.960.200	100	437.286.032	98,81	434.526.020	98,81	99,37	196,32	921.486.220	39,26	34,94	Dispendukcapil	
2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	%	0	0	126,71	486.960.200	100	437.286.032	121,16	434.526.020	121,16	99,37	247,87	921.486.220	0	#DIV/0!	Dispendukcapil	

	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	0		51778	329.710.000	40000	309.800.000	49235	307.847.000	123,09	99,37	101013	637.557.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	0		3976	157.250.200	4000	127.486.032	4076	126.679.020	101,9	99,37	8052	283.929.220	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													121,16	99,37	0							
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0							
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	490	1.232.216.978	103,16	270.241.190	100	264.327.000	98,7	259.265.224	98,7	98,09	201,86	529.506.414	41,2	42,97	Dispendukcapil			
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	%	0		104,76	270.241.190	100	259.452.000	106,48	254.390.224	106,48	98,05	211,24	524.631.414	0	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	0		3977	28.938.000	3500	46.050.000	3864	44.557.000	110,4	96,76	7841	73.495.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	0		5273	241.303.190	5000	213.402.000	5602	209.833.224	112,04	98,33	10875	451.136.414	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil melalui pelayanan keliling yang terfasilitasi	%	0		0	0	100	4.875.000	100	4.875.000	100	100	100	4.875.000	0	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.03.2.02.06	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatn Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatn Sipil	Laporan	0		0	0	29	4.875.000	29	4.875.000	100	100	29	4.875.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													103,24	99,02	0							
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0							
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%	500	1.553.919.682	87,13	246.393.480	100	196.370.000	100	193.914.704	100	98,75	187,13	440.308.184	37,43	28,34	Dispendukcapil			
			Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	%	0		100	0	100	0	100	0	100	0	200	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase laporan dan penyajian data yang tepat waktu	%	0		99,13	67.972.580	100	39.320.000	100	38.874.704	100	98,87	199,13	106.847.284	0	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	0		70	24.896.580	40	37.320.000	40	36.924.704	100	98,94	110	61.821.284	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	0		12	43.076.000	12	2.000.000	12	1.950.000	100	97,5	24	45.026.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan	%	0		100	178.420.900	100	155.850.000	100	153.840.000	100	98,71	200	332.260.900	0	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0		4	178.420.900	4	145.050.000	4	143.640.000	100	99,03	8	322.060.900	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0		0	0	1	10.800.000	1	10.200.000	100	94,44	1	10.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi Bimtek	%	0		0	0	100	1.200.000	100	1.200.000	100	100	100	1.200.000	0	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	0		0	0	1	1.200.000	1	1.200.000	100	100	1	1.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	99,19	0							
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0							
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	300	137.725.336	100	49.525.000	100	33.000.000	100	31.800.000	100	96,36	200	81.325.000	66,67	59,05	Dispendukcapil			
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan data profil kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	0		100	49.525.000	100	33.000.000	100	31.800.000	100	96,36	200	81.325.000	0	#DIV/0!	Dispendukcapil			
	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	0		2	49.525.000	2	33.000.000	2	31.800.000	100	96,36	4	81.325.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukcapil			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	96,36								
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.629.936.406		5.217.366.979										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													105,03	97,94								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11				12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	97.917.297	90	1.367.550	90	768.600.000	90	754.833.700,00	100	98,21	180	756.201.250	200	772	Dinas Sosial P3A			
	2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen			90	1.367.550	90	768.600.000	90	754.833.700,00	100	98,21	180	756.201.250	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Dokumen			0	0	1	19.800.000	1	18.942.500,00	100	95,67	1	18.942.500	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga			0	0	4	697.800.000	4	686.066.350,00	100	98,32	4	686.066.350	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan			1	1.367.550	1	45.000.000	1	43.825.050,00	100	97,39	2	45.192.600	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen			0	0	1	6.000.000	1	5.999.800,00	100	100	1	5.999.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	98,21								
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											974.950.000		258.628.400									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	98,21								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

Faktor Penghambat :

- a.
b.

Faktor Pendukung :

- a.
b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (PAPBD 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	80	Rp1.924.210.360	80	Rp1.778.144.222	80	Rp1.736.693.996	100	97,67	160	Rp2.895.177.778			Kecamatan Mayangan	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	Rp1.042.789.100	80	Rp1.157.084.222	80	Rp1.116.801.900	100	96,52	80	Rp1.818.734.897			Kecamatan Mayangan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunanandi Kelurahan (ATI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp4.993.500	100	99,87	4	Rp9.993.500			KELURAHAN JATI	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunanandi Kelurahan (MANGUNHARJO)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp10.000.000			KELURAHAN MANGUNHARJO	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunanandi Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp10.000.000			KELURAHAN WIROBORANG	

	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp10.000.000			KELURAHAN SUKABUMI	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp4.940.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp9.940.000			KELURAHAN MAYANGAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (JATI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	Rp -	10	Rp15.000.000	10	Rp15.000.000	100	100	10	Rp15.000.000			KELURAHAN JATI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MANGUNHARJO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	6	Rp44.425.000	10	Rp54.600.000	10	Rp50.700.000	100	92,86	16	Rp95.125.000			KELURAHAN MANGUNHARJO	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	Rp -	10	Rp27.500.000	10	Rp27.500.000	100	100	10	Rp27.500.000			KELURAHAN WIROBORANG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	8	Rp20.000.000	10	Rp38.500.000	10	Rp35.750.000	100	92,86	18	Rp55.750.000			KELURAHAN SUKABUMI	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	Rp -	10	Rp22.500.000	10	Rp22.500.000	100	100	10	Rp22.500.000			KELURAHAN MAYANGAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (JATI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	0	0	2	Rp215.190.000	2	Rp199.000.000	2	Rp197.125.000	100	99,06	4	Rp412.315.000			KELURAHAN JATI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (MANGUNHARJO)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	0	0	2	Rp169.952.000	2	Rp158.900.000	2	Rp139.999.300	100	88,11	4	Rp309.951.300			KELURAHAN MANGUNHARJO	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (WIROBORANG)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	0	0	2	Rp186.800.000	2	Rp214.500.000	2	Rp214.000.000	100	99,77	4	Rp400.800.000			KELURAHAN WIROBORANG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (SUKABUMI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	0	0	2	Rp213.147.000	2	Rp217.484.222	2	Rp209.284.100	100	96,23	4	Rp422.431.100			KELURAHAN SUKABUMI	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (MAYANGAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	0	0	2	Rp168.335.100	2	Rp184.100.000	2	Rp179.950.000	100	97,75	4	Rp348.285.100			KELURAHAN MAYANGAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	Rp881.421.260	80	Rp621.060.000	80	Rp619.892.096	100	99,81	80	Rp1.076.442.980				
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	0	0	6	Rp881.421.260	6	Rp621.060.000	6	Rp619.892.096	100	99,81	12	Rp1.501.313.356			KECAMATAN MAYANGAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	97,91						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.778.144.222		1.736.693.996								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	97,91						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
b.

Faktor Pendukung :

- a.
b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	persen	0	0	79	3.518.051.873	88	2.221.176.104	88	2.166.803.100	100	97,55	167	5.684.854.973	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	persen	0	0	95	2.035.776.980	95	823.605.104	95	822.874.600	100	99,91	190	2.858.651.580	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	0	0	10	2.035.776.980	10	823.605.104	10	822.874.600	100	99,91	20	2.858.651.580	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan	persen	0	0	100	1.482.274.893	100	1.397.571.000	100	1.343.928.500	100	96,16	200	2.826.203.393	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	0	5	38.724.850	5	30.000.000	4	30.000.000	80	100	9	68.724.850	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	0	1	65.773.000	2	15.000.000	2	15.000.000	100	100	3	80.773.000	#DIV/0!	#DIV/0!		

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		0	0	0	0	2	42.460.000	2	15.000.000	100	35,33	2	15.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		0	0	1	61.632.948	3	7.500.000	1	7.500.000	33	100	2	69.132.948	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Kulon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		0	0	1	71.067.700	3	73.726.500	3	69.240.000	100	93,91	4	140.307.700	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Curahgrinting)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		0	0	1	20.000.000	3	44.106.000	3	44.106.000	100	100	4	64.106.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas		0	0	2	215.549.600	2	195.000.000	2	193.584.000	100	99,27	4	409.133.600	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0004	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas		0	0	2	219.450.400	2	210.000.000	2	200.830.000	100	95,63	4	420.280.400	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0005	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas		0	0	2	144.232.000	2	208.605.000	2	207.705.000	100	99,57	4	351.937.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0006	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas		0	0	2	208.511.400	3	209.900.000	3	205.750.000	100	98,02	5	414.261.400	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas		0	0	3	224.284.000	3	151.273.500	3	149.473.500	100	98,81	6	373.757.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02.0008	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Curahgrinting)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas		0	0	2	213.048.995	3	210.000.000	3	205.740.000	100	97,97	5	418.788.995	#DIV/0!	#DIV/0!		
											1.163.082.500										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100,00	97,55						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.221.176.104		2.166.803.100									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														100,00	97,55						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a. Kegiatan dana Kelurahan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan masih akan direalisasikan mulai trwulan 2 serta terdapat titik lokasi yang perlu adanya pendampingan dari Kejaksaaan negeri
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan masih menunggu jadwal dari instansi terkait

Faktor Pendukung :

- a.
- b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat																		
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%			90	2.891.731.938	95	2.182.872.100	95	2.397.748.945	100	95,67	147	3.780.184.408	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi	%			90	1.534.329.120	100	832.872.100	100	803.494.954	100	98,71	140	1.708.059.390	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasya rakatan			21	1.534.329.120	21	832.872.100	21	803.494.954	100	98,71	31	1.708.059.390	#DIV/0!	#DIV/0!		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang di berdayakan	%			90	1.357.402.818	100	1.350.000.000	100	1.594.253.991	100	94,2	140	2.072.125.018	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Kademangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit			0	0	5	30.000.000	4	30.000.000	80	100	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Kademangan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit			4	71.573.098	5	59.837.500	3	46.948.392	60	78,46	4	71.573.098	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Ketapang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit			0	0	5	45.000.000	1	44.250.000	20	98,33	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Pilang	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit			2	62.701.550	5	105.750.000	3	103.382.058	60	97,76	2	62.701.550	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Pohsangit Kidul	

7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit			2	78.679.296	5	122.250.000	2	110.748.766	40	90,59	2	78.679.296	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Triwung Kidul	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit			0	0	5	4.900.000	4	4.900.000	80	100	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Triwung Lor	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kademangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas			6	176.430.200	7	195.000.000	2	283.382.400	28,57	94,46	10	280.907.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Kademangan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas			6	151.193.750	7	165.162.500	2	184.409.100	28,57	96,97	10	312.002.850	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Ketapang	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas			6	241.291.000	7	180.000.000	3	312.775.700	42,86	96,95	10	346.570.100	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Pilang	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas			6	93.190.200	7	119.250.000	2	101.449.850	28,57	87	9	176.690.050	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Pohsangit Kidul	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas			6	254.066.500	7	102.750.000	2	89.203.400	28,57	92,78	9	343.269.900	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Triwung Kidul	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas			6	228.277.200	7	220.100.000	4	282.804.325	57,14	94,55	11	399.730.650	#DIV/0!	#DIV/0!	Kelurahan Triwung Lor	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	96,45						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.182.872.100		888.452.470								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												100,00	96,45						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11			
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	100%	3.303.374.409	100%	2.274.518.948	85%	892.371.743	85	39,23	13%	4.195.746.152	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi	Lembaga	0	0	80%	1.353.374.409	80%	791.505.200	80%	783.623.993	100	99	25%	2.136.998.402	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	0	12	1.353.374.409	12	791.505.200	12	783.623.993	100	99	3	2.136.998.402	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	1.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	%	0	0	80%	1.950.000.000	80%	1.483.013.748	70%	182.419.650	87,5	12,3	60%	2.132.419.650	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Sumber Wetan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	5	10.000.000	5	23.000.000	5	22.813.400	100	99,19	3	32.813.400	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Kedopok)		LKK	0	0	5	5.078.000	5	15.000.000	4	14.308.900	80	95,39	3	19.386.900	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Lor)		LKK	0	0	5	25.000.000	5	15.000.000	3	12.739.600	60	84,93	4	37.739.600	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Wetan)		LKK	0	0	5	21.305.000	5	10.000.000	3	6.300.000	60	63	3	27.605.000	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Kareng Lor)		LKK	0	0	5	25.000.000	5	9.000.000	5	8.115.000	100	90,17	3	33.115.000	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Kulon)		LKK	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	9.395.000	100	93,95	3	19.395.000	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok		

7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Sumber Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	0	0	8	155.000.000	8	190.422.200	3	115.003.750	37,5	60,39	-	270.003.750		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedopok		Pokmas	0	0	2	154.422.000	2	262.534.000	2	188.248.980	100	71,7	-	342.670.980		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Lor)		Pokmas	0	0	6	182.970.000	6	153.850.000	2	67.500.000	33,33	43,87	-	250.470.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Wetan)		Pokmas	0	0	6	153.695.000	6	152.500.000	6	146.900.000	100	96,33	-	300.595.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kareng Lor)		Pokmas	0	0	6	127.000.000	6	192.581.500	6	144.102.750	100	74,83	-	271.102.750		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Kulon)		Pokmas	0	0	4	110.000.000	4	194.518.000	3	184.799.750	75	95	1	294.799.750		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Sumber Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	3	160.000.000	3	22.500.000	3	22.500.000	100	100		182.500.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedopok)		Unit	0	0	6	165.500.000	3	47.500.000	3	47.500.000	100	100		213.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Lor)		Unit	0	0	1	117.030.000	2	60.000.000	0	-	-	-		117.030.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Wetan)		Unit	0	0	6	150.000.000	3	64.608.048	3	57.500.000	100	89		207.500.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kareng Lor)		Unit	0	0	6	173.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	100	100		218.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Kulon)		Unit	0	0	1	205.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	100	100		220.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												93,75	55,65					
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.274.518.948		892.371.743							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												93,75	55,65					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Rendah					

- Faktor Penghambat :
- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat																		
1	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	0	95%	2.361.487.698	86,48%	2.108.256.909	91,03%	89,28%	86,48%	2.108.256.909	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	0	90%	1.659.975.698	72,93%	1.408.385.191	81,03%	84,84%	72,93%	1.408.385.191	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	LKK	0	0	0	0	30 Lembaga Kemasyarakatan	145.879.100	30	145.879.100	100,00%	100,00%	30	145.879.100	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	17 Unit	297.740.000	6	97.799.441	35%	33%	6	97799441	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	0	0	0	11 Pokmas / Ormas	1.216.356.598	11	1.164.706.650	100,00%	95,75%	11	1.164.706.650	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	%	0	0	0	0	100%	701.512.000	100,00%	699.871.718	100,00%	99,77%	100,00%	699.871.718	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	0	0	0	0	4 Lembaga Kemasyarakatan	701.512.000	4	699.871.718	100,00%	99,77%	4	699.871.718	0	0	Kecamatan Wonoasih	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													91,03	89,28						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.361.487.698		2.108.256.909								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													91,03	89,28						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi						

Fakt
or
Pen
gha
mba
t :
a.
b.

b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu	%	95	74.369.960	100	105.832.804	95	432.309.250	100	367.101.739,00	105,3	84,9	200	472.934.543	210,53	635,9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.02.2.01.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pendataan keluarga yang dilaksanakan	%			90	987.500	90	200.000.000	95	199.478.000,00	105,6	99,7	185	200.465.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen			1	987.500	1	200.000.000	1	199.478.000,00	100	99,7	2	200.465.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.02.2.02.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) yang dilaporkan	%			100	104.845.304	90	232.309.250	100	167.623.739,00	111,1	72,2	200	272.469.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen			29	600.000	29	2.500.000	39	2.496.600,00	134,5	99,9	68	3.096.600	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan					1	100.349.250	1	62.135.500,00	100	61,9	1	62.135.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan			1	17.400.000	1	69.210.000	2	63.505.000,00	200	91,8	3	80.905.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen			58	22.150.304	50	50.500.000	69	29.736.639,00	138	58,9	127	51.886.943	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit					3	9.750.000	3	9.750.000,00	100	100	3	9.750.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													108,33	85,95			#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi			#DIV/0!	#DIV/0!		
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	90	436.960.393	85	2.406.206.450	90	2.183.072.070	100	1.703.684.472,00	111,1	78	185	4.109.890.922	205,56	940,6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KIE KKBPK yang dilaksanakan	%			85	556.251.500	85	708.860.750	100	544.871.000,00	117,6	76,9	185	1.101.122.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	laporan			2	52.900.000	1	110.490.750	1	52.163.000,00	100	47,2	3	105.063.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan					1	246.600.000	2	185.733.000,00	200	75,3	2	185.733.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan					1	79.000.000	1	61.200.000,00	100	77,5	1	61.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Presentase penyuluhan Advokasi dan KIE pada remaja	Dokumen					1	132.100.000	1	128.355.000,00	100	97,2	1	128.355.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen				1		5.000.000	1		5.000.000,00	100	100	1		5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi				1		135.670.000	1		112.420.000,00	100	82,9	1		112.420.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.02.	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase penyuluhan, pergerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK oleh PKB/PLKB	85 %			85	460.808.250	85	485.923.200	100		417.919.200,00	117,6	86	185		878.727.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang			267	433.808.250	267	485.923.200	267		417.919.200,00	100	86	534		851.727.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.03.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan KB yang dilaksanakan	%			120	1.302.506.700,00	85	760.258.120,00	175		544.319.272,00	205,9	71,6	295		1.846.825.972	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan			1	26.309.531,00	1	33.946.000	1		6.155.781,00	100	18,1	2		32.465.312	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Orang			756	563.742.765	251	594.587.000	251		445.680.873,00	100	75	1007		1.009.423.638	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) danSarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen			46	21.366.870	40	43.407.120	40		39.103.618,00	100	90,1	86		60.470.488	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan			44	105.413.000	46	88.318.000	46		53.379.000,00	100	60,4	90		158.792.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%			85	86.640.000	85	228.030.000	85		196.575.000,00	100	86,2	170		283.215.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen			1	14.550.000	1	7.850.000	1		7.850.000,00	100	100	2		22.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit					1	148.780.000	1		130.765.000,00	100	87,9	1		130.765.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung			29	71.400.000		71.400.000	29		57.960.000,00	100	81,2	29		57.960.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														148,24	79,2							
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi							
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	90		370.919.078	100	1.875.805.070	90	2.335.494.000	100	2.129.614.900,00	111,1	91,2	200		4.005.419.970	222,22	1.079,90	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.04.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pendampingan	%			100	1.845.690.000	85	1.085.364.000	100		954.357.400,00	117,6	87,9	200		2.800.047.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan					1	40.000.000	1		38.800.000,00	100	97	1		38.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit					25	300.000.000	32		297.920.000,00	128	99,3	32		297.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	orang				145	64.400.000	145		33.220.000,00	100	51,6	145		33.220.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok			68	680.964.000	68	680.964.000	68		584.417.400,00	100	85,8	68		584.417.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

	2.14.04.2.02.	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan / pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%			100	30.115.070	85	1.250.130.000	100	1.175.257.500,00	117,6	94	200	1.205.372.570	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisa si			19	30.115.070	19	111.750.000	19	64.800.000,00	100	58	38	94.915.070	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan					1	531.180.000	1	503.257.500,00	100	94,7	1	503.257.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan					1	607.200.000	1	607.200.000,00	100	100	1	607.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													117,65	90,97						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									4.950.875.320		4.200.401.111									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													124,74	85,37						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Perhubungan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan Perhubungan																				
A	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90	7.770.759.404,00	94	1.524.332.499,00	98	7.683.721.943,00	93	7.506.978.744,00	95	97,7	187	9.031.311.243,00	207	116	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	90	19.600.000,00	98,75	16.885.600,00	90	14.317.900,00	90	14.317.000,00	100	99,99	189	31.202.600,00	210	159	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	16.000.000,00	6	14.105.600,00	6	12.288.300,00	6	12.288.000,00	100	100	12	26.393.600,00	200	165	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	3.600.000,00	4	2.780.000,00	7	2.029.600,00	7	2.029.000,00	100	99,97	11	4.809.000,00	275	134	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.828.047.749,00	100	5.514.532.887,00	100	5.712.792.596,00	99	5.601.990.878,00	99	98,06	199	11.116.523.765,00	199	191	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	5.494.621.249,00	528	5.333.810.827,00	531	5.665.262.596,00	528	5.554.496.770,00	99	98,04	1.056	10.888.307.597,00	1056	198	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	100	160.246.500,00	100	176.503.160,00	12	42.130.000,00	12	42.097.108,00	100	99,92	112	218.600.268,00	112	136	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	7	12.933.500,00	8	4.218.900,00	7	5.400.000,00	7	5.397.000,00	100	99,94	15	9.615.900,00	214	74	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	0	0	0	0	100	11.350.000,00	91	11.140.200,00	91	98,15	91	11.140.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0	0	0	0	2	11.350.000,00	2	11.140.200,00	100	98,15	2	11.140.200,00			Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	%	40	30.000.000,00	40	16.289.609,00	100	19.638.000,00	48	9.524.600,00	48	48,5	88	25.814.209,00	220	86	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang	50	30.000.000,00	50	16.289.609,00	6	19.638.000,00	6	9.524.600,00	100	48,5	56	25.814.209,00	112	86	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	263.047.150,00	99,17	135.707.914,00	100	491.992.000,00	100	479.756.639,00	100	97,51	199	615.464.553,00	199	234	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	100	39.608.150,00	97,47	24.626.400,00	5	111.042.000,00	5	108.082.000,00	100	97,33	102	132.708.400,00	102	335	Dinas Perhubungan	

	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	100		19.671.000,00	100	9.692.400,00	6	133.950.000,00	6	129.262.000,00	100	96,5	106	138.954.400,00	106	706	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	100		14.168.000,00	98	6.580.000,00	2	26.686.000,00	4	25.199.000,00	200	94,43	102	31.779.000,00	102	224	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Dokumen	48		5.400.000,00	36	3.600.000,00	2	3.600.000,00	4	3.600.000,00	200	100	40	7.200.000,00	83	133	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	Laporan	100		14.200.000,00	99,73	9.795.000,00	12	47.495.000,00	12	44.428.000,00	100	93,54	112	54.223.000,00	112	382	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100		170.000.000,00	99,81	81.414.114,00	12	169.219.000,00	12	169.185.639,00	100	99,98	112	250.599.753,00	112	147	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100		1.115.482.755,00	99,125	943.122.726,00	100	967.045.747,00	97	939.342.202,00	97	97,14	196	1.882.464.928,00	196	169	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	100		6.500.000,00	98,46	2.057.000,00	12	5.042.500,00	12	4.436.500,00	100	87,98	110	6.493.500,00	110	100	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	100		346.148.000,00	99,87	205.209.248,00	12	217.238.700,00	12	213.606.826,00	100	98,33	112	418.816.074,00	112	121	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	100		6.875.000,00	99	17.405.000,00	5	31.400.000,00	5	15.870.000,00	100	50,54	104	33.275.000,00	104	484	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	100		755.959.755,00	99,17	718.451.478,00	12	713.364.547,00	12	705.428.876,00	100	98,89	111	1.423.880.354,00	111	188	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100		514.581.750	99,7	412.326.650,00	100	466.585.700,00	66	450.907.225,00	66	96,64	166	863.233.875,00	166	168	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	Unit	100		45.000.000	1	30.151.399,00	1	43.534.500,00	1	43.107.734,00	100	99,02	2	73.259.133,00	2	163	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100		425.261.750	31	353.915.251,00	34	384.121.200,00	32	371.132.479,00	94	96,62	63	725.047.730,00	63	170	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100		20.220.000	17	10.405.000,00	35	21.930.000,00	33	19.749.000,00	94	90,05	50	30.154.000,00	50	149	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	100		24.100.000	4	17.855.000,00	4	17.000.000,00	4	16.918.012,00	100	99,52	8	34.773.012,00	8	144	Dinas Perhubungan	
																				Dinas Perhubungan	
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	86	91						
													Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi						
B	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan kota	%	0		52.404.000,00		34.393.580,00	22	6.025.000,00	0	5.848.750,00	0	97,07	0	40.242.330,00	#DIV/0!	77	Dinas Perhubungan	
			Prosentase pemenuhan Dokumen kajian Bidang perhubungan	%	22		100.000,00		10.234.900,00	100	10.189.500,00	100	10.189.500,00	100	100	100	20.424.400,00	452	20424	Dinas Perhubungan	
			Prosentase Sarana dan Prasarana Jalan sesuai standar kementrian Perhubungan	%	20		12.700.839.362,00		18.372.214.571,00	100	16.924.124.995,00	98	16.795.841.085,00	98	99,24	98	35.168.055.656,00	491	277	Dinas Perhubungan	
			Prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji berkala	%	99		387.892.400,00		377.050.345,00	99	518.371.500,00	99	507.434.364,00	100	97,89	99	884.484.709,00	100	228	Dinas Perhubungan	
			Prosentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	%	100		3.484.373.000,00		3.098.502.518,00	0	2.885.414.000,00	0	2.839.309.338,00	0	98,4	0	5.937.811.856,00	0	170	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	%	90		11.930.800.000,00	111,16	18.204.864.640,00	90	16.685.286.895,00	90	16.559.861.001,00	101	99,25	202	34.764.725.641,00	224	291	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	unit	1		50.000.000,00	3	206.884.053,00	1	295.022.000,00	1	291.703.776,00	100	98,88	4	498.587.829,00	400	997	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit	8		50.000.000,00	79	1.964.936.374,00	54	960.829.306,00	54	923.742.130,00	100	97,15	133	2.888.678.504,00	1663	5777	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1500		11.830.800.000,00	1268	16.033.044.213,00	1900	15.439.435.589,00	1499	15.344.415.095,00	79	99,38	2767	31.377.459.308,00	184	265	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	%	90		998.470.000,00	135,27	680.962.750,00	90	674.200.000,00	88	654.851.150,00	98	97,13	223,27	1.335.813.900,00	248	134	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	8200		998.470.000,00	12	680.962.750,00	12	674.200.000,00	12	654.851.150,00	100	97,13	24	1.335.813.900,00	0	134	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang laik jalan	%	94		387.892.400,00	55,76	377.050.345,00	94	518.371.500,00	95	507.434.364,00	101	97,89	151	884.484.709,00	160	228	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Unit	8500		66.700.000,00	8250	50.907.000,00	8970	30.700.000,00	10826	30.520.000,00	121	99,41	19076	81.427.000,00	224	122	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen	5000		125.000.000,00	0	0	8000	200.000.000,00	8000	200.000.000,00	100	100	8000	200.000.000,00	160	160	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	unit	9		46.500.000,00	9	223.025.625,00	13	171.665.000,00	13	169.031.250,00	100	98,47	22	392.056.875,00	244	843	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	8942		149.692.400,00	4600	103.117.720,00	12	116.006.500,00	12	107.883.114,00	100	93	4612	211.000.834,00	52	141	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jaringan jalan di wilayah kota	%	80		3.196.225.362,00	110,42	2.557.287.199,00	100	2.444.802.100,00	100	2.415.188.272,00	100	98,79	211	4.972.475.471,00	264	156	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	85		2.397.806.000,00	83	2.383.544.768,00	12	2.201.464.000,00	12	2.174.933.188,00	100	98,79	95	4.558.477.956,00	112	190	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan	12		28.380.000,00	10	3.995.000,00	6	4.500.000,00	8	4.275.000,00	133	95	18	8.270.000,00	150	29	Dinas Perhubungan	

	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Dokumen	70		770.039.362,00	99,05	167.349.931,00	35	238.838.100,00	35	235.980.084,00	100	98,8	134,05	403.330.015,00	192	52	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin	%	30		100.000,00	35	10.234.900,00	80	10.189.500,00	80	10.189.500,00	99	100	115	20.424.400,00	382	20424	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	0		100.000,00	14	10.234.900,00	15	10.189.500,00	15	10.189.500,00	100	100	29	20.424.400,00		20424	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	%	18,78		59.717.000,00	12,8	30.000.000,00	30	5.250.000,00	110	5.250.000,00	367	100	122,8	35.250.000,00	654	59	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Laporan	5803		59.717.000,00	2077	30.000.000,00	15	5.250.000,00	15	5.250.000,00	100	100	2092	35.250.000,00	36	59	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	%	16,67		2.500.000,00	14,88	750.000,00	15	4.450.000,00	15	4.338.750,00	100	97,5	30	5.088.750,00	179	204	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	50		2.500.000,00	40	750.000,00	3	4.450.000,00	5	4.338.750,00	167	97,5	45	5.088.750,00	90	204	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek	%	85		49.904.000,00	16	33.643.580,00	30	1.575.000,00	30	1.510.000,00	100	95,87	46	35.153.580,00	54	70	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.14.0002	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	unit	204		3.500.000,00	12	5.760.400,00	10	1.275.000,00	10	1.210.000,00	100	94,9	22	6.970.400,00	11	199	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	204		46.404.000,00	12	27.883.180,00	12	300.000,00	1	300.000,00	8	100	13	28.183.180,00	6	61	Dinas Perhubungan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														133	98						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
C	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		%				100	4.156.000,00	2	1.999.800,00	2	1.575.000		79					Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemilik kapal dibawah 7GT yang hadir dalam pembinaan keselamatan pelayaran	%	74		8.469.607,00	30	4.156.000,00	75	1.999.800,00	75	1.575.000	100	79	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten /kota	Laporan	52		8.469.607,00	30	4.156.000,00	1	1.999.800,00	1	1.575.000	100	79	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100,00	78,76						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											28.029.846.738	27.667.176.781									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														106,36	89,31						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Komunikasi dan Informatika

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	9.304.135.408	100	6.674.112.681	100	7.342.990.853	100	7.173.486.915	100	97,69	200	13.847.599.596	200	148,83	Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase			90	2.835.000	90	3.425.000	100	3.345.000	111,48	97,66	190	6.180.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			7	615.000	7	400.000	7	397.500	100	99,38	14	1.012.500			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			9	2.220.000	9	3.025.000	9	2.947.500	100	97,44	18	5.167.500			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase			100	6.275.699.217	100	6.207.478.214	100	6.105.627.703	100	98,36	200	12.381.326.920			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			49	6.274.014.217	45	6.206.678.214	44	6.104.838.403	97,78	98,36	93	12.378.852.620			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan			12	1.685.000	13	800.000	13	789.300	100	98,66	25	2.474.300			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase			100	2.400.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	100	200	5.900.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			1	2.400.000	1	3.500.000	1	3.500.000	100	100	2	5.900.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD sesuai ketentuan	Persentase			100	4.000.000	100	5.000.000	100	3.996.000	100	79,92	200	7.996.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			3	4.000.000	2	5.000.000	2	3.996.000	100	79,92	5	7.996.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase			100	264.420.209	100	354.314.564	100	349.657.654	100	98,69	200	614.077.863			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			12	69.470.050	12	116.846.440	12	112.739.550	100	96,49	24	182.209.600			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			8	12.635.000	8	13.320.000	8	12.820.000	100	96,25	16	25.455.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	9.881.700	12	10.000.000	12	9.977.600	100	99,78	24	19.859.300			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	172.433.459	12	214.148.124	12	214.120.504	100	99,99	24	386.553.963			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase			100	606.555.721	100	571.463.942	100	548.859.475	100	96,04	200	1.155.415.196			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	249.476.962	12	255.860.000	12	234.330.345	100	91,59	24	483.807.307			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	357.078.759	12	315.603.942	12	314.529.130	100	99,66	24	671.607.889			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase			80	118.846.242	80	197.809.133	80	158.501.083	100	80,13	160	277.347.325			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			11	74.136.452	11	123.841.633	11	96.441.298	100	77,87	22	170.577.750			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			25	15.561.947	25	41.837.500	25	30.712.700	100	73,41	50	46.274.647			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3	29.147.843	2	32.130.000	2	31.347.085	100	97,56	5	60.494.928			Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												101,64	92,97						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase media komunikasi yang dikelola	Persentase	90	1.450.350.318	90	4.535.595.539	90	1.631.259.731	90	1.484.410.130	100	91	90	6.020.005.669	100	415,07	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase media komunikasi yang dikelola	Persentase			90	4.535.595.539	90	1.631.259.731	90	1.484.410.130	100	91	90	6.020.005.669			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen			12	68.840.785	12	48.828.000	12	48.075.554	100	98,46	24	116.916.339			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen			12	245.508.371	12	513.142.731	12	438.771.206	100	85,51	24	684.279.577			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen			19	1.688.475.000	6	245.700.000	6	244.866.250	100	99,66	25	1.933.341.250			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan			2	49.900.000	2	40.300.000	2	34.610.000	100	85,88	4	84.510.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen			10	151.924.000	9	117.539.000	9	108.146.120	100	92,01	19	1			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen			600	2.330.947.383	750	665.750.000	970	609.941.000	129,33	91,62	1570	2.940.888.383			Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												104,89	92,19						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	Persentase	74	5.598.599.272	77,5	4.640.288.425	74	1.328.246.600	77,5	1.279.474.643	104,73	96,33	77,5	5.919.763.068	104,73	105,74	Dinas Komunikasi dan Informatika	

	2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi	Persentase			100	1.344.018.406	100	979.384.500	100	939.467.823	100	95,92	100	2.283.486.229			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1.600.000	1	4.995.000		4.752.500	0	95,15	1	6.352.500			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit			56	1.342.418.406	56	974.389.500	60	934.715.323	107,14	95,93	116	2.277.133.729			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Layanan Berbasis Elektronik	Persentase			100	3.296.270.019	100	348.862.100	100	340.006.820	100	97,46	200	3.636.276.839			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			3	2.000.000	2	26.530.000	2	26.122.464	100	98,46	5	28.122.464			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah			28	2.051.709.046	28	6.625.000	28	6.480.000	100	97,81	56	2.058.189.046			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit			4	1.194.942.813	3	244.324.100	3	238.611.560	100	97,66	7	1.433.554.373			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen			6	47.618.160	6	71.383.000	6	68.792.796	100	96,37	12	116.410.956			Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													86,73	97,01						
Predikat Kinerja													Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										10.302.497.184		9.937.371.688				25787368333				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													97,75	94,06						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.17.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	327	39.594.108.042,00	82	8.230.793.411,00	84	8.142.075.454,00	84	7.979.846.858,00	100	98,01	166	16.210.640.269,00	50,76	40,94		
	2.17.01.2.01	Kegiatan PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen			82	80.187.080,00	84	115.960.000,00	84	96.118.054,00	100	82,89	166	176.305.134,00				
	2.17.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			2	59.410.080,00	2	105.335.000,00	2	85.808.054,00	100	81,46	4	145.218.134,00				
	2.17.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen			2	10.205.000,00	0	0	0	0	0	0	2	10.205.000,00				
	2.17.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen			1	3.375.000,00	0	0	0	0	0	0	1	3.375.000,00				
	2.17.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			2	7.197.000,00	0	10.625.000,00	2	10.310.000,00	0	0	4	17.507.000,00				
	2.17.01.2.02	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen			72	6.671.284.754,00	72	6.912.413.302,00	72	6.786.910.148,00	100	98,18	144	13.458.194.902,00				
	2.17.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang			58	6.384.066.604,00	58	6.819.391.802,00	232	6.702.985.298,00	400	98,29	290	13.087.051.902,00				
	2.17.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	271.713.150,00	12	83.853.500,00	12	74.924.850,00	100	89,35	24	346.638.000,00				
	2.17.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			12	5.630.000,00	12	4.517.500,00	12	4.410.000,00	100	97,62	24	10.040.000,00				
	2.17.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Laporan			12	1.000.000,00	12	4.650.500,00	12	4.590.000,00	100	98,7	24	5.590.000,00				

	2.17.01.2.03	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen			80	34.435.080,00	80	30.645.000,00	80	29.723.054,00	100	96,99	160	64.158.134,00			
	2.17.01.2.03.06	Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persen			80	34.435.080,00	80	30.645.000,00	80	29.723.054,00	100	96,99	160	64.158.134,00			
	2.17.01.2.04	Kegiatan ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen			80	16.380.000,00	80	3.375.000,00	80	3.375.000,00	100	100	160	19.755.000,00			
	2.17.01.2.04.07	Sub. Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan			2	16.830.000,00	2	3.375.000,00	2	3.375.000,00	100	100	4	20.205.000,00			
	2.17.01.2.05	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen			85	36.935.080,00	85	34.720.000,00	85	34.703.054,00	100	99,95	170	71.638.134,00			
	2.17.01.2.05.03	Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persen			85	36.935.080,00	85	34.720.000,00	85	34.703.054,00	100	99,95	170	71.638.134,00			
	2.17.01.2.06	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen			80	561.590.392,00	80	292.907.100,00	85	285.087.622,00	106,25	97,33	165	846.678.014,00			
	2.17.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen			90	26.939.200,00	90	27.620.900,00	90	27.449.600,00	100	99,38	180	54.388.800,00			
	2.17.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen			80	4.497.800,00	80	5.496.700,00	80	5.456.800,00	100	99,27	160	9.954.600,00			
	2.17.01.2.06.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persen			80	47.424.473,00	80	795.000,00	80	580.000,00	100	72,96	160	48.004.473,00			
	2.17.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen			85	154.103.950,00	85	65.337.500,00	85	57.980.500,00	100	88,74	170	212.084.450,00			
	2.17.01.2.06.08	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	Persen			80	154.103.950,00	80	30.342.000,00	80	30.321.054,00	100	99,93	160	184.425.004,00			
	2.17.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persen			80	297.163.889,00	80	163.315.000,00	80	163.299.668,00	100	99,99	160	460.463.557,00			
	2.17.01.2.08	Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen			80	642.246.645,00	80	576.449.460,00	80	569.828.730,00	100	98,85	160	1.212.075.375,00			
	2.17.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen			80	31.795.080,00	80	23.620.000,00	80	23.398.054,00	100	99,06	160	55.193.134,00			
	2.17.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persen			80	126.291.819,00	80	133.470.000,00	80	131.897.726,00	100	98,82	160	258.189.545,00			
	2.17.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persen			80	484.159.746,00	80	419.359.460,00	80	414.532.950,00	100	98,85	160	898.692.696,00			
	2.17.01.2.09	Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen			90	187.734.380,00	90	175.605.592,00	90	174.101.196,00	100	99,14	180	361.835.576,00			
	2.17.01.2.09.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persen			85	45.015.310,00	85	75.364.468,00	85	75.281.854,00	100	99,89	170	120.297.164,00			
	2.17.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen			80	45.434.370,00	80	73.949.500,00	80	72.584.362,00	100	98,15	160	118.018.732,00			
	2.17.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persen			85	13.000.000,00	85	11.000.000,00	85	10.995.000,00	100	99,95	170	23.995.000,00			
	2.17.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Persen			90	73.505.200,00	90	5.291.624,00	90	5.249.980,00	100	99,21	180	78.755.180,00			
	2.17.01.2.09.11	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persen			85	10.779.500,00	85	10.000.000,00	85	9.990.000,00	100	99,9	170	20.769.500,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,78	96,67					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2	2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	4	431.597.702,00	10	213.976.280,00	10	354.687.800,00	10	349.481.918,00	100	98.53	20	563.458.198,00	500	130,55	
	2.17.02.2.01.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha			50	213.976.280,00	50	354.687.800,00	50	349.481.918,00	100	98.53	100	563.458.198,00			
	2.17.02.2.01.01	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha			50	213.976.280,00	50	354.687.800,00	50	349.481.918,00	100	98.53	100	563.458.198,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	98.53					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Persen	4	200.511.652,00	10	0	10	42.650.000,00	10	39.025.782,00	100	91,5	20	39.025.782,00	500	19,46	
	2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya dlm Daerah Kab/ Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha			50	0	50	42.650.000,00	50	39.025.782,00	100	91,5	100	39.025.782,00			
	2.17.02.2.01.04	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yg wilayah keanggotaannya daerah kab / kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan da pengawasan	Unit Usaha			50	0	50	42.650.000,00	50	39.025.782,00	100	91,5	100	39.025.782,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	91,5					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	2.17.02.2.01.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang mendapatkan Fasilitas Diklat Perkoperasian	Persen	100	1.024.468.637,00	25	371.919.251,00	25	1.500.000,00	25	1.500.000,00	100	100	50	373.419.251,00	50	36,45	
	2.17.02.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	orang			115	371.919.251,00	115	1.500.000,00	115	1.500.000,00	100	100	230	373.419.251,00			
	2.17.02.2.01.01	Sub. kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang			115	371.919.251,00	115	1.500.000,00	115	1.500.000,00	100	100	230	373.419.251,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	100					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mandiri	Persen	1	509.492.916,00	25	65.981.648,00	25	13.213.500,00	25	11.975.656,00	100	90,63	50	77.957.304,00	5000	15,3	
	2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha	Koperasi dan ukm			37	65.981.648,00	37	13.213.500,00	37	11.975.656,00	100	90,63	74	77.957.304,00			
	2.17.06.2.01.07	Sub. Kegiatan Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	Koperasi dan ukm			37	65.981.648,00	37	13.213.500,00	37	11.975.656,00	100	90,63	74	77.957.304,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	90,63					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi					
3	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha	Persen	6,73	2.537.602.266,00	2,34	3.338.618.995,00	2,73	1.356.614.100,00	2,75	1.342.619.361,00	100,73	98,97	5,09	4.681.238.356,00	75,63	184,47	
	2.17.07.2.01.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dan kelembagaan usaha	PUM			100	3.338.618.995,00	100	1.356.614.100,00	100	1.342.619.361,00	100	98,97	200	4.681.238.356,00			
	2.17.07.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	Unit Usaha			350	6.907.000,00	350	4.430.000,00	350	4.230.000,00	100	95,49	700	11.137.000,00			
	2.17.07.2.01.02	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha			350	2.514.418.099,00	350	361.715.000,00	350	352.990.907,00	100	97,59	700	2.867.409.006,00			
	2.17.07.2.01.04	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha			100	809.465.190,00	100	986.669.100,00	100	981.598.454,00	100	99,49	200	1.791.063.644,00			
	2.17.07.2.01.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	kali			6	7.828.706,00	6	3.800.000,00	6	3.800.000,00	100	100	12	11.628.706,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	98,97					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	Persen	2,81	1.042.018.714,00	0,91	373.373.285,00	1,04	224.205.500,00	1,04	223.984.255,00	100	99,9	1,95	597.357.540,00	69,4	57,33	
	2.17.08.2.01.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang mndapatkan fasilitas Pengembangan Produksi & Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan tehnologi	PUM			150	373.373.285,00	150	224.205.500,00	150	223.984.255,00	100	99,9	300	597.357.540,00			
	2.17.08.2.01.01	Sub. Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta desain dan tehnologi	Unit Usaha			150	373.373.285,00	150	224.205.500,00	150	223.984.255,00	100	99,9	300	597.357.540,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	99,90					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										10.134.946.354		9.948.433.830							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,11	96,60					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Penanaman Modal

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPd tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						10.626.096.990,00		7.480.026.018		10.796.548.989,00										
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persenta se	100	9.389.414.940,00	102	6.719.303.288	100	9.789.203.189,00	76,13	9.154.023.801,00	76,13	93,51	178,13	15.873.327.089,00	178,13	169,06	DPMPTSP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persenta se	100	86.294.500,00	100	57.443.590	100	77.220.700,00	100	43.968.554,00	100	56,94	200	101.412.144,00	200	117,52	DPMPTSP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	44.155.500,00	10	44.177.090	10	39.680.500,00	10	39.668.554,00	100	99,97	20	83.845.644,00	200	189,89	DPMPTSP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	42.139.000,00	10	13.266.500	10	37.540.200,00	10	37.140.200,00	100	98,93	20	50.406.700,00	200	119,62	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persenta se	100	3.948.272.912,00	147	4.523.209.658	100	4.323.830.011,00	233	4.209.970.736,00	233	97,37	380	8.733.180.394,00	380	221,19	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bu lan	37	3.885.817.412,00	462	4.384.371.568	37	4.274.792.511,00	128	4.161.110.182,00	345,95	97,34	590	8.545.481.750,00	1.594,59	219,91	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	183	47.665.500,00	537	130.883.090	183	38.872.500,00	540	38.798.554,00	295,08	99,81	1.077,00	169.681.644,00	588,52	355,98	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	laporan	25	14.790.000,00	25	7.955.000	25	10.165.000,00	25	10.062.000,00	100	98,99	50	18.017.000,00	200	121,82	DPMPTSP	
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persenta se	100	6.525.000,00	100	4.500.000	100	4.500.000,00	50	4.500.000,00	50	100	150	9.000.000,00	150	137,93	DPMPTSP	
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	6.525.000,00	12	4.500.000	4	4.500.000,00	12	4.500.000,00	300	100	24	9.000.000,00	600	137,93	DPMPTSP	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persenta se	100	53.800.000,00	100	42.050.000	100	214.500.000,00	50	191.225.300,00	50	89,15	150	233.275.300,00	150	433,6	DPMPTSP	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	39.000.000,00	2	32.050.000	3	58.650.000,00	3	58.150.000,00	100	99,15	5	90.200.000,00	166,67	231,28	DPMPTSP	
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	14.800.000,00	2	10.000.000	2	155.850.000,00	2	133.075.300,00	100	85,39	4	143.075.300,00	200	966,73	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persenta se	100	500.509.810,00	100	355.155.900	100	421.337.510,00	84	411.903.790,00	84	97,76	184	767.059.690,00	184	153,26	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	78.297.110,00	12	64.435.500	12	78.712.110,00	12	77.860.500,00	100	98,92	24	142.296.000,00	200	181,74	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	13.312.700,00	6	10.077.400	6	13.725.700,00	6	13.657.500,00	100	99,5	12	23.734.900,00	200	178,29	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	9.750.000,00	40	4.680.000	72	6.110.000,00	72	6.090.000,00	100	99,67	112	10.770.000,00	155,56	110,46	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	12.000.000,00	7	8.000.000	6	15.000.000,00	6	14.997.000,00	100	99,98	13	22.997.000,00	216,67	191,64	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	258.600.000,00	50	168.603.000	50	221.239.700,00	50	217.376.552,00	100	98,25	100	385.979.552,00	200	149,26	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	8.520.000,00	100	9.787.500	100	8.520.000,00	100	8.500.000,00	100	99,77	200	18.287.500,00	200	214,64	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	120.030.000,00	12	89.572.500	12	78.030.000,00	12	73.422.238,00	100	94,09	24	162.994.738,00	200	135,79	DPMPTSP	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persenta se	100	2.951.406.310,00	90,9	109.463.200	100	3.023.406.310,00	3	2.735.600.000,00	3	90,48	93,9	2.845.063.200,00	93,9	96,4	DPMPTSP	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	166	2.951.406.310,00	10	109.463.200	166	3.023.406.310,00	166	2.735.600.000,00	100	90,48	176	2.845.063.200,00	106,02	96,4	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persenta se	100	1.026.892.108,00	100	1.056.038.890	100	920.456.158,00	69	877.658.041,00	69	95,35	169	1.933.696.931,00	169	188,31	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	467.460.000,00	12	537.449.250	12	358.860.000,00	12	345.077.373,00	100	96,16	24	882.526.623,00	200	188,79	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	559.432.108,00	18	518.589.840	18	561.596.158,00	18	532.580.668,00	100	94,83	36	1.051.170.308,00	200	187,9	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persenta se	100	815.714.300,00	78,8	571.442.050	100	803.952.500,00	72	679.197.380,00	72	84,48	150,8	1.250.639.430,00	150,8	153,32	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	162.194.300,00	16	93.509.550	16	123.190.000,00	16	108.135.089,00	100	87,78	32	201.644.639,00	200	124,32	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	100.020.000,00	68	122.482.500	186	127.262.500,00	186	98.400.000,00	100	77,32	254	220.882.500,00	136,56	220,84	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	553.500.000,00	2	355.450.000	3	553.500.000,00	2	472.662.291,00	66,67	85,4	4	828.112.291,00	133,33	149,61	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													82,63	88,94						

											Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi						
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Persentase	0,41	100.000.000,00	104	103.890.000	0,41	100.000.000,00	0,23	97.406.000,00	55,37	97,41	104,23	201.296.000,00	25.421,22	201,3	DPMPTSP	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota	Persentase	100	100.000.000,00	100	103.890.000	100	100.000.000,00	100	97.406.000,00	100	97,41	200	201.296.000,00	200	201,3	DPMPTSP	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000,00	1	103.890.000	1	100.000.000,00	1	97.406.000,00	100	97,41	2	201.296.000,00	200	201,3	DPMPTSP	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	97,41						
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan	Persentase	100	150.000.000,00	100	25.838.000	100	150.000.000,00	100	123.440.000,00	100	82,29	200	149.278.000,00	200	99,52	DPMPTSP	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	Persentase	100	150.000.000,00	100	25.838.000	100	150.000.000,00	100	123.440.000,00	100	82,29	200	149.278.000,00	200	99,52	DPMPTSP	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150.000.000,00	1	25.838.000	1	150.000.000,00	1	123.440.000,00	100	82,29	2	149.278.000,00	200	99,52	DPMPTSP	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	82,29						
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi						
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ljin yang terbit tepat waktu	Persentase	100	457.617.050,00	89,22	248.865.140	100	285.995.800,00	73	278.465.364,00	73	97,37	162,22	527.330.504,00	162,22	115,23	DPMPTSP	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase	100	457.617.050,00	89,22	248.865.140	100	285.995.800,00	73	278.465.364,00	73	97,37	162,22	527.330.504,00	162,22	115,23	DPMPTSP	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	15.200.000,00	2.255	157.180.860	50	9.550.000,00	45	8.965.000,00	90	93,87	2.300,00	166.145.860,00	4.600,00	1.093,06	DPMPTSP	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2700	325.895.400,00	749	83.169.280	2700	186.870.400,00	2.442,00	182.793.256,00	90,44	97,82	3.191,00	265.962.536,00	118,19	81,61	DPMPTSP	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	60	5.400.000,00	48	800.000	60	4.760.000,00	60	3.510.000,00	100	73,74	108	4.310.000,00	180	79,81	DPMPTSP	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi	Kegiatan Usaha	750	111.121.650,00		7.715.000	500	84.815.400,00	492	83.197.108,00	98,4	98,09	492	90.912.108,00	65,6	81,81	DPMPTSP	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	73	97,37						
											Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Tinggi						
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal	Persentase	100	422.886.000,00	95%	339.300.000	100	392.886.000,00	149	345.765.750,00	149	88,01	149,95	685.065.750,00	149,95	162	DPMPTSP	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengawasan penanaman modal	Persentase	100	422.886.000,00	95%	339.300.000	100	392.886.000,00	149	345.765.750,00	149	88,01	149,95	685.065.750,00	149,95	162	DPMPTSP	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	60.933.000,00			10	58.933.000,00	40	50.032.000,00	400	84,9	40	50.032.000,00	400	82,11	DPMPTSP	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	60	238.788.000,00	393	319.000.000	60	237.988.000,00	573	205.183.750,00	955	86,22	966	524.183.750,00	1.610,00	219,52	DPMPTSP	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	123.165.000,00	35	20.300.000	25	95.965.000,00	57	90.550.000,00	228	94,36	92	110.850.000,00	368	90	DPMPTSP	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	149	88,01						
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi						
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	Persentase	100	106.179.000,00	100	42.829.590	100	78.464.000,00	100	76.507.054,00	100	97,51	200	119.336.644,00	200	112,39	DPMPTSP	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase	100	106.179.000,00	100	42.829.590	100	78.464.000,00	100	76.507.054,00	100	97,51	200	119.336.644,00	200	112,39	DPMPTSP	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	78	106.179.000,00	78	42.829.590	78	78.464.000,00	78	76.507.054,00	100	97,51	156	119.336.644,00	200	112,39	DPMPTSP	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00	97,51						

Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					10.403.662.989			9.729.842.219										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										100,77	91,92							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Kepemudaan dan Olahraga

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0		85	5.436.661.844,00	87	6.605.477.417,00	70	6.013.034.869,00	80,46	91,03	155	11.449.696.713,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			85	45.853.400,00	87	80.186.145,00	90	73.812.250,00	103,45	92,05	175	119.665.650,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			6	23.078.400,00	6	48.175.145,00	6	43.193.150,00	100	89,66	12	66.271.550,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			7	22.775.000,00	7	32.011.000,00	7	30.619.100,00	100	95,65	14	53.394.100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			86	4.217.395.368,00	86	4.772.412.565,00	90	4.356.000.414,00	104,65	91,27	176	8.573.395.782,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang			35	4.161.907.168,00	35	4.696.524.565,00	35	4.281.044.164,00	100	91,15	70	8.442.951.332,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan			700	55.488.200,00	25	75.888.000,00	25	74.956.250,00	100	98,77	725	130.444.450,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					82	10.000.000,00	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen					5	10.000.000,00	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan						0	0	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	orang					0	0	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			87	306.617.090,00	87	260.501.100,00	87	244.283.503,00	100	93,77	174	550.900.593,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			6	129.220.390,00	6	73.671.690,00	6	64.511.000,00	100	87,57	12	193.731.390,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			2	1.370.000,00	2	1.180.000,00	1	411.000,00	50	34,83	3	1.781.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	paket			4	22.630.000,00	4	46.775.000,00	4	43.674.000,00	100	93,37	8	66.304.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			720	9.640.000,00	720	10.800.000,00	720	10.240.000,00	100	94,81	1440	19.880.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			100	143.756.700,00	100	128.074.410,00	100	125.447.503,00	100	97,95	200	269.204.203,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	%			87	80.165.000,00	87	102.000.000,00	100	99.800.000,00	114,94	97,84	187	179.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			7	80.165.000,00	7	102.000.000,00	7	99.800.000,00	100	97,84	14	179.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%			87	588.595.300,00	87	980.666.108,00	87	898.082.581,00	100	91,58	174	1.486.677.881,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			5	0	5	1.500.000,00	0	0	-	-	5	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			3	397.537.068,00	3	478.260.000,00	3	412.196.690,00	100	86,19	6	809.733.758,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			3	157.488.152,00	3	120.030.000,00	3	108.000.000,00	100	89,98	6	265.488.152,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			3	33.570.080,00	3	380.876.108,00	3	377.885.891,00	100	99,21	6	411.455.971,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
	2.19.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	%			87	198.035.686,00	87	399.711.499,00	87	341.056.121,00	100	85,33	174	539.091.807,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	

2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			13	62.394.700,00	13	151.417.500,00	13	109.472.939,00	100	72,3	26	171.867.639,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			150	31.953.000,00	65	41.712.500,00	65	26.747.000,00	100	64,12	215	58.700.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			1	103.687.986,00	1	206.581.499,00	1	204.836.182,00	100	99,16	2	308.524.168,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												77,88	68,98						Dispopar	
Predikat Kinerja												Tinggi	Sedang						Dispopar	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pemuda berprestasi	%			60	69.960.000,00	80	77.800.000,00	80	77.350.200,00	100	99,42	140	147.310.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.02.2.01	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	presentase pemuda yang berprestasi	%			70	69.960.000,00	70	77.800.000,00	70	77.350.200,00	100	99,42	140	147.310.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan KapasitasDaya Saingnya	orang			100	20.000.000,00	100	75.000.000,00	100	74.617.000,00	100	99,49	200	94.617.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirusaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang			100	49.960.000,00	0	2.800.000,00	0	2.733.200,00	-	97,61	100	52.693.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100	99,42							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	%			35	12.693.104.053,73	35	6.230.942.000,00	0	6.102.458.680,99	-	97,94	35	18.795.562.734,72	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.03.2.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Olah Raga yang dibina	%			60,5	1.069.528.317,00	60,5	1.011.952.000,00	30	951.298.815,00	49,59	94,01	90,5	2.020.827.132,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	lokasi			6	1.069.528.317,00	6	1.011.952.000,00	6	951.298.815,00	100	94,01	12	2.020.827.132,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.03.2.02	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase prestasi yang diraih tingkat daerah	%					80	218.990.000,00	0	217.845.000,00	-	99,48	0	217.845.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen					1	218.990.000,00	1	217.845.000,00	100	99,48	1	217.845.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.03.2.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	Presentase Atlet yang berprestasi	%			60	11.623.575.736,73	60	5.000.000.000,00	60	4.933.314.865,99	100	98,67	120	16.556.890.602,72	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	orang			500	11.623.575.736,73	500	5.000.000.000,00	500	4.933.314.865,99	100	98,67	1000	16.556.890.602,72	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												49,86	97,38							
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase organisasi pramuka yang dibina	%			90	500.000.000	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	100	190	900.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.04.2.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	jumlah organisasi pramuka yang dibina	organisas i			1	500.000.000	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	100	100	2	900.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang			100	500.000.000	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	100	200	900.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	100,00							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										xxxx		xxxx								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												81,94	91,45							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Tinggi	Sangat Tinggi							
Faktor Penghambat :																				

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Statistik

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Release Data Statistik Tepat Waktu	Persentase	100	35.822.068	100	15.865.000	100	54.961.200	100	54.007.800	100	98,27	100	69.872.800	100	195,06	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dirilis	Data			32	15.865.000	32	54.961.200	32	54.007.800	100	98,27	64	69.872.800			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen			2	14.640.000	12	19.982.000	12	19.722.000	100	98,7	14	34.362.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang			102	1.225.000	187	34.979.200	234	34.285.800	125	98,02	336	35.510.800			Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	98,27						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										54.961.200		54.007.800								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	98,27						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Persandian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan Persandian																				
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan	Persentase	58,3	30.704.630	50	90.063.500	58,3	205.633.000,00	58,3	202.812.690,00	100	98,63	108,3	292.876.190	185,76	953,85	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01.0004	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sistem elektronik yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persentase			9,23	90.063.500	9,23	205.633.000,00	36,92	202.812.690,00	400	98,63	46,15	292.876.190			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah			28	90.063.500	28	205.633.000,00	28	202.812.690,00	100	98,63	56	292.876.190			Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	98,63						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										205.633.000		202.812.690								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	98,63						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
----	------	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------------------	-----

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									100	1.248.473.334,00	97,54	1.217.716.615,00	97,54	97,54						
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Dalam Daerah yang dikembangkan	Persenta se	100	3.020.000.000,00	100	894.060.650,00	100	800.502.334,00	100,87	807.465.005,00	100,87	100,87	200,87	1.701.525.655,00	200,87	212,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Budaya yang dibina	Persenta se	100	2.860.000.000,00	100	875.116.650,00	100	256.802.334,00	106,67	276.450.005,00	106,67	107,65	206,67	1.151.566.655,00	206,67	448,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persenta se	100		100		100		107,65		107,65	107,65	207,65		207,65	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	6	1.355.000.000,00	2	97.192.000,00	3	126.535.000,00	3	108.626.604,00	100	85,85	5	205.818.604,00	166,67	162,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	150	1.505.000.000,00	50	777.924.650,00	100	130.267.334,00	98	167.823.401,00	98	128,83	148	945.748.051,00	148	726,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional Masyarakat yang dilestarikan	Persenta se	100	160.000.000,00	100	18.944.000,00	100	543.700.000,00	97,67	531.015.000,00	97,67	97,67	197,67	549.959.000,00	197,67	101,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	6	160.000.000,00	2	18.944.000,00	5	543.700.000,00	5	531.015.000,00	100	97,67	7	549.959.000,00	140	101,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													104	104,32						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
3	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persenta se	100	225.000.000,00	100	277.916.300,00	100	12.425.000,00	100	12.125.000,00	100	97,59	200	290.041.300,00	200	2.334,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Seni yang dibina	Persenta se	100	225.000.000,00	100	277.916.300,00	100	12.425.000,00	100	12.125.000,00	100	97,59	200	290.041.300,00	200	2.334,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	20	225.000.000,00	5	277.916.300,00	5	12.425.000,00	5	12.125.000,00	100	97,59	10	290.041.300,00	200	2.334,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	97,59						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
4	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan	Persenta se	100	310.000.000,00	100	85.767.452,00	100	59.940.000,00	93,18	53.354.718,00	93,18	89,01	193,18	139.122.170,00	193,18	232,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Sejarah Lokal yang dibina	Persenta se	100	310.000.000,00	100	85.767.452,00	100	59.940.000,00	93,18	53.354.718,00	93,18	89,01	193,18	139.122.170,00	193,18	232,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	225	310.000.000,00	110	85.767.452,00	110	59.940.000,00	100	53.354.718,00	90,91	89,01	210	139.122.170,00	190,91	232,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													93,18	89,01						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
5	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persenta se	100	170.000.000,00	100	24.190.700,00	100	56.266.000,00	89,48	50.345.348,00	89,48	89,48	189,48	74.536.048,00	189,48	132,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang mendapatkan legalitas	Persenta se	100	170.000.000,00	100	24.190.700,00	100	56.266.000,00	100	50.345.348,00	100	89,48	200	74.536.048,00	200	132,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	7	170.000.000,00	2	24.190.700,00	3	56.266.000,00	3	50.345.348,00	100	89,48	5	74.536.048,00	166,67	132,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
6	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	Persenta se	100	500.000.000,00	100	696.919.263,00	100	319.340.000,00	92,2	294.426.544,00	92,2	92,2	192,2	991.345.807,00	192,2	310,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas Museum Kota	Persenta se	100	500.000.000,00	100	696.919.263,00	100	319.340.000,00	92,2	294.426.544,00	92,2	92,2	192,2	991.345.807,00	192,2	310,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	150	500.000.000,00	50	696.919.263,00	75	319.340.000,00	75	294.426.544,00	100	92,2	125	991.345.807,00	166,67	310,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													92,20	92,20						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.248.473.334	97,54	1.217.716.615								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													95,77	94,52						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a. beberapa belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan event , sehingga perlu penyesuaian pada Perubahan APBD, sehingga dapat maksimal pelaksanaan setelah P - APBD 2024

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan event Pemerintah Kota dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga dapat mendukung capaian kinerja
- b.

Urusan : Perpustakaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

	2.23.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	490	26.927.637.105,00	100	5.286.978.818,00	90	5.708.589.959,00	90	5.598.632.374,00	100	98,07	190	10.885.611.192,00	38,78	40,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.23.01.2.01	Kegiatan PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			90	11.687.500,00	100	17.627.500,00	100	16.955.000,00	100	96,18	190	28.642.500,00				
	2.23.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan			7	11.687.500,00	7	17.627.500,00	7	16.955.000,00	100	96,18	14	28.642.500,00				
	2.23.01.2.02	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	4.724.528.678,00	100	4.915.053.907,00	100	4.832.755.686,00	100	98,33	200	9.557.284.364,00				
	2.23.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang per bulan			100	4.604.499.518,00	574	4.861.808.407,00	574	4.779.534.078,00	100	98,31	674	9.384.033.596,00				
	2.23.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			574	120.029.160,00	12	53.245.500,00	12	53.221.608,00	100	99,96	586	173.250.768,00				
	2.23.01.2.03	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	%			0	0	100	5.000.000,00	100	4.933.950,00	100	98,68	100	4.933.950,00				
	2.23.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			0	0	1	5.000.000,00	1	4.933.950,00	100	98,68	1	4.933.950,00				
	2.23.01.2.05	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Diadakan	%			0	0	100	250.000,00	0	0	-	-	0	0				
	2.23.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket			0	0	1	250.000,00	0	0	-	-	0	0				
	2.23.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang			0	0	0	0	0	0	-	-	0	0				
	2.23.01.2.06	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100%	%			100	158.464.630,00	100	219.104.623,00	100	206.509.716,00	100	94,25	200	364.974.346,00				
	2.23.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket			4	81.814.730,00	4	67.242.350,00	4	62.782.704,00	100	93,37	8	144.597.434,00				
	2.23.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket			4	8.099.800,00	4	7.700.000,00	4	7.545.000,00	100	97,99	8	15.644.800,00				
	2.23.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen			1.210	1.690.000,00	240	1.560.000,00	240	1.560.000,00	100	100	1.450	3.250.000,00				
	2.23.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan			36	34.701.700,00	40	105.972.273,00	40	105.499.912,00	100	99,55	76	140.201.612,00				
	2.23.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen			12	32.158.400,00	12	36.630.000,00	12	29.122.100,00	100	79,5	24	61.280.500,00				
	2.23.01.2.07	Kegiatan PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	%			0	0	100	158.406.700,00	100	155.739.500,00	100	98,32	100	155.739.500,00				
	2.23.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit			0	0	24	158.406.700,00	24	155.739.500,00	100	98,32	24	155.739.500,00				
	2.23.01.2.08	Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%			100	247.077.535,00	100	262.592.667,00	100	254.059.109,00	100	96,75	200	501.136.644,00				
	2.23.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan			12	74.617.855,00	12	100.895.000,00	12	93.168.078,00	100	92,34	24	167.785.933,00				
	2.23.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan urusan kantor yang disediakan	laporan			12	172.459.680,00	12	161.697.667,00	12	160.891.031,00	100	99,5	24	333.350.711,00				
	2.23.01.2.09	Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara	%			100	60.157.975,00	100	130.554.562,00	100	127.679.413,00	100	97,8	200	187.837.388,00				
	2.23.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit			1	26.018.566,00	1	36.416.400,00	1	35.291.506,00	100	96,91	2	61.310.072,00				
	2.23.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit			7	21.119.409,00	7	27.948.150,00	7	26.247.907,00	100	93,92	14	47.367.316,00				
	2.23.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit			50	13.020.000,00	51	39.000.000,00	51	39.000.000,00	100	100	101	52.020.000,00				

2.23.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			0	0	2	27.190.012,00	2	27.140.000,00	100	99,82	2	27.140.000,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
2.23.02	Program PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IKM layanan Perpustakaan	Indeks	390	657.112.403	81,21	85.062.500,00	80	276.457.700,00	81,55	275.354.600,00	101,94	99,6	162,76	360.417.100,00	41,73	54,85		
		Persentase peningkatan Perpustakaan yang dibina	%	35		8		9		9		100		17		48,57			
2.23.02.2.01	Kegiatan PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perpustakaan yang dibina	%			100	39.375.000,00	100	171.965.700,00	100	171.050.800,00	100	99,47	200	210.425.800,00				
2.23.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan			10	11.440.000,00	12	29.845.000,00	12	29.145.000,00	100	97,65	22	40.585.000,00				
2.23.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar			1.547	27.935.000,00	954	142.120.700,00	1070	141.905.800,00	112,16	99,85	2.617	169.840.800,00				
2.23.02.2.02	Kegiatan PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sasaran pemasyarakatan perpustakaan	%			100	45.687.500,00	100	104.492.000,00	100	104.303.800,00	100	99,82	200	149.991.300,00				
2.23.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan			2	45.687.500,00	3	104.492.000,00	3	104.303.800,00	100	99,82	5	149.991.300,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	99,64						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.985.047.659		5.873.986.974							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												93,75	85,04						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Kearsipan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.24	Urusan Kearsipan																		
	2.24.02	Program PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola	%	75,85	623.599.471	14,45	72.184.080,00	14,55	120.814.600,00	14,55	116.859.044,00	100	96,73	29	189.043.124,00	38,23	30,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai Standart	%	425		90		95		95	0	100	-	185	0	43,53			
	2.24.02.2.01	Kegiatan PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase arsip dinamis yang dikelola	%			100	38.512.080,00	100	59.132.500,00	100	58.712.044,00	100	99,29	200	97.224.124,00				
	2.24.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas			19.501	38.512.080,00	20000	59.132.500,00	20000	58.712.044,00	100	99,29	39.501	97.224.124,00				
	2.24.02.2.02	Kegiatan PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase arsip statis yang dikelola	%			100	28.827.000,00	100	15.886.500,00	100	12.951.400,00	100	81,52	200	41.778.400,00				
	2.24.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Berkas			2.800	28.827.000,00	3000	15.886.500,00	3000	12.951.400,00	100	81,52	5.800	41.778.400,00				
	2.24.02.2.03	Kegiatan PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Persentase Pembinaan kearsipan tingkat daerah kab/kota	%			100	4.845.000,00	100	45.795.600,00	100	45.195.600,00	100	98,69	200	50.040.600,00				
	2.24.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan			25	4.845.000,00	30	45.795.600,00	30	45.195.600,00	100	98,69	55	50.040.600,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	93,17						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											120.814.600		116.859.044							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	93,17						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1	944.020.933,00	1,01	853.054.693,00	1	792.171.800,00	1,03	779.460.807,00	103,2	98,4	1,28	1.003.380.554,00	128	215,94		
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pendapatan nelayan	%	5	559.020.933,00	5	465.969.660,00	5	439.757.800,00	5,63	437.904.132,00	112,6	99,58	6,25	552.575.288,00	125	98,85		
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	2433	559.020.933,00	2067	465.969.660,00	2260	439.757.800,00	2.048	437.904.132,00	90,62	99,58	4.020,00	552.575.288,00	165,23	98,85		
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase pelaku usaha yang mendapat layanan dari UPT TPI	%	86	385.000.000,00	100	387.085.033,00	86	352.414.000,00	90	341.556.675,00	104,65	96,92	142	450.805.266,00	165,12	117,09		
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	260	385.000.000,00	100	387.085.033,00	100	352.414.000,00	100	341.556.675,00	100	96,92	142	450.805.266,00	54,62	117,09		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													PREDIKAT KINERJA							
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	%	1	495.429.590,00	1,19	740.260.060,00	1	731.102.000,00	1,01	687.080.452,00	101	93,98	1,42	859.663.016,00	142	1.674,23		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang mendapat fasilitasi (%)	%	4	90.500.000,00	0	-	4	207.210.000,00	4	203.989.932,00	100	98,45	1	47.349.532,00	25	55,38		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Kelompo k	4	85.500.000,00	0	-	24	207.210.000,00	24	203.989.932,00	100	98,45	3	47.349.532,00	75	55,38		
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan budidaya ikan yang baik	%	25	399.929.590,00	25,1	740.260.060,00	25	523.892.000,00	25	483.090.520,00	100	92,21	31,1	812.313.484,00	124,4	1.618,85		
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	110	48.204.000,00	100	51.748.650,00	125	143.700.000,00	125	143.296.054,00	100	99,72	130	62.519.478,00	118,18	129,7		
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	60	26.200.000,00	735	351.203.280,00	100	76.720.000,00	100	38.895.036,00	100	50,7	735	358.678.936,00	1.225,00	1.369,00		
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha		325.525.596,00	8	337.308.130,00	8	303.472.000,00	8	300.899.430,00	100	99,15	10	391.115.070,00	#DIV/0!	120,15		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													PREDIKAT KINERJA							
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan perairan darat yang mendapat pengawasan	%		100.227.405,00	1	42.674.880,00	1	44.792.000,00	1	44.523.084,00	100	99,4	1,5	68.633.158,00	#DIV/0!	68,48		
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Perairan darat yang direstocking	%	35	100.227.405,00	20	42.674.880,00	35	44.792.000,00	35	44.523.084,00	100	99,4	30	68.633.158,00	85,71	68,48		
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		100.227.405,00	1	42.674.880,00	1	44.792.000,00	1	44.523.084,00	100	99,4	1	68.633.158,00	#DIV/0!	68,48		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													PREDIKAT KINERJA							
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Perikanan	Rp./Kg	31825	853.861.705,00	30464	1.103.310.318,00	31825	778.225.085,00	32.335,00	771.250.463,00	101,6	99,1	30.464,00	1.229.444.791,00	95,72	330,89		
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	20	57.078.000,00	17	89.934.560,00	20	79.698.000,00	21	78.643.994,00	105	98,68	22	108.568.716,00	110	190,21		
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	5	57.078.000,00	2	89.934.560,00	2	79.698.000,00	2	78.643.994,00	100	98,68	2	108.568.716,00	40	190,21		
	3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	5	796.783.705,00	5,25	1.013.375.758,00	5	698.527.085,00	5,1	692.606.469,00	102	99,15	6,25	1.120.876.075,00	125	140,68		

	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	350	796.783.705,00	350	1.013.375.758,00	350	698.527.085,00	350	692.606.469,00	100	99,15	437	1.120.876.075,00	124,86	140,68			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													103,50	98,91							
PREDIKAT KINERJA													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.346.290.885		2.282.314.806									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													103,03	97,97							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Faktor Penghambat :																					
a. Belum semua indikator kinerja terealisasi karena proses perhitungan bersifat tahunan																					
b. Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan di anggaran kas																					
Faktor Pendukung :																					
a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin																					
b.																					

Urusan : Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Urusan Pariwisata																			
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Destinasi Wisata Yang Berkembang	%	0	0	5	805.209.284,00	10	654.985.500,00	10	623.194.588,00	100	95,15	15	1.428.403.872,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.02.2.03	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	presentase peningkatan SDM pelaku pariwisata	%			12	613.683.184,00	30	583.985.500,00	30	581.649.938,00	100	99,6	42	1.195.333.122,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi			1	609.683.184,00	1	532.985.500,00	1	530.799.938,00	100	99,59	2	1.140.483.122,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan					1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	100	100	1	45.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen			1	4.000.000,00	3	6.000.000,00	3	5.850.000,00	100	97,5	4	9.850.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.02.2.04	PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase usaha pariwisata yang terdaftar	%			85	191.526.100,00	90	71.000.000,00	0	41.544.650,00	0	58,51	85	233.070.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	usaha			3	191.526.100,00	3	71.000.000,00	3	66.194.650,00	100	93,23	6	257.720.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase angka kunjungan wisatawan	%				-3,54	1.814.076.187,00	13	1.481.220.606,00	0	1.385.005.001,00	-	93,5	-3,54	3.199.081.188,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar	
	3.26.03.2.01	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kegiatan Pemasaran Pariwisata	%				40	1.814.076.187,00	10	1.481.220.606,00	10	1.385.005.001,00	100	93,5	50	3.199.081.188,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen			2	98.350.892,00	14	42.450.500,00	14	41.585.984,00	100	97,96	16	139.936.876,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen			2	143.893.775,00	1	1.315.476.174,00	1	1.222.029.961,00	100	92,9	3	1.365.923.736,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan			11	1.571.831.520,00	12	123.293.932,00	12	121.389.056,00	100	98,46	23	1.693.220.576,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase peningkatan sarpas ekonomi kreatif yang di pelihara	%			5	7.965.000,00	5	5.000.000,00	5	4.200.000,00	100	84	10	12.165.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispapar		

	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	%	1	488834115	1	767.520.536,00	1	1.055.170.600,00	1	936.139.297,00	100	88,72	1	287.377.050,00	100	#DIV/0!			
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	0,01	84063115	0,01	46.746.400,00	90	68.500.000,00	90	67.515.800,00	100	98,56	0,01	4.800.000,00	100	#DIV/0!			
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveillans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	0	0	0	-	29	68.500.000,00	29	67.515.800,00	100	98,56	-	4.800.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan yang Mendapat Pengawasan/Pendampingan	%	52,94	171481000	53,3	208.249.244,00	52,94	194.731.600,00	64,28	192.601.358,00	121,42	98,91	53,3	252.129.914,00	100,68	147,03			
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	0	171481000	12	208.249.244,00	12	194.731.600,00	12	192.601.358,00	100	98,91	12	252.129.914,00	#DIV/0!	147,03			
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase ternak yang terfasilitasi pemasarannya	%	70	233290000	65	219.607.330,00	70	791.939.000,00	70	676.022.139,00	100	85,36	65	30.447.136,00	92,86	#DIV/0!			
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	0	0	0	-	5	791.939.000,00	5	676.022.139,00	100	85,36	-	30.447.136,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					
PREDIKAT KINERJA																					
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil pertanian	%	0	88.505.631,00	1,26	102.757.510,00	1	130.569.900,00	1,37	123.612.100,00	137	94,67	1,26	134.757.510,00	#DIV/0!	152,26			
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kehilangan Hasil Pertanian	%	1	88.505.631,00	1,27	102.757.510,00	1	130.569.900,00	0,9	123.612.100,00	90	94,67	1,27	134.757.510,00	127	152,26			
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	88.505.631,00	101,5	102.757.510,00	100	130.569.900,00	128	123.612.100,00	128,3	94,67	101,5	134.757.510,00	#DIV/0!	152,26			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					
PREDIKAT KINERJA																					
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Produk dan Unit Usaha Sarana Produksi Ternak yang memenuhi legalitas	%	100	12636296	90	82.474.068,00	100	65.126.000,00	100	61.235.612,00	100	94,03	90	92.481.802,00	90	731,87			
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase unit usaha sarana produksi ternak yang dipantau legalitasny	%	100	12636296	100	82.474.068,00	100	65.126.000,00	100	61.235.612,00	100	94,03	100	92.481.802,00	100	731,87			
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	0	12636296	1	82.474.068,00	1	65.126.000,00	1	61.235.612,00	100	94,03	1	92.481.802,00	#DIV/0!	731,87			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					
PREDIKAT KINERJA																					
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	%	0,1	113.726.668,00	2,34	3.915.399.612,00	0,1	4.376.918.279,00	0,22	4.206.128.621,00	220	96,1	2,34	4.071.147.916,00	2.340,00	#DIV/0!			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Capaian Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	22,55	113.726.668,00	22,91	3.915.399.612,00	22,54	4.376.918.279,00	22,96	4.206.128.621,00	101,86	96,1	22,91	4.071.147.916,00	101,6	#DIV/0!			
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	113.726.668,00	5	654.944.292,00	5	885.108.500,00	5	879.410.888,00	100	99,36	5	809.092.596,00	250	711,44			
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	0	0	18	3.260.455.320,00	50	3.491.809.779,00	70	3.326.717.733,00	140	95,27	18	3.262.055.320,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													101,86	96,10							
PREDIKAT KINERJA													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.592.400.529		6.276.711.246				4864255724					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													107,54	95,84							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Faktor Penghambat :

- a. Belum semua indikator kinerja terealisasi karena proses perhitungan bersifat tahunan
- b. Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan di anggaran kas
- c. Produktivitas menurun, terutama bawang merah karena faktor cuaca dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibandingkan triwulan 1 pada N-1 serta berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi
- d. Kegiatan yang bersumber dana DAK Non Fisik belum terealisasi dikarenakan belum salurnya anggaran DAK Non Fisik

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Perdagangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	2	3	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	Persen	306	12.208.655.655.489,00	91	873.496.637,00	91	162.076.097,00	91	160.263.242,00	100	98,88	182	1.033.759.879,00	59,48	0,01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
	3.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	Persen			80	848.983.800,00	80	147.076.097,00	80	145.442.242,00	100	98,89	160	994.426.042,00			DKUP	
	3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit			7	848.983.800,00	6	147.076.097,00	6	145.442.242,00	100	98,89	13	994.426.042,00			DKUP	
	3.30.04.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen			80	24.512.837,00	80	15.000.000,00	80	14.821.000,00	100	98,81	160	39.333.837,00			DKUP	
	3.30.04.2.02.03	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen			12	24.512.837,00	12	15.000.000,00	12	14.821.000,00	100	98,81	24	39.333.837,00			DKUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali	Persen	326	7.853.829.067,00	82	1.856.789.710,00	82	1.598.423.524,00	82	1.562.268.697,00	100	97,74	164	3.419.058.407,00	50,31	43,53	DKUP	
	3.30.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pasar yang terstandarisasi Bersih Tertib Aman sesuai standart	Persen			80	1.729.050.710,00	80	1.481.173.524,00	80	1.446.829.197,00	100	97,68	160	3.175.879.907,00			DKUP	
	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Agen dan PasarRakyat	Laporan			12	1.729.050.710,00	12	1.481.173.524,00	12	1.446.829.197,00	100	97,68	24	3.175.879.907,00			DKUP	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen			80	108.039.000,00	80	108.250.000,00	80	106.814.500,00	100	98,67	160	214.853.500,00			DKUP	
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Laporan			12	108.039.000,00	12	108.250.000,00	12	106.814.500,00	100	98,67	24	214.853.500,00			DKUP	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persen			80	19.700.000,00	80	9.000.000,00	80	8.625.000,00	100	95,83	160	28.325.000,00			DKUP	
	3.30.04.2.02.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan			12	19.700.000,00	12	9.000.000,00	12	8.625.000,00	100	95,83	24	28.325.000,00			DKUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	97,40						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	4	260.487.301,00	1	48.512.743,00	1	23.592.000,00	1	23.408.054,00	100	99,22	2	71.920.797,00	50	27,61	DKUP	
	3.30.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang	Pelaku Usaha			25	48.512.743,00	30	23.592.000,00	30	23.408.054,00	100	99,22	55	71.920.797,00			DKUP	
	3.30.05.2.01.06	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang lokal	Pelaku Usaha			25	48.512.743,00	30	23.592.000,00	30	23.408.054,00	100	99,22	55	71.920.797,00			DKUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang memenuhi standar secara metrologi legal	Persen	335	9.976.343.038,00	80	263.609.780,00	80	68.964.600,00	80	66.002.704,00	100	95,71	160	329.612.484,00	47,76	3,3	DKUP	
	3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP	Pelaku Usaha			1000	263.609.780,00	1000	68.964.600,00	1100	66.002.704,00	110	95,71	2100	329.612.484,00			DKUP	
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	Unit			1500	263.609.780,00	1500	68.964.600,00	1500	66.002.704,00	100	95,71	3000	329.612.484,00			DKUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													110,00	95,71						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.853.056.221		1.811.942.697								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													102,50	97,79						
													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Perindustrian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
----	------	---	---	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----

04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	33.105.845.047,00	95,48	34.434.129.224,00	100	33.481.212.777,00	94,24	30.896.360.170,00	94,24	92,28	189,72	65.330.489.394,00	189,72	197,34	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.01	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	121.743.900,00	94,33	26.176.000,00	100	81.595.637,00	100	80.722.297,00	100	98,93	194,33	106.898.297,00	194,33	87,81	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	120.063.900,00	5	17.171.000,00	5	73.970.637,00	5	73.602.297,00	100	99,5	10	90.773.297,00	100	75,6	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	1.680.000,00	10	9.005.000,00	10	7.625.000,00	10	7.120.000,00	100	93,38	20	16.125.000,00	200	959,82	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	17.425.530.063,00	100	18.075.812.087,00	100	18.560.316.347,00	100	17.945.906.250,00	100	96,69	200	36.021.718.337,00	200	206,72	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	100	16.857.076.362,00	147	17.476.845.207,00	132	18.500.728.947,00	132	17.886.407.696,00	100	96,68	279	35.363.252.903,00	279	209,78	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dannnPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	469.302.201,00	12	477.566.560,00	12	45.587.400,00	12	45.498.554,00	100	99,81	24	523.065.114,00	24	111,46	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	17	99.151.500,00	14	121.400.320,00	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00	100	100	16	135.400.320,00	94,12	136,56	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	26.250.000,00	100	19.935.000,00	100	13.000.000,00	100	0	100	0	200	19.935.000,00	200	75,94	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	26.250.000,00	12	19.935.000,00	12	13.000.000,00	12	0	100	0	24	19.935.000,00	24	75,94	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	718.647.600,00	100	785.341.044,00	100	804.478.922,00	57,56	615.542.987,00	57,56	76,51	157,56	1.400.884.031,00	157,56	194,93	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	7.875.000,00	8	8.641.500,00	8	9.000.000,00	8	8.025.000,00	100	89,17	16	16.666.500,00	10,67	211,64	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	100	402.766.000,00	45	439.938.486,00	42	472.793.539,00	42	392.988.404,00	100	83,12	87	832.926.890,00	87	206,8	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	100	50.000.000,00	10	33.470.000,00	10	80.000.000,00	0	0	0	0	10	33.470.000,00	10	66,94	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	258.006.600,00	350	303.291.058,00	350	242.685.383,00	186	214.529.583,00	53,14	88,4	536	517.820.641,00	536	200,7	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	3.840.156.627,00	100	997.072.467,00	100	1.162.757.500,00	100	1.152.776.523,00	100	99,14	200	2.149.848.990,00	200	55,98	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	3.127.553.138,00	7	155.875.000,00	24	319.588.300,00	24	319.210.300,00	100	99,88	31	475.085.300,00	31	15,19	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	72.580.200,00	10	141.897.000,00	24	195.858.200,00	24	191.835.000,00	100	97,95	34	333.732.000,00	34	459,81	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	640.023.289,00	12	699.300.467,00	12	647.311.000,00	12	641.731.223,00	100	99,14	24	1.341.031.690,00	24	209,53	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	0	94,44	1.618.700.000,00	100	1.161.615.000,00	100	1.155.115.000,00	100	99,44	194,44	2.773.815.000,00	194,44	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Jumlah realisasi kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kendaraan	0	0	4	1.588.000.000,00	0	0	0	0	0	0	4	1.588.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	135.800.000,00	5	132.850.000,00	100	97,83	5	132.850.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	0	0	8	30.700.000,00	13	1.025.815.000,00	13	1.022.265.000,00	100	99,85	21	1.052.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persen	100	1.948.970.606,00	100	1.874.044.684,00	100	1.706.200.000,00	100	1.611.597.075,00	100	94,46	200	3.485.641.759,00	200	178,85	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	1.544.620.106,00	12	1.048.847.618,00	12	1.143.350.000,00	12	1.067.150.075,00	100	93,34	24	2.115.997.693,00	24	136,99	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	404.350.500,00	12	825.197.066,00	12	562.850.000,00	12	544.447.000,00	100	96,73	24	1.369.644.066,00	24	338,73	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	1.190.621.900,00	59,21	1.736.300.612,00	100	2.223.076.294,00	100	2.130.421.973,00	100	95,83	159,21	3.866.722.585,00	159,21	324,76	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	100	362.763.400,00	21	504.928.064,00	14	395.611.400,00	14	369.626.569,00	100	93,43	35	874.554.633,00	35	241,08	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan	0	0	30	446.287.183,00	65	1.247.850.744,00	65	1.206.238.804,00	100	96,67	95	1.652.525.987,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	100	100	3	25.000.000,00	300	250	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	181.841.500,00	13	104.552.000,00	13	286.558.000,00	13	283.405.600,00	100	98,9	26	387.957.600,00	26	213,35	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	636.017.000,00	240	675.533.365,00	342	273.056.150,00	342	251.151.000,00	100	91,98	582	926.684.365,00	582	145,7	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	837.254.362,00	100	765.119.244,00	100	912.637.049,00	73,33	684.132.988,00	73,33	74,96	173,33	1.449.252.232,00	173,33	173,1	Sekretariat Daerah	

4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	100	145.260.390,00	2	91.509.244,00	2	39.837.049,00	1	6.504.008,00	50	16,33	3	98.013.252,00	3	67,47	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	9	71.993.972,00	9	103.610.000,00	9	212.800.000,00	9	107.628.980,00	100	50,58	18	211.238.980,00	200	293,41	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4	20.000.000,00	0	0	2	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	100	600.000.000,00	2	570.000.000,00	2	600.000.000,00	1	570.000.000,00	50	95	3	1.140.000.000,00	3	190	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.12	FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumaha tnggaan pimpinan	Persen	100	4.782.737.860,00	100	4.620.926.660,00	100	4.443.481.291,00	100	3.461.747.508,00	100	77,91	200	8.082.674.168,00	200	169	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	4.587.937.860,00	7	4.550.433.779,00	7	4.236.116.291,00	7	3.389.736.617,00	100	80,02	14	7.940.170.396,00	14	173,07	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	99.500.000,00	5	40.936.773,00	3	148.282.500,00	3	42.214.791,00	100	28,47	8	83.151.564,00	8	83,57	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	100	95.300.000,00	5	29.556.108,00	3	59.082.500,00	3	29.796.100,00	100	50,43	8	59.352.208,00	8	62,28	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Persen	100	709.026.689,00	100	375.247.992,00	100	234.916.455,00	100	233.522.550,00	100	99,41	200	608.770.542,00	200	85,86	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	100	319.828.854,00	15	150.962.780,00	15	196.936.455,00	15	195.696.550,00	100	99,37	30	346.659.330,00	30	108,39	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	100	252.110.437,00	6	56.027.783,00	6	22.340.000,00	6	22.199.000,00	100	99,37	12	78.226.783,00	12	31,03	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	137.087.598,00	10	168.257.429,00	8	15.640.000,00	8	15.627.000,00	100	99,92	18	183.884.429,00	18	134,14	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Persen	100	1.504.905.440,00	100	3.539.453.434,00	100	2.177.138.282,00	100	1.824.875.019,00	100	83,82	200	5.364.328.453,00	200	356,46	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol	Laporan	100	1.504.905.440,00	12	2.515.587.490,00	12	1.125.271.282,00	12	918.032.134,00	100	81,58	24	3.433.619.624,00	24	228,16	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	0	0	12	1.023.865.944,00	12	1.051.867.000,00	12	906.842.885,00	100	86,21	24	1.930.708.829,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang pemerintahan	Persen	100	4.311.902.190,00	100	15.432.262.614,00	100	15.980.433.151,00	62,59	10.446.888.516,00	62,59	65,37	162,59	25.879.151.130,00	162,59	600,18	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase tata kelola pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	481.006.042,00	92,86	1.014.499.966,00	100	699.678.561,00	100	635.169.838,00	100	90,78	192,86	1.649.669.804,00	192,86	342,96	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	100	179.354.700,00	6	212.978.466,00	7	461.661.061,00	7	409.261.603,00	100	88,65	13	622.240.069,00	13	346,93	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan/ dokumen fasilitasi administrasi kewilayahan	Kegiatan	100	61.779.342,00	5	748.628.100,00	3	191.000.000,00	3	180.251.000,00	100	94,37	8	928.879.100,00	8	1.503,54	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan/ dokumen fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kegiatan	100	239.872.000,00	2	52.893.400,00	6	47.017.500,00	6	45.657.235,00	100	97,11	8	98.550.635,00	8	41,08	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat yang terfasilitasi	Persen	100	2.423.383.550,00	100	13.153.804.364,00	100	13.800.589.192,00	100	13.201.896.562,00	100	95,66	200	26.355.700.926,00	200	1.087,56	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100	813.061.350,00	8	5.616.478.292,00	8	2.806.831.500,00	8	2.768.445.864,00	100	98,63	16	8.384.924.156,00	16	1.031,28	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	100	1.389.125.200,00	502	7.282.825.772,00	5	10.756.824.840,00	5	10.198.010.608,00	100	94,81	507	17.480.836.380,00	507	1.258,41	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemuduran dan Olahrag, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Triantibum Linmas	Dokumen	100	221.197.000,00	2	254.500.300,00	2	236.932.852,00	2	235.440.090,00	100	99,37	4	489.940.390,00	4	221,5	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.03	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Layanan Pemerintahan Bidang Hukum Yang terselesaikan	Persen	100	1.305.751.218,00	91,3	1.243.849.884,00	100	1.455.665.398,00	86,3	1.427.815.374,00	86,3	98,09	177,6	2.671.665.258,00	177,6	204,61	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk Hukum	100	131.720.000,00	370	100.523.400,00	375	80.005.800,00	374	79.755.800,00	99,73	99,69	744	180.279.200,00	744	136,87	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	100	783.851.200,00	91	941.270.700,00	65	1.194.059.050,00	24	1.166.624.841,00	36,92	97,7	115	2.107.895.541,00	115	268,92	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Produk Hukum	100	390.180.018,00	357	202.055.784,00	370	181.600.548,00	301	181.434.733,00	81,35	99,91	658	383.490.517,00	658	98,29	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.04	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	Persentase dokumen kerja sama daerah yang difasilitasi	Persen	100	101.761.380,00	101,36	20.108.400,00	100	24.500.000,00	100	23.442.000,00	100	95,68	201,36	43.550.400,00	201,36	42,8	Sekretariat Daerah	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama Daerah (Dalam Negeri) yang difasilitasi	Naskah Kerjasama	100	101.761.380,00	43	20.108.400,00	73	24.500.000,00	73	23.442.000,00	100	95,68	116	43.550.400,00	116	42,8	Sekretariat Daerah	

Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
	04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	4.422.455.066,00	100	1.075.835.778,00	100	1.284.628.457,00	76,77	764.055.135,00	76,77	59,48	176,77	1.839.890.913,00	176,77	41,6	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terfasilitasi	Persen	100	2.382.537.794,00	100	448.644.830,00	100	559.698.390,00	100	547.510.744,00	100	97,82	200	996.155.574,00	200	41,81	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	85	131.775.000,00	9	74.893.430,00	9	39.034.685,00	9	38.993.027,00	100	99,89	18	113.886.457,00	21,18	86,42	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	85	1.845.186.552,00	6	320.013.600,00	8	352.488.443,00	8	345.372.109,00	100	97,98	14	665.385.709,00	16,47	36,06	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	85	4.576.242,00	2	4.143.000,00	2	3.152.262,00	2	3.148.800,00	100	99,89	4	7.291.800,00	4,71	159,34	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	85	401.000.000,00	3	49.594.800,00	3	165.023.000,00	3	159.996.808,00	100	96,95	6	209.591.608,00	7,06	52,27	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Laporan Pembangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	65.815.600,00	100	17.183.500,00	100	63.416.340,00	100	61.805.419,00	100	97,46	200	78.988.919,00	200	120,02	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	85	65.815.600,00	1	17.183.500,00	12	63.416.340,00	12	61.805.419,00	100	97,46	13	78.988.919,00	15,29	120,02	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	860.321.172,00	100	323.199.068,00	100	351.063.727,00	98,7	348.788.630,00	98,7	99,35	198,7	671.987.698,00	198,7	78,11	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	568.034.270,00	45	57.686.330,00	40	61.294.442,00	39	60.284.003,00	97,5	98,35	84	117.970.333,00	84	20,77	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	100	152.850.620,00	350	250.722.238,00	150	282.397.285,00	148	281.624.827,00	98,67	99,73	498	532.347.065,00	498	348,28	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	80	139.436.282,00	40	14.790.500,00	40	7.372.000,00	40	6.879.800,00	100	93,32	80	21.670.300,00	100	15,54	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terfasilitasi	Persen	100	1.113.780.500,00	100	286.808.380,00	100	310.450.000,00	100	306.694.588,00	100	98,79	200	593.502.968,00	200	53,29	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	85	1.113.780.500,00	1	286.808.380,00	4	310.450.000,00	4	306.694.588,00	100	98,79	5	593.502.968,00	5,88	53,29	Sekretariat Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													99,67	98,36						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										50.746.274.385		42.107.303.821	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													96,66	92,32						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Move Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Unsur Staf : Sekretariat DPRD

Sur Staf : Sekretariat DPRD																				
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Program Minimal 80%	%	100	141.645.495.553,00	100	24.296.353.735,00	100	27.159.415.244,00	100	25.908.581.450,00	100	95,39	200	50.204.935.185,00	200	35,44	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	100	384.350.300,00	100	79.417.900,00	100	134.800.000,00	100	127.864.750,00	100	94,86	95	207.282.650,00	95	53,93	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	157.357.400,00	2	5.120.500,00	4	84.800.000,00	4	77.809.200,00	100	91,76	92	82.929.700,00	2300	52,7	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	6	226.992.900,00	6	74.297.400,00	6	50.000.000,00	6	49.955.550,00	100	99,91	100	124.252.950,00	1666,67	54,74	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	18.299.127.170,00	100	4.540.841.041,00	100	4.765.927.625,00	100	4.508.382.723,00	100	94,6	95	9.049.223.764,00	95	49,45	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	17.461.880.978,00	36	4.237.137.961,00	39	4.582.795.354,00	39	4.353.869.880,00	100	95	95	8.591.007.841,00	243,59	49,2	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	580.887.052,00	1	263.097.000,00	1	115.897.852,00	1	114.185.370,00	100	98,52	99	377.282.370,00	9900	64,95	Sekretariat DPRD	

	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	256.359.140,00	1	40.606.080,00	12	67.234.419,00	12	40.327.473,00	100	59,98	60	80.933.553,00	500	31,57	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen	100	35.000.000,00	100	208.586.000,00	100	52.500.000,00	100	0	100	0		208.586.000,00	0	595,96	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	1	52.500.000,00	0	0	1	52.500.000,00	0	0	0	0	100	0	10000	0	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	1.004.384.800,00	100	208.586.000,00	100	584.131.479,00	100	482.968.500,00	100	82,68	83	691.554.500,00	83	68,85	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	3	294.992.800,00	0	0	3	206.359.500,00	3	196.387.500,00	100	95,17	95	196.387.500,00	3166,67	66,57	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen	5	10.000.000,00	0	0	5	5.000.000,00	5	4.275.000,00	100	85,5	86	4.275.000,00	1720	42,75	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.0009	Pen didikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20	699.392.000,00	37	208.586.000,00	20	372.771.979,00	20	282.306.000,00	100	75,73	76	490.892.000,00	380	70,19	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD sesuai ketentuan	Persen	100	4.655.013.468,00	100	1.175.172.776,00	100	1.194.985.730,00	100	1.111.446.716,00	100	93,01	93	2.286.619.492,00	93	49,12	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	paket	10	1.405.307.419,00	1	548.942.239,00	10	190.262.780,00	10	190.178.600,00	100	99,96	100	739.120.839,00	1000	52,59	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	paket	15	353.446.937,00	6	88.811.437,00	15	102.651.500,00	15	102.118.800,00	100	99,48	99	190.930.237,00	660	54,02	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	10	76.558.000,00	2	26.000.000,00	10	23.760.000,00	10	23.759.000,00	100	100	100	49.759.000,00	1000	65	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	5	273.314.901,00	2	48.900.000,00	5	124.916.000,00	5	116.000.000,00	100	92,86	93	164.900.000,00	1860	60,33	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	338.704.800,00	0	0	12	80.025.000,00	12	79.828.600,00	100	99,75	100	79.828.600,00	833,33	23,57	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	1.576.520.656,00	20	286.904.400,00	30	461.366.000,00	30	404.262.376,00	100	87,62	88	691.166.776,00	293,33	43,84	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	89.998.055,00	0	0	1	53.544.450,00	1	52.959.910,00	100	98,91	99	52.959.910,00	9900	58,85	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	511.119.400,00	12	130.169.400,00	3	158.460.000,00	3	142.339.430,00	100	89,83	90	272.508.830,00	750	53,32	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	100	1.705.797.000,00	100	1.332.091.026,00	100	784.185.000,00	100	753.640.000,00	100	96,1	96	2.085.731.026,00	96	122,27	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	50.000,00	3	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	100	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	100	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	15	88.275.000,00			15	58.275.000,00	15	50.250.000,00	100	86,23	86	50.250.000,00	573,33	56,92	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	71	1.587.472.000,00			71	725.910.000,00	71	703.390.000,00	100	96,9	97	703.390.000,00	136,62	44,31	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen	100	6.586.402.332,00	100	1.400.964.548,00	100	1.993.634.972,00	100	1.934.323.125,00	100	97,02	97	3.335.287.673,00	97	50,64	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	18	203.230.000,00	12	44.498.000,00	12	49.962.000,00	12	46.583.500,00	100	93,24	93	91.081.500,00	516,67	44,82	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.080.126.727,00	12	270.371.183,00	12	298.260.000,00	12	295.241.214,00	100	98,99	99	565.612.397,00	825	52,37	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.002.730.100,00	9	570.059.500,00	12	951.346.000,00	12	908.532.600,00	100	95,5	95	1.478.592.100,00	791,67	49,24	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.300.315.505,00	12	516.036.865,00	12	694.066.972,00	12	683.965.811,00	100	98,54	99	1.200.002.676,00	825	52,17	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi		100	4.722.606.468,00	100	1.332.091.026,00	100	1.422.726.242,00	100	1.340.826.917,00	100	94,24	94	2.672.917.943,00	94	56,6	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	534.621.300,00	6	234.847.600,00	3	148.521.900,00	3	142.948.123,00	100	96,25	96	377.795.723,00	3200	70,67	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	1.317.543.712,00	14	268.418.990,00	18	390.175.972,00	18	366.401.184,00	100	93,91	94	634.820.174,00	522,22	48,18	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	62.123.500,00			4	20.000.000,00	4	19.131.000,00	100	95,66	96	19.131.000,00	2400	30,8	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	123	930.629.506,00	11	232.709.506,00	37	364.686.250,00	37	327.164.912,00	100	89,71	90	559.874.418,00	73,17	60,16	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	912.321.300,00	1	296.313.300,00	1	147.082.000,00	1	144.690.100,00	100	98,37	98	441.003.400,00	9800	48,34	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	965.367.150,00	1	299.801.630,00	163	352.260.120,00	163	340.491.598,00	100	96,66	97	640.293.228,00	808,33	66,33	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Persenta se	100	61.420.479.064,00	100	15.428.284.944,00	100	16.132.226.696,00	100	15.555.427.719,00	100	96,42	96	30.983.712.663,00	96	50,45	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bu lan	30	60.210.707.064,00	30	15.177.430.944,00	30	15.757.226.696,00	30	15.230.139.219,00	100	96,65	97	30.407.570.163,00	323,33	50,5	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	120	1.091.648.000,00	90	248.730.000,00	120	330.000.000,00	120	321.500.000,00	100	97,42	97	570.230.000,00	80,83	52,24	Sekretariat DPRD	

	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	118.124.000,00	2	2.124.000,00	30	45.000.000,00	2	3.788.500,00	6,67	8,42	80	5.912.500,00	266,67	5,01	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Persentase	100	9.352.054.900,00	100	130.994.500,00	100	94.297.500,00	100	93.801.000,00	100	99,47	99	224.795.500,00	99	2,4	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	5.100.000,00	0	0	1	1.800.000,00	1	1.440.000,00	100	80	80	1.440.000,00	8000	28,24	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12	187.788.400,00	6	34.994.500,00	7	49.997.500,00	7	49.991.000,00	100	99,99	100	84.985.500,00	833,33	45,26	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	9.159.166.500,00	9	96.000.000,00	12	42.500.000,00	12	42.370.000,00	100	99,69	100	138.370.000,00	833,33	1,51	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
	04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	71.526.161.814,00	78,53	16.346.847.963,00	74	28.092.688.564,00	85,07	23.749.197.195,00	114,9594595	84,54	85	40.096.045.158,00	114,86	56,06	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana	persen	100	5.214.421.093,00	100	731.490.810,00	100	1.563.312.820,00	100	1.081.581.654,00	100	69,19	69	1.813.072.464,00	69	34,77	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	712.317.600,00	1	97.041.400,00	1	256.689.200,00	1	142.256.908,00	100	55,42	55	239.298.308,00	5500	33,59	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	2.803.484.443,00	6	560.460.360,00	8	770.559.620,00	8	595.276.717,00	100	77,25	77	1.155.737.077,00	962,5	41,23	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	299.496.000,00	1	38.000.000,00	1	104.598.000,00	1	53.370.000,00	100	51,02	51	91.370.000,00	5100	30,51	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	1	1.280.991.050,00	1	35.991.050,00	1	325.000.000,00	1	281.106.629,00	100	86,49	86	317.097.679,00	8600	24,75	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	118.132.000,00	0	0	1	106.466.000,00	1	9.571.400,00	100	8,99	90	9.571.400,00	9000	8,1	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	2.143.465.530,00	100	528.863.790,00	100	484.675.176,00	100	473.655.357,00	100	97,73	98	1.002.519.147,00	98	46,77	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	508.161.530,00	1	218.442.790,00	1	178.358.176,00	1	175.491.857,00	100	98,39	98	393.934.647,00	9800	77,52	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	125.474.000,00	1	27.480.000,00	1	5.819.000,00	1	4.050.000,00	100	69,6	70	31.530.000,00	7000	25,13	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	931.066.500,00	1	188.721.000,00	1	282.160.000,00	1	277.463.500,00	100	98,34	98	466.184.500,00	9800	50,07	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	206.426.500,00	1	51.850.000,00	1	7.319.000,00	1	5.850.000,00	100	79,93	80	57.700.000,00	8000	27,95	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	9.545.000,00	1	1.695.000,00	1	100.000,00	1	0	100	0	100	1.695.000,00	10000	17,76	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggunjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggunjawaban APBD	Dokumen	1	362.792.000,00	1	40.675.000,00	1	10.919.000,00	1	10.800.000,00	100	98,91	99	51.475.000,00	9900	14,19	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	1.345.132.997,00	100	219.413.500,00	100	275.970.000,00	100	268.725.000,00	100	97,37	96	488.138.500,00	96	36,29	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	15	113.816.000,00	15	18.556.000,00	15	5.500.000,00	15	4.500.000,00	100	81,82	82	23.056.000,00	546,67	20,26	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	15	108.310.000,00	15	18.560.000,00	15	4.500.000,00	15	4.410.000,00	100	98	98	22.970.000,00	653,33	21,21	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	15	96.235.000,00	15	18.425.000,00	15	4.500.000,00	15	4.500.000,00	100	100	0	22.925.000,00	0	23,82	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	15	96.010.000,00	15	18.200.000,00	15	4.275.000,00	15	4.275.000,00	100	100	1	22.475.000,00	6,67	23,41	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	15	96.235.000,00	15	18.425.000,00	15	3.825.000,00	15	3.825.000,00	100	100	10	22.250.000,00	66,67	23,12	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	151.555.000,00	1	20.400.000,00	1	15.420.000,00	1	11.025.000,00	100	71,5	71	31.425.000,00	7100	20,74	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	508.299.998,00	1	67.810.000,00	1	216.280.000,00	1	214.605.000,00	100	99,23	99	282.415.000,00	9900	55,56	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	174.671.999,00	1	39.097.500,00	1	21.670.000,00	1	21.585.000,00	100	99,61	10	60.682.500,00	1000	34,74	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	8.884.612.695,00	100	2.259.009.595,00	100	2.397.793.800,00	100	1.346.451.483,00	100	56,15	56	3.605.461.078,00	56	40,58	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	30	762.835.800,00			30	762.835.800,00	30	306.070.300,00	100	40,12	40	306.070.300,00	133,33	40,12	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	90	5.870.063.595,00	150	1.800.859.595,00	90	1.171.394.000,00	90	612.306.183,00	100	52,27	52	2.413.165.778,00	57,78	41,11	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dokumen		902.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	135.000.000,00	7	252.000.000,00	7	252.000.000	7	222.000.000,00	100	88,1	88	474.000.000,00	1257,14	351,11	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	1.008.000.000,00	0	0	12	5.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	189.965.300,00	1	2.400.000,00	1	6.399.000,00	1	6.075.000,00	100	94,94	95	8.475.000,00	9500	4,46	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	40	15.998.000,00	55	203.750.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	100	100	10	403.750.000,00	25	2.523,75	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05	PENERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir	Persen	100	3.447.790.150,00	100	874.966.150,00	100	736.793.700,00	100	639.515.150,00	100	86,8	87	1.514.481.300,00	87	43,93	Sekretariat DPRD	

4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	30	106.400.000,00	30	18.550.000,00	30	20.000.000,00	30	19.999.500,00	100	100	10	38.549.500,00	33,33	36,23	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	3.341.390.150,00	90	856.416.150,00	60	716.793.700,00	60	619.515.650,00	100	86,43	86	1.475.931.800,00	143,33	44,17	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.06	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	100	47.650.000,00	100	0	100	12.470.000,00	100	7.470.000,00	100	59,9	60	7.470.000,00	60	15,68	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	15.000.000,00	0	0	1	5.000.000,00	1	0	100	0	100	0	10000	0	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	32.650.000,00	0	0	1	7.470.000,00	1	7.470.000,00	100	100	10	7.470.000,00	1000	22,88	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.07	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	Persentase Kerja Sama Daerah	Persen	100	212.450.000,00	0	0	100	85.828.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	17.450.000,00	0	0	1	828.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1	195.000.000,00	0	0	1	85.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	persen	100	45.524.794.986,00	100	11.733.102.118,00	100	22.535.845.068,00	100	19.931.798.551,00	100	88,44	88	31.664.900.669,00	88	69,56	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	450	45.305.559.386,00	670	11.717.902.118,00	450	22.503.189.468,00	487	19.900.748.551,00	108,22	88,44	88	31.618.650.669,00	19,56	69,79	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	103.895.600,00			1	26.715.600,00	1	26.550.000,00	100	99,38	99	26.550.000,00	9900	25,55	Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	105.340.000,00	30	15.200.000,00	12	5.940.000,00	12	4.500.000,00	100	75,76	76	19.700.000,00	633,33	18,7	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												87,50	69,45						
Predikat Kinerja												Tinggi	Sedang						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								55.252.103.808		49.657.778.645									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												87,50	69,45						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Tinggi	Sedang						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.
- c.

Urusan Pengawasan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	Satuan	K	5 Rp	K	6 Rp	K	7 Rp	K	8 Rp	K	9 Rp	K	10 Rp	K	11 Rp	12	13
			Indikator																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%			100	6.680.571.197	94	7.030.595.725	100	6.775.035.746	106,38	96,37	200	13.455.606.943	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.01	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%			100	26.605.700	90	12.183.400	87,5	11.983.589	97,22	98,36	187,5	38.589.289	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok			4	8.995.900	4	2.381.500	4	2.381.500	100	100	8	11.377.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap			4	17.609.800	4	9.801.900	4	9.602.089	100	97,96	8	27.211.889	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.02	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%			100	6.161.535.037	100	6.653.726.505	100	6.463.155.388	100	97,14	200	12.624.690.425	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
			Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%			100		100		87,5		87,5		187,5	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan			100	5.910.583.407	12	6.503.130.078	12	6.318.109.050	100	97,15	112	12.228.692.457	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok			100	241.511.630	460	148.916.127	417	144.286.338	90,65	96,89	517	385.797.968	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan			2	9.440.000	12	1.680.300	12	1.380.000	100	82,13	14	10.820.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%			100	313.906.008	100	135.983.320	100	133.304.512	100	98,03	200	447.210.520	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi	%			100		100		100	0	100		200	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket			100	74.969.397	12	35.775.100	12	33.405.000	100	93,38	112	108.374.397	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	paket			100	8.350.000	2	9.750.000	2	9.700.000	100	99,49	102	18.050.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	

6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	laporan				100	14.999.000	12	15.000.000	12	14.999.000	100	99,99	112	29.998.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan				100	215.587.611	12	75.458.220	12	75.200.512	100	99,66	112	290.788.123	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
6.01.01.2.08	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	%				100	65.926.652	100	121.920.000	100	64.542.412	100	52,94	200	130.469.064	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan				100	65.926.652	12	121.920.000	12	64.542.412	100	52,94	112	130.469.064	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
6.01.01.2.09	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%				100	60.052.800	100	106.782.500	100	101.429.845	100	94,99	200	161.482.645	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit				100	19.837.800	13	68.754.000	13	64.606.845	100	93,97	113	84.444.645	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit				100	33.504.500	42	31.302.500	42	30.106.000	100	96,18	142	63.610.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung				100	6.710.500	1	6.726.000	1	6.717.000	100	99,87	101	13.427.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													99,44	88,29						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	%	165		71,42	564.131.933	75	267.561.400	75	930.908.203	100	347,92	146	1.495.040.136	195	559	Inspektorat		
		Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	378		190	945.035.314	91	560.134.900	95		103,89	-	285	945.035.314	313	169			
		Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	200		100	215.594.900	100	131.746.200	100		100	-	200	215.594.900	200	164			
6.01.02.2.01	Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah memperoleh SAKIP Nilai A	%			71,42	564.131.933	75	827.696.300	75	801.367.103	100	96,82	146	1.365.499.036	195	165			
		Persentase perangkat daerah yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material	%					91		92,85										
		Persentase tindaklanjut yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan	%					91		94,54										
6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan			39	368.943.108	48	131.509.800	69	131.157.006	143,75	99,73	108	500.100.114	225	380			
6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan			29	195.188.825	24	136.051.600	30	129.612.250	125	95,27	59	324.801.075	246	239			
6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan			31	638.891.274	48	299.101.700	75	295.285.198	156,25	98,72	106	934.176.472	221	312			
6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan			43	173.854.400	24	200.691.700	43	188.888.300	179,17	94,12	86	362.742.700	358	181			
6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakan			1	78.660.500	1	27.911.000	1	26.977.000	100	96,65	2	105.637.500	200	378			
6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen			4	53.629.140	4	32.430.500	4	29.447.349	100	90,8	8	83.076.489	200	256			
6.01.02.2.02	Keg Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	200		100	215.594.900	100	131.746.200	100	129.541.100	100	98,33	200	345.136.000	200	262			
		Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai terkait kerugian daerah	%			100		100		89		89,47		189	0	189	#DIV/0!			
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan			4	9.692.400	4	304.000	4	303.900	100	99,97	8	9.996.300	200	3288			
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan			27	205.902.500	24	131.442.200	24	129.237.200	100	98,32	51	335.139.700	213	255			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	97,05						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIYAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP	Level	6		3	706.551.500	3	85.072.900	3	80.185.964	100	94,26	6	786.737.464	200	925			
6.01.03.2	Keg Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinis"	%			57	96.597.100	66	27.550.000	100	27.520.914	151,52	99,89	157	124.118.014	238	451			
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%			66	609.954.400	64	57.522.900	87	41.141.700	135,94	71,52	153	651.096.100	239	1132			
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangka t Daerah			28	96.597.100	27	27.550.000	28	27.520.914	103,7	99,89	56	124.118.014	207	451			
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan			7	609.954.400	7	57.522.900	7	52.665.050	100	91,55	14	662.619.450	200	1152			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													143,73	85,71	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										8.075.111.125		7.786.129.913				7786129913	#DIV/0!	96		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													121,59	87,00						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi		0	#DIV/0!	#DIV/0!		

Faktor Penghambat :

- a. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

Urusan Perencanaan

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PERENCANAAN																				
1	05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	%	100	22.076.447.487,00	100	962.814.520,00	95	1.340.123.500,00	100	1.239.883.629,00	105,26	92,52	200	2.202.698.149,00	200	9,98	Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	%			111	725.316.678,00	95	1.273.511.500,00	100	1.177.307.013,00	105,26	92,45	211	1.902.623.691,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara			1	76.495.228,00	2	98.098.000,00	4	90.141.874,00	200	91,89	5	166.637.102,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen			2	648.821.450,00	4	1.175.413.500,00	4	1.087.165.139,00	100	92,49	6	1.735.986.589,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.02	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persentase			95	237.497.842,00	100	13.875.000,00	100	13.363.402,00	100	96,31	195	250.861.244,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen			2	648.821.450,00	4	13.875.000,00	4	13.363.402,00	100	96,31	6	662.184.852,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.03	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase laporan hasil pengendalian evaluasi yang disusun secara tepat waktu	Persentase			95	112.248.676,00	100	52.737.000,00	100	49.133.214,00	100	93,17	195	161.381.890,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Kerjasama			100	750.000,00	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00	100	100	101	2.325.000,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	dokumen laporan			4	111.498.676,00	4	51.162.000,00	4	47.558.214,00	100	92,96	8	159.056.890,00			Bappeda Litbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													101,75	93,98						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang menyusun dokumen berkualitas baik	%	100%	4.530.557.750,00	100	597.675.379,00	100	620.960.250	100	584.625.460,00	100	94,15	200	1.182.300.839,00	20.000,00	26,1	Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.01	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Prosentase perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase			100	597.675.379,00	100	324.466.700	100	289.672.751,00	100	89,28	200	887.348.130,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Laporan			34	83.540.439,00	30	136.215.000	25	109.520.392,00	83,33	80,4	59	193.060.831,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	Laporan			27	151.258.151,00	6	188.251.700	7	180.152.359,00	116,67	95,7	34	331.410.510,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.02	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Prosentase perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase			100	156.411.882,00	100	146.405.050	100	145.383.112,00	100	99,3	200	301.794.994,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan			6	87.525.684,00	6	70.367.800	6	70.077.804,00	100	99,59	12	157.603.488,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan			4	68.886.198,00	4	76.037.250	4	75.305.308,00	100	99,04	8	144.191.506,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.03	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase			100	206.464.907,00	100	150.088.500	100	149.569.597,00	100	99,65	200	356.034.504,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renja/Renstra dengan RKPD/RPJMD pda bidang Infrastruktur	Laporan			16	117.339.490,00	4	79.803.000	4	79.597.605,00	100	99,74	20	196.937.095,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renja/Renstra dengan RKPD/RPJMD pda bidang Kewilayahan	Laporan			16	89.125.417,00	6	70.285.500	6	69.971.992,00	100	99,55	22	159.097.409,00			Bappeda Litbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	89,88						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						
	05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program minimal 80%	Persentase	90	9.704.496.000,00	85	6.818.947.745,00	100	6.782.536.163,00	100	6.782.321.428,00	100	100	185	13.601.269.173,00	205,56	140,15	Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah program minimal 80%	Persentase			100	42.107.080,00	87	38.737.992	95	38.691.954,00	109,2	99,88	195	80.799.034,00			Bappeda Litbang	

5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen			4	41.103.280,00	4	37.382.355	4	37.336.554,00	100	99,88	8	78.439.834,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan			4	1.003.800,00	4	1.355.637	4	1.355.400,00	100	99,98	8	2.359.200,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase			100	5.824.972.980,00	100	5.745.815.952	100,31	5.674.709.142,00	100,31	98,76	200,31	11.499.682.122,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang			100	5.620.547.380,00	61	5.640.961.352	61	5.570.126.646,00	100	98,74	161	11.190.674.026,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Laporan			2	113.579.900,00	2	104.854.600	3	104.582.496,00	150	99,74	5	218.162.396,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi BMD perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase			100	1.438.000,00	100	3.314.000	100	3.298.000,00	100	99,52	200	4.736.000,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.03.00006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	3.314.000	1	3.298.000,00	100	99,52	1	3.298.000,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentaaun	Persentase			80	8.082.950,00	90	5.260.000	100	1.347.850,00	111,11	25,62	180	9.430.800,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.05.00009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang			80	5.714.200,00	2	3.130.000	0	0	0	0	80	5.714.200,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang			80	2.368.750,00	2	2.130.000	1	1.347.850,00	50	63,28	81	3.716.600,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi umum PD sesuai ketentuan	Persentase			100	326.829.034,00	100	292.040.005	100	276.942.689,00	100	94,83	200	603.771.723,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			6	56.368.450,00	5	67.275.100	20	67.067.500,00	400	99,69	26	123.435.950,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket			1	4.839.400,00	3	5.283.800	12	11.761.000,00	400	222,59	13	16.600.400,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			3	7.949.900,00	4	12.312.500	9	11.959.800,00	225	97,14	12	19.909.700,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			6	9.315.000,00	12	9.720.000	12	9.720.000,00	100	100	18	19.035.000,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan			1	7.184.000,00	6	10.000.000	12	9.922.500,00	200	99,23	13	17.106.500,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen			1	150.835.349,00	12	84.103.605	12	83.529.139,00	100	99,32	13	234.364.488,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen			1	90.336.935,00	12	103.345.000	12	89.555.250,00	100	86,66	13	179.892.185,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase			100	30.500.000,00	100	159.000.000	183,06	145.175.000,00	183,06	91,31	283,06	175.675.000,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			4	30.500.000,00	4	159.000.000	16	145.175.000,00	400	91,31	20	175.675.000,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi	Persentase			100	421.181.132,00	100	411.634.443	100	410.227.431,00	100	99,66	200	831.408.563,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan			12	122.536.012,00	12	124.325.000	12	123.260.294,00	100	99,14	24	245.796.306,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			2	298.645.120,00	12	287.309.443	12	286.967.137,00	100	99,88	14	585.612.257,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam Kondisi baik	Persentase			86	163.836.569,00	100	240.899.300	101,74	231.929.362,00	101,74	96,28	187,74	395.765.931,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			1	27.610.000,00	1	23.964.300	4	23.701.475,00	100	98,9	5	51.311.475,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit			13	50.001.999,00	12	55.717.500	21	55.182.279,00	175	99,04	34	105.184.278,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			4	24.708.500,00	4	31.000.000	8	23.404.000,00	200	75,5	12	48.112.500,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit			1	49.536.070,00	1	120.325.000	5	119.891.608,00	100	99,64	6	169.427.678,00			Bappeda Litbang	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit			1	11.980.000,00	1	9.892.500	5	9.750.000,00	100	98,56	6	21.730.000,00			Bappeda Litbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												113,18	88,23						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							9.151.208.463	100,00	8.606.830.517										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												101,75	95,56						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b.

Urusan Keuangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		5 BELANJA DAERAH								46.333.542.487,00										
3	05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	97	0	97	38.983.948.022,00	97	38.920.442.802,00	97	35.146.729.357,00	100	90,3	194	74.130.677.379,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
4	5.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	96	0	96	85.511.520,00	96	22.006.300,00	96	21.307.149,00	100	96,82	192	106.818.669,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
5	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5		5	85.511.520,00	5	17.506.300,00	5	16.934.399,00	100	96,73	10	102.445.919,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
6	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7		7	4.500.000,00	7	4.372.750,00	7		100	97,17	102	35.703.908.972,00	1457	#DIV/0!	BPPKAD	
7	5.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	95	0	95	35.699.536.222,00	20	35.699.536.222,00	20	32.086.850.061,00	100	89,88	281	67.633.788.983,00	296	#DIV/0!	BPPKAD	
8	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	261		261	35.546.938.922,00	261	35.546.938.922,00	261	31.947.909.772,00	100	89,88	6.393	32.074.443.872,00	2449	#DIV/0!	BPPKAD	
9	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danmmpengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6132		6132	126.534.100,00	4599	126.534.100,00	4.599	113.823.289,00	100	89,95	10.731	113.823.289,00	175	#REF!	BPPKAD	
10	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	Laporan	33		33	26.063.200,00	33	26.063.200,00	33	25.117.000,00	100	96,37	66	51.180.200,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
11	5.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persentase	94		94	80.757.000,00	94	80.757.000,00	94	77.974.152,00	100	96,55	188	158.731.152,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
12	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20		20	80.757.000,00	20	80.757.000,00	20	77.974.152,00	100	96,55	40	158.731.152,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
13	5.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persentase	95		95	808.880.192,00	95	808.880.192,00	95	753.573.193,00	100	93,16	190	1.562.453.385,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
14	5.02.01.2.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	180		180	787.840.192,00	180	787.840.192,00	180	747.716.393,00	100	94,91	360	1.535.556.585,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
15	5.02.01.2.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15		15	21.040.000,00	15	21.040.000,00	1	5.856.800,00	7	27,84	16	26.896.800,00	107	#DIV/0!	BPPKAD	
16	5.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	96		96	1.095.117.088,00	96	1.095.117.088,00	96	1.037.257.151,00	100	94,72	192	2.132.374.239,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
17	5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	26		216	224.450.000,00	60	224.450.000,00	60	208.194.000,00	100	92,76	276	432.644.000,00	1062	#DIV/0!	BPPKAD	
18	5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7		7	60.560.000,00	7	60.560.000,00	7	45.740.000,00	100	75,53	14	106.300.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
19	5.02.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4		4	60.200.000,00	4	60.200.000,00	4	60.119.000,00	100	99,87	8	120.319.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
20	5.02.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12	424.887.088,00	12	424.887.088,00	12	417.828.748,00	100	98,34	24	842.715.836,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
21	5.02.01.2.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12		12	325.020.000,00	12	325.020.000,00	12	305.375.403,00	100	93,96	24	630.395.403,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
22	5.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase	96		96	192.750.000,00	96	192.750.000,00	96	190.000.000,00	100	98,57	192	382.750.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
23	5.02.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7		7	192.750.000,00	8	192.750.000,00	8	190.000.000,00	100	98,57	15	382.750.000,00	214	#DIV/0!	BPPKAD	
24	5.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase	96		96	451.647.200,00	97	451.647.200,00	97	437.386.214,00	100	96,84	193	889.033.414,00	201	#DIV/0!	BPPKAD	
25	5.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13		13	413.680.000,00	13	413.680.000,00	13	406.799.214,00	100	98,34	26	820.479.214,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
26	5.02.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36		36	37.967.200,00	36	37.967.200,00	36	30.587.000,00	100	80,56	72	68.554.200,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
27	5.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpelihara	Persentase	94		94	569.748.800,00	94	569.748.800,00	94	560.900.893,00	100	98,45	188	1.130.649.693,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
28	5.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34		34	220.498.800,00	34	220.498.800,00	34	218.923.544,00	100	99,29	68	439.422.344,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
29	5.02.01.2.09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	235		235	226.750.000,00	235	226.750.000,00	235	225.731.500,00	100	99,55	470	452.481.500,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	

30	5.02.01.2.09.0010	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69		69	122.500.000,00	69	122.500.000,00	69	116.245.849,00	100	94,89	138	238.745.849,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100	95,45							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
31	05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang Tepat	Persenta se	100		100	5.252.026.230,00	100	5.164.508.630,00	100	4.521.529.627,00	100	87,55	200	9.773.555.857,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	246		246	1.682.812.513,00	246	1.848.902.600,00	246	1.580.679.932,00	100	85,49	492	3.263.492.445,00	20024	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.01.0001	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2		2	637.892.015,00	2	719.044.800,00	2	648.163.039,00	100	90,14	4	1.286.055.054,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN DAN PERUBAHAN PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2		2	56.273.510,00	2	61.000.000,00	2	52.846.025,00	100	86,63	4	109.119.535,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.01.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2		2	200.939.046,00	2	144.448.500,00	2	117.923.350,00	100	81,64	4	318.862.396,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.01.0008	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TETANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2		2	752.257.442,00	2	905.954.300,00	2	743.300.768,00	100	82,05	4	1.495.558.210,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.01.0010	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	12		12	35.450.500,00	12	18.455.000,00	12	18.446.750,00	100	99,96	24	53.897.250,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.02	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan dengan Tepat	SKPD	28		28	1.031.606.157,00	28	851.103.300,00	28	820.208.020,00	100	96,37	56	1.851.814.177,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.02.0001	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2617		2617	35.450.500,00	2617	95.641.000,00	2.617	93.399.108,00	100	97,66	5.234	128.849.608,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.02.0003	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	632		632	77.305.500,00	632	77.305.500,00	632	77.166.273,00	100	99,82	1.264	154.471.773,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi pengelolaan Dana perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	10		10	28.570.000,00	10	28.570.000,00	10	28.567.000,00	100	99,99	20	57.137.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	3		3	97.299.000,00	2	77.136.000,00	2	63.506.064,00	100	82,33	5	160.805.064,00	167	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	20		20	52.382.000,00	20	16.458.000,00	20	16.264.650,00	100	98,83	40	68.646.650,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.02.0011	PEMBINAAN PEN ATAU SAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Orang yg Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Orang	156		156	740.599.157,00	156	555.992.800,00	156	541.304.925,00	100	97,36	312	1.281.904.082,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.03	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persenta se	100		100	642.936.060,00	100	377.365.000,00	100	376.478.454,00	100	99,77	200	1.019.414.514,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.03.0002	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDATAAN, BELANJA, PEMBIAYAAN,PENDAPATAN- LO DAN BEBAN	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO, dan Beban	Dokumen	312		312	161.613.160,00	492	152.686.000,00	492	152.157.108,00	100	99,65	804	313.770.268,00	258	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.03.0003	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	17		17	94.009.290,00	17	75.781.500,00	17	75.547.082,00	100	99,69	34	169.556.372,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.03.0004	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	36		36	233.115.000,00	35	59.245.000,00	35	59.191.700,00	100	99,91	71	292.306.700,00	197	#DIV/0!	BPPKAD	
	5.02.02.2.03.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN / KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN / KOTA	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2		2	49.186.510,00	2	44.562.500,00	2	44.544.900,00	100	99,96	4	93.731.410,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	

	5.02.02.2.03.0010	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2		2	5.069.000,00	2	2.000.000,00	2	1.990.000,00	100	99,5	4	7.059.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.02.2.03.0011	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	75		75	99.943.100,00	2	43.090.000,00	75	43.047.664,00	3750	99,9	150	142.990.764,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.02.2.04	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100		100	1.894.671.500,00	100	2.087.137.730,00	100	1.744.163.221,00	100	83,57	200	3.638.834.721,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.03.5.02.03.2.01	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100		100	1.894.671.500,00	100	2.087.137.730,00	100	1.744.163.221,00	100	83,57	200	3.638.834.721,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	91,3								
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel	Persentase	88		88	411.940.250,00	88	411.940.250,00	88	409.199.630,00	100	99,33	176	821.139.880,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.03.5.02.03.2.01	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel	Persentase	88		88	411.940.250,00	88	411.940.250,00	88	409.199.630,00	100	99,33	176	821.139.880,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.03.2.01.0001	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2		2	7.225.000,00	2	7.225.000,00	2	7.211.450,00	100	99,81	4	14.436.450,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2		2	6.280.000,00	2	6.280.000,00	2	6.280.000,00	100	100	4	12.560.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan BMD	Laporan	28		28	56.698.000,00	28	56.698.000,00	28	56.484.954,00	100	99,62	56	113.182.954,00			BPPKAD		
	5.02.03.2.01.0007	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	50		50	241.454.250,00	35	241.454.250,00	35	240.310.558,00	100	99,53	85	481.764.808,00	170	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.03.2.01.0010	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGINAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	10		10	94.483.000,00	10	94.483.000,00	10	93.242.668,00	100	98,69	20	187.725.668,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.03.2.01.0012	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1		1	5.800.000,00	1	5.800.000,00	1	5.670.000,00	100	97,76	2	11.470.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	99,33								
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase	3		3	1.840.560.805,00	3	1.836.650.805,00	3	1.747.679.582,00	100	95,16	6	3.588.240.387,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase	3		3	1.840.560.805,00	3	1.836.650.805,00	3	1.748.016.600,51	100	95,17	6	3.588.577.405,51	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0004	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	35		35	82.103.200,00	35	63.062.000,00		63.000.000,00	0	99,9	35	145.103.200,00	100	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0005	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	55		55	562.504.850,00	55	573.702.572,00	55	557.762.559,00	100	97,22	110	1.120.267.409,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0006	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2500		2500	36.973.600,00	2500	52.874.200,00	2.407	51.374.200,00	96	97,16	4.907	88.347.800,00	196	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0007	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pemutakhiran data	Obyek Pajak	3000		3000	410.723.965,00	3000	336.847.583,00	2.266	305.068.577,00	76	90,57	5.266	715.792.542,00	176	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0008	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	75000		75000	6.056.500,00	75000	38.176.000,00	85.899	36.956.120,00	115	96,8	160.899	43.012.620,00	215	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0009	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	14000		14000	38.267.300,00	14000	47.910.300,00	14.000	46.964.318,00	100	98,03	28.000	85.231.618,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0011	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	75000		75000	510.314.390,00	75000	507.463.150,00	61.316	488.373.808,00	82	96,24	136.316	998.688.198,00	182	#DIV/0!	BPPKAD		
	5.02.04.2.01.0013	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	25		25	193.617.000,00	25	216.615.000,00	25	198.180.000,00	100	91,49	50	391.797.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	99,90								
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									46.333.542.487			41.825.138.196									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												100,00	96,50								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d	Target Kinerja dan Anggaran RKPD	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Unit SKPD Penanggung	Ket
----	------	--	---	--	---	----------------------------------	--	---	--	--	----------------------	-----

	Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		2024 (periode RPJMD)		RKPD tahun lalu (2023)		Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Dievaluasi (2024)		Realisasi Anggaran RKPD tahun 2024 (%)		Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							64,04	7.007.642.650,00	64,5	7.025.305.004,00	78,32	6.659.316.842,00	121,43	94,79	142,36	13.666.959.492,00			BKPSDM	
	5.3	KEPEGAWAIAN						6.697.995.550,00		6.588.993.904,00		6.266.809.955,00		95,11		12.964.805.505,00			BKPSDM	
	05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	82,25	32.365.174.785,00	100	5.537.324.942,00	84	6.056.268.174,00	82,29	5.900.881.350,00	97,97	97,43	182,29	11.438.206.292,00	221,63	35,34	BKPSDM	
	5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persentase			72,73	1.468.000,00	100	54.983.000,00	101,1	52.772.250,00	101,1	95,98	173,83	54.240.250,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			5	498.000,00	5	3.218.000,00	5	3.183.000,00	100	98,91	10	3.681.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			11	970.000,00	12	51.765.000,00	12	49.589.250,00	100	95,8	23	50.559.250,00			BKPSDM	
	5.3.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase			109,03	4.890.284.021,00	100	5.260.055.919,00	184,87	5.133.394.473,00	184,87	97,59	293,9	10.023.678.494,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			167	4.797.248.421,00	43	5.248.694.919,00	166	5.124.978.973,00	386,05	97,64	333	9.922.227.394,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			483	91.520.600,00	450	9.781.000,00	783	6.840.500,00	174	69,94	1266	98.361.100,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan			2	1.515.000,00	2	1.580.000,00	2	1.575.000,00	100	99,68	4	3.090.000,00			BKPSDM	
	5.3.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase			77,11	286.655.934,00	100	292.135.548,00	10,79	279.403.749,00	10,79	95,64	87,9	566.059.683,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			9	83.015.560,00	18	56.445.380,00	13	49.601.630,00	72,22	87,88	22	132.617.190,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			9	39.023.500,00	15	24.868.100,00	10	22.989.500,00	66,67	92,45	19	62.013.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			12	33.197.500,00	7	40.105.500,00	7	37.771.000,00	100	94,18	19	70.968.500,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			560	3.360.000,00	730	4.380.000,00	7	4.340.000,00	0,96	99,09	567	7.700.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			11	13.091.500,00	12	15.000.000,00	12	14.217.600,00	100	94,78	23	27.309.100,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			28	48.042.700,00	40	85.588.893,00	29	84.736.443,00	72,5	99	57	132.779.143,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen			12	66.925.174,00	12	65.747.675,00	12	65.747.576,00	100	100	24	132.672.750,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persentase			0	0	100	126.098.000,00	100	125.710.000,00	100	99,69	100	125.710.000,00				
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0	0	14	126.098.000,00	14	125.710.000,00	100	99,69	14	125.710.000,00				
	5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksana an yang Terpenuhi	persentase			77,78	228.804.506,00	100	209.547.206,00	53,33	203.088.442,00	53,33	96,92	131,11	431.892.948,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			5	780.000,00	20	0	0	0	0	0	5	780.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	113.400.376,00	12	112.022.500,00	12	105.826.046,00	100	94,47	24	219.226.422,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			13	114.624.130,00	13	97.524.706,00	12	97.262.396,00	92,31	99,73	25	211.886.526,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persentase			112,24	130.112.481,00	100	113.448.501,00	43,65	106.512.436,00	43,65	93,89	155,89	236.624.917,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			5	20.434.500,00	1	25.472.500,00	1	25.284.500,00	100	99,26	6	45.719.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			14	32.330.981,00	15	36.863.000,00	22	35.266.936,00	146,67	95,67	36	67.597.917,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			35	17.313.000,00	109	26.111.070,00	25	21.261.000,00	22,94	81,43	60	38.574.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			0	0	1	25.001.931,00	1	24.700.000,00	100	98,79	1	24.700.000,00			BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													82,29	96,62						
Predikat Kinerja													Tinggi	Sangat Tinggi						
5.3.2002	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Capaian Layanan Kepegawaian	%	95	11.786.637.031,00	112,44	1.160.670.608,00	95	532.725.730,00	100,26	365.928.605,00	105,54	68,69	212,7	1.526.599.213,00	223,89	12,95	BKPSDM		
		Persentase Capaian Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%	76		67,84		77		87,59		113,76		155,43		204,52		BKPSDM		
		Persentase Capaian Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	%	90		135,35		90		129,21		143,56		264,56		293,95		BKPSDM		
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang Terselesaikan	persentase			106,82	414.446.089,00	95	220.534.730,00	95,25	199.575.986,00	100,26	90,5	202,07	614.022.075,00			BKPSDM		

5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dokumen			2	6.406.595,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	100	100	4	8.906.595,00			BKPSDM	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen			543	247.398.994,00	1562	176.331.330,00	1485	158.528.986,00	95,07	89,9	2.028,00	405.927.980,00			BKPSDM	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen			135	9.666.000,00	135	11.705.900,00	133	9.050.000,00	98,52	77,31	268	18.716.000,00			BKPSDM	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen			9	150.974.500,00	5	29.997.500,00	3	29.497.000,00	60	98,33	12	180.471.500,00			BKPSDM	
5.3.2.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sesuai dengan Syarat Jabatan	persentase			121,81	275.293.956,00	90	155.101.602,00	116,29	26.381.771,00	129,21	17,01	238,1	301.675.727,00			BKPSDM	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen			1701	250.640.956,00	1600	152.967.852,00	1907	24.248.021,00	119,19	15,85	3.608,00	274.888.977,00			BKPSDM	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen			359	18.054.200,00	500	2.133.750,00	535	2.133.750,00	107	100	894	20.187.950,00			BKPSDM	
5.3.2.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	persentase			100	384.394.250,00	90	123.250.100,00	100	108.036.850,00	111,11	87,66	200	492.431.100,00			BKPSDM	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen			3	384.394.250,00	3	123.250.100,00	3	108.036.850,00	100	87,66	6	492.431.100,00			BKPSDM	
5.3.2.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yg telah dinilai dan dievaluasi kinerjanya	persentase			90,9	86.536.313,00	97	33.839.298,00	55,66	31.933.998,00	57,38	94,37	146,56	118.470.311,00			BKPSDM	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen			3239	64.944.813,00	14760	5.554.498,00	8057	5.554.498,00	54,59	100	11.296,00	70.499.311,00			BKPSDM	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang			248	1.600.000,00	250	6.311.800,00	260	5.848.000,00	104	92,65	508	7.448.000,00			BKPSDM	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang			47	19.991.500,00	106	21.973.000,00	97	20.531.500,00	91,51	93,44	144	40.523.000,00			BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												99,49	72,38						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang						
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						309.647.100,00		436.311.100,00		392.506.887,00				702.153.987,00			BKPSDM	
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Capaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	%	62,67	7.076.452.176,00	56,18	309.647.100,00	65	436.311.100,00	81,42	392.506.887,00	125,26	89,96	137,6	702.153.987,00	219,57	9,92	BKPSDM	
5.4.2.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	persentase			85,25	58.606.700,00	80	183.824.600,00	118	157.745.687,00	147,5	85,81	203,25	216.352.387,00			BKPSDM	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang			341	58.606.700,00	450	183.824.600,00	531	157.745.687,00	118	85,81	872	216.352.387,00			BKPSDM	
5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase			100	251.040.400,00	80	252.486.500,00	120	234.761.200,00	150	92,98	220	485.801.600,00			BKPSDM	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan			3	251.040.400,00	5	252.486.500,00	6	234.761.200,00	120	92,98	9	485.801.600,00			BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												148,75	89,40						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.025.305.004	6.659.316.842			0,00	6659316842				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												110,18	86,13						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi						

FAKTOR PENDUKUNG :

1 Terdapat pendataan daftar kebutuhan barang untuk setiap bidang pada setiap akan dilakukannya penganggaran.

- | | |
|----|---|
| 1. | Adanya pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah yang menunjang nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui DOU ASN (Dari Oleh Untuk ASN) |
| 2. | Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan efektif antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo dengan pihak-pihak terkait lain yang berwenang dan berkepentingan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. |
| 3. | Adanya kebijakan peningkatan kapasitas ASN berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan secara efektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan mengembangkan kompetensi ASN baik melalui pemberian izin belajar dan/atau tugas belajar maupun melalui pemberian izin belajar dan/atau tugas belajar maupun melalui diklat/seminar/workshop/sejenis; |
| 4. | Adanya ketentuan yang telah mengatur yang telah mengatur mengenai administrasi dan manajemen kepegawaian; |
| 5. | Adanya komitmen untuk segera menyesuaikan diri terhadap peraturan-peraturan mengenai administrasi dan manajemen kepegawaian yang baru. |

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Belum optimalnya penyederhanaan pengelompokan dan klasifikasi jabatan dalam hal penataan jabatan ASN
2. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memadai
3. Belum tersusunnya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara baik yang memuat IKU, IKI, dan Perjanjian Kinerja seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Urusan Penelitian dan Pengembangan

[illegible]

	05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	Persenta se	90		1.691.983.500,00	117,64		471.398.970,00	90		515.688.300	100		261.924.100,00	111,11	50,79	217,64	733.323.070,00	241,82	43,34	BAPPEDDA LITBANG	
	05.05.02.2.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persenta se				100		367.914.780,00	90		425.579.500	100		174.336.892,00	111,11	40,96	200	542.251.672,00			BAPPEDDA LITBANG	
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan				2		367.914.780,00	3		425.579.500	1		174.336.892,00	33,33	40,96	3	542.251.672,00			BAPPEDDA LITBANG	
	05.05.02.2.04	05.05.02.2.05	Persentase Inovasi yang diterapkan di daerah	Persenta se				80		103.484.190,00	93		90.108.800	100		87.587.208,00	107,53	97,2	180	191.071.398,00			BAPPEDDA LITBANG	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Laporan				75		103.484.190,00	5		90.108.800	1		87.587.208,00	20	97,2	76	191.071.398,00			BAPPEDDA LITBANG	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	109,32	69,08						
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sedang						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													564.058.300,00			261.924.100,00								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	109,32	69,08						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Sedang						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11			
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	97	0	95	3.658.156.041,00	97	3.813.365.920,00	164,63	3.568.082.127,00	169,72	93,57	259,63	7.226.238.168,00	268%		Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	0	0	98	45.196.000,00	97	30.776.100,00	99,1	30.500.000,00	102,16	99,1	197,1	75.696.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	7	38.928.000,00	7	4.596.000,00	7	4.596.000,00	100	100	14	43.524.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja SKPD	Laporan	0	0	8	6.268.000,00	8	26.180.100,00	8	25.904.000,00	100	98,95	16	32.172.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	0	0	100	3.043.872.959,00	100	3.229.662.441,00	93,59	3.022.617.518,00	93,59	93,59	193,59	6.066.490.477,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0	0	23	2.887.696.883,00	23	3.152.882.941,00	92	2.947.070.453,00	400	93,47	115	5.834.767.336,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danrnnpengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	5	138.446.376,00	5	68.007.500,00	5	67.851.065,00	100	99,77	10	206.297.441,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD	Laporan	0	0	5	17.729.700,00	5	8.772.000,00	5	7.696.000,00	100	87,73	10	25.425.700,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPESAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	0	0	120	1.970.000,00	95	2.487.500,00	99,5	2.475.000,00	104,74	99,5	219,5	4.445.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Orang	0	0	120	1.970.000,00	120	2.487.500,00	120	2.475.000,00	100	99,5	240	4.445.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	0	0	95	95.041.530,00	95	122.842.810,00	96,84	118.960.972,00	101,94	96,84	191,84	214.002.502,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	0	0	5	20.759.300,00	6	26.095.810,00	6	25.617.300,00	100	98,17	11	46.376.600,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	0	0	3	6.569.800,00	4	6.070.000,00	4	5.410.000,00	100	89,13	7	11.979.800,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Laporan	0	0	6	9.053.500,00	8	10.000.000,00	8	9.593.000,00	100	95,93	14	18.646.500,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	120	58.658.930,00	120	80.677.000,00	120	78.340.672,00	100	97,1	240	136.999.602,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	Persen	0	0	100	336.980.937,00	100	325.877.019,00	92,57	301.677.571,00	92,57	92,57	192,57	638.658.508,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	0	0	12	86.462.217,00	12	88.686.737,00	12	86.645.914,00	100	97,7	24	173.108.131,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	

	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	0	0	12	250.518.720,00	12	237.190.282,00	12	215.031.657,00	100	90,66	24	465.550.377,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	0	0	100	135.094.615,00	100	101.720.050,00	90,3	91.851.066,00	90,3	90,3	190,3	226.945.681,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	0	0	0	0	9	53.563.800,00	9	50.197.641,00	100	93,72	9	50.197.641,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	11	77.134.615,00	3	22.386.250,00	3	17.658.425,00	100	78,88	14	94.793.040,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	7	7.060.000,00	20	15.500.000,00	20	13.995.000,00	100	90,29	27	21.055.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	1	50.900.000,00	1	10.270.000,00	1	10.000.000,00	100	97,37	2	60.900.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													97,55	95,32						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Potensi Konflik Sosial yang tidak berkembang menjadi konflik terbuka	Persen	0	0	85	532.783.830,00	90	751.618.000,00	98,34	739.147.761,00	109,27	98,34	183,34	1.271.931.591,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.02.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase rumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan	Persen	0	0	85	532.783.830,00	90	751.618.000,00	98,34	739.147.761,00	109,27	98,34	183,34	1.271.931.591,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	0	0	100	529.583.830,00	125	259.155.000,00	125	252.488.054,00	100	97,43	225	782.071.884,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	0	0	3	3.200.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	100	100	7	4.700.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	0	0	0	0	75	490.963.000,00	300	485.159.707,00	400	98,82	300	485.159.707,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													109,27	98,34						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Lembaga Politik yang Mendapatkan Penguatan	Kali	0	0	90	2.347.673.505,00	100	31.873.263.025,00	100	31.872.737.839,00	100,00	100	190	34.220.411.344,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilukada serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Kali	0	0	90	2.347.673.505,00	100	31.873.263.025,00	100	31.872.737.839,00	100,00	100	190	34.220.411.344,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi, Kelembagaan Pemerintah,Pemilu/ Pemilukada serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Orang	0	0	2140	2.277.828.805,00	760	31.459.203.025,00	760	31.459.057.839,00	100	100	2900	33.736.886.644,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintan,Pemilu/ Pemilukada serta Pemantauan Sistusi Politik Daerah	Laporan	0	0	7	69.844.700,00	8	414.060.000,00	8	413.680.000,00	100	99,91	15	483.524.700,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	100						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

	08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Mendapatkan Penguatan	Kali	0	0	87	175.823.453,00	100	122.160.000,00	99,11	121.070.054,00	99,11	99,11	186,11	296.893.507,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.04.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan sesuai Ketentuan	Kali	0	0	87	175.823.453,00	100	122.160.000,00	99,11	121.070.054,00	99,11	99,11	186,11	296.893.507,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	0	0	250	61.620.500,00	180	11.270.000,00	180	10.192.000,00	100	90,43	430	71.812.500,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa ormas dan Ormas Asing Daerah	Laporan	0	0	9	114.202.953,00	8	110.890.000,00	8	110.878.054,00	100	99,99	17	225.081.007,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													99,11	99,11						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Partisipasi Lembaga dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persen	0	0	85	233.450.080,00	90	877.990.000,00	98,47	864.522.554,00	109,41	98,47	183,47	1.097.972.634,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.05.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya sesuai ketentuan	persen	0	0	85	233.450.080,00	90	877.990.000,00	98,47	864.522.554,00	109,41	98,47	183,47	1.097.972.634,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Pengyat Kepercayaan di Daerah	Orang	0	0	70	232.475.080,00	75	576.490.000,00	75	576.193.054,00	100	99,95	145	808.668.134,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Pengyat Kepercayaan di Daerah	Laporan	0	0	2	975.000,00	2	301.500.000,00	2	288.329.500,00	100	95,63	4	289.304.500,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													109,41	98,47						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	Persen	0	0	100	5.226.702.592,00	100	2.949.791.000,00	98,79	2.914.057.608,00	98,79	98,79	198,79	8.140.760.200,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.06.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	Persen	0	0	100	5.226.702.592,00	100	2.949.791.000,00	98,79	2.914.057.608,00	98,79	98,79	198,79	8.140.760.200,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	0	0	600	558.763.792,00	650	504.721.000,00	650	502.708.108,00	100	99,6	1250	1.061.471.900,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	0	0	2	4.250.000,00	2	17.995.000,00	2	17.820.000,00	100	99,03	4	22.070.000,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	12	4.663.688.800,00	12	2.427.075.000,00	12	2.393.529.500,00	100	98,62	24	7.057.218.300,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													98,79	98,79						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										40.388.187.945,00		40.079.617.943,00								

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										102,35	98,34						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan Fungsi Koordinasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (PAPBD 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Fungsi Koordinasi																				
1	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	84,9	Rp4.553.286.647	84,9	Rp2.278.973.800	90,5	Rp2.261.999.675	106,6	99,26	175,4	Rp3.589.790.241			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	0	Rp2.192.369.590	84,9	Rp1.538.403.800	90,5	Rp1.538.296.242	106,6	99,99	90,5	Rp2.465.650.284			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	1	Rp2.192.369.590	1	Rp1.538.403.800	1	Rp1.538.296.242	100	99,99	2	Rp3.730.665.832			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	0	Rp2.360.917.057	84,9	Rp740.570.000	90,5	Rp723.703.433	106,6	97,72	90,5	Rp1.124.140.056				
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp123.435.160	12	Rp21.630.000	12	Rp21.618.054	100	99,94	24	Rp145.053.214			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (JATI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp408.397.055	12	Rp122.812.000	12	Rp118.432.600	100	96,43	24	Rp526.829.655			KELURAHAN JATI	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (MANGUNHARJO)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp405.451.648	12	Rp185.311.500	12	Rp178.682.113	100	96,42	24	Rp584.133.761			KELURAHAN MANGUNHARJO	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (WIROBORANG)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp339.419.706	12	Rp113.880.000	12	Rp112.178.215	100	98,51	24	Rp451.597.921			KELURAHAN WIROBORANG	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (SUKABUMI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp632.335.778	12	Rp148.193.000	12	Rp146.330.579	100	98,74	24	Rp778.666.357			KELURAHAN SUKABUMI	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (MAYANGAN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp451.877.710	12	Rp148.743.500	12	Rp146.461.872	100	98,47	24	Rp598.339.582				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													101,98	98,55						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	24	Rp345.433.080	26	Rp388.736.500	26	Rp387.614.554	100	99,71	50	Rp660.687.138			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	0	Rp345.433.080	26	Rp388.736.500	26	Rp387.614.554	100	99,71	26	Rp660.687.138			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketanran Nasional (KECAMATAN MAYANGAN)	Jumiah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	80	Rp345.433.080	80	Rp388.736.500	80	Rp387.614.554	100	99,71	160	Rp733.047.634			KECAMATAN MAYANGAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	99,71						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
3	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	100	Rp5.641.699.937	100	Rp8.181.299.732	100	Rp7.993.739.960	100	97,71	200	Rp11.884.211.875				
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp49.445.000	100	Rp3.118.000	100	Rp3.083.000	100	98,88	100	Rp4.766.099				

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	10	Rp49.445.000	10	Rp3.118.000	10	Rp3.083.000	100	98,88	20	Rp52.528.000			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp5.224.702.955	100	Rp7.536.457.070	100	Rp7.352.167.901	100	97,55	100	Rp10.818.093.943				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	0	0	58	Rp5.012.065.075	58	Rp7.431.328.570	58	Rp7.247.243.927	100	97,52	116	Rp12.259.309.002			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	72	Rp212.637.880	72	Rp105.128.500	72	Rp104.923.974	100	99,81	144	Rp317.561.854			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp82.882.650	100	Rp135.482.422	100	Rp135.238.613	100	99,82	100	Rp225.767.710				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	7	Rp49.485.650	8	Rp45.616.117	8	Rp45.500.300	100	99,75	15	Rp94.985.950			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	800	Rp2.535.000	800	Rp3.870.000	800	Rp3.840.000	100	99,22	1600	Rp6.375.000			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	12	Rp7.616.500	12	Rp10.000.000	12	Rp9.982.500	100	99,83	24	Rp17.599.000			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	Rp23.245.500	12	Rp75.996.305	12	Rp75.915.813	100	99,89	24	Rp99.161.313			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp24.450.000	100	Rp44.500.000	50	Rp43.725.000	50	98,26	50	Rp87.450.098				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	11	Rp24.450.000	8	Rp44.500.000	8	Rp43.725.000	100	98,26	19	Rp68.175.000			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp165.478.332	100	Rp252.543.523	100	Rp251.848.700	100	99,72	100	Rp379.396.723				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	Rp66.242.876	12	Rp120.641.000	12	Rp120.440.601	100	99,83	24	Rp186.683.477			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	12	Rp99.235.456	12	Rp131.902.523	12	Rp131.408.099	100	99,63	24	Rp230.643.555			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	Rp94.741.000	100	Rp209.198.717	100	Rp207.676.746	100	99,27	100	Rp368.737.798				
	7.1.1.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	6	Rp19.698.500	6	Rp32.649.723	6	Rp32.523.208	100	99,61	12	Rp52.221.708			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.1.1.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	2	Rp15.019.000	5	Rp54.008.000	5	Rp52.677.538	100	97,54	7	Rp67.696.538			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.1.1.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	30	Rp10.720.000	30	Rp42.142.000	30	Rp42.086.000	100	99,87	60	Rp52.806.000			KECAMATAN MAYANGAN	
	7.1.1.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	2	Rp49.303.500	2	Rp80.398.994	2	Rp80.390.000	100	99,99	4	Rp129.693.500			KECAMATAN MAYANGAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													97,62	99,09						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										10.849.010.032,00		10.643.354.189,00								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													99,87	99,12						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

a.

b.

Faktor Pendukung :

a.

b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Fungsi Koordinasi																				
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	0	0	82,75	4.075.143.203	84,5	2.417.627.500	80,25	2.378.525.802	94,97	98,38	163	6.453.669.005	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	persen	0	0	100	2.222.628.160	100	1.744.060.000	100	1.741.379.708	100	99,85	200	3.964.007.868	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	0	0	5	2.222.628.160	5	1.744.060.000	5	1.741.379.708	100	99,85	10	3.964.007.868	0	0	Kecamatan Kanigaran	

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	persen		0	0	95	1.852.515.043	95	673.567.500	95	637.146.094	100	94,59	190	2.489.661.137	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	52.292.160	12	61.084.000	12	61.023.398	100	99,9	24	113.315.558	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanigaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	352.045.455	12	123.218.000	12	118.681.579	100	96,32	24	470.727.034	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Curahgrinting)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	285.900.960	12	104.408.000	12	91.336.053	100	87,48	24	377.237.013	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonsari Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	310.470.242	12	124.098.000	12	119.164.161	100	96,02	24	429.634.403	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	290.282.845	12	83.838.000	12	79.400.725	100	94,71	24	369.683.570	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tisnonegaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	229.580.691	12	64.500.000	12	60.308.128	100	93,5	24	289.888.819	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	331.942.690	12	112.421.500	9	107.232.050	75	95,38	21	439.174.740	0	0	Kecamatan Kanigaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													94,97	98,38							
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	38.359	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	persen		0	0	30	413.900.000	30	451.238.000	30	447.641.366	100	99,2	60	861.541.366	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang difasilitasi	persen		0	0	88	413.900.000	88	451.238.000	100	447.641.366	113,64	99,2	188	861.541.366	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	persen		0	0	124	413.900.000	124	451.238.000	124	447.641.366	100	99,2	248	861.541.366	0	0	Kecamatan Kanigaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	99,2							
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	36.898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persen		0	0	98	9.086.897.041	99	9.869.874.278	99	9.670.396.816	100	97,98	197	18.757.293.857	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen		0	0	100	15.000.000	100	9.500.000	100	9.490.000	100	99,89	200	24.490.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		0	0	7	15.000.000	7	9.500.000	7	9.490.000	100	99,89	14	24.490.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	0	0	95	8.372.297.492	95	9.297.723.298	95	9.127.317.016	100	98,17	190	17.499.614.508	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	0	0	73	8.013.642.952	73	9.231.233.798	73	9.060.875.408	100	98,15	146	17.074.518.360	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	0	0	12	358.654.540	12	66.489.500	12	66.441.608	100	99,93	24	425.096.148	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	dokumen	0	0	100	212.533.140	100	103.288.999	100	101.475.128	100	98,24	200	314.008.268	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	0	7	95.901.965	7	52.000.000	7	50.295.850	100	96,72	14	146.197.815	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0	2	38.411.500	2	3.692.999	2	3.675.000	100	99,51	4	42.086.500	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0	0	24	3.500.000	24	4.680.000	24	4.670.000	100	99,79	48	8.170.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	12	4.846.000	12	7.000.000	12	6.929.000	100	98,99	24	11.775.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0	20	69.873.675	20	35.916.000	20	35.905.278	100	99,97	40	105.778.953	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	0	0	100	82.300.000	100	33.100.000	100	30.945.000	100	0	200	113.245.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	8	82.300.000	1	33.100.000	1	30.945.000	100	93,49	9	113.245.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	persen	0	0	100	280.498.309	100	289.796.880,00	100	273.175.549	100	94,26	200	553.673.858	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0	12	156.858.809	12	164.670.000	12	148.378.594	100	90,11	24	305.237.403	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0	12	123.639.500	12	125.126.880	12	124.796.955	100	99,74	24	248.436.455	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persen	0	0	100	124.268.100	100	136.465.101	100	127.994.123	100	93,79	200	252.262.223	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	0	0	1	10.710.300	1	26.885.500	1	25.865.808	100	96,21	2	36.576.108	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0	27	19.749.800	27	44.579.601	27	38.377.691	100	86,09	54	58.127.491	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0	52	19.550.000	52	15.000.000	52	14.350.000	100	95,67	104	33.900.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0	1	74.258.000	1	50.000.000	1	49.400.624	100	98,8	2	123.658.624	0	0	Kecamatan Kanigaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	97,98						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										12.738.739.778,00		12.496.563.984,00								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													98,32	98,52						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

a.

b.

Faktor Pendukung :

a.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s/d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Fungsi Koordinasi																		
		UNSUR KEWILAYAHAN																		
	07.01.02	PROGRAM PENUNJANG urusan PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 persen	%			100	8.762.792.828	100	8.857.127.016	50	4.912.980.066	50	55,47	150	13.675.772.894	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Minimal 80%	%			95	3.669.000	100	5.000.000	45	1.554.000	45	31,08	140	5.223.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			6	1.497.000	7	2.500.000	2	1.080.000	28,57	43,2	8	2.577.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			12	2.172.000	12	2.500.000	3	474.000	25	18,96	15	2.646.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	7.942.370.459	100	8.164.723.536	50	4.711.879.375	50	57,71	150	12.654.249.834	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang			260	7.636.693.899	75	8.099.066.816	141	4.682.139.063	188	57,81	401	12.318.832.962	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			16	305.676.560	16	65.656.720	8	29.740.312	50	45,3	24	335.416.872	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	800.000	100	2.000.000	0	0	0	0	100	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang			2	800.000	75	2.000.000	0	0	0	0	2	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	%			100	4.105.000	100	8.738.500	0	0	0	0	100	4.105.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			70	4.105.000	2	8.738.500	0	0	0	0	70	4.105.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	161.566.654	100	159.576.310	50	54.588.070	50	34,21	150	216.154.724	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			8	46.816.300	8	68.123.300	5	20.080.500	62,5	29,48	13	66.896.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			3	41.180.800	3	6.120.000	2	1.680.000	66,67	27,45	5	42.860.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			12	3.120.000	12	3.600.000	5	1.170.000	41,67	32,5	17	4.290.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			12	7.399.500	12	5.000.000	6	3.361.000	50	67,22	18	10.760.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			12	63.050.054	12	76.733.010	7	28.296.570	58,33	36,88	19	91.346.624	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%			100	253.370.000	95	90.000.000	20	14.000.000	21,05	15,56	120	267.370.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			15	180.870.000	15	90.000.000	2	14.000.000	13,33	15,56	17	194.870.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%			100	236.684.385	100	228.736.170	50	103.312.859	50	45,17	150	339.997.244	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	90.570.231	12	104.400.000	6	46.206.440	50	44,26	18	136.776.671	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	146.114.154	12	124.336.170	6	57.106.419	50	45,93	18	203.220.573	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%			100	160.227.330	100	198.352.500	50	27.645.762	50	13,94	150	187.873.092	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			1	31.778.000	1	38.650.000	1	10.640.016	100	27,53	2	42.418.016	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			21	31.107.788	26	58.827.500	13	17.005.746	50	28,91	34	48.113.534	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			41	15.130.000	88	25.875.000	0	0	0	0	41	15.130.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			1	82.211.542	1	75.000.000	0	0	0	0	1	82.211.542	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													33,26	24,71						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	nilai/skor			97,37	3.706.642.314	84,8	2.169.120.200	0	760.459.457	0	35,06	97,37	4.467.101.771	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keluruhan Kategori Berkembang	%			84	1.908.905.388	100	1.424.870.000	50	448.309.770	50	31,46	134	2.357.215.158	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen			20	1.908.905.388	20	1.424.870.000	9	448.309.770	45	31,46	29	2.357.215.158	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%			100	1.797.736.926	100	744.250.200	50	312.149.687	50	41,94	150	2.109.886.613	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	149.277.100	12	72.450.000	6	28.133.710	50	38,83	18	177.410.810	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kademangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	245.986.026	12	72.512.500	6	31.841.123	50	43,91	18	277.827.149	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ketapang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	275.817.446	12	128.698.000	6	57.106.300	50	44,37	18	332.923.746	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pilang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	319.846.586	12	115.985.100	6	41.707.751	50	35,96	18	361.554.337	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	262.881.448	12	141.370.400	6	56.653.946	50	40,07	18	319.535.394	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	279.380.515	12	106.597.000	6	45.439.003	50	42,63	18	324.819.518	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	264.547.805	12	106.637.200	6	51.267.854	50	48,08	18	315.815.659	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													50	36,7						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%			21	437.232.240	22	382.500.000	10	131.949.140	45,45	34,5	31	569.181.380	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang Difasilitasi	%			85	437.232.240	90	382.500.000	8	131.949.140	8,89	34,5	93	569.181.380	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang			116	437.232.240	116	382.500.000	96	131.949.140	82,76	34,5	212	569.181.380	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													8,89	34,5						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.408.747.216,00		5.805.388.663,00								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													30,72	31,97						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11				12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Fungsi Koordinasi																						
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	100%	9.761.568.351	100%	9.575.687.657	100%	9.314.267.995	100	97,27	20%	19.075.836.346		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK			
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	0	0	100%	14.460.200	100%	12.654.000	100%	12.460.000	100	98,47	20%	26.920.200		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK			
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	27	14.460.200	27	12.654.000	27	12.460.000	100	98,47	5	26.920.200		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK			

	7.1.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	8.793.544.567	100%	8.928.379.180	100%	8.717.992.992	100	97,64	25%	17.511.537.559		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	0	0	960	8.407.178.567	960	8.828.008.680	80	8.617.670.276	8,33	97,62	80	17.024.848.843		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	18	386.366.000	18	100.370.500	18	100.322.716	100	99,95		486.688.716		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Sesuai Ketentuan	Laporan	0	0	100%	3.500.000	100%	-	0	-	0	0	0	3.500.000		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	2	3.500.000	2	-	0	-	0	0	0	3.500.000		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	9.772.750	0%	0	0	-	0	0	0	9.772.750		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	121	9.772.750	0	0	0	-	0	0	0	9.772.750		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	203.259.300	100%	158.850.439	100%	148.114.126	100	93,24	20%	351.373.426		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	8	56.927.700	8	61.249.200	8	44.690.600	100	72,97	0	101.618.300		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	1	40.840.100	1	9.632.000	1	9.398.000	100	97,57	1	50.238.100		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	12	3.240.000	1	3.240.000	1	3.220.000	100	99,38	1	6.460.000		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	12	10.000.000	2	38.000.000	2	35.381.500	100	93,11	1	45.381.500		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	30	92.251.500	30	46.729.239	14	45.315.526	46,67	96,97	2	137.567.026		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	5	0	0	100%	196.428.600	100%	66.300.000	100%	64.690.000	100	97,57	0	261.118.600		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	2	72.500.000	0	0	0	-	0	0	0	72.500.000		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	15	123.928.600	15	66.300.000	7	64.690.000	46,67	97,57	0	188.618.600		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	0	0	100%	363.612.998	100%	284.381.296	80%	274.602.812	80	96,56		638.215.810		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket	0	0	24	94.890.014	24	90.900.000	12	81.335.193	50	89,48	2	176.225.207		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	17	268.722.984	17	193.481.296	14	193.267.619	82,35	99,89	4	461.990.603		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	0	0	100%	176.989.936	100%	125.122.742	98%	96.408.065	98	77,05	13%	273.398.001		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	21	62.482.900	21	84.947.642	21	66.312.862	100	78,06	10	128.795.762		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	8	22.602.450	8	17.175.100	8	9.264.203	100	53,94	5	31.866.653		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	42	21.747.500	42	23.000.000	42	20.831.000	100	90,57	-	42.578.500		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	3	70.157.086	3	-	-	-	0	0	-	70.157.086		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													72,25	70,07					KECAMATAN KEDOPOK	
Predikat Kinerja													Sedang	Sedang					KECAMATAN KEDOPOK	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	0	0	9100%	3.849.050.970	8300%	1.938.054.000	8600%	1.217.002.818	103,61	62,8		5.066.053.788		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang	%	0	0	100%	1.496.760.500	100%	1.049.842.000	0%	1.031.747.254	-	98,28	0%	2.528.507.754		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	2	1.496.760.500	2	1.049.842.000	2	1.031.747.254	100	98,28	0	2.528.507.754		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	0	0	97%	2.352.290.470	97%	888.212.000	62%	185.255.564	63,92	20,86	22%	2.537.546.034		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	111.809.000	12	40.612.000	12	40.588.108	100	99,94	3	152.397.108		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumber Wetan)		Laporan	0	0	12	428.263.000	12	195.104.000	12	191.644.853	100	98,23	3	619.907.853		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	

	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedopok)		Laporan	0	0	12	365.848.940	12	135.154.000	12	124.061.809	100	91,79	3	489.910.749		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Lor)		Laporan	0	0	12	347.450.800	12	112.584.000	12	106.795.634	100	94,86	3	454.246.434		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Wetan)		Laporan	0	0	12	345.857.200	12	115.112.000	12	108.512.153	100	94,27	3	454.369.353		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kareng Lor)		Laporan	0	0	12	344.387.530	12	113.880.000	12	101.503.635	100	89,13	3	445.891.165		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Kulon)		Laporan	0	0	12	408.674.000	12	175.766.000	12	167.094.937	100	95,07	3	575.768.937		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													31,96	59,57					KECAMATAN KEDOPOK	
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Rendah					KECAMATAN KEDOPOK	
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	22%	376.070.000	22%	410.770.000	100%	410.726.868	454,55	99,99		786.796.868		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	100%	376.070.000	100%	410.770.000	100%	410.726.868	100	99,99	25%	786.796.868		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	122	376.070.000	122	410.770.000	122	410.726.868	100	99,99	30	786.796.868		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100	99,99						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											11.924.511.657,00		10.941.997.681,00							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													68,07	76,54						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sedang	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
Fungsi Koordinasi																				
1	07.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	0	100%	9.638.366.951	100%	9.283.957.862	100%	96,32%	100%	9.283.957.862	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	0	0	0	0	100%	23.750.000	100%	23.638.000	100%	99,53%	100%	23.638.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	4 Laporan	23.750.000	4	23.638.000	100%	99,53%	4	23.638.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0	100%	9.079.163.159	100,00%	8.737.540.497	100%	96,24%	100,00%	8.737.540.497	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0	0	0	0	73 Orang/bulan	8.972.758.159	73	8.631.515.609	100%	96,20%	73	8.631.515.609	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	106.405.000	12	106.024.888	100%	99,64%	12	106.024.888	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0	100%	4.000.000	100%	3.975.000	100%	99,38%	100%	3.975.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	4.000.000	1	3.975.000	100%	99,38%	1	3.975.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	100,00%	100%	6.000.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	100 Orang	6.000.000	100	6.000.000	100%	100,00%	100	6.000.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	100%	91,00%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a.
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Probolinggo, Januari 2025
KEPALA BAPPEDA LITBANG
KOTA


DIAH SAJEKTI Wulandari Sisit, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711213 199803 2 006

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi ekonomi dan keuangan Kota Probolinggo Tahun 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026 sebagai tahun rencana. Gambaran kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan keuangan Kota Probolinggo Tahun 2026 yang bertujuan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan.

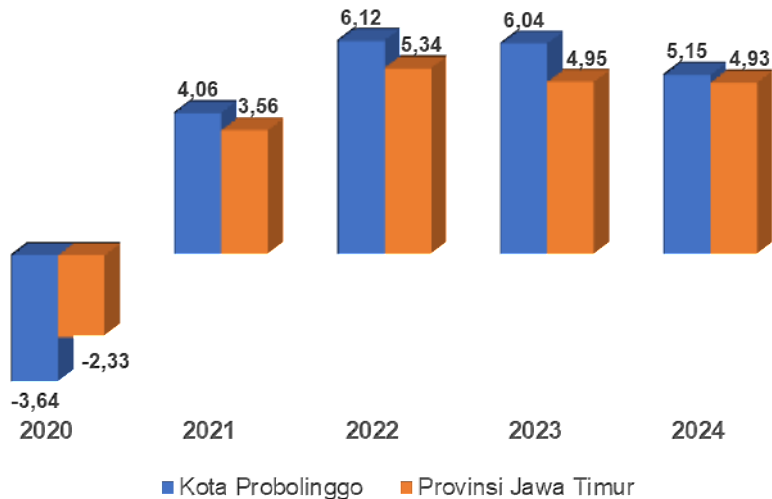
Bab ini berisi gambaran kondisi ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2024, prakiraan kondisi ekonomi Tahun 2025 serta Tahun rencana 2026 yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam membangun perekonomian daerah pada Tahun rencana yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan pedoman yang mengarahkan pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui program dan kegiatan pembangunan. Perumusan arah kebijakan ekonomi Tahun 2026 merupakan respon terhadap kinerja ekonomi tahun sebelumnya sekaligus menjawab tantangan di masa datang. Dalam konteks tersebut perlu dilakukan telaah terhadap kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini tahun 2024 (n-2) serta proyeksi tahun 2025 (n-1). Telaah tersebut tentunya harus didukung ketersediaan data yang akurat dan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga kebijakan yang diambil lebih rasional dan efektif.

3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2024

Gambaran kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2024 digunakan untuk menganalisis dinamika faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap penentuan proyeksi kerangka perekonomian daerah Tahun 2026 sebagai tahun rencana dalam penyusunan RKPD. Gambaran kondisi ekonomi Kota Probolinggo menjadi acuan dalam penentuan kebijakan ekonomi di tingkat lokal serta cerminan kontribusi Kota Probolinggo dalam konstelasi ekonomi regional dan nasional. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada Tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja positif dan dapat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3. 1 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kota Probolinggo Tahun 2024

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka 2025 (diolah)

Tabel 3. 1 Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) juta Rp	11.074.500	11.699.900	12.931.380	14.296.470	15.374.980
PDRB (ADHK) juta Rp	8.035.270	8.361.140	8.870.000	9.408.510	9.893.270
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB (%)	-3,64	4,06	6,12	6,04	5,15
Jumlah Penduduk (jiwa)	239.650	241.200	243.200	244.560	243.750
PDRB ADHB per kapita (juta)	46,30	48,41	52,92	57,89	61,61
Inflasi (persen)	1,88	1,76	5,45	2,86	1,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,70	6,55	4,57	4,53	4,44
Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita (Ribu Rupiah per Tahun)	12.180	12.245	12.571	12.999	13.405

Sumber : BPS Kota Probolinggo Tahun 2025

Merujuk pada tabel di atas maka kinerja ekonomi makro Kota Probolinggo pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren positif. Indikasi tersebut terlihat dari beberapa hal yaitu;

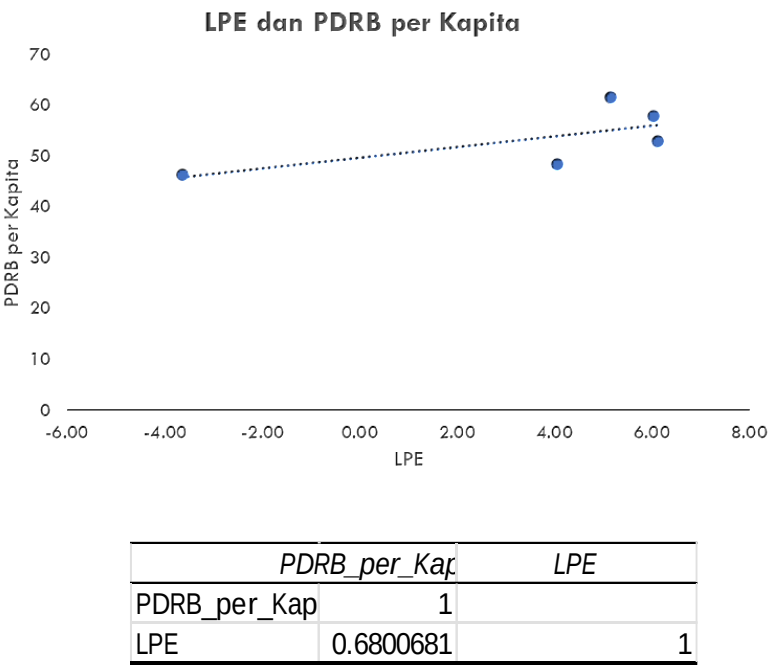
a. Laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2020 – 2024 menunjukkan indikasi kenaikan produksi barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 5,15% atau lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur. Namun laju pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 6,04% turun menjadi 5,15% pada tahun

2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,89%. Hal tersebut diindikasikan karena kondisi yang mulai normal pasca-pandemi COVID-19 dan perlambatan di sektor perdagangan.

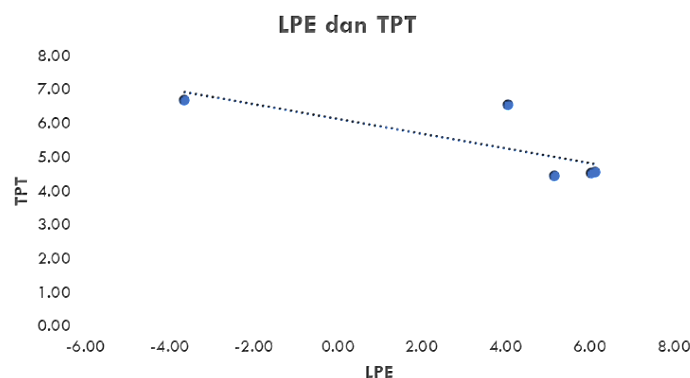
Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi juga diikuti dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum terdapat hubungan positif antara Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita di Kota Probolinggo, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita. Namun, korelasi positif tersebut tidak terlalu kuat sehingga dapat diindikasikan terdapat faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi PDRB per kapita.



Gambar 3. 2 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kota Probolinggo Tahun 2024
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka 2025 (diolah)

- b. Inflasi yang terus turun dalam 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) yang dapat menjadi indikasi naiknya daya beli masyarakat. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) inflasi Kota Probolinggo mengalami fluktuasi, dengan lonjakan signifikan di tahun 2022 yang kemudian berhasil dikendalikan kembali di tahun-tahun berikutnya. Tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 yang menunjukkan membaiknya kondisi perekonomian dan stabilnya harga. Selanjutnya pada tahun 2024, inflasi cenderung stabil yang menunjukkan bahwa kenaikan harga relative terkendali.
- c. Tingkat Pengangguran yang terus turun dalam 5 tahun terakhir yang mengindikasikan semakin tinggi angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja.

Korelasi negatif antara LPE dan TPT menunjukkan bahwa semakin tinggi Laju Pertumbuhan Ekonomi, semakin rendah pula Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal tersebut mengindikasikan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Probolinggo diindikasikan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan terus menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



	LPE	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
LPE	1	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-0.766113502	

Gambar 3. 3 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan TPT Kota Probolinggo Tahun 2024
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka 2025 (diolah)

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dalam struktur ekonomi Kota Probolinggo tahun 2024 adalah: perdagangan besar dan eceran (26,20%), transportasi dan pergudangan (16,28%), industri pengolahan (14,63%). Posisi strategis Kota Probolinggo sebagai simpul jasa dan PKW dalam skala regional turut mendukung berkembangnya sektor-sektor sekunder dan tersier. Kebijakan dalam penetapan target pembangunan serta perumusan kebijakan pembangunan diarahkan untuk pengembangan sektor-sektor potensial guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta berkelanjutan.

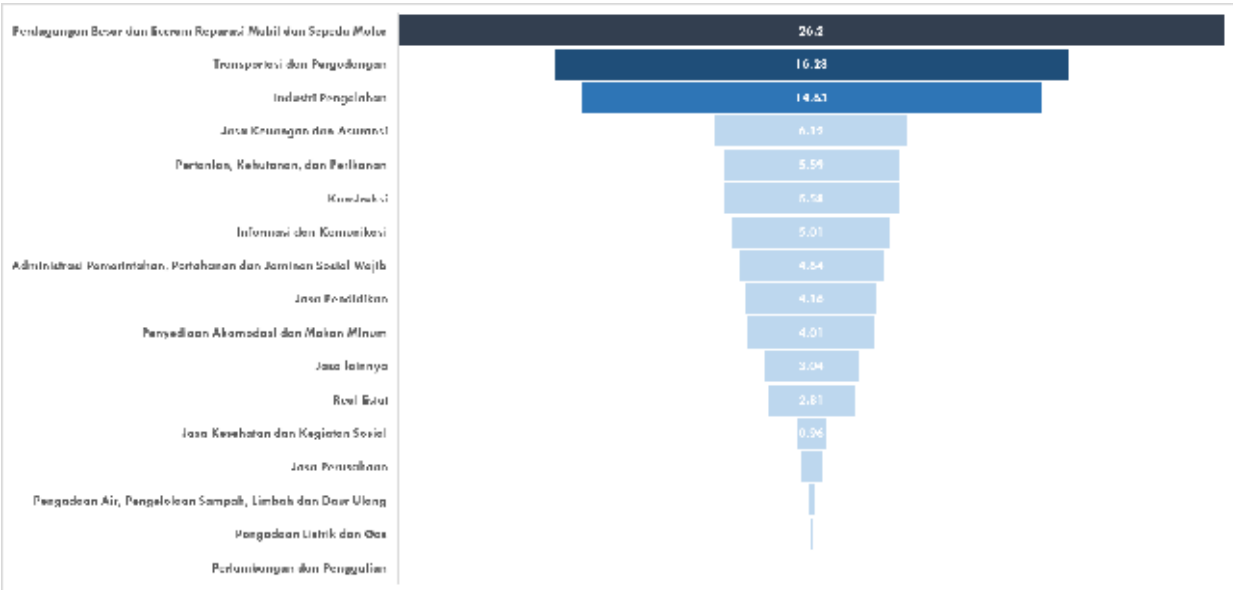
Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024

LAPANGAN USAHA		DISTRIBUSI PDRB				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,17	5,72	5,98	6	5,59
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	14,46	14,67	14,59	14,65	14,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,22	0,21	0,20	0,20
F	Konstruksi	5,68	5,47	5,47	5,43	5,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,71	26,35	26,48	26,22	26,20
H	Transportasi dan Pergudangan	13,72	14,09	15,23	16,09	16,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,74	3,8	3,83	3,84	4,01
J	Informasi dan Komunikasi	5,52	5,54	5,2	5,07	5,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,71	6,58	6,4	6,32	6,12
L	Real Estat	3,25	3,17	3,04	2,91	2,81

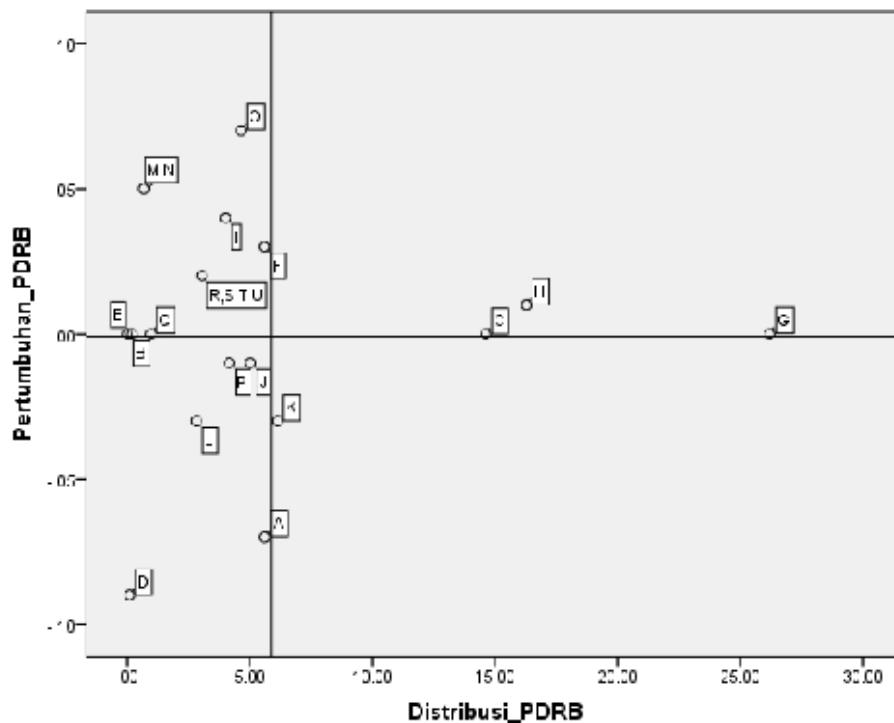


M,N	Jasa Perusahaan	0,64	0,63	0,59	0,64	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,28	4,99	4,52	4,35	4,64
P	Jasa Pendidikan	4,96	4,76	4,36	4,22	4,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,03	0,96	0,96	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,83	2,88	3,02	2,99	3,04

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka 2025



Gambar 3. 4 Struktur Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2024
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka 2025 (diolah)



Keterangan:

- A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B Pertambangan dan Penggalian
- C Industri Pengolahan
- D Pengadaan Listrik dan Gas
- E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F Konstruksi
- G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H Transportasi dan Pergudangan
- I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J Informasi dan Komunikasi
- K Jasa Keuangan dan Asuransi
- L Real Estat
- M,N Jasa Perusahaan
- O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- P Jasa Pendidikan
- Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R,S,T,U Jasa lainnya

Gambar 3. 5 Sebaran Sektor Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2024
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka 2025 (diolah)

Sebaran sektor perekonomian tahun 2024 merupakan gambaran sektor-sektor potensial dalam pengembangan ekonomi Kota Probolinggo ditinjau dari kontribusi dan tingkat pertumbuhan masing-masing sektor. Sektor : Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan 3 sektor potensial dengan kontribusi besar dan laju pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan seluruh sektor. Industri pengolahan dan perdagangan secara rata-rata memiliki pertumbuhan di atas rata-rata meskipun secara riil mengalami kontraksi pada tahun 2024. Sektor-sektor pada Kuadran C merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena meskipun kontribusi rendah namun sektor-sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2024.

- Kuadran A, distribusi PDRB tinggi dan pertumbuhan PRDB tinggi meliputi: Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Kuadran B, distribusi PDRB tinggi dan pertumbuhan PRDB rendah meliputi: Jasa Keuangan dan Asuransi
- Kuadran C, distribusi PDRB rendah dan pertumbuhan PRDB tinggi meliputi: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Perusahaan
- Kuadran D, distribusi PDRB rendah dan pertumbuhan PRDB rendah meliputi: Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi, Real Estat, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas

3.1.2. PRAKIRAAN KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2025-2026

Kondisi perekonomian Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan yang positif pasca pandemic Covid-19. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi baik di skala global hingga lokal. Pasca Pandemi Covid-19 kondisi perekonomian Kota Probolinggo Kembali pulih dan meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 namun relatif baik dengan angka di atas 6% yang menunjukkan terjadi stabilisasi pasca-pandemi. Pada tahun 2024 kembali terjadi kontraksi dibandingkan 2023 yang diindikasikan karena kondisi ekonomi cenderung melandai setelah terjadi rebound pada tahun 2021 - 2022. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,15% atau lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan provinsi.

Tren pertumbuhan ekonomi dalam kurun 5 tahun terakhir dan kondisi ekonomi global maupun nasional menjadi dasar dalam penentuan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. Penetapan target tersebut mengindikasikan optimisme bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik.

Tabel 3. 3 Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025-2026

	CAPAIAN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI					PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-3,64	4,06	6,12	6.04	5.15	5,28	5,47
Tingkat Pertumbuhan	-9,58	7,7	2,06	-0,08	-0,89	0,13	019

Beberapa pertimbangan dalam penentuan proyeksi kondisi ekonomi dan target ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024. Akan tetapi dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sangat fluktuatif. Menurun drastis pada periode Tahun 2020 karena Pandemi Covid-19 kemudian meningkat



drastis pada Tahun 2021 dengan berbagai stimulan pemulihan ekonomi Pasca Pandemi. Akan tetapi kemudian mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022-2024;

- b. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tercatat sebesar 5,15%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), terjadi penurunan sebesar 0,89%, dari 6,04% menjadi 5,15%. Penurunan ini mencerminkan kontraksi pertumbuhan yang terjadi seiring dengan berakhirnya fase pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan sempat terdorong oleh efek rebound ekonomi. Dengan demikian, meskipun tetap tumbuh positif, laju pertumbuhan mulai menyesuaikan ke level yang lebih stabil.;
- c. Oleh karena itu proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Tahun 2025-2026 diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi riil mengikuti berdasarkan mekanisme pasar murni tanpa stimulant khusus dengan Tingkat pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan pada kisaran 0,13% hingga 0,19% ;
- d. Pertimbangan lain diluar perhitungan statistic terhadap data series pertumbuhan ekonomi kota antara lain :
 - Adanya kewaspadaan terhadap imbas dari perekonomian global yang tidak menentu dari kebijakan internasional khususnya Amerika dan Cina ;
 - Periode awal tahun politik dari pergantian periode kepemimpinan Presiden, Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Masa transisi dari pergantian presiden dan kepala daerah yang dikhawatirkan akan berimbas terhadap stabilitas ekonomi daerah Tahun 2025-2026 dari *starting point* penataan landasan kerja awal, penyesuaian kebijakan serta kepercayaan dunia usaha untuk penanaman modal skala besar guna mengungkit pertumbuhan ekonomi.
- e. Oleh karena itu penetapan target kinerja untuk pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 ditetapkan tidak terlalu tinggi kenaikannya pada kisaran 1,3-1,9% sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian setiap tahunnya.

3.1.3. KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2026

Sistem perencanaan pembangunan merupakan sistem perencanaan yang berjenjang atau hirarkis. Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota merupakan system yang tak terpisah dari perencanaan pembangunan di level regional dan nasional. Keterpaduan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang terintegrasi, efisien, dan merata.

3.1.2.1. Kebijakan Ekonomi Nasional

A. Outlook Ekonomi Nasional 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian



ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diperkirakan tetap baik di tengah tren perlambatan perekonomian global yang diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025 sehingga Indonesia mampu bertahan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,80 persen), transportasi dan pergudangan (8,69 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 4,43 persen pada tahun 2024. Subsektor industri logam dasar mencatat pertumbuhan kuat sebesar 13,34 persen, didorong oleh program hilirisasi nikel yang meningkatkan ekspor baja tahan karat. Sejumlah proyek industri strategis yang telah selesai konstruksi diharapkan dapat memperkuat industri logam dasar nasional. Sektor pariwisata turut menggeliat dengan rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,04 persen, dengan devisa pariwisata mencapai sebesar US\$16,71 miliar. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai tingkat prapandemi serta lonjakan wisatawan nusantara yang telah melampaui tingkat sebelum pandemi.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan bertahan pada kisaran 5,20 persen di tengah dinamika global, khususnya tantangan risiko perang dagang secara langsung. GNI per kapita Indonesia diharapkan meningkat ke level US\$5.230 melalui pelaksanaan kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi. Kebijakan-kebijakan dari sisi pengeluaran meliputi: (i) Peningkatan konsumsi masyarakat yang diperkirakan tumbuh meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, program bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), (ii) PMTB atau investasi pada tahun 2025 yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,96 persen, didukung oleh kebijakan optimalisasi pengelolaan aset BUMN, pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, *tax holiday* dan *tax allowance*; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (iii) Peningkatan kinerja ekspor Indonesia melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain diversifikasi produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak tarif. Peningkatan kinerja ekspor diperkirakan menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif resiprokal AS dan kebijakan lanjutan lainnya, serta beragam respons dari negara mitra dagang.

Peningkatan GNI per kapita pada tahun 2025 dari sisi produksi melalui peningkatan produksi lapangan usaha yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional, yaitu: (i) industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,05 persen pada tahun 2025, dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang mencapai 20,80 persen dari total PDB nasional, utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, inisiasi



program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan minuman, peningkatan penggunaan teknologi *Generative AI (Artificial Intelligence)* yang mendorong permintaan pada subsektor industri elektronik serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau, (ii) sektor pertanian yang pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 3,16 persen, seiring peningkatan permintaan produk pertanian yang didorong oleh program MBG. Dari sisi pasokan, pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 akan didukung oleh pelaksanaan program-program menuju swasembada pangan dan optimalisasi peran Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, (iii) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 8,80 persen, utamanya didorong oleh program MBG yang dimulai sejak awal tahun 2025, (iv) sektor pariwisata yang diproyeksikan meningkat sejalan dengan pemulihan perjalanan wisata global. Rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,20–4,30 persen pada tahun 2025, didukung oleh pemulihan ekonomi negara asal wisatawan, peningkatan konektivitas penerbangan langsung ke Indonesia serta penyelenggaraan acara berskala internasional, (v) sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan tumbuh sebesar 8,91 persen didukung peningkatan mobilisasi masyarakat, peningkatan kinerja pariwisata, serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya.

Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2024 mencatat kinerja yang baik, mengindikasikan ketahanan sektor eksternal yang kuat. Kondisi ini tercermin dari surplus neraca keseluruhan sebesar US\$7,21 miliar, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu US\$6,30 miliar. Surplus tersebut mengindikasikan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang kondusif dan terus berkembang, meskipun di tengah kondisi ketidakpastian global.

Pada tahun 2025, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh dalam menjaga stabilitas eksternal. Neraca perdagangan barang diperkirakan tetap surplus sebesar US\$35,28 miliar, seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui langkah negosiasi, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerja sama bilateral dan multilateral, serta mempersiapkan sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprosal. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa akan mengalami sedikit perbaikan menjadi US\$17,75 miliar, ditopang oleh meningkatnya surplus neraca jasa perjalanan karena semakin tingginya devisa pariwisata seiring dengan upaya perluasan negara target pasar dan peningkatan belanja wisatawan mancanegara.

Kuangan Negara

Kinerja keuangan negara pada tahun 2024 menunjukkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal, terutama di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal tercermin dari defisit APBN mencapai 2,29 persen PDB, serta stok utang pemerintah sebesar 39,36 persen



PDB. Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tahun anggaran 2024 mencapai Rp507,80 triliun (2,29 persen PDB). Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp553,20 triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp556,60 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun 2024 sebesar Rp45,40 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19,40 triliun.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan berfokus pada upaya untuk: (i) mempercepat pertumbuhan ekonomi, (ii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), antara lain melalui program MBG, (iii) mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel.

Stabilitas moneter tahun 2024 ditopang oleh berlanjutnya perbaikan kondisi perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Capaian tersebut tercermin dari realisasi inflasi yang melambat dan terjaga dalam rentang sasaran, serta volatilitas nilai tukar yang terjaga. Realisasi inflasi umum sepanjang tahun 2024 mengalami tren penurunan. Pada akhir tahun 2024, realisasi inflasi mencapai 1,57 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sebesar 1,50–3,50 persen serta lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 2,61 persen (yoy).

Pada tahun 2025, inflasi akan dijaga dalam rentang sasaran 1,5–3,5 persen (yoy) didukung oleh (i) pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pasar murah; (ii) peningkatan produksi dalam negeri diantaranya melalui pengembangan kawasan produksi pertanian hortikultura melalui pemanfaatan pekarangan; (iii) penguatan infrastruktur dan konektivitas; serta (iv) perbaikan kualitas data pangan.

Sepanjang tahun 2024, pergerakan nilai tukar mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal, utamanya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan ekonomi, termasuk pergantian kepemimpinan di sejumlah negara yang berdampak terhadap masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2024 mencapai Rp15.846 per US\$, tetap terjaga dalam rentang target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni Rp15.700–Rp16.100 per US\$.

Pada triwulan I tahun 2025, nilai tukar rupiah masih berfluktuasi dan tercatat melemah sebesar 1,12 persen (ytd), mencapai Rp16.313 per US\$. Sebagai upaya memitigasi berlanjutnya pelemahan rupiah dan sebagai respons terhadap arah kebijakan moneter global, kebijakan suku bunga optimal masih berlanjut yang mempertahankan suku bunga BI-Rate sebesar 5,75 persen pada Februari 2025

Dari sisi kewilayahan, Wilayah Jawa tumbuh 4,92 persen, melambat dari tahun 2023 yang tumbuh 4,96 persen. Perekonomian Wilayah Jawa pada tahun 2024 juga



ditopang sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 7,09 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,28 persen seiring dengan pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berbagai proyek multiyears, seperti Pembangunan Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan, Jalan Tol Jogja–Solo, serta pembangunan MRT dan LRT.

Pada tahun 2025, perekonomian Wilayah Jawa diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen. Perekonomian Wilayah Jawa didorong oleh sejumlah proyek yang mendorong pertumbuhan investasi, antara lain proyek pembangunan infrastruktur konektivitas seperti MRT dan LRT, serta pengembangan KI, termasuk KI Terpadu Batang, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE), KI Halal Sidoarjo, dan KEK Singhasari. Perbaikan sektor industri yang sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian Wilayah Jawa.

B. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 20252029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Tabel 3. 4 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026.

No	Indikator	Sasaran 2026
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>,yoy</i>): Akhir Periode	2,5±1,0
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 - 16.900a
3	Cadangan Devisa (miliar US\$)	171,01–171,42
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2–6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(1,04)–(0,90)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18–21,20
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6–4,7
8	Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,00–24,70
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22–13,35
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45–11,40
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,22)–(0,40)
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)–(2,70)
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,8–39,9
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17–7,18
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.093,3–2.175,3
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,4–1.006,5

Sumber : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026



Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain itu konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi terus didorong guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026 melalui peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Selain itu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00 guna menjamin tingkat efisiensi investasi.

Langkah-langkah strategis dalam mencapai target investasi serta mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi terus dilakukan. Dalam rangka percepatan investasi diperlukan kepastian hukum, yang saat ini masih terdapat tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi *market intelligence*, *business matching* dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) dan/atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *ecommerce* bagi pelaku UMKM, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan



database informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Sektor-sektor yang menjadi motor penggerak perekonomian terus didorong pengembangannya yang mencakup: (i) Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026, (ii) Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026, (iii) Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK, (iv) sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Selain lapangan usaha di atas, pada tahun 2026 rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US\$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor-faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, Pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan *event* berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan



peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (*Tourism 5.0*).

Arah kebijakan fiskal tahun 2026 adalah kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Pada tahun 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,22–13,35 persen PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,45–11,40 persen PDB dan PNPB sebesar 1,76–1,94 persen PDB.

Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada percepatan implementasi *core tax system* secara menyeluruh, simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan pajak (*tax compliance*), perluasan basis pajak dan mendorong sektor informal menjadi formal, intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai, penguatan perpajakan sejalan dengan struktur ekonomi yang lebih produktif, perbaikan data basis pajak dengan penguatan *cashless economy*, percepatan digitalisasi perpajakan secara efektif, serta penajaman efektivitas insentif perpajakan untuk mendorong sektor prioritas.

Dukungan Pemerintah terhadap arah kebijakan peningkatan *local tax* dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang difokuskan pada percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah, diagnostik potensi ekonomi daerah, serta kerjasama pertukaran data antara instansi pusat dan daerah. Upaya tersebut terutama diimplementasikan pada pemungutan pajak dan retribusi sektor utama perekonomian di daerah. Selain upaya tersebut, strategi pemberian insentif pajak dan retribusi daerah akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian lokal.

Pada tahun 2026, belanja negara ditargetkan mencapai 14,75–16,05 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 11,86–12,69 persen PDB dan TKD sebesar 2,89–3,37 persen PDB. Pengalokasian belanja negara diutamakan pada pertahanan, percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, swasembada pangan, energi, dan air, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah.

Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53–2,70 persen PDB disertai pengendalian *primary balance*, didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, baik dari utang dan nonutang, untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Fokus pembiayaan APBN antara lain untuk (i) mendukung proyek prioritas yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda terhadap perekonomian; (ii)



optimalisasi peran *Special Mission Vehicle* (SMV), BLU, dan Danantara untuk mendukung sasaran pembangunan; (iii) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi); serta (iv) optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, selain didorong dari sisi penerimaannya, juga diarahkan mengoptimalkan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Pemanfaatan instrumen pembiayaan utang diarahkan untuk dapat disinergikan dengan pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan ketuntasan. Pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah difokuskan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, strategi pembiayaan melalui pengelolaan dana abadi daerah didorong untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai.

Pada tahun 2026, neraca perdagangan barang ditargetkan surplus sebesar US\$33,13–34,81 miliar dengan mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor melalui upaya reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerjasama bilateral dan multilateral, serta mempersiapkan sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprokal. Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial ditargetkan terus mengalami perkembangan yang baik sehingga dapat mencatatkan surplus sebesar US\$21,45–24,02 miliar.

Pada tahun 2026, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi dijaga pada rentang sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500Rp16.900 per US\$. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2026 diarahkan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (i) stabilisasi harga melalui penyaluran Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (ii) peningkatan produksi dalam negeri melalui: pengembangan kawasan pangan dan hortikultura; optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian; penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan; penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP); serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD); (iii) penguatan kelancaran distribusi melalui: peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) serta penguatan dan perluasan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD); serta (iv) perbaikan kualitas data pangan, penguatan koordinasi sejak proses perencanaan, serta koordinasi perumusan kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi *timing* maupun *sequencing* sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap kenaikan inflasi.



Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya melalui (i) strategi operasi moneter *pro-market* untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, masuknya aliran modal asing, serta pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing; (ii) menetapkan tingkat suku bunga BI-Rate yang optimal untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan; (iii) mendorong penerapan kebijakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan pencapaian target inflasi dan mendukung stabilitas eksternal; (iv) menjaga ketersediaan cadangan devisa untuk mendukung stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri (ULN) Pemerintah; serta (v) optimalisasi implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan sektor keuangan tidak hanya diarahkan pada upaya menjaga stabilitas, namun juga pendalaman sektor keuangan, melalui penguatan peran sektor keuangan, khususnya pada sektor yang mendukung program prioritas pembangunan (termasuk UMKM).

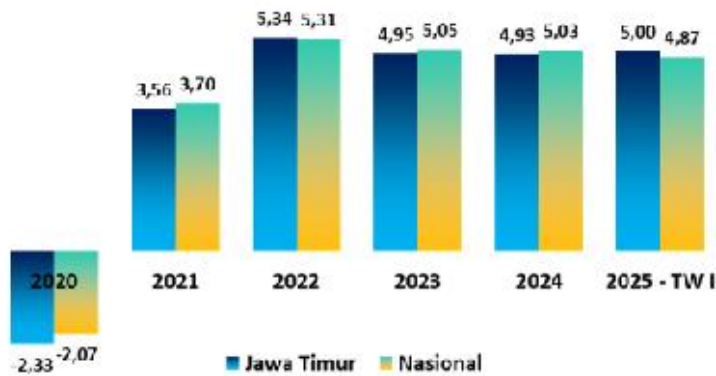
Dari aspek kewilayahan, pada tahun 2026 Wilayah Jawa ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,7–6,1 persen dengan fokus pada pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, serta kawasan komoditas unggulan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan tersebut diantaranya komoditas tebu yang berlokasi di Cirebon-Majalengka, Pegunungan Kendeng, Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang, serta Tapal Kuda. Ekonomi biru di Kawasan Indramayu-Cirebon, Pati-Rembang, Pacitan-TrenggalekTulungagung, Lamongan, serta Sumenep. Kawasan pengembangan industri seperti Cilegon-Serang-Tangerang, Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban, Cirebon-Kertajati, Cekungan Bandung, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus. Pengembangan kawasan metropolitan seperti kawasan aglomerasi Jakarta, WM Bandung, Semarang, dan Surabaya juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Wilayah Jawa. Selain itu, terdapat pengembangan kawasan perkotaan Non-WM serta pengembangan kawasan pariwisata ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor jasa serta konsumsi rumah tangga.

3.1.2.2. Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

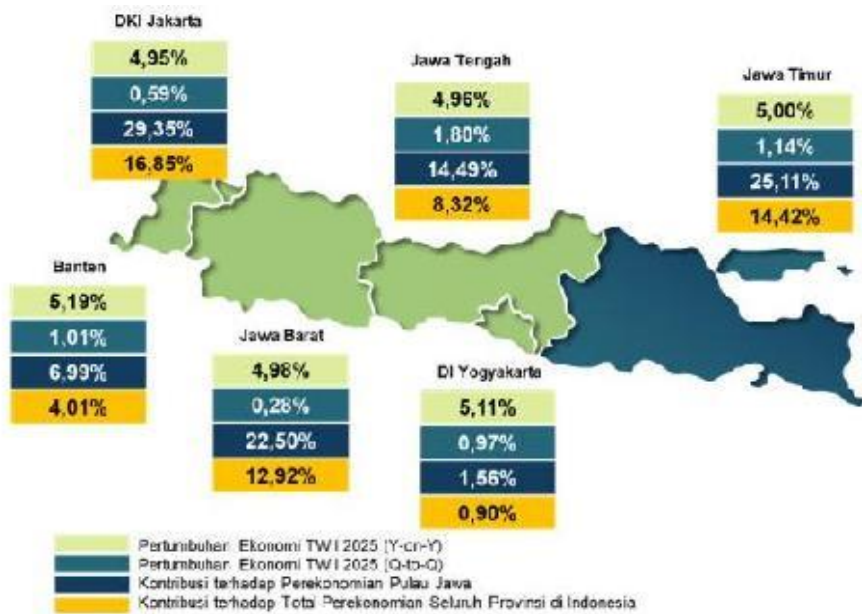
Perekonomian Jawa Timur tahun 2024 menunjukkan kinerja positif yaitu tumbuh 5 persen. Ekonomi Jawa Timur ditopang oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,85 persen, perdagangan sebesar 18,81 persen dan pertanian sebesar 10,66 persen. Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya (5,76 persen), Kota Madiun (5,73 persen), Kabupaten Sidoarjo (5,54 persen), Kota Pasuruan (5,45 persen), Kota Malang (5,41 persen), Kabupaten Pasuruan (5,34 persen), Kota

Blitar (5,33 persen), Kota Mojokerto (5,32 persen), Kabupaten Mojokerto (5,29 persen), Kota Probolinggo (5,15 persen), Kabupaten Jombang (5,15 persen), Kota Batu (5,04 persen), Kabupaten Malang (4,96 persen), dan Kabupaten Kediri (4,95 persen). Pada Triwulan I Tahun 2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,00 (y-o-y).

Gambar 3. 6 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025



Gambar 3. 7 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Triwulan I Tahun 2025
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan mencapai 4,80% sampai 5,63%. Sektor penopang perekonomian Jawa Timur diproyeksikan masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.

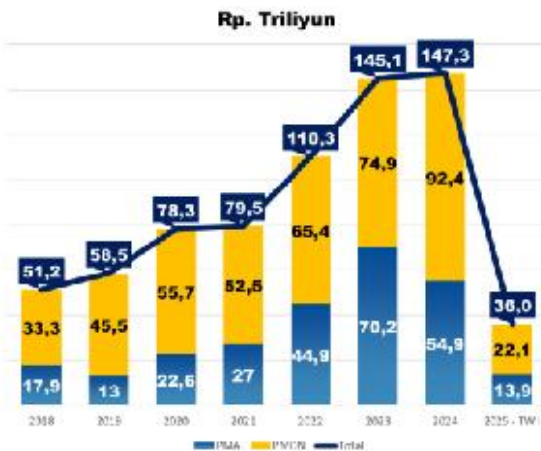
Tabel 3. 5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2026

Organisasi/Lembaga	Proyeksi (%)	
	2025	2026
Bank Indonesia Prov Jatim	4,70-5,50	4,80 – 5,60
FEB Universitas Airlangga	4,70 – 5,12	4,60 – 4,90

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Total Ekspor Jawa Timur hingga Maret Tahun 2025 mencapai USD 6,13 miliar, sedangkan impor mencapai sebesar USD 6,99 miliar. Sementara itu, Neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit sebesar USD 859 Juta. Ekspor nonmigas memberikan kontribusi sebesar 97,55 persen dari total ekspor. Kontribusi ekspor non migas yang besar disokong oleh komoditas perhiasan/permata, lemak dan minyak hewani/nabati, tembaga, kayu dan barang dari kayu, ikan, krustasea dan moluska, serta berbagai produk kimia.

Kinerja Investasi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp 36 Trilyun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,9 Trilyun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 22,1 Trilyun. Selama 5 Tahun terakhir realisasi investasi Jawa Timur menunjukkan tren positif.



Gambar 3. 8 Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur 2019-Triwulan I 2025
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Inflasi Jawa Timur pada bulan April tahun 2025 mencapai 1,35 persen (y-o-y) dan 0,93 persen (m to m) atau lebih rendah dari inflasi Nasional. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Jawa Timur bulan April tahun 2025 adalah Tarif Listrik, Emas Perhiasan, Angkutan Udara, Bawang Merah, dan Kelapa. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar ialah cabe rawit, daging ayam ras, telur ayam ras dan cabe merah.



Gambar 3. 9 Perkembangan Inflasi Jawa Timur 2024-April 2025
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025



Pada triwulan IV 2024, DPK korporasi di perbankan tercatat tumbuh 18,53% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,21% (yoy). Di tengah peningkatan penyaluran kredit korporasi, perlambatan ini ditengarai seiring tendensi pelaku usaha untuk menggunakan DPK dalam mendukung strategi peningkatan kapasitas produksi menjelang HBKN Nataru. Kondisi ini tercermin dari hasil SKDU yang menunjukkan adanya kenaikan penggunaan dana internal korporasi sebagai sumber pembiayaan, yaitu dari 87,15% pada triwulan III 2024 menjadi 90,19%. Berdasarkan komponennya, perlambatan DPK terjadi pada deposito dan giro dari sebelumnya masing-masing tumbuh 25,98% (yoy) dan 19,71% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi 21,35% (yoy) dan 13,78% (yoy).

Perubahan dinamika geopolitik dunia yang dinamis dan mempengaruhi perkembangan ekonomi global diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Kebijakan moneter secara global diperkirakan masih ketat seiring penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) dan suku bunga kebijakan moneter bank sentral lainnya yang diperkirakan akan lebih rendah ke depan.

Pada tahun 2017-2024, ICOR Jawa Timur menunjukkan tren yang relatif stabil pada kisaran 5,31 - 5,65 namun masih lebih rendah dibanding Nasional dengan trend 6,72 – 6,47. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi investasi dalam meningkatkan output (pertumbuhan ekonomi) di Jawa Timur dari tahun ke tahun cenderung lebih efisien dibanding Nasional.

Tantangan yang dihadapi Jawa Timur antara lain belum meratanya Pembangunan ekonomi wilayah yang diindikasikan dari adanya ketimpangan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur khususnya antara wilayah Selatan, Utara serta Madura. Inflasi Jawa Timur hingga awal tahun 2025 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ sehingga dapat memperkuat optimisme ekonomi Jawa Timur terjaga positif di tahun 2025.

Ekonomi Jawa Timur diharapkan akan tumbuh secara inklusif dan berdampak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta pendidikan yang semakin membaik.

Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur Tahun 2026, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;



6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* dan ekonomi biru/*blue economy* dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

Menjadi *center of gravity* ekonomi kawasan timur Indonesia, Provinsi Jawa Timur tumbuh menjadi kawasan strategis berskala nasional karena kekuatan pasarnya (*market strength*). Oleh karena itu diperlukan arah kebijakan kewilayahan untuk menciptakan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung keterpaduan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Arah pengembangan wilayah Kota Probolinggo Tahun 2026 menjadi acuan dalam pengembangan Kota Probolinggo yang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 serta bagian dari Kawasan BTS dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.

Arah Pengembangan Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya) berdaya saing tinggi dan mendorong investasi pada sektor potensial (pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi perkantoran, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan).
2. Pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk mendorong pengembangan kawasan strategis Bromo – Tengger – Semeru.
3. Peningkatan kualitas sistem layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan akses ke simpul transportasi lainnya.
4. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
5. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan



berkelanjutan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, akses rumah tangga terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah serta tetap memastikan pemenuhan akses sanitasi layak terhadap masyarakat, dan penanganan terhadap kawasan kumuh.

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
7. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan strategi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor prioritas yang berkontribusi terhadap emisi GRK yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya adalah pertanian, transportasi, energi, serta pengelolaan sampah dan air limbah. Pelaksanaan aksi pembangunan karbon perlu diiringi dengan penguatan kerja sama pentahelix sebagai bentuk kolaborasi berbagai sektor dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana gelombang pasang, banjir, banjir bandang, cuaca ekstim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, kegagalan teknologi dan lekuefaksi.

3.1.2.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo

Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren positif dengan capaian pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tercatat sebesar 5,15%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), terjadi penurunan sebesar 0,89%, dari 6,04% menjadi 5,15%. Penurunan ini mencerminkan kontraksi pertumbuhan yang terjadi seiring dengan berakhirnya fase pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan sempat terdorong oleh efek rebound ekonomi. Dengan demikian, meskipun tetap tumbuh positif, laju pertumbuhan mulai menyesuaikan ke level yang lebih stabil. Kondisi ini diperkirakan dapat dipertahankan di tahun 2025 dan 2026 di tengah ketidakpastian global dan dinamika regional. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo diproyeksikan dapat tumbuh 0,13% menjadi 5,28%.

Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029, tahun 2026 merupakan milestone yang penting dalam penahapan pembangunan di Kota Probolinggo. Oleh karena itu perekonomian Kota Probolinggo tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,47%. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dalam struktur ekonomi Kota Probolinggo diperkirakan dapat terus tumbuh



pada tahun 2026. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB diperkirakan naik menjadi 15,10% dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperkirakan naik menjadi 26,53%. Peran Kota Probolinggo sebagai PKW dan ketersediaan infrastruktur merupakan dukungan terhadap pengembangan sektor primer dan sekunder. Di sisi lain Pemerintah Kota Probolinggo juga terus berupaya mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata diperkirakan juga terus tumbuh seiring dengan pengembangan destinasi dan ameniti wisata. Pengembangan destinasi dan amenity wisata tersebut tidak hanya bertujuan untuk pengembangan wisata lokal namun juga untuk mendukung pengembangan kawasan strategis BTS. Pada tahun 2026 rasio kewirausahaan diperkirakan naik menjadi 8,62% dan rasio PAD sektor Pariwisata terhadap Total PAD diperkirakan naik menjadi 4,69%. Sektor pertanian dan perikanan tetap mendapat perhatian guna mendukung ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan

Inflasi Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 1,90% atau turun sebesar 0,96% dari tahun 2023 yang sebesar 2,86%. Angka inflasi Kota Probolinggo pada tahun 2025 perlu dikendalikan agar tidak mengurangi daya beli serta menyebabkan ketimpangan. Pada tahun 2026 inflasi Kota Probolinggo perlu mempertimbangkan target nasional sebesar $2,5 \pm 1,0\%$. Guna mendukung hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna stabilisasi harga pada tahun 2026.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB per Kapita sebagai cerminan tingkat kesejahteraan di Kota Probolinggo. Peningkatan PDRB per Kapita tersebut tentunya harus diikuti dengan kebijakan untuk memastikan pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Guna memastikan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, target PDRB per Kapita Kota Probolinggo pada tahun 2026 adalah sebesar 82,20 juta Rp dengan target Indeks Gini sebesar 0,322.

Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,15%. Pada tahun 2026 Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal diharapkan dapat dipertahankan sebesar 1,15%. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Probolinggo pada Tahun 2026 diperkirakan menjadi 16,84% melalui peningkatan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,09 dan diupayakan turun menjadi 3,084 pada tahun 2026 guna menjamin tingkat efisiensi investasi. Guna peningkatan investasi diperlukan langkah-langkah strategis khususnya untuk menjamin kepastian hukum investasi. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan perdagangan antara lain melalui promosi dan misi dagang serta kerja sama antardaerah, inisiasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM.

Dari sisi perpajakan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendukung kebijakan peningkatan *local tax* guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Guna menjamin keselarasan pembangunan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota, penetapan target indikator makro Tahun 2026 telah mengacu pada penetapan target makro untuk Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Secara umum penetapan target dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 telah selaras

dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Keselarasan antara target pembangunan antara Nasional – Provinsi Jawa Timur – Kota Probolinggo secara detail akan dibahas pada Bab VI.

Tabel 3. 6 Target Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2026	
		RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47- 5,64	5,47
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,12 - 79,45	78,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,07-3,67	3,67
4	Tingkat Kemiskinan (%)	5,52-5,38	5,38
5	Rasio Gini	0,335 - 0,322	0,322
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO ₂ eq)	349743,16	392.531,068

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Kebijakan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026 diterjemahkan dalam langkah-langkah operasional berupa prioritas dan arah kebijakan yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 7 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PROBOLINGGO 2025-2029	
TUJUAN dan SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral, dengan Sasaran: - Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah - Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif, dengan Sasaran: - Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	
RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026	
PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	- Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global - Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah - Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah - Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui <i>Branding</i> dan Promosi - Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal



Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	a. Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis sektor pertanian dan perikanan serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan b. Inisiasi Pengembangan Sistem Cadangan Pangan Daerah
---	--

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Arah kebijakan keuangan Kota Probolinggo, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

3.2.1.1. SUMBER PENDANAAN APBD

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah ini nantinya akan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah untuk kategori Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD



merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun, dan adanya tren penyesuaian dan efisiensi dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maka diharapkan pada tahun 2026 ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat naik secara bertahap, selain itu perlu dilakukan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2026 yang mengacu pada perencanaan jangka menengah, tema dan prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

1. Melakukan survei dan pendataan potensi objek pajak/retribusi baru untuk selanjutnya dilakukan analisa, uji potensi, dan hal lain yang diperlukan untuk mendapatkan nilai akupansi.
2. Melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital dalam pengelolaan pajak/retribusi
3. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pembayaran pajak/retribusi.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat/ Pelaku Usaha/Wajib Pajak terkait peraturan perundang-undangan tentang PDRD, bersama Legislatif.
2. Melakukan Uji Petik potensi PAD secara berkala.
3. Melakukan rekonsiliasi data usaha, perizinan, dan kepatuhan perpajakan dengan SKPD terkait secara berkala.
4. Melaksanakan Operasi Gabungan bersama Tim Pembina SAMSAT untuk optimalisasi Opsen PKB dan BBN KB.
5. Menambah alat rekam pajak untuk pajak daerah yang sifatnya self asesment dan penambahan alat pengukur meteran air khusus untuk obyek Pajak Air Tanah
6. Menghimbau Wajib Pajak Parkir untuk memasang portal parkir sebagaimana ketentuan perundang-undangan
7. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi berkaitan dengan pemenuhan laporan sebagai syarat salur dana pemerintah pusat dan provinsi.
8. Pendampingan Kejaksaan dalam rangka upaya pengendalian dan optimalisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
9. Bekerjasama dengan direktorat jenderal pajak dan direktorat jenderal perimbangan keuangan dalam hal pertukaran data wajib pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing



10. Bekerjasama dengan BPN untuk melakukan pemutakhiran NJOP dan peta bidang melalui pengintegrasian aplikasi pemetaan lahan guna memutakhirkan data lokasi, luas dan kondisi terkini bidang tanah yang merupakan obyek pajak PBB dan BPHTB

Perkembangan realisasi pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2023-2024, dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang mendorong ataupun menghambat. Yang termasuk faktor pendorong, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diketahui bahwa peningkatan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Probolinggo yang dari tahun 2020 hingga 2024 meningkat sebesar 23,12% (BPS, 2025). Hal ini berarti omzet yang diperoleh pengusaha cenderung meningkat sehingga meningkatkan dasar pengenaan pajak ataupun meningkatkan jumlah wajib pajak.
- b. Basis data perpajakan yang diperoleh dari sumber eksternal maupun verifikasi lapangan secara langsung. Informasi mengenai wajib pajak baru serta data terkait omzet akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Probolinggo agar potensi pajak daerah dapat direalisasikan.
- c. Sinergi antara satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan koordinasi penindakan. Adanya dukungan data dari DPMPSTP serta Dispopar dapat ditindaklanjuti oleh BPPKAD, dan apabila diperlukan, BPPKAD bisa bekerja sama dengan Satpol-PP agar dapat melakukan penertiban atas wajib pajak yang kurang kooperatif.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan realisasi pendapatan adalah:

- a. Pandemi Covid-19 di tahun 2019-2020 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan pada masyarakat sehingga menghambat kegiatan usaha yang berdampak menurunkan omzet. Hal ini membuat dasar pengenaan pajak menjadi turun.
- b. Rendahnya kesadaran wajib pajak menyebabkan menurunnya kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban pajaknya, seperti pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi riil, pembayaran yang tidak tepat waktu, serta penolakan upaya pengawasan dari Pemerintah Kota Probolinggo. Selain itu, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemberian fasilitas dan layanan dari Pemerintah Kota sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat
- c. Kurangnya penegakan hukum memicu ketidakpatuhan pada Wajib Pajak. Adapun sanksi yang diatur secara formal yakni pemberian denda administrasi keterlambatan sebesar 1% tiap bulan. Belum terdapat sanksi yang mengena seperti pembatasan ataupun penutupan usaha karena keterbatasan wewenang Pemerintah Kota dalam menerbitkan izin yang dapat terbit secara otomatis.
- d. Ketidaktahuan masyarakat atas prosedur perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, serta pembayaran Pajak Daerah membuat masyarakat enggan membayar pajak. Selain itu, adanya prosedur lain yang berhubungan seperti perizinan juga membuat masyarakat



enggakan melakukan usaha, sehingga jumlah wajib pajak tidak meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi masif secara langsung kepada masyarakat

Untuk proyeksi pendapatan tahun 2026-2027 didasarkan pada berbagai hal, yakni target Pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan sebesar 5% setahun sesuai dengan arahan Presiden Indonesia, tren realisasi pajak daerah beberapa tahun terakhir yang digunakan sebagai tolak ukur penetapan target sesuai dengan kondisi yang ada, sebaran wajib pajak, serta kebijakan tertentu yang dapat mempengaruhi realisasi pajak daerah, seperti rencana penertiban atas reklame yang tidak sesuai dengan regulasi daerah.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Probolinggo pada kurun waktu Tahun 2020-2027, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2023 s/d 2027

NO	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI Tahun 2023 (Audited)	REALISASI Tahun 2024 (Audited)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2025 (APBD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2025 (Perubahan RKPD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2026 (RKPD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2027 (Rancangan Akhir RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	968,433,112,167.29	992.701.449.220,29	987.730.680.350,00	987.877.750.294,00	918.544.460.033,64	1.038.409.542.948,74
4.1	Pendapatan Asli Daerah	209,779,956,402.29	206.341.550.899,29	242.541.964.799,00	241.144.432.919,00	256.289.928.417,64	267.366.022.437,17
4.1.01	Pajak daerah	56,636,986,040.36	63.360.763.657,57	90.796.892.010,00	90.984.038.585,00	96.196.189.670,00	106.430.118.218,53
4.1.02	Retribusi daerah	12,202,736,808.00	20.582.077.811,00	141.746.973.476,00	142.015.330.731,00	149.664.978.618,94	150.113.156.255,24
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1,421,600,239.43	1.539.068.149,53	1.512.480.263,00	1.609.872.868,00	1.575.393.486,00	1.769.089.308,21
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	139,518,633,314.50	120.859.641.281,19	8.485.619.050,00	6.535.190.735,00	8.853.366.642,70	9.053.658.655,19
4.2	Pendapatan Transfer	758,653,155,765.00	786.359.898.321,00	745.188.715.551,00	746.733.317.375,00	662.254.531.616,00	771.043.520.511,57
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	634,206,402,044.00	656.882.353.121,00	689.716.222.000,00	681.446.404.175,00	598.087.588.616,00	706.010.387.511,57
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124,446,753,721.00	114.015.034.200,00	55.472.493.551,00	65.286.913.200,00	64.166.943.000,00	65.033.133.000,00

Catatan : Data *Audited*, Mei 2025

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo, 2025



3.2.1.2. SUMBER PENDANAAN NON APBN DAN NON APBD

Dalam dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif, kreativitas dalam menjangkau beragam sumber pendanaan menjadi elemen penting untuk mendukung pencapaian target Pembangunan, sehingga pembiayaan alternatif dipandang sebagai instrument strategis untuk mengurangi ketergantungan pada skema pendanaan konvensional, seperti pajak, sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Adapun beberapa jenis pendanaan Non APBN dan Non APBD yang bisa diakses oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Pinjaman Daerah
- b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP)
- c. Obligasi Pemerintah Daerah
- d. Corporate Social Responsibility (CSR)
- e. Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO
- f. Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)

Dalam hal ini Kota Probolinggo memang belum mengakses pendanaan Npn APBN dan Non APBD, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di masa mendatang, seiring dengan kebutuhan Pembangunan Daerah yang semakin meningkat, Kota Probolinggo akan mulai mengakses sumber-sumber pendanaan lain selain APBN dan APBD.

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dalam Struktur APBD dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi : merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek ;



- b. Belanja modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi ;
- c. Belanja tidak terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer : merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2026 disesuaikan dengan program prioritas kepala daerah terpilih serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
2. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional, antara lain dukungan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat;
3. Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan Posyandu 6 bidang SPM;
4. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, antara lain:
 - Peningkatan kualitas pendidikan melalui integrasi nilai-nilai keagamaan yang didukung perluasan cakupan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sektor informal;
 - Perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui fasilitasi pembiayaan ;
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung Usaha Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui integrasi basis data terpadu (DTSEN) serta pemberian fasilitasi/bantuan yang tepat sasaran ;
 - Stimulan Peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif kelompok Masyarakat dalam Pembangunan ;
 - Peningkatan efektifitas pembiayaan pembangunan berbasis kewilayahan ;
 - Penguatan ekonomi kerakyatan melalui stimulan pengembangan usaha bagi UMKM ;
 - Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang didukung usaha peningkatan produktivitas sektor pertanian ;
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kota;
 - Perluasan cakupan pendapatan daerah melalui penguatan basis data dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan ;
 - Peningkatan nilai manfaat dan produktifitas aset daerah ;



- Penguatan tata kelola Sumberdaya Manusia Aparatur Daerah guna mendorong efektivitas pelayanan publik ;
 - Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis Kawasan;
 - Penguatan Citra Kota melalui Integrasi Konsep Probolinggo Bersolek yang terintegrasi dengan usaha penanggulangan bencana daerah.
5. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
 6. Menjaga keberlanjutan dan keseimbangan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektif serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
 7. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tren persentase realisasi anggaran total belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2021 - 2024 mengalami kenaikan, mulai dari 80,71% dan terakhir di tahun 2024 persentase realisasi belanja adalah 94,5%. Hal ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk proyeksi Belanja, Persentase terbesar jenis belanja adalah belanja operasi yang juga terus mengalami kenaikan realisasi, mulai dari 87,71% dan terakhir di tahun 2024 persentase realisasi belanja operasional mencapai 94,79%. Demikian juga dengan realisasi belanja modal dari tahun 2021-2024 juga mengalami kenaikan, mulai awal 43,63% sampai terakhir tahun 2024 mencapai 91,28%.

Untuk proyeksi belanja tahun 2026-2027 lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan baru dari Kepala Daerah terpilih untuk mencapai visi-misi yang telah diperjanjikan dalam RPJMD tahun 2025-2026.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 2 (dua) tahun terakhir, realisasi belanja daerah tahun 2023-2024 serta alokasi belanja daerah tahun 2025 dan 2026 maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2023 – 2027 dituangkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Probolinggo Tahun 2023 s/d 2027

NO	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI Tahun 2023 (Audited)	REALISASI Tahun 2024 (Audited)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2025 (APBD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2025 (Perubahan RKPD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2026 (RKPD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2027 (Rancangan Akhir RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH	1,016,894,990,872.63	1.039.189.025.613,39	1.055.145.680.350,00	1.076.841.886.016,00	967.749.460.033,64	1.086.409.542.948,74
5.1	BELANJA OPERASI	902,709,536,086.63	962.025.905.595,45	998.674.683.592,00	1.001.444.474.898,00	912.340.016.841,64	996.286.402.569,36
5.1.01	Belanja Pegawai	437,510,461,343.00	482.680.530.154,99	521.850.169.876,00	513.003.170.645,05	453.163.250.523,02	534.636.874.889,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404,026,544,251.90	385.430.948.232,01	432.072.418.074,00	443.716.920.671,95	427.763.286.562,62	421.191.406.448,26
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	59,789,919,852.73	93.723.268.208,45	44.597.995.642,00	44.459.283.581,00	31.166.479.756,00	40.193.021.231,85
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,382,610,639.00	191.159.000,00	154.100.000,00	265.100.000,00	247.000.000,00	265.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL	112,290,783,286.00	75.418.956.796,94	51.420.996.758,00	72.797.411.118,00	51.659.443.192,00	85.073.140.379,38
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48,060,266,778.00	38.597.721.026,00	27.383.766.500,00	29.065.557.605,00	13.498.761.857,00	25.304.054.124,90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,561,483,076.00	16.393.751.764,94	14.901.354.757,00	17.985.052.140,00	24.339.623.091,00	28.158.691.919,23
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,310,177,902.00	18.229.916.560,00	8.082.981.701,00	24.316.407.573,00	13.515.686.125,00	30.215.722.891,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,252,807,309.00	2.050.139.196,00	1.002.143.800,00	1.009.643.800,00	11.600.000,00	1.208.805.776,50
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	106,048,221.00	147.428.250,00	50.750.000,00	420.750.000,00	293.772.119,00	185.865.667,75
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,894,671,500.00	1.744.163.221,00	5.050.000.000,00	2.600.000.000,00	3.750.000.000,00	5.050.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,894,671,500.00	1.744.163.221,00	5.050.000.000,00	2.600.000.000,00	3.750.000.000,00	5.050.000.000,00

Catatan : Data *Audited*, Mei 2025

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo, 2025



3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain yang Diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Probolinggo Tahun 2023 s/d 2027

NO	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI Tahun 2023 (Audited)	REALISASI Tahun 2024 (Audited)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2025 (APBD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2025 (Perubahan RKPD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2026 (RKPD)	PROYEKSI/TARGET Tahun 2027 (Rancangan Akhir RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PEMBIAYAAN	183,913,590,820.35	135.451.712.115,00	67.415.000.000,00	88.964.135.722,00	49.205.000.000,00	48.000.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	183,913,590,820.35	135.451.712.115,00	67.415.000.000,00	88.964.135.722,00	56.205.000.000,00	48.000.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	183,913,590,820.35	135.451.712.115,00	67.415.000.000,00	88.964.135.722,00	56.205.000.000,00	48.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	7.000.000.000,00	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	7.000.000.000,00	-

Catatan : Data *Audited*, Mei 2025

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo, 2025



BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo pada 20 Februari 2025, maka terdapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Periode Baru Tahun 2025-2029 dengan Tahun rencana 2026-2030. Oleh karena itu RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 menjadi Tahun pertama dari RPJMD dimaksud. Adapun RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 saat ini masih dalam tahap penetapan Peraturan Daerah dari Rancangan Akhir RPJMD yang telah disusun bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2026. Secara khusus RKPD ini menjadi titik krusial serta memiliki tingkat urgensi yang tinggi sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Periode RPJMD yang baru sebagai tahun awal periode, yang juga akan digunakan sebagai dasar penentuan keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah sampai dengan akhir periode RPJMD dimaksud.

Perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ini dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya (2024) yang juga menjadi *baseline* capaian kinerja untuk penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 serta analisa lebih lanjut terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta keterkaitan prioritas kebijakan dengan tingkat nasional dan provinsi sebagai dasar perumusan kebijakan. Hasil dari perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahunan dimaksud nantinya akan dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana serta pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya guna merumuskan dukungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahunan yang telah ditetapkan. Selain itu juga pertimbangan terhadap telaah dan Usulan Kegiatan berdasarkan Pokok-pokok Pikiran DPRD guna pencapaian prioritas dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 dilakukan dalam rangka mencapai Visi Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk periode Tahun 2025-2029.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 ini merupakan penjabaran Tahun Pertama dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang saat ini masih dalam tahapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (pembahasan dengan DPRD) dan telah disusun hingga tahapan Rancangan Akhir secara Paralel dengan Penyusunan RKPD Tahun 2026 ini. RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 ini merupakan tahapan awal dari periode perencanaan Pembangunan baru dari kepemimpinan **dr. H. Aminuddin, Sp.OG(K), M.Kes.** sebagai Wali Kota Probolinggo bersama **Hj. Ina Dwi Lestari Buchori, S.AP., M.M.** sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo hasil pemilihan umum Tahun 2024, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Kepala Daerah Kota Probolinggo dimaksud telah berkomitmen menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan. Sebagai tahun awal periode Pembangunan jangka menengah daerah yang baru, maka RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 ini memiliki peran strategis dalam usaha pencapaian seluruh target kinerja yang telah diperjanjikan dalam periode RPJMD yang baru mengingat Tahun 2026 sebagai *starting point* dan landasan dasar untuk pencapaian target pada Tahun-tahun selanjutnya hingga akhir periode RPJMD serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dari seluruh rangkaian prioritas pada tahun rencana RPJMD.

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 berdasarkan Rancangan RPJMD dimaksud yaitu :

1. VISI : **“Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif”**
2. MISI :
 - a. Misi 1 : Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan

Misi pertama ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pondasi utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Probolinggo. Secara filosofis, SDM yang unggul dan berdaya saing menjadi modal dasar yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo menempatkan penguatan kualitas SDM sebagai prioritas utama, yang tercermin dari penempatan misi ini di urutan pertama. Komitmen ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai visi Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif. Pilar utama dalam penguatan SDM ini bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dua sektor fundamental yang saling berkaitan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif.

Dalam implementasinya, misi ini diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas. Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui jaminan mutu layanan pendidikan di semua jenjang, mendukung penuh program wajib belajar 13



tahun, serta mendorong peningkatan daya saing pemuda melalui pengembangan potensi di bidang olahraga dan kepemudaan. Di sisi lain, cakupan layanan kesehatan masyarakat juga diperluas, dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan serta penguatan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, serta memiliki daya saing yang tinggi, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan Kota menuju masa depan yang lebih baik.

b. Misi 2 : Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial & Pemajuan Kebudayaan

Misi ini bertujuan untuk mempercepat penanganan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan di Kota Probolinggo. Pengentasan kemiskinan secara efektif menjadi prioritas utama, dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan produktif. Pemerintah Kota Probolinggo akan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, memastikan adanya kesetaraan gender, serta menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran, menekan ketimpangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial yang merata akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan visi Kota Probolinggo yang sejahtera dan inklusif.

Di sisi lain, pemajuan kebudayaan juga menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, berkarakter, dan berdaya saing di tengah dinamika modernisasi. Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya daerah, sekaligus mendorong pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari identitas kota yang kuat. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi prioritas untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman dan harmonis, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman sosial. Melalui misi ini, Kota Probolinggo optimis dapat mewujudkan kehidupan sosial yang adil, setara, dan bermartabat, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya yang memperkuat jati diri daerah.

c. Misi 3 : Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital

Misi ketiga ini berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi Kota Probolinggo yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memaksimalkan potensi lokal di sektor perdagangan, jasa, dan industri. Sebagai kota dengan tipologi perkotaan kecil, pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan lapangan kerja, khususnya melalui penguatan UMKM dan industri kreatif berbasis potensi lokal. Pemerintah Kota Probolinggo juga akan mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung transformasi ekonomi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi usaha



di berbagai sektor. Melalui akselerasi investasi produktif, peningkatan daya saing perdagangan dan jasa, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, Kota Probolinggo diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor-sektor unggulannya secara merata.

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan di Kota Probolinggo tidak hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas lahan pertanian yang terbatas, tetapi juga mengutamakan strategi pengelolaan distribusi pangan melalui sektor perdagangan. Intervensi pengendalian harga dan stabilisasi pasokan menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pemerintah kota akan memperkuat jejaring perdagangan pangan antarwilayah serta memfasilitasi pengembangan pasar yang efisien dan transparan. Dengan strategi ini, ketahanan pangan dapat terjaga, sementara perekonomian daerah terus tumbuh berbasis potensi lokal yang didukung oleh investasi produktif dan integrasi teknologi digital. Misi ini diharapkan mampu mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota modern yang tangguh, sejahtera, dan adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan ekonomi global

d. Misi 4 : Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan

Misi keempat bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Probolinggo yang adaptif, modern, dan berorientasi pada layanan publik yang prima. Dalam upaya membangun birokrasi yang profesional, mandiri, dan akuntabel, Pemerintah Kota Probolinggo akan mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas, agar mampu merespon tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan inovatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien ini juga didukung dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, pembangunan ekosistem pelayanan publik yang humanis dan modern menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo akan mendorong penguatan pelayanan publik terpadu, memperluas cakupan layanan berbasis digital, serta mengadopsi inovasi-inovasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Misi ini mendukung terwujudnya Kota Probolinggo yang tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika pemerintahan di era transformasi digital.

e. Misi 5 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan.

Misi kelima menegaskan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi penggerak utama



perekonomian, tetapi juga berwawasan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perkotaan, seperti keterbatasan ruang, pertumbuhan kawasan permukiman kumuh, dan risiko bencana, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah secara merata dan terintegrasi dengan penataan ruang yang adaptif. Penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, pembangunan infrastruktur ini harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar tidak menambah beban terhadap kualitas lingkungan hidup yang sudah menurun.

Selain itu, pembangunan infrastruktur Kota Probolinggo juga diarahkan untuk memperkuat resiliensi terhadap bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam. Upaya mitigasi dan pengelolaan risiko bencana menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah, guna menciptakan kota yang tangguh menghadapi perubahan iklim dan potensi bencana lainnya. Pemantapan resiliensi perkotaan diwujudkan melalui pengembangan ruang terbuka hijau, konservasi lingkungan, serta penerapan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Kota Probolinggo diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, modern, dan adaptif.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kota Probolinggo secara keseluruhan. Hal yang dimaksudkan sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Persyaratan utama dalam penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah measurable dan tangible. *Measurable* dalam artian bahwa Tujuan dan Sasaran harus dapat diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan *Tangible* yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 secara terperinci beserta indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD, sebagaimana Tabel 4.1.



Tabel 4. 1 Tujuan & Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD 2026	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target Kinerja RPJMD 2026	Urusan Pengampu	PERANGKAT DAERAH
Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,17	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Indeks Pendidikan	Indeks	0,720	1. Pendidikan	Disdikbud
								2. Perpustakaan	Disperpusip
				Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,839	3. Kepemudaan dan Olahraga	Dispopar
								1. Kesehatan	Dinkes PPKB
Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	1. Persentase Penduduk Miskin 2. Indeks Gini 3. Indeks Kebudayaan (berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD/Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah)	%	5,38	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Persentase Penurunan PMKS/PPKS	%	9,596	2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,78	1. Sosial	Dinsos PPPA
		Indeks Indeks	0,322 72	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,67	2. Pemberdayaan Masyarakat	
								Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Disperinaker
				Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	%	35,16	Tenaga Kerja	
								Kebudayaan	Disdikbud
Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB per Kapita	%	5,47	Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	Indeks	71,02	1. Trantibum	Satpol PP
					Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			2. Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol
		Juta Rupiah	82,20		1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	15,10	1. Perindustrian	Disperinaker
					2. Kontribusi Sektor	%	26,53	2. Perdagangan	DKUP



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD 2026	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target Kinerja RPJMD 2026	Urusan Pengampu	PERANGKAT DAERAH
					Perdagangan terhadap PDRB				Dispopar
					3. Rasio Kewirausahaan	Rasio	8,62	3. Koperasi dan UMKM	
					4. Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	Rasio	4,69	4. Pariwisata	
					5. NTP (Nilai Tukar Petani)	Nilai	111,50	5. Pertanian	
					6. NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Nilai	97,22	6. Kelautan dan Perikanan	
				Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,98	Pangan	DKPPP
Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif	1. ICOR 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rasio %	3,084 16,84	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	%	1,15	Penanaman Modal	DPMPTSP
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86.54	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Nilai SAKIP	Nilai	84.69	1. Unsur Staff (Setda)	Setda
								2. Perencanaan	Bapperida
								3. Penelitian dan Pengembangan	
								4. Statistika	Diskominfo
								5. Kearsipan	Disperpusip
					Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	Keuangan	BPPKAD
					Level Maturitas SPIP	Kategori	3	Pengawasan	Inspektorat
						Indeks		1. Kepegawaian	BKPSDM



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA RPJMD 2026	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target Kinerja RPJMD 2026	Urusan Pengampu	PERANGKAT DAERAH
					Indeks Sistem Merit		Indeks : 0,76 Nilai : 312	2. Pendidikan dan Pelatihan	
					Nilai SPBE	Nilai	4,15	1. Komunikasi dan Informatika 2. Persandian	
				Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,65	1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil
								2. Unsur Kewilayahan	Kecamatan
								3. Penanaman Modal	DPMPSTP
								4. Kesehatan	Dinkes PPKB
								5. Unsur Staff	Setda dan Setwan
					Indeks Inovasi Daerah	Indeks	71,05	Penelitian dan Pengembangan	Bapperida
Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infrastruktur	Indeks	77,64	Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	83,52	1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR PKP
								2. Perumahan dan Kawasan Permukiman	
								3. Pertanahan	
Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 eq	392.531,068	Pelestarian Lingkungan Hidup	Rasio Konektivitas	Rasio	84,61	Perhubungan	Dishub
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	66,59	Lingkungan Hidup	DLH
					Indeks Risiko Bencana	Indeks	100.29	Trantibum Sub Bencana	BPBD



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksud, maka juga telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah, untuk menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sedangkan Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 secara terperinci sebagaimana Tabel 4.2.

Guna keselarasan dukungan terhadap Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 (Program Prioritas, Program Hasil Cepat Terbaik, Proyek Strategis Nasional serta Kegiatan Prioritas Utama) sebagai berikut :

1. Pemberian Makan Bergizi
 - a. Pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren yang terintegrasi dalam pelaksanaan Tujuan : Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
 - b. Pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta kelompok rentan lainnya (lansia, PMKS, dll) yang terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (1) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan serta (2) Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender.
2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang didukung Usaha Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan, Cakupan Akses Layanan Kesehatan serta Usaha Percepatan Penurunan Stunting
Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian guna mendukung Usaha Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Jaminan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida
Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (a) Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah dari Sektor Pertanian, Perkebunan Peternakan, dan Perikanan serta (b) Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal
4. Pengembangan Sekolah Unggul Terintegrasi serta Usaha Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan, didukung Perbaikan Sarana Prasarana dan integrasi digitalisasi
Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Pendidikan Berkualitas yang Merata
5. Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Stimulan Usaha



Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran yang terintegrasi melalui Fasilitas Stimulan Kartu Amanah terintegrasi :

- a. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender → bagi peningkatan kesejahteraan sosial
 - b. Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah → bagi stimulan usaha baik permodalan maupun peralatan
6. Pembangunan Infrastruktur, konservasi sumberdaya air serta dukungan perluasan akses rumah yang terintegrasi dengan PSU serta akses sanitasi dan air bersih aman
- Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah
7. Peningkatan Rasio Penerimaan Daerah, Penguatan Reformasi Birokrasi dan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis
8. Penguatan Keamanan dan Stabilitas Wilayah, didukung usaha pemberantasan narkoba dan penguatan Kerukunan Umat Beragama
- Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat
9. Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
- Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender
10. Pelestarian Lingkungan Hidup
- Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan
11. Pemerataan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) serta Perluasan Akses Lapangan Kerja
- Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (a) Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah, (b) Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal serta (c) Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing
12. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga
- Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (a) Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan, (b) Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta (b) Pendidikan Berkualitas yang Merata melalui Peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga.

Tabel 4. 2 Strategi & Arah Kebijakan untuk Pencapaian Tujuan & Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029
berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan	Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Indeks Pendidikan	1. Pendidikan	Perluasan, penguatan dan jaminan mutu layanan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun serta daya saing pemuda dan olahraga	1. Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan melalui pelengkapan sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum yang inklusif, serta pengendalian izin pendidikan
					2. Perpustakaan		2. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
					3. Kepemudaan dan Olahraga		3. Penguatan Budaya Baca dan Literasi didukung Konten Lokal dan Digitalisasi Layanan
			Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	1. Kesehatan	Perluasan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	4. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Kepramukaan serta Prestasi dan Pembudayaan Olahraga
					2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung penguatan pengelolaan layanan serta penyediaan sarana prasarana bagi fasilitas kesehatan primer dan rujukan
							2. Peningkatan pemerataan kesejahteraan dan kompetensi Tenaga Kesehatan
Misi 2 : Akselerasi Penanganan Masalah	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Persentase Penduduk Miskin 2. Indeks Gini	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian	Persentase Penurunan PMKS/PPKS	1. Sosial	Penguatan jaminan sosial serta efektifitas pemberdayaan, perlindungan, dan	3. Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga melalui peningkatan cakupan kepesertaan KB dan pembinaan Ketahanan Keluarga
							1. Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dan inklusif berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan	serta Pelestarian Kebudayaan	3. Indeks Kebudayaan (berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD/Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah)	Masyarakat, dan Kesetaraan Gender			pelibatan seluruh kelompok masyarakat	2. Penguatan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
					2. Pemberdayaan Masyarakat		Penguatan kapasitas dan partisipasi kelompok masyarakat serta lembaga kemasyarakatan, termasuk kelompok rentan dalam pembangunan daerah
				Indeks Pembangunan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial serta perlindungan dan pemenuhan hak anak
			Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tenaga Kerja	Penguatan Sistem <i>Demand - Driven</i> Ketenagakerjaan	1. Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal dengan Dunia Usaha didukung Perluasan akses informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja 2. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan tenaga kerja
			Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	Kebudayaan	Penguatan Nilai Seni dan Budaya Lokal	Pengelolaan Kesenian Tradisional, Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Museum secara berkelanjutan, partisipatif dan inklusif
			Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Trantibum	Peningkatan kepatuhan, kewaspadaan, dan toleransi dalam mewujudkan stabilitas daerah	Penguatan kualitas pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung penegakan Perda dan Perkada
					2. Kesatuan Bangsa dan Politik		1. Penguatan budaya demokrasi, kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial dalam memelihara stabilitas sosial dan politik daerah -- parpol, ormas, kewaspadaan 2. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, ketahanan ideologi, ekonomi, Sosial dan Budaya dalam memperkuat



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							harmoni masyarakat -- wawasan kebangsaan, ketahanan eksosbud
Misi 3 : Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital	Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB per Kapita	Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1. Perindustrian	Percepatan Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah melalui Modernisasi Sistem serta Penguatan Konektivitas dan Kolaborasi	1. Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) yang didukung Peningkatan Ekosistem Industrialisasi
				2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2. Perdagangan		2. Pengembangan mata rantai perdagangan regional serta standarisasi sarana prasarana perdagangan guna peningkatan nilai ekspor daerah dan stabilitas harga
				3. Rasio Kewirausahaan	3. Koperasi dan UMKM		3. Peningkatan Daya Saing Koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi 4. Penguatan Daya Saing UMKM yang didukung Peningkatan akses ke sumber daya produktif
				4. Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	4. Pariwisata		5. Penataan dan Penguatan Daya Tarik dan Pemasaran Wisata secara kolaboratif dan partisipatif yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 6. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif guna mendukung penguatan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif
				6. NTP (Nilai Tukar Petani)	5. Pertanian		7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian yang berkelanjutan didukung modernisasi sistem, prasarana dan sarana produksi



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				7. NTN (Nilai Tukar Nelayan)	6. Kelautan dan Perikanan		8. Peningkatan Produksi Perikanan yang didukung Fasilitas peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta integrasi teknologi
			Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal	Indeks Ketahanan Pangan	Pangan	Menjamin ketersediaan pangan jangka panjang dan pemanfaatan pangan lokal secara masif	Pengembangan Tata Kelola Pangan melalui penguatan logistik dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan
	Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif	1. ICOR 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Investasi berbasis Potensi Lokal	Penguatan daya tarik investasi melalui kepastian hukum, promosi dan kerjasama penanaman modal, serta kemudahan perizinan sektor ekonomi produktif
Misi 4 : Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Nilai SAKIP	1. Unsur Staff (Setda)	Penerapan prinsip <i>Good Governance</i> yang didukung Profesionalitas SDM dan Digitalisasi	1. Peningkatan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah yang kolaboratif, efektif, efisien, dan akuntabel
					2. Perencanaan		2. Peningkatan kualitas perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung hasil penelitian pengembangan dan berbasis satu data
					3. Penelitian dan Pengembangan		3. Penguatan pengelolaan arsip daerah yang autentik dan terpercaya
					4. Statistika		
					5. Kearsipan		
				Opini BPK terhadap LKPD	Kuangan		4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan 5. Perluasan cakupan pendapatan daerah dan pengendalian <i>Potential Loss</i> Pendapatan Asli Daerah 6. Optimalisasi Pemanfaatan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif dan efisien



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Level Maturitas SPIP	Pengawasan		7. Penguatan Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis manajemen Risiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP
				Indeks Sistem Merit	1. Kepegawaian		8. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi ASN sesuai kebutuhan daerah serta pengembangan karir ASN berbasis Meritokrasi
					2. Pendidikan dan Pelatihan		
				Indeks SPBE	1. Komunikasi dan Informatika		9. Pengembangan ekosistem digital yang andal, aman dan aksesibel dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan
					2. Persandian		
			Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Indeks Pelayanan Publik	1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membangun Ekosistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Humanis dan Modern, serta <i>Scaling Up</i> Inovasi	1. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik yang inklusif dan berorientasi kepuasan masyarakat, didukung penguatan digitalisasi 2. Penguatan Sinergitas peran Lembaga Legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
					2. Unsur Kewilayahan		
					3. Penanaman Modal		
					4. Kesehatan		
					5. Unsur Staff		
				Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan		Peningkatan Kematangan Inovasi Daerah
Misi 5 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Penyediaan dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang mantap	1. Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur strategis yang terintegrasi dan aksesibel guna mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi 2. Peningkatan Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Aman 3. Pemantapan Pembangunan

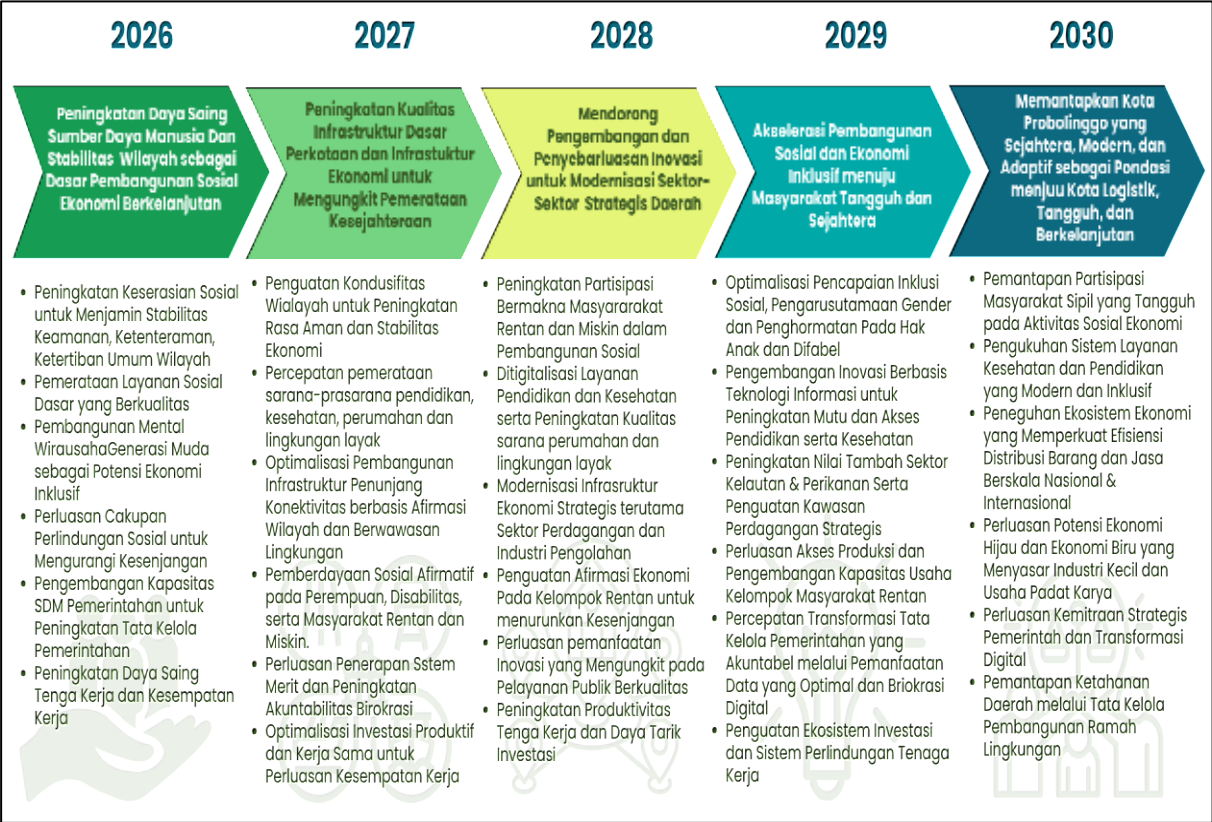


MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							Kewilayahan melalui Harmonisasi Pusat Pelayanan Kota dan Akselerasi Sub Pusat Pelayanan Kota
					2. Perumahan dan Kawasan Permukiman		4. Peningkatan akses hunian layak di perkotaan, percepatan penataan kawasan kumuh perkotaan dan Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman
					3. Pertanahan		5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pertanahan
				Rasio Konektivitas	Perhubungan		6. Peningkatan mobilitas dan konektivitas melalui integrasi multimoda dan sarana prasarana perhubungan
	Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	Pelestarian Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Pengelolaan Sampah terpadu hulu hilir berbasis masyarakat 2. Membangun Citra Kota melalui Peningkatan Daya Tarik Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati 3. Menjamin pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon dengan pelibatan masyarakat
			Resiliensi terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Trantibum Sub Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Perkotaan	Pengembangan Mitigasi Teknis dan Non Teknis di daerah Rawan Bencana melalui peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4.2. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 telah menetapkan tema pembangunan tahunan yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan tahunan. Adapun tema dan prioritas pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana diamanatkan dalam Rancangan Akhir RPJMD dimaksud disajikan pada Gambar 4.1 dibawah ini. Untuk Tahun 2025 sebagai penjabaran Tahun Pertama atau periode awal dari pelaksanaan RPJMD ini, telah ditetapkan Tema Pembangunan **“PENINGKATAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA DAN STABILITAS WILAYAH SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI BERKELANJUTAN.”**

Tema penguatan kapasitas SDM dan kewillayahan ini terkait dengan periode awal Pembangunan jangka menengah daerah Dimana Tahun 2026 sebagai landasan Pembangunan Tahun 2025-2029. SDM merupakan subyek dan obyek Pembangunan, dengan peningkatan kapasitas dan daya saing SDM diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk keberhasilan Pembangunan sosial ekonomi kota. Daya saing SDM sebagai subyek Pembangunan mengandung pengertian bahwa Masyarakat dan stakeholder yang merupakan pelaku Pembangunan Kota Probolinggo memiliki modal dasar (kemampuan, pengetahuan, ketrampilan) yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan Pembangunan secara efektif, efisien dan berhasil guna. Sedangkan daya saing SDM sebagai obyek Pembangunan mengandung pengertian Upaya untuk peningkatan keberdayaan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk mendukung Upaya Pembangunan Sosial Ekonomi Kota yang berkelanjutan. Kebutuhan penguatan dan daya saing SDM ini tergambarkan dari capaian indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM kota probolinggo selama 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024) terus meningkat hingga sebesar 77,9 di Tahun 2024, diatas capaian nasional dan provinsi, serta menduduki peringkat ke-10 IPM tertinggi di Jawa Timur. Akan tetapi jika dibandingkan dengan 9 (Sembilan) kota di Jawa Timur, Kota Probolinggo masih menduduki peringkat IPM terendah sehingga diperlukan usaha untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM dimaksud. Sedangkan fokus stabilitas wilayah pada Tahun 2026 ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk peningkatan kententraman dan ketertiban umum wilayah, penanganan konflik sosial dimana keamanan merupakan juga merupakan modal dasar Pembangunan wilayah dan landasan Pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.



Gambar 4. 1 Tema Dan Prioritas Pembangunan untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Rancangan Akhir RPJMD)

Berdasarkan tema pembangunan dimaksud, maka perlu ditetapkan prioritas dan arah kebijakan untuk mendukung usaha pencapaian tema pembangunan dan sebagai dasar penentuan program prioritas pembangunan yang perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Perumusan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 selain mengacu pada RPJMD juga terdapat amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77 dimana diperlukan penyelarasan dan sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan prioritas nasional dan provinsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Hal ini terkait dengan kebutuhan penelaahan kebijakan yang menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena adanya amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan yang lebih tinggi, karakteristik suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan yang lebih tinggi, adanya peluang bagi pengembangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Oleh karena itu dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan serta prioritas dan sasaran pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Hasil dari sinkronisasi dan penyelarasan dimaksud maka telah dilakukan penyesuaian terhadap Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026, dengan tidak mengubah esensi dasar fokus pembangunan sebagai usaha pelaksanaan RPD yang juga diamanatkan dalam kerangka kerja tahunan. Hasil dan

analisis penyelarasan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagaimana Tabel 4.3 dibawah ini.

Analisis terkait penyesuaian Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 berdasarkan sinkronisasi dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu :

1. Berdasarkan hasil Rakorbangplus 2025 dan *Kick Off* RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Bappenas pada 5 Mei 2025, telah ditetapkan **Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”** ;
2. Sedangkan berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur Tanggal 29 April 2025 ditetapkan **Rancangan Akhir Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas menuju Kemandirian Pangan dan Energi”** ;
3. Berdasarkan persandingan dimaksud maka diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Produktif masih menjadi fokus utama pembangunan di Tahun 2026 baik pada tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Timur yang didukung dengan usaha untuk pencapaian kedaulatan/kemandirian pangan.
4. **Tema Rancangan Awal RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 mengacu Tema Pembangunan Tahun 2026 pada RPD Tahun 2025-2026 yaitu : “Peningkatan Ekosistem Ekonomi, Sosial, Tata Kelola dan Lingkungan yang didorong Infrastruktur Berkelanjutan”**
5. Sedangkan **Tema Rancangan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 mengacu Tema Pembangunan Tahun 2026 pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu : “Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Stabilitas Wilayah Sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan”**
6. Oleh karena itu dalam Rancangan Akhir ini masih diperlukan penyelarasan kembali terhadap tema pembangunan daerah dimaksud. Hal ini terkait dengan fokus ekonomi inklusif yang telah selaras, akan tetapi juga diperlukan untuk pengintegrasian kebutuhan perwujudan ekonomi produktif. Selain itu juga terdapat focus Pembangunan yang menjadi mandatory pada Tahun 2026 yang belum diintegrasikan pada Tema Pembangunan Kota Probolinggo yang terkait dengan usaha pencapaian Kedaulatan/Kemandirian Pangan Daerah dan Energi ;
7. Hasil analisis penyelarasan Tema Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3, dimana **Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 yaitu : “PENINGKATAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA DAN KETAHANAN PANGAN SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI PRODUKTIF DAN INKLUSIF”.**

Tabel 4. 3 Penyelarasan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL	Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas menuju Kemandirian Pangan dan Energi
TEMA PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026 (berdasarkan RPD Tahun 2025-2026) Peningkatan Ekosistem Ekonomi, Sosial, Tata Kelola dan Lingkungan yang didorong Infrastruktur Berkelanjutan
	RANCANGAN RKPD 2026 (berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029) Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan Stabilitas Wilayah Sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan
	RANCANGAN AKHIR RKPD 2026 (penyesuaian hasil sinkronisasi) “PENINGKATAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA DAN KETAHANAN PANGAN SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI PRODUKTIF DAN INKLUSIF”
	Analisis Hasil Sinkronisasi Tema Pembangunan : ▪ Energi tidak diambil sebagai tema Pembangunan karena tidak ada kewenangan pengelolaan Energi di Kota Probolinggo ▪ Sumberdaya Manusia tetap menjadi Fokus Utama sebagai modal Pembangunan 2026-2030. SDM merupakan subyek dan obyek Pembangunan, dengan peningkatan kapasitas dan daya saing SDM diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk keberhasilan Pembangunan sosial ekonomi kota. ▪ Integrasi pencapaian ekonomi produktif juga diselaraskan sebagai Tema Pembangunan Tahun 2026 mengingat adanya keselarasan dengan sasaran Pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 untuk Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah ▪ Sedangkan terkait Stabilitas Wilayah tidak lagi dijadikan focus Pembangunan untuk keselarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi, mengingat telah selesainya Pesta Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Dimana kondisi stabilitas wilayah Kota Probolinggo tetap terjaga pada periode awal kepemimpinan Kepala Daerah Baru ini. Focus stabilitas wilayah ini nantinya akan diintegrasikan pada periode akhir RPJMD menjelang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Periode selanjutnya.

Dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 selain tema Pembangunan tahunan juga telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Tahunan (sebagaimana Gambar 4.1). Adapun Prioritas Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 20026 yang diamanatkan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD dimaksud antara lain :



1. Peningkatan Keserasian Sosial Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
2. Pemerataan Layanan Sosial Dasar yang Berkualitas
3. Pembangunan Mental Wirausaha Generasi Muda sebagai Potensi Ekonomi Inklusif
4. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial untuk Mengurangi Kesenjangan
5. Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelarasan dan penyesuaian Tema Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagaimana Tabel 4.3 dimaksud, maka juga dilakukan penyelarasan terhadap Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional berdasarkan RKP dan Prioritas Provinsi berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Penyesuaian Prioritas Pembangunan dan perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 selain didasarkan pada Sinkronisasi kebijakan Nasional dan Provinsi juga disesuaikan ulang dengan hasil penyesuaian tema Pembangunan serta dukungan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil Penyelarasan, penyesuaian dan perumusan Rancangan Akhir Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 yang telah disusun maka juga telah ditetapkan urusan dan perangkat daerah pengampu, penanggungjawab pelaksanaan prioritas dan arah kebijakan dimaksud sebagaimana disajikan Tabel 4.4. Guna mendukung Tema Pembangunan Tahun 2026, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan dan 23 (dua puluh tiga) Arah Kebijakan. Penetapan penanggungjawab dimaksud ditetapkan sebagai panduan bagi Perangkat Daerah untuk perencanaan program, kegiatan dan pendanaan yang mendukung usaha pencapaian prioritas dan arah kebijakan dimaksud dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan penetapan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 maka juga masih dilakukan penyelarasan terhadap Prioritas Nasional berdasarkan RKP dan Prioritas Provinsi berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77. Penyelarasan dan sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan prioritas nasional dan provinsi Provinsi dimaksud terkait dengan kebutuhan penelaahan kebijakan yang menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena adanya amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan yang lebih tinggi, karakteristik suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan yang lebih tinggi, adanya peluang bagi pengembangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.



Tabel 4. 4 Prioritas, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 dan Penanggungjawab

TEMA RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026 : Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Ketahanan Pangan sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Produktif dan Inklusif			
PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN PENDUKUNG	KETERANGAN
PRIORITAS KOTA 1 - PK 1 Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	a. Peningkatan Fasilitas Pendidikan Berkualitas, Digitalisasi Pendidikan dan Budaya Literasi	a. Pendidikan b. Perpustakaan	Mendukung : ▪ Misi 1 RPJMD Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan ▪ Sasaran RPJMD - S.1 Pendidikan Berkualitas yang Merata ▪ Sasaran RPJMD -S.2 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
	b. Pengembangan potensi pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga	c. Kepemudaan dan Olahraga	
	c. Penguatan sistem, kualitas layanan dan pemenuhan fasilitas kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	d. Kesehatan	
	d. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan Keluarga Berencana (KB)	e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
PRIORITAS KOTA 2 - PK 2 Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	a. Pemerataan Layanan Sosial Dasar yang Berkualitas dalam pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial	a. Sosial	Mendukung ▪ Misi 2 RPJMD Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan ▪ Sasaran RPJMD - S.3 Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender ▪ Sasaran RPJMD - S.4 Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing
	b. Peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kelembagaan Masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam Pembangunan	b. Pemberdayaan Masyarakat	
	c. Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai dukungan Pencapaian SPM serta peningkatan partisipasi masyarakat		
	d. Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup Perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender dalam Pembangunan	c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan	d. Tenaga Kerja	



TEMA RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026 : Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Ketahanan Pangan sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Produktif dan Inklusif			
PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN PENDUKUNG	KETERANGAN
	kebutuhan pasar kerja serta perluasan akses lapangan kerja produktif		
PRIORITAS KOTA 3 - PK 3 Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	a. Pelestarian kebudayaan melalui pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang didukung peningkatan peran aktif Masyarakat	a. Kebudayaan	Mendukung ▪ Misi 2 RPJMD Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan ▪ Sasaran RPJMD - S.5 Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan ▪ Sasaran RPJMD - S.6 Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat
	b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat serta peningkatan peran serta Masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah dan politik	b. Trantibum c. Kesatuan Bangsa dan Politik	
PRIORITAS KOTA 4 - PK 4 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	a. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global	a. Perindustrian b. Koperasi dan UMKM	Mendukung ▪ Misi 3 RPJMD Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital ▪ Sasaran RPJMD - S.7 Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah ▪ Sasaran RPJMD - S.9 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
	b. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah		
	c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah	c. Perdagangan	
	d. Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui <i>Branding</i> dan Promosi	d. Pariwisata	
	e. Penguatan Regulasi Penanaman Modal serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	e. Penanaman Modal	
PRIORITAS KOTA 5 - PK 5	a. Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi	a. Pertanian b. Kelautan dan Perikanan	Mendukung



TEMA RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026 :

Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Ketahanan Pangan sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Produktif dan Inklusif

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN PENDUKUNG	KETERANGAN
Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	komoditas pangan strategis sektor pertanian dan perikanan serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan		▪ Misi 3 RPJMD Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital ▪ Sasaran RPJMD - S.8 Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal
	b. Inisiasi Pengembangan Sistem Cadangan Pangan Daerah	c. Pangan	
PRIORITAS KOTA 6 - PK 6 Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	a. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital yang Transparan, Inklusif, Efisien yang didukung Manajemen Risiko dan <i>Evidence Based</i> , serta dukungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	a. Unsur Staff (Setda & Setwan) b. Perencanaan c. Statistika d. Kearsipan e. Keuangan f. Pengawasan g. Komunikasi dan Informatika h. Persandian	Mendukung ▪ Misi 4 RPJMD Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan ▪ Sasaran RPJMD - S.10 Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis ▪ Sasaran RPJMD - S.11 Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi
	b. Penguatan implementasi Sistem Merit dalam peningkatan kompetensi, kinerja dan profesionalitas ASN	i. Kepegawaian j. Pendidikan dan Pelatihan	
	c. Peningkatan Fasilitasi inovasi daerah yang mendukung kualitas pelayanan publik	k. Penelitian dan Pengembangan	
	d. Peningkatan Kualitas, Efisiensi, Transparansi dan Aksesibilitas Pelayanan Publik	l. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil m. Unsur Kewilayahan n. Penanaman Modal o. Kesehatan	
PRIORITAS KOTA 7 - PK 7 Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	a. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Infrastruktur Strategis	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Pertanahan d. Perhubungan	Mendukung ▪ Misi 5 RPJMD Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan ▪ Sasaran RPJMD - S.12 Pengembangan infrastruktur Berbasis
	b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan	e. Lingkungan Hidup f. Trantibum Sub Bencana	



TEMA RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026 : Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Ketahanan Pangan sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Produktif dan Inklusif			
PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN PENDUKUNG	KETERANGAN
	bencana dalam mewujudkan Pembangunan Kota Berketahanan dan Rendah Karbon		Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah ▪ Sasaran RPJMD - S.13 Pelestarian Lingkungan Hidup ▪ Sasaran RPJMD - S.14 Resiliensi terhadap Bencana

Pada Tabel 4.5 telah disajikan penyelarasan Prioritas Pembangunan yang menganalisis Tingkat keselarasan dan relevansi prioritas Kota Probolinggo dalam mendukung pelaksanaan agenda Pembangunan dan program-program prioritas baik pada Tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Hasil penyelarasan prioritas dimaksud menunjukkan bahwa prioritas Pembangunan yang disusun pada Tingkat daerah baik Kota Probolinggo maupun Provinsi Jawa Timur tidak berkorelasi lurus secara urutan fokus prioritas dengan Prioritas Nasional (dalam hal ini yang ditetapkan melalui Agenda Pembangunan Nasional), akan tetapi prioritas tahunan daerah dimaksud telah dapat mendukung seluruh agenda Pembangunan nasional yang telah ditetapkan.



Tabel 4. 5 Penyelarasan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan RKP & RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
PRIORITAS NASIONAL 1 – PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PRIORITAS PROVINSI 7 - PP 7 : JATIM BERKAH AMANAH, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.	PRIORITAS KOTA 3 - PK 3 Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat serta peningkatan peran serta Masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah dan politik	Terkait dengan Ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM di Kota Probolinggo dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik). Mandatory prioritas Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan melalui pelaksanaan prioritas penguatan harmonisasi social dan jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban umum wilayah melalui peningkatan wawasan kebangsaan untuk mencegah potensi konflik sosial
PRIORITAS NASIONAL 2 – PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	-	PRIORITAS KOTA 3 - PK 3 Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat serta peningkatan peran serta Masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah dan politik	Telah ada penyelarasan prioritas Sistem Pertahanan Keamanan melalui Prioritas Jaminan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah di daerah
	PRIORITAS PROVINSI 4 - PP 4 : JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	PRIORITAS KOTA 5 - PK 5 Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	a. Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis sektor pertanian dan perikanan serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan	Terkait dengan dukungan prioritas pangan, ekonomi biru dan hijau telah diselaraskan dalam prioritas ketahanan pangan yang didukung oleh Produktivitas Pertanian dan Perikanan



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru			b. Inisiasi Pengembangan Sistem Cadangan Pangan Daerah	
	PRIORITAS PROVINSI 2 - PP 2 : JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas PRIORITAS PROVINSI 9 - PP 9 : JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	PRIORITAS KOTA 4 - PK 4 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	a. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global b. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah d. Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui Branding dan Promosi e. Penguatan Regulasi Penanaman Modal serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Sedangkan terkait dengan perekonomian telah diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi. Akan tetapi terkait dengan pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo menjadi arah kebijakan pendukung untuk pencapaian Prioritas 2 : Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dengan arah kebijakan : Peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kelembagaan Masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam Pembangunan. Terkait dengan Energi, tidak terdapat kewenangan pengelolaan energi di Kota Probolinggo.



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		PRIORITAS KOTA 7 - PK 7 Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	a. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Infrastruktur Strategis b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan bencana dalam mewujudkan Pembangunan Kota Berketahanan dan Rendah Karbon	Telah dilakukan penyelarasan prioritas terkait infrastruktur dengan nasional dan provinsi terkait dengan Ekonomi Hijau, Air Minum dan Sanitasi
PRIORITAS NASIONAL 3 – PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif, serta Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	PRIORITAS PROVINSI 3 – PP 3 : JATIM AKSES Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan InAglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan	PRIORITAS KOTA 7 - PK 7 Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Infrastruktur Strategis	Telah dilakukan penyelarasan prioritas terkait infrastruktur dengan nasional dan provinsi
	PRIORITAS PROVINSI 2 - PP 2 : JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	PRIORITAS KOTA 4 - PK 4 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	a. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global b. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah	Terkait dengan wirausaha, industri kreatif, industri dan Koperasi telah disinkronisasi dalam arah kebijakan dari Prioritas Ekonomi



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
			d. Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui Branding dan Promosi e. Penguatan Regulasi Penanaman Modal serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	
		PRIORITAS KOTA 2 - PK 2 Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja serta perluasan akses lapangan kerja produktif	Prioritas untuk peningkatan lapangan kerja berkualitas telah disinkronisasi dalam prioritas ketahanan sosial dan kesejahteraan sosial melalui perluasan akses lapangan kerja produktif
PRIORITAS NASIONAL 4 – PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjaraan Gender serta Penguatan Peran Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PRIORITAS PROVINSI 5 - PP 5 : JATIM CERDAS Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan PRIORITAS PROVINSI 6 - PP 6 : JATIM SEHAT Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan	PRIORITAS KOTA 1 - PK 1 Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	a. Peningkatan Fasilitas Pendidikan Berkualitas, Digitalisasi Pendidikan dan Budaya Literasi b. Pengembangan potensi pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga c. Penguatan sistem, kualitas layanan dan pemenuhan fasilitas kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan kapasitas SDM Kesehatan d. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan Keluarga Berencana (KB)	Telah dilakukan sinkronisasi kebutuhan Pembangunan SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan serta Pemuda dan Olahraga pada prioritas dan arah kebijakan kota yang didukung penyelenggaraan urusan perpustakaan, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	PRIORITAS PROVINSI 1 - PP 1 : JATIM SEJAHTERA, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan PRIORITAS PROVINSI 8 - PP 8 : JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	PRIORITAS KOTA 2 - PK 2 Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	a. Pemerataan Layanan Sosial Dasar yang Berkualitas dalam pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial b. Peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kelembagaan Masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam Pembangunan c. Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai dukungan Pencapaian SPM serta peningkatan partisipasi masyarakat d. Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup Perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender dalam Pembangunan	Terkait dengan prioritas Gender dan disabilitas telah diakomodasi dalam prioritas ketahanan sosial dan kesejahteraan sosial
PRIORITAS NASIONAL 5 – PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumberdaya	PRIORITAS PROVINSI 4 - PP 4 : JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	PRIORITAS KOTA 4 - PK 4 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong	Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global	Prioritas nasional terkait industri telah disinkronisasi pada prioritas ekonomi yang terkait dengan Industri Kecil Menengah (IKM)



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah dalam negeri	PRIORITAS PROVINSI 9 – PP 9 : JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif		
PRIORITAS NASIONAL 6 – PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PRIORITAS PROVINSI 1 - PP 1 : JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	PRIORITAS KOTA 2 - PK 2 Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	a. Pemerataan Layanan Sosial Dasar yang Berkualitas dalam pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial b. Peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kelembagaan Masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam Pembangunan c. Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai dukungan Pencapaian SPM serta peningkatan partisipasi masyarakat d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar	Prioritas Pembangunan dari desa dan dari bawah dilaksanakan melalui Prioritas Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan arah kebijakan pemberdayaan Masyarakat. Terkait pemberantasan kemiskinan juga telah disinkronisasi dalam prioritas ini kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan Masyarakat dan tenaga kerja



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	PRIORITAS PROVINSI 2 - PP 2 : JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas		kerja serta perluasan akses lapangan kerja produktif	
		PRIORITAS KOTA 4 - PK 4 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	a. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global b. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah d. Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui Branding dan Promosi e. Penguatan Regulasi Penanaman Modal serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Sedangkan terkait prioritas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi juga telah disinkronisasi melalui prioritas ekonomi kerakyatan dan ekonomi inklusif
		PRIORITAS KOTA 7 - PK 7 Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Infrastruktur Strategis	Telah dilakukan penyelarasan prioritas terkait infrastruktur permukiman dengan nasional dan provinsi terkait dengan dukungan pengentasan kemiskinan



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
PRIORITAS NASIONAL 7 – PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS PROVINSI 7 - PP 7 : JATIM BERKAH AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	PRIORITAS KOTA 6 - PK 6 Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	a. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital yang Transparan, Inklusif, Efisien yang didukung Manajemen Risiko dan <i>Evidence Based</i> , serta dukungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal b. Penguatan implementasi Sistem Merit dalam peningkatan kompetensi, kinerja dan profesionalitas ASN c. Peningkatan Fasilitas inovasi daerah yang mendukung kualitas pelayanan publik d. Peningkatan Kualitas, Efisiensi, Transparansi dan Aksesibilitas Pelayanan Publik	Terkait dengan tata Kelola pemerintahan telah disinkronisasi dalam prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, bersih dan efisien. Focus kapasitas SDM pemerintah disinkronisasi dengan Tema Pembangunan Kota Tahun 2026 yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing SDM.
PRIORITAS NASIONAL 8 – PN 8 : Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PRIORITAS PROVINSI 8 - PP 8 : JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	PRIORITAS KOTA 3 - PK 3 Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelestarian kebudayaan melalui pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang didukung peningkatan peran aktif Masyarakat	Sinkronisasi prioritas penyelarasn dan harmonisasi kebudayaan telah disinkronisasi melalui prioritas pelestarian kebudayaan
	PRIORITAS PROVINSI 9 - PP 9 : JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan	PRIORITAS KOTA 7 - PK 7 Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan bencana dalam mewujudkan Pembangunan Kota Berketahanan dan Rendah Karbon	Prioritas nasional harmonisasi lingkungan alam disinkronisasi melalui prioritas harmonisasi alam dan lingkungan hidup yang didukung arah kebijakan Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana



RKP 2026	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2026	RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026		ANALISIS HASIL SINKRONISASI
		PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	Pembangunan Berkelanjutan			
	-	PRIORITAS KOTA 3 - PK 3 Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat serta peningkatan peran serta Masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah dan politik	Sedangkan terkait Peningkatan Toleransi antar umat beragama disinkronisasi pada prioritas harmonisasi sosial guna menjamin keamanan dan ketertiban umum wilayah yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan trantibum dan pemerintahan umum (kesbangpol) untuk menjaga kerukunan umat beragama, mencegah potensi konflik social dan gangguan keamanan wilayah



Tabel 4. 6 Program Prioritas Pendukung Prioritas dan Arah Kebijakan Kota Probolinggo Tahun 2026

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	URUSAN PENDUKUNG
PRIORITAS KOTA 1 - PK 1 Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	a. Peningkatan Fasilitas Pendidikan Berkualitas, Digitalisasi Pendidikan dan Budaya Literasi	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pengembangan Kurikulum c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Program Pembinaan Perpustakaan	a. Pendidikan b. Perpustakaan
	b. Pengembangan potensi pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga	a. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan b. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan c. Program Pengembangan kapasitas kepramukaan	c. Kepemudaan dan Olahraga
	c. Penguatan sistem, kualitas layanan dan pemenuhan fasilitas kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	d. Kesehatan
	d. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan Keluarga Berencana (KB)	a. Program Pengendalian Penduduk b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PRIORITAS KOTA 2 - PK 2 Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	a. Pemerataan Layanan Sosial Dasar yang Berkualitas dalam pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial	a. Program Rehabilitasi Sosial b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial c. Program Pemberdayaan Sosial	a. Sosial
	b. Peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kelembagaan Masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam Pembangunan	a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	b. Pemberdayaan Masyarakat



PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	URUSAN PENDUKUNG
	c. Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai dukungan Pencapaian SPM serta peningkatan partisipasi masyarakat		
	d. Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup Perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender dalam Pembangunan	a. Program Perlindungan Perempuan b. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) c. Program Perlindungan Khusus Anak d. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja serta perluasan akses lapangan kerja produktif	a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Penempatan Tenaga Kerja c. Program Hubungan Industrial	d. Tenaga Kerja
PRIORITAS KOTA 3 - PK 3 Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	a. Pelestarian kebudayaan melalui pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang didukung peningkatan peran aktif Masyarakat	a. Program Pengembangan Kebudayaan b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	a. Kebudayaan
	b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat serta peningkatan peran serta Masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah dan politik	a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	b. Trantibum c. Kesatuan Bangsa dan Politik



PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	URUSAN PENDUKUNG
		d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
PRIORITAS KOTA 4 - PK 4 Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	a. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global	a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	a. Perindustrian
	b. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah	b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	b. Koperasi dan UMKM
	c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah	c. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
	d. Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui <i>Branding</i> dan Promosi	d. Program Pengembangan UMKM	
	e. Penguatan Regulasi Penanaman Modal serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
		a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	c. Perdagangan
		b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		c. Program Pengembangan Ekspor	
		a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	d. Pariwisata
		b. Program Pemasaran Pariwisata	
		c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		a. Program Promosi Penanaman Modal	e. Penanaman Modal
		b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
PRIORITAS KOTA 5 - PK 5 Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	a. Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis sektor pertanian dan perikanan serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan	a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Pertanian
		b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	b. Kelautan dan Perikanan
		c. Program Penyuluhan Pertanian	
		d. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	



PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	URUSAN PENDUKUNG
PRIORITAS KOTA 6 - PK 6 Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif		e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	b. Inisiasi Pengembangan Sistem Cadangan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	c. Pangan
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital yang Transparan, Inklusif, Efisien yang didukung Manajemen Risiko dan <i>Evidence Based</i> , serta dukungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Program Perekonomian dan Pembangunan c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah d. Program Riset dan Inovasi Daerah e. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral f. Program Pengelolaan Arsip g. Program Pengelolaan Keuangan Daerah h. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah i. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah j. Program Penyelenggaraan Pengawasan k. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi l. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik m. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika n. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	a. Unsur Staff (Setda & Setwan) b. Perencanaan c. Statistika d. Kearsipan e. Keuangan f. Pengawasan g. Komunikasi dan Informatika h. Persandian
	b. Penguatan implementasi Sistem Merit dalam peningkatan kompetensi, kinerja dan profesionalitas ASN	a. Program Kepegawaian Daerah b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	i. Kepegawaian j. Pendidikan dan Pelatihan
	c. Peningkatan Fasilitasi inovasi daerah yang mendukung kualitas pelayanan publik	Program Riset dan Inovasi Daerah	k. Penelitian dan Pengembangan



PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	URUSAN PENDUKUNG
	d. Peningkatan Kualitas, Efisiensi, Transparansi dan Aksesibilitas Pelayanan Publik	a. Program pencatatan sipil b. Program pendaftaran penduduk c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik e. Program Pelayanan Penanaman Modal f. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman g. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	l. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil m. Unsur Kewilayahan n. Penanaman Modal o. Kesehatan
PRIORITAS KOTA 7 - PK 7 Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	a. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Infrastruktur Strategis	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum c. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase e. Program Penataan Bangunan Gedung f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya g. Program Penyelenggaraan Jalan h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang j. Program Pengembangan Perumahan k. Program Kawasan Permukiman l. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU) m. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh n. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Pertanahan d. Perhubungan



PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	URUSAN PENDUKUNG
		o. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan bencana dalam mewujudkan Pembangunan Kota Berketahanan dan Rendah Karbon	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) d. Program Pengelolaan Persampahan e. Program Penanggulangan Bencana	e. Lingkungan Hidup f. Trantibum Sub Bencana

4.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya eksternal, selama 1 (satu) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan / meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah atau masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Perumusan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2026 dengan memperhatikan : (1) permasalahan-permasalahan pembangunan yang bersifat strategis di Kota Probolinggo untuk Tahun Rencana 2026 mendatang yang merupakan tahun pertama dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, (2) program dan kegiatan prioritas daerah berdasarkan Tema Pembangunan Tahun 2026 sebagaimana dijabarkan pada subbab 4.2, (3) sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan Kota Probolinggo, serta, (3) keadaan dan karakteristik kota pada saat sekarang. Adapun Isu Strategis Pembangunan Daerah untuk masing-masing urusan pemerintah daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4. 7. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Probolinggo

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
A	URUSAN WAJIB		
A.1	Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	1. Pemerataan Mutu Pendidikan 2. Pengelolaan sekolah yang inklusif dan terintegrasi dengan layanan digital 3. Peningkatan mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik 4. Pelengkapan sarana prasarana/fasilitas pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
2	Kesehatan	1. Penurunan stunting 2. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan primer dan rujukan 3. Aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4. Peningkatan kualitas SDM kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 2. Peningkatan akses Sambungan Rumah untuk jaringan air perpipaan yang aman dan sarana prasarana sanitasi aman 3. Percepatan Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 4. Pengendalian pemanfaatan ruang pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan LP2B	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peningkatan akses rumah layak huni bagi warga tidak mampu 3. Optimalisasi pelaksanaan serah terima fasum/PSU dalam pengembangan perumahan 4. Penyediaan Lahan TPU	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
	a. Sub Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Perkada; 2. Penguatan SDM Aparatur Penegakan Perda Perkada 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas stakeholder untuk pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja
	b. Sub Urusan : Kebakaran	Optimalisasi pelayanan penanganan kebakaran sesuai responsif time	Satuan Polisi Pamong Praja
	c. Sub Urusan : Bencana	Peningkatan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	BPBD
6	Sosial	1. Optimalisasi penanganan serta fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan PMKS/PPKS/PAS untuk peningkatan kesejahteraan sosial 2. Sinkronisasi Basis Data Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi dengan DTSEN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
A.2	Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	1. Peningkatan kompetensi dan keterampilan Calon Tenaga Kerja dan fasilitasi pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Kerjasama dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal 3. Peningkatan Cakupan Pemenuhan persyaratan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Perusahaan 4. Monitoring dan evaluasi deteksi dini ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
2	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Optimalisasi usaha Penurunan kasus kekerasan serta perlindungan perempuan dan anak 2. Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan 3. Fasilitasi peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Keluarga 4. Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Pangan	1. Peningkatan Kualitas konsumsi pangan yang beragam dan keamanan pangan 2. Peningkatan Rasio ketersediaan pangan terhadap konsumsi normatif (IAV). 3. Penurunan <i>food waste</i> 4. Pembentukan Cadangan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
4	Pertanahan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Ketentuan Pertanahan dan tertib administrasi pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Lingkungan Hidup	1. Mempertahankan Kualitas Air dan Udara tetap baik 2. Peningkatan Kualitas Lahan dengan Tata Kelola RTH yang Baik dan Memadai 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pemanfaatan Teknologi yang berkembang dokumen adminduk dalam genggam (IKD) 2. Pemanfaatan data kependudukan untuk proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Wilayah 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan 3. Peningkatan kemandirian dan keberdayaan Masyarakat, termasuk untuk kelompok rentan	▪ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ▪ Kecamatan
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi dan perencanaan KB untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga 2. Aksesibilitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi KB yang berkualitas 3. Peningkatan intervensi hasil pendampingan keluarga TPK (catin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, Baduta) dalam rangka penurunan stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
9	Perhubungan	1. Pelengkapan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelengkap jalan serta fasilitas keselamatan jalan terutama untuk kelompok rentan (anak-anak, dan kelompok Disabilitas) 2. Peningkatan kualitas layanan perhubungan melalui integrasi pemanfaatan IT guna	Dinas Perhubungan



NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
		meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lalu lintas 3. Peningkatan mobilitas dan konektivitas melalui penataan regulasi, kebijakan dan rencana lalu lintas angkutan jalan	
10	Komunikasi dan Informatika	1. Percepatan transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam menopang Reformasi Birokrasi Tematik 2. Penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Penguatan infrastruktur TIK untuk mendukung implementasi SPBE 4. Meningkatkan Pemanfaatan Layanan Teknologi Informasi kepada masyarakat 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah terutama menangkal isu hoax, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang misleading	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Peningkatan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro melalui integrasi pemanfaatan TIK, pengembangan inovasi, serta Fasilitasi standarisasi produk, permodalan dan pembiayaan, peningkatan kompetensi pelaku usaha 2. Peningkatan promosi dan pemasaran melalui penguatan akses kemitraan skala lokal, regional, nasional 3. Optimalisasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pelaku usaha mikro.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
12	Penanaman Modal	1. Fasilitasi Kemudahan Berusaha melalui Penguatan Mekanisme Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal 2. Peningkatan kualitas layanan penanaman modal melalui pemenuhan dan penguatan infrastruktur, integrasi dengan OSS, pengelolaan data potensi investasi daerah 3. Optimalisasi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 4. Peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Dinas Penanaman Modal, PTSP
13	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Pengembangan kapasitas pemuda melalui peningkatan potensi kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor 2. Peningkatan Kapasitas dan daya saing organisasi pemuda 3. Pemasarakatan dan pembudayaan olahraga melalui penyelenggaraan event / kompetisi olahraga secara berjenjang 4. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
14	Statistik	Penguatan penyelenggaraan statistik sektoral terpadu melalui Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian	1. Pelaksanaan Audit Internal Keamanan SPBE (Sistem Elektronik);	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
		2. Perlindungan Informasi melalui kegiatan Pengamanan Sinyal dan Kontra Penginderaan	
16	Kebudayaan	1. Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Lokal 2. Optimalisasi pengelolaan cagar budaya, museum, obyek pemajuan kebudayaan 3. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan	Peningkatan minat baca masyarakat Kota Probolinggo yang terintegrasi secara digital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Kearsipan	Peningkatan kesadaran pengelolaan arsip secara baku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
B	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	Perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan 2. Optimalisasi pengolahan hasil perikanan, diversifikasi usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan, Standardisasi dan sertifikasi Produk Olahan untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah hasil perikanan 3. Optimalisasi Kerjasama perluasan akses pemasaran hasil perikanan 4. Optimalisasi Usaha Pencegahan alih fungsi lahan budidaya Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	Pariwisata	1. Pengembangan daya tarik pariwisata melalui Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, pengelolaan obyek dan destinasi wisata 2. Peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku pariwisata dalam tata kelola destinasi industri dan pemasaran pariwisata 3. Peningkatan peran serta Masyarakat serta sinergi dan kerjasama antar stakeholder terkait pengelolaan pariwisata secara holistik 4. Peningkatan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event, kalender wisata dan integrasi pemanfaatan TIK untuk pemasaran pariwisata 5. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi pelaku ekonomi kreatif 6. Peningkatan daya saing Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3	Pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Utama guna tercapainya swasembada pangan khususnya komoditas strategis 2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui usaha peningkatan kesuburan tanah, pencegahan alih fungsi lahan pertanian (khususnya LP2B), standarisasi benih berkualitas, pembatasan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, penyediaan sarana prasarana, alat dan mesin pertanian 3. Peningkatan fasilitasi pemasaran, pengolahan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan nilai tambah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan



NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
		4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM 5. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan melalui pengembangan SDM, transfer teknologi budidaya dan pengolahan hasil peternakan, fasilitasi pemasaran dan pengolahan produk peternakan serta perlengkapan sarana prasarana penunjang 6. Peningkatan Kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular strategis (zoonosis)	
4	Perdagangan	1. Peningkatan pemanfaatan kestabilan harga dan ketersediaan barang pokok dan penting; 2. Peningkatan perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri serta mendorong peningkatan ekspor; 3. Pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat; 4. Optimalisasi pemanfaatan pusat perdagangan 5. Peningkatan perlindungan konsumen dan kemetropolitan 6. Penataan pedagang pasar tradisional dan PKL	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
5	Perindustrian	1. Percepatan pembangunan industry berbasis keunggulan local 2. Pembangunan industry yang berwawasan lingkungan 3. Peningkatan kapasitas produksi IKM 4. Peningkatan kemampuan penggunaan teknologi produksi 5. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri 6. Peningkatan kemampuan akses industry terhadap sumber daya ekonomi produktif, sarana dan usaha industry 7. Peningkatan kesadaran pelaku IKM untuk memenuhi legalitas, HAKI dan perizinan 8. Peningkatan kesadaran pelaporan informasi industry oleh pelaku industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
C	URUSAN PENUNJANG		
C.1	Unsur Staf		
1	Unsur Staf		
	a. Sekretariat Daerah	1. Optimalisasi pelaporan capaian kinerja pada indikator kinerja keluaran LPPD 2. Optimalisasi fasilitasi perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Pengharmonisasian produk hukum daerah, fasilitasi bantuan hukum dan pengelolaan informasi hukum 4. Peningkatan tata Kelola pengadaan 5. Peningkatan monitoring dan evaluasi atas pengendalian inflasi daerah serta Kerjasama antar daerah 6. Optimalisasi Pemenuhan Dokumen Pendukung dalam Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah 7. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah



NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
		8. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, penatausahaan keuangan dan kepegawaian	
	b. Sekretariat DPRD	1. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi peran legislatif dalam penguatan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (<i>legislasi, budgeting, controlling</i>) 2. Akomodasi kebutuhan fasilitasi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan akses berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan daerah oleh DPRD	Sekretariat DPRD
C.2	Fungsi Pengawasan		
1	Pengawasan	1. Peningkatan kompetensi SDM APIP sehingga bisa menjalankan fungsi <i>assurance</i> dan <i>colsulting</i> serta peran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 2. Implementasi manajemen risiko secara komprehensif pada tingkat Pemerintah Daerah dan pada tingkat Perangkat Daerah 3. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan 4. Implementasi pembinaan dan pengawasan berbasis teknologi informasi	Inspektorat
C.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
1	Perencanaan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	Kuangan	1. Optimalisasi kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan potensi PAD 2. Optimalisasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja 3. Pemanfaatan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif dan efisien	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1. Optimalisasi penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo guna mendukung penerapan Smart Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 2. Peningkatan kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Penelitian dan Pengembangan	1. Integrasi implementasi hasil penelitian/riset daerah ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah 2. Penguatan penciptaan, pengembangan, keberlanjutan inovasi baik di tingkat Perangkat Daerah maupun Masyarakat sehingga dapat direplikasi pada skala yang lebih luas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	Fungsi Penunjang Lainnya (Kesatuan Bangsa dan Politik)	Peningkatan harmonisasi dan ketahanan sosial untuk pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH
C.4	Fungsi Koordinasi/Unsur Kewilayahan		
1	Koordinasi	1. Peningkatan kualitas layanan dan dukungan Sarana dan Prasarana, Akses Informasi, integrasi TI serta Kapasitas dan Profesionalitas Aparatur dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis wilayah; 2. Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengembangan potensi wilayah 3. Penguatan Koordinasi, Sinergi Lintas Sektor Pembinaan, dan Pengawasan Wilayah Kelurahan/Kecamatan	Kecamatan

4.4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program / kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pasal 78 ayat 2 disebutkan bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka DPRD perlu memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Oleh karena itu Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Probolinggo merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kota Probolinggo, melalui kegiatan reses dan Kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 5 (lima) daerah pemilihan. Kegiatan reses ini nantinya akan merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Probolinggo lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD Tahun 2026.



Adapun pokok-pokok pikiran tersebut berupa :

- a. Kajian Permasalahan Pembangunan Daerah yang perlu diakomodir sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, serta
- b. Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2026.

4.4.1.KAJIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tahapan Pembangunan Kota Probolinggo periode Tahun 2025 – 2029 sekarang ini sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 (dua puluh) tahun yang akan datang (2025 -2045), merupakan periode **Penguatan Pondasi transformasi** untuk Visi **“Probolinggo Kota Logistik Tangguh, Maju, Dan Berkelanjutan”** visi tersebut akan wujudkan melalui lima agenda pembangunan jangka Panjang daerah yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Unggul yang Berdaya Saing
2. Masyarakat Mandiri dan Sejahtera
3. Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
4. Menciptakan Pemerintah yang Adaptif dan Layanan Publik yang Prima
5. Integrasi Infrastruktur, Konektivitas, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Melalui tahapan manajemen teknokrasi pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan setiap lima tahunan sesuai tahapannya, lima agenda Pembangunan jangka panjang Kota Probolinggo tersebut, tentu akan menjadi inspirasi dan kendali berjalannya pemerintahan dalam rentang 20 (dua puluh) tahun kepemimpinan periode lima tahunan Kepala Daerah sesuai tahapannya.

Berdasarkan arah kebijakan RPJPD 2025 – 2045, periode pemerintahan Tahun 2025 - 2029 sekarang, merupakan periode memperkuat pondasi transformasi oleh karena itu, keseluruhan tahapan Pembangunan periode ini diarahkan untuk penguatan pondasi kemajuan daerah dengan perencanaan yang realistis dan terukur keberhasilannya, hal ini sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Daerah, berdasarkan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Mengawali pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, Pemerintah Kota Probolinggo sedang melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026 sebagai tahun tahapan ke 1 (pertama) pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (RPJMD) Kota Probolinggo yang baru Tahun 2025– 2029. Proses penyusunan dan penetapan RKPD 2026 merupakan aktifitas yang sangat penting dan strategis, karena sebagai rencana tahunan tahapan awal periode RPJMD dengan Visi baru **“Mewujudkan Kota Probolinggo Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, Dan Adaptif”**. Dalam sistem perencanaan tahun awal disebut sebagai periode peletakan dasar Pembangunan untuk perwujudan visi dan misi daerah.



Sebagai bagian dari unsur Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD Kota Probolinggo sudah barang tentu harus terlibat secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti yang sekarang sedang dalam proses penyusunan yaitu RKPD Kota Probolinggo tahun 2026. Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal penyusunan RKPD, diharapkan akan terjadi sinergitas antara kemauan pemerintah daerah dengan kehendak masyarakat yang diserap DPRD Kota Probolinggo melalui Reses maupun kunjungan kerja ke daerah pemilihannya. Hasil serap aspirasi masyarakat tersebut dituangkan dalam Pokok pokok pikiran (POKIR) DPRD yang menjadi salah satu dasar masukan untuk penyusunan RKPD tahun yang direncanakan.

Untuk Bahan Masukan RKPD tahun 2026, DPRD Kota Probolinggo telah melaksanakan serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses maupun Kunjungan kerja ke daerah pemilihannya masing-masing, kemudian hasilnya dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini. Banyak hal yang dituangkan mulai dari pentingnya peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, kesehatan dan daya beli) agar tercipta manusia unggul, peningkatan perekonomian daerah untuk mengurangi pengangguran dan percepatan penurunan kemiskinan, penanganan bencana serta perbaikan tata kelola pemerintahan, pada akhirnya semua berujung pada pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Mendasarkan hal tersebut, maka Rencana Kerja Perintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 diharapkan dapat disusun program dan kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran dan manfaatnya langsung kepada masyarakat, mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan, terpadu lintas sektor dengan berorientasi pada output, outcome, *benefit* serta *impact* yang terukur sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Usulan program dan kegiatan berbasis *money follow programs* , yang efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sebagai upaya menciptakan terobosan dalam penanganan isu strategis daerah maka program dan kegiatan yang disusun juga mengutamakan penanganan isu strategis daerah, merupakan hasil kreativitas dan inovasi berdasarkan riset dan pengembangan atas pengalaman panjang kerja kerja pembangunan pemerintah daerah selama ini.

Penyelenggaraan musrenbang dilakukan secara berjenjang dimulai dari desa/kelurahan sampai dengan Kabupaten, dilaksanakan tepat waktu dan cermat dalam menangkap aspirasi publik, menampung dan mengolah masukan seluruh stakeholders pembangunan termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan.

Dengan telah ditetapkannya Tujuan dan sasaran beserta target indikator kinerja per tahun, sebagaimana dalam RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada pemerintah Kota Probolinggo, agar dalam menyusun dan

merancang program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 benar-benar memperhatikan/mendasarkan kepada jenis dan target indikator kinerja yang hendak dicapai dalam tahun 2026 sesuai tabel tujuan, sasaran dan Target Pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam Tabel 4.1. Tentu setelah dilakukan penyesuaian target indikator baik tujuan maupun sasaran daerah berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 dan target 2025.

Berdasarkan dinamika permasalahan masyarakat dan hasil evaluasi DPRD atas kinerja pemerintah daerah sampai dengan tahun 2024, DPRD merekomendasikan agar Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada RKPD Kota Probolinggo tahun 2026 mendasarkan pada isu strategis baru yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui perluasan akses pendidikan formal dan kesetaraan, harapan lama sekolah, serta pemantapan kualitas layanan Pendidikan;
- 2) Kesehatan berkualitas menjangkau seluruh lapisan Masyarakat;
- 3) Masyarakat yang berdaya dan jaminan kesejahteraan sosial dalam percepatan pengentasan kemiskinan;
- 4) Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan;
- 5) Birokrasi efektif, Adaptif, dan kompetitif berorientasi terhadap dampak serta digitalisasi layanan publik yang prima melalui teknologi informasi;
- 6) Optimalisasi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal kota probolinggo;
- 7) Masyarakat yang berbudaya dalam menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan social;
- 8) Iklim investasi penggerak sektor strategis Kota Probolinggo;
- 9) Memperkuat struktur ketenagakerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk penyusunan program dan kegiatan dalam pemenuhan isu strategis tahun 2026 hendaknya memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi oleh masing-masing PD/urusan pemerintah daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang baru periode 2025 - 2029.

Oleh karena RKPD Kota Probolinggo tahun 2026 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Probolinggo periode 2025-2026 sekaligus tahun awal RPJMD yang baru periode 2025-2029. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan hendaknya Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2024 dan target kinerja tahun 2025).

Untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan pembangunan antara tingkatan pemerintahan, maka Perencanaan pembangunan Kota Probolinggo tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Sedangkan untuk penyusunan program dan kegiatan dalam pemenuhan isu strategis tahun 2026 hendaknya memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi oleh masing-masing urusan pemerintah daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan RPJMD.

4.4.2.USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Usulan program prioritas pembangunan Tahun 2026 oleh DPRD Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Kajian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 8 Usulan Program Prioritas Pembangunan 2026 oleh DPRD Kota Probolinggo

TUJUAN /SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TA 2026 USULAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
1. Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah - Meningkatnya Nilai Investasi Daerah; - Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah; dan - Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah	- Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Berbasis Industri Pengolahan dan perdagangan (ekonomi kreatif dan UMKM). - Meningkatkan Investasi Daerah; - Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sektor Pariwisata, agar Persentase Peningkatan PAD dalam APBD Sektor Pariwisata meningkat dan UMKM sector pariwisata berkembang. - Menurunkan Jumlah Pengangguran. - Meningkatkan Pemerataan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat agar Indeks Gini turun.
2. Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan - Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Masyarakat	- Percepatan penurunan kemiskinan focus pada Penuntasan kemiskinan ekstrem 0%. - Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja - Meningkatkan Pendapatan Masyarakat agar angka kemiskinan menurun drastis. - Menjaga kondusifitas daerah agar transisi kepemimpinan nasional dan daerah lancar dan aman melalui Pengendalian potensi konflik sosial pasca pemilu 2024
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM - Meningkatnya Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan. - Meningkatnya Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	- Meningkatkan Kualitas Pendidikan; melalui pemenuhan tuntas paripurna SPM pendidikan. - Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui pemenuhan tuntas paripurna SPM Kesehatan - Pembenahan secara menyeluruh strategi pencapaian SPM urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Mandatory Spending sesuai dengan kebutuhan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang adaptif serta pelayanan publik yang prima berbasis digital Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif; dan	Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah; agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat.

TUJUAN /SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TA 2026 USULAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan agar Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup - Meningkatnya Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan; - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; dan - Meningkatnya Mitigasi, Adaptasi dan Ketahanan terhadap Bencana	- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana; agar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana lebih baik - Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk penuntasan SPM urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar - Mengurangi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, - Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan - Penataan sistem drainase kota, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup - Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan

Sumber : Kajian Pokok-Pokok Pikiran DPRD, 2025

4.4.3.USULAN KEGIATAN ASPIRASI MASYARAKAT

Sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD. Mengingat secara nasional telah diamanatkan untuk pemanfaatan SIPD sebagai *e-planning* untuk perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi maka Pokok-pokok pikiran DPRD yang berupa usulan kegiatan juga nantinya juga perlu diinputkan dalam aplikasi dimaksud, dimana masing-masing anggota DPRD telah memiliki *username* dan *password* guna menginput usulan kebutuhan program kegiatan dalam RKPD berdasarkan penyerapan aspirasi melalui reses. Dengan adanya aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka seluruh daerah wajib memanfaatkan SIPD untuk menyediakan Informasi Pembangunan Daerah yang didalamnya meliputi tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (meliputi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah).

Pelaksanaan kegiatan penjaringan usulan masyarakat melalui Reses/penjaringan aspirasi masyarakat DPRD untuk Kelengkapan Pokok-pokok Pikiran DPRD perlu diarahkan mengacu pada Kamus Usulan serta Kelengkapan Persyaratan Usulan



agar dapat diinputkan melalui Menu Pokok-pokok Pikiran dalam SIPD-RI. Mengacu pada sistem pengusulan kegiatan dalam SIPD-RI maka tidak diperkenankan mengajukan usulan secara bebas, diarahkan untuk memilih jenis kegiatan dalam kamus usulan yang telah diinputkan dalam SIPD-RI. Kamus usulan dimaksud terdiri dari 201 (dua ratus satu) usulan kegiatan yang diampu oleh 24 (dua puluh empat) Perangkat daerah, dan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori bidang usulan sebagai berikut :

- a. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebanyak 85 (delapan puluh lima) jenis usulan kegiatan dari 11 (sebelas) Perangkat Daerah Pengampu ;
- b. Ekonomi sebanyak 68 (enam puluh delapan) jenis usulan kegiatan dari 3 (tiga) Perangkat Daerah Pengampu ;
- c. Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat sebanyak 48 (empat puluh delapan) jenis usulan kegiatan dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah Pengampu.

Sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun n-1. Oleh karena itu, usulan kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 dapat disampaikan (dan diinputkan melalui SIPD-RI) mulai Januari s/d 19 Maret 2025. Hal ini mengingat Musrenbang RKPD Kota Probolinggo dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Tanggal 26 Maret 2025. Usulan yang telah diinputkan dalam SIPD dimaksud kemudian diverifikasi secara berjenjang oleh Sekretariat DPRD, Mitra Bappeda, Perangkat Daerah dan TAPD berdasarkan prioritas pembangunan kota dan kemampuan pembiayaan untuk penentuan usulan yang dapat diakomodir dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Verifikasi dimaksud dilakukan untuk penelaahan kesesuaian usulan program dan kegiatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan kota serta ketersediaan kapasitas riil anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178 Ayat 2.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Probolinggo merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kota Probolinggo, melalui kegiatan reses dan Kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di daerah pemilihan yang meliputi 5 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Probolinggo lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD, KUA PPAS dan APBD Tahun 2025.

Hasil identifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah daerah, pokok pokok pikiran (POKIR) DPRD Kota Probolinggo untuk RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Total Usulan yang diajukan oleh Anggota DPRD sebanyak 1.462 kegiatan yang diajukan oleh 29 anggota DPRD. Terdapat 1 anggota DPRD yang tidak mengajukan usulan (Atas Nama : Imam Hanafi dari Partai PDI Perjuangan) ;



- b. Dari usulan dimaksud, hanya terdapat 1.274 usulan yang diproses dan diberikan rekomendasi berjenjang mulai dari Bappeda Litbang, Perangkat Daerah dan TAPD. Sebanyak 188 usulan ditolak (karena tidak sesuai dengan kamus) dan dikembalikan (karena kelengkapan usulan belum terpenuhi) dan tidak diajukan ulang ;
- c. Berdasarkan Perangkat Daerah, usulan terbanyak ditujukan kepada DKUP sebanyak 1.053 usulan, selanjutnya DKPPP sebanyak 134 usulan ;
- d. Jumlah Usulan yang terakomodasi sebanyak 984 Usulan (77,24% % dari usulan kegiatan) dengan Total Pagu Akomodasi sebesar Rp. 6.257.610.000, 00 (48,2% dari usulan anggaran) ;
- e. Akomodasi usulan Pokir terbanyak berada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (42,43% dari Total Pagu Akomodasi Pokir DPRD), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan (38,66% dari Total Pagu Akomodasi Pokir DPRD), serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (13,83% dari Total Pagu Akomodasi Pokir DPRD).



Tabel 4. 9 Akomodasi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 Berdasarkan Pengusul

NO	PENGUSUL (NAMA ANGGOTA DPRD)	FRAKSI	USULAN		AKOMODASI	
			Jumlah Kegiatan	Usulan Anggaran	Jumlah Kegiatan	Pagu Akomodasi
1	ABDUL MUJIB, S.Pd.I	PKB	147	963.000.001	35	350.000.000
2	DASNO	PKS	14	453.750.000	13	250.000.000
3	dr. EVARIANI, M.Kes.	GABUNGAN (Gerakan Pembangunan Indonesia Raya)	4	10.500.000	4	10.500.000
4	EKO PURWANTO	PKB	14	888.500.000	14	250.000.000
5	ELLYAS ADITIAWAN, S.I.Kom	NASDEM	73	279.500.010	61	249.500.000
6	ENDANG IRAWATI	GABUNGAN (Gerakan Pembangunan Indonesia Raya)	50	1.311.215.003	43	226.200.000
7	GURUH DWI PRASETYO, S.A.P.	GOLKAR	12	400.000.000	11	250.000.000
8	H. ABDUS SYUKUR, ST	GOLKAR	45	437.500.000	45	250.000.000
9	H. AMIR MAHMUD	GOLKAR	69	455.600.000	1	250.000.000
10	H. SYAIFUDIN, DZ	PKB	59	217.500.000	59	217.500.000
11	HERI PONIMAN	GABUNGAN (Gerakan Pembangunan Indonesia Raya)	55	165.000.000	55	167.500.000
12	HJ NUR HUDANA	PKB	5	323.500.000	3	32.500.000
13	Hj. DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI, S.E.	GOLKAR	34	332.500.000	33	317.500.000
14	Hj. FARINA CHURUN ININ, A.Md	GOLKAR	55	493.060.000	54	250.560.000
15	ISAH JUNAIDAH, S.E.	PDI-PERJUANGAN	23	339.250.000	23	220.000.000
16	MASDA PUTRI AMELIA	GOLKAR	15	246.500.000	15	246.500.000
17	MOH. MUIZZUDDIN	PKB	90	263.500.000	85	249.500.000
18	MUCHLAS KURNIAWAN	GOLKAR	2	402.500.000	1	250.000.000
19	NUNUNG MOH TOHA	NASDEM	98	296.000.000	85	250.000.000
20	ROBIT RIYANTO	GABUNGAN (Gerakan Pembangunan Indonesia Raya)	68	726.540.000	62	248.315.000
21	RYADLUS SHOLIHIN FIRDAUS, M.Pd.	GABUNGAN (Gerakan Pembangunan Indonesia Raya)	61	364.700.000	60	219.200.000



NO	PENGUSUL (NAMA ANGGOTA DPRD)	FRAKSI	USULAN		AKOMODASI	
			Jumlah Kegiatan	Usulan Anggaran	Jumlah Kegiatan	Pagu Akomodasi
22	SAHRI TRIGIANTORO, S.H.	PDI-PERJUANGAN	3	100.000.000	3	100.000.000
23	SAIFUL IMAN, S.H.	PKB	6	448.000.000	5	250.000.000
24	SANTI WILUJENG PRASTYANI	PDI-PERJUANGAN	8	42.000.000	9	44.500.000
25	SIBRO MALISI, SS	NASDEM	124	372.500.000	85	256.000.000
26	SUPRIYANTO	PDI-PERJUANGAN	13	107.675.000	13	107.675.000
27	SYAIFUL ROHMAN, S.Pd	PKS	18	463.750.000	17	250.000.000
28	TRI ATMOJO ADIP SUSILO, S.Pt	PKS	41	1.616.875.000	27	250.000.000
29	ZAINUL FATONI, SH.I	GABUNGAN (Gerakan Pembangunan Indonesia Raya)	68	460.660.000	63	244.160.000
30	IMAM HANAFI	PDI-PERJUANGAN	-	-	-	-
Total			1.274	12.981.575.014	984	6.257.610.000



Tabel 4. 10 Akomodasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026
Berdasarkan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH TUJUAN	USULAN		AKOMODASI	
		Jumlah Kegiatan	Usulan Anggaran	Jumlah Kegiatan	Pagu Akomodasi
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	30.000.000	1	30.000.000
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	1	5.000.000	1	5.000.000
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	134	1.297.515.010	88	865.315.000
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	1.053	2.963.000.004	844	2.419.000.000
5	Dinas Lingkungan Hidup	4	22.400.000	4	22.400.000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	64	7.938.400.000	32	2.655.235.000
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2	406.260.000	1	6.660.000
8	Dinas Perhubungan	3	51.000.000	3	51.000.000
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	1	5.000.000	1	5.000.000
10	Kecamatan Kademangan	1	50.000.000	5	158.000.000
11	Kecamatan Kedopok	5	158.000.000	3	30.000.000
12	Kecamatan Mayangan	4	45.000.000	1	10.000.000
13	Sekretariat Daerah	1	10.000.000	1	30.000.000
Total		1.274	12.981.575.014	984	6.257.610.000



BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026, diselaraskan dengan RPJMN tahun 2025-2029, Perencanaan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan Perencanaan Jangka Menengah Kota Probolinggo tahun 2025-2029, serta memperhatikan prioritas kepala daerah terpilih dan kondisi daerah pada tahun 2026.

Program Perangkat Daerah tersebut merupakan input timbal-balik dari rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing Perangkat Daerah guna pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan ditunjang dengan hasil musyawarah rencana pembangunan mulai tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, dimana secara vertikal menghubungkan proses perencanaan “bottom-up” dan “top-down” yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen Rencana Pembangunan Tahunan. Sepenuhnya disadari bahwa pencapaian kinerja program/kegiatan bukanlah semata-mata dihasilkan dari kinerja Perangkat Daerah pelaksanaanya semata, namun lebih sebagai hasil dari sinergitas pencapaian kinerja program/kegiatan lainnya yang saling menunjang. Bahkan lebih dari itu, keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan sinergitas lintas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, antar tingkatan pemerintahan (baik pusat maupun provinsi), serta antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan (baik dunia usaha maupun masyarakat).

Kebutuhan anggaran belanja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercermin dalam pagu indikatif, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan usulan program/kegiatan/sub kegiatan untuk prioritas belanja penyelenggaraan urusan yang diampu Perangkat Daerah, usulan kegiatan dalam Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026, serta sinkronisasi terhadap tema serta prioritas pembangunan tahun 2026 yang telah disepakati dan disinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat nasional serta provinsi. Selanjutnya kegiatan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah disampaikan secara detail, sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026.

**TABEL 5.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						134.276.352.205,16							184.912.164.425,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						131.816.488.693,16							183.420.264.925,00		
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						131.816.488.693,16							183.420.264.925,00		
1	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 Persentase	109.181.295.743,16						-	119.881.704.875,00		
	1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			100 Persentase	571.307.903,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Bidang dan Sekretariat, serta Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF)	-	547.555.425,00		
1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Bidang dan Sekretariat, serta Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF)		115.851.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	443.617.903,98	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Bidang dan Sekretariat, serta Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF)		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	76.790.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Bidang dan Sekretariat, serta Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF)		231.703.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	105.964.175.081,18			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Seluruh ASN di Lingkungan Disdikbud Kota Probolinggo	-	116.734.818.250,00		
1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19390 Orang/bulan	105.661.566.489,18	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Seluruh ASN di Lingkungan Disdikbud Kota Probolinggo		116.126.596.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	23.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Seluruh ASN di Lingkungan Disdikbud Kota Probolinggo		463.407.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	29.685.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Seluruh ASN di Lingkungan Disdikbud Kota Probolinggo		57.925.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	249.323.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Seluruh ASN di Lingkungan Disdikbud Kota Probolinggo		86.888.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	17.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Bidang dan Sekretariat, Satuan Pendidikan SD SMP TK Negeri	-	75.000.000,00	
	1 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	17.100.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Bidang dan Sekretariat, Satuan Pendidikan SD SMP TK Negeri		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	12.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Disdikbud	-	28.951.800,00	
	1 01 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	12.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Disdikbud		28.951.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persentase	441.751.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang, Satuan Pendidikan	-	471.115.400,00	
1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	149.935.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang, Satuan Pendidikan		86.855.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	17.543.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang, Satuan Pendidikan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	45.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang, Satuan Pendidikan		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	116.775.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang, Satuan Pendidikan		92.645.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	112.498.100,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang, Satuan Pendidikan		231.614.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			100 Persentase	1.685.069.658,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang	-	1.576.457.000,00	
1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	510.549.930,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.174.519.728,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang		926.457.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara	-	100 Persentase	489.291.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang Disdikbud, Satuan Pendidikan SD dan SMP, TK	-	447.807.000,00	
1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				53 Unit	132.901.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang Disdikbud, Satuan Pendidikan SD dan SMP, TK		115.807.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	26.390.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang Disdikbud, Satuan Pendidikan SD dan SMP, TK		32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	180.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wirobarang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat dan Bidang Disdikbud, Satuan Pendidikan SD dan SMP, TK		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Sekretariat dan Bidang Disdikbud, Satuan Pendidikan SD dan SMP, TK		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 % 98.67 %	21.884.753.950,00						-	62.752.741.650,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Meningkatnya partisipasi Warga Negara Usia 7-12 thn pada Pendidikan Dasar SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional.	-			64.00 nilai 76.53 nilai 100 % 99.41 % 71.09 % 61.41 %	6.828.483.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta	-	28.791.270.850,00	
	1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			0				1 0	125.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75 Peserta Didik	117.911.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		115.857.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				150 Orang	30.450.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		550.816.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	336.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		94.792.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				86 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		105.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				115 Satuan Pendidikan	3.559.200.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		16.644.266.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				344 Orang	89.536.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		168.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																
			0				1 0	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	108.025.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		75.834.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	171.926.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		63.195.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0041 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 komunitas	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		52.662.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				12 Kegiatan	47.450.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		157.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	594.085.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		209.835.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Unit	435.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		3.777.028.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				86 Satuan Pendidikan	748.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		2.580.463.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	290.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta		3.949.688.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SMP/MTs Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional.	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 100 Persentase 79.10 Nilai 68.87 Nilai	6.607.941.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta	-	19.675.596.600,00	
1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	435.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		1.843.188.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75 Peserta Didik	117.101.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		157.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				40 Orang	15.250.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		294.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				110 Orang	110.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		73.727.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				230 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		73.727.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	4.379.940.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		14.499.925.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan penggunaannya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				144 Orang	46.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		136.922.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				48 Orang	90.445.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		51.609.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	197.690.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		78.993.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	36.350.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		63.195.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	38.750.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		157.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				27 Satuan Pendidikan	505.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		2.138.098.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1300 Paket	605.915.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP Negeri Swasta		105.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D IV Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	-			79.90 Persen 100 Persentase 85.92 Persen 78.69 Persen	7.058.899.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta	-	12.386.888.300,00	
1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	44.975.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		115.409.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	45.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		83.934.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				234 Satuan Pendidikan	218.526.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		209.834.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD																
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				234 Satuan Pendidikan	5.688.998.450,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		9.734.575.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				468 Orang	118.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		104.917.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				450 Peserta didik	150.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		167.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				12 Kegiatan	317.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		774.291.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				9719 Satuan Pendidikan	476.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan PAUD (TK/RA/KB/TPA/SPS) Negeri Swasta		1.196.059.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Nonformal / Kesetaraan Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	-			100 Persentase 49.14 Persen	1.389.430.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Non formal / Kesetaraan	-	1.898.985.900,00	
	1 01 02 2.04 0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50 Orang	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Non formal / Kesetaraan		52.459.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Non formal / Kesetaraan		52.458.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				74 Satuan Pendidikan	915.930.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Non formal / Kesetaraan		1.563.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				25 Orang	36.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Non formal / Kesetaraan		73.422.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				6 Peserta Didik	400.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Non formal / Kesetaraan		157.376.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	-			100 Persen 100 Persentase	238.750.000,00					-		480.830.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	-			100 Persentase 100 Persen	23.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar SD SMP Negeri Swasta	-	266.978.000,00	
	1 01 03 2.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				113 Orang	23.750.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan Dasar SD SMP Negeri Swasta		266.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan PAUD dan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal Persentase satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	-			100 Persen 100 Persentase	215.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD dan PNF/Kesetaraan	-	213.852.000,00	
	1 01 03 2.02 0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				2 Dokumen	215.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Satuan Pendidikan PAUD dan PNF/Kesetaraan		213.852.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks pemerataan guru Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	-			0.87 indeks 63.00 undefined	441.689.000,00						-	145.286.000,00	
	1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan ketentuan	-			63.33 Persentase	441.689.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	145.286.000,00	
	1 01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Dokumen	65.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		19.805.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				10 Laporan	376.689.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		125.481.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	-			100 %	1.001.651.184,00						-	642.952.500,00	
	2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dibina	-			100 Persentase	436.651.184,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelaku Budaya	-	67.952.500,00	
	2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	200.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelaku Budaya		22.952.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 02 2.01 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	236.651.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelaku Budaya		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Kesenian Tradisional yang dibina	-			100 Persentase	565.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelaku Kesenian Tradisional	-	575.000.000,00	
	2 22 02 2.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	125.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelaku Kesenian Tradisional		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 02 2.02 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				25 Laporan	440.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelaku Kesenian Tradisional		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-			100 Persentase	575.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Seni yang dibina	-			100 Persentase	575.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pelaku Kesenian Daerah	-	150.000.000,00	
	2 22 03 2.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	550.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Pelaku Kesenian Daerah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 03 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				3183 Unit	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Museum yang dikelola Daerah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				50 Orang	288.212.328,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Museum yang dikelola Daerah		163.947.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				4 Unit	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Museum yang dikelola Daerah		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	75.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Museum yang dikelola Daerah		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SD NEGERI CURAHGRINTING 1						31.185.000,00							102.031.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						31.185.000,00							102.031.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						31.185.000,00							102.031.200,00	
12	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			79.90 persen 98.67 Persen	31.185.000,00						-	102.031.200,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	31.185.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI CURAHGRINTING 1	-	102.031.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	31.185.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pilang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI CURAHGRINTING 1		102.031.200,00	SD NEGERI CURAHGRINTING 1
		SD NEGERI CURAHGRINTING 3						58.611.000,00							75.374.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						58.611.000,00							75.374.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						58.611.000,00							75.374.400,00	
13	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	58.611.000,00						-	75.374.400,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	58.611.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI CURAHGRINTING 3	-	75.374.400,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	58.611.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pilang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI CURAHGRINTING 3		75.374.400,00	SD NEGERI CURAHGRINTING 3
		SD NEGERI JATI 1						271.814.000,00							423.751.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						271.814.000,00							423.751.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						271.814.000,00							423.751.200,00	
14	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 Persen 98.67 Persen	271.814.000,00						-	423.751.200,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 persentase 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	271.814.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JATI 1	-	423.751.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	271.814.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JATI 1		423.751.200,00	SD NEGERI JATI 1
		SD NEGERI JATI 4						65.916.000,00							99.273.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						65.916.000,00							99.273.600,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						65.916.000,00							99.273.600,00	
15	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS)* 77.90 Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 Persen 98.67 Persen	65.916.000,00						-	99.273.600,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	65.916.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JATI 4	-	99.273.600,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	65.916.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JATI 4		99.273.600,00	SD NEGERI JATI 4
		SD NEGERI JREBENG KIDUL						82.773.000,00							154.425.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.773.000,00							154.425.600,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						82.773.000,00							154.425.600,00	
16	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 Persen 98.67 Persen	82.773.000,00						-	154.425.600,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 nilai 99.41 Persen 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	82.773.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG KIDUL	-	154.425.600,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	82.773.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG KIDUL		154.425.600,00	SD NEGERI JREBENG KIDUL
		SD NEGERI JREBENG KULON 1						90.921.000,00							181.082.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						90.921.000,00							181.082.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						90.921.000,00							181.082.400,00	
17	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS)" Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 persen 98.67 persen	90.921.000,00						-	181.082.400,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	90.921.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG KULON 1	-	181.082.400,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	90.921.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG KULON 1		181.082.400,00	SD NEGERI JREBENG KULON 1
		SD NEGERI JREBENG KULON 2						90.077.600,00								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						90.077.600,00							178.324.800,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						90.077.600,00							178.324.800,00	
18	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS)" Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 Persen 98.67 Persen	90.077.600,00						-	178.324.800,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 persen 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	90.077.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG KULON 2	-	178.324.800,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	90.077.600,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG KULON 2		178.324.800,00	SD NEGERI JREBENG KULON 2
		SD NEGERI JREBENG LOR 1						113.115.000,00								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						113.115.000,00							253.699.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						113.115.000,00							253.699.200,00	
19	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 Persen 98.67 Persen	113.115.000,00						-	253.699.200,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	113.115.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG LOR 1	-	253.699.200,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	113.115.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG LOR 1		253.699.200,00	SD NEGERI JREBENG LOR 1	
		SD NEGERI JREBENG LOR 3						116.768.000,00								265.648.800,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						116.768.000,00							265.648.800,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						116.768.000,00							265.648.800,00		
20	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 Persen 98.67 Persen	116.768.000,00						-	265.648.800,00		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	116.768.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG LOR 3	-	265.648.800,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	116.768.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG LOR 3		265.648.800,00	SD NEGERI JREBENG LOR 3	
		SD NEGERI JREBENG LOR 7						107.668.000,00								119.496.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						107.668.000,00							119.496.000,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						107.668.000,00							119.496.000,00		
21	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persentase 77.90 Persen 98.67 Persen	107.668.000,00						-	119.496.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persentase 71.09 Nilai 51.41 Nilai	107.668.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG LOR 7	-	119.496.000,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	107.668.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG LOR 7		119.496.000,00	SD NEGERI JREBENG LOR 7
		SD NEGERI JREBENG WETAN						77.997.000,00							138.799.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						77.997.000,00							138.799.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						77.997.000,00							138.799.200,00	
22	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	77.997.000,00						-	138.799.200,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 51.41 Nilai	77.997.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG WETAN	-	138.799.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	77.997.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI JREBENG WETAN		138.799.200,00	SD NEGERI JREBENG WETAN
		SD NEGERI KADEMANGAN 1						93.449.000,00							189.355.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						93.449.000,00							189.355.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						93.449.000,00							189.355.200,00	
23	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	93.449.000,00						-	189.355.200,00	

No		Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional					Daerah
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	127.724.000,00						-	301.497.600,00	
	1	01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 99.41 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	127.724.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KANIGARAN 6	-	301.497.600,00	
	1	01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	127.724.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KANIGARAN 6		301.497.600,00	SD NEGERI KANIGARAN 6
			SD NEGERI KARENG LOR 1						117.504.000,00							151.668.000,00	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						117.504.000,00							151.668.000,00	
	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						117.504.000,00							151.668.000,00	
29	1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 persen 98.67 persen	117.504.000,00						-	151.668.000,00	
	1	01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	117.504.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KARENG LOR 1	-	151.668.000,00	
	1	01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	117.504.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kareng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KARENG LOR 1		151.668.000,00	SD NEGERI KARENG LOR 1
			SD NEGERI KARENG LOR 2						73.221.000,00							123.172.800,00	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						73.221.000,00							123.172.800,00	
	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						73.221.000,00							123.172.800,00	
30	1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	73.221.000,00						-	123.172.800,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 51.41 Nilai	73.221.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KARENG LOR 2	-	123.172.800,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	73.221.000,00	Kota Probolinggo, Kedopak, Kareng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KARENG LOR 2		123.172.800,00	SD NEGERI KARENG LOR 2
		SD NEGERI KEBONSARI KULON 1						233.887.000,00							299.659.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						233.887.000,00							299.659.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						233.887.000,00							299.659.200,00	
31	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD(APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	233.887.000,00						-	299.659.200,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentse Warga Negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 651.41 Nilai	233.887.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEBONSARI KULON 1	-	299.659.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	233.887.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEBONSARI KULON 1		299.659.200,00	SD NEGERI KEBONSARI KULON 1
		SD NEGERI KEBONSARI KULON 3						263.666.500,00							397.094.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						263.666.500,00							397.094.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						263.666.500,00							397.094.400,00	
32	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	263.666.500,00						-	397.094.400,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD PersentaseWarga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	263.666.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEBONSARI KULON 3	-	397.094.400,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						50.749.000,00							49.636.800,00	
	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	50.749.000,00					-		49.636.800,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	50.749.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3	-	49.636.800,00	
1 01 02 2.01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	50.749.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3		49.636.800,00	SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3
		SD NEGERI KEDOPOK 1						80.807.000,00							147.991.200,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						80.807.000,00							147.991.200,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						80.807.000,00							147.991.200,00	
36	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 persen 98.67 persen	80.807.000,00					-		147.991.200,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	80.807.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDOPOK 1	-	147.991.200,00	
	1 01 02 2.01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	80.807.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDOPOK 1		147.991.200,00	SD NEGERI KEDOPOK 1
		SD NEGERI KEDOPOK 2						83.335.000,00							156.264.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						83.335.000,00							156.264.000,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						83.335.000,00							156.264.000,00	
37	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 persen 98.67 Persen	83.335.000,00					-		156.264.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	83.335.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDOPOK 2	-	156.264.000,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	83.335.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDOPOK 2		156.264.000,00	SD NEGERI KEDOPOK 2	
		SD NEGERI KEDUNGASEM 1						182.017.000,00								246.345.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						182.017.000,00							246.345.600,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						182.017.000,00							246.345.600,00		
38	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	182.017.000,00						-	246.345.600,00		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	182.017.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDUNGASEM 1	-	246.345.600,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	182.017.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedung Asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDUNGASEM 1		246.345.600,00	SD NEGERI KEDUNGASEM 1	
		SD NEGERI KEDUNGASEM 4						125.652.000,00								178.324.800,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						125.652.000,00							178.324.800,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						125.652.000,00							178.324.800,00		
39	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 persen 98.67 Persen	125.652.000,00						-	178.324.800,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	125.652.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDUNGASEM 4	-	178.324.800,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	125.652.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedung Asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDUNGASEM 4		178.324.800,00	SD NEGERI KEDUNGASEM 4
		SD NEGERI KEDUNGGALENG						111.324.000,00							131.445.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						111.324.000,00							131.445.600,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						111.324.000,00							131.445.600,00	
40	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	111.324.000,00						-	131.445.600,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	111.324.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDUNGGALENG	-	131.445.600,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	111.324.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedunggaleng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KEDUNGGALENG		131.445.600,00	SD NEGERI KEDUNGGALENG
		SD NEGERI KETAPANG 1						118.067.000,00							153.506.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						118.067.000,00							153.506.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						118.067.000,00							153.506.400,00	
41	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	118.067.000,00						-	153.506.400,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	118.067.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KETAPANG 1	-	153.506.400,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	118.067.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KETAPANG 1		153.506.400,00	SD NEGERI KETAPANG 1	
		SD NEGERI KETAPANG 2						120.877.000,00								162.698.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						120.877.000,00							162.698.400,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						120.877.000,00							162.698.400,00		
42	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	120.877.000,00						-	162.698.400,00		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	120.877.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KETAPANG 2	-	162.698.400,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	120.877.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KETAPANG 2		162.698.400,00	SD NEGERI KETAPANG 2	
		SD NEGERI KETAPANG 3						47.198.000,00								154.425.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						47.198.000,00							154.425.600,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						47.198.000,00							154.425.600,00		
43	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	47.198.000,00						-	154.425.600,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 nilai 76.56 nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	47.198.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KETAPANG 3	-	154.425.600,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	47.198.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI KETAPANG 3		154.425.600,00	SD NEGERI KETAPANG 3
		SD NEGERI MANGUNHARJO 1						85.582.000,00							163.617.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						85.582.000,00							163.617.600,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						85.582.000,00							163.617.600,00	
44	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	85.582.000,00						-	163.617.600,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	85.582.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI MANGUNHARJO 1	-	163.617.600,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	85.582.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI MANGUNHARJO 1		163.617.600,00	SD NEGERI MANGUNHARJO 1
		SD NEGERI MANGUNHARJO 10						34.275.000,00							112.142.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						34.275.000,00							112.142.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						34.275.000,00							112.142.400,00	
45	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	34.275.000,00						-	112.142.400,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	24.394.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI MAYANGAN 4		63.424.800,00	SD NEGERI MAYANGAN 4
		SD NEGERI PAKISTAJI 1						87.831.000,00							170.971.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						87.831.000,00							170.971.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						87.831.000,00							170.971.200,00	
55	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	87.831.000,00						-	170.971.200,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64,00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	87.831.000,00			Memperkuat pembangunanan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI PAKISTAJI 1	-	170.971.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	87.831.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Pakistaji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI PAKISTAJI 1		170.971.200,00	SD NEGERI PAKISTAJI 1
		SD NEGERI PAKISTAJI 2						82.492.000,00							153.506.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.492.000,00							153.506.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						82.492.000,00							153.506.400,00	
56	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 persen 98.67 Persen	82.492.000,00						-	153.506.400,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64,00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	82.492.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI PAKISTAJI 2	-	153.506.400,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	180.357.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKABUMI 4	-	321.720.000,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	180.357.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKABUMI 4		321.720.000,00	SD NEGERI SUKABUMI 4	
		SD NEGERI SUKABUMI 6														149.829.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						81.368.000,00							149.829.600,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						81.368.000,00							149.829.600,00		
66	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	81.368.000,00						-	149.829.600,00		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	81.368.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKABUMI 6	-	149.829.600,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	81.368.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKABUMI 6		149.829.600,00	SD NEGERI SUKABUMI 6	
		SD NEGERI SUKABUMI 7														130.526.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						75.469.000,00							130.526.400,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						75.469.000,00							130.526.400,00		
67	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	75.469.000,00						-	130.526.400,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakraian Capaian Target RENUA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	75.469.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKABUMI 7	-	130.526.400,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	75.469.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKABUMI 7		130.526.400,00	SD NEGERI SUKABUMI 7
		SD NEGERI SUKOHARJO 1						167.232.000,00							314.366.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						167.232.000,00							314.366.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						167.232.000,00							314.366.400,00	
68	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	167.232.000,00						-	314.366.400,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	167.232.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKOHARJO 1	-	314.366.400,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	167.232.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Sukoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKOHARJO 1		314.366.400,00	SD NEGERI SUKOHARJO 1
		SD NEGERI SUKOHARJO 3						182.579.000,00							248.184.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						182.579.000,00							248.184.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						182.579.000,00							248.184.000,00	
69	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	182.579.000,00						-	248.184.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	182.579.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKOHARJO 3	-	248.184.000,00			
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	182.579.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Sukoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKOHARJO 3		248.184.000,00	SD NEGERI SUKOHARJO 3		
		SD NEGERI SUKOHARJO 4						78.278.000,00									139.718.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						78.278.000,00									139.718.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						78.278.000,00									139.718.400,00	
70	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	78.278.000,00						-	139.718.400,00			
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	78.278.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKOHARJO 4	-	139.718.400,00			
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	78.278.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUKOHARJO 4		139.718.400,00	SD NEGERI SUKOHARJO 4		
		SD NEGERI SUMBER WETAN 1						70.517.000,00									230.719.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						70.517.000,00									230.719.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						70.517.000,00									230.719.200,00	
71	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	70.517.000,00						-	230.719.200,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	70.517.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUMBER WETAN 1	-	230.719.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	70.517.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Sumber Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUMBER WETAN 1		230.719.200,00	SD NEGERI SUMBER WETAN 1
		SD NEGERI SUMBER WETAN 2						118.067.000,00							153.506.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						118.067.000,00							153.506.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						118.067.000,00							153.506.400,00	
72	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	118.067.000,00						-	153.506.400,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	118.067.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUMBER WETAN 2	-	153.506.400,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	118.067.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Sumber Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUMBER WETAN 2		153.506.400,00	SD NEGERI SUMBER WETAN 2
		SD NEGERI SUMBERTAMAN 1						87.830.000,00							170.971.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						87.830.000,00							170.971.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						87.830.000,00							170.971.200,00	
73	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	87.830.000,00						-	170.971.200,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	87.830.000,00			-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-	-	170.971.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	87.830.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Sumber Taman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-		170.971.200,00	SD NEGERI SUMBERTAMAN 1
		SD NEGERI SUMBERTAMAN 2						128.096.000,00							303.336.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						128.096.000,00							303.336.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						128.096.000,00							303.336.000,00	
74	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	128.096.000,00					-		303.336.000,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	128.096.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUMBERTAMAN 2	-	303.336.000,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	128.096.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Sumber Taman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI SUMBERTAMAN 2		303.336.000,00	SD NEGERI SUMBERTAMAN 2
		SD NEGERI TISNONEGARAN 1						237.820.000,00							312.528.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						237.820.000,00							312.528.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						237.820.000,00							312.528.000,00	
75	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	237.820.000,00					-		312.528.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	237.820.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TISNONEGARAN 1	-	312.528.000,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	237.820.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TISNONEGARAN 1		312.528.000,00	SD NEGERI TISNONEGARAN 1	
		SD NEGERI TISNONEGARAN 3						235.853.000,00								306.093.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						235.853.000,00							306.093.600,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						235.853.000,00							306.093.600,00		
76	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	235.853.000,00						-	306.093.600,00		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	235.853.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TISNONEGARAN 3	-	306.093.600,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	235.853.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TISNONEGARAN 3		306.093.600,00	SD NEGERI TISNONEGARAN 3	
		SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1						76.886.000,00								175.567.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						76.886.000,00							175.567.200,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						76.886.000,00							175.567.200,00		
77	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	76.886.000,00						-	175.567.200,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	76.886.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1	-	175.567.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	76.886.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1		175.567.200,00	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1
		SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2						84.739.600,00								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						84.739.600,00							160.860.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						84.739.600,00							160.860.000,00	
78	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	84.739.600,00						-	160.860.000,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	84.739.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2	-	160.860.000,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	84.739.600,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2		160.860.000,00	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2
		SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3						117.786.000,00								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						117.786.000,00							152.587.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						117.786.000,00							152.587.200,00	
79	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	117.786.000,00						-	152.587.200,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	117.786.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3	-	152.587.200,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	117.786.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3		152.587.200,00	SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3	
		SD NEGERI TRIWUNG LOR 1						51.974.000,00								170.052.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						51.974.000,00							170.052.000,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						51.974.000,00							170.052.000,00		
80	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	51.974.000,00						-	170.052.000,00		
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	51.974.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG LOR 1	-	170.052.000,00		
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	51.974.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG LOR 1		170.052.000,00	SD NEGERI TRIWUNG LOR 1	
		SD NEGERI TRIWUNG LOR 2						29.218.000,00								95.596.800,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.218.000,00							95.596.800,00		
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						29.218.000,00							95.596.800,00		
81	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	29.218.000,00						-	95.596.800,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	29.218.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG LOR 2	-	95.596.800,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	29.218.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG LOR 2		95.596.800,00	SD NEGERI TRIWUNG LOR 2
		SD NEGERI TRIWUNG LOR 3						54.222.000,00								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54.222.000,00							177.405.600,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						54.222.000,00							177.405.600,00	
82	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	54.222.000,00						-	177.405.600,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	54.222.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG LOR 3	-	177.405.600,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	54.222.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI TRIWUNG LOR 3		177.405.600,00	SD NEGERI TRIWUNG LOR 3
		SD NEGERI WIROBORANG 1						230.339.000,00								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						230.339.000,00							404.448.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						230.339.000,00							404.448.000,00	
83	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			100 Persen 77.90 Persen 98.67 Persen	230.339.000,00						-	404.448.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 100 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	230.339.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI WIROBORANG 1	-	404.448.000,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	230.339.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI WIROBORANG 1		404.448.000,00	SD NEGERI WIROBORANG 1
		SD NEGERI WIROBORANG 4						32.027.500,00							104.788.800,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.027.500,00							104.788.800,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						32.027.500,00							104.788.800,00	
84	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	32.027.500,00						-	104.788.800,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 Persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	32.027.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI WIROBORANG 4	-	104.788.800,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	32.027.500,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI WIROBORANG 4		104.788.800,00	SD NEGERI WIROBORANG 4
		SD NEGERI WONOASIH 1						89.234.000,00							175.567.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						89.234.000,00							175.567.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						89.234.000,00							175.567.200,00	
85	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 persen 98.67 persen	89.234.000,00						-	175.567.200,00	
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebhinekaan SD Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-			64.00 Nilai 76.53 Nilai 76.56 Nilai 99.41 persen 71.09 Nilai 61.41 Nilai	89.234.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SD NEGERI WONOASIH 1	-	175.567.200,00	
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
88	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	424.494.000,00						-	571.771.200,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	424.494.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 2	-	571.771.200,00		
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	424.494.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisononegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 2		571.771.200,00	SMP NEGERI 2	
		SMP NEGERI 3						414.799.000,00							702.718.800,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						414.799.000,00								702.718.800,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						414.799.000,00								702.718.800,00	
89	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 persen 98.67 persen	414.799.000,00						-	702.718.800,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 nilai 73.36 nilai 72.50 nilai 98.58 persen 79.10 nilai 68.87 nilai	414.799.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 3	-	702.718.800,00		
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	414.799.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 3		702.718.800,00	SMP NEGERI 3	
		SMP NEGERI 4						476.819.000,00							736.705.200,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						476.819.000,00								736.705.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						476.819.000,00								736.705.200,00	
90	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	476.819.000,00						-	736.705.200,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	476.819.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 4	-	736.705.200,00	
1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	476.819.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 4		736.705.200,00	SMP NEGERI 4
		SMP NEGERI 5						436.194.000,00							698.720.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						436.194.000,00							698.720.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						436.194.000,00							698.720.400,00	
91	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	436.194.000,00						-	698.720.400,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	436.194.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 5	-	698.720.400,00	
1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	436.194.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 5		698.720.400,00	SMP NEGERI 5
		SMP NEGERI 6						400.352.000,00							569.772.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						400.352.000,00							569.772.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						400.352.000,00							569.772.000,00	
92	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	400.352.000,00						-	569.772.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	400.352.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 6	-	569.772.000,00	
1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	400.352.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kareng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 6		569.772.000,00	SMP NEGERI 6
		SMP NEGERI 7						460.793.000,00							701.719.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							460.793.000,00						701.719.200,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							460.793.000,00						701.719.200,00	
93	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	460.793.000,00						-	701.719.200,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	460.793.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 7	-	701.719.200,00	
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	460.793.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 7		701.719.200,00	SMP NEGERI 7
		SMP NEGERI 8						395.315.000,00							558.776.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							395.315.000,00						558.776.400,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							395.315.000,00						558.776.400,00	
94	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	395.315.000,00						-	558.776.400,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	395.315.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 8	-	558.776.400,00	
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	395.315.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 8		558.776.400,00	SMP NEGERI 8
		SMP NEGERI 9						436.320.000,00							749.700.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							436.320.000,00						749.700.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							436.320.000,00						749.700.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	436.320.000,00						-	749.700.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	436.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 9	-	749.700.000,00	
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	436.320.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SMP NEGERI 9		749.700.000,00	SMP NEGERI 9
		SMP NEGERI 10						465.830.000,00							712.714.800,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						465.830.000,00							712.714.800,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						465.830.000,00							712.714.800,00	
96	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	465.830.000,00						-	712.714.800,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	-			62.69 Nilai 73.36 Nilai 72.50 Nilai 98.58 Persen 79.10 Nilai 68.87 Nilai	465.830.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	SMP NEGERI 10	-	712.714.800,00	
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	465.830.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	SMP NEGERI 10		712.714.800,00	SMP NEGERI 10
		TK NEGERI PEMBINA						55.225.000,00							35.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						55.225.000,00							35.000.000,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						55.225.000,00							35.000.000,00	
97	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	-			77.90 Persen 98.67 Persen	55.225.000,00						-	35.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D IV Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	-			79.90 Persen 85.92 Persen 78.69 Persen	55.225.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	K NEGERI PEMBINA	-	35.000.000,00		
1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	55.225.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	K NEGERI PEMBINA		35.000.000,00	TK NEGERI PEMBINA	
		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						84.522.449.551,00							100.922.882.490,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						83.395.087.551,00								99.851.270.490,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						83.395.087.551,00								99.851.270.490,00	
98	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	36.074.661.676,00						-	37.778.586.015,00		
	1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	-			100 %	40.025.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	44.000.000,00		
1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	10.025.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	32.642.844.969,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	34.234.954.708,00		
1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				333 Orang/bulan	32.142.405.969,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		33.742.027.708,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	364.439.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		343.327.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	136.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		149.600.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	30.000.000,00	
	1 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	71.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	40.000.000,00	
	1 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	71.200.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	594.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	734.240.000,00	
1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	75.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		82.500.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		16.500.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.240.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		13.240.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		16.500.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	223.960.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	22.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		22.500.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	230.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		253.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			95 %	40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	40.000.000,00	
1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	40.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			100 %	2.157.363.488,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	2.114.412.200,00	
1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.725.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		1.725.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	283.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		283.900.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.871.738.488,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		1.828.787.200,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	498.527.819,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	540.979.107,00	
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	337.548.712,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		380.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				125 Unit	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.979.107,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		60.979.107,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
99	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	-			102,13 Rasio 17,5 Rasio	41.910.799.875,00						-	56.374.865.475,00	
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi Proporsi Fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standart	-			100 % 100 %	2.349.356.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	3.813.640.000,00	
	1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				8 Unit	520.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	55.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90 Unit	270.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																				
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	1.499.356.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		1.448.640.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																				
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				5 Paket	5.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate) Angka Stillbirth (angka bayi lahir mati) Cakupan ANC (Antenatal Care) sesuai standart Cakupan Kepesertaan Aktif JKN ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV Persentase Cakupan penerima PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) Persentase pemberian ASI Eksklusif Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	-					90 % 6,8 Rasio 85 % 90 % 90 % 100 % 68,5 % 100 % 89 % 7,5 Rasio	38.686.443.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	51.390.225.475,00	
1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4084 Orang	449.013.750,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		443.413.750,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4055 Orang	102.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3822 Orang	223.950.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		221.150.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18877 Orang	262.100.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		259.300.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35048 Orang	69.810.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		67.010.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				162979 Orang	103.700.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		100.900.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32463 Orang	297.175.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		294.375.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19251 Orang	95.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		92.800.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8918 Orang	95.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		92.800.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				484 Orang	93.050.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		90.250.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3952 Orang	98.550.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		95.750.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6704 Orang	156.673.125,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		153.873.125,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	5.485.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	588.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		585.600.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	159.450.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	904.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		1.295.248.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	34.665.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		47.190.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	38.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		40.200.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	185.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		185.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	65.635.600,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		67.555.600,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 02 02 2.02 0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	25.650.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1	02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diterbitkan sesuai ketentuan	-			100 %	875.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	1.171.000.000,00	
1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				35 Unit	875.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		1.171.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
100	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-			70 %	51.800.000,00						-	48.200.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai ketentuan	-			100 %	16.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SDM Kesehatan pada Dinkes PPKB	-	13.200.000,00	
1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	16.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SDM Kesehatan pada Dinkes PPKB		13.200.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional sesuai kompetensinya	-			100 %	35.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SDM Kesehatan pada Dinkes PPKB	-	35.000.000,00	
1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				115 Orang	35.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	SDM Kesehatan pada Dinkes PPKB		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
101	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Fasilitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	-			100 %	22.300.000,00						-	19.500.000,00	
	1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Izin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan yang diterbitkan sesuai ketentuan	-			100 %	8.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	8.000.000,00	
1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	-			100 %	14.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	11.500.000,00	
1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				15 Unit	14.300.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		11.500.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
102	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	-			100 %	5.335.526.000,00						-	5.630.119.000,00	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Siklus Hidup Persentase Puskesmas, Kelurahan Siaga, SBH yang aktif	-			80 % 30 %	5.335.526.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	5.630.119.000,00	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	5.335.526.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		5.630.119.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.127.362.000,00							1.071.612.000,00	
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1.127.362.000,00							1.071.612.000,00	
103	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	-			17,5 Rasio 1,98 Rasio	10.600.000,00						-	5.000.000,00	
	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah yang disusun sesuai ketentuan	-			90 %	10.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	5.000.000,00	
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	10.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
104	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	-			70 Rasio 7,15 %	518.362.000,00						-	483.172.000,00	
	2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KIE Bangsa Kencana yang dilaksanakan	-			86 %	18.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	0,00	
	2 14 03 2.01 0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	18.700.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2 14 03 2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase penyuluhan, pergerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK oleh PKB/PLKB	-			100 %	424.020.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	458.172.000,00	
2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				267 Orang	424.020.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		458.172.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2 14 03 2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan KB yang dilaksanakan	-			85 %	50.642.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	0,00	
2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				988 Orang	27.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2 14 03 2.03 0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	22.842.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2 14 03 2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-			86 %	25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	25.000.000,00	
2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				29 Kampung	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
105	2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	-			40 %	598.400.000,00						-	583.440.000,00	
	2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina Persentase Keluarga yang sesuai dengan klasifikasi yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			65 % 65 %	598.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	583.440.000,00	
	2 14 04 2.01 0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				425 Orang	68.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2 14 04 2.01 0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				68 Kelompok	530.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		583.440.000,00	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		RSUD DR MOH SALEH						137.019.804.396,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						137.019.804.396,00							0,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						137.019.804.396,00							0,00	
106	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	137.019.804.396,00						-	0,00	
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	26.666.604.396,00			-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-	-	0,00	
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				377 0	26.666.604.396,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	RSUD DR MOH SALEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	110.353.200.000,00			-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-	-	0,00	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	110.353.200.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	RSUD DR MOH SALEH
		PUSKESMAS WONOASIH						2.792.500.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.792.500.000,00							0,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.792.500.000,00							0,00	
107	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	2.792.500.000,00					-		0,00	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas/RSUD	-			88,34 Indeks	2.792.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	0,00	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.792.500.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		0,00	PUSKESMAS WONOASIH
		PUSKESMAS KETAPANG						2.965.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.965.000.000,00							0,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.965.000.000,00							0,00	
108	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	2.965.000.000,00					-		0,00	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas/RSUD	-			88,34 Indeks	2.965.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	0,00	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.965.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA BELANJA LAINNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		0,00	PUSKESMAS KETAPANG
		PUSKESMAS KEDOPOK						2.401.250.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.401.250.000,00							0,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.401.250.000,00							0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENUA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	1 02 01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	2.401.250.000,00						-	0,00	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas/RSUD	-			88,34 Indeks	2.401.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	0,00	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.401.250.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		0,00	PUSKESMAS KEDOPOK
		PUSKESMAS KANIGARAN						3.430.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.430.000.000,00							0,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.430.000.000,00							0,00	
110	1 02 01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	3.430.000.000,00						-	0,00	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas/RSUD	-			88,34 Indeks	3.430.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	0,00	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.430.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		0,00	PUSKESMAS KANIGARAN
		PUSKESMAS SUKABUMI						1.790.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.790.000.000,00							0,00	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.790.000.000,00							0,00	
111	1 02 01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	1.790.000.000,00						-	0,00	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas/RSUD	-			88,34 Indeks	1.790.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB	-	0,00	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.790.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Aparatur Dinkes PPKB		0,00	PUSKESMAS SUKABUMI

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/bulan	21.340.679.122,38	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai RSUD Ar Rozy		24.352.671.505,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	321.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-	-	300.000.000,00	
1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	321.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-		300.000.000,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-	-	275.000.000,00	
1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	250.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-		275.000.000,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD	-			86 indeks	12.596.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	14.096.000.000,00	
1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	12.596.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		14.096.000.000,00	RSUD AR - ROZY
114	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2. Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita 1. Angka Kematian Ibu (AKI)	-			14 indeks 70,91 indeks	26.567.321.484,00						-	31.267.402.686,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standart	-			100 %	14.078.621.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	17.434.573.686,00	
	1 02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				5 Unit	1.340.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		2.079.674.105,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	1.935.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		3.246.908.482,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				587 Unit	2.315.423.210,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		2.938.400.225,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	4.784.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		4.545.671.874,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	3.704.198.290,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		4.623.919.000,00	RSUD AR - ROZY

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10. Angka Stillbirth (angka bayi lahir mati) 1. Cakupan ANC (Antenatal Care) sesuai standart 2. Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 3. Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita 4. Persentase pemberian ASI Eksklusif 5. Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB Succes Rate) 6. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart 7. Cakupan Kepesertaan Aktif JKN 8. ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV 9. Persentase Cakupan penerima PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis)	-			5,5 indeks 89 % 93 % 5,5 indeks 74 % 90 % 100 % 90 % 90 % 100 %	10.839.749.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	11.879.984.000,00	
1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	10.691.349.984,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		11.879.984.000,00	RSUD AR - ROZY
1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	148.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keesehatan	-			100 %	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai RSUD Ar Rozy	-	330.000.000,00	
1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai RSUD Ar Rozy		330.000.000,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diterbitkan sesuai ketentuan	-			100 %	1.348.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	1.622.845.000,00	
1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENUA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	355.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		414.000.000,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 02 2.04 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	993.950.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		1.208.845.000,00	RSUD AR - ROZY
115	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-			100 %	360.000.000,00						-	396.000.000,00	
	1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan (Puskesmas, Labkesmas dan Rumah Sakit) yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standart kebutuhan	-			100 %	35.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai RSUD Ar Rozy	-	38.500.000,00	
	1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai RSUD Ar Rozy		38.500.000,00	RSUD AR - ROZY
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional sesuai kompetensinya	-			100 %	325.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai RSUD Ar Rozy	-	357.500.000,00	
	1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				285 Orang	325.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai RSUD Ar Rozy		357.500.000,00	RSUD AR - ROZY
116	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	-			100 %	200.000.000,00						-	286.671.150,00	
	1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo	-	286.671.150,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat Kota Probolinggo		286.671.150,00	RSUD AR - ROZY	
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						48.635.585.970,00							121.913.367.971,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.521.292.378,00								121.538.101.906,00	
	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						43.165.271.644,00								111.775.047.906,00	
117	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 persentase	12.273.189.328,00						-	13.310.908.550,00		
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	86.516.776,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	84.150.900,00		
	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	86.516.776,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		84.150.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	-			100 persentase	9.021.386.184,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	9.605.372.350,00		
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				792 Orang/bulan	8.301.569.056,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		8.859.980.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1 03 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	719.817.128,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		745.392.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	-			100 persentase	24.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-	25.000.000,00	
1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	24.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi PD sesuai Ketentuan	-			100 persentase	1.592.603.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	1.670.455.500,00	
1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	33.970.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	102.450.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		106.389.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	11.627.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	383.475.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		304.615.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	178.993.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		180.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		4.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material																
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	102.068.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		107.765.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	197.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		192.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	448.640.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		512.101.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	20.750.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	108.030.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		111.035.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Terpenuhi	-			100 persentase	94.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	130.000.000,00	
1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	44.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	-			100 persentase	753.800.068,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	1.065.830.000,00	
1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	424.042.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		478.030.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	23.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		58.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	306.757.568,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		529.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terpenuhi	-			100 persentase	700.882.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	730.099.800,00	
1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12.536.300,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		15.953.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	289.006.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		284.146.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	149.340.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
118	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	-			69.85 persentase 84.57 persentase 94.94 persentase	4.088.397.920,00						-	15.693.304.000,00	
	1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola sesuai ketentuan	-			99.5 persentase	4.088.397.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	15.693.304.000,00	
1 03 02 2.02 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1.25 KM	2.780.715.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		13.086.304.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				13 KM	1.164.032.328,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 03 02 2.02 0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				25 Lembaga	22.150.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 02 2.02 0045 Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air																
			Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi				5 Dokumen	121.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		462.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
119	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	-			35.35 persentase	2.354.710.816,00						-	4.219.738.600,00	
	1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi baik	-			35.35 persentase	2.354.710.816,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	4.219.738.600,00	
1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				415 Liter/Detik	2.186.529.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	168.181.632,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		369.738.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
120	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	-			100 persentase	2.787.927.184,00						-	2.341.900.000,00	
	1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Air Limbah Domestik dalam kondisi baik	-			100 persentase	2.787.927.184,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	2.341.900.000,00	
1 03 05 2.01 0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				80 M³/Hari	2.395.447.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		1.956.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	392.480.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
121	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-			48.97 persentase	2.969.679.184,00						-	25.306.977.250,00	
	1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam kondisi mantap	-			48.97 persentase	2.969.679.184,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	25.306.977.250,00	
	1 03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1.601.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		22.556.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 03 06 2.01 0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				15 Sistem Drainase Perkotaan	1.368.679.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		2.750.327.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
122	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	-			82 persentase	11.298.905.184,00						-	24.313.590.000,00	
	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	-			82 persentase	11.298.905.184,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	24.313.590.000,00	
	1 03 08 2.01 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				8 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		2.520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	10.136.555.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		21.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				400 Dokumen	162.350.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		293.590.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
123	1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	-			86 persentase	1.239.761.184,00						-	550.968.000,00	
	1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya sesuai ketentuan	-			86 persentase	1.239.761.184,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	550.968.000,00	
1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1.239.761.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		550.968.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
124	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan	-			97,92 persentase	5.764.722.252,00						-	24.982.250.000,00	
	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	-			97,92 persentase	5.764.722.252,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	24.982.250.000,00	
1 03 10 2.01 0053 Pembangunan Jalan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				2,5 KM	2.782.214.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		21.847.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10 2.01 0055 Rehabilitasi Jalan																
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				8 KM	2.775.757.660,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10 2.01 0058 Rehabilitasi Jembatan																
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				15 Meter	56.750.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10 2.01 0069 Pembangunan Jembatan																
			Panjang jembatan yang dibangun				5 Meter	150.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
125	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	-			70 persentase	50.000.000,00					-	-	6.325.000,00	
	1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Ketentuan	-			70 persentase	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	6.325.000,00	
1 03 11 2.04 0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				30 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		6.325.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
126	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten/Kota	-			100 persentase	337.978.592,00					-	-	1.049.086.506,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	-			100 persentase	265.978.592,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	808.886.506,00	
	1 03 12 2.01 0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	265.978.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		808.886.506,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	72.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	240.200.000,00	
	1 03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	72.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		240.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.356.020.734,00							9.763.054.000,00	
127	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-			100 persentase	1.723.841.392,00						-	2.063.054.000,00	
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersedia	-			100 persentase	211.836.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	165.000.000,00	
	1 04 02 2.01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				5 Dokumen	211.836.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersedia undefined	-			100 persentase undefined undefined	1.138.005.392,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	1.623.054.000,00	
	1 04 02 2.05 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	1.138.005.392,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		1.623.054.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang direkomendasikan untuk diterbitkan izin	-			100 persentase	374.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	275.000.000,00	
	1 04 02 2.06 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				20 Laporan	374.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
128	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	-			32.09 persentase	972.238.750,00						-	3.300.000.000,00	
	1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	undefined	-			undefined undefined	972.238.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	3.300.000.000,00	
	1 04 03 2.03 0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				1 Ha	972.238.750,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
129	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-			82 persentase	2.659.940.592,00						-	4.400.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik	-			82 persentase	2.659.940.592,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PADA SEKTOR STRATEGIS	-	-	4.400.000.000,00	
	1 04 05 2.01 0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				15 Lokasi	1.309.425.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PADA SEKTOR STRATEGIS	-		1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 05 2.01 0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				10 Lokasi	1.350.515.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						114.293.592,00							375.266.065,00	
	2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						114.293.592,00							375.266.065,00	
130	2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	-			100 persentase	114.293.592,00						-	375.266.065,00	
	2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang diselesaikan	-			100 persentase	114.293.592,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	375.266.065,00	
	2 10 04 2.01 0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	114.293.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		375.266.065,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						17.352.775.769,00							24.172.528.115,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.352.775.769,00							24.172.528.115,00	
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17.352.775.769,00							24.172.528.115,00	
131	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program	-			90 %	11.831.971.169,00						-	16.518.971.038,00	
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah	-			2 Dokumen	34.668.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	50.063.970,00	
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranokot Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				4 0	20.948.200,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		29.724.970,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	13.720.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		20.339.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			98 Dokumen	10.420.013.905,00			Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	14.068.772.135,00	
1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	9.910.342.905,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		13.380.508.947,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	509.671.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		688.263.188,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			12 Dokumen	24.500.000,00			Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	29.095.000,00	
1 05 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				249 Dokumen	24.500.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		29.095.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	-			12 Dokumen	463.187.176,00			Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	756.934.145,00	
1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	296.085.076,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pen ye larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		487.783.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0003 Penvediaan Peralatan Rumah Tanoga																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	41.697.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		45.701.370,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan																
			0				12 0	14.400.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		13.851.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		9.108.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	24.300.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		34.155.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	81.004.800,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		166.334.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			12 Laporan	529.311.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	744.843.831,00	
1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	419.297.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		530.343.831,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	110.014.400,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP		214.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik	-			50 Unit	360.289.988,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Seluruh Pegawai Satpol PP	-	869.261.957,00	

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1711 laporan	383.900.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		495.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	3.418.653.600,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		4.356.822.278,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-			12 kegiatan	880.800.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo	-	1.423.504.500,00	
1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	193.800.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		446.798.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	687.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		976.706.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
133	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	-			100 %	426.538.000,00						-	692.406.000,00	
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani	-			100 Laporan	310.038.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo	-	558.756.000,00	
1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				5 Dokumen	255.588.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		495.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				60 Laporan	23.400.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		29.601.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				127 Dokumen	31.050.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		34.155.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang ditangani	-			109 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo	-	12.650.000,00	
	1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				109 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		12.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah penanganan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	-			300 Orang	106.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo	-	121.000.000,00	
	1 05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				300 Orang	106.500.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat Kota Probolinggo		121.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						4.001.312.276,00							5.380.475.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.001.312.276,00							5.380.475.500,00	
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.001.312.276,00							5.380.475.500,00	
134	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			82 %	3.059.083.869,00						-	3.315.475.500,00	
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			82 %	4.008.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo	-	5.600.000,00	
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.100.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.908.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		2.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			82 %	2.326.883.969,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo	-	2.522.787.000,00	
1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.269.057.969,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		2.466.770.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	57.826.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		56.017.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	-			undefined undefined	206.933.740,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo	-	350.500.000,00	
1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	41.582.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	9.439.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		12.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	19.885.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	6.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	101.191.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo Kota Probolinggo		102.541.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	43.100.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo Kota Probolinggo		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo Kota Probolinggo		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
135	1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	-			52 %	942.228.407,00						-	2.065.000.000,00	
	1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang telah memiliki informasi rawan bencana	-			41 %	52.594.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Wilayah dan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Serta Aparat Pemerintah pada Instansi Terkait Kota Probolinggo	-	65.000.000,00	
1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				120 Orang	52.594.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Wilayah dan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Serta Aparat Pemerintah pada Instansi Terkait Kota Probolinggo		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase TRC yang kompeten	-			100 %	506.877.907,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Wilayah dan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Serta Aparat Pemerintah pada Instansi Terkait Kota Probolinggo	-	875.000.000,00	
1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				15 Unit	20.133.907,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Wilayah dan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Serta Aparat Pemerintah pada Instansi Terkait Kota Probolinggo		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	26.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Wilayah dan Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Serta Aparat Pemerintah pada Instansi Terkait Kota Probolinggo		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	19.050.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.907.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.01 0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	114.850.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		132.077.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.773.765.084,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5.891.332.902,00	
1 06 01 2.02 0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			0				33 Orang 0	4.647.483.084,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.746.108.602,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.02 0003Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	112.482.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		129.354.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.02 0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	13.800.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.870.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Barang Milik Daerah	-	2.587.500,00	
1 06 01 2.03 0006Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.250.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Barang Milik Daerah		2.587.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	284.040.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	326.646.449,00	
1 06 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			0				60 0	59.088.415,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		67.951.677,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
			0				12 0	224.951.976,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		258.694.772,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	420.522.819,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	483.601.241,00	
1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			0				4 0	63.672.819,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah		73.223.741,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	19.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.850.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12.075.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.120.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.588.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 06 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah		23.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	244.200.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah		280.830.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	60.030.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Administrasi Umum Perangkat Daerah		69.034.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	597.148.906,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah	-	690.279.242,00	
1 06 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	187.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		215.050.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		23.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	81.250.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		97.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	206.898.906,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		237.929.242,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	102.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		117.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184.590.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	212.278.500,00	
1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	6.100.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.015.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				11 Laporan	132.090.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		151.903.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	24.650.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		28.347.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.750.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25.012.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	334.108.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	384.224.430,00	
1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.140.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		48.461.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			0				24 0	107.836.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		124.011.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				125 Unit	64.442.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		74.108.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	109.690.200,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		126.143.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
137	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	465.660.384,00						-	505.082.300,00	
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	465.660.384,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin	-	505.082.300,00	
	1 06 02 2.03 0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Keluarga	1.499.800,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		7.379.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Lembaga	4.160.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		4.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1.499.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		1.850.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				66 Orang	36.220.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		41.653.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial																
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti				12 Laporan	422.281.584,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
138	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	1.366.000.000,00						-	1.485.262.500,00	
	1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	1.052.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	-	1.124.450.000,00	
1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				58 Orang	800.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		840.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang																
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	4.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	48.250.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	35.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		37.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	33.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		17.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	4.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	4.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		4.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		23.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan																
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0014 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	65.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		74.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.01 0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	4.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		4.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	313.750.000,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	360.812.500,00	
1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	4.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		4.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		5.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permaknaan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permaknaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	70.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		80.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 06 04 2.02 0004 Penyediaan Sandang																
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		115.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	36.750.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		42.262.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	4.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		4.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	12.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		13.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0009 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		5.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		8.625.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		17.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		17.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan																
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	17.500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		20.125.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	12.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		13.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
139	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	6.233.872.342,00						-	7.155.047.050,00	
	1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			-	12.399.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin	-	14.317.500,00	
1 06 05 2.01 0004 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi																
			Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				2 Orang	12.399.550,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		14.317.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.221.472.792,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin	-	7.140.729.550,00	
1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				7000 Orang	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		28.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05 2.02 0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				189 Orang	91.472.792,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		115.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05 2.02 0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3817 Orang	6.075.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		6.962.479.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05 2.02 0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				235 Usulan	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		34.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
140	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	270.671.670,00						-	311.271.650,00	
	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	159.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam	-	183.540.000,00	
1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam		57.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam		17.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	2.400.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam		2.760.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial																
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				98 Orang	84.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam		96.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.01 0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	8.200.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam		9.430.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	111.071.670,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam	-	127.731.650,00	
1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Orang	111.071.670,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencana Alam		127.731.650,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
141	1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	130.037.792,00						-	145.022.500,00	
	1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	130.037.792,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional	-	145.022.500,00	
1 06 07 2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.750.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional		10.062.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	30.400.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional		34.960.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 07 2.01 0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				24 Laporan	90.887.792,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.846.818.502,00							2.050.227.479,00	
2 08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.072.537.534,00							1.179.278.414,00	
142	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	361.071.584,00						-	415.241.322,00	
	2 08 02 2.01	Pelebmbagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	77.952.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak	-	89.653.800,00	
2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	45.102.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak		51.876.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				65 Lembaga	32.850.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak		37.777.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	283.119.584,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak	-	325.587.522,00	
2 08 02 2.02 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				35 Lembaga	30.200.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak		34.730.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02 0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				400 orang	169.689.584,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak		195.143.022,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02 0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				195 Orang	83.230.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak		95.714.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
143	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	105.648.800,00						-	121.421.120,00	
	2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan	-	2.225.000,00	
2 08 03 2.01 0003 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota																
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.01 0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.01 0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				1 Lembaga	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.01 0007 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				1 Kebijakan	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	103.148.800,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	118.621.120,00	
	2 08 03 2.02 0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan TingkatKabupaten/Kota				10 Orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02 0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02 0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02 0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				2 orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02 0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				24 orang	100.648.800,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		115.746.120,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02 0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				24 orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	575.000,00	
	2 08 03 2.03 0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				2 orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
144	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	369.382.600,00						-	375.000.000,00	
	2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	369.382.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat	-	375.000.000,00	
	2 08 04 2.02 0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	369.382.600,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		375.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
145	2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	5.280.000,00						-	6.072.000,00	
	2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.280.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak	-	6.072.000,00	
	2 08 05 2.01 0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	5.280.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak		6.072.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
146	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	200.517.400,00						-	226.311.250,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	95.091.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga PHA	-	105.071.350,00	
2 08 06 2.01 0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	68.942.400,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga PHA		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.01 0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	26.149.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga PHA		30.071.350,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	105.426.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak	-	121.239.900,00	
2 08 06 2.02 0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				10 Lembaga	40.096.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak		46.110.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02 0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				4 Lembaga	65.330.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak		75.129.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
147	2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	30.637.150,00						-	35.232.722,00	
	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat	-	1.725.000,00	
2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.01 0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/kota				1 Kegiatan	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.01 0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota				5 Orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	27.637.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat	-	31.782.722,00	
2 08 07 2.02 0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				24 Orang	25.137.150,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		28.907.722,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				20 Orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				2 Orang	500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	774.280.968,00						-	870.949.065,00	
	2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	774.280.968,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat	-	870.949.065,00	
	2 13 05 2.01 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	34.800.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		40.020.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	300.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		345.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 13 05 2.01 0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		57.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 13 05 2.01 0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	389.480.968,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Semua pihak masyarakat		428.429.065,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						22.608.199.500,00						26.711.002.793,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.216.965.538,00						21.711.082.490,00		
	2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						14.216.965.538,00						21.711.082.490,00		
149	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	13.961.881.278,00						-	21.350.000.000,00	
	2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	-			100 %	76.816.184,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP	-	270.000.000,00	
	2 09 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	16.045.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	60.771.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			95 %	11.994.950.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP	-	14.920.000.000,00	
2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	11.730.040.080,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		14.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	256.684.960,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		380.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	8.225.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP	-	30.000.000,00	
2 09 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	439.516.412,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP	-	960.000.000,00	
2 09 01 2.06 0002 Penediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	134.649.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	38.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	266.367.212,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		560.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	187.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP	-	3.135.000.000,00	
2 09 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	37.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	150.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		3.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			95 %	815.929.159,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP	-	1.050.000.000,00	
2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	320.496.015,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		430.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	495.433.144,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		620.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			95 %	427.669.483,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP	-	985.000.000,00	
	2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43.770.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				56 Unit	304.450.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		570.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	79.449.483,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	ASN dan Non ASN DKPPP		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
150	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan Pangan	-			0,56 Skor	157.105.076,00						-	141.082.490,00	
	2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat	-			191 kg/kap/thn	93.673.676,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat	-	116.082.490,00	
	2 09 03 2.01 0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				8 Unit	32.114.492,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		68.312.490,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	34.693.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		22.770.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	26.865.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tingkat Konsumsi Energi terhadap standar konsumsi energi (% dari 2.100 kkal/kap/hari)	-			88,5 %	63.431.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat	-	25.000.000,00	
	2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	63.431.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
151	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	-			10 %	80.479.184,00						-	175.000.000,00	
	2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase wilayah dengan peta kerentanan dan ketahanan pangan yang telah disusun dan dimutakhirkan	-			100 %	26.915.592,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat	-	25.000.000,00	
	2 09 04 2.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	26.915.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kerawanan Pangan yang ditangani	-			100 %	53.563.592,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat	-	150.000.000,00	
	2 09 04 2.02 0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	20.450.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 09 04 2.02 0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				12 Dokumen	33.113.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
152	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	-			85,1 %	17.500.000,00						-	45.000.000,00	
	2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	-			80 %	17.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat	-	45.000.000,00	
	2 09 05 2.01 0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	17.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.391.233.962,00							4.999.920.303,00	
	3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.338.454.958,00							3.160.000.000,00	
153	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-			1,30 %	453.609.354,00						-	1.180.000.000,00	
	3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-			1,3 %	76.379.684,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Nelayan	-	700.000.000,00	
	3 25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				360 Orang	76.379.684,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Nelayan		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase pelaku usaha yang mendapat layanan dari UPTD TPI	-			91 %	377.229.670,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Nelayan	-	480.000.000,00	
	3 25 03 2.03 0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				480 Layanan	377.229.670,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Nelayan		480.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
154	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-			1,22 %	425.628.604,00						-	840.000.000,00	
	3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang difasilitasi	-			25 %	21.850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pembudidaya ikan	-	330.000.000,00	
	3 25 04 2.02 0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				19 Kelompok	21.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pembudidaya ikan		330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan budidaya ikan yang baik	-			35 %	403.778.604,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pembudidaya ikan	-	510.000.000,00	
	3 25 04 2.04 0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				125 Dokumen	33.815.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pembudidaya ikan		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				150 Unit	31.283.092,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pembudidaya ikan		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				2 Unit	338.679.920,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pembudidaya ikan		410.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
155	3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum darat yang mendapat pengawasan	-			100 %	33.715.092,00						-	140.000.000,00	
	3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Perairan umum darat yang direstocking	-			20 %	33.715.092,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat	-	140.000.000,00	
3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				30 Pelaku Usaha	33.715.092,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
156	3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	-			21,68 kg/kap/thn	425.501.908,00						-	1.000.000.000,00	
	3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-			25 %	76.429.184,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pelaku Usaha Perikanan	-	70.000.000,00	
3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	76.429.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pelaku Usaha Perikanan		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan tersalurkan	-			15 %	349.072.724,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pelaku Usaha Perikanan	-	930.000.000,00	
3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	3.325.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok tani/petani/Pelaku usaha peternakan/Pelaku Usaha Pertanian		22.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 03 2.01 0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				6 Unit	3.325.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok tani/petani/Pelaku usaha peternakan/Pelaku Usaha Pertanian		22.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				5 Dokumen	3.325.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok tani/petani/Pelaku usaha peternakan/Pelaku Usaha Pertanian		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
159	3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			27 % 85 %	1.960.036.110,00						-	851.613.534,00	
	3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	-			75 %	264.379.184,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Peternak	-	250.470.000,00	
3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				29 Wilayah	264.379.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Peternak		250.470.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan yang Mendapat Pengawasan/Pendampingan	-			85 %	215.843.374,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat	-	225.426.300,00	
3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	215.843.374,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Masyarakat		225.426.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	-			100 %	1.479.813.552,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pelaku usaha peternakan	-	375.717.234,00	
3 27 04 2.05 0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				5 Unit	1.479.813.552,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pelaku usaha peternakan		375.717.234,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
160	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian	-			88,23 % 95 %	73.625.000,00						-	250.474.568,00	
	3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Area terdampak Bencana Pertanian yang ditanggulangi	-			87,09 %	73.625.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok tani/petani	-	250.474.568,00	
	3 27 05 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				110 Ha	4.325.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok tani/petani		62.590.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3 27 05 2.01 0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				44 Ha	69.300.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok tani/petani		187.884.568,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
161	3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	-			100 %	54.929.184,00						-	25.047.456,00	
	3 27 06 2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase unit usaha sarana produksi ternak yang dipantau legalitasnya	-			100 %	54.929.184,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pelaku usaha peternakan	-	25.047.456,00	
	3 27 06 2.02 0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan														
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				1 Laporan	54.929.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Pelaku usaha peternakan		25.047.456,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
162	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	-			80 %	3.729.963.710,00						-	300.284.745,00	
	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	-			60 %	3.729.963.710,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok sektor pertanian, perikanan, dan peternakan	-	300.284.745,00	
	3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	424.940.910,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok sektor pertanian, perikanan, dan peternakan		150.284.745,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 27 07 2.01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				162 Unit	3.305.022.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan 5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Kelompok sektor pertanian, perikanan, dan peternakan		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						43.987.433.063,00							39.773.320.460,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						43.987.433.063,00							39.773.320.460,00	
	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						43.987.433.063,00							39.773.320.460,00	
163	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			88 Persen	17.653.934.491,00						-	18.892.853.928,00	
	2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			88 Persen	158.712.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	161.247.382,00	
	2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	72.221.700,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		78.857.066,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	86.490.300,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		82.390.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	14.221.632.275,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	15.251.534.575,00	
	2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/bulan	13.816.674.275,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		14.869.480.737,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	371.809.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		347.247.388,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	33.149.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		34.806.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	10.500.000,00	
2 11 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	-			90 Persen	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	15.750.000,00	
2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		15.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	-			95 Persen	794.642.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	831.996.680,00	
2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	150.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		89.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	-			95 Persen	1.705.512.416,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	1.979.750.291,00	
2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	239.260.840,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		276.518.382,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35.979.576,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		37.534.875,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.430.272.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		1.665.697.034,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	-			100 Persen	560.435.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	489.825.000,00	
2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	105.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		110.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, PaiaK dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	198.935.700,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		287.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	228.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		78.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		7.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
164	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Disusun Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	150.000.000,00						-	157.500.000,00	
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Disusun Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	150.000.000,00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan	-	157.500.000,00	
2 11 02 2.01 0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH																
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan		157.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
165	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Mutu Lingkungan Hidup (Media Tanah, Air dan Udara) Dengan Kualitas Baik	-			72 Persen	1.594.517.335,00						-	1.810.926.879,00	
	2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			90 Persen	1.487.411.882,00			Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	1.621.926.879,00	
2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	18.505.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	95.455.436,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		157.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 0008 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				2 Laporan	11.925.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		24.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				2 Laporan	56.370.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		68.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				1 Unit	335.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		294.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				2 Laporan	50.613.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		39.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				525 Dokumen	889.542.946,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		975.126.879,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			50 Persen	89.955.453,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	168.000.000,00	
	2 11 03 2.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	69.955.453,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		136.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				2 Titik	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Wilayah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			50 Persen	17.150.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	21.000.000,00	
	2 11 03 2.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	17.150.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
166	2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan Publik	-			20.25 Persen	6.129.401.558,00						-	7.621.270.220,00	
	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Konservasi Kehati	-			100 Persen	6.129.401.558,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan	-	7.621.270.220,00	
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Ha	2.916.509.436,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan		4.354.340.197,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				250 Orang	130.599.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan		68.249.895,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				48 Unit	507.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan		420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	2.299.629.222,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan		2.557.903.978,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	275.263.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan		220.776.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
167	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Yang Sesuai Standar	-			60 Persen	20.534.000,00						-	175.665.000,00	
	2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	-			90 Persen	20.534.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	175.665.000,00	
2 11 05 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				8 Dokumen	20.534.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		175.665.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
168	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Dibina Dan Diawasi Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	-			82 Persen	117.465.904,00						-	188.713.350,00	
	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Dibina Dan Diawasi Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	-			82 Persen	117.465.904,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	188.713.350,00	
2 11 06 2.01 0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	22.025.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		62.713.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Linokunaa yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				260 Badan Usaha	95.440.904,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		126.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
169	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan Dan Kelompok Masyarakat Yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Lingkungan	-			86 Persen	192.481.900,00						-	222.787.814,00	
	2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup	-			86 Persen	192.481.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	222.787.814,00	
2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	49.300.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		91.537.814,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				300 Orang	82.150.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		47.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	61.031.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
170	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah Dan Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-			62 Persen	170.060.000,00						-	178.500.000,00	
	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah Dan Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-			62 Persen	170.060.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	178.500.000,00	
2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				25 Entitas	170.060.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		178.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
171	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup Masyarakat Yang Tertangani	-			100 Persen	19.150.000,00						-	63.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup	-			100 Persen	19.150.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	63.000.000,00	
2 11 10 2.01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				5 Perkara	6.250.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10 2.01 0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				15 Pengaduan	12.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
172	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah Yang Terlayani	-			81 Persen	17.939.887.875,00						-	10.462.103.269,00	
	2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Dan Terolah	-			81 Persen	17.939.887.875,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	-	10.462.103.269,00	
2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				7 Kelompok	119.125.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		32.651.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan																
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				22500 Ton	2.230.133.100,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		2.345.589.494,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				80 Persentase	2.703.654.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara		2.785.792.145,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodioester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				52 Orang	54.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	-			100 %	242.608.481,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo	-	302.500.000,00	
2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	62.988.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	7.307.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	11.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	4.380.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	152.532.981,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	-			100 %	65.000.000,00			-	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	71.500.000,00	
2 12 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		38.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	-			100 %	462.724.144,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo	-	552.200.000,00	
2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	2.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		2.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	201.825.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	258.899.144,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	-			100 %	99.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo	-	198.000.000,00	
2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	33.250.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.750.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kota Probolinggo		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
174	2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*1. Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital *2. Persentase kepemilikan kartu identitas anak	-			10 dan 81 %	515.500.552,00						-	633.478.824,00	
	2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembuatan dokumen kependudukan yang terlayani	-			100 %	515.500.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo	-	633.478.824,00	
2 12 02 2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				12 Dokumen	34.020.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		18.986.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				40500 Dokumen	312.240.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		464.475.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.01 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				4050 Dokumen	169.240.552,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		150.017.824,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
175	2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	*1. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan *2. Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan *3. Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan *4. Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-			100, 100,100 dan 100 %	286.337.552,00						-	341.116.389,00	
	2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	-			100 %	276.912.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo	-	324.616.389,00	
2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				8450 Dokumen	99.975.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		122.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				8450 Layanan	176.937.552,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		201.966.389,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan	-			100 %	9.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo	-	16.500.000,00	
2 12 03 2.02 0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				29 Laporan	9.425.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
176	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-			100 %	296.714.592,00						-	441.650.000,00	
	2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase laporan dan penyajian data kependudukan yang sesuai ketentuan	-			100 %	61.165.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo	-	140.250.000,00	
2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				58 Dokumen	44.365.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		52.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	16.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola sesuai ketentuan	-			100 %	230.549.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo	-	288.200.000,00	
2 12 04 2.03 0003 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	182.550.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		222.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	47.999.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo	-	13.200.000,00		
2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
177	2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	-			100 %	22.000.000,00						-	30.250.000,00		
	2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang disusun sesuai ketentuan	-			100 %	22.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo	-	30.250.000,00		
2 12 05 2.01 0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	22.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kota Probolinggo		30.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS PERHUBUNGAN						26.655.062.653,00							32.033.587.116,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.655.062.653,00								32.033.587.116,00	
	2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						26.655.062.653,00								32.033.587.116,00	
178	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	8.806.993.447,16						-	9.028.955.882,00		
	2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			6 Dokumen 7 Laporan 77 %	14.728.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	17.150.986,00		
2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	11.930.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		14.211.196,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	2.798.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		2.939.790,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	-			100 %	6.537.999.608,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	7.466.494.180,00	
	2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				600 Orang/bulan	6.245.024.156,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		7.179.964.662,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	283.575.552,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		282.085.498,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	9.399.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		4.444.020,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	-			100 %	10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	17.745.000,00	
	2 15 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		17.745.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	-			100 %	12.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		16.500.000,00	
2 15 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	12.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		16.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	-			100 %	357.382.683,16			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		347.453.400,00	
2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.416.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		32.295.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	36.833.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		28.680.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	37.036.283,16	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		31.908.450,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		3.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		40.740.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	199.497.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		210.048.720,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	164.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	40.000.000,00	
	2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				67 Unit	164.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	-			100 %	1.174.901.056,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		536.403.536,00	
	2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.472.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		3.648.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	254.290.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		244.341.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	31.375.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	885.764.056,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	-		288.413.286,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	-			100 %	535.982.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	587.208.780,00	
	2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.586.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		46.563.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	409.556.100,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		435.127.980,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	45.840.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		24.517.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
179	2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	-			76 %	17.055.051.037,84						-	23.004.631.234,00	
	2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	-			75 %	13.543.757.713,84			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	18.161.333.984,00	
2 15 02 2.02 0002 Penvediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	526.253.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		2.525.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				12 Unit	499.822.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		122.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1900 Unit	12.517.681.713,84	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		15.513.433.984,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase pemenuhan standar pembangunan fasilitas parkir diluar ruas jalan	-			48 %	534.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	836.400.000,00	
2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Laporan	534.100.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		836.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			95 %	362.262.368,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	551.000.000,00	
2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguian Berkala Kendaraan Bermotor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				24 Unit	81.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				9000 Unit	17.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	97.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		174.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	140.912.368,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-			75 %	2.540.331.656,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	3.279.807.250,00	
2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi				25 Laporan	31.799.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		47.940.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Keselamatan	-			43 %	16.575.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	30.600.000,00	
2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	16.575.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		30.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan wilayah perkotaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT)	-			57 %	4.795.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	4.800.000,00	
2 15 02 2.11 0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4.795.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		4.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	-			39 %	19.412.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	89.650.000,00	
2 15 02 2.14 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	13.262.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.14 0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				6 Unit	6.150.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		39.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan yang ditetapkan	-			91 %	2.016.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	3.100.000,00	
2 15 02 2.16 0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2.016.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		3.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
180	2 15 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-			-	793.018.168,00						-	0,00	
	2 15 05 2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase penyediaan peralatan keselamatan perlintasan sebidang di jalan kabupaten/kota	-			42 %	793.018.168,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo	-	0,00	
2 15 05 2.01 0004 Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia				75 Unit	793.018.168,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan 7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Probolinggo		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.918.010.093,63							14.427.070.394,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.918.010.093,63							14.427.070.394,00	
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.604.671.693,63							13.962.470.394,00	
181	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	7.659.007.457,63						-	9.980.970.394,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Kegiatan Minimal 80%	-			90 %	9.415.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	27.562.500,00	
	2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	4.975.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		16.537.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	4.440.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		11.025.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	6.533.460.581,63			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	7.546.667.894,00	
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	6.433.539.581,63	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		7.436.667.894,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	99.921.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	4.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	-	12.000.000,00	
	2 16 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				3 Dokumen	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				4 Aplikasi	304.274.100,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan																
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				15 Aplikasi	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				12 Laporan	52.639.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 0036 Penyediaan Akses Internet																
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				80 Perangkat Daerah	863.624.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				3 Dokumen	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				2 Dokumen	9.990.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						117.800.000,00							209.600.000,00	
184	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data	-			72 %	117.800.000,00						-	209.600.000,00	
	2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi ke portal Satu Data Indonesia	-			88 %	117.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Pengguna Data	-	209.600.000,00	
	2 20 02 2.01 0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				40 %	4.680.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Pengguna Data		10.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				40 %	47.313.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Pengguna Data		110.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	16.325.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Pengguna Data		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				122 Orang	49.482.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perangkat Daerah dan Pengguna Data		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						195.538.400,00							255.000.000,00	
185	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	-			580 Indeks	195.538.400,00						-	255.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	-			75 Dokumen	7.575.577.617,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	0,00	
2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	7.362.296.025,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	195.281.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	10.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			82 persen	35.615.592,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	0,00	
	2 17 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	35.615.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			85 persen	8.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	0,00	
	2 17 01 2.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	8.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	-			85 persen	60.631.184,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	0,00	
	2 17 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	60.631.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Nasional	13 Daerah	14	15	16	17
	2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			85 persen	371.450.092,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	0,00	
2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	62.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	55.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	42.439.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.010.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			85 persen	29.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	0,00	
	2 17 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	19.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			85 persen	623.669.336,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-	-	0,00	
	2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	26.735.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	160.890.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	436.043.744,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			85 persen	223.678.848,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	0,00	
2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	81.833.056,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	84.345.792,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	17.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
187	2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	-			42 persen	88.740.000,00						-	0,00	
	2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan sesuai ketentuan	-			3 persen	88.740.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi	-	0,00	
	2 17 02 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	88.740.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
188	2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	-			85 persen	28.550.000,00						-	0,00	
	2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang difasilitasi melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan	-			3 persen	28.550.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi	-	0,00	
	2 17 03 2.01 0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				50 Unit Usaha	28.550.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
189	2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	-			25 persen	16.900.000,00						-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan fasilitasi penilaian kesehatan koperasi	-			3 persen	16.900.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi	-	0,00	
	2 17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				25 Unit Usaha	16.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
190	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	-			18 persen	65.240.000,00					-	0,00		
	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-			70 persen	65.240.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi	-	0,00	
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	65.240.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
191	2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	-			47 persen	11.900.000,00					-	0,00		
	2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan koperasi mandiri	-			3 persen	11.900.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi	-	0,00	
	2 17 06 2.01 0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				45 Unit Usaha	11.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
192	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	-			18 persen	456.790.000,00					-	0,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan usaha	-			3 persen	456.790.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku Usaha dan UMKM	-	0,00	
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				350 Unit Usaha	215.300.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku Usaha dan UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				100 Unit Usaha	26.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku Usaha dan UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				150 Unit Usaha	71.350.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku Usaha dan UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				100 Orang	7.300.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku Usaha dan UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	13.300.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku Usaha dan UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil														

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				175 Unit Usaha	567.580.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pelaku Usaha dan UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.841.094.477,00							0,00	
	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.841.094.477,00							0,00	
194	3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-			76 persen	789.300.000,00						-	0,00	
	3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	-			80 persen	763.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL	-	0,00	
	3 30 03 2.01 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	763.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	-			82 persen	25.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL	-	0,00	
	3 30 03 2.02 0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	25.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
195	3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-			80 persen	1.863.953.277,00						-	0,00	
	3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang difasilitasi untuk pengendalian ketersediaan	-			85 persen	1.679.566.477,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL	-	0,00	
	3 30 04 2.01 0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	1.679.566.477,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang difasilitasi untuk pengendalian harga dan ketersediaan di tingkat pasar	-			82 persen	175.286.800,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-	-	0,00	
3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	175.286.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang didistribusikan tepat sasaran	-			82 persen	9.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL	-	0,00	
3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	9.100.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
196	3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	-			16 persen	73.600.000,00						-	0,00	
	3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dagang melalui pameran dan misi dagang produk ekspor unggulan	-			2 persen	73.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL	-	0,00	
3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	73.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
197	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang memenuhi standart metrologi legal	-			20 persen	114.241.200,00						-	0,00			
	3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaku usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP	-			92 persen	114.241.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL	-	0,00			
	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1500 Unit	114.241.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pedagang dan PKL		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						8.687.988.184,00							10.989.314.847,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.687.988.184,00							10.989.314.847,00			
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						8.687.988.184,00							10.989.314.847,00			
198	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	7.567.870.472,00						-	9.480.950.475,00			
	2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			100 %	427.130.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMP TSP, Masyarakat	-	71.291.210,00			
	2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	216.430.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMP TSP, Masyarakat		49.691.210,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
	2 18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	210.700.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMP TSP, Masyarakat		21.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	4.699.435.536,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP,	-	5.915.633.440,00	
2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4.592.621.191,02	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP,		5.757.767.230,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				183 Dokumen	96.619.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP,		137.866.210,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25 Laporan	10.194.752,98	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP,		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	5.900.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat	-	11.031.250,00	
2 18 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	5.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		11.031.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	176.599.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP	-	71.437.500,00	
2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	42.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP		56.312.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	134.099.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP		15.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	499.581.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat	-	719.032.250,00	
	2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	78.138.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		133.743.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8.225.100,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		16.670.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	6.240.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		12.187.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	18.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		22.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	296.698.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		369.893.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				115 Dokumen	8.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	83.430.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		150.037.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-				100 %	103.426.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat	-	439.065.000,00	
2 18 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	103.426.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		439.065.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-				100 %	1.126.537.136,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat	-	1.393.446.325,00	
2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	507.780.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		660.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	618.757.136,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		733.371.325,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	529.260.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat	-	860.013.500,00	
	2 18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit	143.610.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		169.843.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				186 Unit	65.650.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		83.418.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	320.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pegawai DPMPTSP, Masyarakat		606.751.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
199	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	-			100 %	352.657.357,00						-	426.331.250,00	
	2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Fasilitas/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal yang Ditetapkan	-			2 Dokumen	107.850.000,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Penanaman Modal	-	191.593.750,00	
	2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	73.395.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Penanaman Modal		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2 18 02 2.01 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	34.455.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Penanaman Modal		41.593.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
	2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Potensi Penanaman Modal yang siap ditawarkan	-			100 %	244.807.357,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Investor/penanam Modal	-	234.737.500,00			
	2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.807.357,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Investor/penanam Modal		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
	2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	211.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Investor/penanam Modal		84.737.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
200	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestas	-			undefined undefined	83.368.000,00						-	261.468.750,00			
	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Potensi Penanaman Modal yang Dipromosikan	-			100 %	83.368.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Investor/penanam Modal	-	261.468.750,00			
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	83.368.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Investor/penanam Modal		261.468.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
201	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	-			100 %	315.104.052,00						-	483.700.662,00			
	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan/non perizinan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP Kabupaten/ Kota	-			100 %	315.104.052,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	pelaku usaha	-	483.700.662,00			

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	141.315.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	pelaku usaha		104.287.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal																
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				25 Kegiatan Usaha	46.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	pelaku usaha		53.662.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
203	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman moda	-			100 %	175.997.711,00						-	174.863.710,00	
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola dari Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	-			100 %	175.997.711,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	masyarakat	-	174.863.710,00	
2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				78 Dokumen	175.997.711,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	masyarakat		174.863.710,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						15.755.638.807,31							25.688.101.058,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.089.833.737,31							21.182.238.394,00	
2 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						13.089.833.737,31							21.182.238.394,00	
204	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 %	-			89 %	6.938.452.441,31						-	10.256.562.819,00	
	2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-			80 %	133.542.603,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo	-	210.000.000,00	
2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	70.032.125,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	63.510.478,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				80 %	4.993.031.134,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo	-	7.900.000.000,00	
2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.740.484.334,96	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		7.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	182.436.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				700 Laporan	70.110.800,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				80 %	320.047.609,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo	-	625.462.819,00	
2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	82.374.500,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 0003 Penvediaan Peralatan Rumah Tanqqa																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.464.500,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	62.216.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		52.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1800 Dokumen	10.800.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		12.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	162.192.609,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		407.862.819,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				80 %	92.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	BMD dispopar kota probolinggo	-	200.000.000,00	
2 19 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	92.500.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	BMD dispopar kota probolinggo		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				80 %	1.088.242.296,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo	-	1.005.600.000,00	
2 19 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	1.500.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		1.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	474.030.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		480.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	120.030.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		144.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	492.682.296,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	dispopar kota probolinggo		380.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-			80 %	311.088.798,35			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	BMD dispopar kota probolinggo	-	315.500.000,00	
	2 19 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.081.500,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	BMD dispopar kota probolinggo		45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	146.039.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	BMD dispopar kota probolinggo		110.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	53.520.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	BMD disopar kota probolinggo		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.448.298,35	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	BMD disopar kota probolinggo		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
205	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudahaan Berprestasi	-			89 %	262.950.000,00						-	724.513.215,00	
	2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	-			45 %	262.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pemuda kota probolinggo	-	724.513.215,00	
2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				100 Orang	68.400.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pemuda kota probolinggo		164.513.215,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	103.350.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pemuda kota probolinggo		360.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				100 Orang	91.200.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pemuda kota probolinggo		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
206	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Berprestasi	-			65 %	5.528.431.296,00						-	7.701.162.360,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	-			45 %	917.581.296,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	sarana dan prasarana olahraga di kota probolinggo	-	1.401.162.360,00	
2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				6 Unit	917.581.296,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	sarana dan prasarana olahraga di kota probolinggo		1.401.162.360,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	-			45 %	110.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	pelajara dan atlet kota probolinggo	-	300.000.000,00	
2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	110.850.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	pelajara dan atlet kota probolinggo		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	-			45 %	4.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	atlet daerah kota probolinggo	-	6.000.000.000,00	
2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				1.650 Orang	4.500.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	atlet daerah kota probolinggo		6.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA
207	2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang difasilitasi	-			100 %	360.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
	2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	-			45 %	360.000.000,00			-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-	-	2.500.000.000,00	
2 19 04 2.01 0003 Penoembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				34204 Orang	360.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	-		2.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.665.805.070,00							4.505.862.664,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.665.805.070,00							4.505.862.664,00	
208	3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Berkembang	-			41,60 %	1.670.858.166,00					-		3.126.000.000,00	
	3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	-			15 %	20.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	daya tarik destinasi kota probolinggo	-	15.000.000,00	
	3 26 02 2.01 0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Lokasi	20.200.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	daya tarik destinasi kota probolinggo		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	-			15 %	1.529.108.166,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	destinasi pariwisata kota probolinggo	-	2.881.000.000,00	
	3 26 02 2.03 0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	1.178.908.166,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	destinasi pariwisata kota probolinggo		1.989.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.03 0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	185.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	destinasi pariwisata kota probolinggo		690.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.03 0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	65.036.968,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	pariwisata kota probolinggo		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				15 Kegiatan	642.196.968,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	pariwisata kota probolinggo		445.524.543,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
210	3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang difasilitasi	-			4 %	110.900.000,00					-		244.532.835,00	
	3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	-			15 %	110.900.000,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-	-	244.532.835,00	
	3 26 04 2.02 0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual														
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 kegiatan	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		94.532.835,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 04 2.02 0017	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif														
			Jumlah terlaksanakanya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif				1 Promosi	103.400.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
211	3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas SDM	-			29 %	81.800.000,00					-		289.805.286,00	
	3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	-			15 %	81.800.000,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-	-	289.805.286,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3 26 05 2.01 0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				80 Orang	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	61.800.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		89.805.286,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						6.052.406.116,31							9.249.286.032,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.052.406.116,31							9.249.286.032,00	
2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.811.669.024,31							8.290.581.165,00	
212	2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	5.657.190.392,31						-	7.444.326.545,00	
	2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			90 %	14.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	13.896.094,00	
2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	14.650.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		13.896.094,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100%	-			100 %	4.993.339.370,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	6.386.234.206,00	
2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				574 Orang/bulan	4.903.357.778,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		6.376.926.523,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	89.981.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		9.307.683,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	182.458.442,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	228.525.971,00	
	2 23 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	64.731.242,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		52.116.609,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.450.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		11.040.955,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.560.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.945.940,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	76.687.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		113.646.352,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	36.030.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		45.776.115,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	-			100 %	39.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	131.410.356,00	
2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	39.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		131.410.356,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	-			100 %	268.986.768,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	528.681.730,00	
2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96.690.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		145.751.760,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172.296.768,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		382.929.970,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	-			100 %	158.255.812,31			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	155.578.188,00	
2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.617.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		47.206.444,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.09 0002 Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	20.393.700,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		38.384.346,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	49.744.212,31	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		50.048.171,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	52.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		19.939.227,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
213	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	-			3 %	154.478.632,00						-	846.254.620,00	
	2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina	-			100 %	101.503.632,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat	-	550.659.900,00	
2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				16 Perpustakaan	47.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat		191.822.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1650 Eksemplar	54.103.632,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat		358.837.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sasaran pemasyarakatan perpustakaan	-			100 %	52.975.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat	-	295.594.720,00	
2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	52.975.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan 1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Masyarakat		295.594.720,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						240.737.092,00							958.704.867,00		
214	2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standart Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola	-			100 % 14,65 %	240.737.092,00						-	958.704.867,00		
	2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola	-			100 %	118.965.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Lembaga/Instansi	-	705.744.117,00		
	2 24 02 2.01 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis															
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				21000 Berkas	62.665.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Lembaga/Instansi		381.407.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 24 02 2.01 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	56.300.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Lembaga/Instansi		324.336.867,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang dikelola	-			100 %	121.771.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Lembaga/Instansi	-	252.960.750,00		
	2 24 02 2.02 0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis															
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3400 Arsip	121.771.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Lembaga/Instansi		252.960.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						15.440.080.636,00							14.066.164.165,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.277.016.608,00								3.198.275.561,00	
	2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.277.016.608,00								3.198.275.561,00	
215	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-			76,69 %	35.089.592,00						-	35.358.400,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			10 laporan	35.089.592,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-	-	35.358.400,00	
	2 07 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	35.089.592,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	-		35.358.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
216	2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	-			100 %	85.000.000,00						-	93.500.000,00	
	2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-			1 paket	85.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah dan instansi yang Membidangi Ketenagakerjaan	-	93.500.000,00	
	2 07 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	85.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perangkat Daerah dan instansi yang Membidangi Ketenagakerjaan		93.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
217	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas	-			90,3 %	3.633.723.511,00						-	308.314.409,00	
	2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	-			90,3 %	3.633.723.511,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Lainnya	-	308.314.409,00	
	2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				512 Orang	3.416.854.327,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Lainnya		132.748.162,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2 07 03 2.01 0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				12 Lembaga	216.869.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Lainnya		175.566.247,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
218	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di sektor formal dan informal	-			90,3 %	152.752.000,00						-	142.178.795,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di sektor formal dan informal	-			90,3 %	112.752.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kerja Disabilitas	-	124.026.760,00	
	2 07 04 2.01 0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				50 Orang	36.932.650,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kerja Disabilitas		40.625.475,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2 07 04 2.01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				19 Orang	75.819.350,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kerja Disabilitas		83.401.285,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di sektor formal dan informal	-			90,3 %	40.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	-	18.152.035,00	
	2 07 04 2.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				130 Orang	40.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		18.152.035,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
219	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	-			130 Laporan	2.370.451.505,00						-	2.618.923.957,00	
	2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-			80 Laporan	2.269.431.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Lainnya	-	2.496.374.650,00	
	2 07 05 2.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				90 Laporan	2.269.431.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Lainnya		2.496.374.650,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-			12 Perkara	101.020.005,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Lainnya	-	122.549.307,00	
2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				7 Perkara	101.020.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Lainnya		122.549.307,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.163.064.028,00							10.867.888.604,00	
	3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						9.163.064.028,00							10.867.888.604,00	
220	3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-			76,69 %	8.393.752.980,00						-	10.475.624.504,00	
	3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			10 laporan	12.050.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	49.247.000,00	
3 31 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	12.050.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		49.247.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			48 Orang/Bulan	7.614.819.220,00			-	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	9.583.300.368,00	
3 31 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	7.467.744.628,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		9.417.455.106,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	118.109.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		150.352.422,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	28.965.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		15.492.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah	-			12 Dokumen	6.350.000,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo	-	6.985.000,00	
3 31 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.350.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		6.985.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	-			12 Dokumen	17.150.000,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo	-	18.865.000,00	
3 31 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	16.250.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		17.875.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		990.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	-			12 Dokumen	146.439.360,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo	-	160.588.296,00	
3 31 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	39.119.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		43.030.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		2.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		16.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	58.090.360,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		63.899.396,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		1.155.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	25.230.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		27.753.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah	-			1 Laporan	15.000.000,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo	-	16.500.000,00	
	3 31 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		16.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	-			12 Dokumen	427.932.760,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo	-	470.726.036,00	
3 31 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	118.890.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		130.779.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	309.042.760,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		339.947.036,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			12 Dokumen	154.011.640,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo	-	169.412.804,00	
3 31 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	63.311.640,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		69.642.804,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15.700.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		17.270.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo		82.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
221	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri	-			84 %	744.613.121,00						-	357.080.213,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	-			84 %	744.613.121,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	357.080.213,00	
3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5 Dokumen	64.079.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		93.437.484,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				9 Dokumen	662.012.159,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		192.563.511,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	16.871.778,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		23.614.218,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1.650.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		47.465.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
222	3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase izin usaha industri yang diterbitkan	-			83 %	11.628.097,00						-	13.776.101,00	
	3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-			60 Dokumen	11.628.097,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	13.776.101,00	
3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				11 Dokumen	11.628.097,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		13.776.101,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
223	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	13.069.830,00						-	21.407.786,00	
	3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	13.069.830,00			-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	21.407.786,00	
3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				4 Dokumen	13.069.830,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas 4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		21.407.786,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		BAGIAN PEMERINTAHAN						364.283.584,00							408.017.402,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						364.283.584,00							408.017.402,00	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH						364.283.584,00							408.017.402,00	
224	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-			100 Persen	364.283.584,00						-	408.017.402,00	
	4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tata Kelola Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan	-			100 Persen	305.043.584,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	342.467.402,00	
4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan																
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	180.863.584,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		166.537.402,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		80.080.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				2 0	69.680.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		85.850.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 02 2.01 0005Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				5 Perangkat Daerah	4.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		10.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	-			100 Persen	59.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	65.550.000,00	
4 01 02 2.04 0001Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				50 Dokumen	54.740.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		55.550.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 02 2.04 0003Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	4.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		10.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						12.498.346.998,00							10.345.504.036,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						12.498.346.998,00							10.345.504.036,00	
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH						12.498.346.998,00							10.345.504.036,00	
225	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-			100 Persen	12.498.346.998,00						-	10.345.504.036,00	
	4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang kesejahteraan rakyat	-			100 Persen	12.498.346.998,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	10.345.504.036,00	
4 01 02 2.02 0001Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	2.442.100.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		1.822.402.200,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	9.770.233.454,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		8.244.823.836,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahragra, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	286.013.544,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		278.278.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		BAGIAN HUKUM						927.108.792,00							760.550.000,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						927.108.792,00								760.550.000,00	
4 01		SEKRETARIAT DAERAH						927.108.792,00								760.550.000,00	
226 4 01 02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	-			100 Persen	927.108.792,00						-	760.550.000,00		
4 01 02 2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Layanan Pemerintahan Bidang Hukum Yang difasilitasi sesuai ketentuan	-			100 Persen	927.108.792,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	760.550.000,00		
4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				350 Dokumen	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		50.050.000,00	BAGIAN HUKUM	
4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum																	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				74 Kasus	600.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		555.500.000,00	BAGIAN HUKUM	
4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	227.108.792,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		155.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						631.481.168,00							866.350.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						631.481.168,00							866.350.000,00	
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH						631.481.168,00							866.350.000,00	
227	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	-			100 Persen	631.481.168,00						-	866.350.000,00	
	4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terfasilitasi	-			100 Persen	239.044.784,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	468.900.000,00	
	4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				7 Dokumen	34.420.384,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		35.350.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	144.024.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		249.470.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	6.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		8.080.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4 01 03 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				3 Dokumen	54.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		176.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Laporan Pembangunan yang terselesaikan tepat waktu	-			100 Persen	42.211.384,00			-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	47.000.000,00	
4 01 03 2.02 0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		3.030.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	39.211.384,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		43.970.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang difasilitasi	-			100 Persen	350.225.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	350.450.000,00	
4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	350.225.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		350.450.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN UMUM								27.477.045.611,00							29.104.575.127,00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								27.477.045.611,00							29.104.575.127,00	
SEKRETARIAT DAERAH								27.477.045.611,00							29.104.575.127,00	
228	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 Persen	27.477.045.611,00						-	29.104.575.127,00	
4	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	-			100 Persen	25.363.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah	-	19.363.500,00	
4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	14.713.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		11.113.500,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10.650.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		8.250.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	19.576.535.511,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah	-	21.180.062.877,00	
4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/bulan	19.224.275.511,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		20.843.637.877,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	344.010.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		329.000.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	8.250.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		7.425.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	36.582.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah	-	42.000.000,00	
4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barano Milik Daerah pada SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	36.582.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		42.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	257.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Aparatur Sekretariat Daerah	-	264.150.000,00	
4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	43.950.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Aparatur Sekretariat Daerah		26.600.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	8.250.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Aparatur Sekretariat Daerah		6.300.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Aparatur Sekretariat Daerah		31.250.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				137 Orang	180.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Aparatur Sekretariat Daerah		200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 Persen	1.410.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah	-	1.454.215.150,00	
4 01 01 2.06 0002 Penediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	400.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		378.000.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				10 Paket	200.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		195.452.250,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		234.700.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	610.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		646.062.900,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 Persen	80.605.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	126.000.000,00	
4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		21.000.000,00	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	60.605.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		105.000.000,00	BAGIAN UMUM

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		660.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan kerumahtangaan pimpinan yang terpenuhi	-			100 Persen	5.261.217.658,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah	-	4.167.266.522,00	
4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	3.444.249.658,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		2.840.399.982,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1.748.478.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		1.275.315.241,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	68.490.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Sekretariat Daerah		51.551.299,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang difasilitasi	-			100 Persen	3.025.691.980,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	1.716.684.660,00	
4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	1.925.691.980,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		1.199.778.270,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisonegaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		516.906.390,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						423.495.212,00							461.468.450,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						423.495.212,00							461.468.450,00	
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH						423.495.212,00							461.468.450,00	
231	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematangan UKPJ	-			88,95 Nilai	423.495.212,00						-	461.468.450,00	
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang dapat diselesaikan sesuai ketentuan	-			100 Persen	423.495.212,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah	-	461.468.450,00	
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				40 Dokumen	108.823.292,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		68.680.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Dokumen	225.307.920,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		292.788.450,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	89.364.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pemerintah Daerah		100.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		SEKRETARIAT DPRD						53.347.473.189,00							59.773.828.252,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						53.347.473.189,00							59.773.828.252,00	
	4 02	SEKRETARIAT DPRD						53.347.473.189,00							59.773.828.252,00	
232	4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	26.170.586.707,00						-	29.844.525.718,00	
	4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	175.125.000,00			-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	247.000.000,00	
	4 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50.125.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		97.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	125.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.033.045.187,00			-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	4.916.658.624,00	
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.827.134.803,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		4.686.658.624,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	205.910.384,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	
	4 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	278.994.000,00			-	-	-	-	512.000.000,00	
	4 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				148 Paket	1.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		137.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	277.494.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.024.776.800,00			-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	1.458.291.000,00	
4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	349.926.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	102.632.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.672.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		32.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	40.580.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	74.172.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		80.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	210.734.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		461.266.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	156.060.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			-	240.000.000,00			-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	1.200.000.000,00	
4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	40.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	200.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			-	2.158.669.328,00			-	-	-	-	2.121.448.000,00	
4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	386.360.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	647.121.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		821.448.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.075.188.328,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		825.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.196.457.300,00			-	-	-	-	1.590.000.000,00	
4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	137.211.900,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnnya				19 Unit	247.904.700,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	25.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	256.970.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		365.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	247.402.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				163 Unit	281.968.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	15.855.279.092,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	17.535.528.094,00	
4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	15.390.279.092,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		17.070.528.094,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				90 Paket	375.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	90.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	158.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	213.600.000,00	
4 02 01 2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				30 Dokumen	1.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 0002 Fasilitas Fraksi DPRD																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD				84 Laporan	54.920.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	101.520.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		155.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
233	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	-			100 %	27.176.886.482,00					-		29.929.302.534,00	
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi	-			100 %	1.766.604.229,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya	-	1.656.088.166,00	
4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	210.375.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		210.317.250,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	996.817.384,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		1.046.420.916,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	81.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		81.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	293.350.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		293.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD																
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	24.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																
			0				30 0	161.061.345,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			100 %	534.511.600,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya	-	593.601.997,00	
4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	135.483.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		181.785.917,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	48.735.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		42.825.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	295.320.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		197.037.080,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	49.123.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		98.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	5.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya		73.554.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah	-			100 Persen	331.210.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	DPRD Kota Probolinggo	-	525.221.760,00	
4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	5.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	DPRD Kota Probolinggo		81.138.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	5.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	DPRD Kota Probolinggo		81.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	5.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	DPRD Kota Probolinggo		81.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	5.850.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	DPRD Kota Probolinggo		54.714.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	270.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	DPRD Kota Probolinggo		118.055.760,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan																
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	37.810.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	DPRD Kota Probolinggo		109.314.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	3.675.023.200,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	633.041.111,00	
4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				180 Dokumen	3.153.723.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.741.111,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
234	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	7.569.366.822,00						-	8.454.555.687,00	
	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			87 %	61.989.788,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	120.000.000,00	
	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50.414.788,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	11.575.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	-			100 %	6.488.945.448,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	7.050.955.687,00	
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	6.238.185.387,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		6.750.955.687,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	250.760.061,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	-			100 %	3.140.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	10.600.000,00	
	5 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barano Milik Daerah pada SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	3.140.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		10.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Ketentaaun	-			100 %	13.130.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	20.000.000,00	
5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				43 Orang	13.130.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD sesuai Ketentuan	-			100 %	291.748.386,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	548.000.000,00	
5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	68.723.700,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.828.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.536.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.620.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				100 Laporan	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	64.974.086,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	125.065.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	22.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	25.000.000,00	
5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	22.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			100 %	507.306.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	400.000.000,00	
5 01 01 2.08 0002 Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	141.860.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	365.446.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	-			100 %	180.606.800,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	-	280.000.000,00	
5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	31.464.300,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	57.592.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	26.550.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
235	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	-			96 %	1.006.646.000,00						-	1.181.000.000,00	
	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			87 %	876.514.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	986.000.000,00	
5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	92.942.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		154.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	783.572.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		832.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	-			100 %	14.905.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	25.000.000,00	
5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	14.905.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persebtase Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi yang Disusun Secara Tepat Waktu	-			100 %	101.641.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	150.000.000,00	
5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	101.641.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Pembangunan Daerah yang Dikelola dalam SIPD	-			100 %	13.585.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	20.000.000,00	
5 01 02 2.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	13.585.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
236	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			100 %	1.078.397.232,00						-	1.360.000.000,00	
	5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyusun dokumen berkualitas baik	-			100 %	407.365.515,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	500.000.000,00	
5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pemerintahan				28 Laporan	206.531.715,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia				10 Laporan	200.833.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase PD Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik	-			100 %	383.376.964,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	480.000.000,00	
5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	130.582.964,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang SDA				4 Laporan	252.794.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang menyusun dokumen berkualitas baik	-			100 %	287.654.753,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	380.000.000,00	
5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	140.080.253,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Kewilayahan				6 Laporan	147.574.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						665.663.594,00							750.000.000,00	
237	5 05 03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	-			100 %	665.663.594,00						-	750.000.000,00	
	5 05 03 2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembanganm, Pengkajian dan Penerapan	-			100 %	458.427.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	-	500.000.000,00	
5 05 03 2.01 0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				2 Laporan	458.427.368,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 05 03 2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase Inovasi yang Diterapkan di Daerah	-			100 %	207.236.226,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	-	250.000.000,00	
5 05 03 2.02 0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual																
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				2 Laporan	207.236.226,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						36.202.659.503,00							82.362.486.512,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						36.202.659.503,00							82.362.486.512,00	
	5 02	KEUANGAN						36.202.659.503,00							82.362.486.512,00	
238	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	25.942.885.934,00						-	61.018.839.946,00	
	5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	-			100 %	19.769.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	65.052.300,00	
5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	9.464.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		34.652.300,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	10.305.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		30.400.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	-			100 %	22.945.825.582,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	55.522.698.646,00	
5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				186 Orang/bulan	22,711,033,018.60	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		55.289.383.346,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4132 Dokumen	558.885.376,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		193.502.100,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				33 Laporan	39.422.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		39.813.200,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	-		100 %	94.846.776,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	25.075.000,00	
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				32 Laporan	94.846.776,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		25.075.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeeah sesuai ketentuan	-		100 %	655.334.776,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	495.670.000,00	
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				157 Dokumen	601.168.776,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		431.190.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	54.166.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		64.480.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terpenuhi	-			100 %	826.915.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	1.514.465.000,00	
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				74 Paket	223.005.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		210.450.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	32.240.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		109.810.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				16 Laporan	54.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		657.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	193.039.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		217.980.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	324.130.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		319.225.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	183.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		74.040.000,00	
5 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	183.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		74.040.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	-			100 %	503.770.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	2.499.865.200,00	
5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	473.030.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		332.180.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	30.740.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		2.167.685.200,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	713.424.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	821.973.800,00	
5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	110.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		253.248.800,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, PaiaK dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	149.975.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		149.975.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				193 Unit	296.574.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		190.500.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	156.875.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		228.250.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
239	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	-			100 %	6.359.347.595,00					-		16.863.116.353,00	
	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah sesuai ketentuan	-			100 %	1.653.141.676,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	2.120.000.000,00	
	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	734.228.884,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		630.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	105.024.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	269.991.200,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	543.897.092,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		820.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	-			100 %	964.945.141,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	1.486.083.600,00	
5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				730 Dokumen	130.490.597,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		175.130.900,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				200 Dokumen	166.102.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		121.279.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				18 Dokumen	17.286.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	32.236.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		107.299.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				336 Dokumen	10.980.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		70.507.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				112 Orang	607.849.144,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		781.867.700,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan	-			100 %	741.260.778,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	1.300.000.000,00	
5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				468 Dokumen	66.941.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				36 Laporan	171.052.484,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		460.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				42 Dokumen	104.189.800,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	7.552.752,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	100.342.100,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				211 Orang	291.182.050,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	-			100 %	3.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	11.957.032.753,00	
5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				15 Laporan	3.750.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		11.957.032.753,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
240	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang valid dan akuntabel	-			100 %	615.382.256,00						-	1.505.000.000,00	
	5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel	-			100 %	615.382.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	1.505.000.000,00	
5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga																
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	14.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	14.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				20 Laporan	76.726.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		240.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				10 Laporan	397.272.372,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		810.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 03 2.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	63.952.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		190.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	49.431.884,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		140.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
241	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	-			3.75 &	3.285.043.718,00					-		2.975.530.213,00	
	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	-			3.75 %	3.285.043.718,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	2.975.530.213,00	
	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Dokumen	5.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				50 Unit	136.660.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		98.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				100 Laporan	1.093.857.367,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		682.500.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3000 Laporan	110.900.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		160.882.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2500 Obyek Pajak	350.541.268,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		710.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah																
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				80000 Dokumen	99.800.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		365.697.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				40000 Layanan	427.400.009,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		62.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				80000 Dokumen	606.357.890,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		679.951.213,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				14 Dokumen	217.700.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		215.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Paiaak Daerah dan Retribusi Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Laporan	1.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		1.500.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 04 2.01 0015Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	233.397.184,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		0,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA						7.465.388.196,69							15.000.901.619,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.465.388.196,69							15.000.901.619,00	
5	03	KEPEGAWAIAN						7.020.044.946,69							13.058.725.892,00	
242	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	6.518.564.869,69						-	10.010.655.441,00	
	5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			100 %	61.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM	-	436.267.291,00	
5 03 01 2.01 0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		186.348.051,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.01 0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	54.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		249.919.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	5.742.959.025,69			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM	-	7.467.133.045,00	
5 03 01 2.02 0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	5.661.104.025,69	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		6.932.083.951,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	80.155.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		381.844.922,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	1.700.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		153.204.172,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	307.417.990,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM	-	845.344.630,00	
5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	55.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		181.341.956,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	25.805.740,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		80.831.165,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	34.342.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		88.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1095 Dokumen	5.040.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		11.952.478,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		39.690.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	105.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		330.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	67.229.750,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		112.579.031,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			100 %	309.909.584,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM	-	550.797.975,00	
5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		292.879.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	109.909.584,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		257.918.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	97.278.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM	-	711.112.500,00	
5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.472.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		165.375.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	25.755.770,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		192.937.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	26.050.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		132.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN BKPSDM		220.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
243	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 3 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya 4 Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik 1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	-			70 % 82 % 91.67 % 92 %	501.480.077,00						-	3.048.070.451,00	
	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terselesaikan sesuai ketentuan	-			95 %	294.696.289,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo	-	1.390.185.603,00	
5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	11.832.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		73.105.710,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 0003Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1040 Dokumen	264.034.289,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		946.927.149,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 0006Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																
			0				121 0	7.960.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		200.241.392,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 0010Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	10.870.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		169.911.352,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan	-			90 %	95.564.788,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo	-	588.132.878,00	
5 03 02 2.02 0001Pengelolaan Mutasi ASN																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1600 Dokumen	78.314.788,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		398.668.148,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 0002Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	17.250.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		189.464.730,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan	-			100 %	70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo	-	462.879.480,00	
	5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	70.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		462.879.480,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase capaian kinerja aparatur dengan rating hasil kerja dan perilaku minimal "sesuai ekspektasi" 2. Persentase Aparatur Sipil Negara yang dievaluasi kinerjanya sesuai dengan ketentuan	-			90 % 90 %	41.219.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo	-	606.872.490,00	
	5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				14875 Dokumen	24.644.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		102.801.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				270 Orang	6.320.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		168.000.210,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	10.255.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		336.070.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						445.343.250,00							1.942.175.727,00	
244	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2. Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 4. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis 1. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional 3. Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-			100 % 70 % 80 % 88 %	445.343.250,00						-	1.942.175.727,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Nasional	13 Daerah	14	15	16	17
	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan	-			100 %	115.598.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo	-	329.637.139,00	
5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				785 Orang	115.598.250,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		329.637.139,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai dengan ketentuan	-			100 %	309.745.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo	-	1.579.959.780,00	
5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	309.745.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		1.579.959.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5 04 02 2.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo	-	32.578.808,00	
5 04 02 2.03 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri																
			Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				2 Orang	20.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN Pemerintah Kota Probolinggo		32.578.808,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						9.494.266.778,56							15.030.726.833,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						9.494.266.778,56							15.030.726.833,00	
	6 01	INSPEKTORAT DAERAH						9.494.266.778,56							15.030.726.833,00	
245	6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80s%	-			98 %	8.251.536.709,86						-	10.413.646.800,00	
	6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	-			100 %	34.072.138,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	150.000.000,00	
6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		75.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	19.072.138,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	7.139.156.271,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	8.300.000.000,00	
6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	7.057.718.674,56	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		8.000.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				460 Dokumen	81.437.597,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	363.646.800,00			-	-	-	-	363.646.800,00	
6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	363.646.800,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		363.646.800,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	226.195.429,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	550.000.000,00	
6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.866.379,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.701.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		20.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	19.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		30.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	136.628.050,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	19.389.591,30			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	500.000.000,00	
6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	19.389.591,30	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			100 %	327.800.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	250.000.000,00	
6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	148.290.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		250.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	179.510.480,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	141.276.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	300.000.000,00	
6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	34.550.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.726.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
246	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	-			100 % 85 % 92 %	708.541.918,70						-	3.017.080.033,00	
	6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal A Persentase Perangkat Daerah yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material Persentase tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan	-			85 % 95 % 92 %	581.448.258,70			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	2.667.080.033,00	
6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				38 Laporan	75.444.287,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		615.765.856,00	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				70 Laporan	165.330.700,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		800.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja																
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	122.990.472,20	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		350.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan																
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				42 Laporan	128.362.199,50	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		551.314.177,00	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal																
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	67.373.100,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT
6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	21.947.500,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	-			100 %	127.093.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	350.000.000,00	
6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	13.097.500,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				4 Laporan	113.996.160,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		300.000.000,00	INSPEKTORAT
247	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	-			100 %	534.188.150,00					-		1.600.000.000,00	
	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	-			100 % 67 %	534.188.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	1.600.000.000,00	
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				28 perangkat daerah	225.179.250,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				7 Kegiatan	251.433.900,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6 01 03 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				28 perangkat daerah	57.575.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN WONOASIH						14.364.955.686,00							16.354.011.901,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.364.955.686,00							16.354.011.901,00	
	7 01	KECAMATAN						14.364.955.686,00							16.354.011.901,00	
248	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	9.985.304.542,00					-		11.536.395.643,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			100 %	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	33.000.000,00	
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	30.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		33.000.000,00	KECAMATAN WONOASIH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	9.261.713.443,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	10.740.445.434,00	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	8.941.041.075,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		10.387.705.829,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	320.672.368,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		352.739.605,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	2.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	2.475.000,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.250.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		2.475.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	9.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	10.010.000,00	
	7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	9.100.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		10.010.000,00	KECAMATAN WONOASIH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	-			100 %	196.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	216.260.000,00		
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6 Paket	86.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		94.600.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6 Paket	13.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		14.300.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12 Paket	6.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		6.600.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						400 Dokumen	3.600.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		3.960.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	8.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		8.800.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	80.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		88.000.000,00	KECAMATAN WONOASIH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	42.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	46.200.000,00	
7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	42.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		46.200.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	-			100 %	259.476.099,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	285.423.709,00	
7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.780.500,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		133.958.550,00	KECAMATAN WONOASIH
7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	137.695.599,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		151.465.159,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	184.165.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih	-	202.581.500,00	
7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		38.500.000,00	KECAMATAN WONOASIH
7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paiaik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	69.165.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		76.081.500,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	46.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		50.600.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	34.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Wonoasih		37.400.000,00	KECAMATAN WONOASIH
249	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Wonoasih)	-			94,19 indeks	2.761.111.184,00						-	3.037.222.302,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keluruhan Kategori berkembang	-			100 %	2.718.455.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	RT/RW dan Masyarakat Kecamatan Wonoasih	-	2.990.301.151,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	2.718.455.592,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	RT/RW dan Masyarakat Kecamatan Wonoasih		2.990.301.151,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	-			100 %	42.655.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Wonoasih	-	46.921.151,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	42.655.592,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Wonoasih		46.921.151,00	KECAMATAN WONOASIH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
250	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			96 %	825.955.184,00						-	908.550.702,00	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Difasilitasi	-			100 %	195.855.184,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	LKK dan Masyarakat Kecamatan Wonoasih	-	380.440.702,00	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	195.855.184,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	LKK dan Masyarakat Kecamatan Wonoasih		380.440.702,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	-			100 %	630.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Wonoasih	-	528.110.000,00	
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5 Keluarga	275.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Wonoasih		137.500.000,00	KECAMATAN WONOASIH
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				250 Keluarga	355.100.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Wonoasih		390.610.000,00	KECAMATAN WONOASIH
251	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Wonoasih)	-			25 %	94.484.776,00						-	103.933.254,00	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	-			100 %	94.484.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Wonoasih	-	103.933.254,00	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	94.484.776,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Wonoasih		103.933.254,00	KECAMATAN WONOASIH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
252	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan (Kecamatan Wonoasih)	-			82 %	698.100.000,00						-	767.910.000,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-			100 %	698.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Wonoasih	-	767.910.000,00	
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	698.100.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Wonoasih		767.910.000,00	KECAMATAN WONOASIH
		KECAMATAN KADEMANGAN						14.374.163.810,00							19.685.688.527,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.374.163.810,00							19.685.688.527,00	
	7 01	KECAMATAN						14.374.163.810,00							19.685.688.527,00	
253	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.103.984.666,00						-	14.010.939.327,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	19.800.000,00	
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.115.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		9.900.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.115.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		9.900.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.376.331.103,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	12.616.376.081,00	
	7 01 01 2.02 0001	Penvedliaan Gaii dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	9.103.806.691,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		12.498.292.513,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	272.524.412,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		118.083.568,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	8.800.000,00	
7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.080.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		8.800.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	12.100.000,00	
7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	6.800.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		12.100.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	162.437.779,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	281.664.350,00	
7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	67.417.779,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		82.500.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan				3 Paket	6.360.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		60.500.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.560.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		5.124.350,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	14.600.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		4.400.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	72.500.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		129.140.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	132.000.000,00	
7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	12.500.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		132.000.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	311.030.784,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	350.858.122,00	
7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	124.400.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		151.782.981,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	186.630.784,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		199.075.141,00	KECAMATAN KADEMANGAN
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	229.575.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	589.340.774,00	
7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.070.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		43.740.774,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	70.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		71.500.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	27.375.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		67.100.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	97.130.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		407.000.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
254	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			97.27 Nilai	2.659.492.368,00					-	-	3.258.448.985,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			12 Dokumen	2.545.565.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	3.044.031.540,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	2.545.565.592,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		3.044.031.540,00	KECAMATAN KADEMANGAN
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			12 Laporan	113.926.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	214.417.445,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	113.926.776,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		214.417.445,00	KECAMATAN KADEMANGAN
255	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	862.215.592,00					-	-	1.811.300.215,00	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	214.090.592,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	1.668.300.215,00	
7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				21 Lembaga Kemasyarakatan	214.090.592,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		1.668.300.215,00	KECAMATAN KADEMANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	648.125.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	143.000.000,00	
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				3 Keluarga	226.125.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		82.500.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				97 Keluarga	422.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		60.500.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
256	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.500.000,00					-	-	24.200.000,00	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	24.200.000,00	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.500.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
257	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	746.971.184,00					-	-	580.800.000,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	746.971.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	580.800.000,00	
	7 01 05 2.01 0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				116 Orang	61.471.184,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		96.800.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	685.500.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		484.000.000,00	KECAMATAN KADEMANGAN
		KECAMATAN KEDOPOK						13.501.986.549,00							16.222.424.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.501.986.549,00							16.222.424.170,00	
	7 01	KECAMATAN						13.501.986.549,00							16.222.424.170,00	
258	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	9.391.761.715,00					-		12.073.560.400,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			100 %	6.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	27.500.000,00	
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	6.075.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		27.500.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	8.784.668.047,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Kedopok	-	10.917.500.000,00	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	8.419.389.210,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Kedopok		10.780.000.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	365.278.837,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Kedopok		137.500.000,00	KECAMATAN KEDOPOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Sesuai Ketentuan	-			100 %	450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	22.000.000,00	
7 01 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	450.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		22.000.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	7.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Kedopok	-	13.860.000,00	
7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				104 Orang	7.625.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai Kecamatan Kedopok		13.860.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	147.820.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	256.740.000,00	
7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	58.570.100,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		84.700.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.300.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		14.520.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		11.220.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		49.500.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	66.350.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		96.800.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	-			100 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	194.700.000,00	
7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		194.700.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	-			100 %	315.716.268,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	379.720.000,00	
7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	119.049.900,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kedopok		158.070.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	196.666.368,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Pegawai dan Msyarakat Kecamatan Kedopok		221.650.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.407.300,00			-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	261.540.400,00	
7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.279.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		149.930.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	57.308.300,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		84.110.400,00	KECAMATAN KEDOPOK
7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	20.820.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		27.500.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
259	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			85 Skor	2.434.694.776,00						-	1.725.163.770,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori berkembang	-			100 %	2.360.039.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	1.596.108.470,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2.360.039.592,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok		1.596.108.470,00	KECAMATAN KEDOPOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	-			100 %	74.655.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	129.055.300,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	74.655.184,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok		129.055.300,00	KECAMATAN KEDOPOK
260	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	927.014.466,00						-	1.855.000.000,00	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	469.545.976,00			-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	1.320.000.000,00	
	7 01 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	469.545.976,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		1.320.000.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	-			100 %	457.468.490,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	535.000.000,00	
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				3 Keluarga	79.500.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Kedopok		85.000.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				200 Keluarga	377.968.490,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Kedopok		450.000.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
261	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			26 %	45.615.592,00						-	24.200.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	-			100 %	45.615.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	24.200.000,00	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	45.615.592,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok		24.200.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
262	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-			84 %	702.900.000,00						-	544.500.000,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti	-			100 %	702.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok	-	544.500.000,00	
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	702.900.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Kedopok		544.500.000,00	KECAMATAN KEDOPOK
		KELURAHAN SUMBER TAMAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
	7 01	KECAMATAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
263	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Wonoasih)	-			94,19 indeks	159.111.184,00						-	175.022.302,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	-			100 %	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	RT/RW Kelurahan Sumber Taman	-	9.240.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.400.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Sumber Taman	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	RT/RW Kelurahan Sumber Taman		9.240.000,00	KELURAHAN SUMBER TAMAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	-			100 %	150.711.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sumber Taman	-	165.782.302,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	150.711.184,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Sumber Taman	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sumber Taman		165.782.302,00	KELURAHAN SUMBER TAMAN
264	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			96 %	230.800.000,00						-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-			91 %	230.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Taman	-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	30.800.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Sumber Taman	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Taman		33.880.000,00	KELURAHAN SUMBER TAMAN
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	51.750.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Sumber Taman	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Taman		56.925.000,00	KELURAHAN SUMBER TAMAN
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	148.250.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Sumber Taman	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Taman		163.075.000,00	KELURAHAN SUMBER TAMAN
		KELURAHAN KEDUNG ASEM						412.566.776,00							453.823.454,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						412.566.776,00							453.823.454,00	
	7 01	KECAMATAN						412.566.776,00							453.823.454,00	
265	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Wonoasih)	-			94,19 indeks	181.766.776,00						-	199.943.454,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	-			100 %	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	RT/RW dan Masyarakat Kecamatan Wonoasih	-	9.240.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			0				12 Dokumen 0	8.400.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedung Asem	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	RT/RW dan Masyarakat Kecamatan Wonoasih		9.240.000,00	KELURAHAN KEDUNG ASEM
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	-			100 %	173.366.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedung Asem	-	190.703.454,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	173.366.776,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedung Asem	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedung Asem		190.703.454,00	KELURAHAN KEDUNG ASEM
266	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			96 %	230.800.000,00						-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-			91 %	230.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedung Asem	-	253.880.000,00	
7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	30.800.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedung Asem	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedung Asem		33.880.000,00	KELURAHAN KEDUNG ASEM
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	115.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedung Asem	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedung Asem		126.500.000,00	KELURAHAN KEDUNG ASEM
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedung Asem	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedung Asem		93.500.000,00	KELURAHAN KEDUNG ASEM
		KELURAHAN KEDUNG GALENG						389.911.184,00							428.902.302,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
	7 01	KECAMATAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
267	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Wonoasih)	-			94,19 indeks	159.111.184,00						-	175.022.302,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	-			100 %	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng	-	9.240.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.400.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedunggaleng	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng		9.240.000,00	KELURAHAN KEDUNG GALENG
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	-			100 %	150.711.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng	-	165.782.302,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	150.711.184,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedunggaleng	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng		165.782.302,00	KELURAHAN KEDUNG GALENG
268	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			96 %	230.800.000,00						-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-			91 %	230.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng	-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	30.800.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedunggaleng	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng		33.880.000,00	KELURAHAN KEDUNG GALENG
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	74.500.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedunggaleng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng		81.950.000,00	KELURAHAN KEDUNG GALENG
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	125.500.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Kedunggaleng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedunggaleng		138.050.000,00	KELURAHAN KEDUNG GALENG
KELURAHAN PAKISTAJI								389.911.184,00							428.902.302,00	
UNSUR KEWILAYAHAN								389.911.184,00							428.902.302,00	
KECAMATAN								389.911.184,00							428.902.302,00	
269	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Wonoasih)	-			94,19 indeks	159.111.184,00						-	175.022.302,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	-			100 %	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Pakistaji	-	9.240.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.400.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Pakistaji	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Pakistaji		9.240.000,00	KELURAHAN PAKISTAJI
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	-			100 %	150.711.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Pakistaji	-	165.782.302,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	150.711.184,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Pakistaji	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Pakistaji		165.782.302,00	KELURAHAN PAKISTAJI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			96 %	230.800.000,00						-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-			91 %	230.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Pakistaji	-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	30.800.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Pakistaji	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Pakistaji		33.880.000,00	KELURAHAN PAKISTAJI
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	27.600.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Pakistaji	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Pakistaji		30.360.000,00	KELURAHAN PAKISTAJI
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	172.400.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Pakistaji	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Pakistaji		189.640.000,00	KELURAHAN PAKISTAJI
		KELURAHAN JREBENG KIDUL						389.911.184,00							428.902.302,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
	7 01	KECAMATAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
271	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Wonoasih)	-			94,19 indeks	159.111.184,00						-	175.022.302,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	-			100 %	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul	-	9.240.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.400.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul		9.240.000,00	KELURAHAN JREBENG KIDUL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	150.711.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul	-	165.782.302,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	150.711.184,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul		165.782.302,00	KELURAHAN JREBENG KIDUL
272	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			96 %	230.800.000,00						-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-			91 %	230.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul	-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	30.800.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul		33.880.000,00	KELURAHAN JREBENG KIDUL
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	45.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul		49.500.000,00	KELURAHAN JREBENG KIDUL
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Jrebeng Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul		170.500.000,00	KELURAHAN JREBENG KIDUL
		KELURAHAN WONOASIH						389.911.184,00							428.902.302,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
	7 01	KECAMATAN						389.911.184,00							428.902.302,00	
273	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Wonoasih)	-			94,19 indeks	159.111.184,00						-	175.022.302,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	-			100 %	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wonoasih	-	9.240.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.400.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wonoasih		9.240.000,00	KELURAHAN WONOASIH
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	-			100 %	150.711.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wonoasih	-	165.782.302,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	150.711.184,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wonoasih		165.782.302,00	KELURAHAN WONOASIH
274	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			96 %	230.800.000,00						-	253.880.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-			91 %	230.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wonoasih	-	253.880.000,00	
7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	30.800.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wonoasih		33.880.000,00	KELURAHAN WONOASIH
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	45.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wonoasih		49.500.000,00	KELURAHAN WONOASIH
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	Kota Probolinggo, Wonoasih, Wonoasih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wonoasih		170.500.000,00	KELURAHAN WONOASIH
		KELURAHAN KADEMANGAN						340.255.592,00							884.069.825,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						340.255.592,00							884.069.825,00	
	7 01	KECAMATAN						340.255.592,00							884.069.825,00	
275	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			97.27 Nilai	117.955.592,00						-	390.636.287,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			12 Dokumen	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	24.200.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	KELURAHAN KADEMANGAN
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			12 Dokumen	114.955.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	366.436.287,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	114.955.592,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		366.436.287,00	KELURAHAN KADEMANGAN
276	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	222.300.000,00						-	493.433.538,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	222.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	493.433.538,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	22.300.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		6.050.000,00	KELURAHAN KADEMANGAN
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	42.860.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		216.525.038,00	KELURAHAN KADEMANGAN
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	157.140.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Kademangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		270.858.500,00	KELURAHAN KADEMANGAN
KELURAHAN POHSANGIT KIDUL								408.414.368,00							773.670.161,00	
UNSUR KEWILAYAHAN								408.414.368,00							773.670.161,00	
KECAMATAN								408.414.368,00							773.670.161,00	
277	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	186.114.368,00					-		415.352.576,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	24.200.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pohsangit Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	KELURAHAN POHSANGIT KIDUL
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	183.114.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	391.152.576,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	183.114.368,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pohsangit Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		391.152.576,00	KELURAHAN POHSANGIT KIDUL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
278	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	222.300.000,00						-	358.317.585,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	222.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	358.317.585,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	22.300.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pohsangit Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		6.050.000,00	KELURAHAN POHSANGIT KIDUL
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	67.150.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pohsangit Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		213.178.085,00	KELURAHAN POHSANGIT KIDUL
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	132.850.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pohsangit Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		139.089.500,00	KELURAHAN POHSANGIT KIDUL
		KELURAHAN KETAPANG						408.990.368,00							842.261.082,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						408.990.368,00							842.261.082,00	
7 01		KECAMATAN						408.990.368,00							842.261.082,00	
279	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	186.690.368,00						-	387.118.465,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	24.200.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	KELURAHAN KETAPANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	183.690.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	362.918.465,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	183.690.368,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	362.918.465,00	KELURAHAN KETAPANG
280	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	222.300.000,00					-	-	455.142.617,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	222.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	455.142.617,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	22.300.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	6.050.000,00	KELURAHAN KETAPANG
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	90.650.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	214.836.617,00	KELURAHAN KETAPANG
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat	di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	109.350.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Ketapang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	234.256.000,00	KELURAHAN KETAPANG
		KELURAHAN TRIWUNG KIDUL						386.526.776,00							1.039.883.278,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						386.526.776,00							1.039.883.278,00	
	7 01	KECAMATAN						386.526.776,00							1.039.883.278,00	
281	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			97.27 Nilai	164.226.776,00					-	-	438.799.320,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			12 Dokumen	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	KELURAHAN TRIWUNG KIDUL
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	161.226.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	414.599.320,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	161.226.776,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		414.599.320,00	KELURAHAN TRIWUNG KIDUL
282	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	222.300.000,00						-	601.083.958,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	222.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	601.083.958,00	
7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	22.300.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		6.050.000,00	KELURAHAN TRIWUNG KIDUL
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	56.916.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		214.367.958,00	KELURAHAN TRIWUNG KIDUL
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	143.084.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Kidul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		380.666.000,00	KELURAHAN TRIWUNG KIDUL
		KELURAHAN PILANG						385.950.776,00							1.046.880.330,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						385.950.776,00							1.046.880.330,00	
	7 01	KECAMATAN						385.950.776,00							1.046.880.330,00	
283	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			97,27 Nilai	163.650.776,00						-	456.341.113,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			12 Dokumen	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	24.200.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pilang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	KELURAHAN PILANG
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	160.650.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	432.141.113,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	160.650.776,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pilang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		432.141.113,00	KELURAHAN PILANG
284	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	222.300.000,00						-	590.539.217,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	222.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	590.539.217,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENUA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	22.300.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pilang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		6.050.000,00	KELURAHAN PILANG
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	74.500.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pilang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		207.483.467,00	KELURAHAN PILANG
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	125.500.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Pilang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		377.005.750,00	KELURAHAN PILANG
		KELURAHAN TRIWUNG LOR						385.950.776,00							946.380.949,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						385.950.776,00							946.380.949,00	
	7 01	KECAMATAN						385.950.776,00							946.380.949,00	
285	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	163.650.776,00					-	-	373.168.110,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	24.200.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		24.200.000,00	KELURAHAN TRIWUNG LOR
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	160.650.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-	-	348.968.110,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	160.650.776,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	-		348.968.110,00	KELURAHAN TRIWUNG LOR
286	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	222.300.000,00					-	-	573.212.839,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	222.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	-	573.212.839,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	11.150.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		6.050.000,00	KELURAHAN TRIWUNG LOR
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	75.440.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		212.850.639,00	KELURAHAN TRIWUNG LOR
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	135.710.000,00	Kota Probolinggo, Kademangan, Triwung Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-		354.312.200,00	KELURAHAN TRIWUNG LOR
		KECAMATAN MAYANGAN						13.074.923.892,00							13.930.534.161,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.074.923.892,00							13.930.534.161,00	
	7 01	KECAMATAN						13.074.923.892,00							13.930.534.161,00	
287	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 %	7.967.069.524,00						-	10.490.235.087,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			100 %	5.271.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	50.000.000,00	
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.271.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		50.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	7.333.832.846,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	9.494.235.087,00	
	7 01 01 2.02 0001	Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	6.984.250.070,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		9.344.235.087,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	349.582.776,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		150.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	6.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	15.000.000,00	
7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.870.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		15.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	13.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	50.000.000,00	
7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	13.350.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		50.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	132.771.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	219.000.000,00	
7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	40.032.500,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		77.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	4.991.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		10.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.498.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		5.500.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		16.500.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	74.250.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		110.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	110.000.000,00	
7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	6.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		110.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			100 %	280.791.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	274.000.000,00	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117.120.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		132.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	163.671.184,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		142.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 %	188.182.994,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan	-	278.000.000,00	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.044.500,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		50.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	69.242.250,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		90.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	32.896.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		50.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.244,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Kecamatan Mayangan		88.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
288	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Mayangan)	-			87 indeks	3.729.980.184,00						-	2.174.834.374,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 %	3.635.839.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan	-	2.094.248.374,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	3.635.839.592,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan		2.094.248.374,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			100 %	94.140.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan	-	80.586.000,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	94.140.592,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan		80.586.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
289	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (Kecamatan Mayangan)	-			89 %	728.060.592,00						-	803.464.700,00	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			100 %	147.980.592,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mayangan	-	578.464.700,00	
7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	147.980.592,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mayangan		578.464.700,00	KECAMATAN MAYANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase TP. PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	-			100 %	580.080.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mayangan	-	225.000.000,00	
	7 01 03 2.06 0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5 Keluarga	188.880.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mayangan		165.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
	7 01 03 2.06 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	391.200.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kecamatan Mayangan		60.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
290	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Mayangan)	-			25 %	53.413.592,00						-	22.000.000,00	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	-			100 %	53.413.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan	-	22.000.000,00	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	53.413.592,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan		22.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN
291	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan (Kecamatan Mayangan)	-			82 %	596.400.000,00						-	440.000.000,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	-			100 %	596.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan	-	440.000.000,00	
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	596.400.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kecamatan Mayangan		440.000.000,00	KECAMATAN MAYANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN JATI						395.095.184,00							482.864.200,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						395.095.184,00							482.864.200,00	
	7 01	KECAMATAN						395.095.184,00							482.864.200,00	
292	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Mayangan)	-			87 indeks	173.295.184,00						-	157.864.200,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 %	19.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakatatj Kelurahan Jati	-	10.000.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	19.250.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakatatj Kelurahan Jati		10.000.000,00	KELURAHAN JATI
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			100 %	154.045.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakatatj Kelurahan Jati	-	147.864.200,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	154.045.184,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakatatj Kelurahan Jati		147.864.200,00	KELURAHAN JATI
293	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (Kecamatan Mayangan)	-			89 %	221.800.000,00						-	325.000.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			100 %	221.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakatatj Kelurahan Jati	-	325.000.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakatatj Kelurahan Jati		5.000.000,00	KELURAHAN JATI
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	66.750.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jati		150.000.000,00	KELURAHAN JATI
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	147.250.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Jati	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jati		170.000.000,00	KELURAHAN JATI
		KELURAHAN MANGUNHARJO						472.835.960,00							539.722.650,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						472.835.960,00							539.722.650,00	
	7 01	KECAMATAN						472.835.960,00							539.722.650,00	
294	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Mayangan)	-			87 indeks	241.035.960,00						-	214.722.650,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 %	14.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo	-	10.000.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo		10.000.000,00	KELURAHAN MANGUNHARJO
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			100 %	226.635.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo	-	204.722.650,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	226.635.960,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo		204.722.650,00	KELURAHAN MANGUNHARJO
295	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (Kecamatan Mayangan)	-			85 %	231.800.000,00						-	325.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Nasional	13 Daerah	14	15	16	17
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			100 %	231.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo	-	325.000.000,00	
7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	14.925.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo		5.000.000,00	KELURAHAN MANGUNHARJO
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	53.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo		150.000.000,00	KELURAHAN MANGUNHARJO
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	163.875.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mangunharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Mangunharjo		170.000.000,00	KELURAHAN MANGUNHARJO
		KELURAHAN WIROBORANG						377.711.184,00							455.318.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						377.711.184,00							455.318.000,00	
	7 01	KECAMATAN						377.711.184,00							455.318.000,00	
296	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Mayangan)	-			87 indeks	153.111.184,00						-	130.318.000,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 %	13.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wiroborang	-	10.000.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	13.300.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wiroborang		10.000.000,00	KELURAHAN WIROBORANG
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			100 %	139.811.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wiroborang	-	120.318.000,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	139.811.184,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Wiroborang		120.318.000,00	KELURAHAN WIROBORANG
297	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (Kecamatan Mayangan)	-			89 %	224.600.000,00						-	325.000.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			100 %	224.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wiroborang	-	325.000.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wiroborang		5.000.000,00	KELURAHAN WIROBORANG
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	104.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wiroborang		150.000.000,00	KELURAHAN WIROBORANG
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	112.800.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Wiroborang	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Wiroborang		170.000.000,00	KELURAHAN WIROBORANG
		KELURAHAN SUKABUMI							406.134.776,00						499.662.300,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							406.134.776,00						499.662.300,00	
	7 01	KECAMATAN							406.134.776,00						499.662.300,00	
298	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Mayangan)	-			87 indeks	181.534.776,00						-	174.662.300,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 %	9.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sukabumi	-	10.000.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	9.575.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sukabumi		10.000.000,00	KELURAHAN SUKABUMI
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			100 %	171.959.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sukabumi	-	164.662.300,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	171.959.776,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sukabumi		164.662.300,00	KELURAHAN SUKABUMI
299	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (Kecamatan Mayangan)	-			89 %	224.600.000,00						-	325.000.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			100 %	224.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sukabumi	-	325.000.000,00	
7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	8.100.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sukabumi		5.000.000,00	KELURAHAN SUKABUMI
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	100.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sukabumi		150.000.000,00	KELURAHAN SUKABUMI
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	116.500.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Sukabumi	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sukabumi		170.000.000,00	KELURAHAN SUKABUMI
		KELURAHAN MAYANGAN						450.564.368,00						485.791.850,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN						450.564.368,00						485.791.850,00		
7 01		KECAMATAN						450.564.368,00						485.791.850,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	171.000.000,00	Kota Probolinggo, Mayangan, Mayangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Mayangan		170.000.000,00	KELURAHAN MAYANGAN
		KELURAHAN SUMBER WETAN						485.821.552,00							774.895.220,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						485.821.552,00							774.895.220,00	
	7 01	KECAMATAN						485.821.552,00							774.895.220,00	
302	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			85 Skor	255.621.552,00						-	527.395.220,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori berkembang	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan	-	33.000.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Sumber Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan		33.000.000,00	KELURAHAN SUMBER WETAN
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	-			100 %	245.621.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan	-	494.395.220,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	245.621.552,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Sumber Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan		494.395.220,00	KELURAHAN SUMBER WETAN
303	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			84 %	230.200.000,00						-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan	-			80 %	230.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan	-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	24.600.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Sumber Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan		27.500.000,00	KELURAHAN SUMBER WETAN
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	98.750.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Sumber Wetan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan		55.000.000,00	KELURAHAN SUMBER WETAN
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	106.850.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Sumber Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Sumber Wetan		165.000.000,00	KELURAHAN SUMBER WETAN
KELURAHAN KEDOPOK								416.894.776,00							705.499.234,00	
UNSUR KEWILAYAHAN								416.894.776,00							705.499.234,00	
KECAMATAN								416.894.776,00							705.499.234,00	
304	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			85 Skor	186.694.776,00						-	457.999.234,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori berkembang	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedopok	-	33.000.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedopok		33.000.000,00	KELURAHAN KEDOPOK
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	-			100 %	176.694.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedopok	-	424.999.234,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	176.694.776,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kedopok		424.999.234,00	KELURAHAN KEDOPOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
305	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			84 %	230.200.000,00						-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan	-			80 %	230.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedopok	-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedopok		27.500.000,00	KELURAHAN KEDOPOK
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	78.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedopok		55.000.000,00	KELURAHAN KEDOPOK
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	133.200.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kedopok	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kedopok		165.000.000,00	KELURAHAN KEDOPOK
		KELURAHAN JREBENG LOR						403.279.184,00							673.304.280,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						403.279.184,00							673.304.280,00	
	7 01	KECAMATAN						403.279.184,00							673.304.280,00	
306	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			85 Skor	163.079.184,00						-	425.804.280,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori berkembang	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor	-	33.000.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor		33.000.000,00	KELURAHAN JREBENG LOR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	-			100 %	153.079.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor	-	392.804.280,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	153.079.184,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor		392.804.280,00	KELURAHAN JREBENG LOR
307	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			84 %	240.200.000,00						-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	240.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor	-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor		27.500.000,00	KELURAHAN JREBENG LOR
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	45.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor		55.000.000,00	KELURAHAN JREBENG LOR
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	176.200.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Lor		165.000.000,00	KELURAHAN JREBENG LOR
		KELURAHAN JREBENG WETAN						403.855.184,00							667.999.640,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						403.855.184,00							667.999.640,00	
	7 01	KECAMATAN						403.855.184,00							667.999.640,00	
308	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			85 Skor	163.655.184,00						-	420.499.640,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Nasional	13 Daerah	14	15	16	17
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan	-	33.000.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan		33.000.000,00	KELURAHAN JREBENG WETAN
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	-			100 %	153.655.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan	-	387.499.640,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	153.655.184,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan		387.499.640,00	KELURAHAN JREBENG WETAN
309	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			84 %	240.200.000,00					-		247.500.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan	-			80 %	240.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan	-	247.500.000,00	
7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan		27.500.000,00	KELURAHAN JREBENG WETAN
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	74.750.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Wetan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan		55.000.000,00	KELURAHAN JREBENG WETAN
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	146.450.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Wetan		165.000.000,00	KELURAHAN JREBENG WETAN
		KELURAHAN KARENG LOR						392.511.184,00							679.764.283,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						392.511.184,00							679.764.283,00	
	7 01	KECAMATAN						392.511.184,00							679.764.283,00	
310	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			85 %	162.311.184,00						-	432.264.283,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori berkembang	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor	-	33.000.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kareng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor		33.000.000,00	KELURAHAN KARENG LOR
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	-			100 %	152.311.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor	-	399.264.283,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	152.311.184,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kareng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor		399.264.283,00	KELURAHAN KARENG LOR
311	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			84 %	230.200.000,00						-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan	-			80 %	230.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor	-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	21.800.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kareng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor		27.500.000,00	KELURAHAN KARENG LOR
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	91.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kareng Lor	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor		55.000.000,00	KELURAHAN KARENG LOR
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	117.400.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Kareng Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Kareng Lor		165.000.000,00	KELURAHAN KARENG LOR
KELURAHAN JREBENG KULON								463.549.960,00							756.668.000,00	
UNSUR KEWILAYAHAN								463.549.960,00							756.668.000,00	
KECAMATAN								463.549.960,00							756.668.000,00	
312	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			85 %	236.149.960,00						-	509.168.000,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori berkembang	-			100 %	12.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon	-	33.000.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	12.800.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon		33.000.000,00	KELURAHAN JREBENG KULON
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai standart pelayanan	-			100 %	223.349.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon	-	476.168.000,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	223.349.960,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon		476.168.000,00	KELURAHAN JREBENG KULON

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
313	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	-			84 %	227.400.000,00						-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan	-			80 %	227.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon	-	247.500.000,00	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	24.600.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon		27.500.000,00	KELURAHAN JREBENG KULON
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	188.000.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Kulon	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon		55.000.000,00	KELURAHAN JREBENG KULON
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	14.800.000,00	Kota Probolinggo, Kedopok, Jrebeng Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kulon		165.000.000,00	KELURAHAN JREBENG KULON
		KECAMATAN KANIGARAN						16.063.771.833,00							14.743.232.189,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						16.063.771.833,00							14.743.232.189,00	
	7 01	KECAMATAN						16.063.771.833,00							14.743.232.189,00	
314	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	-			100 persen	10.496.559.081,00						-	11.185.832.189,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			100 persen	13.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan masyarakat	-	52.500.000,00	
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	13.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Semua kel/Desa Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan masyarakat		52.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 persen	9.674.619.101,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan masyarakat	-	10.050.782.189,00	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	9.423.859.509,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan masyarakat		9.945.782.189,00	KECAMATAN KANIGARAN
	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	250.759.592,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan masyarakat		105.000.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	-			100 persen	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat	-	10.500.000,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	5.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		10.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 persen	9.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat	-	31.500.000,00	
	7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				73 Orang	9.400.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		31.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 persen	156.340.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat	-	221.550.000,00	
7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	55.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		78.750.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		31.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	4.440.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		10.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	16.900.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		21.000.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		79.800.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	122.053.000,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat	-	157.500.000,00	
7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	122.053.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		157.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	-			100 persen	309.176.384,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat	-	362.250.000,00	
7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	161.930.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		178.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	147.246.384,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		183.750.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-			100 persen	206.970.596,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat	-	299.250.000,00	
7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28.810.500,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		31.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	75.160.096,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		84.000.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	23.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		26.250.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		157.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
315	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			84.25 skor	3.876.750.368,00						-	1.964.550.000,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 persen	3.816.171.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	1.833.300.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	3.816.171.184,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		1.833.300.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			90 persen	60.579.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	131.250.000,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	60.579.184,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		131.250.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
316	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	-			88,25 persen	917.690.792,00						-	1.081.500.000,00	
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	PersentaseLembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			100 persen	191.740.792,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	-	912.450.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Lembaga Kemasyarakatan	191.740.792,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		912.450.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
	7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase TP, PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	-			90 persen	725.950.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	-	169.050.000,00	
7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				70 Keluarga	423.700.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		11.550.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				6 Keluarga	302.250.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		157.500.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
317	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			36 persen	35.671.592,00						-	23.100.000,00	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	-			81 persen	35.671.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	masyarakat	-	23.100.000,00	
7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	35.671.592,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	masyarakat		23.100.000,00	KECAMATAN KANIGARAN
318	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-			81 persen	737.100.000,00						-	488.250.000,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-			81 persen	737.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	masyarakat	-	488.250.000,00	
7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	60.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN KANIGARAN
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	168.800.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kanigaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Masyarakat		125.000.000,00	KELURAHAN KANIGARAN
		KELURAHAN SUKOHARJO						366.621.592,00							325.887.116,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						366.621.592,00							325.887.116,00	
	7 01	KECAMATAN						366.621.592,00							325.887.116,00	
321	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			84,25 skor	126.621.592,00						-	100.887.116,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat	-	5.250.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Sukoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	ASN dan Masyarakat		5.250.000,00	KELURAHAN SUKOHARJO
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			90 persen	116.621.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	95.637.116,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	116.621.592,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Sukoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		95.637.116,00	KELURAHAN SUKOHARJO
322	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	-			88,25 persen	240.000.000,00						-	225.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			90 persen	240.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	masyarakat	-	225.000.000,00	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	27.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Sukoharjo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN SUKOHARJO
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	213.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	masyarakat		125.000.000,00	KELURAHAN SUKOHARJO
		KELURAHAN TISNONEGARAN						338.750.000,00							303.750.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						338.750.000,00							303.750.000,00	
	7 01	KECAMATAN						338.750.000,00							303.750.000,00	
323	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			84,25 skor	104.350.000,00					-		78.750.000,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	5.250.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		5.250.000,00	KELURAHAN TISNONEGARAN
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			90 persen	94.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	73.500.000,00	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	94.350.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		73.500.000,00	KELURAHAN TISNONEGARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
324	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	-			88,25 persen	234.400.000,00						-	225.000.000,00		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			90 persen	234.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	-	225.000.000,00		
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	56.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN TISNONEGARAN	
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	178.400.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Tisnonegaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		125.000.000,00	KELURAHAN TISNONEGARAN	
		KELURAHAN KEBONSARI WETAN						404.492.776,00							371.975.749,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						404.492.776,00								371.975.749,00	
	7 01	KECAMATAN						404.492.776,00								371.975.749,00	
325	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			84,25 skor	172.892.776,00						-	146.975.749,00		
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 persn	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	5.250.000,00		
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		5.250.000,00	KELURAHAN KEBONSARI WETAN	
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			90 persen	162.892.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	141.725.749,00		
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	162.892.776,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		141.725.749,00	KELURAHAN KEBONSARI WETAN
326	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	-			88,25 persen	231.600.000,00						-	225.000.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			90 persen	231.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	-	225.000.000,00	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	51.750.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Wetan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN KEBONSARI WETAN
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	179.850.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		125.000.000,00	KELURAHAN KEBONSARI WETAN
		KELURAHAN KEBONSARI KULON						374.579.184,00							358.614.533,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						374.579.184,00							358.614.533,00	
	7 01	KECAMATAN						374.579.184,00							358.614.533,00	
327	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			84,25 skor	145.779.184,00						-	133.614.533,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	5.250.000,00	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		5.250.000,00	KELURAHAN KEBONSARI KULON

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Nasional	13 Daerah	14	15	16	17
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			90 persen	135.779.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	128.364.533,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	135.779.184,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		128.364.533,00	KELURAHAN KEBONSARI KULON
328	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			84,25 skor	228.800.000,00						-	225.000.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			90 persen	228.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	-	225.000.000,00	
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	66.570.625,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Kulon	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN KEBONSARI KULON
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	162.229.375,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Kebonsari Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		125.000.000,00	KELURAHAN KEBONSARI KULON
								323.221.592,00							325.887.116,00	
7 UNSUR KEWILAYAHAN								323.221.592,00							325.887.116,00	
7 01 KECAMATAN								323.221.592,00							325.887.116,00	
329	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	-			84,25 skor	98.621.592,00						-	100.887.116,00	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	-			100 persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat	-	5.250.000,00	
7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	10.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Curahgrinting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Masyarakat		5.250.000,00	KELURAHAN CURAH GRINTING			
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	-			90 persen	88.621.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	masyarakat	-	95.637.116,00				
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	88.621.592,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Curahgrinting	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif 6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	masyarakat		95.637.116,00	KELURAHAN CURAH GRINTING			
330	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	-			88,25 persen	224.600.000,00						-	225.000.000,00				
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-			90 persen	224.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	-	225.000.000,00				
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	104.000.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Curahgrinting	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		100.000.000,00	KELURAHAN CURAH GRINTING			
7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	120.600.000,00	Kota Probolinggo, Kanigaran, Curahgrinting	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat		125.000.000,00	KELURAHAN CURAH GRINTING			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
								8.252.619.532,00									17.076.063.190,00		
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								8.252.619.532,00									17.076.063.190,00		
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								8.252.619.532,00									17.076.063.190,00		
331	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			95 %	4.122.297.261,00						-	7.219.447.690,00				
	8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	-			95 %	25.913.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Kota Probolinggo	-	29.883.210,00				
8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranokat Daerah																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7.528.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Kota Probolinggo		11.988.462,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	18.385.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Kota Probolinggo		17.894.747,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	-			90 %	3.460.390.435,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Monitoring, Pelaporan, dan Tata Kelola Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo	-	5.134.744.480,00	
8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.292.075.659,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Monitoring, Pelaporan, dan Tata Kelola Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo		4.887.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	75.648.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Monitoring, Pelaporan, dan Tata Kelola Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo		100.044.480,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	92.666.776,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Monitoring, Pelaporan, dan Tata Kelola Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo		147.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	-			100 %	3.600.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-	-	16.100.000,00	
8 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.600.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		16.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	-			100 %	7.500.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	-	192.050.000,00	
8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	5.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan		48.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	2.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan		143.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	-			95 %	107.716.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Penyediaan sarana prasarana administrasi kantor Kota Probolinggo	-	250.470.000,00	
8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Penyediaan sarana prasarana administrasi kantor Kota Probolinggo		29.095.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	3.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Penyediaan sarana prasarana administrasi kantor Kota Probolinggo		14.950.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Penyediaan sarana prasarana administrasi kantor Kota Probolinggo		16.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	7.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Penyediaan sarana prasarana administrasi kantor Kota Probolinggo		17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	75.716.400,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Penyediaan sarana prasarana administrasi kantor Kota Probolinggo		172.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	-			100 %	15.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	-	-	373.750.000,00	
8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	15.000.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	-		373.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Nasional	13 Daerah	14	15	16	17
	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	-			100 %	352.598.776,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Jasa komunikasi, administrasi kantor Kota Probolinggo	-	690.000.000,00	
	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	108.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Jasa komunikasi, administrasi kantor Kota Probolinggo		258.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	244.198.776,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Jasa komunikasi, administrasi kantor Kota Probolinggo		431.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	-			100 %	149.578.250,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Barang milik daerah SKPD Kota Probolinggo	-	532.450.000,00	
	8 01 01 2.09 0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				12 Unit	55.571.500,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		Barang milik daerah SKPD Kota Probolinggo		155.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	48.498.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Barang milik daerah SKPD Kota Probolinggo		86.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	20.500.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Barang milik daerah SKPD Kota Probolinggo		66.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.008.750,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Barang milik daerah SKPD Kota Probolinggo		224.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
332	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	-			85 %	738.003.592,00						-	2.152.800.000,00	
	8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan	-			85 %	738.003.592,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelajar, Masyarakat, PD Terkait, Anggota Korsik, Anggota Pasdikbraka Kota Probolinggo	-	2.152.800.000,00	
	8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunqal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				125 Orang	270.540.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelajar, Masyarakat, PD Terkait, Anggota Kursik, Anggota Paskibraka Kota Probolinggo		1.063.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	1.200.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 2. Peningkatan ketahanan sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pelajar, Masyarakat, PD Terkait, Anggota Kursik, Anggota Paskibraka Kota Probolinggo		25.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka																
			Jumlah Paskibraka				74 Orang	466.263.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Pelajar, Masyarakat, PD Terkait, Anggota Kursik, Anggota Paskibraka Kota Probolinggo		1.063.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
333	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	-			92 %	1.222.133.490,00						-	2.167.750.000,00	
	8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik sesuai ketentuan	-			92 %	1.222.133.490,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Tokoh masyarakat,Tenaga Pengajar,pemilih pemula,Partai Politik,Masyarakat kota Probolinggo jumlah 2023 Kota Probolinggo	-	2.167.750.000,00	
8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				800 Orang	992.083.490,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Tokoh masyarakat,Tenaga Pengajar,pemilih pemula,Partai Politik,Masyarakat kota Probolinggo jumlah 2023 Kota Probolinggo		1.667.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 Laporan	230.050.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Tokoh masyarakat,Tenaga Pengajar,pemilih pemula,Partai Politik,Masyarakat kota Probolinggo jumlah 2023 Kota Probolinggo		500.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
334	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	-			91 %	395.485.592,00						-	1.857.250.000,00	
	8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan	-			91 %	395.485.592,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Tokoh masyarakat,Pengurus Ormas,Masyarakat kota probolinggo	-	1.857.250.000,00	
8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				180 Orang	212.630.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Tokoh masyarakat,Pengurus Ormas,Masyarakat kota probolinggo		1.265.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				8 Laporan	182.855.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Tokoh masyarakat,Pengurus Ormas,Masyarakat kota probolinggo		592.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
335	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	-			88 %	592.020.592,00						-	1.059.725.000,00	
	8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya sesuai ketentuan	-			88 %	592.020.592,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat, Pelajar, FKUB, PD Terkait Kota Probolinggo	-	1.059.725.000,00	
8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				75 Orang	590.820.592,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat, Pelajar, FKUB, PD Terkait Kota Probolinggo		1.051.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Laporan	1.200.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Masyarakat, Pelajar, FKUB, PD Terkait Kota Probolinggo		8.625.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
336	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	1.182.679.005,00						-	2.619.090.500,00	
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan	-			100 %	1.182.679.005,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	OPD, Masyarakat, Pemuda/Pelajar, Timdu PKS, Forkopimda, Tokoh Agama/Tokoh MAsyarakat Kota Probolinggo	-	2.619.090.500,00	
8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				650 Orang	679.069.005,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	OPD, Masyarakat, Pemuda/Pelajar, Timdu PKS, Forkopimda, Tokoh Agama/Tokoh MAsyarakat Kota Probolinggo		1.052.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	23.210.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	OPD, Masyarakat, Pemuda/Pelajar, Timdu PKS, Forkopimda, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kota Probolinggo		48.875.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	480.400.000,00	Kota Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif 3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	OPD, Masyarakat, Pemuda/Pelajar, Timdu PKS, Forkopimda, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kota Probolinggo		1.517.965.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H							967.749.460.033,64							1.079.063.776.378,63		



BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja Pemerintah Daerah sebagai gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran penting guna menilai sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan telah atau sedang dicapai sehingga Pemerintah Daerah dapat mengetahui efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Tiga aspek dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bab ini adalah: (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 sebagai merupakan gambaran atau ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selama periode lima tahun yang merefleksikan prioritas pembangunan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah, (2) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota atau provinsi, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan, (3) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ukuran minimal jenis dan kualitas layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara, tanpa memandang kondisi ekonomi atau geografis.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025–2029. Oleh karena itu RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 merupakan *milestone* 1 dalam rangkaian periodisasi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029. Dalam konteks tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 memiliki fungsi tidak hanya sebagai gambaran efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah namun juga menjadi *feedback* dalam perencanaan di tahun-tahun berikutnya sebagaimana periodisasi dalam RPJMD 2025-2029.



6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKU sebagai ultimate outcome penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam pengukuran keberhasilan pembangunan, penentuan arah dan fokus kebijakan, sebagai dasar evaluasi dan pengendalian, penyelarasan perencanaan, alokasi sumber daya.

IKU dalam bab ini merupakan indikator tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, visi *“Mewujudkan Kota Probolinggo Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, Dan Adaptif”* diterjemahkan dalam 5 misi yaitu:

1. Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan;
2. Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan;
3. Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital;
4. Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan; dan
5. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan.

Visi dan Misi sebagai outcome yang diharapkan pada akhir periode RPJMD perlu dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang measurable dan tangible. Measurable mengandung makna bahwa tujuan dan sasaran RPJMD harus dipastikan dapat diukur. Tangible dapat diterjemahkan bahwa tujuan dan sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Guna memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPJMD sebagai operasionalisasi Visi dan Misi dapat diukur (measureable) maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya dalam penjenjangan kinerja, IKU Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 tersebut akan menjadi perjanjian kinerja Wali Kota yang wajib dipertanggungjawabkan setiap tahunnya dalam laporan kinerja tahunan.

Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 dengan 1 tujuan yaitu: Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan dengan sasaran:
 - a. Pendidikan Berkualitas yang Merata; dan
 - b. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan.
2. Misi 2 dengan 1 tujuan yaitu: Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan, dengan:
 - a. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender;
 - b. Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing;

- c. Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan; dan
 - d. Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat.
3. Misi 3 dengan 2 tujuan yaitu:
- a. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral dengan sasaran:
 - Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah; dan
 - Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal.
 - b. Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif dengan sasaran:
 - Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
4. Misi 4 dengan 1 tujuan yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik dengan sasaran:
- a. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis; dan
 - b. Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi;
5. Misi 5 dengan 2 tujuan yaitu:
- a. Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dengan sasaran:
 - Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah
 - b. Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan dengan sasaran:
 - Resiliensi terhadap Bencana; dan
 - Pelestarian Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 tersebut diakomodasi dalam 37 (tiga puluh tujuh) indikator yang ditetapkan sebagai IKU dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029. Secara terperinci, pada Tabel 6.1 telah disajikan data persandingan capaian kinerja tahun 2024, target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2025 dan 2026.

Tabel 6. 1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,79	78,17	78,17
2	Indeks Pendidikan	Indeks	0,71	0,720	0,720
3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,836	0,839	0,839
4	Persentase Penduduk Miskin	%	6,18	5,38	5,38
5	Rasio Gini	Indeks	0,344	0,322	0,322
6	Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Indeks	54,76	72	72



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
7	Persentase Penurunan PMKS / PPKS / PAS	%	8,792	9,596	9,596
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,26	97,66	97,66
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,44	3,67	3,67
10	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	%	32,03	35,16	35,16
11	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	70,00	71,02	71,02
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,47	5,47
13	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	61,61	82,20	82,20
14	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	14,63	15,10	15,10
15	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	26,20	26,53	26,53
16	Rasio Kewirausahaan	%	8,28	8,62	8,62
17	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	%	4,67	4,69	4,69
18	NTP (Nilai Tukar Petani)	Indeks	111,33	111,50	111,50
19	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indeks	97,18	97,22	97,22
20	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,62	79,98	79,98
21	ICOR	Nilai	3,61	3,084	3,084
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	17,05	16,84	16,84
23	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	%	-0,21	1,15	1,15
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,66	86,54	86,54
25	Nilai SAKIP	Nilai	71,91	73	73
26	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
27	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3
28	Indeks Sistem Merit	Indeks	Indeks : 0,74* Nilai : 303*	Indeks : 0,76 Nilai : 312	Indeks : 0,76 Nilai : 312
29	Indeks SPBE	Indeks	4,04	4,15	4,15
30	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15	4,65	4,65
31	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	66,72	71,05	71,05
32	Indeks Infrastruktur	Indeks	74,66	77,64	77,64
33	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	82,52	83,52	83,52



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
34	Rasio Konektivitas	Nilai	84,61	84,61	84,61
35	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	342.851,836	392.531,068	392.531,068
36	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	poin	58,17	66,59	66,59
37	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,01	100,29	100,29

Keterangan : (*) angka sementara, menunggu rilis data
Sumber: Bapperida, 2025

6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci dapat didefinisikan sebagai indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD merupakan intermediate outcome atau hasil yang hendak dicapai sebagai bagian dari proses menuju hasil akhir (*ultimate outcome*).

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 memuat 186 indikator yang meliputi:

- a. 37 indikator untuk Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum.
- b. 149 Indikator Kinerja Kunci sebagai gambaran penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan.

Tabel 6. 2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
I	Aspek Geografi dan Demografi				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,62	79,98	79,98
2	Rasio Konektivitas	Rasio	84,61	84,61	84,61
3	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	342.851,836	392.531,068	392.531,068
4	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	poin	58,17	66,59	66,59
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,01	100,29	100,29
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,47	5,47
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	61,61	82,20	82,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,44	3,67	3,67
4	Rasio Gini	Indeks	0,344	0,322	0,322
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,79	78,17	78,17
6	Indeks Pendidikan	Indeks	0,71	0,72	0,72
7	Indeks Kesehatan	Indeks	0.836	0.839	0.839
8	Persentase Penduduk Miskin	%	6,18	5,38	5,38

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
9	Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Indeks	54,76	72	72
10	Persentase Penurunan PMKS / PPKS / PAS	%	8,792	9,596	9,596
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,26	97,66	97,66
12	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	%	32,03	35,16	35,16
13	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	70,00	71,02	71,02
III	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	14,63	15,10	15,10
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	26,20	26,53	26,53
3	Rasio Kewirausahaan	%	8,28	8,62	8,62
4	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	%	4,67	4,69	4,69
5	NTP (Nilai Tukar Petani)	Indeks	111,33	111,5	111,5
6	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indeks	97,18	97,22	97,22
7	Indeks Infrastruktur	Indeks	74,66	77,64	77,64
8	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	82,52	83,52	83,52
9	ICOR	Indeks	3,61	3,084	3,084
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	17,05	16,84	16,84
11	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	%	-0,21	1,15	1,15
12	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,79	5,81	5,81
IV	Aspek Pelayanan Umum				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,66	86,54	86,54
2	Nilai SAKIP	Skor	71,91	84,69	84,69
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
4	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3
5	Indeks Sistem Merit	Indeks	Indeks : 0,74* Nilai : 303*	Indeks : 0,76 Nilai : 312	Indeks : 0,76 Nilai : 312
6	Indeks SPBE	Indeks	4,04	4,15	4,15
7	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15	4,65	4,65
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	66,72	71,05	71,05
INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A	Pendidikan				
1	Rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun	Tahun	9,72	10,22	10,22
2	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,64	16,39	16,39
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	14,28	14,28
4	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	66,09	71,09	71,09
5	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	76,90	79,10	79,10
6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	55,61	61,41	61,41



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
7	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	65,87	68,87	68,87
8	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	%	75,76	79,90	79,90
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	%	98,48	98,67	98,67
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	%	32,72	49,14	49,14
11	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	%	71,17	78,69	78,69
12	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	85,72	88,9	88,9
13	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	59,00	64,00	64,00
14	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57,89	62,69	62,69
15	Iklim Keamanan SD	Nilai	74,73	76,53	76,53
16	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,36	73,36	73,36
17	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	74,56	76,56	76,56
18	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70,50	72,50	72,50
B Kesehatan					
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,31	74,68	74,68
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	23,1	17,5	17,5
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Rasio	250,70	102,13	102,13
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kesehatan PPKB	Indeks	88,21	88,34	88,34
5	Penemuan Kasus TBC	%	110	90	90
6	Angka Persentase Pasien HIV Baru yang memulai pengobatan ARV	%	61	95	95
7	Angka Persentase Penemuan Kasus Malaria diobati sesuai standar	%	100	100	100
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,54	100	100
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,1	18	18
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	29,85	35,35	35,35
3	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	97,52	97,92	97,92
4	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	90,98	91,48	91,48
5	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata ruang	%	100	100	100
6	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	23,5	33,5	33,5
7	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum Berkualitas Baik	%	88,09	89,34	89,34
D Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	99,5	99,525	99,525
2	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh	%	6,38	32,09	32,09
E Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
1	Persentase Penurunan Kasus Gangguan Ketentraman, dan ketertiban Umum	%	2	2	2
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	70	71,02	71,02
3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	%	100	100	100
F	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan)				
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,42	0,57	0,57
G	Sosial				
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	90,05	90,30	90,30
H	Tenaga Kerja				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	53,09	61,47	61,47
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,55	71,05	71,05
3	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	%	89,28	90,3	90,3
4	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%	70	74	74
5	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	60,70	64,45	64,45
J	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,257	0,239	0,239
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,7	72,10	72,10
K	Pangan				
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Skor	4,47	4,07	4,07
2	Skor PPH Konsumsi	Skor	84,69	85,00	85,00
3	Skor PPH Ketersediaan	Skor	59,22	59,25	59,25
L	Pertanahan				
1	Persentase penyelesaian sengketa pertanahan	%	100	100	100
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	41	59,75	59,75
M	Lingkungan Hidup				
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	82,54	83,72	83,72
2	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	%	54,35	58,70	58,70
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	41,43	64,11	64,11
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,74	82,12	82,12
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	26,66	42,12	42,12
6	Persentase RTH Publik	%	5,66	20	20
M	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Persentase penduduk memiliki KTP-el	%	99,01	100	100
2	Persentase penduduk memiliki akta	%	99,03	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
	kelahiran usia 0-18 tahun				
3	Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	%	100	100	100
4	Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	86,68	88	88
6	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Ketentuan	%	95,64	96,25	96,25
N Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa					
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	%	95	100	100
2	Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	%	95	100	100
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Mayangan	%	95	100	100
4	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Mayangan yang aktif	%	80	85	85
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Kanigaran	%	95	100	100
6	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Kanigaran yang aktif	%	88	88,50	88,50
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Kademangan	%	95	100	100
8	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Kademangan yang aktif	%	95	95,30	95,30
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Kedopok	%	80	100	100
10	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Kedopok yang aktif	%	85	85,30	85,30
11	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Wonoasih	%	85,71	85,91	85,91
12	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Wonoasih yang aktif	%	86	86,50	86,50
O Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Angka Kelahiran Total (Fertility Rate)	Skor	2,02	1,98	1,98
2	Unmeet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) (%)	%	7,2	7,15	7,15
3	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Rasio	17,6	17,5	17,5
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,72	66,1	66,1
5	Angka pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	69	70	70

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPd
			2024	2026	2026
P	Perhubungan				
1	Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	%	96,76	97,25	97,25
2	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan	%	67	69	69
3	Persentase Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam kota	%	47,57	49,39	49,39
4	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Berkondisi Baik	%	72	84	84
Q	Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	%	83,45	86	86
2	Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	%	60,98	75,61	75,61
R	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Persentase Koperasi Sehat	%	59	61	61
2	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri	%	2	2,35	2,35
S	Penanaman Modal				
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai	0,466 T	0,548 T	0,548 T
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPMPSTP	Indeks	83,39	84,3	84,3
T	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	25,27	25,35	25,35
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	97,33	97,40	97,40
U	Statistika				
1	Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas	%	69	71	71
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,87	2,98	2,98
V	Persandian				
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	531	580	580
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	50	63,18	63,18
W	Kebudayaan				
1	Persentase kebudayaan yang dikelola	%	100	100	100
X	Perpustakaan				
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	72,13	73,65	73,65
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	79,02	79,04	79,04
Y	Kearsipan				
1	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	90,55	90,57	90,57
2	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	84,92	86	86
Z	Kelautan dan Perikanan				
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,02	1,26	1,26



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
2	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	%	6,1	6,5	6,5
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	94,93	96,79	96,79
AA Pariwisata					
1	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,78	0,80	0,80
2	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	%	8,05	9	9
3	Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif	%	0,5	1	1
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	4,01	4,02	4,02
AB Pertanian					
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	%	0,22	0,240	0,240
2	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian	%	1,37	1,5	1,5
3	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis	%	63,87	64	64
AC Perdagangan					
1	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan	%	10	14	14
2	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	0,15	0,19	0,19
AD Perindustrian					
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	0,85	0,90	0,90
AE Unsur Staff					
1	Nilai LPPD	Nilai	3,442	3,446	3,446
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	83,9	84,10	84,10
3	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	96,94	97,05	97,05
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat Daerah	Indeks	85,35	86,10	86,10
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	51,71	51,73	51,73
6	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	85,07	86,10	86,10
AF Perencanaan					
1	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik	%	100	100	100
2	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	23,36	25	25
AG Keuangan					
1	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Nilai	76,14	76,90	76,90
2	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-1,67	5,66	5,66
3	Persentase PD dengan Realisasi Keuangan di atas 90%	%	96,43	96,8	96,8
4	Persentase PD dengan LKPD yang sesuai ketentuan	%	100	100	100
5	Persentase Aset Tetap dengan Dokumentasi Legal	%	91,92	92,5	92,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD	TARGET KINERJA RKPD
			2024	2026	2026
6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kevalidan Data Barang Milik Daerah	%	82,14	82,50	82,50
AH Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	78,02*	80	80
2	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	79,12*	80,00	80,00
AI Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100
2	Persentase hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	%	100	100	100
3	Presentase Nilai Inovasi Daerah yang matang	%	73	77	77
AJ Pengawasan					
1	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	%	75	85,71	85,71
2	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	94,54	95	95
3	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai kategori Baik dalam penyelenggaraan SPIP	%	N/A (indikator baru)	85,71	85,71
5	Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	%	75	85	85
AK Urusan Kewilayahan					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mayangan	Indeks	84,90	87	87
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kademangan	Indeks	97,25	97,27	97,27
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kanigaran	Indeks	80.25	84.5	84.5
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kedopok	Indeks	86,21	88	88
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonoasih	Indeks	94,17	94,19	94,19
AL Urusan Pemerintahan Umum					
1	Indeks Demokrasi	Indeks	78,7	78,7	78,7
2	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	60	60	60
3	Indeks Kewaspadaan	Indeks	60	60	60
4	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6	7	7
5	Persentase Partai Politik dan Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	%	78	79	79

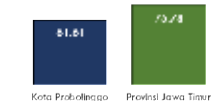
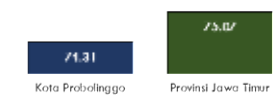
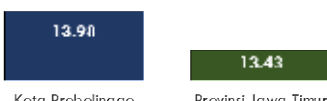
Sumber: Bapperida, 2025

Selain IKU dan IKD, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 memuat pula indikator spesifik daerah yang telah ditetapkan target kinerjanya dengan mengacu pada capaian kinerja

Tahun 2024 serta trend pertumbuhan capaian kinerja indikator. Indikator spesifik daerah ini khususnya terkait dengan bidang ekonomi dan sosial sebagai indikator makro yang mendukung pencapaian IKU.

Capaian indikator spesifik Kota Probolinggo pada tahun 2024 menunjukkan tren positif yang ditandai dengan capaian indikator yang berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur. Capaian tersebut menjadi dasar dalam penentuan target pada tahun 2026 yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026.

Tabel 6. 3 Target Indikator Spesifik Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024		TARGET KINERJA
					TAHUN 2026
1	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rp.	61,61		82,20
2	PDRB Per Kapita ADHK	Juta Rp.	39,65		48,50
3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp.	13.405		14.332
4	Jumlah Penganggur	Jiwa	5.748		4.886
5	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	15.240		13.696
6	AHH (Angka Harapan Hidup)	Angka	74,31		74,68
7	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Angka	9,72		10,22
8	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Angka	13,98		14,28
9	Rasio Gini	Rasio	0,344		0,322

Sumber: Bapperida, 2025

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan merupakan proses berjenjang yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota) dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dari level nasional hingga ke daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri



(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 maka salah satu sinkronisasi yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi indikator yang bertujuan untuk memastikan rencana pembangunan daerah (RPJMD) selaras dengan RPJMN, memastikan dukungan pencapaian target pembangunan nasional serta mempermudah evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Sinkronisasi indikator pada bab ini difokuskan pada indikator-indikator nasional yang relevan dengan urusan pemerintahan daerah serta indikator-indikator yang menjadi indikator tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur, khususnya pada 6 (enam) indikator makro Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 meliputi: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Penurunan Emisi GRK Kumulatif.

Berdasarkan identifikasi indikator pada level nasional dan provinsi maka persandingan capaian dan target indikator-indikator yang akan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6. 4 Sinkronisasi Target Pembangunan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	4,93	5,15	5,8 – 6,3	Jawa Timur: 4,80 – 5,40 Kota Probolinggo: 5,47- 5,64	5,47	Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sebesar 5,47% pada tahun 2026 telah selaras dengan target Provinsi Jawa Timur untuk Kota Probolinggo yaitu pada kisaran 5,47- 5,64.
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,57	9,56	6,18	6,5 – 7,5	Jawa Timur: 8,81 – 9,10 Kota Probolinggo: 5,52 - 5,38	5,38	Tingkat kemiskinan merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026.

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
									Tingkat kemiskinan Kota Probolinggo pada tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan pelaksanaan pembangunan memberi dampak positif berupa semakin baik akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 5,38% atau telah selaras dengan target yang ditetapkan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Probolinggo sebesar 5,52% - 5,38%. Hal tersebut berimplikasi pada perlu peningkatan komitmen dan usaha dalam penurunan kemiskinan di Kota Probolinggo.
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,91	4,19	4,44	4,44 – 4,96	Jawa Timur: 3,84 – 4,48 Kota Probolinggo: 4,07 - 3,67	3,67	Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026. Tingkat pengangguran terbuka Kota Probolinggo pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
									nasional namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan belum optimalnya kondisi pasar kerja sehingga perlu kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja. Target TPT Kota Probolinggo pada tahun 2026 adalah sebesar 3,67% atau telah selaras dengan target yang ditetapkan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Probolinggo sebesar 4,07% - 3,67%. Target tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk menurunkan angka TPT guna mendukung pencapaian target Provinsi dan Nasional.
4	Rasio Gini	Rasio	0,381	0,373	0,344	0,377 – 0,380	Jawa Timur: 0,370 – 0,380 Kota Probolinggo: 0,335 - 0,322	0,322	Rasio Gini merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026. Rasio Gini Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 0,344 atau lebih rendah dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan Kota

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
									Probolinggo lebih rendah dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi. Rasio Gini yang rendah dapat diartikan bahwa masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan ekonomi secara merata dan pada akhirnya dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Target Rasio Gini Kota Probolinggo pada tahun 2026 adalah sebesar 0,322 telah selaras dengan target Provinsi Jawa Timur untuk Kota Probolinggo yang sebesar 0,335 - 0,322. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan pemerataan pembangunan.
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,02	75,35	77,79		Jawa Timur: 75,80 – 76,40 Kota Probolinggo: 79,12 - 79,45	78,17	Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026. IPM Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 77,79 atau lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
	Indeks Modal Manusia (RKP)	Indeks				0,57			dan Provinsi Jawa Timur. Nilai IPM yang tinggi mengindikasikan terdapat peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Probolinggo baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketersediaan SDM yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Probolinggo. Target IPM Kota Probolinggo pada tahun 2026 adalah sebesar 78,17 atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Probolinggo yang berada pada kisaran 79,12 - 79,45. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Probolinggo, baik khususnya dari aspek pendidikan, kesehatan, agar dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur. RKP 2026 menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai indikator untuk mengukur pemerintah berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Target IMM pada tahun

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
									2026 adalah sebesar 0,57.
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	%	17,47 (2023)	0,73		19,07	Jawa Timur: 5,95		Penurunan Emisi GRK merupakan indikator sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026. Capaian penurunan emisi GRK Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 342.851,836 Ton CO2 eq. Target penurunan emisi GRK Kota Probolinggo pada tahun 2026 adalah sebesar 392.531,068 Ton CO2 eq atau lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Probolinggo sebesar 349.743,16 Ton CO2 eq.
		Ton CO2 eq			342.851,836		Kota Probolinggo: 349.743,16	392.531,068	
7.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,85	92,19	97,26	92,02-9 (2025)	93,20 – 93,48	97,66	Indeks Pembangunan Gender Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 97,26 atau lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengimplementasikan program-program terkait kesetaraan gender. Seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
									memiliki kesempatan yang dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Target Indeks Pembangunan Gender Kota Probolinggo pada tahun 2026 sebesar 97,66 atau lebih tinggi dibandingkan target Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan kesetaraan dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Indeks Pembangunan Gender tidak menjadi Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Tidak terdapat target untuk Kota Probolinggo pada Tahun 2026
8.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	75,6	N/A	N/A	76,40 – 77,90	N/A	Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Indeks Kesalehan Sosial tidak menjadi IKU, IKD dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026.

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
									Proxy yang digunakan dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum.
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,53	71,24	58,17	76,67	74,08 – 74,25	66,59	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026. IKLH Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar 58,17 atau jauh lebih rendah dibandingkan capaian Nasional dan Provinsi. Capaian IKLH tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 61,69. Oleh karena diperlukan langkah-langkah guna memastikan pencapaian IKLH di Kota Probolinggo sebagai ukuran kelestarian lingkungan hidup khususnya pada aspek kualitas lingkungan dan kualitas lahan. Target IKLH Kota Probolinggo tahun 2026 sebesar 66,59 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			TARGET KINERJA TAHUN 2026			KETERANGAN
			RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Probolinggo	
									Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		93,82	85,66		85,80 - 86,40	86.54	Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 dan menjadi IKU RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026. Target IRB Kota Probolinggo tahun 2026 adalah sebesar 86.54 atau lebih tinggi dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Timur sebesar 85,80 - 86,40. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.



6.3. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis Pelayanan Dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi :

1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar;
 3. pendidikan kesetaraan;
 4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 7. pelayanan kesehatan balita;
 8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 15. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
 16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
 19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 21. pelayanan informasi rawan bencana;
 22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- dan



29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pelayanan dasar SPM dimaksud dilaksanakan melalui penyelenggaraan 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu : (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan dan Kawasan Permukiman, (e) Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta (f) Sosial.

Penetapan target SPM Kota Probolinggo Tahun 2026 mengacu pada indikator SPM yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang dibedakan berdasarkan Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal Layanan Dasar. Selain itu juga mempertimbangkan Capaian Indikator SPM untuk Tahun 2022 walaupun terdapat perbedaan beberapa indikator SPM mengingat untuk Tahun 2022 indikator mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Perbandingan target nasional juga dijadikan acuan untuk penetapan target daerah mengingat pelaksanaan indikator diarahkan untuk mendukung pencapaian target nasional disamping asas kewajaran pencapaian target dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel 6. 5 Target Indikator SPM Urusan Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN INDIKATOR SPM			TARGET INDIKATOR SPM								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PENDIDIKAN													
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	96,33%	99,89%	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa, sumber daya manusia	100%	100%	100%	
					Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	100%	100%					
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	90,80%	99,89%	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa, sumber daya manusia	100%	100%	100%	
					Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	100%	100%					



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN INDIKATOR SPM			TARGET INDIKATOR SPM								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100,00%	99,54%	Jumlah Warga Negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa, sumber daya manusia	100%	100%	100%	

Tabel 6. 6 Target Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KESEHATAN													
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	92%	86.84%	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Layanan Kesehatan	86%	82.93%	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	83%	85,75%	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	90%	91.12%	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah warga negara usia Pendidikan	97,44%	91,12%	Jumlah anak pada usia pendidikan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya	100%	100%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pendidikan Dasar	dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan			dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan				manusia dan tata cara pemenuhan				
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah warga negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	88,487%	99,41%	Jumlah warga negara usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
7	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	87,42%	100%	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	50,96%	99,60%	Jumlah Warga negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan Layanan	100%	94,51%	Jumlah warga Negara Penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kesehatan			mendapatkan Pelayanan Kesehatan								
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan Jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	Jumlah Warga Negara dengan gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	Jumlah Warga negara terduga Tuberculosis yang mendapat Layanan Kesehatan	100%	100%	Jumlah Warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya Tahan tubuh Manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya Tahan tubuh Manusia (HIV) Yang mendapat layanan kesehatan	100%	100%	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya Tahan tubuh Manusia (HIV) Yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	100%	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				95,27%									

Tabel 6. 7 Target Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	Jumlah barang dan jasa	100%	100%	100%	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,52%	98,69%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	96.35%	99%	Jumlah barang dan jasa	100%	96.35%	100%	

Tabel 6. 8 Target Indikator SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PERUMAHAN RAKYAT													
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Jumlah barang dan jasa	100%	100%	100%	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Daerah Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh Fasilitas Rumah yang Layak Huni	100%	100%	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	100%	100%	Jumlah barang dan jasa	100%	100%	100%	

Tabel 6. 9 Target Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TRANTIBUMLINMAS													
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	86,67%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	Satpol PP
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	96,00%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	BPBD
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	BPBD

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	96%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	BPBD
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92%	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	Satpol PP

Tabel 6. 10 Target Indikator SPM Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SOSIAL													
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	75%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	78%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	81%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	89%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018			INDIKATOR PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021								KETERANGAN
		INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	PENERIMA LAYANAN DASAR				MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
					INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	74,80%		Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota	100%	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%	

6.1.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2
6.2.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	5
6.3.	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	24

Tabel 6. 1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo	Tahun 2026	3
Tabel 6. 2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Probolinggo	Tahun 2026	5
Tabel 6. 3 Target Indikator Spesifik Daerah Kota Probolinggo	Tahun 2026	13
Tabel 6. 4 Sinkronisasi Target Pembangunan	Tahun 2026	15
Tabel 6. 5 Target Indikator SPM Urusan Pendidikan Kota Probolinggo	Tahun 2026	26
Tabel 6. 6 Target Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Probolinggo	Tahun 2026	28
Tabel 6. 7 Target Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo	Tahun 2026	32
Tabel 6. 8 Target Indikator SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo	Tahun 2026	33
Tabel 6. 9 Target Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Probolinggo	Tahun 2026	34
Tabel 6. 10 Target Indikator SPM Urusan Sosial Kota Probolinggo	Tahun 2026	36



BAB 7 PENUTUP

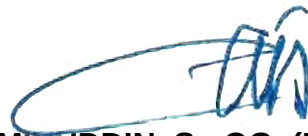
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 ini, diharapkan semua pihak dapat mengetahui tentang kondisi umum daerah yang terkait dengan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan daerah, evaluasi RKPD hingga triwulan I Tahun 2025, kerangka keuangan dan ekonomi daerah Tahun 2026, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta target kinerja pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Probolinggo Tahun 2026;
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2026;
3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antarsektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 ini, diharapkan kegiatan perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana dapat dievaluasi sebagai upaya pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2026.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026 ini disusun, untuk dipedomani oleh seluruh aparaturnya pelaksana pembangunan di Kota Probolinggo.

WALI KOTA PROBOLINGGO



dr. H. AMINUDDIN, Sp. OG., (K)., M. Kes



**BAPPEDALITBANG
KOTA PROBOLINGGO**

2025